



Sejarah

WILAYAH PERBATASAN NUSA TENGGARA TIMUR - TIMOR LESTE

Satu Gunung Dua Dunungan

Direktorat
Kebudayaan

Oleh:
Prof. Dr. S. Hudijono
Drs. Munandjar Widiyatmika
Drs. Djakariah MPd.

Penyunting:
Endjat Djaenuderajat

980.87
SHU
5

Sjarah

WILAYAH PERBATASAN NUSA TENGGARA TIMUR - TIMOR LESTE

Satu Gunung Dua Dunungan

Oleh:

Prof. Dr. S. Hudijono
Drs. Munandjar Widiyatmika
Drs. Djakariah MPd

Penyunting:

Endjat Djaenuderajat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012

**SEJARAH WILAYAH PERBATASAN
NUSA TENGGARA TIMUR - TIMOR LESTE**

Satu Gunung Dua Dunungan

Penulis

Prof. Dr. S. Hudijono

Drs. Munandjar Widiyatmika

Drs. Djakariah MPd

Penyunting:

Endjat Djaenuderajat

Penerbit:

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp./Fax. : 021-5725539

331 + iv hlm; 17x24 cm

ISBN: 978-979-1274-63-0

KATA PENGANTAR

Wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur yang membentang sepanjang 239 (Kabupaten Timor Tengah Utara sepanjang 101 km dan Kabupaten Belu sepanjang 138 km), bukanlah ruang hampa yang sekedar garis batas dan patok batas. Sejarah wilayah perbatasan di tempat itu pada hakekatnya adalah sejarah politik dan akumulasi peristiwa yang panjang dalam sejarah wilayah perbatasan, yang menyangkut persaingan wilayah, kekuasaan dan ekonomi di Pulau Timor sejak dahulu. Semenjak berdirinya Negara Timor Leste, banyak peristiwa yang muncul, bukan saja masalah pengungsian yang jumlahnya ratusan ribu jiwa, tetapi juga persoalan lintas batas illegal dan penyelundupan di perbatasan, pencurian ternak, kriminalitas dan lain-lain. Masalah lain adalah masalah sosial budaya terkait adanya hubungan kekerabatan antara warga dua negara, yang sebenarnya mereka adalah satu keturunan.

Persaingan yang panjang antara Belanda dan Portugis di Pulau Timor, tidak saja merubah wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga membawa pengaruh besar atas sistem pemerintahan tradisional dan perdagangan, serta nilai-nilai yang bersumber dari adat yang diwariskan leluhur. Setelah mengalami pergolakan dan perjuangan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 1999 Propinsi Timor Timur seusai jajak pendapat melepaskan diri. Antara penduduk di kedua sisi perbatasan sering timbul masalah terkait persengketaan batas dan persoalan sosial ekonomi, pembunuhan, penyelundupan, penyerobotan lahan dan kecemburuan sosial antara penduduk kedua wilayah. Penulisan sejarah wilayah perbatasan ini memberi informasi perbatasan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Selain berterima kasih kepada Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan seluruh jajarannya yang mensponsori Penulisan Sejarah Wilayah Perbatasan NTT – Timor Leste, Tim Penulis juga sangat berhutang budi, baik kepada keluarga maupun perseorangan yang membantu Tim Penulis pada waktu mengumpulkan informasi di daerah perbatasan. Mereka adalah keluarga-keluarga yang akrab dengan daerah perbatasan, tinggal di daerah perbatasan, dan ada yang keluarganya menjadi berbeda kewarganegaraan, karena hasil jajak pendapat.

Yang pertama disebut adalah keluarga Martinus Kale (56 tahun), yang salah satu puterinya menikah dengan warga Timor Leste. Keluarga ini menerima kedatangan Tim Penulis dengan keramahan khas Kefamenanu, serta banyak memberi informasi dan kemudahan selama Tim Penulis mengumpulkan informasi di daerah perbatasan. Berikutnya adalah keluarga Jorovicus Lake (50 tahun), penduduk Haumeni yang berbatasan dengan Distrik Oekusi, Timor Leste, yang telah memberi informasi

yang berharga. Berikutnya adalah keluarga Alousius Luan Mau (50 tahun), warga Atambua, yang orang tua maupun adiknya tetap berada di Timor Leste, sehingga sering terkendala dalam hal urusan-urusan adat dan keluarga. Keluarga ini memberi informasi yang berharga dan bantuan yang sangat berarti kepada Tim Penulis pada waktu berada di daerah perbatasan. Tim penulis juga sangat berhutang budi kepada para mahasiswa dan alumni Universitas Nusa Cendana, yang telah membantu pengumpulan informasi. Para mahasiswa dan alumni ini tinggal di daerah perbatasan, dan ada yang merupakan pelaku eksodus dari Timor Timur ke Timor Barat sesuai jajak pendapat 1999. Mereka adalah Dorkas Y.A. Kale, Dominggas Lake, Marzzella C. Luan, serta Andreas Kale, ST dkk. Kepada para mahasiswa dan alumni Universitas Nusa Cendana ini Tim Penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih.

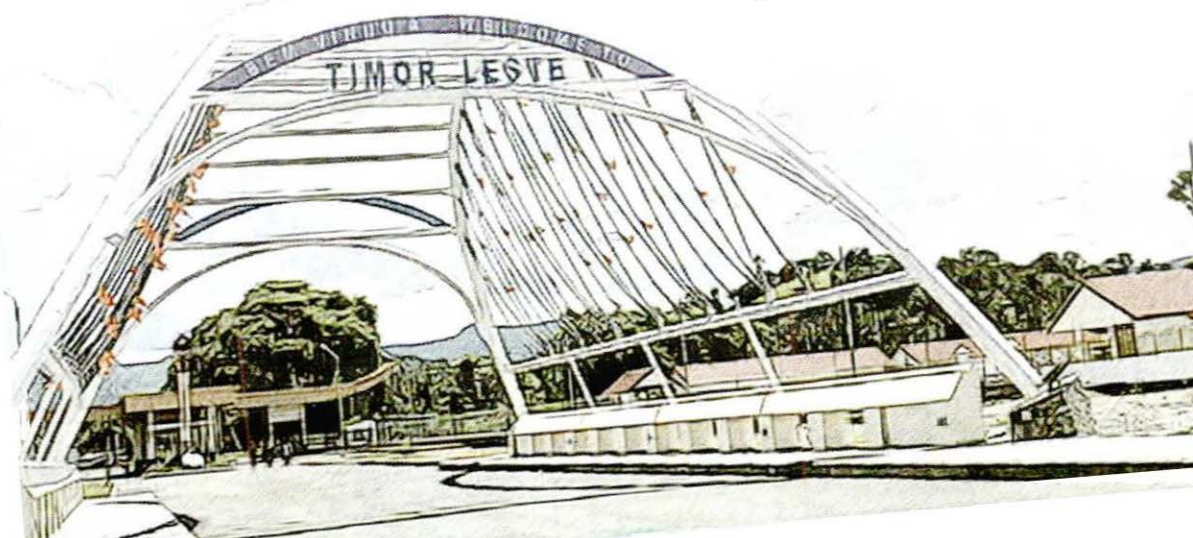
Tentu masih banyak lagi pihak-pihak yang berjasa, kepada siapa Tim Penulis harus mengucapkan terima kasih. Jika tidak sempat disebutkan di sini, bukan karena tidak penting, namun semata-mata karena terbatasnya ruang. Sembah sujud kepada Tuhan, seraya memohon agar kerjasama dari banyak orang melalui Penulisan Sejarah Wilayah Perbatasan NTT-Timor Leste ini bermanfaat bagi sesama. Amien.

Kupang, Oktober 2012

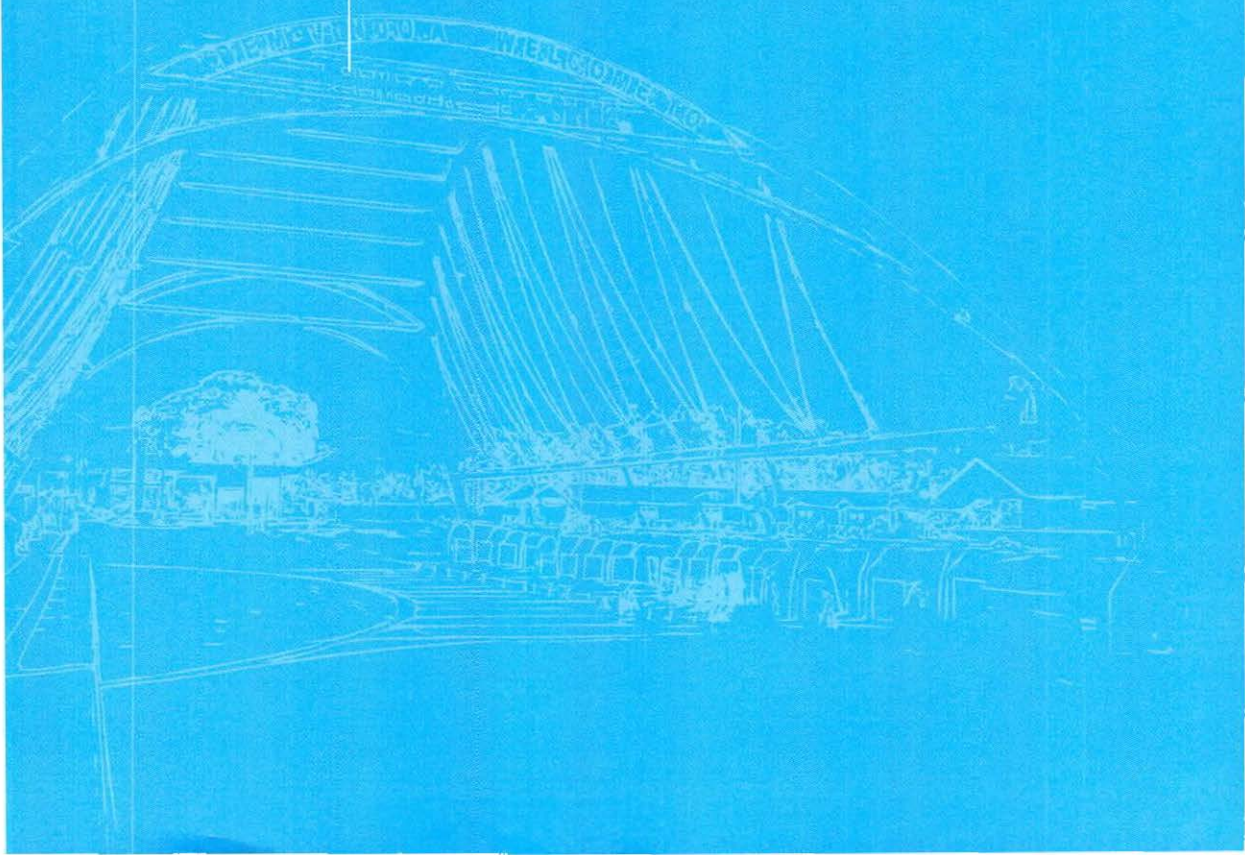
Tim Penulis.

DAFTAR ISI

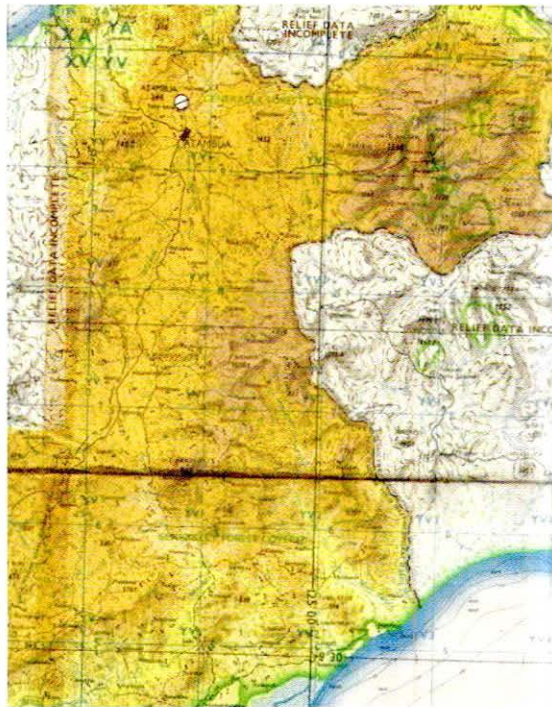
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste	2
1.2. Perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste dalam Catatan	8
1.3. Urutan Paparan	17
Bab II Mengungkap Dinamika Perbatasan	
2.1. Jejaring Hubungan Antarnusa Bumi Cendana s/d Abad 16	19
2.2. Dinamika Perbatasan dalam Kancah Persaingan Wilayah Kekuasaan Sampai Tahun 1810	79
Bab III Dinamika Perbatasan Masa Keresidenan Timor dan Masa Pendudukan Jepang 1810-1942	
3.1. Perbatasan Masa Keresidenan Timor dan Daerah Taklukan- nya 1810-1942	125
3.2. Perbatasan Masa Pendudukan Jepang 1942-1945	193
Bab IV Perbatasan Negara Republik Indonesia dan Timor Leste	
4.1. Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste 1945-1975	205
4.2. Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste 1975-1999	211
Bab V Dinamika Perbatasan sebagai Pintu Gerbang Matahari Terbit (Loro Sae)	
5.1. Panjang Garis Batas, Pilar dan Pos di Perbatasan	252
5.2. Pintu Gerbang matahari Terbit (Loro Sae): Arti Penting, Keadaan dan Permasalahannya	259
5.3. Tinjauan Pengembangan Kawasan Perbatasan	305
Bab VI Penutup	
6.1. Simpulan	310
6.2. Saran	311
DAFTAR PUSTAKA	312
BIODATA PENULIS	319
DAFTAR PUBLIKASI TENTANG WILAYAH PERBATASAN SEJAK 1974	329



BAB 1 | **Pendahuluan**



1.1 Perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste



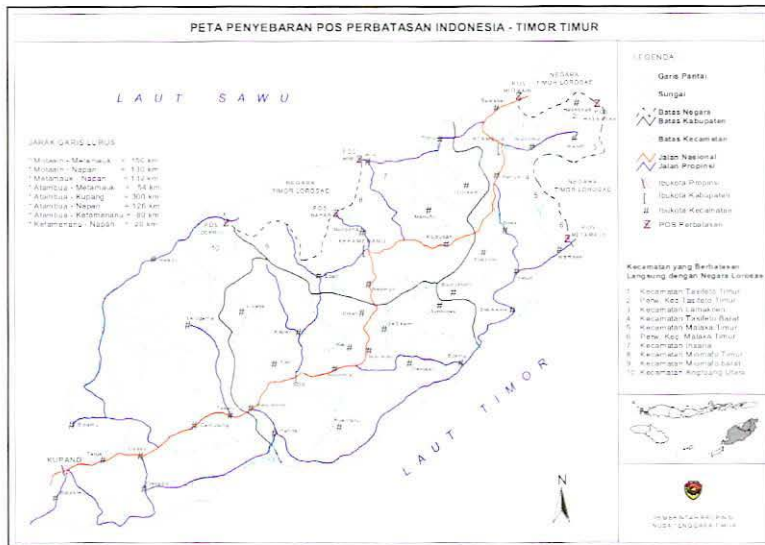
Gambar 1.1 Peta Perbatasan Belu dengan Timor Portugis ¹



Gambar 1.2 Peta Perbatasan Oecusi dengan TTU ²

¹ Joint Operations Graphic-Ground. Published by Ministry of Defence United Kingdom 1967 skala 1:250.00

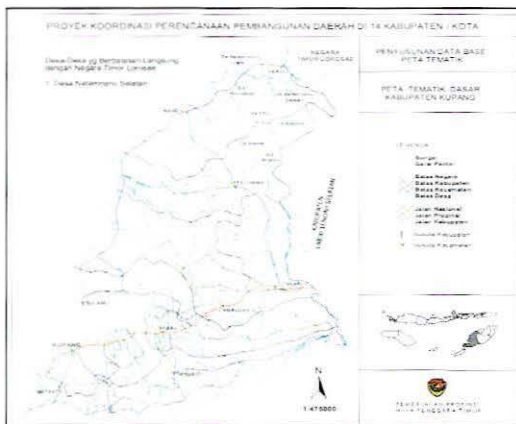
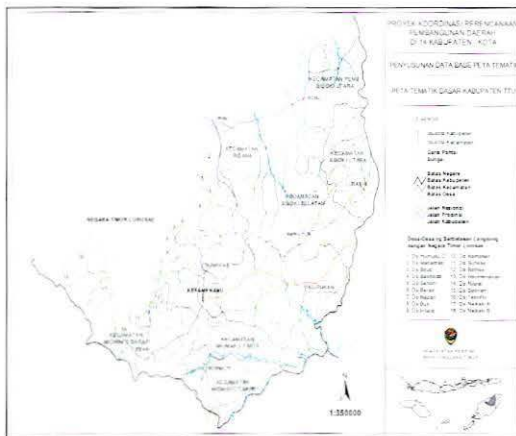
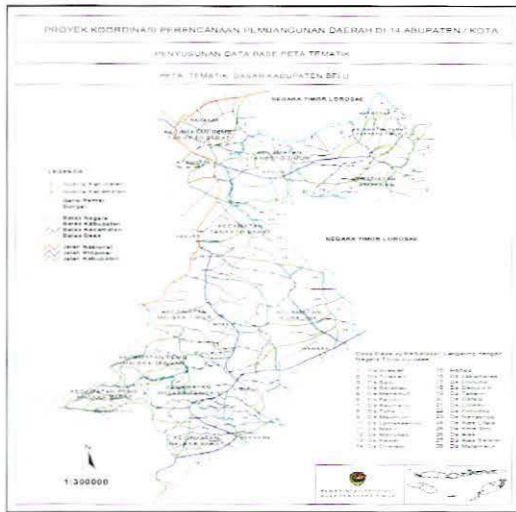
² Joint Operations Graphic-Ground. Published by Ministry of Defence United Kingdom 1967 skala 1:250.00



Gambar 1.3 Peta Perbatasan NTT=Timor-Timor Leste



Gambar 1.4 Peta Wilayah Perbatasan Laut NTT-Timor Leste





Gambar 1.8 Pulau Batek sebagai pulau Luar

Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste mulai gencar diperbincangkan kalayak ramai di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri semenjak terjadinya integrasi propinsi Timor Portugis dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1975. Timor Portugis menjadi salah satu propinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan deklarasi Balibo yang dikenal pula sebagai proklamasi Integrasi Timor Timur pada 30 Nopember 1975.³ Namun dalam waktu yang hampir bersamaan tanggal 28 Nopember 1975 Fretilin memproklamirkan Republik Demokrasi Rakyat Timor⁴. Pasca jajak pendapat tahun 1999, Timor Timur terlepas dari integrasi NKRI dan menjadi Negara Republik Demokrasi Timor Leste. Terjadinya eksodus besar-besaran pasca jajak pendapat tahun 1999. Jumlah pengungsi pada tahun 2002 ada 26.222 kk atau 155.690 jiwa di dalam barak dan 2.630 kk atau 128.458 jiwa. Dewasa ini jumlah pengungsi di NTT 104.436 jiwa. Kemudian 9.526 kk atau 28.934 jiwa kembali ke Timor Leste⁵.

Pada masa itulah muncul masalah perbatasan kedua Negara yakni Timor Leste dan Negara Republik Indonesia di wilayah propinsi NTT. Permasalahan tidak saja muncul sebagai dampak pengungsian, tetapi juga persoalan lintas batas terutama munculnya penyelundupan melewati jalan tikus di perbatasan. Demikian juga masalah sosial budaya terkait adanya hubungan kekerabatan antara warga di perbatasan kedua belah pihak, muncul pula pencurian ternak, kriminalitas dan dampak lainnya.

Peta menyangkut perbatasan paling tidak ada 10 buah peta yakni: 1. *Administrative Indeeling van de Afdeeling Timor* (1:500.000, tahun 1911. 2. *Bakhuis L.A. 1905. BY de Kaart*

³ Jill Jolliffe, 1978. *East Timor: Nationalism and Colonialism*. University Queensland Press, hal.325-326, Lihat juga Aco Detaq, 1978 *Kisah Tamatnya kekuasaan Kolonialisme Portugis di Timor Timur*. Percana. Kupang., hal. 8-9

⁴ Jill Jolliffe, 1978. Hal.327-328

⁵ Widiyatmika, M., 2007c. *Masalah Sosial Budaya di Perbatasan NTT-Timor Leste*. Laporan Penelitian. UPT Arseologi wilayah Bali, NTB, NTT., hal 84-85

van een deel van het Eiland Timor op de schaal 1:500.000 TAG Amsterdam. 3. Schetskaart van Timor (Nederlandsch Gebiet) 1:250.000 published by the Topographische Dienst berdasarkan sketch and surveys of 1919. 4. *Carta da Provincia de Portugal 1927*. 5. *Peta Timor Portuguese 1:250.000* tahun 1937 published by Asia Investment Company Ltd. 6. *The Dutch Topographische Dienst 1941 copy maps in colours :map analysis of Java to Timor*, Washington, 9 additional place names and City sketch of Dili skala 1:20.000. 7. *Peta Atambua Indonesia dan Peta Oekusi Skala 1:250.000 Joint Operation graphic Ground elevation in metre depths in fathoms series 150, sheet S c 51 B Edition 1 GSG5* Published by D Survey Ministry of Defence United Kingdom 1967. 8. *Peta Perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Leste, Peta perbatasan kabupaten TTU dengan Timor Leste dan Peta perbatasan Kupang dengan Timor Leste skala 1:350.000* BAPPEDA Propinsi NTT 2007. 9. *Timor, Provincia, Carta de Portugal 1:50.000*, peta: 1. Ilha Atauro, 10 Peta Maubara, peta 13 Manatuto, peta 18 Batugede, peta 27 Pante Makasar, peta 29 Maliana, Peta 30 Bobonaro, Peta 31 Suai.

Perbatasan darat antara wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste membentang sepanjang 239 km yang terdiri dari perbatasan di sebelah Barat yakni dengan enclave Oekusi sepanjang 101 km dan perbatasan di sebelah Timur yakni antara kabupaten Belu dengan wilayah Timor Leste sepanjang 138 km. Paparan Gubernur NTT⁶, perbatasan di sebelah barat (Oekusi) sepanjang 101 km, 74 km mengikuti Thalweg dan 27 km mengikuti watershed dan lembah. Sedangkan garis batas bagian Timur sepanjang 138 km, 117 km mengikuti Thalweg dan 21 km mengikuti Watershed dan lembah.

Wilayah perbatasan bukanlah merupakan suatu ruang hampa dan tidak sekedar garis batas dan patok batas. Ramainya pemberitaan baik dalam negeri maupun luar negeri umumnya sebatas informasi politik atau sejarah masa kini. Pemberitaan ini menjadi pincang tidak seimbang apabila dikaitkan dengan sejarah wilayah perbatasan yang merupakan suatu akumulasi peristiwa yang panjang dalam sejarah wilayah perbatasan. Kondisi sosial budaya, agama, bahasa, ekonomi kurang mendapat sorotan. Apalagi kalau diingat bahwa sejarah wilayah perbatasan masa kini pada hakekatnya adalah sejarah politik. Sedangkan politik masa lalu yang bersifat sejarah struktural yang terekam dalam struktur dan nilai-nilai menjadi kurang mendapat perhatian. Sebenarnya bibliografi Timor baik Timor bagian wilayah Indonesia dan Timor Leste cukup banyak.

Berdasarkan Bibliografi yang ditulis Kevin S Serlock tahun 1980, terbitan Research School of Pacific, Australian University, Canberra ada 2986 buah buku/artikel/laporan. Judul-judul dalam bibliografi : Antropologi 408 buah, bahasa/oral literatur 150 buah, agama 490 buah, sejarah 633 buah⁷. Tentunya tidak semua menyangkut perbatasan.

⁶ Piet A Tallo. 2005. Memahami Dengan Hati, Dalam Membangun Nusa Tenggara Timur, Bentara, Jakarta hal. 185

⁷ Kevin Serlock. 1980. A Bibliography of Timor Including East Timor/Formaly Portugues Timor and Rote. Researc School of Pasific Studies, The Australian National University, Canberra, hal. 169-190

Namun sumber tersebut menjadi penting menyaoal perbatasan di luar terbitan sesudah tahun 1980. Beberapa literatur tentang perbatasan antara lain:

N.J.F.Eenegrens *regeling tusschen Nederlandsch Timor en Portugeesch Timor met een schetskaart.. De Indische Gids, Amsterdam:1894. (Border Settlement between Dutch and Portuguese Timor)*⁸. Sperco (Kapitan)/Pseudonym of J.Grader:*De greaswisseling op het Eiland Timor, De Reflector 1917 (Border changes on Timor Island). Grensaangelegen heden op Timor.Kolonial verslag, The Hague, 1911 (Border issues in Timor)*⁹. *Memoire du Gouvernement Portugais. Arbitrage de Timor, Frontiere est d'Oecussi-Ambenu.Lisabon, Imprensa Nacional,1913*¹⁰.*Verdrag tusschen Nederland en Portgal regering van de grenzen vom het wederzigsch gebied op Timor Eiland/stukkin betreffende de goed keuring van het verdrag Bijlagen van handelingen der Staten-General, 1904-1906*¹¹. Heijman, Albertas. *De Timor traktaten 1859 en 1893. Leiden, S.C. van Doeslarrgh , Doctoral Thesis, Leiden.1895*¹². Sturler, Jacques Eduard de.*Tractaat van 20 April 1859 tot regeling van het weder zijdsch grond gebied van Nederklnd en Portugal op Timor en Onder hoorigheden. In his het grond gebied van Nederlandsch Oost Indie in verhand met de tractaen met toward the Settlement of mutual territory of the Nederlands and Portugal in Timor and Dependencies*¹³.

Sumber literatur sesudah 1980 antara lain: Francillon, Gerald. 1980. *IncurSION Upon Wehali, a Modern History of Ancient Empire.*, Massachussetts¹⁴. Fried Berg, Claudin. 1980. *Boiled Woman and Broiled Man: Myths and Agricultural Ritual of Bunaq of Central Timor*¹⁵. Schulte Nordholt H.G. 1980. *Symbolic Classification of Atoni of Timo*¹⁶. Barros, Duarte de. 1984. *Timor Rites and Mitos Atauros*¹⁷. David Hicks. 1985: *Roh Orang Tetun*. Jakarta: Sinar Harapan 147 hal.¹⁸

Ataupah, Hendrik. 1992. *Ekologi, Penyebaran Penduduk dan Pengelompokkan Orang Meto di Timor Barat*¹⁹. Gomang, Syarifudin R. 1993. *The People of Alor and their Alliances in Eastern Indonesia*²⁰. Therik, Gerson Tom. 1995. *Wehali, The four corner Land. The Cosmology*

⁸ Kevin Serlock, 1980. Hal. 178

⁹ Kevin Serlock, 1980, hal. 180

¹⁰ Kevin Serlock, 1980, hal. 182

¹¹ Kevin Serlock, 1980, hal. 169

¹² Kevin Serlock. 1980 hal. 169

¹³ Kevin Serlock. 1980 hal. 180

¹⁴ Francillon Gerald. 1980. *IncurSION Upon Wehali, a Modern History of Ancient Empire.*, Massachussetts. In Fox (ed): *The Flow of Life in Eastern Indonesia*. Harvard University Press, Cambridge and London, England. 18 hal.

¹⁵ Fried Berg, Claudin. 1980. *Boiled Woman and Broiled Man: Myths and Agricultural Ritual of Bunaq of Central Timor*. In Fox (ed): *The Flow of Life in Eastern Indonesia*. Harvard University Press, Cambridge and London, England. 24 hal.

¹⁶ Schulte Nordholt H.G. 1980. *Symbolic Classification of Atoni of Timor*. In Fox (ed): *The Flow of Life in Eastern Indonesia*. Harvard University Press, Cambridge and London, England 17 hal

¹⁷ Barros, Jorge Duarte. 1984. *Timor Ritos and Atauros*. Lisboa, Ministerio Educacao. 108 hal

¹⁸ Hicks David. 1985: *Roh Orang Tetun*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. Hal 147

¹⁹ Ataupah, H. 1992. *Ekologi, Penyebaran Penduduk dan Pengelompokkan Orang Meto di Timor Barat*. Universitas Indonesia (Disertasi), 511 hal.

²⁰ Gomang, Syarifudin R. 1993. *The People of Alor and their Alliances in Eastern Indonesia*. Department of Sociology, Wollangong University. 146 hal.

and Traditions of a Timorese Ritual Centre ²¹. Silab, Wilfridus et al. 2002. *Biboki, Insana dan Miomaffo, dari Kajian Ethno Historiografis* ²². Alexander Un Usfinit 2003. *Maubes Insana, Salah Satu Masyarakat di Timor dengan struktur Adat Yang Unik* ²³. Widiyatmika, M. 2007. *Masalah Sosial Budaya Perbatasan NTT-Timor Leste* ²⁴. Gregor Neonbasu. 2011. *We Seek Our Roots, Oral Traditionin Biboki, West Timor* ²⁵. *Sejarah Gereja Katolik di Timor*. (tiga jilid) ²⁶, Hagerdal, Hans tanpa tahun. *Historical Notes on Pre Modern Timor* ²⁷

Penduduk di wilayah perbatasan dari segi bahasa dan kelompok etnis terdapat bahasa Tetun, Bunak dan Kemak di wilayah perbatasan kabupaten Belu, dan penduduk berbahasa Dawan/Uab Metto di wilayah perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara, kabupaten Timor Tengah Selatan dan kabupaten Kupang. ²⁸. Dari segi kesatuan suku ratusan suku/marga dengan tuturannya sendiri-sendiri yang mengacu kepada leluhur mereka. Kesatuan adat mereka bertumpu pada rumah adat suku/uma yang dikelola oleh ketua adat masing-masing. Walaupun sebagian besar penduduk telah memeluk agama katolik, tetapi pengaruh budaya suku yang bertumpu pada arwah leluhur sampai sekarang masih kental. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang penting mulai bercocok tanam, upacara perkawinan, kematian dan hubungan sosial selalu mengacu kepada leluhur. Hal ini biasanya dilakukan sebelum upacara melalui penyembelihan hewan terutama ayam jantan untuk dilihat bagian hati dan ususnya. Apakah leluhur memberi restu atau tidak. Tanpa leluhur masyarakat adat tidak berani melanggar karena takut leluhur marah karena tidak berkenaan.

Namun apabila dicermati literatur yang relatif banyak tersebut pada hakekatnya bersifat sangat lokal dan belum menjadi satu informasi yang terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu suatu tulisan sejarah perbatasan yang lebih komprehensif mendesak dan bisa dibaca dengan mudah oleh khalayak sangat dilakukan.

1.2 Perbatasan Nusa Tenggara Timur Timor Leste Dalam Catatan

Wilayah Perbatasan RI-Timor Leste merupakan hasil akumulasi proses sejarah yang panjang terjadinya persaingan wilayah, kekuasaan dan ekonomi di Timor.

²¹ Therik, Gerson Tom. 1995. *Wehali, The four corner Land. The Cosmology and Traditions of a Timorese Ritual Centre*. Australian National University, Canberra (Disertasi). 328 hal.

²² Silab, Wilfridus et al. 2002. *Biboki, Insana dan Miomaffo, dari Kajian Ethno Historiografis*. Proyek Penelitian dan Kajian Sejarah, Dinas Pariwisata, kabupaten TTU, 114 hal.

²³ Alexander Un Usfinit 2003. *Maubes Insana, Salah Satu Masyarakat di Timor dengan struktur Adat Yang Unik*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius. 227 hal.

²⁴ Widiyatmika, M. 2007. *Masalah Sosial Budaya Perbatasan NTT-Timor Leste*, UPTD Arkeologi Wilayah Bali, NTB dan NTT. 194 hal.

²⁵ Gregor Neonbasu. 2011. *We Seek Our Roots, Oral Traditionin Biboki, West Timor*. Instropos Institut e v. Arnold Janssen Swiss, Germany. 385 hal.

²⁶ *Sejarah Gereja Katolik di Timor*, Jilid 1, 2, 3. Tanpa Tahun Seminari Tinggi Lalian, Atambua. 1310 hal.

²⁷ Hagerdal/Hans. *Pre Modern Timor*. Tanpa Tahun. Departement of Humanities, Vaxyo University, Sweden. 137 hal.

²⁸ Atupah, H. 1992 hal 506

Persaingan diawali sejak bangsa Belanda datang di Solor dan merebut benteng Portugis tahun tanggal 20 April 1613. Penghuni Benteng 1000 orang di antaranya 80 orang kulit putih, 450 peranakan /mestisos/Topases harus meninggalkan benteng dan sebagian besar menuju Malaka ²⁹.

Pulau Timor pertama kali disebutkan secara resmi dalam tulisan musafir Cina Chau-yu-kua tahun 1225 dengan istilah Kih-ri Tinwu yang terletak di sebelah Timur Tiongkalo gunungnya subur ditumbuhi pohon cendana. Timor telah melakukan hubungan teratur dengan Kadiri ³⁰. Sedangkan musafir Cina yang lain Dao yi Zhi lue tahun 1350 menyebutkan Timor dengan istilah Guli Dimen ³¹. Tulisan dalam buku Negara Kertagama tahun 1365 pupuh XIV/4 disebutkan Timor bagian Majapahit ³². Sumber Portugis menyebutkan Timor dengan istilah The Island of Santacruz ³³.

Portugis pertama kali datang di Timor pada 6 Januari 1514 ³⁴, namun pemukiman Portugis pertama kali di Lifao tahun 1520 ³⁵. Sedangkan pusat kedudukan Portugis di Lifao baru berlangsung tahun 1702 ³⁶. Persaingan Portugis dengan Belanda berlanjut setelah VOC mengambil alih sebuah benteng kecil di Kupang. VOC dan Portugis menanda tangani perjanjian Denhag tanggal 12 Juni 1642 untuk meredakan persaingan. Isi: pulau Timor dan Sulawesi terbuka bagi Belanda dan Portugis, Belanda diperbolehkan mengawini putri Solor ³⁷. Benteng kecil Portugis di Kupang direbut Belanda yang kemudian dibangun menjadi sebuah benteng tanggal 2 Februari 1653 ³⁸. Pada tahun 1655 jatuh korban pertama akibat pertempuran dengan Antonio da Hornay opperhoofd van Der Hejden. Pertempuran berikutnya terjadi tahun 1656 ketika De Flaming Oudhoorn yang dibantu kompi Tahalile dengan kapiten Jonker kalah di Amarasi ³⁹. Pada tahun 1661 kembali terjadi perjanjian The Hague antara Belanda dan Portugal setelah 50 tahun konflik kekuasaan ⁴⁰. Akibat persaingan dan tekanan Portugis terhadap penduduk di pedalaman Timor 20.000 penduduk mengungsi ke sekitar Kupang meminta perlindungan VOC ⁴¹.

Ternyata pengungsian/eksodus penduduk berlangsung kembali pasca Perjanjian

²⁹ Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Wali Gereja Indonesia: 1972: Sejarah Gereja Katolik Indonesia Jilid I. Percetakan Nusa Indah, Ende, Flores, hal 381.

³⁰ W.P.Groeneveldt, 1960. Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources. Bhratara, Jakarta ha. 116.

³¹ Hans Hagerdal. Tanpa Tahun : Hal 2

³² Slamet Muljono. 1976. Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya. Bhratara, Jakarta hal. 280.

³³ Barros, Jorge Duarte. 1984, hal 26.

³⁴ Timor Pequena Monografia, 1970, Agencia Geral Do Ultramar, Lisboa, hal 57

³⁵ Parimartha, I Gede, 2002, Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915. Penerbit Jambatan, Jakarta hal. 91

³⁶ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid I, 1971. hal. 339..

³⁷ Widiyatmika M., 2009. Kupang Dalam Kancah Persaingan Hegemoni Kolonial tahun 1653-1917. Kupang: Pusat Pengembangan Madrasah NTT, hal. 47.

³⁸ Widiyatmika M., 2009., hal. 41.

³⁹ Schulte Nordholt H.G. 1971. hal. 172

⁴⁰ Widiyatmika M. 2009. hal. 47.

⁴¹ Schulte Nordholt, H.G. 1971, hal 172

Lisabon tahun 1859, 400 KK Penduduk Atauro/Pulau Kambing tidak mau berada dalam kekuasaan Portugis dan memilih mengungsi ke wilayah Belanda di Pulau Alor⁴². Pengungsian ketiga terjadi pasca penyelesaian Perbatasan berlaku efektif tahun tanggal 20 November 1916 ada 5000 penduduk Maukatat meninggalkan dataran dan mengungsi ke wilayah Timor Belanda⁴³. Sedangkan pengungsian besar-besaran yang terakhir terjadi Pasca Jajak Pendapat tahun 1999. Jumlah pengungsi pada tahun 2002 ada 26.222 kk atau 155.690 jiwa di dalam barak dan 2.630 kk atau 128.458 jiwa. Dewasa ini jumlah pengungsi di NTT 104.436 jiwa. Kemudian 9.526 kk atau 28.934 jiwa kembali ke Timor Leste⁴⁴. Pertempuran terbesar terjadi pada tahun 1749 dalam perang Penfui dimana Pasukan Portugis Hitam dipimpin Letnan Jendral Gaspar da Costa dengan sekutunya dengan kekuatan 50.000 orang kalah oleh pasukan VOC di bawah vandrik Lipp⁴⁵. Sejak saat itu kekuasaan Portugis hitam semakin surut dan VOC semakin mengembangkan kekuasaan di pedalaman Timor. Penguasaan sungai Benanai dari hulu dan hilir membawa dampak besar karena dapat menguasai pertumbuhan cendana. Aliran sungai menjadi tempat lalu lintas cendana dari udik sampai ke hilir yang muaranya merupakan tempat paling ideal sebagai pelabuhan cendana yang terlindung dari ombak besar⁴⁶.

Wesei Wehali yang dibangun para pendatang dari Malaka (Sinan Mutin Malaka) dipimpin empat bersaudara yang kemudian menjadi pendiri kerajaan. Yang sulung membangun kerajaan Wehali, adiknya membangun kerajaan Wewiku dan Haitimuk sedangkan yang bungsu membangun kerajaan Fatuaruin. Raja tertinggi bergelar maaromak Oan yang berada di pusat kerajaan di Laran yang tidak aktif memerintah. Sedangkan yang memerintah secara langsung adalah 3 putranya yang bergelar Liurai. Satu dibagian Barat (Loro Toba) dipegang Liurai Sonbai. Satu di bagian Timur (Loro Sae) dipegang Lirai Likusaen⁴⁷.

Namun kerajaan Wesei Wehali mengalami kemerosotan pada tahun 1642 karena serangan Portugis dipimpin Fransisco Fernandez⁴⁸. Semenjak kemerosotan Wesei Wehali, Portugis Hitam dibawah Dominggus Da Costa membangun Kote Noemuti menggantikan pusat politik dan perdagangan cendana di Timor. Dari Noemuti digerakkan para meo untuk mengendalikan pemotongan cendana dan juga melakukan penyerangan kekuasaan VOC di Kupang⁴⁹. Gelombang penyerangan ke pusat kedudukan VOC di Kupang baru berakhir setelah perang Penfui tahun 1749. Pada

⁴² Sarifudin Gomang, S.1993, hal.74

⁴³ Timor Pequena Monografica. 1970. hal 57

⁴⁴ Widiyatmika M. 2007 hal. 47

⁴⁵ Schulte Nordholt H.G. 1971, hal.177

⁴⁶ Ataupah H.1992 hal 19

⁴⁷ Widiyatmika, M. 2007b. Lintasan Sejarah Di Nusa Tenggara Timur: Pusat Pengembangan Madrasah NTT. Kupang. hal.44

⁴⁸ Schulte Nordholt, H.G. 1917. hal. 171

⁴⁹ Ataupah, H. 1992. hal. 143

Perang Penfui Portugis dan sekutunya mengalami kekalahan dari VOC. Sejak saat itu kekuatan Portugis dan Portugis Hitam surut. Bahkan sejak tahun 1769 pusat kedudukan Portugis tergusur dari Lifao karena pemberontakan Fransisco da Hornay II sehingga Gubernur Portugis mengungsi ke Dili. Sejak tahun 1769 Dili kemudian menjadi pusat kedudukan Portugis di Timor ⁵⁰

P.Antonio S Jacinto tanggal 25 Desember 1645 mengadakan perjanjian dengan raja Kupang Dom Duarte, untuk membangun benteng dan gereja bagi Portugis. Raja dan rakyat mengakui sebagai kawula Portugis. Karena raja masih buta huruf kontrak dilakukan dengan cap tanda salib di bawahnya ⁵¹. Persaingan memperebutkan wilayah kekuasaan dan perdagangan berlangsung melalui proses yang panjang. Kedua belah pihak membangun persekutuan dengan para raja setempat yang diikat dengan perjanjian. Untuk lebih mengefektifkan persaingan menghadapi Belanda di Timor, Portugis menunjuk seorang pejabat dengan pangkat capitao mor. Capitao mor yang pertama Carneiro tahun 1650 ⁵². Kemudian berturut-turut pejabat capitao mor Portugis di Timor adalah: Simao Luis 1656-1664, Antonio Da Hornay 1664-1669, Matheus da Costa 1671-1672, Antonio da Hornay 1673-1693 (periode kedua), Fransisco da Hornay I tahun 1693-1696-1730. Dominggus da Costa I 1697-1722, Fransisco da Hornay II 1722-1730, Gaspar da Costa III 1734-1749, Joao Hornay 1749-1757, Fransisco da Hornay III 1757-1772 dan Pedro da Hornay 1785-1795 ⁵³. Dalam persaingan yang panjang tidak saja merubah wilayah yang dikuasai baik Belanda maupun Portugis, tetapi juga membawa pengaruh besar atas sistem pemerintahan tradisional dan perdagangan serta nilai-nilai yang bersumber dari adat yang diwariskan leluhur.

Semula perdagangan cendana dengan 12 bandar cendana, berubah akibat kekuasaan kolonial yang mendasarkan pada monopoli dagang. Cendana tidak lagi menjadi sumber kemakmuran bagi rakyat, tetapi menjadi sumber masalah. Para raja dan rakyat dipaksa mengikuti kehendak pemerintah kolonial, kerja rodi, pengaturan pajak, penaklukkan kerajaan dengan dalih menegakkan kewibawaan dan menegakkan keamanan. Salah satu korbannya adalah: peran para meo dicabut dari akar budayanya. Demikian juga norma-norma yang dihormati berdasarkan nilai-nilai leluhur menjadi melemah ⁵⁴.

Di pihak Belanda/VOC pemimpin di Timor diawali oleh seorang opperhoofd pertama J.van Heyden tahun 1655 sampai pejabat opperhoofd terakhir ke 38 yakni P.Stopkeert tahun 1808-1810. Kemudian pemerintahan Belanda dijabat oleh seorang residen sejak tahun 1810 yang dijabat residen J.A.Hazart sampai tahun 1833 ⁵⁵.

⁵⁰ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid I, 1973. Hal 407

⁵¹ Sejarah Gereja Katolik Indonesia I, hal.395

⁵² Barros, Jorge Duarte. 1984. hal 26

⁵³ Timor Pequena Monografia, 1970. Hal. 189

⁵⁴ Widiyatmika M.2007. Hal 108

⁵⁵ J.De Roo van Alderwerelt..Aanteekeningen over Timor en Onderhoorighede.Uit T.B.G. deel 47.blz.194-226

Kebijakan residen Hazart pada tahun 1819 menyerang dan mengambil alih pelabuhan Atapupu dari Portugis. Tahun 1864 Atapupu menjadi salah satu Post Houders yang kemudian menjadi tempat kedudukan Kontrolir yang menguasai wilayah Belu. Pusat kedudukan kontrolir kemudian dipindahkan ke Atambua. Dalam perkembangan pemerintah kolonial Belanda tahun 1885 ditetapkan 4 onder afdeeling di pulau Timor yakni Belu, Oematan, Kupang dan Rote Sabu⁵⁶. Onder Afdeling Belu yang mencakup 20 swapraja. Jumlah kerajaan sebelum kedatangan orang Barat hanya satu kerajaan Wesei Wehali dengan 3 liurai, kemudian kerajaan-kerajaan kecil merdeka setelah penaklukan oleh Portugis tahun 1642.

Swapraja di Wilayah Belu kemudian menciut dari 3 buah menjadi 2 buah, kemudian menjadi hanya sebuah kerajaan/swapraja saja yakni Swapraja Belu. Sedangkan Onder afdeeling Timor Tengah Utara ada 3 swapraja yakni: swapraja Miomaffo, Insana dan Biboki. Di samping itu untuk mempertahankan diri dari penaklukan kolonial Belanda dan Portugis terjadi serangkaian perlawanan yang panjang dari tahun 1642 ketika Fransisco Fernandes menaklukkan Wesei Wehali sampai perlawanan terakhir terjadi pada tahun 1913 di wilayah Perbatasan di bagian Utara yakni di Nualain dan Lamaknen terjadi lebih dari 20 perlawanan⁵⁷.

Sesuai dengan artikel I Undang-Undang tahun 1909, kerajaan Maukatar diserahkan kepada Portugis. Sebaliknya pemerintah Belanda memperoleh Noemuti, Tahakae dan Tamiru Ailala. Noemuti digabungkan dengan swapraja Miomaffo, Tahakae dimasukkan kedalam wilayah kerajaan Nualain dan Tamiru Ailala dimasukkan kerajaan Lakekun. Dengan demikian di wilayah Belu Utara tinggal satu swapraja yakni Belu Tasifeto⁵⁸.

Tanggal 28 Juli Tahun 1917, berdasarkan surat keputusan Gubernemen Tanggal 28/7/1917 no.31: ditetapkan Noemuti masuk wilayah Timor Tengah Utara, Tahakae masuk wilayah distrik Lamaknen dari swapraja Belu Tasifeto dan Tamiru Ailala masuk distrik Dirma dari swapraja Malaka. Noemuti kemudian berstatus sebagai sebuah kefeteran di lingkungan kerajaan Miomaffo⁵⁹.

Menurut catatan Muller dalam Parera 1971 yang dikutip Widiyatmika M.2008⁶⁰ dahulu Harhen Biboki termasuk dalam wilayah Oekusi, tetapi tahun 1850 dimasukkan dalam wilayah Wehali. Tahun 1916 kerajaan Biboki ditetapkan sebagai kerajaan dengan beslit Gubernur Jendral tanggal 21 Agustus 1916 no.34 dengan mengangkat Kornel Manlea, Kau Mauk menjadi raja dengan membawahi 5 kefeteran yakni: Ustetu, Petasi, Bukifan, Taitoh dan Harneno.

Hal 224-225.

⁵⁶ Parimarta, I. Gede. 2002 hal. 357

⁵⁷ Widiyatmika M. dkk. 2005. Belu Dalam Kancan Perjuangan Melawan Kekuasaan Kolonial. UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Propinsi NTT. Hal 112-188.

⁵⁸ Widiyatmika M. dkk. 2005. Hal. 313-314

⁵⁹ Widiyatmika M. 2007 hal 312

⁶⁰ Widiyatmika M. 2008. Sistem Pemerintahan Tradisional Kabupaten Timor Tengah Utara. UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional NTT, Kupang hal 193

Tanggal 10 Juni 1893 kedua penguasa kolonial di Timor Belanda dan Portugis meninjau kembali hasil kesepakatan tahun 1859 dengan keputusan baru yang dilaksanakan di Lisbon dan dikenal sebagai Konvensi Lisbon yang diumumkan pada tanggal 1 Juli 1893. Isi Keputusan tersebut adalah: Portugal mengembalikan kepada Belanda Tahakae, Noemuti dan Tamiru Ailala dan menerima dari Belanda seluruh dataran Maukatar. Kesepakatan ini disahkan melalui konvensi Internasional di Denhag tanggal 1 Oktober 1904. tercantum dalam *Indische Staatblad* 1894 no.81 tanggal 1 Oktober 1904 yang ditanda tangani di S' Gravenhage. Perjanjian tersebut tercantum dalam *Indische Staatblad* Tahun 1906 no.194 Parlemen Portugis meratifikasi Konvensi The Hague dan memperbaiki instrumen dalam waktu satu bulan pada tahun 1909 Kemudian dilakukan survey bersama perbatasan bagian Timur Oekusi Ambenu. Termasuk yang dibicarakan adalah enclave Noimuti dan wilayah Bikomi ⁶¹

Selanjutnya pada tahun 1917 Tahakae dimasukkan dalam wilayah distrik Lamaknen swaprja Tasifeto dan Tamiru Ailala sementara itu terjadi sebuah masalah karena seorang liurai dari Oekusi menawan penguasa Tunbaba. Tahun 1911 Portugis dan Belanda sepakat membicarakan ulang masalah perbatasan yang selama 100 tahun sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan militer Belanda ⁶².

Gubernur Jendral A.W.F van Idenburg (1909-1916) memutuskan melakukan perlawanan ketika Portugis melakukan serangan ke Maukatar pada bulan Februari 1911. Belanda mengirimkan pasukan Infantri yang terdiri dari orang-orang Ambon. Pada bulan Juni 1911 terjadi pertempuran antara pasukan Portugis dan Belanda. Pada tanggal 18 Juli 1911 Portugis menduduki Lakmaras. Pasukan Belanda dikirimkan tanggal 18 Juli 1911 via Atapupu. Dalam pertempuran di Lakmaras 3 prajurit Portugis asal Mozambiq tewas. Pembantu letnan Fransisco da Costa dan pengikutnya ditawan. Kemudian dilakukan perdamaian kembali antara Portugis dan Belanda yang memadukan hasil Perjanjian Lisbon dan Konvensi the Hague. Dalam perjanjian ini status Tunbaba dan Bikomi masih mengambang demikian juga Noemuti, Tamiru Ailala, Tahakay dan Maukatar. Akhirnya masalah perbatasan diputuskan mahkamah arbitrase Liga Bangsa-Bangsa di Swiss tanggal 25 Juni 1914. Diputuskan seluruh enclave dihapuskan kecuali Oekusi. Maukatar diserahkan ke Portugis dan Noemuti serta Taffaroe kepada Belanda. Masalah perbatasan dianggap selesai pada April 1915 dan efektif tanggal 20 November 1916 dengan resmi dilaksanakan pertukaran wilayah. Sebagai akibat persetujuan tersebut Penduduk Tamiru Ailala meminta tetap sebagai penduduk wilayah Portugis tetapi Tahakai menjadi penduduk wilayah Belanda. Sedangkan di Maukatar sekitar 5000 penduduk meninggalkan dataran dan pergi ke

⁶¹ Gronsaangelegenheden op Timor. Kolonial Veslag. The Hague 1911 hal 1-15. Lihat Lamberts, H. Nota betreffende de Portugeesche grensgewesten. 1912 hal. 1137-1147.

Lihat Arbitrage Concernant la delimitation des possessions neerlandaises et Portugaises dans l'ile de Timor. Memore presente par le Gouvernement des Pays Bas. The Hague. 1913. hal. 1-4.

⁶² Memore du Gouvernement Portugais. Arbitrage de Timor; Frontiere est de Oekusi-Ambenu. Lisbon, Imprensa Nacional. 1913.

wilayah Timor Belanda. Sedangkan penduduk Noemuti setia terhadap perjanjian.. Pada tanggal 28 Juli 1917 berdasarkan keputusan gubernemen tanggal 28/7/1917 no.31 ditetapkan Noemuti masuk wilayah Timor Tengah Utara, Tahakae masuk wilayah distrik Lamaknen, swapraja Belu Tasifeto dan Tamiru Ailala masuk dalam distrik Dirma swapraja Malaka. Parera, 1971, dalam Widiyatmika dkk. 2009.⁶³

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 Timor dipersatukan dalam tentara pendudukan dengan pusat di Kupang dan di Dili. Pada waktu itu perbatasan yang ada tidak diberlakukan lagi. Namun setelah Jepang menyerah, maka perbatasan kembali seperti semula. Penyerahan secara langsung kekuasaan Jepang kepada Sekutu dilakukan di dua tempat yakni di Kupang dan di Dili. Serah terima dilakukan diatas deck kapal perang HMAS Morseby di Kupang tanggal 11 September 1945 dan di Dili tanggal 23 September 1945. Pihak Sekutu diwakili Brigadir Jendral Lewis Dyke. Dengan diserahkan kekuasaan Jepang pemulihan kekuasaan baik di Kupang maupun di Dili. Gubernur Ferraira de Carvalo kembali memimpin Propinsi Timor Portugis. Dengan demikian sejak itu kembali berlaku perbatasan Timor Portugis dengan wilayah Timor Belanda.⁶⁴

Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karesidenan Timor kembali berada di lingkungan penguasa kolonial Belanda di lingkungan Negara Indonesia Timur. Tahun 1950 Timor masuk kedalam pangkuan Republik Indonesia, Sampai tahun 1958 Timor berada di lingkungan Propinsi Sunda Kecil yang kemudian berubah menjadi Nusa Tenggara. Pada waktu itu perbatasan dengan wilayah propinsi Timor Portugis, wilayah perbatasan tidak menalami perubahan. Demikian pula ketika tahun 1958 Propinsi Nusa Tenggara Timur berdiri, perbatasan dengan wilayah Timor Portugis tidak mengalami perubahan⁶⁵.

Namun pada tahun 1975 terjadi Integrasi wilayah Timor Portugis dengan wilayah Republik Indonesia. Integrasi diawali dengan Petisi/Deklarasi Balibo. Pada tanggal 30 November 1975 keempat Partai UDT, Aprodite, Kota dan Trabalista memproklamirkan dari Balibo atas nama rakyat Timor Timur: Timor Portugis bebas dari Penjajahan dan Timor Timur bergabung dengan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Ke empat Partai membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur, dengan keputusan semua Partai pada tanggal 17 Desember 1975 no.2 tahun 1975 menetapkan Armando Dos Rei Araujo sebagai Formatur dengan mandat penuh dan sebagai ketua/kepala Eksekutif Pemerinah Sementara Timor Timur. Kemudian Presiden Suharto pada tanggal 17 Juli 1976 menanda tangani Undang-Undang No.7 Tahun 1976 tentang penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Daerah Tingkat I Timor Timur, dan secara resmi wilayah

⁶³ Widiyatmika M.2009,hal 1159
Lihat Timor Pegena Monografia.1970.hal.14

⁶⁴ Barros, Jorge Duarte.1984.hal. 122-123.

⁶⁵ Widiyatmika M.2007 b.hal 389-397

Timor Timur bersatu kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ⁶⁶.

Sejak itu perbatasan yang semula sebagai perbatasan negara kini menjadi perbatasan propinsi Timor Timur dengan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Walaupun Timor Timur telah masuk menjadi propinsi terbaru dari negara kesatuan republik Indonesia, pada masa Orde Baru melaksanakan Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Gencarnya pembangunan fisik dan pendidikan membawa perubahan besar. Namun berdasarkan pengamatan penulis sebagai anggota tim Leknas LIPI sewaktu melaksanakan penelitian masalah Integrasi tahun 1982 adalah: Hasil informasi nara sumber justru berbanding terbalik dengan harapan. Sewaktu ditanya tentang hasil kemerdekaan di Timor Timur melalui integrasi, sangat mencengangkan. Komentar para nara sumber: merdeka apa, semuanya serba susah. Memang jalan mulus hot mix sampai ke desa-desa, setiap kecamatan dibangun Tilpun otomatis, generasi muda mengikuti pendidikan dengan bea siswa dari pemerintah sampai ke Perguruan Tinggi. Gedung-gedung baru dibangun sangat bagus. Pelayanan pemerintahan menyebar sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Anehnya mereka berkata dengan sinis. Jalan bagus, rumah bagus bukan untuk rakyat. Siapa yang menikmati, para pendatang. Membanjirnya pendatang dalam bidang aparatur pemerintahan, pedagang dan pedagang informal yang relatif lebih maju dan ulet dengan daya saing lebih baik. Hal ini menyebabkan penduduk lokal tersisih kalah bersaing. Generasi muda berpendidikan sulit memperoleh pekerjaan. Petani kopi mau menjual kopi ke Dili ditangkap karena harus melalui KUD. Tetapi oknum tertentu bebas membawa kopi keluar ber- karung-karung. "Jangankan menjadi pejabat, mau jadi kuli bangunan saja susah karena kalah bersaing dengan buruh pendatang dari Jawa dan Bali yang lebih diminati pra kontraktor. Ironi memang persepsi penduduk lokal menjadi sumbang dan karena tersisih menjadi penonton pembangunan di negeri sendiri. Semua pendatang dari luar diidentikan sebagai "Jawa". Penduduk lokal yang tersisih, kecewa dan frustrasi melihat kenyataan menjadi berbalik arah. Seperti teori Selo Sumardjan dalam bukunya: Perubahan Sosial di Yogyakarta tahun 1969. Masyarakat petani yang merasa kecewa, tertekan akan bereaksi ganda. Menjadi introvert atau sebaliknya menjadi agresif terhadap simbol-simbol pemberi tekanan ⁶⁷. Seperti ungkapan Herman Suwardi 1972 ⁶⁸. Menyangkut perubahan perilaku diungkapkan: Perilaku mengalami perubahan sebagai hasil proses berulang pengalaman terus menerus. Pengalaman berulang ini menumbuhkan persepsi dan keinginan. Dalam kasus integrasi di Timor Timur pengalaman berulang yang mengecewakan menumbuhkan kekecewaan dan frustrasi dan bersifat agresif. Gencarnya pembangunan fisik dan pendidikan tidak

⁶⁶ Aco Detaq, 1978. Kisah Tamatnya Kekuasaan Kolonialisme Portugis di Timor Timur. Kupang : Percana, hal 13
Lihat Barros, Jorge, Duarte, 1984 hal 147-148.

⁶⁷ Selo Suwardjan 1981. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Hal 327-328

⁶⁸ Herman Suwardi. 1972. Respon Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian, Terutama Padi. Suatu Kasus yang Terjadi di Jawa Barat. (Disertasi Universitas Pajajaran Bandung) hal 31-34

diimbangi dengan pembangunan dengan pendekatan sosial budaya yang memadai menjadi umpan yang empuk bagi kampanye Fretilin dan media luar negeri. Gencarnya berita media masa baik dalam negeri maupun luar negeri lebih banyak menyoroti masalah politik. Berita dan informasi yang berkembang di luar negeri sangat mencolok menyoroti tiga hal: invasi Indonesia ke Timor Timur, perlawanan Fretilin dan HAM ⁶⁹.

Sebelum jajak pendapat tahun 1999, muncul cikal bakal berdirinya Negara Timor Leste dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Timor Leste yang diumumkan oleh Fretilin di Dily tanggal 28 November 1975. Proklamasi ditanda tangani oleh Xavier do Amaral, didampingi tokoh Fretilin antara lain: Mari Alkatiri, Nicolau Lobato, Rogerio Lobato, Guido Soares dan Octavio de Araujo ⁷⁰

Setelah mengalami pergelokan dan perjuangan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia pada tahun 1999 propinsi Timor Timur pasca Jajak Pendapat melepaskan diri dan sejak itu diberlakukan kembali perbatasan wilayah Nusa Tenggara Timur dengan wilayah Timor Leste. Namun sebenarnya garis batas tidak mengalami perubahan. Namun Pasca jajak Pendapat tahun 1999 terjadi kekacauan akibat terjadinya eksodus besar-besaran penduduk yang tetap memilih menjadi warga negara RI. Namun sejak itu terjadi persoalan besar para pengungsi terutama di wilayah kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan Kupang. Bahkan penduduk di kedua sisi perbatasan sering timbul masalah terkait persengketaan batas dan persoalan sosial ekonomi, persoalan kejahatan seperti pembunuhan, penyelundupan, penyerobotan lahan, kecemburuan sosial antara kedua wilayah⁷¹. Untuk mengatasi persoalan perbatasan dilakukan berbagai perundingan dengan payung huu yakni: 1. Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (LN Tahun 2000 No.185 TLN No 4012). 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan dengan UNTAET. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia No.185.5.102 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia-Timor Timur. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 185-05-079 tentang Peembentukan Komite Perantara Perbatasan (Border Liasson Commite) Republik Indonesia dengan Timor Timur. Dalam Keputusan Mendagri menetapkan Wakil Gubernur NTT sebagai Ketua Perantara Perbatasan. 5. Keputusan Gubernur NTT No.169/KEP/HK/2002, tentang Pengangkatan Anggota Perantara Perbatasan RI-Timor Timur ⁷²

⁶⁹ Kevin Serlock.1980 hal.191-206

Lihat Lihat Jill Jolliffe. 1978.East Timor Nationalism and Colonialism.University of Queensland Press.hal.211-269

⁷⁰ Jill Jolliffe. 1978. Hal 213-214

⁷¹ Widiyatmika M.2007c.. Hal.120-132

⁷² Piet A.Tallo..2005. Memahami Dengan Hati Dalam Membangun Nusa Tenggara Timur.Bentara dan Propinsi NTT Kupang..hal.201

1.3 Urutan Paparan

Buku Sejarah Perbatasan RI-Timor Leste terdiri dari 5 bab dan Lampiran. Bab I Menyangkut pendahuluan diungkapkan Penelusuran sejumlah dokumen, artikel dan buku/literatur tentang Timor baik Timor bagian Barat (bekas wilayah Belanda maupun wilayah bagian Timur (bekas wilayah Portugis) cukup banyak. Sampai tahun 1980 yang diuraikan Kevin Sherlock tentang Bibliografi Timor ada 2992 buah, sedangkan yang menyangkut sejarah ada 662 buah. Namun belum ada satu uraian khusus yang komprehensif tentang sejarah perbatasan, yang ada adalah uraian sepenggal-sepenggal tentang sejarah perbatasan sebagai bagian dari suatu topik berupa buku. Sedangkan tulisan perasingan pemerintah kolonial Portugis dan Belanda telah diawali tahun 1613 di Solor dan dilanjutkan di Timor sejak tahun 1655 sampai tahun 1913 yang melibatkan sejumlah kerajaan di perbatasan.

Bab 2 Perbatasan NTT dan Timor Leste dalam catatan menguraikan catatan sejak mula sejarah pulau Timor; hubungan dengan dunia luar melalui perdagangan Cendana, kerajaan tertua dan perubahannya. Kedatangan bangsa Barat dan persaingan yang terjadi serta kontrak-kontrak dan perundingan perbatasan dan penyelesaian perbatasan.

Bab 3 Dinamika Perbatasan masa keresiden Timor 1810-1942 dan Masa Pendudukan Jepang 1942-1945 Menguraikan terbentuknya karesiden Timor dan Daerah Takluknya dan berbagai perjanjian perbatasan mulai dari perjanjian Lisbon 1859 sampai Perjanjian 1904 dan perlawanan menentang kebijakan Pasifikasi Belanda di Timor dan Perang Melawan Pajak di wilayah Timor Portugis. Dalam bab ini juga diuraikan tentang wilayah perbatasan masa pendudukan Jepang.

Bab 4 Menguraikan terbentuknya Provinsi NTT dan perkembangan kerajaan yang kemudian di likuidasi dan terbentuknya kecamatan dan desa gaya baru di perbatasan.

Bab 5 Menguraikan terjadinya integrasi dari bekas wilayah Timor Portugis menjadi Provinsi Timor Timur sejak tahun 1975, Uraian media tentang invansi dan perlawanan di Timor Timur serta persepsi masyarakat tentang Integrasi. Selanjutnya diuraikan terjadinya jajak pendapat tahun 1999 yang melahirkan Negara Demokrasi Timor Leste. Sejak terlepas dari Indonesia, muncul eksodus pengungsi besar-besaran ke wilayah Nusa Tenggara Timur serta permasalahan pengungsi. Pada periode ini juga dilakukan perundangan baru tapal batas dan pemantapan tapal batas. Akhirnya diuraikan pembangunan wilayah perbatasan bagian Timor yang menjadi gerbang matahari terbit yang diharapkan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan permasalahan yang dihadapi.



**BAB 2 | Mengungkap Dinamika
Perbatasan Sampai
tahun 1810**

2.1 Jejaring Hubungan Antar Nusa Bumi Cendana s/d abad 16

a. *Awal hubungan Bumi Cendana dengan Dunia Luar.*

Pulau Timor masuk dalam hubungan antar Nusa terkait dengan perdagangan Cendana. Groeneveldt 1980 dalam Ormelung 1955 menyebutkan: Sumber tertulis tertua mengenai pulau Timor adalah buku karya musafir Cina bernama *Chau-yu-kua* tahun 1225 yang berjudul *Chu-fan-sih* menyebutkan tentang pulau Timor yang kaya cendana telah mengadakan hubungan yang teratur dengan kerajaan Kadiri¹. Perdagangan cendana dan kemudian juga lilin dan budak menjadi barang dagangan penting yang mendorong terjadinya hubungan dagang dan kontak dengan dunia luar. Sebenarnya hubungan antara Timor termasuk Belu dengan dunia luar yang terkait dengan perdagangan cendana sudah jauh lebih awal dari tahun 1225. Seorang ahli perdagangan kuno Wolters (1963) yang dikutip Widiyatmika 2007², mengemukakan bahwa para pedagang dari Sriwijaya datang langsung membeli cendana pada pusat penghasil cendana di pulau Sumba sekitar abad ke 3 Masehi. Sebenarnya perdagangan cendana berdasarkan sumber-sumber tidak langsung diduga telah berkembang sekitar awal abad Masehi. Hal ini mengingat pendapat van Leur (1955), Pelliot dan Lamster yang merekonstruksi pelayaran para pedagang Hindu dan Cina pada awal abad Masehi telah sampai di pulau Jawa³.

Mengingat pulau-pulau di Nusa Tenggara yang jaraknya satu dengan yang lain hanya dipisahkan oleh selat yang sempit, para pedagang Hindu dan Cina telah sampai ke kepulauan Nusa Tenggara Tenggara⁴. Namun tidak banyak diketahui aktivitas dagang pada awal abad Masehi karena terbatasnya sumber yang dapat dipakai menelusuri hal itu. Tetapi para raja di wilayah Indonesia bagian Barat seperti Dwapatom, Sriwijaya, dalam mempererat hubungan dengan kaisar Cina para utusan mempersembahkan berbagai barang berharga salah satunya cendana. Muhamad Yamin berkaitan dengan Timor yang mengutip buku *Taci-che-liao* diterbitkan tahun 1349 oleh *Wang Ta Yuan* menyebutkan pulau Timor yang dikaitkan dengan cendana telah dikunjungi para pedagang Cina. Berita lebih lanjut buku karya *Fei-Hsin* tahun 1436 uraian Groeneveldt 1969 dalam Widiyatmika, 2007⁵, menyebutkan *Kihri Timun* terletak disebelah Timur *Tiong kalo* gunung-gunungnya ditumbuhi pohon cendana. Pada waktu itu telah ada 12 bandar atau bandar tansito. Masing-masing dikepalai oleh seorang kepala. Apabila perahu dagang tiba, orang laki-laki datang ke atas perahu untuk menukar hasil. Barang-barang impor yang utama emas, perak, besi, barang pecah belah dan lainnya. *Tiong-kalo* adalah sebutan untuk Ujung Galuh

¹ Ormelung, F.J. 1955, *The Timor Problem*, Jakarta, Groningen, J.B. Wolters hal.95.

² Widiyatmika, M. 2007a. *Cendana dan Dinamika Masyarakat Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Pusat Pengembangan Madrasah NTT: hal. 11.

³ Ormelung, F.J., 1955 hal.96

⁴ Ormelung, 1955. hal.94.

Lihat van Leur, *Indonesian Trade and Society*. 1954. Jakarta: Sumur Bandung hal.54

⁵ Widiyatmika, M., 2007a., hal. 11

pelabuhan penting di Jawa Timur yang dibangun raja Airlangga dan telah berkembang menjadi pelabuhan penting yang banyak dikunjungi para pedagang dari berbagai daerah di Indonesia dan pedagang dari Luar Negeri. Begitu pentingnya dan terkenalnya pelabuhan Ujung Galuh bagi para pelaut dan pedagang Cina.

Pelabuhan ini dijadikan penunjuk arah terhadap daerah-daerah di sebelah Timur pulau Jawa antara lain pulau Timor. Pada pertengahan abad ke 15 di Timor telah ada 12 bandar. Tentunya bandar ini terkait dengan perdagangan cendana. Atapupu⁶ merekonstruksi nama ke 12 bandar di pulau Timor tersebut adalah: Atapupu, Mena, Wini, Oekusi, Lifao, Soliu, Naikliu, Kupang, Hanbo, Tarba, Teres, Nunkolo, Boking dan Motadikin. Ormeling (1955)⁷ mengidentifikasi 3 pelabuhan penting di pantai Timor bagian Selatan adalah: Kolbano, Nunkolo dan Motadikin. Dua dari pelabuhan penting di pulau Timor yang disebutkan di atas berada di wilayah Belu yakni Atapupu di Pantai Utara dan Motadikin di Pantai Selatan. Dari kedua pelabuhan tersebut hasil dari Belu dikapalkan keluar terutama cendana, lilin dan budak

Para pedagang yang banyak berkunjung ke kedua pelabuhan utama di Belu adalah pedagang Hindu dari Jawa, pedagang Cina, kemudian juga para pedagang Bugis dan Makassar. Ormeling (1955)⁸ menyebutkan dalam rangka memperlancar pengangkutan cendana para pedagang Hindu memasukkan kuda sebagai kuda beban dan kuda tunggang. Masuknya kuda yang semula dimaksudkan memperlancar pengangkutan kayu cendana dari pedalaman ke pelabuhan pengekspor cendana, juga memberi corak pada alat transportasi penting di darat yakni kuda sebagai kuda tunggang, bahkan kuda menjadi salah satu kendaraan penting bagi para prajurit tradisional untuk berperang. Kuda juga mempunyai arti ekonomi penting bagi penduduk, sehingga hewan ternak kuda menjadi salah satu incaran para pencuri ternak yang sering menyulut peperangan dan pemenggalan kepala bagi para pencuri kuda yang tertangkap⁹.

b. Pengaruh Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit pernah mempunyai pengaruh di Timor termasuk kerajaan perbatasan di Belu dan Timor Timur. Timor mempunyai arti penting karena sebagai penghasil cendana yang laku di pasaran dunia. Para pedagang Jawa dan Malaka merupakan pedagang utama cendana yang pergi ke Timor. Berdasarkan buku Negara Kertagama pupuh XIV yang diungkapkan oleh Slamet Muljono 1979 dalam Widiyatmika M (2007 b)¹⁰. Kerajaan kerajaan di daerah bawahan termasuk di Timor, dalam urusan Negara para pembesar di daerah seberang lautan tetap berdaulat penuh. Kewajiban utama daerah bawahan terhadap pemerintah pusat Kerajaan Majapahit, pada waktu

⁶ Atapupu, H.1993. Ekologi Persebaran Penduduk dan Pengelompokan Orang Meto di Timor Barat, Jakarta: Universitas Indonesia (Disertasi), hal..19

⁷ Ormeling, F.J. 1955. hal. 96

⁸ Ormeling F.J. 1955 hal. 114

⁹ Ormeling F.J. 1955. hal 114

¹⁰ Widiyatmika M. 2007 b. hal 1141-150

waktu tertentu yang telah ditetapkan harus menghadap kepusat kerajaan Majapahit dengan memberikan upeti sebagai tanda kesetiaan. Dengan cara ini pemerintahan menjadi lebih efisien.

Untuk mempertahankan kesetiaan dan kesatuan kerajaan Majapahit dengan daerah-daerah seberang lautan, Majapahit menurut Yamin M.(1962) ¹¹ menerapkan strategi: 1). Memelihara kekuatan armada Angkatan Laut untuk melindungi daerah-daerah yang membangkang pemerintahan pusat Majapahit. Armada Angkatan Laut mengawasi daerah-daerah bawahan. Di daerah-daerah strategis ditempatkan Armada Angkatan Laut Majapahit. 2). Pada musim-musim tertentu pemerintah pusat Majapahit mengirimkan para pegawai dan pendeta ke daerah-daerah seberang lautan untuk menarik upeti disertai para pendeta. 3). Rapat Nusantara dan rapat tentara. Setiap tahun berturut-turut dilakukan rapat nusantara di pusat kerajaan yang dihadiri para pembesar Majapahit, keluarga kerajaan dan raja bawahan pada setiap bulan Palguna. Kemudian diikuti dengan rapat tentara yang disebut Balaguna Apupul Ahem yang berlangsung pada bulan Citra (Februari-Maret). Pada setiap bulan Caitra dibacakan kitab Raja Kapa-Kapa kepada para prajurit (Yamin, 1962) ¹². Kunjungan para pendeta ke daerah. Para pendeta agama Budha hanya diperkenankan menyebarkan agama Budha ke Wilayah Sebelah Timur. Sedangkan pendeta agama Siwa bebas menyebarkan agama di mana saja. Majapahit juga melakukan pendekatan perkawinan dengan putri-putri lokal tokoh kunci di daerah. Sehingga memererat kekeluargaan. Di daerah muncul banyak keturunan Campuran Majapahit. 6). Pada waktu kapal Victoria merapat di Batu Gede wilayah pantai Utara dekat perbatasan Timor Timur, Pigaffeta mengetahui kerajaan Majapahit justru di Batu Gede.

Bukti-bukti sisa pengaruh Majapahit dapat ditelusuri dalam beberapa hal:

- 1). Serapan kata Jawa Kuno/Sansekerta seperti kata Cendana yang di Tetun disebut Ai Kamenil. Kata Tasik (Laut) dikenal istilah Tasi Feto Tasi Mane (Laut Betina di Laut Sabu dan Laut Jantan di Laut Timor). Kata Alas (hitan), rah (darah), let (sekat), Batu Gede (nama kota di Timor Timur).
- 2). Cerita 7 putri turun dari langit (feto iku) dan salah satu tidak bisa terbang karena dicuri sayapnya dan akhirnya kawin dengan seorang pemuda bangsawan (mirip cerita Jaka Tarub).
- 3). Konsep tujuh lapisan langit Tujuh lapis langit dan 7 lapis bumi dalam istilah Lamaknen: Jigil Hitu As Hitu, Jogil hitu muk muak hitu (Bere Tallo 1968) ¹³

¹¹ Yamin M. 1962 hal 275-276

¹² Yamin M. 1962 hal. 284-286

¹³ Bere Tallo. 1968. hal. 415

c. *Sistem politik pemerintahan kerajaan di Belu (Daerah Perbatasan)*

1). Asal usul nama Belu

Schulte Nordholt (1971)¹⁴ mengutip Documento Sarzedas mengungkapkan bahwa pula Timor dihuni oleh dua kelompok penduduk yakni: orang Belo dan Vaiqueno. Orang Bello yang tinggal di bagian Barat adalah Vaiqueno. Nama Terdapat dua propinsi dengan 2 kelompok penduduk yang berbeda yakni dibagian Timur dihuni Bellos, Belos, atau Belo menurut sumber Portugis mengacu kepada penduduk dan tempat orang berbahasa Tetun di luar wilayah Portugis. Laporan Luis Fillipe FR Thomas dalam Tom Therik (1995)¹⁵ mengemukakan bahwa sebelum kedatangan orang Eropa separo dari wilayah Timur-Timor penduduknya berbahasa dos Belos-Belo yang merupakan nama kedua dari wilayah penduduk berbahasa Tetun. Jadi Bellos merujuk kepada Belu yang kemudian menjadi bagian dari wilayah Timor Barat. Bahasa Tetun sebagai bahasa yang digunakan penduduk yang dikaitkan dengan penaklukan separo wilayah Timor bagian Timur secara militer oleh bangsawan berbahasa Tetun yang diistilahkan dos Belos. Dato artinya bangsawan dan Belo adalah penduduk berbahasa Tetun.

Ormeling (1955)¹⁶ mengemukakan bahwa orang Belu atau Ema Tetun adalah mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai orang Belu. Nama Belu berarti teman dalam bahasa Tetun digunakan oleh orang Dawan (Atoni Meto) terhadap Ema Tetun. Berdasarkan mitos pendatang kemudian, Ema Belu adalah penduduk asli Belu yakni Ema Melu. Menurut Vroklage (1953) dalam Schulte Nordholt (1971)¹⁷, penduduk seluruh Belu tetap menganggap Melu adalah sebagai pemilik tanah. Berdasarkan dokumen tertulis pertama yang menyebutkan tentang Belu adalah dokumen Sarzedas tahun 1722-1725 yang menyebutkan Belu sebagai salah satu propinsi wilayah Portugis (propinsi dos Bellos). Kata Belu kemudian juga muncul dalam kontrak Paravicini dimana Hiacijntoe Correa disebutkan sebagai raja besar Belu menandatangani perjanjian atas nama 29 wilayah kerajaan di bawah pengaruhnya.

2). Asal Usul kerajaan Wesei Wehali

Mula sistem pemerintahan di Belu terkait dengan awal munculnya kerajaan Wewiku Wehali yang dalam tuturan lisan disebut Wesei Wehali berpusat di Laran Belu Selatan. Sebelum terbentuknya kerajaan Wesei Wehali di Belu telah ada sistem pemerintahan suku yang teratur. Kerajaan Wesei Wehali didirikan oleh para pendatang. Namun ada beberapa versi tentang para pendatang yang mendirikan kerajaan Wesei Wehali antara lain:

¹⁴ Schulte Nordholt, H.G. 1971. The Political System of Atoni of Timor. The Hague Martijnus Nijhoff, Groningen, hal. 163

¹⁵ Tom Therik, 1995. Wehali: The Four Corner Land The Cosmology and Traditions of Timorese Ritual Centre. The Australian National University, hal. 18

¹⁶ Ormeling, F.J. 1955. hal. 70

¹⁷ Schulte Nordholt, H.G. 1971 hal. 163

Lihat Tom Therik G, 1995, hal 50

Lihat pula Castro, A. de. 1867 As Possesoes Portuguezas na Ociania. Lisboa: Imprensa Nartional hal. 328



Gambar 2.1 Hutan Cendana di Timor

Parera (1971) dalam Widiyatmika, 2007¹⁸, mengemukakan asal usul kerajaan Wesei Wehali didirikan oleh empat suku yang menyatakan diri sebagai *hutun rai hat* yang meninggalkan tanah leluhurnya Sina Mutin Malaka. Mereka berlayar dengan menggunakan perahu layar dari bambu. Dalam pelayaran tersendat karena adanya halangan angin topan dan gelombang besar. Mereka menyadari bahwa halangan itu dipercaya disebabkan anjing suanggi berupa seekor burung hantu. Demi kelancaran perjalanan mereka kembali mengambil burung hantu yang tertinggal. Setelah burung hantu diambil dan diletakkan di atas tiang layar kemudian laut tenang kembali dan perjalanan berjalan lancar.

Setelah empat hari perjalanan rombongan sampai di Ninobo Rai Henek (Makasar). Tetapi karena kena angin sakaal, perahunya pecah. Tetapi seluruh anggota rombongan dapat selamat mencapai daratan. Namun beberapa peninggalan yang dibawa tenggelam di antara barang yang hilang antara lain semua arsip tulisan tangan. Bambu rakit yang pecah ditanam di darat dan ternyata tumbuh subur dan berkembang baik. Di Makasar pada waktu itu telah ada penduduk. Mereka diperlakukan dengan baik¹⁹.

Di Makasar anggota rombongan di bawah pimpinan Dato Makerek dan Dato Badaen mulai membuat perahu kembali yang terbuat dari kayu. Setelah perahu selesai, mereka melanjutkan perjalanan menyinggahi pulau Kusu, Pulau Kae, Pulau Api, Pulau Loe dan Larantuka Bouboin. Di Larantuka sebagian rombongan turun ke darat dan tinggal di sana. Rombongan yang lain melanjutkan pelayaran menuju pulau Timor dan sampai di Pantai Amanatun yang curam. Sebagian rombongan turun ke darat dan mendaki sebuah bukit melihat keadaan. Mereka melihat sebuah dataran yang luas tidak terlalu jauh dari Pantai. Rombongan melanjutkan perjalanan dan sampai di daratan yang luas di Besikama di Belu Selatan.

Tentang nama Wewiku Wehali dan Wesei Wehali terdapat beberapa versi.

¹⁸ Widiyatmika, M. 2007. Lintasan Sejarah Bumi Cendana. Kupang: Pusat Pengembangan Madrasah. NTT hal: 37

¹⁹ Widiyatmika, M. 2007b. hal 38

Nama Wewiku Wehali berasal dari Nama pohon yang ditanam oleh pendatang pertama pendiri kerajaan yakni pohon Ai Hali, pohon Ai biku, pohon Ai Timuk sehingga menghasilkan 3 nama kerajaan Wewiku, Wehali dan Hatimuk. Tetapi wehali, wewiku kata *we* bukan berasal dari kata *air* tetapi memang kata *we* yang berarti *air*, *hale beringin* artinya *air beringin*. Wehali juga ditafsirkan berasal dari kata *wai* dan *halik*. *Wai* berarti memang atau sungguh sedangkan *hale* atau *halik* mengelilingi. Jadi Wehali artinya kebenaran bahwa kerajaan yang mengelilingi kerajaan sekitarnya. Sedangkan versi yang lain nama lengkap kerajaan Wesei Wehali Wetoh Mubesi. Pengertian Wesei, *we* berarti *air*, *si* berarti menadah atau menyaring atau menahan sesuatu, juga berarti pancuran. Jadi Wesei berarti *air yang ditadah atau air pancuran yang mengalir dari atas*. Wetoh artinya *air damar*, sedangkan Maubesi nama sebuah teluk yang dahulu merupakan sebuah bandar. Untuk mengenang pohon beringin bersejarah tersebut maka tanda simbol kerajaan Wehali adalah pohon beringin.

Menurut van Wouden (1985)²⁰ *hutun rai hat* yang merupakan 4 suku pendatang dari Sinan Mutin Malaka sepakat mencari tempat baru dan berpencar. Yang tertua menempati lokasi di tengah dataran, di depan rumahnya mereka menanam bibit pohon Ai hali atau beringin. Sehingga wilayahnya diberi nama Wehali. Sedangkan yang kedua mengambil tempat agak ke barat dataran, di depan rumahnya ditanam sebatang bibit pohon Ai biku, Oleh karena itu nantinya nama kerajaan adalah Wewiku. Saudara yang ketiga menetap di dataran bagian sebelah Utara Wehali. Di depan rumahnya ditanam pohon Katimuk. Oleh karena itu kerajaannya diberi nama Haitimuk (berdasarkan makaoan di Hatimuk disebutkan bahwa sebelum menetap di Haitimuk yang sekarang leluhur mereka menetap lebih dulu di sebuah bukit yang disebut Wesei. Sedangkan yang ke empat mengambil tempat di pegunungan di sebelah utara Wehali. Nantinya anak lelaki dari kerajaan Wehali menjadi pemimpin dan kemudian mendirikan kerajaan Fatuaruin. Satu versi cerita rakyat tentang pohon yang ditanam bahwa leluhur pendatang ini pada waktu datang yang ditanam hanya satu pohon beringin. Namun kemudian pohon beringin ini bercabang tiga dan tiap cabang berlainan. Di dalam cerita di Belu Selatan istilah *Ai sorun tolu*. Sedangkan pusat kerajaan mereka memilih pada sebuah delta (sungai bercabang tiga) yang disebut *Mota sorun tolu*. Tentunya tiga cabang pohon yang berlainan bersifat simbolis²¹.

Pada waktu rombongan dari Malaka datang mereka membawa tanah, meriam, kelewang,, gading, perhiasan dan gong yang kemudian menjadi benda pusaka kerajaan dan disimpan di rumah pemali kerajaan (*Uma lulik*). Pada waktu rombongan datang di dataran telah ada sistem kemasyarakatan yang teratur dalam bentuk pemerintahan suku. Penghuni yang telah ada yakni *Ema Melus*. Terjadilah

²⁰ Van Wouden, F.A.E.1985. Klen, Mitos dan Kekuasaan..Jakarta:Grafiti Pres,hal.45

Lihat Grijzen, H.J.1934.Mededeelingen omtrent Beloe of Midden Timor,VBG 54, hal.18

²¹ Widiyatmika M.2007 hal.39

peperangan antara rombongan pendatang dari Malaka dengan penduduk asli (*Melus*). Orang *Melus* sebagai penduduk asli dalam peperangan mereka kalah karena pendatang yang lebih kuat persenjataannya. Dengan kekalahan dalam peperangan tersebut orang *Melus* terdesak ke arah pegunungan di Belu dan pegunungan di daerah sebelah Barat wilayah Belu. Dalam perkembangannya Wesei Wehali menjadi kerajaan kembar diperintah oleh raja yang bergelar *Maromak Oan*. Namun *Maromak Oan* tidak aktif memerintah, ia diistilahkan *mahaa toba mahemu toba* karena kedudukan dianggap sakral hanya aktif dalam kegiatan rohani. Untuk kepentingan pemerintahan dijalankan oleh *Liurai*. Satu versi cerita *Maromak Oan* yang dikutip Parera (1971) dalam Widiyatmika 2007b²² diungkapkan bahwa *Maromak Oan* pertama adalah keturunan bidadari dari langit, ia anak puteri bungsu dari 7 puteri kakaktua (*liurai fetu hitu*) yang turun mandi di sebuah danau di Wehali dan si bungsu ditangkap oleh raja Wehali. Ia kemudian kawin dengan raja Wehali dan mempunyai anak *Maromak Oan* yang pertama. Setelah *Maromak Oan* lahir ibunya meninggal dunia. Sayangnya ditinggal ditaruh di bawah perapian. Tentunya cerita yang mirip cerita Jaka Tarub ini juga bersifat simbolis bukan fakta sejarah. Namun dibalik mitos ini tentunya ada unsur-unsur sejarah yang disimboliskan dalam bentuk cerita burung kakak tua.

Cerita yang dihimpun Herman Seran Laran dan dikutip Us Finit (2003)²³ mengenai *Maromak Oan* diuraikan sebagai berikut: Wewiku Wehali (Wesei Wehali) yang selalu dipimpin seorang ratu yang bergelar *Maromak Oan* dan suaminya yang bergelar *Liurai*. Kerajaan ini didirikan oleh Bria Bauk yang bergelar *liurai* dan istrinya Hoar Diak Maklakan (Hoar *Maromak*), ia bergelar *Maromak Oan* ke 1. Ia mempunyai 4 putra (*mane hat liurai*) dan seorang putri.

Nama putra dan putri tersebut adalah:

- 1). Bara Mataus sebagai *liurai* Wehali.
- 2). Sako Mataus pergi ke Molo sebagai raja Sonbai.
- 3). Ura Mataus diutus ke Tengah pulau Timor (*Faina Maubes Neiki Neofanu*) dan menjadi usi *Nenomnanu* & raja *Maubes Insana*.
- 4). Neke Mataus diutus ke Larantuka menjadi raja Larantuka.
- 5). Seorang putri bernama Bui Ikun di Wehali menjadi *Maromak Oan* ke-2.

Kemudian berlanjut ke *Maromak Oan* ke 3 dan ke 4. Tetapi setelah itu tidak ada keturunan, karena takut terjadi kekosongan apalagi waktu itu terjadi perang antara Wehali dengan Wewiku. Atas kesepakatan para *fukun* diambil putri dari *Maubes Insana*, keturunan *usi Neno Mnanu* bernama Bee Pala Finit (Pala Finit Neno) menjadi *Maromak Oan* ke 5. Karena ragu kebenaran Bee Pala Finit putra Usi Neno

²² Widiyatmika, M. 2007 hal. 49

²³ Us Finit, Un. Alexander. 2003. *Maubes Insana*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. hal. 42

Mnanu maka Bee Pala Finit diuji kesaktiannya dengan meniti pada seutas benang yang direntangkan dan melewati lubang sumpit. Ternyata ia berhasil melaluinya. *Liurai* menjadi takut menikahnya. Oleh karena itu kemudian dikirimkan lagi Bee Bona Finit (Bona Fona) yang kemudian dinikahi. Keturunannya menjaga dan meneruskan adat istiadat *Maromak Oan* serta istana di Laran *Uma Bot*, Betun. Bee Pala Finit akhirnya tewas karena terbakar di dalam istananya dalam pertempuran melawan Wewiku. Abu jenasahnya dimakamkan di Betun disebut: *Ahun Maromak*. Sedangkan *liurai* telah melarikan diri ke Oe Liurai di Maubes Insana. Setelah Bee Pala Finit wafat berakhirlah riwayat *Maromak Oan* karena ia naik ke surga (*Maromak Oan Sae nikar Ti'an*). Setelah wafat *Maromak Oan* ke 5 (Pala Finit Neno) maka atas bantuan Portugis diangkatlah seorang penguasa kerajaan Wehali menggantikan Pala Finit Neno dengan gelar Keiser dari Haitimuk yang kemudian mengangkat dirinya menjadi *Maromak Oan*. Tetapi ia tidak diakui oleh raja-raja dan kemudian melarikan diri.

Apabila dibanding sumber tersebut dengan nama *Maromak Oan* sebelumnya tidak cocok. Neke Mataus yang disebutkan menjadi raja Larantuka, dalam silsilah raja Larantuka tidak dikenal nama Neke Mataus. Raja Pertama Larantuka dikenal dengan nama Paji Golo Arakiang. Dari dokumen yang ada *Maromak Oan* yang mengungsi adalah Don Feliks dengan istri dan pengikutnya mengungsi ke Oekusi dan tewas dalam pertempuran di Oekusi melawan Belanda. Sedangkan yang mengungsi ke Biboki adalah Don Pedro. Mengenai Ketiadaan keturunan dan perang Wesei Wehali, dalam cerita rakyat yang dihimpun Kornelis Bau dalam Widiyatmika dkk 2007b²⁴ bahwa terjadinya perang Wewiku Wehali yang dikenal dengan istilah *Hatuda Liurai* disebabkan pengingkaran kesepakatan. Pada waktu itu Raja di Wehali tidak mempunyai seorang keturunan, agar tidak terjadi kekosongan maka para bangsawan tinggi kerajaan bermusyawarah. Hasil musyawarah mereka sepakat mendatangkan seorang putri bangsawan dari *Tafatik Besikama/Lasaen* untuk melanjutkan kekuasaan dan mendapatkan keturunan. Juga disepakati bahwa apabila kelak sang putri memperoleh seorang putra harus dikembalikan ke Wewiku untuk memangku jabatan *liurai* menggantikan pamannya yang sudah mangkat. Sebaliknya kalau yang lahir seorang putri boleh menetap di Wehali untuk melanjutkan keturunan yang telah punah dan mendiami rumah suku.

Kemudian sang putri dari Wewiku yang dibawa ke Wehali memperoleh anak seorang putra, tetapi anak beserta inang pengasuhnya disembunyikan/diasingkan di suatu tempat di *Maralilu* dekat Tubaki atas petunjuk para tua adat dan *makoan* di Wehali. Para tetua adat dan bangsawan dari Wewiku menjadi gusar karena Wehali mengingkari kesepakatan ketika mengantar sang putri apabila mempunyai anak putra harus diantar ke Wewiku. Beberapa bangsawan tua adat di *Tafatik Lasaen/Besikama* diutus ke Wehali untuk menanyakan kejelasan soal putra yang lahir dan

²⁴ Widiyatmika dkk, 2007, Sistem Pemerintahan Tradisional di Belu, Kupang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Propinsi NTT, hal. 138

akan dijemput untuk dibawa ke Wewiku dan dinobatkan sebagai Liurai. Tetapi pihak Wehali tidak bersedia menyerahkan putra tersebut ke pihak Wewiku. Akibatnya terjadilah pertempuran sengit antara Wewiku dengan Wehali yang dikenal dengan sebutan *hatuda Liurai* memperebutkan seorang putra. Akibat pertempuran saudara tersebut jatuhlah korban di kedua belah pihak yang cukup banyak. Dalam saat yang kritis muncullah putra yang disembunyikan yang menjadi penyebab peperangan. Putra tersebut maju ke medan perang dan meminta kedua belah pihak yang berperang menghentikan peperangan. Permintaan dituruti dan akhirnya berhentilah peperangan tersebut. Hubungan Insana dengan Belu Selatan cukup erat tidak saja terkait dengan hubungan perkawinan juga hubungan persahabatan.

Dari sumber di Laran yang dikutip Tom Therik (1995)²⁵ raja Luis Taolin kawin dengan Usi Fore Tuna. Cicitnya yang bernama Kahalasi Taolin kawin dengan Tai dari Uma Klaran di Builaran. Putra termuda mereka bernama Fatin Luis Taolin menjadi raja kedua di Insana. Disebutkan Liurai di Laran terpaksa meninggalkan Laran karena diusir rakyat dari Dirma, Wewiku, Haitimuk dan Lakekun. Liurai mengungsi ke Insana. Atas bantuan dari Insana musuh-musuh Liurai bisa dipukul mundur. Untuk mengenang bantuan Insana di Builaran dibangun rumah yang disebut *Akar Insana rohan*, *naek Insana rohan*. Sejak bantuan tersebut Insana dianggap mempunyai hak ikut terlibat dalam urusan dalam rumah Liurai.

Dengan analogi dengan wanita, Wehali (kampung Laran dan penguasa tertinggi kerajaan Wehali) dikategorikan sebagai wilayah panas, masak dan larangan. Wehali adalah menjadi superior di antara wilayah lain karena ia masuk kategori wanita, panas, pemali dan masak. Dalam kondisi demikian Wehali berkuasa. Ia sumber tiga kehidupan, tidak hanya pada pihak lain tetapi juga berlaku bagi dirinya. Keamanan tergantung pada lelaki di luar, yang dapat merubah masak makanan, masak minuman kedalam bahan mentah dan air mentah²⁶.

Laran sebagai pusat pemerintahan Wesei Wehali dengan pusatnya ada pada Ai Lotuk merupakan bangunan suci terdapan menghadap Alas Lulik/Ksadan. Terdapat 12 bangunan utama di Laran yang terletak pada 4 lokasi dalam kampung Laran yang disebut *leun* (Tom Therik, 1995)²⁷.

Leun masing-masing dikepalai fukun wanita dan fukun lelaki yakni:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1). Le'un Klot terdapat | : Uma Bei Nufa uma Ai As dan Uma Kwaik. |
| 2). Le'un TatinisOLON | : Uma Marii La, uma Tabutak, Uma Manekin. |
| 3). Le'un Akar Laran | : Tafatik Leko, Tafatik Mako'a Rai dan Uma Fore Asa |
| 4). Le'un Loro Manu | : Uma Insana dan Uma Ai Tou |

²⁵ Therik, Gerson Tom. 1995. Hal 89

²⁶ Tom Therik, Gerson 1995, hal. 86

²⁷ Tom Therik, Gerson, 1995, hal. 102

Tafatik Mako Rai merupakan tempat tinggal Maromak Oan dan rumah sebagai penyedia istri bagi Maromak Oan. Sedangkan Tafatik Leko sebagai rumah tempat kelahiran Maromak Oan. Sedangkan Ai Lotuk merupakan inti (pusat dari pusat). Sebelum kedatangan bangsa Eropa menurut penutur sejarah adat (makoan) kerajaan agung Wehali diperintah oleh dua lelaki. Liurai feto (seorang lelaki dalam ritual dianggap sebagai liurai wanita dan liurai mane (liurai laki-laki). Kedudukan liurai lelaki dipegang oleh suku rumah Tei Seran.

Menurut Tom Therik (1995)²⁸ wilayah di bawah hegemoni Wehali dibedakan atas 3 kelompok. Kelompok pertama adalah wilayah liurai wanita yang kemudian dikenal sebagai Maromak Oan yang dipercaya memerintah secara langsung. Di wilayah berbahasa Tetun sebelum pembagian pulau atas dua, kelompok wilayah dapat terdiri dari: Wehali, Wewiku, Haitimuk, Fatuaruin, Dirma, Lakekun, Suai, Kamanasa dan Fohoterin. Wilayah 4 terakhir ada di wilayah Timor Leste. Di samping kelompok tersebut terdapat dua kelompok lain dimana kekuasaan Maromak Oan dikenal. Kelompok kedua terdiri dari sebagian wilayah berbahasa Tetun yang umumnya berada di kabupaten Belu dan sebagian berada di Timor Leste. Kelompok ketiga terdiri dari beberapa wilayah yang merupakan kerajaan Sonbai termasuk Insana, Manulea, Haneno, Biboki yang secara politik erat dengan Maromak Oan dari pada dengan Sonbai. Sedangkan wilayah lain seperti Amabi, Amfoan, Amanantun, Amarasi lebih bebas.

Namun sumber lisan lain yang dikutip Francillon dalam Tom Therik (1995)²⁹ menyebutkan Ada dua orang tokoh bernama Bu Kiak dan saudara lelakinya Mau Kiak. Bu Kiak dikawini oleh seorang lelaki misterius dan dari perkawinannya melahirkan seorang wanita yang bernama Hoar Nai Daholek. Kemudian datang para pendatang dari Malaka (Rai Taek Malaka) yang datang beserta pengikutnya dari Malaka di Semenanjung Malaya. Mereka datang ke Wehali dari arah matahari terbit. Taek Rai Malaka kemudian mengawini Hoar Nai Daholek. Putra-putranya menjadi raja di Timor. Dua putra lelakinya memerintah di arah matahari terbit dan putra yang lain memerintah di arah matahari terbenam. Dua putra lelaki yang lain tetap tinggal dan menjadi pelindung saudara perempuan yang bungsu. Ketiganya tinggal di Wehali. Kerajaan Wesei Wehali diperintah oleh seorang raja yang bergelar *Maromak Oan*. *Maromak Oan* tidak langsung memerintah tetapi sebagai lambang/symbol kerohanian dan tidak boleh bekerja. Ia hanya tidur, makan dan minum. Sebagai pelaksana pemerintahan di bawah kekuasaan *Maromak Oan* terdapat 3 liurai yakni: *liurai* Wehali, *liurai* Likusaen dan *liurai* Sonbai. *Liurai* Likusaen menguasai wilayah Timor Timur (*Liurai loro sa'e*), sedangkan *liurai* Sonbai di sebelah Barat meliputi wilayah Miomaffo hingga Kupang ia tergolong *Liurai loro toba*.

Di atas pundak *liurai* Wehali terdapat 2 jabatan penting yakni: sebagai *liurai* Wehali

²⁸ Tom Therik, 1995.hal.99

²⁹ Tom Therik, 1995.hal.100

yang berkuasa atas seluruh wilayah Belu dan Biboki, Insana serta sebagian kerajaan di Timor Timur. Sebagai *liurai* Fatuaruin ia menguasai Fatuaruin, Manulea dan Bani-Bani yang merupakan pemasok utama logistik bagi *liurai*. Di bawah *liurai* terdapat para *loro* dan di bawah para *loro* terdapat para *nai*. Khusus di bawah *Liurai* Wehali di Belu Selatan terdapat 4 raja yang bergelar *loro* yakni: Wewiku, Wehali, Hatimuk, Lakekun dan Dirma yang merupakan *mone hat laen hat rin besi hat rin kmurak hat*. Di Belu Utara terdapat kerajaan Fialaran yang berstatus *loro*. Di lingkungan kerajaan Fialaran terdapat beberapa kerajaan /*nai* di Fialaran Barat terdiri dari Bauho, Klusin, Dafaala, Manuk Leten., Umak Laran dan Sorbau (keempat yang terakhir disebut *uma hat* (rumah yang empat) atau *rin besin hat* (keempat tiang besi yaki Bauho. Sedangkan Fialaran Timur terdiri dari Lasiolat, Asumanu, Tohe, Maumutin dan Aaiton Sering kali nama kerajaan menyatakan jumlah anaknya. Fialaran dasi sanulu (sepuluh dasi)³⁰.

Di samping mitos tentang Hoar Nai Haholek masih dijumpai mitos Dawan yang terkait dengan Belu Selatan Mitos menyebutkan pada waktu bumi mulai kering datang 10 kelompok bergelar *loro*. 4 tinggal di Wehali, 6 pergi keluar, *Loro* yang tertua pergi ke Likusaen Bauboe, satu pergi ke Biboki, satu pergi ke Insana, satu pergi ke Amanuban, satu pergi ke Amanantun, satu pergi ke Amarasi. Versi Wewiku ada 4 bersaudara pergi ke tanah matahari terbenam yakni: Natu Taek, Nuba Taek, Sana Taek dan Boki Taek. Ke empat saudara tersebut menjadi leluhur kerajaan Amanuban, Amanantun, Biboki, Insana. Dari perspektif Wewiku, Insana, Biboki, Amanuban dan Amanantun dipandang sebagai cerobong asap *liurai*, jalan setapak *liurai* (*knokar liurai, inuk Liurai*). Mereka adalah wilayah pengaruh *liurai* oleh karena itu wilayah tersebut membayar upeti kepada *liurai* dimana *liurai* hanya makan dan tidur. Dalam kaitan dengan Amarasi tidak dianggap sebagai wilayah pengaruh *Liurai*. Ia hanya dipandang sebagai tanda kebesaran yang masuk pada rumah *Liurai*. Itulah sebabnya dalam benda pusaka di Builaran terdapat pelana dari tenunan yang dibuat dari Amarasi. Amanantun dan Amanuban yang dibangun oleh Natu Taek dan Nuba Taek masih menyisakan persoalan. Penduduk yang tinggal di We Oe dan Alkani yang terletak di perbatasan Amanantun, dianggap wilayah kedua belah pihak bahkan pernah terjadi perang suku. Penduduk di Kampung Uma To'os Fatuk memiliki jimat pada Uma kakaluk yang disebut Seran Luan Fuik nama seorang pahlawan suku pada peperangan tersebut. Sedangkan tuturan adat di Uma Lor menyebutkan adanya hubungan perkawinan antara Amanuban dengan bangsawan Uma Lor di Wewiku. Sedangkan tokoh lain yang terkait dengan *Liurai* adalah Mollo. Mollo dan *Liurai* Sonbai dianggap sebagai saudara muda *Liurai* Wehali. Nai Laban pergi ke wilayah udik sungai Benanain yang kosong dan memberikan kabar baik kepada abangnya di Wehali yang tinggal di muara Benenain. Sonbai mengirimkan kabar melalui *tukek* (tabung bambu) yang diisi air dan di apungkan ke arah hilir sungai Benain. *Liurai* Wehali akhirnya mengetahui bahwa adiknya telah berhasil. Bambu itu ditanam di Laran³¹.

³⁰ Widiyatmika, M.dkk.2007, hal 63

³¹ Widiyatmika, M.dkk.2007 hal 43

Dalam klasifikasi simbolik hegemoni Wehali bagi wilayah-wilayah bawahan yang mempersembahkan upeti ke Maromak Oan yang tinggal di Laran, mereka memanfaatkan kampung Batane sebagai rumah persinggahan. Setiap raja tinggal semalam di rumah leluhur tersebut. Terdapat 3 rumah keluarga yakni: Uma Makaer Lulik (putri tertua), uma Bei Luruk (putri tengah) dan Uma Tudik (putri bungsu). Rumah pertama sebagai simbol rumah yang memberikan kelahiran pada Maromak Oan. Rumah kedua simbol rumah yang memberikan kelahiran pada Liurai dan rumah ketiga sebagai simbol memberikan kelahiran pada Liurai Sonbai, Liurai dari wilayah matahari terbenam dan Liurai Likusaen dari wilayah matahari terbit. Nama Uma tudik (rumah pisau) diberikan sebagai simbol tugas Liurai Sonbai dan Liurai Likusaen sebagai pekerja Maromak Oan yang harus menyediakan makanan dan upeti (*koto lamak, lamak harani*) untuk maromak oan (Tom Therik, 1995)³².

Dalam struktur politik kerajaan Wehali dalam konsep gender di Tetun Selatan, tanah wanita (*rai fetu*) yang dalam masyarakat dijelaskan sebagai matriarkhat oleh Francillon (1967) dalam Widiyatmika dkk 2007³³, diawali dengan prinsip wanita. Hal ini terkait dengan wanita pertama di bumi (*Ferik Ha'in Raiklaran*) yang memberikan kelahiran para raja Wehali. Nama wanita tersebut Hoar Na'i Haholek. Nai Hoar Haholek kemudian kawin dengan seorang lelaki pendatang dari Malaka dan melahirkan anak cucu dan para raja di Timor. Itulah sebabnya Nai Hoar Haholek memberikan kehidupan dan karena itu Wehali harus hadir di wilayah lain. Versi Wewiku namanya Hoar Diak Daholek atau Hoar Nahak Daholek.

Penekanan pada asal wanita juga dimanifestasikan dalam organisasi politik. Sebagai wilayah pusat, Maromak Oan adalah penguasa tertinggi. Walaupun Maromak Oan seorang lelaki ia dikonsepsikan sebagai wanita. Kategori wanita diindikasikan pula ia hanya makan, tidur dan bersifat pasif. Sebagai penguasa tertinggi ia tidak melaksanakan kekuasaan sendiri. Kekuasaan berada di tangan raja eksekutif yakni: Liurai Likusaen di wilayah matahari terbit, Wehali di wilayah pusat wilayah kerajaan (Wesei Wehali) dan Liurai Sonbai di wilayah matahari terbenam. Liurai dikonsepsikan sebagai raja lelaki yang aktif sebagai pintu gerbang dan pintu masuk ke Wehali di pusat kedudukan Maromak Oan.

Di wilayah Wesei Wehali liurai yang dikonsepsikan sebagai lelaki juga diidentifikasi kembali sebagai raja yang hanya makan dan minum. Dalam kategori wanita ia tidak langsung memerintah. Kekuasaan memerintah di delegasikan kepada pejabat lebih bawah yang masuk kategori lelaki dengan gelar loro (matahari). Terdapat 4 loro yang mewakili 4 wilayah yakni: Wewiku, Haitimuk, Lakekun dan Dirma. Ke empat wilayah loro mengelilingi dan menjaga wilayah ke lima yang dikenal sebagai 4 sudut tanah. Wilayah inilah Maromak oan tinggal. Wilayah ini

³² Tom Therik, 1995, hal 150

³³ Widiyatmika M. dkk 2007 hal 40

dianggap sebagai Wehali dalam dan 4 wilayah lainnya dianggap sebagai Wehali luar³⁴.

Dalam struktur politik kerajaan Wesei Wehali dalam kosmologi Tetun termasuk Liurai Likusaen yang mewakili wilayah matahari terbit dan Liurai Sonbai yang mewakili wilayah matahari terbenam. Wilayah 4 sudut tanah sebagai pusat tanah dibatasi sejumlah pilar. Pilar terluar adalah: liurai Likusaen, Liurai Wehali, Liurai Sonbai yang masing-masing mewakili bagian Timur, bagian pusat dan bagian barat pintu gerbang. Sejumlah pilar yang lain diwakili oleh: loro Wewiku, loro Wehali, loro Lakekun dan loro Dirma. Ke 4 loro ini mewakili empat sudut dari kebun. Dalam simbolisme kebun, Wehali dalam adalah diartikan sebagai pagar kebun. Akses masuk ke Wehali melalui jenjang naik pagar. Jenjang ini diwakili oleh kampung Sulit Anameta. Pilar ke tiga yang diterjemahkan sebagai pilar yang mewakili fukun fetu (wanita) : Kateri, Umakatahan, Kletek dan Fahiluka. Ke empat fukun simbol dari 4 sudut tiang rumah³⁵.

Di empat sudut tanah Maromak Oan dibantu oleh dua bangsawan. Satu dinamai Nai Umanen dan yang lain Nai Lawalu. Klasifikasi gender lelaki dan wanita juga berlaku bagi bangsawan tersebut. Nai Umanen yang dipilih dari anggota lelaki di dalam rumah di kampung Umanen dan Nai Lawalu juga dipilih dari rumah di kampung Biuduk Fehan. Maromak Oan, Umanen dan Lawalu di kelilingi oleh dewan 4 wanita tua dan empat lelaki tua (*Ferik hat, katuas hat*) yang dipilih dari 4 kampung yang membentuk wilayah 4 sudut tanah. Mereka bergelar *fukun ferik* (fukun wanita) dan *fukun katuas* (*fukun lelaki*). Klasifikasi luar dalam perbandingan antara organisasi politik Sonbai dan Liurai Wesei Wehali menurut Cuningham (1962) dalam Widiyatmika M.2007b³⁶ dikemukakan dalam diagram berikut:

Liurai		Sonbai	
Liurai Dalam	Liurai Luar	Sonbai Dalam	Sonbai Luar
Wewiku	Amanantun	Kono	Beun Uf
Haitimuk	Amanuban	Oematan	Kune Uf
Dirma	Insana	Babu	Afoan Uf
Lakekun	Biboki	Bifel	Lasi Uf

Klasifikasi superior dan inferior terkait dengan kategori dalam (*nanan*)/luar (*mone*) dalam kenyataan oleh Cuningham dikenali dari penjelasan pengelompokan Amfoan sebagai kelompok wilayah Sonbai Luar ke dalam Ambenu, Amfoan, Amarasi dan Amanuban. Raja dari ke empat wilayah tersebut tidak diklasifikasi sebagai Sonbai luar tetapi lebih pada di dunia luar Sonbai dalam artian mereka tidak membayar upeti kepada Sonbai. Dunia luar dan bagian luar diterjemahkan dalam istilah Dawan *mone*. Kategori dunia dalam dan bagian dalam sebagai superioritas dan dunia luar dan bagian luar dikategorikan sebagai inferioritas.

³⁴ Widiyatmika, M. dkk. 2007 hal. 45

³⁵ Tom Therik, 1995 hal. 75

³⁶ Widiyatmika M. 2007 hal. 59

Wehali juga diklasifikasikan sebagai ruang muat, pusat dan wilayah yang pertama kering. Schulte Nordholt (1971)³⁷ dalam menjelaskan klasifikasi Lingkaran Konsentris dalam sistem politik Dawan, superior berada di pusat sedangkan yang kurang superior berada di pinggiran pusat, sebaliknya lingkaran luar sebagai maskulin eksterior. Lingkaran sesudah lingkaran dekat pusat pemerintahan dalam hal Insana berada di tangan Atupas dan Us Bala. Lingkaran kekuasaan ini pada dasarnya tentang sistem politik dengan konsep *usan* (pusat) dan *eno-lalan* pintu gerbang-jalan setapak. Penggunaan bilangan sebagai model, setiap gerak dari pinggir ke pusat harus melalui gerbang dan jalan setapak. Penjelasan *eno-lalan* menurut Schulte Nordholt dan Cunningham dijelaskan terkait dengan bilangan yang dianggap sebagai membentuk lingkaran pusat kerajaan. Konsep gerbang dan jalan setapak di kalangan Tetun di Belu Selatan menunjukkan hubungan politik. Hubungan sosial dikaitkan dengan istilah jalan setapak, sedangkan hubungan politik menggunakan istilah gerbang/pintu dan batas.

Wehali menyatakan bahwa menjadi pusat seluruh masyarakat yang berasal dari jalan setapak tua dan jalan tua. Dalam kaitan dengan masa bumi masih digenangi air, tanah yang pertama kering hanya sepotong di bukit yang dikenal sebagai Marlilu Haholek. Tanah kering ini dalam bentuk pusat yang dikaitkan dengan seorang wanita bernama Hoar Nai Haholek. Dari cerita sejarah Wehali memperoleh status sebagai pusat tanah dan tali tanah dan tempat muatan tanah (*rai husar, rai binan rai hun*) sebagai pusat alam semesta. Pada waktu pertama kali bumi kering hanya sebesar mata ayam dan buah pinang (*rai manu matan, rai bua klanan*).

Menurut ideologi politik yang berlaku di kerajaan Wehali–Sonbai menurut Tom Therik (1995)³⁸ masyarakat politik diperintah oleh dua lelaki. Lelaki pertama yang dalam ritual dianggap/dikategorikan sebagai seorang wanita tua (*ferik*). Ia merupakan raja yang tertinggi dalam masyarakat. Yang kedua adalah seorang lelaki tua (*katuas*) yang menjadi pelaksana perintah dari wanita tua (*ferik*). Sebelum kedatangan orang Eropa menurut tuturan sejarah oleh *makoan*, raja tertinggi Wehali diperintah dua orang lelaki yakni *Liurai feto* (seorang lelaki yang dalam adat dipandang sebagai liurai wanita (*feto*) dan *Liurai mane* (Liurai lelaki). Kedudukan Liurai lelaki (*mane*) dipegang oleh uma/rumah dari Tei Seran. Dengan demikian adanya anggapan bahwa maromak Oan adalah wanita bukan dalam artian riil tetapi dalam kategori klasifikasi fetu.

Mane Sanulu turun dari Langit di Wehali

I. Putra Sulung ke Likusaen Baboen

³⁷ Schulte Nordholt, H.G. 1980. The Symbolic Classification of Atoni of Timor. Dalam Fox (ed) The Flow of Life Essays on Eastern Indonesia. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts and London, England, hal 240

³⁸ Tom Therik, 1995, hal.250

2. Satu putra pergi ke Biboki
3. Satu putra pergi ke Insana
4. Satu putra pergi ke Amanuban
5. Satu putra pergi ke Amarasi
6. Empat putra tinggal di Wewiku, Haitimuk dan Dirma dan Lakekun

Para dasi sanulu ini kemudian bergelar loro. Sedangkan struktur pemerintahan Wewiku terdiri dari 4 nai dan 4 dato yang disebut *leun hat dato hat*. 4 nai yang merupakan dato dalam (*dato laran*) adalah: Raja Kaberan Rai di Umalor, Raja Rabasa Hain di Lawain, raja Umaklaran di Lasaen dan raja Leunklot. Rabasa, Lawain, Leubalun/Leunklot. Sedangkan 4 dato: Tamiru, Kletek, Bulu As dan Mota. Ke empat dato ini juga disebut dato molin (raja luar)³⁹.

Raja Kaberan Rai (Penguasa Tanah Air) karena sejak dahulu raja pertama bernama Klau Naruk dalam mitos menyimpan tanah dan air yang diambil dari bumi ketika terbentuk pertama kali dan disebut Rai Resin-We Resin. Dia merupakan putra tertua pengambil kebijakan dan mengumpulkan orang untuk melakukan sesuatu. Raja Rabasa hain bertugas menjalankan ritual adat keagamaan. Dia yang menyediakan atau mempersiapkan siapa pengganti atau yang akan menduduki loro Wewiku di Umaklaran.-Lasaen. Dalam istilah adat tugas tersebut disebut: *Mawa'l birus oan no Kaka'e oan*. Raja Rabasa Nain merupakan putra tertua yang bernama Klau badak.

Sedangkan raja Umaklaran adalah putri bungsu yang dipertuan-agungkan. Namanya Hoar Nahak Makbalin. Raja Leunklot bernama Kalu fauk bertugas sebagai panglima.

Rabasa Nain meliputi:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Umatoos | 8. Alkani |
| 2. Loomota Lalawar | 9. Biuduk Foho |
| 3. Loomota Besin | 10. Fafuli |
| 4. Loo Foun | 11. Baki Taek |
| 5. Rabasa Namon | 12. Sam Taek |
| 6. Rabasa Makbalin | 13. Manlea |
| 7. Rabasa Baladik | 14. Bani-Bani |

³⁹ Widiyatmika M.2007 b hal 60

Lasaen Nain Terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Lasaen | 11. Nabutaek |
| 2. Fafoe | 12. Bauheni |
| 3. Bok | 13. Alala/Wakunsa |
| 4. Maktihan | 14. Nunfutu |
| 5. Mota Ulun | 15. Dadato |
| 6. Iku Nua | 16. Lootasi |
| 7. Weoe | 17. Betuan |
| 8. Hanemasin | 18. Kataforey Tulama |
| 9. Lakulo Weain | 19. Umakitot |
| 10. Kabukalang | 20. Brihalo ⁴⁰ |

Umalor Nain terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Umalor | 8. Lotas |
| 2. Umalin | 9. Na'usu |
| 3. Sikun | 10. Lawalu |
| 4. Sukabihaliti | 11. Hauhan |
| 5. Busabelo | 12. Sukabete |
| 6. Kalisuk Lor | 13. Umaklaran |
| 7. Naininu | 14. Uma Lawun |

Dari cerita rakyat tentang asal usul kerajaan di atas menarik untuk dianalisis tentang beberapa hal: 1). Tentang Sinan Mutin Malaka/Taek Malaka 2). periode kedatangan rombongan dari Malaka dan 3). Proses pengembangan kekuasaan..

Kata Malayu dan Malaka berasal dari bahasa Tamil di India Selatan, yakni malai yang berarti bukit. Orang-orang Hindu lazim memberikan nama daerah mereka yang bergunung-gunung seperti keadaan di India Selatan dengan istilah Melayu. Kata itu sudah digunakan sejak abad ke 7 Masehi untuk sebuah kerajaan Melayu yang terletak di Pantai Timur pulau Sumatra. Sedangkan kata Malaya baru berkembang sekitar abad ke 14 yakni perubahan dari nama Melayu sebagai nama kerajaan yang terletak di sebelah Selatan Selat Malaka menjadi nama Semenanjung di sebelah Utara

⁴⁰ Widiyatmika M.dkk.2007 ,hal 56-57

Selat Malaka (Slamet Mulyana, 1969)⁴¹. Sedangkan bandar Malaka didirikan oleh Hyang Purwawisesa pada akhir abad ke 15 setelah merebut pulau Singapura (M.Yamin, 1962)⁴². Melayu, Malaya dan Malaka melalui Selat Malaka. Oleh karena itu tempat tersebut banyak disinggahi para pedagang dan sangat dikenal oleh para pedagang baik pedagang yang berasal dari India, Cina maupun pedagang Indonesia dan negara lainnya.

Sampai abad ke 13 pelabuhan Malayu sebagai pelabuhan utama kerajaan Sriwijaya yang banyak dikunjungi kapal - kapal dagang dan para pedagang dari berbagai penjuru Asia. Bandar Malayu kemudian jatuh ketangan kerajaan Singasari setelah ekspedisi Pamalayu dari tahun 1275-1286. Sedangkan Malaka sebagai bandar banyak dikunjungi kapal dagang berkembang setelah pelabuhan Malayu mundur di masa Majapahit pada akhir abad ke 15. Oleh karena itu sebutan Malaka hanya populer setelah bandar Malaka berkembang setelah abad ke 15. Kata Malaka inilah yang dipakai oleh para pengungsi dari Malaka. Dari segi teori perpindahan secara makro terdapat faktor pendorong dan faktor penarik. Dalam kaitan dengan berkembangnya rombongan pengungsi keluar Malaka sebagai pendorong meninggalkan Malaka tentunya ada sebab penting. Di Semenanjung Malaka beberapa kali terjadi peristiwa penting antara lain:

- 1). Pada tahun 1030 raja Rajendra Chola Dewa dari kerajaan Chola Mandala di India Selatan, melakukan serangan ke Kadaram (Kedah), sebagai akibat persaingan dagang dengan kerajaan Sriwijaya. Namun pada waktu itu di Semenanjung belum menjadi tempat penting dalam perdagangan, sehingga serangan ini tidak akan menyebabkan pengungsian besar-besaran. Apalagi kemudian daerah ini kembali tenteram (Slamet Mulyono, 1969)⁴³
- 2). Kejadian yang sangat penting adalah setelah Malaka tumbuh dan berkembang sebagai kota bandar besar di Asia Tenggara. Malaka yang didirikan oleh Paramesywara yang kemudian dikenal sebagai Sultan Iskandar Syah, memerintah Malaka tahun 1396-1414. Bandar Malaka karena letaknya yang strategis tumbuh dan berkembang dengan pesat. Van Leur (1955)⁴⁴ mengungkapkan bandar Malaka banyak dihuni para pedagang dari Gujarat, Cina, Jawa dan pedagang lainnya. Dari Gujarat saja telah ada 1000 pedagang yang menetap dan sekitar 3000-4000 pedagang Gujarat yang tidak menetap. Jatuhnya Malaka pada tahun 1511 ketangan Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque menimbulkan perubahan besar. Raja Malaka sendiri Sultan Mahmud Syah mengungsi ke Johor. Kebijakan Portugis yang menerapkan monopoli dagang, dan bermusuhan dengan pedagang dari Asia, mengharuskan para pedagang Asia keluar dari Malaka.

⁴¹ Slamet Muljono, 1969..Sriwijaya. Ende Flores:Nusa Indah hal.121

⁴² Muhamat Yamin. 1962. Sejarah Tata Negara Majapahit. Prapanca, Jakarta hal.335

⁴³ Slamet Muljono, 1969 hal. 121

⁴⁴ Van Leur, 1955. Indonesian Trade and Society, Jakarta, Sumur Bandung hal.83

Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 menurut Gede Parimarttha (2002)⁴⁵ maka perdagangan di kepulauan nampaknya ingin dikontrol Portugis. Desakan Portugis dari Malaka membawa akibat bergesernya jalur perdagangan yang sebelumnya digunakan pedagang Jawa. Kini arus perdagangan pribumi mulai menuju ke tempat-tempat di pantai Barat Sumatra dan bagian barat pulau Jawa, Aceh dan Batam. Sementara itu pedagang Malayu yang merasa terdesak di Malaka ada yang pindah mencari tempat baru di Makasar yang dijadikan tempat untuk berhubungan ke daerah rempah-rempah di Maluku dan Cendana di Timor. Namun banyak pedagang mencari tempat alternatif lain ke sebelah Timur yang sudah dikenalnya termasuk ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur yang banyak dikunjungi pedagang dalam rangka mencari cendana dan lilin. Di tempat baru mereka mengidentifikasi diri sebagai *Sinan Mutin Malaka*, *Sina Malaka*, *Sina Jawa* atau *Malaka Tana Bara*.

Oleh karena itu peristiwa kedatangan rombongan pengungsi dari *Sinan Mutin Malaka* terjadi sekitar tahun 1511. Pendapat Vroklage yang dikutip Parera (1971) dalam Widiyatmika, 2007b⁴⁶ juga mengaitkan kejatuhan Malaka ketangan Portugis tahun 1511 merupakan penyebab pengungsian *Sinan Malaka* ke Belu Selatan. Walaupun Parera keberatan tahun 1511 terlalu pendek untuk suatu kerajaan Wesei Wehali bisa berkuasa menjadi kerajaan besar di pulau Timor hanya dalam jangka 11 tahun. Sebenarnya keberatan Parera kurang tepat mengingat, seandainya *Sinan Mutin Malaka* bermigrasi jauh sebelum tahun 1511 maka kata yang digunakan pasti bukan Malaka tetapi Malayu karena kata Malaka baru berkembang setelah abad ke 15. Keberatan dikaitkan dengan berita Pigafetta bahwa pada tahun 1522 ketika rombongan kapal Victoria merapat di Batu Gede menyebutkan adanya 4 kerajaan bersaudara di pulau Timor bernama: Oibich, Lichsana, Suai dan Cabanaza. Dari 4 kerajaan tersebut Oibich yang terbesar. Oibich diidentifikasi sebagai Wewiku di Belu Selatan, Lichsana sebagai Insana di wilayah Timor Tengah Utara yang memiliki pelabuhan penting bernama Mena (Schulte Nordholt, 1971)⁴⁷. Berita tersebut tidak menyinggung tentang pada tahun 1522 di antara kerajaan tersebut telah menjadi kerajaan terbesar yang menguasai seluruh pulau Timor. Tetapi memang benar bahwa kerajaan Wesei Wehali diketahui kemudian menjadi kerajaan terbesar di Timor dan menguasai hampir sebagian besar pulau Timor. Peristiwa ini pasti terjadi sesudah tahun 1522.

3). Perkembangan Kerajaan Wesei Wehali

Bagaimana proses perkembangan kekuasaan migran dari Malaka yang menetap di Belu Selatan dan mengalahkan penduduk lokal yang lebih dulu ada serta mengembangkan kekuasaannya di hampir seluruh wilayah di pulau Timor. Perkembangan kekuasaan

⁴⁵ Parimarttha, I Gede. 2002. Perdagangan dan Politik Di Nusa Tenggara tahun 1815-1915 Penerbit Jambatan Jakarta hal. 89

⁴⁶ Widiyatmika M. 2007 b hal. 43

⁴⁷ Schulte Nordholt, H.G. 1971 hal. 160

Wesei Wehali yang pesat didukung letaknya yang strategis di dataran Besikama yang subur dan bisa menjadi gudang bahan makanan yang melimpah. Di Belu Selatan mengalir sungai Benain yang muaranya menjadi salah satu bandar terpenting perdagangan cendana dan lilin karena: pelabuhan ini relatif terlindung dari gelombang dan angin, serta berada di muara sungai paling besar di Timor yang seluruh anak-anak sungainya di hulu /daerah perbukitan merupakan daerah penghasil cendana dan lilin. Cendana dan lilin adalah sumber kemakmuran utama bagi kerajaan. Oleh karena itu strategi menunjang monopoli perdagangan cendana adalah mengirimkan prajurit dan para bangsawan menjelajah wilayah perbukitan anak sungai Benain untuk pengamanan dan penguasaan perdagangan cendana dan lilin. Strategi tersebut ditunjang dengan pendekatan perkawinan dengan putri-putri tokoh lokal yang menghasilkan keturunan campuran yang tidak saja mendukung kelancaran penguasaan perdagangan cendana dan lilin, juga secara politis dan sosial menjadi kuat karena didukung penguasa-penguasa lokal yang masih keturunan campuran dengan Belu Selatan.

Mengenai strategi penguasaan wilayah orang Tetun dari Belu Selatan ke anak-anak sungai Benain di perbukitan di wilayah Timor Barat diungkapkan Ataupah⁴⁸ dalam disertasinya tahun 1992 antara lain disebutkan sebagai berikut:

Kegiatan perdagangan cendana dan lilin di kuala sungai Benain yang mendorong perkembangan kekuasaan suku bangsa Tetun sehingga mendominasi suku bangsa Dawan atau Meto disebabkan oleh kombinasi banyak faktor. Dengan memperhatikan *setting* geografik dan sejarah lisan yang dapat ditemukan, faktor-faktor penyebab perdagangan dan perkembangan kekuasaan politik itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Karena pelbagai daerah pertumbuhan alamiah cendana terpencair di pelbagai perbukitan dekat pantai Selatan, perahu atau kapal yang menyusur Pantai Selatan dapat melakukan kegiatan perdagangan sebelum maupun sesudah mencapai kuala sungai Benain, ketika laut Timor tidak menggelora pada musim penghujan. Perahu dan kapal layar mudah dan aman berlabuh di kuala sungai Benain yang dalam airnya lagi terlindung dari bahaya dari sungai maupun laut.
- b. Cendana dari daerah sungai Babulu yang dihuni orang Tetun dan Bunak, maupun dari daerah hulu sungai Tuamotu dan daerah hulu sungai Benain yang dihuni suku bangsa Meto dapat diangkut melalui dasar sungai-sungai yang pada musim kemarau, karena debit air sungai-sungai itu sedikit atau bahkan mengering disana sini. Duri pelepah gebang di tepi sungai serta duri dan onak pelbagai jenis tumbuhan sabana menyulitkan pengangkutan tanpa melalui dasar sungai yang kering.
- c. Walaupun daerah hulu ke tiga sungai tersebut sama-sama menghasilkan

⁴⁸ Ataupah, H. 1992 hal. 143-147
Lihat Widiyatmika, M. 2007b hal 41-47

cendana dan lilin, daerah hulu sungai Benain lebih penting dari pada daerah hulu kedua sungai yang lainnya. Luas DAS Benain kurang lebih 5.300 km², sedangkan luas DAS kedua sungai lainnya masing-masing 400 km².

- d. Banyak pria Tetun berhasil memudiki sungai Benain yang lebar untuk mencari cendana dan lilin. Di antara mereka ada yang kawin mawin dengan wanita Meto lalu menurunkan banyak amaf dan usif Meto yang turut berperan menanamkan pengaruh suku bangsa Tetun di daerah hulu sungai itu. Usif terkemuka berdarah campuran Tetun, Meto dan mungkin juga berdarah Cina, adalah leluhur cikal bakal usif-usif Sonbai yang secara umum dikenal dengan nama Laban karena nama aslinya dikeramatkan. Menurut penuturan sejarah lisan, Laban tidak berasal dari pusat kekuasaan Wesei Wehali tetapi berasal dari daerah perbukitan di sebelah Utara Wehali yang sampai sekarang dihuni bersama orang Tetun dan orang Meto. Laban dan keturunannya yang mengeksploitasi dan berdagang cendana bermukim di bukit batu Maelam dekat Noemuti yang dibangun kemudian oleh orang Kaes Metan. Usif-usif lainnya yang juga berdarah campuran Tetun dan Meto adalah: Usif-usif Sonbai dan sekaligus bersekutu dan atau mengsubordinasikan diri dengan usif-usif adalah: Kono/Takaeb, Oematan, Atok, Bana, Lake, Senak, Mella, Manbait, Boko, Ukat, Olin, Taolin, Benusu, Hitu, Sijao, Tefnay, dan sejumlah besar amaf Meto.

Melalui hubungan kawin mawin dengan usif Sonbai, maka usif Kune dan Pitay dikategorikan juga sebagai sekutu usif-usif Sonbai. Di bawah dominasi usif-usif Sonbai, semua usif yang disebut di atas itulah pengaruh sosial budaya suku Tetun yang cukup besar berlangsung pada golongan suku bangsa Meto di perbukitan dan pegunungan Miomafo- Mutis-Mollo- Fatuleu sampai teluk Kupang. Dominasi kekuasaan politik dan pemerintahan suku bangsa Tetun atas suku bangsa Meto sudah lama berakhir, tetapi pengaruh sosial budaya masih tetap ada. Sistem perkawinan patrilineal Meto yang dipengaruhi sistem perkawinan matrilineal Tetun masih sangat menonjol sampai sekarang dalam penyelesaian perkawinan orang Meto di daerah pengaruh yang pernah intensif dipengaruhi suku bangsa Tetun.

- e. Menurut penuturan sejarah lisan, para leluhur cikal bakal usif-usif Amabi, Amanuban, Amanatun dan Amarasi pun berdarah campuran Tetun dan Meto, dan berasal dari wilayah yang sama dengan wilayah asal Laban. Usif-usif tersebut terakhir berkuasa di perbukitan dan pegunungan Selatan (jika jalan raya Kupang MotaAin melalui depresi tengah sampai ke sekitar kota Kefamnanu dijadikan garis pemisah antara bagian Utara dan bagian Selatan Timor Barat). Leluhur cikal bakal usif-usif Amabi, Sonbai, Amarasi dan Amanuban dianggap seketurunan namun bersaing, bahkan berperang gara-gara persaingan dalam perdagangan cendana dan lilin, sebelum usif Amabi dan Amarasi tersingkir

dari daerah hulu Benain pada permulaan masa intervensi kekuasaan Eropa (Middelkoop, 1952 dalam Ataupah H.1992)⁴⁹. Sebelum tersingkir ke arah barat, usif-usif Amabi dan Amarasi bermukim di daerah hulu sungai Benain sehingga memungkinkan mereka mengirimkan barang dagangan mereka ke kuala sungai Benain maupun ke arah Pantai Utara di Lifao. Karena itu pengaruh Tetun pada mereka cukup intensif.

- f. Usif-usif Amanuban dan Amanatun yang sampai dengan pertengahan abad ke 18 masih merupakan satu kesatuan usif yang berinteraksi secara ramah tidak terlalu intensif dipengaruhi pusat kekuasaan Tetun. Keadaan ini karena sungai Tuamotu yang lebih sempit dari sungai Benain, mudah dipertahankan orang Meto sehingga tidak bisa leluasa dimudiki orang Tetun. Pada tikungan sungai Tuamotu yang sempit maupun puncak-puncak bukit karang yang strategis, orang Meto membangun benteng-benteng batu untuk menghadang kemajuan orang Tetun dari dataran Besikama. Karena bertetangga langsung maka perdagangan yang berpusat di kuala sungai Benain serta hubungan kawin mawin mungkin terjadi. Tetapi dominasi politik suku bangsa Tetun di wilayah Amanatun dan Amanuban tidak bisa berlangsung intensif. Perdagangan darat berlangsung namun jika timbul pertikaian sehingga cendana tidak dapat diangkut ke kuala sungai Benain, orang Meto di perbukitan Amanatun dan Amanuban Timur dapat mengalihkan penjualan cendana mereka ke pantai yang menjadi wilayah kekuasaan mereka. Orang Meto di perbukitan Amanuban Tengah dapat mengangkut barang dagangan mereka melalui dasar anak-anak sungai Benain menuju kuala sungai Benain, atau melalui dasar sungai Noetuke ke Pantai Selatan. Keberhasilan orang Amanuban Tengah mempertahankan wilayah kekuasaannya dan kebebasan berdagang yang dikendalikan pemimpin-pemimpin mereka yang bermukim di bukit Banam menyebabkan orang Amanuban sampai sekarang dinamakan Banamas (orang Banam) oleh golongan orang Meto sampai sekarang.
- g. Orang Meto lainnya di perbukitan Kusa Manlea, Bani-bani dan Insana sukar melepaskan diri dari pengaruh intensif suku bangsa Tetun. Walaupun demikian mereka tetap berupaya mempertahankan kemandirian dan jati diri sosial mereka melalui pertahanan dengan sistem benteng batu di tepi-tepi sungai dan di puncak-puncak bukit. Hubungan kawin mawin dengan *Maromak Oan* memungkinkan perdagangan cendana maupun lilin, sehingga lambat laun suasana permusuhan berkembang menjadi persahabatan dan koeksistensi secara damai.

Dongeng tentang pasangnyanya air laut ke puncak-puncak bukit yang menyebabkan seorang pemuda Tetun dan seorang pemuda Meto saling membantu untuk

⁴⁹ Ataupah H.1992 hal. 147-148

menyelamatkan diri namun kemudian sama-sama berubah menjadi batu monumen perdamaian banyak ditemukan di daerah-daerah perbukitan itu. Dongeng dalam berbagai versi tersebut mencerminkan pengaruh Tetun yang dikategorikan sebagai orang asing terhadap orang Meto yang menganggap diri sebagai penduduk asli perbukitan itu. Perkawinan di antara pria Meto yang menganut sistem patrilineal dengan wanita Tetun yang menganut sistem matrilineal biasanya diselesaikan melalui *faen* (penebangan pokok pohon) yakni pembayaran mahar dalam bentuk uang perak dan emas dan ternak yang banyak jumlahnya supaya isteri bersama semua keturunannya menjadi warga kerabat suami. Sebaliknya ayah mempelai wanita yang memiliki kekuasaan tradisional biasanya memberikan suatu wilayah yang dinamakan *susu laku* (susu dan ubi) atau uki susu (pisang dan susu) di perbatasan agar mempelai wanita dan keturunannya secara simbolik dianggap masih meminum susu ternak dan memakan makanan di wilayah kekuasaan ayah mempelai itu. Dengan demikian walaupun secara fisik mempelai wanita diboyong suaminya ke daerahnya, mempelai itu dan keturunannya dianggap tidak pernah meninggalkan wilayah kekuasaan ayah mempelai itu.

Susulaku di daerah perbatasan Insana dengan Wesei Wehali merupakan wilayah damai, sebagai kawula *usif* Insana tidak akan diganggu atau diserang oleh orang Tetun karena warga yang bermukim di atas tanah *Susulaku* yang dihadiahkan Liurai Wesei Wehali kepada putrinya yang kawin dengan usif Insana dahulu kala. Wilayah *Susulaku* di bagian sungai Benain yang relatif sempit berfungsi sebagai suatu koridor yang memudahkan banyak orang Tetun memudiki sungai itu untuk mencari cendana dan lilin, lalu diangkut sebagai barang dagangan ke hilir sungai. Kekuasaan dan kekayaan yang berasal dari upeti dan perdagangan menyebabkan penguasa Tetun di hilir sungai itu dikiaskan sebagai pohon beringin besar lagi rindang. Pohon beringin itu kehilangan kerindangannya karena usif Insana tidak menghalangi pasukan gabungan Portugis Makasar dari Sulawesi menghancurkan pusat kekuasaan Tetun pada pertengahan abad ke 17. Dominasi politik dan pemerintahan Tetun atas suku bangsa Meto berakhir oleh hancurnya pusat kekuasaan itu. Namun pengaruh kebudayaan Tetun masih cukup besar di daerah hulu sungai Benain sampai masa kini.

Cerita tentang ekspedisi militer dari Wehali dalam rangka penaklukan daerah-daerah wilayah Barat dilaporkan oleh Middelkoop dalam Schulte Nordholt (1971)⁵⁰ dan penaklukan ke wilayah Timur dilaporkan oleh Oliviera. Wilayah taklukan Wehali adalah: Suai Kamanasa, Dirma, Lakekun, Fohoterin, Biboki, Insana, Vohoren, Fatumea, Atsabe, Kasa Bauk, Lamean, Diruate (Diribite), Marobo, Leten Teloe, Boibon, Balibo, Malebaca.

⁵⁰ Schulte Nordholt, H.G. 1971 hal.235

Perdagangan cendana sebagai sumber kemakmuran, di luar Kupang, kedudukan raja adalah penting artinya dalam perdagangan selain kepala-kepala dari penduduk. Disebutkan bahwa perdagangan pertama-tama berlangsung dengan raja, fetor, temukung dan baru kemudian dengan penduduk. Dengan kata lain para pedagang yang datang pertama-tama harus berhubungan dengan raja/kepala. Hal ini jelas menunjukkan adanya pengaruh dari struktur kekuasaan di dalamnya yang memberikan kesempatan kepada orang yang punya kedudukan lebih tinggi menikmati hasil lebih dahulu. Tentunya dalam perdagangan para raja dibantu para bawahan mereka (Groeneveldt)⁵¹ Hal ini memberikan gambaran sebagai berikut: apabila pedagang datang di pantai, atau di pelabuhan melakukan perdagangan, ia diminta memberikan sesuatu (semacam hadiah) yang disebut sirih pinang kepada raja atau kepala setempat 45. Selanjutnya masih harus melakukan perundingan dengan kepala itu untuk memberikan sejumlah iuran atau pajak pelabuhan yang harus dibayarkan kepada raja. Dengan memperhatikan hal seperti itu adalah menjadi biasa untuk pertama kali memberikan sesuatu kepada raja sebelum warganya diijinkan menjual hasilnya di pantai. Raja memiliki hak istimewa atas bahan-bahan tertentu yang bersifat ekonomi, terutama kayu cendana. Biasanya setiap lingkungan kampung (*fukun*) memiliki tempat yang ditumbuhi cendana. Apabila ingin menebangnya, akan dilakukan oleh temukung bersama-sama dengan anggotanya. Setelah direncanakan hal itu wajib disampaikan kepada raja, karena untuk itu raja harus memperoleh sedikitnya 5-10% dari hasil tebangan (Widiyatmika M.2007a)⁵².

4). Kemerosotan kerajaan Wesei Wehali

Kerajaan Wesei Wehali mencapai puncak kejayaannya sekitar awal abad ke 17 karena menguasai daerah hulu dan hilir perdagangan cendana di Timor. Kerajaan ini kemudian mengalami kemerosotan akibat serangan Portugis tahun 1642. Serangan ini menyebabkan beberapa wilayah membebaskan diri dan sejak itu dominasi politik di Timor berada di tangan Kase Metan yang berpusat di Lifao dan Noemuti. Bere Tallo (1968)⁵³ mengungkapkan bahwa kemerosotan kerajaan Wesei Wehali disebabkan karena: 1). Terjadinya perang antara Likusaen dan *liurai* Wehali dimana *liurai* Wehali Suri Liurai dibunuh dan kepalanya dipancung. 2). Peperangan antara kerajaan Tahakae melawan Fialaran dan Lamaknen yang tidak diselesaikan oleh Liurai sekitar tahun 1850. 3). Peperangan antara Fialaran dengan Lamaknen sekitar tahun 1852. 4). Pemberontakan *Loro Wewiku* terhadap Liurai sehingga *Liurai* mengungsi ke Fatuaruin di Builaran hingga sekarang. Dengan kenyataan tersebut *liurai* menjadi tidak berwibawa lagi. Sebenarnya pendapat Bere Tallo sekedar tambahan yang semakin memperlemah kedudukan Wesei Wehali. Tetapi sebab utamanya adalah kekalahan dalam perang melawan Fransisco Fernandes tahun 1642 karena sejak kekalahan tersebut Wesei

⁵¹ Groeneveldt, W.P. 1960. Notes on Malay Archipelago and Malacca., compiled from Chinese Sources , Bratara, Jakarta Hal 117.

⁵² Widiyatmika M.2007 a hal. 25.

⁵³ Bere Tallo, 1968 hal.3

Wehali berada di dalam pengaruh kekuasaan Portugis, kehilangan kewibawaannya dan sebagian besar daerah-daerah kerajaan di Timor Barat satu persatu melepaskan diri. Kerajaan Wesei Wehali tidak lagi berdaulat penuh di seluruh pulau Timor seperti sebelumnya. Kaisar Wehali harus memeluk agama katolik, walaupun secara *de jure* menjadi wilayah kekuasaan Portugis tetapi baru tahun 1859 diserahkan kepada kekuasaan Belanda. Sebelum penyerbuan Portugis tahun 1642 ke Wehali Liurai Sonbai sebagai Liurai di bagian Matahari Terbenan (Liurai Loro Toba) telah lebih dahulu dikalahkan Portugis. Dengan demikian salah satu pilar kekuatan Wesei Wehali dipatahkan. Pasca penaklukan Wesei Wehali tahun 1642 terjadi kekacauan politik dan perpindahan kependudukan secara besar-besaran di wilayah Timor Barat karena kekejaman Portugis di pedalaman pulau Timor sehingga banyak *usif, amaf* dan pengikutnya mengungsi ke sekitar Kupang, di antaranya Amabi, Sonbai Kecil, Oematan. Ratu Mena di Pantai Utara Timor karena melawan Portugis dibunuh oleh Fransisco Carneiro pada tahun 1642. Schulte Nordholt (1971)⁵⁴ mengemukakan penyerbuan tersebut juga menjadi titik balik sejarah Timor sejumlah besar raja telah memeluk agama katolik dan kekalahan tersebut dipandang bahwa *leu musu Maromak Oan* dari Wehali kalah dengan *leu* perangnya Portugis. Kekuatan politik di Timor kemudian jatuh dan dibawah kekuasaan penguasa baru yakni Portugis Hitam atau *Topasses* dibawah dominasi keluarga da Ornay dan da Costa dengan pusat kedudukan di Lifao kemudian pindah ke Noemuti.

d. Kerajaan-kerajaan di perbatasan Belu Terkait dengan Wesei Wehali

1). Kerajaan Fialaran.

Kerajaan Fialaran dalam syair adat dikenal sebagai kerajaan Fehalaran. Asal usul dari kerajaan Fehalaran menurut (Panitia Seminar Adat Fehalaran, 2003)⁵⁵ sebagai berikut: Pada suatu saat terdapat 4 anak leluhur Manuaman Lakan yang mendiami Manuaman Lakan (Gunung Lakan) yaitu: Atok Lakan, Taek Lakan, Balok Loa Lorok dan Elok Loa Lorok. Mereka masing-masing mengawini atau karas Mutu-Belan Rai Libur. Atok Lakan mengawini saudaranya Elok Loa Lorok lalu pergi ke Gunung Nanaet (Nanaet-Dubesi, Faturenes-Kalinak), bergelar Mauk Loro Leten Manek Laliwen. Mereka melahirkan 5 orang anak yakni masing-masing: 1). Deu Mauk 2). Timu Mauk 3). Lida Mauk 4). Dilu Mauk 5). Seorang wanita, yang tidak diketahui namanya dan pergi ke Silawan (Tulakadi-Maninu, Beilaka-Kaitara, Alas Metan Selaoan). Deu Mauk menetap dan berkuasa di Mandeu (Mandeu Raimanus, Talioan-Kufeu). Timu Mauk menetap dan berkuasa di Naitimu, Lida Mauk menetap dan berkuasa di Lidak. Dilu Mauk menetap dan berkuasa di Dualilu (Kenebi Dualilu, Kabuna-Leasame).

⁵⁴ Schulte Nordholt, 1971, hal 164,

Lihat Tom Therik 1995 serangan ke Wehali tahun 1642 hal.62..

Lihat Ataupah, H. 1992 hal 156

⁵⁵ Laporan Seminar Adat Fehalaran, 2003, Atambua, Belu hal.12-17

Keempat putra Atok Lakan tersebut masing-masing berkuasa atas wilayahnya masing-masing yang disebut: *Oa Natar hat-Laluan hat*. Mereka ini akrab dan mengakui leluhur asalnya dari Manuaman Lakan sebagai orang tua dan pemimpinnya, yang bisa melindungi dan membina mereka yang dalam bahasa adat disebut: *Basa Isin hat-kaer kadun hat*. Kemudian diberi kekuasaan sepenuhnya atau otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri namun tetap dalam wilayah kesatuan Manu Aman Lakan atau Fehalaran. Dengan otonomi tersebut maka ke empat wilayah itu disapa dengan *tapa ulu hat-sabeo hat* yang berarti penutup kepala empat, bertopi empat yang lazim disebut *Futu Lesu-Tau faru*. Dengan kedudukan status dan wewenang demikian itu, maka ke empat wilayah itu diberi julukan umum: *Oa natar hat-Laluan hat. Basa isin hat-kaer kadun hat Taka ulu hat-Sabeo hat*.

Taek Lakan mengawini saudarinya yang bernama Balok Loa Lorok dan melahirkan: 1). Bau Lorok (Loro Mauk), 2). Daba Lorok 3). Laka Lorok 4). Aluk Lorok. Ia bersama ke empat anaknya tetap tinggal di manuaman lakan dan perkawinan antara bersaudara tetap berlangsung. Bau Lorok mengawini Saudarinya Daba Lorok dan laka Lorok mengawini saudarinya Aluk Lorok yang tidak diketahui kemana perginya dan bagaimana keturunannya. Sedangkan anak Bau Lorok sebanyak 15 orang, dan 3 di antaranya menetap di Gunung Lakan (Manu Aman Lakan). Mereka masing-masing adalah: Tati Bauk, Bere Bauk dan Lulun Bauk alias Lulun Samara. Sedangkan ke 12 anak lainnya pergi ke tempat lain dan menetap di sana. Kemudian Teti Bauk- Bere Bauk meninggalkan Manuaman Lakan, karena suatu tragedi perebutan kekuasaan yang disebut: *Koin Kiri Aman-Lamak Foho Kiik* dan *Tae Tur-We Onu*. Perselisihan antara Teti Bauk-Bere Bauk di satu pihak dengan Teti Mauk-Bere Mauk di pihak lain, akhirnya Teti Bauk dan Bere Bauk hijrah ke gunung Lubar Lau- Lame Lau dan selanjutnya Teti Bauk tinggal di Likusaen. Sedangkan Bere Bauk tinggal di Wehali. Teti Mauk dan Bere Mauk berfungsi sebagai Mangkubumi kerajaan Fehalaran yang sangat berjasa dalam membuka sayap kekuasaan Fehalaran hingga ke Diruati-Mau Ubin dan Bobiknuan-Maubara dan sebagainya. Teti Mauk menetap di Fehalaran (Natarmeli Bauho) sedangkan Bere Mauk mengambil istri dari Talos-Fatumoko dan menetap di Fulur dengan mendirikan suku Hak Por. Olehnya hubungan antara Lamaknen dan Fehalaran adalah hubungan *Umatali-Uma hae*. *Uma tali* adalah Lamaknen dan *Uma Hae* adalah Fehalaran yaitu hubungan kaka adik (persaudaraan).

Perkawinan antara Lulun Samara (Fehalaran) dengan Dasi Abu Bau Nahak (Wehali)

Semula Teti Mauk dan Bere Mauk mencari isteri Lulun Samara di Diruat-Mau Ubin, Bobiknuan-Maubara. Namun saat itu ketiadaan wanita di sana, sehingga harus dicari wanita di wilayah lain yang sederajat dengan Manuaman Lakan Nain. Di Wesei Wehali tersedia wanita, tetapi belisnya (*feto folin*) dituntut tengkorak manusia. Dalam artian Wesei Wehali sangat membutuhkan anak mantu yang ksatria dan meo

karena pada saat itu sedang berkecamuk perang antara Wehali dengan Likusaen. Saat itu belum ada meo di Manuaman Lakan sehingga harus ada kontak dan negosiasi dengan Loro Mane Hitu yang berdiam di bukit Fatautour-Maubanis (wilayah desa Tohe sekarang) yang sebelumnya sudah ada kontak sewaktu perjalanan menaklukkan Duarati dan Maubara di suatu tempat bernama Loka Lidun-Tau Mutin. Loro Mane Hitu memiliki tengkorak manusia yang dipenggal dalam peperangan di Nubadak (Batugede), yang dibawa dalam perjalanan menuju Fatutour-Maubanis. Setelah negosiasi maka diadakan ikatan sumpah setia *Moruk metan* antara kedua belah pihak (*Loro mane hitu* dengan Fehalaran nain). Ke empat tengkorak milik *Loro mane hitu* akhirnya dibawa ke Natarmeli Bauho selanjutnya dibawa ke Wesei Wehalisebagai belis seorang putri Wehali yang bernama Abu Bau Nahak dan dibawa ke Natarmeli Bauho.

Van Wouden (1983)⁵⁶, mengungkapkan asal usul kerajaan Fialaran sebagai berikut:

Dahulu kala pulau Timor tertutup air laut dan di Belu hanya gunung Lakaan yang menjulang di atas air. Pada masa itu di Lakaan terdapat keluarga raja Bauho. Seorang wanita pertama yang datang dari puncak Lakaan sedangkan yang lelaki yang pertama datang dari negeri jauh. Dalam generasi berikut dua kakak beradik yang menikah dan memperoleh dua orang putra dan dua orang putri. Seorang anak lelaki bernama *Atok Lakaan* pergi dengan saudara perempuannya *Elok Loa Loro* naik kapal ke puncak Nanait di Naitimu. Di sana mereka menjadi moyang raja-raja Naitimu. *Atok* kemudian bernama *Mauk Loro Leten* masuk Laliwen.

Saudara lelaki bernama *Taek Lakaan* dan saudara perempuannya *Balok Loa Loro* tinggal di Lakaan dan beranak 10 orang lelaki dan 3 orang wanita. Anak lelaki yang bungsu dalam berbagai peristiwa menunjukkan keunggulannya, maka oleh saudara-saudaranya ia diakui sebagai raja negeri itu. Dalam perjalanan ke daerah-daerah baru ia tahu maksud yang tepat dari hal-hal yang baru dilihat orang untuk pertama kalinya. Namun abang-abangnya menjadi malu kembali ke Lakaan. Lima orang pergi ke Barat dan empat pergi ke Timur menjadi nenek moyang raja-raja di kawasan itu. Yang bungsu kemudian bermukim di lereng Gunung Lakaan di Mainita. Dia bernama *Dasi Mauk Bauk* dan menikah dengan anak gadis *Maromak Oan* bernama *Dasi Lihu Aton*. Gadis itu dibelinya dari bapaknya dengan beberapa hasil pengayauan. Karena perkawinan itu ia diberi gelar *loro* (matahari).

Dia beranak dua orang lelaki dan dua orang wanita. Lelaki yang sulung tetap tinggal di Mainita dan menikah dengan gadis *loro* dari Lakekun (di pantai Selatan), adiknya yang laki-laki menjadi kepala di Klusin di bawah supremasi abangnya. Saudara-saudara perempuannya menikah dengan kepala daerah Naitimu dan Asumanu. Raja di Mainita beroleh anak laki-laki yang kelak menggantikannya dan tinggal di tempat yang lebih rendah di lereng gunung yaitu Bauho. Raja itu punya tiga orang

⁵⁶ Van Wouden, 1983, 41-43.

Lihat Grijzen, H.J. 1934. Mededeelingen omtrent Beloe of Midden Timor; V>B>G>54 hal 26-36

anak perempuan yang kemudian menikah dengan kepala daerah Lasiolat, Naitimu dan Lidak. Raja Bauho tidak dapat memperoleh istri dari keluarga raja Wehali atau Lakekun kecuali membayar emas kawin/belis yang mahal. Karena itu ia menikah dengan anak raja Balibo dan memperoleh 6 anak lelaki dan 3 anak wanita. Putra yang sulung menggantikan menjadi raja, sedangkan yang lain menjadi raja di Lasaka, Dafala, Manuk Leten, Umaklaran dan Sorbau. Semua berada di bawah supremasi abangnya. Dalam perjalanan salah seorang raja Bauho menjelajah daerahnya sampai di Asumanu. Kepala daerah di situ terkejut melihat raja Bauho sampai terkeceing-kencing. Setelah itu ia mengikuti kemana saja raja pergi. Dalam perjalanan raja Bauho memperlihatkan perhiasan kerajaan yang keramat kepada raja Asumanu sehingga raja Asumanu terkejut setengah mati. Setelah tenang ia melarikan diri tetapi belum jauh lari ia menginjak tikus dan tikus tersebut mati. Oleh karena itu ia mengurungkan niatnya dan mengakui raja Bauho sebagai atasannya. Kejadian ini juga dialami raja Lasiolat. Ia terkejut melihat raja Bauho apalagi setelah raja Bauho memperlihatkan perhiasan kerajaan. Ia menangis terharu dan kemudian tunduk kepada raja Bauho. Tiga kawasan lainnya Tohe, Manumutin dan Aiton yang berada di bawah kekuasaan raja Bauho baik karena keturunan maupun karena perkawinan. Kawasan itu bersama-sama membentuk kerajaan Fialaran yang terdiri dari 12 bagian di bawah pemerintahan tertinggi raja Bauho, urutan kedudukan sesuai dengan penting tidaknya tempat mereka di dalam mitos (van Wouden, 1985)⁵⁷.

Raja Bauho menginginkan dipanggil *Astanara* (memandang tinggi). Kedudukannya terlalu tinggi untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan, maka hal itu diserahkan kepada raja Klusin yang setelah raja Bauho termasuk cabang tertua dari keluarga yang memerintah Fialaran. Dialah yang memerintah dan berbuat sesuatu untuk raja. Hanya dengan perantaraannya orang dapat berhubungan dengan raja utama. Keputusan dan nasehat *Astanara* hanya diminta dalam hal-hal yang sangat penting. Bauho dan Klusin dipandang bapak dan ibu keluarga yang beranggotakan 10 kawasan lainnya. Di antara mereka Lasiolat yang terpenting berkat perkawinan rajanya dengan anak gadis *Astanara* dengan klen yang dekat dengan Klusin. Dan juga berkat besar jumlah penduduknya sehingga memiliki kekuatan lebih dari pada anak yang lain. Itulah sebabnya raja Lasiolat diserahi tugas urusan ketentaraan Fialaran dan dengan demikian ia menjadi tangan kiri raja.

Semua raja memiliki perhiasan kerajaan yang mengandung kekuatan adikodrati (keramat) tanpa perhiasan itu kerajaan tidak ada artinya. Sebagian perhiasan itu diperoleh dari raja utama, sebagian merupakan warisan leluhur. Lasaka sebagai bagian kerajaan tidak ada lagi karena kelalimannya salah seorang rajanya dibunuh oleh raja utama dan wilayahnya digabungkan dengan Bauho. Fialaran dapat dibedakan dua

⁵⁷ Van Wouden, 1985, hal 97-101.
Lihat Grijsen, H.J. 1904, hal 129

bagian: Fialaran Barat yang terdiri dari Bauho, Klusin, Dafala, Manuk Leten, Umaklaran, dan Sorbau (ke empat yang terakhir disebut *uma hat* (ke empat rumah) atau *rin besi hat* (ke empat tiang besi (yaitu Bauho), dan Fialaran Timur yang terdiri dari Lasiolat, Asumanu, Tohe, Maumutin dan Aiton. Seringkali nama sebutan kerajaan menyatakan jumlah anaknya: Fialaran *dasi sanulu* (ke sepuluh dasi), Maukatar *kaluni nen* (ke enam tempat tidur), *Lamaknen* (berarti ke 6 piring makan dari kayu), *Lamak senulu* (10 piring makan dari kayu). Grijzen, (1904)⁵⁸ menyebutkan Lakekun terdiri dari dua bagian yakni Lakekun ae (rumpun) dan Lakekun alas (hutan). Dirma mempunyai delapan anak seorang bertindak sebagai tangan kiri dan tiga raja kecil.

Selanjutnya van Wouden (1985)⁵⁹, mengemukakan lebih lanjut tentang kerajaan Fialaran. Kerajaan Fialaran menurut tradisi terbagi dalam 12 kawasan: ayah, ibu dan sepuluh anaknya, dasi sanulu. Dalam kenyataan hanya ada 11 kawasan. Tidak dapat dikatakan dengan pasti apakah kawasan ke dua belas Lasaka pernah ada. Namun dapat dikemukakan bahwa di wilayah ini ada kecenderungan jumlah kawasan selalu genap. Kawasan kerajaan Fialaran terbagi dalam dua kelompok: fialaran Timur dan Fialaran barat. Dari peran leluhurnya pembagian ini bersumber dari suatu dualisme fratri kuno. Leluhur Fialaran Barat: bauho, Klusin, Dafala, Manuk Leten., Umaklaran dan Sorbau adalah leineage patrilineal mistis yang sama. Sedangkan leluhur bagi parohan yang lain: Lassiolat, Asumanu, Tohe, Maumutin dan Aiton dengan cara lain bergabung dengan kerajaan ini. Asumanu dan Lassiolat oleh perkawinannya dengan anak gadis dari lineage Bauho, dan Tohe oleh perkawinan rajanya dengan wanita dari Lassiolat menjadi terkait dengan Bauho. Yang kedua yang lain bergabung atas kemauan sendiri. Parohan Bauho merupakan keturunan dari Lakaan, pemimpin-pemimpin Lassiolat dan Asumanu tampil dari sebuah lubang tanah. Kedua parohan tersebut dengan langit dan bumi, suatu pembedaan yang khas bagi dualisme fratri. Fratri langit dipandang lebih tinggi dari fratri bumi.

Ke sepuluh anak lelaki dan 3 anak wanita melambangkan negeri Fialaran yang terbagi menjadi 12 belas yang ke tiga belas ditambahkan sebagai lambang kesatuannya. Dalam konsep mitos purba perkawinan antara seorang wanita yang datang dari Lakaan dan lelaki yang berasal dari negeri asing di seberang laut merupakan manusia pertama. Tautan wanita dengan bumi tempat ia berasal dengan penyamaan dari negeri asing, dari seberang laut dengan langit selalu dijumpai. Selanjutnya van Wouden mengungkapkan Fialaran yang terdiri dari dua parohan, enam kawasan termasuk parohan Bauho, lima kawasan termasuk parohan Lassiolat. Kawasan ke 12 Lasaka digabungkan dengan pada Bauho setelah raja kawasan itu dibunuh astanara karena raja itu kejam.

Kapankah sebenarnya kerajaan Fehalaran berdiri. Berdasarkan sastra lisan dari

⁵⁸ Grijzen, H.J. 1904, Mededeelingen Omtrent Beloe of Midden Timor. S Hage: M. Nijhoff hal 129
Lihat Sejarah Gereja Katolik di Timor, Jilid 1. Terbitan Seminari Lalian, hal.24

⁵⁹ Van Wouden, F.A.E. 1985, hal 101-102

para makoan tidak diketahui kapan kerajaan ini berdiri. Namun berdasarkan raja yang memerintah yang diketahui pasti tahun pemerintahannya berdasarkan silsilah Hegerdhal adalah generasi ke 12 yakni: Ato Mauk yang memerintah tahun 1838-1903. Berarti sebelum raja ini terdapat 11 generasi sebelumnya. Apabila rerata generasi 30 tahun maka awal kerajaan Fehalaran sekitar tahun 1528. Tahun ini akan hampir sama dengan kedatangan para leluhur yang menyatakan diri dari Sinan Mutin Malaka.

Struktur pemerintahan di Fehalaran menurut Pius M. Mura dalam Seminar Adat Fehalaran 2003⁶⁰, adalah sebagai berikut:

Sebagai pucuk pemerintahan tertinggi Fehalaran naain bertindak sebagai pelindung, penghayom seluruh komunitas adat yang ada. Namun karena statusnya sebagai Doun Oan, maha toba mahemu toba, Batar tahan Lahare-hare tahan lahare maka dibuatlah satu struktur pemerintahan adat bertingkat dimana loro Fehalaran dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh dua pembantu utama yang menurut status dan fungsinya bisa mengayomi seleuruh komunitas adat yang ada.

Dua pembantu utama itu adalah:

- a. Ina ama Halimodok-Takirin yang bertugas mengendalikan menangani urusan pemerintahan adat, peradilan adat, kesejahteraan masyarakat dan kebudayaan. Dalam pembagian tugas dan kewenangan Ina Ama Halimodok Takirin mengkoordinasikan seluruh wilayah *Rinbesi Hat-Rik Murak Hat* yaitu:
 - 1). Lasaka Beitenis.
 - 2). Fatubaa-dafala, Ninae-Wetotan.
 - 3). Fatubesi-Manleten, Sarabete-Aina.
 - 4). Fahinuan-Nuandato, Kolosumi-Bui batak.

Selain mengkoordinir *Rinbesi hat*, Ina Ama Halimodok Takirin secara langsung mengkoordinir *Oa Natar Hat-Oa Laluan Hat, Basa Isin Hat-Kaer Kadun Hat, Taka Ulu Hat-Sabeo Hat*, yaitu Mandeu-Raimanus, Manuaman-Tukuneno, Nanaet-Dubesi, Fatures-Kainak, Kenbi-Dualilu, Kabuna-Leo Sama.

- b. Ina Ama Dualasi Lasiolat.

Menangani tugas yang istimewa yaitu menjaga keutuhan seluruh wilayah Fehalaran dari berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam. Ina Ama Dualasi-Lasiolat sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya membawahi atau mengkoordinir : *Kabu isin hat-kabu fuan hat, Bunuk metan hat-kakeu dudun hat, Asu iku tula hat-Manu lain dadak hat* yaitu: Fatu Tour-Maubanis.

⁶⁰ Pius Mai Mura, Makalah Sejarah dan Struktur Adat Fehalaran, dalam Seminar Adat Fehalaran 2003, hal 2-8
Lihat Seran Herman Josep, 2009. Ema Tetun Kelangsungan dan Perubahan Dalam Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Suatu Masyarakat Tradisional di Pedalaman P.Timor, Indonesia Bagian Timur. Penerbit Gita Kasih hal 75-89

Liku Bauk-Leo Walu, Asu Manu-Duamanu, Nin Luli-Lokomea, Siarai-Maumutin, Raifatus-Manulain, Aitoun-Duamone, Siburaka-Kaisahe.

Selain dua pembantu utama yang berupa Ina Ama, untuk mengkoordinasikan wilayah-wilayah yang disebut *Talik Sanulu-Dain Sanulu* ditunjuk Silawan sebagai duta besar berkuasa penuh untuk wilayah-wilayah tersebut yang berada di luar *Dasi Sanulu dan Oa natar Hat*. Versi Yos Fernandez (2003)⁶¹ mengemukakan sebagai berikut: Astanara sebagai penyelenggara pemerintahan adat tertinggi, kepala adat pembagi tanah/pembagi wilayah tertinggi. Astanara dibantu oleh dua loro Ina Ama yaitu Loro Ina Ama Halimodok Takirin dan Loro Ina Ama Dualasi-Lasiolat. Selain itu Astanara memegang kekuasaan untuk mengadili, selanjutnya kekuasaan ini dilimpahkan kepada dua loro Ina Ama di atas. Ke dua loro Ina Ama juga diberi tugas memelihara hubungan/komunikasi adat dari tingkat atas ke tingkat menengah sampai tingkat masyarakat bawah serta memelihara hubungan ke dalam dan ke luar wilayah, memelihara keamanan wilayah hukum adatnya. Di antara kedua loro Ina Ama tersebut terdapat perbedaan fungsi yaitu: Loro Ina Ama Halimodok Takirin berfungsi sebagai raja bicara (mangkubumi) dan Loro Ina Ama Dualasi Lasiolat berfungsi sebagai panglima perang/keamanan.

Astanara tidak aktif memerintah hanya makan, minum dan tidur saja (*do-u oan koak oan, maha toba mahemu toba*). Namun dalam kenyataannya Astanara tidak hanya tidur, minum dan makan saja, bersikap masa bodoh atas jalannya pemerintahan. Sebaliknya Astanara tetap mengikuti perkembangan pemerintahan dan memberikan arah dan nasehat kepada dua loro Ina Ama baik diminta maupun tidak.

Astanara dibantu dua loro Ina Ama Halimodok Takirin dan Loro Dualasi Lasiolat.

Loro Ina Ama Halimodok Takirin dibantu 4 kepala persekutuan adat wilayah yang dinamakan *Nai Rinbesi* meliputi wilayah-wilayah hukum adat di bagian dataran rendah yakni: 1). Lasaka dengan gelar *adatnya Lasaka Beitenis*, *Halidait Tatehur*, 2). Dafala dengan gelar *adatnya Fatubaa Dafala, Loubaun Kakohan*. 3). Manleten dengan gelar *adatnya Fatubesi Manleten, Sarabete Aina*. 4). Umaklaran dengan gelar *adatnya Fahiknuan Knua Dato, Kolosuni Buibatak*.

Loro Ina Ama Dualasi Lasiolat dibantu 4 Kepala Persekutuan Adat wilayah yang dinamakan: *Nai Klabor Laen* meliputi: 1). Asumanu dengan gelar *adatnya Asumanu Duamone, Ninluli Lokomea*. 2). Tohe dengan gelar *adatnya Fatutour Maubanis, Likubauk Leowalu*. 3). Maumutin dengan gelar *adatnya Siarai maumutin, Raifatus Manulain*. 4). Aitoun dengan gelar *adatnya Aitoun Duamone, Saburaka Kaisahe*.

⁶¹ Yos Fernandez (2003), Makalah Pemerintahan Adat Fehalarn di Masa Lalu dan Pemerintahan Masa Kini, dalam Seminar Adat Fehalarn Atambua, Belu hal. 1-3

Selain itu masih terdapat 4 Kepala persekutuan adat wilayah yang dinamakan: *Oa natar hat* (putra rumpun empat) meliputi wilayah adat dataran dan pantai terdiri dari: 1). Mandeu dengan gelar adatnya *Mandeu Raimanus, Talioan Kufeu*. 2). Naitimu dengan gelar adatnya: *Nanaet Dubesi, Faturenes Kalinak*. 3). Lidak dengan adatnya: *Manuaman Tukuneno, Foholoro Lakekun*. 4). Jenilu dengan gelar adatnya: *Kenebibi Dualilu, kabuna Leosama*.

Ke empat wilayah persekutuan adat ini diberi status agak istimewa karena langsung di bawah Astanara. Namun dalam praktek pemerintahan mereka melalui Ina Ama Halimodok Takirin. Masih ada satu wilayah persekutuan adat Malun loro yaitu Silawan dengan gelar adatnya: *Alasmetan Silawan, Tulakadi maninu*. Keseluruhan wilayah-wilayah adat tersebut dinamakan dengan istilah: *Dasi Senulu, Aluik Sanulu, Nain Sanulu, Hulun Sanulu* (Sepuluh bangsawan, sepuluh datuk, sepuluh yang dipertuan, sepuluh pemimpin) atau disingkat *Fehalaran Dasi Senulu*. (Dataran bangsawan sepuluh atau Fehalaran Tasifeto/dataran laut wanita. Setiap Kepala Persekutuan adat wilayah dibantu oleh dato (temukung). Dato dibantu oleh ketua suku/klen sampai kepada rakyat biasa semua terjalin erat melembaga, membudaya dengan bersendikan 4 dasar ikatan persaudaraan dan 10 macam ikatan adat berdasarkan sejarah dan faktor genealogis.

2). Kerajaan Lidak

Berdasarkan cerita rakyat Lidak, terdapat seorang tokoh yang berasal dari Wesei Wehali di Belu Selatan bernama Dasi Halek. Tokoh ini datang dari Wesei Wehali pada waktu sampai di Lidak telah ada penduduk asli dan penguasa/tuan tanah yang dipegang oleh Neno Bot. Dasi Halek tidak diterima dengan tangan terbuka, tetapi harus mengadu kekuatan dengan Neno Bot dengan cara adu batu (mempunyai makna simbolis). Penduduk asli mempunyai ketrampilan melempar batu sebagai senjata utama. Dengan melemparkan batu ke arah sasaran dengan tepat bisa mematikan lawan. Pendetang dari Wesei Wehali memiliki senjata kelewang yang merupakan pusaka yang dibawa dari Malaka. Mereka juga memiliki kesaktian setelah melakukan upacara *hasae ai kakaluk*. Terjadilah pertempuran antara penduduk asli dengan pendatang dari Wewiku Wehali dan dimenangkan pendatang dari Wewiku Wehali yang dipimpin *Dasi Halek*. Karena kalah dalam pertempuran, penduduk asli yang merupakan orang Melus terdesak ke arah Barat. Versi lain disebutkan oleh Maxi Mura (1991 dalam Widiyatmika dkk 2007)⁶² pendiri kerajaan Lidak adalah *Lidak Mauk* yang merupakan salah seorang putra dari *Taek Lakan* dengan *Balok Loa Lorok* yang meninggalkan negeri orang tuanya ke arah Barat. Van Wouden (1985)⁶³, mengemukakan bahwa di kerajaan Lidak dalam organisasi kerajaan Lidak, terdapat fukun Lima karena di samping raja utama terdapat lima datu fukun yang memerintah.

⁶² Widiyatmika dkk.2007 hal. 70

⁶³ Van Wouden, F.A.E. 1985, hal 94

Laporan Seminar Adat Fehalaran (2003)⁶⁴ menyebutkan bahwa nenek moyang Lidak datang dari Sinan Mutin Malaka melalui Larantuka Baboe, Bebau (We Bau), Asufuik-Maubesi, Wehali terus ke Lidak. Versi lain mengatakan pendatang ini mendarat di Pantai Utara Timor (Dili-Parasa). Dari Parasa mereka membawa air dan ketika mendarat mereka mericiki tempat itu dengan air. Mereka mengetahui sewaktu mendarat sudah ada orang Melus di Silawan. Kemudian menyusul datang beberapa suku yang datang dan berkuasa di Belu. Mereka datang dari Malaka. Dari 7 pasang, tiga pasang berlayar ke Timor melalui Larantuka Baboe. Satunya tinggal di Fatumea., kedua tinggal di Leowalu dan yang ke tiga tinggal di Motaain bernama Dasi Bada Rai.

3). Kerajaan Lamaknen

Asal usul kerajaan Lamaknen diungkapkan dalam syair *Bei Gua* yang dikumpulkan A.A.Bere Tallo (1968).⁶⁵ Dalam syair *Bei Gua* dikemukakan sebagai berikut: 8 kelompok nenek moyang yakni: Lutarato Jopata, Ro Ikun Ro Bulan, Tonbaq Tonwai, Lakuloq Samoro, Oburo Marobo, Sibiri Kailau, Siataq Mauhaleq dan Lakan Oan Roman Oan. 8 leluhur tersebut turun dari kayangan yang disebut *Esen hitu As hitu* mereka turun di *Jigil hitu mua hitu* (Siawa Mugiwa). Mereka di Siawa Mugiwa bekerja kebun, kawin mawin dan beberapa putranya meninggal dan dikuburkan disana. Kemudian mereka dari Siawa Mugiwa pergi ke Pan Lubu Muk Lubu, Luburato Salower, Rai Lubu Rai Loha. Di tempat tersebut pada waktu itu sudah berpenghuni bernama: Berek Rai Lubu, Mauk Rai Loha Olok Rai Lubu, Sorik Rai Loha. Di tempat baru mereka berkenalan dengan penduduk lokal dan tinggal bersama. Mereka menangkap ikan. Pada waktu di sana leluhur tersebut melihat *biduk ro* bernama *Ikun Makerek Ulun Makerek, Karas Makerek, Belan Makerek*. Mereka menaiki *biduk ro* sampai di Naka Pilat, Lua Pilat, Mete Pilat dan Mo Pilat. Di tempat tersebut *biduk ro* kandas dan hancur karena kena terjangan angin badai *Tatu Luruq Maubesi*. Kemudian mereka mencari tahu sebab-sebab terjadinya kecelakaan. Kemudian diketahui bahwa kecelakaan tersebut karena ibu bapanya.

Mereka pergi ke Sinawa Batola dengan mengajak penduduk setempat yang bernama Kehi Badaen, Sina Badaen, Eru Badaen, Bere Badaen, Kehi Batola, Sina Batola untuk membuat *biduk ro* di Onu Rowa, Ponu Rowan, Onu Lulik, Ponu Lulik. Untuk membuat *biduk* mereka menggunakan kapak Manukelen Masaru. Setelah pekerjaan membuat *biduk* selesai, *biduk* ditambatkan di Meti Sikun Mo Alan. Di Lubu Mugirato, rombongan mengawinkan beberapa anggota di antaranya: Ili Mugirato Ili Malae kawin dengan Kukun Hitu Lawak Hitu, Oli Mugirato Olo Malae dikawinkan di Golelu Gowa. Rombongan kemudian meninggalkan Tanah Lubu dengan membawa harta pusaka menuju ke Onu Owan Ponu Owan, Onu Lulik Ponu Lulik dan di tempat ini *biduk ro* diberi nama sama dengan nama tempat baru tersebut. Kemudian dengan *biduk ro* rombongan

⁶⁴ Seminar Adat Fehalaran (2003 hal 25

⁶⁵ A.A.Bere Tallo 1968. Adat Istiadat dan Kebiasaan Suku Bangsa Bunaq di Lamaknen Jilid 2 Bei Gua. Kisah Penciptaan Alam serta perjalanan dan kegiatan Leluhur, (tidak diterbitkan) hal.454-460

melanjutkan perjalanan ke Fatun Teiq dan selanjutnya berlayar ke *Sinan Mutin Malaka* yang sudah berpunghuni yakni: Berek Malae, Mauk Malae, Olok Malae, Soik Malae, Tara Malae, Loro Malae, Mu Malae, Muna Malae, Sena Malae, Raga Malae, Tuha Malae, Tihu Malae. Di *Sinan Mutin Malaka* anggota rombongan melamar Olok Malae, Soik Malae. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan berlayar dan kemudian mendarat di Kabanasaq Kolobilaq. Dari Kabanasaq Kolobilaq selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke Kehikaiq Kau Kehiq. Di tempat ini anggota rombongan berpisah setelah membagi harta pusaknya yang dibawa dari tanah leluhur. Sebagian rombongan sampai di tempat bernama Lihuai Wetalas. Tempat tersebut sudah berpunghuni. Di tempat tersebut mereka ditantang pemimpin lokal untuk mengadu kesaktian dengan menerka isi bungkusan. Tetapi anggota rombongan tidak bisa menerka isi bungkusan. Sebagian rombongan sampai pula di Turultuq Siolwa. Di tempat ini anggota rombongan juga ditantang adu kesaktian dengan menebak isi bungkusan.

Rombongan leluhur kemudian berkumpul di Turul Tuk Siolwa kemudian di Loborqoloq Celeru untuk melakukan sumpah *Hulo lep* ke 1 (Sumpah Belu Mau Sabu Mau). Dari tempat ini rombongan melanjutkan perjalanan ke Sepalwaq Sepalwai. Sepalwaq Sepalwai merupakan tempat yang belum berpunghuni. Kemudian rombongan berpisah. Rombongan Lutarato Jopata menuju Majoqrapil Hakpor dan melakukan sumpah *hulo lep* ke 2. Sebagian rombongan dari Sepalwaq Sepalwai menuju ke Jobuqpor Ailaeq (Desa Kewar) terus ke Ruan Baraq Mamil dan melakukan sumpah *Hulo lep* ke 3 di Latene Purlolo. Rombongan melanjutkan perjalanan ke Ruan Baraq Mamil dan Gemoqbaq Maugiwai (Gewal). Di Gomaqbaq Maugiwai keturunan kelompok leluhur Lutarato Jopata telah berkembang beranak pinak memenuhi rumah suku dan anggotanya menganggap diri anak *hot hul*. Sedangkan di Siwe Oko Siwe Lolo keturunan Luta Rato Jopata, Ro Ikun Ro Bulan, Tonbaq Tonwai, Lakulaq Samoro, Oburo Marobo, Sibiri Kailau, Siataq Mauhaleq, Lakan Roman dengan cabang-cabangnya telah berkembang sangat banyak baik yang di Gomolbaq Maugiwai maupun yang di Siwe Oko Siwe Lolo. Mereka sangat liar berbuat sekehendak hati, tidak bisa dikendalikan dan saling ribut. Sumpah *hulo lep* yang pernah dilaksanakan 3 kali tidak dapat mengatasi keadaan.

Melihat kenyataan itu Dasi Luan Lesuq sangat prihatin lalu mengadakan perundingan. Diutuslah Bau Maliq ke *Majobbaraq Raibaraq* menghadap ibu bapak di rumah suku *Lauk Gatal Manugatal* memohon batuan diberikan orang pandai dan berani untuk mengatasi masalah yang sedang dialami para leluhur. Utusan diberikan bantuan 2 orang pandai bernama Tai Loeq dan Bere Loeq dengan syarat setelah selesai tugasnya harus kembali ke *Majobbaraq Raibaraq* ke *Deu Lauk Gatal Manugatal*. Kemudian ke 2 utusan tersebut mengundang semua suku di *Siwe Oko Siwe Lolo* menurut hubungan *hulo lep* agar hadir dalam waktu 7 hari 7 malam. Pada hari yang telah ditentukan hadir di Gomoqbaq Maugiwai seluruh pemimpin suku dari *Siwe Oko Siwe Lolo* yakni:

1. *Akaluliq Hakpor Gomo* (penguasa di Hulul).
2. *Lolowalu Leo Walu Gomo* (penguasa di Leowalu).
3. *Mebupor Puolilak Gomo* (penguasa di Lakmaras).
4. *Hollapit Iugewen Gomo* (penguasa di Henes).
5. *Hatukara Railubu Gomo* (penguasa di Nualain).
6. *Taebereq Hoeaq Gomo* (penguasa di Duarato).
7. *Mau Abis Rainaban Gomo* (penguasa di Abis).
8. *Mau Ekin Mau Somon Gomo* (penguasa di Ekin).
9. *Sasaq Bosoq Simugewen Gomo* (penguasa di Sasaq)

Masing-masing rombongan datang dengan bawahannya. Sedangkan yang tidak hadir dalam musyawarah adalah: *Loona Maukusa Gomo* (penguasa di Loonu na).

Dasarai Lamaknen Gomo dibantu oleh *Giri liti*, *gon besi*, *Hubil gamal*, para *Tala hol gomo* di wilayah masing-masing.

Gomolbaq Maugiwal adalah satu *Giri liiti*, *gon besi* dengan Keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah adalah:

1. *Tanah Siwe Oko*, *Siwe Lolo* terdiri dari satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
2. Nama kesatuan: *Dasarai Lamaknen* atau *Okololo Kauq siwe*.
3. *Deu Loegatal* secara *nolaq beqaq* disebut *Ohor a Babulu* dan menjadi *Watan Por Nelas Por*.
4. *Dasarai Lamaknen Gomo* (*Okololo Kaiq Siwe Gomo* atau *Ohoro Babulu Gomo*) adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang disebut:
 - a. *Ukon o Baru Gomo* (pembuat peraturan).
 - b. *Wese o Noq Gomo* (pelaksana peraturan).
 - c. *Tol o Tugal Gomo* (penyelesai terakhir).
 - d. *Poru Molok Gomo* (penguasa kepercayaan /hal yang keramat).
5. Ia tidak melaksanakan sendiri semuanya. Oleh karenanya ia diberi gelar sebagai: *Kumu gol, pok gol* (anak burung dara yang hanya menyisir rambut dan menggoyang susunan sebagai berikut:
 - a. *Deu Tes Gatal* adalah *Giri liti*, *Gon besi* dengan tanda bukti kedudukan: *si holat, si posa* (daging bagian paha dan tengkuk).
 - b. *Deu Bere Gatal* bertugas mengawasi kayu cendana dan lilin dengan pusaka *Kakeris Nuwen*.

- c. *Deu Sabulbul* bertugas mengawasi *Guloq, Gepal* (peternakan).
- d. *Deu Leagebu* tugasnya mengawasi *Soron Goniil* ke 4 kompleks tanah *matas momen*.
- e. *Deu Gela* dari kelompok *Lakuloq Samoro* mengawasi: *Koso Jobel* (tanaman, buah-buahan yang masih muda).
- f. *Deu SabulbulTon* dari kelompok *TonbaqTonwai* mengawasi pelaksanaan semua peraturan dan melaporkannya.

Selanjutnya dibentuk lagi 3 *Giri liti Gon besi* yakni:

- *Mebu Purlilak* dengan *deu Dato gubul* sebagai *Giri liti gon besi* dengan tanda kedudukan *si holat si gubul* (daging bagian paha dan kepala).
- *Hollapit iu Gewen* dengan *deu Hollapit* sebagai *Giri liti gon besi* dengan tanda bukti kedudukan: *si holat si gewal* (daging bagian paha dan limpa).
- *Hatukara Kailubu* dengan *deu Monesogo*, sebagai *Giri liti gon besi* dengan tanda kedudukan *si holat, si lusin* (daging bagian paha dan punggung).

Semua organisasi dari ke 3 *Giri liti gon besi* diserahkan kepada masing-masing *Giri liti*.

Dengan demikian lengkaplah ke 4 penongkat yang disebut:

- *Giri Liti Goniil, Gon Besi Goniil*
- *Pur Hegil Goniil, Ma Umon Goniil*.
- *Halimana Goniil, Kaikase Goniil*.

Ditetapkan kedua *Hobil Gamal* adalah:

- a. *Hulul Baq Hululwai* dengan *deu Akaluliq Hakpor* sebagai *Hobil Gamal*.
- b. *Lolowalu Leowalu* dengan *deu Mautepa Mauluta* sebagai *Hobil Gamal*.

Sebagai bukti kedudukan keduanya diberikan *sikole* (kaki bagian depan).

Dibentuk 7 *Tala hol* yang dikepalai *Tala hol gomo* atau *Hol gomo* dengan tanda bukti kedudukan *sikole* (daging kaki bagian depan).

Ke 7 *Tala Hol* selain *Hulul dan Leowalu* diatas adalah:

- a. *Taebereq Holsaq* dengan *deu Purbelis* sebagai *Hol gomo*.
- b. *Maku Abis Rainaban* dengan *deu Purbalis lon* sebagai *Hol gomo*.
- c. *Mau Ekin Mau Sem On* dengan *deu Mone Gonicat* sebagai *Hol gomo*.
- d. *Loona Maukasa* dengan *deu Maugom On* sebagai *Hol gomo*.
- e. *Sasaq Bosoq Simu Gewen* dengan *deu Motugatal* sebagai *Hol gomo*.

Sebagai peristiwa sejarah kapan perpindahan 8 rombongan leluhur dari *Siawa Mugiwa*, melalui *Sinan Malaka* akhirnya mendarat di *Kabanasaq Kolobilaq*. Mengingat

peristiwa perpindahan tersebut tidak menyebutkan angka tahun, maka kata-kata kunci digunakan sebagai penentu yakni kata Sinan Malaka. Seperti telah diuraikan dibagian Sinan Mutin malaka, kata Malaka yang berasal dari bahasa Tamil malai (gunung) yang kemudian berubah menjadi malayu, malaya dan malaka. Kata malaka sebagai nama tempat/bandar didirikan oleh Parameswara yang kemudian dikenal sebagai Sultan Iskandar Syah yang memerintah tahun 1396-1414,⁶⁶ Namun kemudian Malaka berkembang sebagai bandar besar di Asia Tenggara yang banyak dihuni para pedagang Asia dan Melayu jatuh ketangan Portugis tahun 1511. Pasca kejatuhan bandar Malaka menimbulkan pengungsian besar-besaran para pedagang Asia akibat politik monopoli dagang. Para pedagang inilah yang mengidentifikasi diri sebagai orang Malaka yang dalam tuturan diberbagai tempat disebut Sinan Mutin Malaka, Sinan Malaka, Malaka Tana Bara, Sinan Malaka.

Berbeda dengan tuturan dalam Bei Gua tentang Nualain. Menurut tuturan dari Nualain terbentuknya kerajaan Nualain bermula sebagai pemisahan dari kerajaan Tahakae yang dipimpin oleh Maubeleq dari suku Monewalu. Pendirian pemerintahan dilakukan melalui *Pagutilaq* (membagi dan memisahkan dengan prinsip tertentu). Setelah melakukan upacara pendinginan tanah dilanjutkan pemilihan pemimpin. Hasil *Pagutilaq* ditetapkan jabatan nai /raja diberikan kepada Maubeleq. Jabatan fetor pada Talohaleq, jabatan dato diserahkan pada Hasubereq dari Sepaldaq Sepalwai atas jasanya sebagai panglima perang (*Bei Kaa Lal Ama*) memimpin perebutan kampung Nualain di tangan kerajaan Tahakae. Jabatan kabu atau kepala kampung diserahkan dua orang yakni: Lakuahq sebagai pendiri suku Leorawan Mual dan Baumaliq pendiri suku Leowes. Tugas raja diistilahkan: *kumu gol, pok gol, a sier mel, diri kawé, pur hegil, ma umon, halimama, kaisahe* (sebagai burung dara yang tidur: bangun, makan sambil goyang kaki, serta sebagai ohon beringin yang rimbun dan pohon *kaisahe* atau rumpun bambu yang kokoh yang memberikan naungan). Nai dibantu fetor sebagai wakil raja dengan istilah: *kes alias gomo, nigi o bokal gomo taes o motak gomo* (pengukur dan pemahat, penghalus dan pengkasar penyaring dan pengalas).

Dari silsilah nai di Nualain diketahui raja pertama adalah Bei Nai Maubeleq, raja kedua Bei Nai Leki Beleq diberi gelar Bein (raja besar oleh Wesei Wehali). Dalam silsilah raja ke lima yang wafat dalam perang melawan Portugis di Lakmaras tahun 1911 bernama Bei Nai Malirin (Widiyatmika, M.dkk 2007b⁶⁷). Sebelum raja ke lima ada 4 raja berarti ada 4 generasi. Dengan rata-rata generasi 30 tahun, maka dapat diperkirakan secara kasar raja pertama Bei Nai Maubeleq mendirikan kerajaan Nualain sekitar tahun 1791. Apabila data tersebut dicek silang dengan data lain adalah: Dalam perjanjian Paravicini tahun 1756 raja besar Belu Hiacijnto Correa menanda tangani perjanjian atas nama 29 wilayah bawahan. Ternyata dalam daftar dari 29 kerajaan bawahan tidak dijumpai nama Nualain. Tetapi nama Lamaknen ada

⁶⁶ Widiyatmika M.2007 hal.41

⁶⁷ Widiyatmika M.dkk.2007, Sejarah Pemerintahan Tradisional Belu, UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, NTT hal. 105

dalam daftar. Laporan misionaris tahun 1879 dalam Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid I ⁶⁸, nama Nualain berada diantara 10 wilayah kerajaan Lamaknen.

Sewaktu orang Leowalu menduduki kampung Nualain yang menjadi kerajaan yang baru didirikan, maka orang Melus dan kerajaan tahakae yang menetap di Abis semuanya meninggalkan kampung Abis dan mengungsi ke Sisi. Mereka takut diserang oleh Taebereq Holsaq (Duarato) karena seorang rakyatnya diketahui mencuri seekor kambing kepunyaan orang Duarato. Kampung Abis telah menjadi kosong tanpa penghuni. Maka sebagian orang Duarato berpindah menetap di sana sehingga kampung Abis ditetapkan menjadi bagian dari kampung Duarato. Setelah kampung Abis diduduki, maka kampung Henespael Holsesok dan Mebupor Purlilik dipindahkan ke Henes dan Lakmaaras.

Kampung Nualain sudah aman dan tentram karena selama beberapa tahun diduduki, orang Tahakae tidak pernah datang mengganggu. Mengetahui hal itu maka rakyat Lamaknen mulai berdatangan di sekitar kampung Nualain untuk bertani dan beternak. Dari Gewal datang menetap di Ekin sehingga saat itu Ekin menjadi bagian dari Gewal. Dari Abis mulai menetap pula di Loonuna sehingga Loonuna menjadi bagian dari Abis. Mereka bertani dan beternak di wilayah yang aman. Maka rakyat Ekin berkebun dan beternak hingga kali Malisose. Rakyat Loonuna bertani dan beternak hingga Nokarwek. Lewat wilayah tersebut digunakan oleh rakyat Tahakae. Dengan demikian kedua belah pihak menggunakan wilayah tersebut untuk bertani dan beternak. Maka batas Lamaknen dengan Tahakae berpindah ke Kali Siataq, Kalisose, Norkawek, turun ke Kali Maliwen terus turun ke kali Tafara hingga sekarang.

Pagutilaq II.

Pagutilaq ke II dibentuk setelah Dasi Leki Beleq dilantik menjadi Loro oleh Wesei Wehali dan diakuinya *Bein Gonion* kepada kerajaan Nualain sebagai *Bein Goniil* (empat raja besar) di Lamkanen yang disepakati lewat *mot metan*, yang dihadiri *Bein Gonion* (Gewal, Lakmaras dan Henes) serta tiga *Talahol* (tiga kerajaan kecil yaitu: Hulul, Kiragawa Lariki /Leowalu sekarang dan sasaq yang kini dalam wilayah Timor Leste di Lologewen Mauruan).

Sekembali dari Lologewen Mauruan, Dasi Leki mengumpulkan rakyatnya untuk menyusun program kerja antara lain: penyempurnaan struktur organisasi pemerintahan yang telah dibentuk oleh ayahnya Dasi Maubeleq pada Pagutilaq I. Penyempurnaan struktur pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Jabatan raja

Jabatan raja tetap pada suku Monesogo dan karena itu Dasi Leki dilantik sebagai raja. Maka jabatan raja yang sebelumnya berada di tangan dasi Maubeleq, diserahkan

⁶⁸ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid I, hal.69

terimakan kepada Dasi Leki. Tugas raja diketahui dari julukan yakni:

Kumu gol, Pok gol, A sier mel, diri kawe, pur hegil, ma umon, halimama, kaisahe yang artinya: Sebagai anak burung dara yang tidur, bangun, makan sambil goyang kaki, serta sebagai pohon beringin yang rimbun dan pohon kaisahe atau rumpun bambu yang kokoh yang memberikan naungan. Julukan tersebut dapat digambarkan bahwa tugas seorang raja hanya menunggu laporan dan pertanggung jawaban dari bawahannya serta memberikan dukungan dan perlindungan terhadap bawahan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan kerajaan baik kedalam maupun ke luar.

b. Jabatan fetor

Jabatan feteor atau wakil raja yang sebelumnya dijabat oleh Talohaleq dari suku Deubulot. Namun karena cucunya Likumaliq dari suku Goronto telah dilantik oleh Liurai Wesei Wehali, maka jabatan fetor diserahkan kepada Likumaliq. Setelah Likumaliq mengambil istri yang bernama Lalgomo, maka jabatan beralih dari suku Deubulot ke suku Lalgomo.

Tugas fetor dapat diketahui dari julukannya: *Kes o lias gomo, Nigi o bokal gomo, Taes o matak gomo* (sebagai pengukir dan pemahat, penghalus dan pengkasar, penyaring dan pengalas). Dengan julukan ini fetor adalah wakil raja yang berperan dalam memimpin dan melaksanakan pemerintahan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan mempertanggung jawabkan kepada raja.

c. Jabatan Dato

Suku yang dipilih menjabat dato atau kepala kampung baru satu sehingga perlu ditambah sesuai keperluan. Ada dua macam dato yakni: *mila en ukon* artinya dato yang mengawasi. Untuk memimpin rakyat suku Giralbagal, ia dibantu oleh suku Leorawan Mual. Serdangkan untuk mengawasi hasil tanaman diangkat dari tiga suku yakni: suku Leowes, suku Deubulot dan suku Leorawa. Dalam melaksanakan tugasnya ke tiga suku tersebut membagi wilayah Nualain sebagai berikut:

- 1). Suku Leowes bertanggung jawab atas hasil di wilayah Nualain bagian Utara yakni dari jalan raya sekareang sampai batas Leowalu dan Ekin.
- 2). Suku Leorawan Esen bertanggung jawab atas hasil di wilayah Nualain bagian barat yakni mulai dari jalan raya jurusan Lakamaras ke bagian barat sampai batas Lonuna.
- 3). Suku Deubulot bertanggung jawab atas hasil di wilayah Nualain bagian Timur sampai batas Duarato. Untuk memperlancar tugas dari masing-masing pengawas mereka mengangkat seorang Makleat.

d. Jabatan kabu.

Jabatan kabu atau pembantu kepala kampung pada mulanya berada pada suku

Leprawan mual dengan suku Leowes. Namun karena kedua suku ini telah diangkat menjadi dato, maka sebagai gantinya diangkat dari dua suku lain yakni:

- 1). Suku Sulimetan diangkat menjadi kabu Marenu yaitu kabu yang mempunyai rakyat atau pembantu kepala dusun. Di samping itu ia bertugas menjaga pintu belakang kampung. Setiap tamu yang datang dari pintu belakang harus melaporkan diri kepadanya. Kemudian ia menginformasikan kepada raja.
- 2). Suku Asutalin diangkat menjadi Kabu Kaluk Lesu., yaitu kabu yang bertugas membawa kantung sirih dan destar milik raja. Kemana raja pergi, ia harus ikut serta. Selain itu ia bertugas menjaga pintu bagian depan. Apabila ada tamu dari pintu depan harus melapor kepada ia dan kemudian dilaporkan kepada raja.

Di samping jabatan tersebut dibentuk pula jabatan non struktural yakni:

- 1). Kabitan atau ketua para makleat dan jabatan ini dipercayakan kepada suku Bulupor.
- 2). Pengawal Istana. Jabatan ini diserahkan kepada suku Tailakaq Maubereq yaitru suku Taimau sekarang.
- 3). Besi Ka'a Lal Ama yaitu penasehat raja di bidang pertahanan dan keamanan yang dipercayakan kepada Hasubereq dan Maubereq.

4). Kerajaan Naitimu

Dalam syair adat Naitimu selalu disandingkan dengan Nanaet dengan sebutan *Dun Besi Nanaet* atau *Dun Besi* yang berarti seperti besi atau baja. Istilah *Dun Besi Nanaet* dalam pengertian adat selanjutnya dikenal dengan ungkapan *Foho ain badak dan foho ain naruk*. *Foho ain naruk* merupakan nama lain dari Nanaet atau *foho mata* yang berarti pusat mata atau pandangan terpusat (Fahik, 1994 dalam Widiyatmika dkk 2007)⁶⁹. *Foho ain badak* merupakan nama lain dari *Dun Besi*. Dari cerita rakyat tentang pembentukan kerajaan Naitimu tidak terpisahkan dari *sesekin hat tatanen hat* yakni 4 temukung yang merupakan pelopor pembentukan kerajaan Naitimu. Ke empat temukung tersebut adalah:

- a. Leki Fahik Katuas sebagai temukung Seo yang dianggap sebagai sulung.
- b. Ek Fatu Tabene sebagai temukung MaktaEn.
- c. Kadus NanaenoE sebagai temukung Halilulik
- d. Balau sebagai temukung Haliserin.

Nama Naitimu dikaitkan dengan tokoh yang pertama kali mendiami wilayah Naitimu. Sedangkan versi lain Naitimu berasal dari Timu Mau dan anaknya Nae. Naitimu selalu diidentifikasi berpasangan dengan: Lida Mauk (kerajaan Lidak),

⁶⁹ Widiyatmika M.dkk,2007 hal. 68

Timu Mauk (kerajaan Naitimu), Reu Mauk (kerajaan Mandeu) dan Lilu Mauk (kerajaan Jenilu). Ke empat kerajaan ini merupakan *oa natar hat Oa laluan hat, basa isin hat kaer kadun hat, taka ulu hat Sabeo hat* (terjemahan anak rumpun empat, anak kandung empat, tepuk badan empat, pegang susu empat, tudung kepala empat bertopi empat). Ke empat kerajaan tersebut merupakan empat bersaudara yang saling berdampingan terutama dalam menjaga keamanan. Ke empat kerajaan ini mempunyai hubungan *husar kotu* dengan kerajaan Fialaran dan tunduk kepada Fialaran sebagai *hun Abut* (sumber keturunan mereka). Versi cerita di Fialaran seorang tokoh bernama Atok Lakan putra dari seorang putri dewata bernama Laka Lorok Mesak Fatu Funan Mesak. Atok Lakan kawin dengan Elok Loa Lorok dan kemudian pindah ke bukit Nanaet Dubesi dan mendirikan kerajaan Naitimu (Maxi Mura, 1991) dalam Widiyatmika M. dkk 2007⁷⁰.

Versi cerita rakyat rumusan Seminar Adat Fehalaran (2003)⁷¹ nenek moyang datang dari Sinan Mutin Malaka bernama Agon dengan istrinya Luruk. Mereka datang melalui Larantuka Baboe, Parasa (Dili) terus ke Lakan. Dari lakan ke Nanait. Agon dan Luruk mempunyai banyak anak yang kemudian membentuk *Fukun hat atau Uma hat*. Yaitu empat suku yang terkenal rin besi hat yakni: Uma Kakaluk Kmesak. Uma Fatuhur. Uma Sukur Sou dan Uma Din Dulur. Nenek moyang pertama sewaktu datang menemui orang Melus.

5). Kerajaan Jenilu

Kerajaan Jenilu dalam syair adat dikenal dengan istilah *Dualilu*. Menurut van Wouden (1985)⁷², Jenilu sebuah kerajaan di pantai Utara semula terdiri dari dua bagian yang berdiri sendiri. Kawasan pantai merupakan kawasan *datu hitu* (ke tujuh datu) dan kawasan pegunungan merupakan kawasan *datu hat* (empat datu). Masing-masing dengan rajanya sendiri. Dasi Kabuna yang pertama, daerah pegunungan, muncul dari lubang tanah yang sekarang masih ada bersama ke tiga orang pria bersaudara dan dua orang wanita bersaudara. Para wanita bersaudara dibawa burung ke Lakaan dan Vohoterin, disana mereka menjadi leluhur raja Bauho dan penguasa Vohoterin. Abang yang tertua menjadi raja utama di Kabuna., adiknya menjadi tangan kanan, adiknya lagi menjadi hulubalang. Adiknya yang bungsu dalam peperangan dengan Balibo dilempar kelaut dengan maksud memenangkan perang, ia berubah menjadi buaya. Setelah beberapa generasi hanya ada *dasi* perempuan yang menjadi pengganti raja Utama. Ia menikah dengan raja utama dari kawasan di Pantai dan menurunkan raja-raja yang sekarang memerintah dan digabungkan kedalam wilayah Jenilu. Raja Kabuna sekarang menjadi tangan kanan raja utama. Keturunan ketiga pria bersaudara itu sekarang menjadi *datu* di Kabuna. Beberapa sumber yang lain menyebutkan penduduk Jenilu berasal dari jauh mungkin Malaka, sumber lain menyebutkan semula orang tinggal di gunung dan kemudian turun ke Pantai.

⁷⁰ Widiyatmika M. dkk 2007, hal, 68

⁷¹ Laporan Seminar Adat Fehalaran (2003, hal 12-19

⁷² van Wouden, 1985, hal. 10

6). Kerajaan Mandeu

Berdasarkan informasi nara sumber makoan di Mandeu asal usul kerajaan Mandeu adalah sebagai berikut: pada waktu bumi mulai kering yang kering pertama di Faturika, di Gunung Mandeu I Widiyatmika M.dkk, 2007a⁷³. Kemudian datang dua pasang manusia yakni dua putri bernama Rika Renek dan Soi Renek. Sedangkan 2 lelaki tak diketahui namanya. Kemudian untuk mengatur hukum dan pemerintahan diserahkan kepada 3 orang yang kemudian datang yakni:

- a. Atok Liurai di utus ke Oekusi lewat Maubesi Mutis.
- b. Taek Liurai ditugaskan menguasai wilayah matahari terbit sampai matahari terbenam.
- c. Suri Liurai tinggal di Wehali menjaga sesepuh Liurai Malaka sebagai bapa dan mama.

Kemudian Atok Liurai kembali dari Mutis menunjukkan keaktiannya memukul gunung Mutis dengan bambu lalu keluar air dan menjadi sungai Benanai. Taek Liurai yang menguasai perbukitan Mandeu mempunyai putra 8 orang, 6 putra 2 putri yakni: Boki Taek, Sana Taek, Molo Taek, Mafo Taek, Natu Taek dan Nuba Taek. Sedangkan dua putri yakni Rasi Taek dan Eno Taek. Ke enam putra diutus masing-masing: Boki Taek ke Biboki, Sana Taek ke Insana, Molo Taek ke Mollo, Natu Taek ke Amanantun, Nuba Taek ke Amanuban. Sedangkan Eno taek tinggal di Wehali.

Kenaian Mandeu dalam lingkungan sistem pemerintahan Wehali berperan sebagai pintu gerbang dan persinggahan dan perantara. Istilah adatnya: *Foho Butuk Rai Butuk* dan *Knanokar Babayday* untuk Liurai Wehali. Dalam syair adat diebutkan: *Butuk bodik rai bodik ama rai ulun, los ama raiulun manoin rai ulun*. Mandeu dalam bahasa adat juga sering dijuluki: *Oa feu ulun, oa mane ulun* (sebagai putri sulung dan putra sulung). Mandeu selain ditugaskan sebagai hulubalang juga mengamankan dan menjinakkan daerah-daerah jauh antra lain: *Oan natar hat oan laluan hat*.

Di kenaian Mandeu terdapat beberapa istana kerajaan (*uma metan*):

- 1). Uma Metan Ri Mean Faflur
- 2). Uma Metan Rai Mean Kukun.
- 3). Uma Metan Ri Mean Rafae
- 4). Uma Metan Tasain. Melalui Uma metan Tasain dikenal 3 ksadan yakni: ksadan Baboin I gunung Mandeu. Ksadan Tane Besi Basdebu Manai Maroma Rai dan Ksadan Halimodok Takirin di Fehalaran.
- 5). Uma Metan Kukun.
- 6). Uma Metan Tari Labur disimpan pusaka: satu kelewang dengan hiasan bulu kambing di bagian hulu disebut surik samara. Satu utas muti panjang (moroten)

⁷³ Widiyatmika M..dkk 2007, hal 78

dan sebilah tombak.

7). Uma Metan Ratae

8). Uma Metan Mandeu Raimanus. Dalam uma metan Raimanus terdapat pusaka yang disimpan antara lain:

- 3 buah pelat perak masing-masing dengan nama: Belak Hasoman, Belak Hanetan dan Belak Hanun.
- 2 buah hania (pemukul) masing-masing dengan nama: Tanutuk Baudinik, Tanesan Baudinik.
- 1 buah gong dengan nama: tala Lia manas.
- 2 buah meriam.

7). Kerajaan Asumanu.

Suatu hal yang menarik dari laporan Seminar adat Fehalaran (2003)⁷⁴, nenek moyang Asumanu datang dari Malaka dengan sebuah kapal batarian mendarat di gunung Lakan yang saat itu merupakan satu-satunya daratan yang muncul di atas permukaan air dan tempat lain masih digenangi air. Kapten kapal bernama Magelains. Tentunya cerita rakyat ini setelah diseleksi dengan kritik sejarah sangat bias dan terpengaruh perjalanan keliling dunia Magelhaens. Sayangnya berbeda sangat jauh. Magelhaens adalah pemimpin armada keliling dunia dengan 4 kapal. Ia sendiri terbunuh di wilayah Philipina oleh raja Lapu-Lapu. Kapalnya tinggal satu buah yakni kapal Victoria yang mendarat di Batugede tahun 1522 dalam rangka mengisi perbekalan untuk melanjutkan perjalanan ke Tanjung Harapan. Jadi Magelhaens tidak pernah sampai di Malaka. Dan pada waktu itu pulau Timor sudah berupa pulau tidak tergenang air.

8). Kerajaan Aitoun.

Berdasarkan hasil Laporan Seminar Adat Fehalaran (2003)⁷⁵, nenek moyangnya datang dari Sinan Mutin Malaka dengan Ro Manulain-Niduk Manulain, Ro Fautahan Biduk Fautahan, Ro Maradoes Biduk Maradoes. Mereka mendarat di Heranba-Weluli (Bukit Aitoun), Foho Sabu Lakan Kaisabe. Kerajaan ini sebenarnya merupakan bagian 12 kerajaan di Fehalaran. Aitoun ibu kotanya di Nuahai⁷⁶

9). Kerajaan Maumutin.

Menurut Laporan Seminar Adat Fehalaran (2003)⁷⁷, nenek moyang mereka datang dari Sina (Siam/burma) dan dari Sina Mutin Malaka melalui Larantuka Baboe, lamahala (Adonara), Lamahera (Lomblen) terus ke Komoro dekat Dili. Kembali ke Lamahera untuk mengambil istri di Lamahera. Dapat istri di Malaka dan juga membawa

⁷⁴ Laporan Seminar adat Fehalaran, 2003 hal 24

⁷⁵ Laporan Seminar Adat Fehalaran, 2003 hal 24

⁷⁶ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid I hal 24

⁷⁷ Laporan Seminar Adat Fehalaran, 2003 hal 24

kayu cendana kemudian dari Maumutin pindah ke Maukatar. Untuk memperingati nenek moyang yang datang dengan kapal lalu didirikan Foho yakni Foho Liurai dan Foho Tahan Leki, Foho Leubauk Leowalu.

10). Kerajaan Dirma

Menurut laporan Seminar Adat Fehalaran (2003)⁷⁸, nenek moyang bernama Bei Teako yang bertempat tinggal di Malaka mengirimkan 3 orang anaknya laki-laki berlayar dengan kapal ke Timor bersama pengikutnya melalui Batavia, Klaban (Kalabahi), Larantuka, Babo Dily terus ke Bobonaro lalu ke Fatumea Rai Oan. Ketiga anak itu masing-masing: Loro Sangkoe tinggal di Debululik/Welaka. Loro Bonleo tinggal di Sanleo/Dirma. Loro Sonbai terus ke Barat tinggal di Dawan. Kemudian ketiganya kembali ke Malaka sambil mengambil teman-temannya 5 orang yakni: Hare Lorok, Batar Lorok, Meli Lorok, Bui Lorok, Tora Lorok. Sampai di Tyimor ke limanya dikubur hidup-hidup dan tumbuh menjadi jagung, padi dua macam, jewawut atau tora, kayu cendana (Ai Kamelin) di kebun-kebunnya yang disebut Toos Kukun.

Dari beberapa cerita rakyat dalam laporan seminar adat Fehalaran (2003)⁷⁹ kapan nenek moyang leluhur datang dari Malaka. Sesuai dengan yang telah diuraikan menyangkut kedatangan leluhur yang mengidentifikasi sebagai Sinan Mutin Malaka adalah sesudah tahun 1511. Namun beberapa cerita fakta sejarahnya kabur dan bertentangan dengan kenyataan, misalnya: apabila benar mereka lewat Batavia berarti kurun waktunya sesudah Batavia berdiri yakni pertengahan abad ke 17. Tetapi disebutkan mereka melalui Kalabahi lebih rancu lagi karena Kalabahi baru dibangun Belanda tahun 1911. Salah satu dari ketiga anak nama Loro Sonbai datang dari Malaka lewat Batavia tentunya ada kerancuan apalagi kalau mereka lewat Kalabahi. Sonbai memang pernah diajak ke Batavia oleh Ters Horst opperhoofd VOC bersama raja Kupang, Amabi untuk meminta bantuan. Itu terjadi setelah tahun 1655. Jagung diperkenalkan VOC ada dua versi tahun: pertama tahun 1659 jagung pertama sudah siap panen (Hagerdhal, tanpa tahun)⁸⁰ sedangkan dalam Ormeling (1955)⁸¹, jagung diperkenalkan VOC tahun 1672.

11). Kerajaan Silawan

Berdasarkan tradisi para leluhur Silawan hadir dengan kata *tubu lake rai mores lake rai* (muncul dan hidup dari dalam tanah) pada suatu gua bernama Fatuk mau batar (batu mau jagung) yang terletak di wilayah Timor Leste pada ketinggian 300m dari permukaan laut dimana di tempat itu diketemukan serakan tulang ikan dan kerang. Klen pendaras mereka adalah Mane Kiik dan Klen Manrhain dengan tokohnya Atin Kai Hale-Dain Kai Hale dan seorang wanita bernama Ut Agustinus Bere

⁷⁸ Laporan Seminar Adat Fehalaran, 2003 hal 27

⁷⁹ Laporan Seminar Adat Fehalaran, 2003

⁸⁰ Hagerdhal, Hans, tanpa Tahun Historical Notes on Pre Modern Timor, University Vaxjo, Swedia hal.24

⁸¹ Ormeling, F.J. 1955 hal 106

dalam Widiyatmika dkk 2007b⁸². Dalam hubungan dengan kerajaan Fehalaran, Silawan disebutkan dalam syair adat dengan istilah *Tulakudi meninu alas metan sela oan atau Tula Kadi meninu beilaka kaitara*. Dalam hubungan dengan Wehali Silawan dan tiga kerajaan lain yakni Naitimu, Lidak dan Mandeu dikenal dengan sebutan *Oan natar hat, oan laluan hat, basa isin hat, kaer kadun hat, taka ulu hat, sabeo hat* (empat kumpulan, empat kandang, tepuk empat kali, pegang empat, tutup kepala empat, topi empat). Sampai sekarang masih diingat perkataan: Belu alin Belu maun ha matak-matak hemu ran ran artinya Belu adik, Belu kakak, makan mentah-mentah, minum darah-darah). Masa ini dikenal mereka belum mengenal api, sehingga makanan belum dimasak.

Hagerdal Hans dalam Widiyatmika dkk, 2007⁸³, sekitar tahun 1630 raja Silabo atau Sialaban berhasil dibaptis oleh Pater Christavao Rangel diikuti dengan pembangunan sebuah gereja.

12). Kerajaan Bani Bani

Kerajaan Bani-Bani mempunyai hubungan kekerabatan dan Sasian tatanen (tata pemerintahan) dengan kerajaan Wesei Wehali/Fatuaruin. Menurut Tefa 2006 dalam Widiyatmika dkk 2007⁸⁴ pada suatu ketika pemimpin raja sehari dengan sonafnya yang bernama Sonaf Bakaaf di Bani Bani menyerahkan tongkat kekuasaannya kekuasaan pada raja dari sonaf lo Kufeu. Sonaf lo Kufeu digandengkan dengan sonaf kesatuan pendukungnya Alaka Amana Biku Barani. Menurutnya sonah lo Kufeu berasal dari Loro Liurai Malaka/Wehali. Sekitar tahun 1400-an BaniBani diperintah Nai Loron Mesak (Niuf Neon Mese/raja sehari). Dengan suku pendukungnya Abukun. Berdasarkan kesepakatan ketiga suku besar mereka menghadap Liurai Malaka Wehali Boboto Bita Rui Makerek Neak Sui Suik Wehali.

Kepada para utusan Bani-Bani, Liurai Wehali menyerahkan Tafatik Uma Metan, / Sonaf Alaka-Amanas, Biku Barani (lo Kufeu), putra raja dengan permaisurinya Boboto Bita Rui Makerek, Fianet Tae Sikone dan permaisurinya Uis Sianet, dua buah tongkat kerajaan, besi 10 ikat tombak 10 ikat, kakaluk inan Liurai Malaka Wehali, rai hussar rai binan. Ketika pulang utusan Bani-Bani dengan membawa pusaka hadiah tersebut mengambil rute Marlulu haholek sona fahi a.tebes, taben taloit Bitirai taroman. Selanjutnya status BaniBani disebut Liurai. Raja pertama Bani-Bani Baboto Bita Ruin Makerek yang dalam bahasa lokal disebut lama makerek dengan gelar Sui loro saen, sui loro monun (menanduk matahari naik dan menanduk matahari turun).

Menurut Parera 1971 dalam Widiyatmika M.dkk 2007⁸⁵, raja Bani-Bani yang menyerahkan diri dalam Perang Penfui tahun 1749 bernama Don Luis Paniero. Ia

⁸² Widiyatmika M.dkk 2007bhal 82,83

⁸³ Widiyatmika M.dkk 2007 hal 83

⁸⁴ Widiyatmika M.dkk 2007hal 84,85

⁸⁵ Widiyatmika M.dkk 2007 hal. 85.

seorang raja yang mengirim surat kepada VOC tahun 1767. Menurut informasi Makoan Liurai dan tokoh adat di Wekfau setiap tahun Bani Bani menyerahkan upeti termasuk jagung (*tahudi Wehali silu tohu Wehali*) kepada Liurai Wehali/Fatuaruin melalui fukun Lae Tua di Wekfau. Apabila raja Bani-Bani wafat ritual pemakaman menunggu sampau Fuku Lae Tua datang. Ketika ia menerima kabar kematian raja Bani Bani ia langsung pergi ke Bani Bani dengan kuda. Sesampai di rumah duka ia membuat ritual sirihpinang (halo mama) baru setelah itu warga kerajaan oleh menangisi mayat si raja yang meninggal. Upacara pemakaman diawali dengan seekor kuda raja Bani Bani dihiasi dengan uang dan kain dan diserahkan kepada Fukun Lae Tua untuk menuntun kuda tersebut mengelilingi jenazah berbaring sambil menunggu pemakaman selesai. Setelah pemakaman kuda tersebut dibawa oleh Fuku Lae Tua pulang ke Wekfau dan melaporkan kepada Liurai.

13). Kerajaan Lakekun

Kerajaan Lakekun termasuk salah satu Loro dari empat Loro kerajaan Wehali/Fatuaruin. Asal kata Lakekun adalah La dan keku yang berarti tidak dapat dicabut. Grijzen 1904 dalam Widiyatmika M.dkk 2007⁸⁶ Lakekun terdiri dari dua bagian yakni Lakekun Hae (rrmput) dan Lakekun Alas (hutan). Dimasukkan Alas ke Lakekun sebagai akibat kebijakan pembagian pulau Timor oleh Portugis dan Belanda tahun 1859. Sesungguhnya Alas termasuk Tamiru Ailala, kerajaan Cobalima dan bagian dari kerajaan Dacolo. Lakekun dikenal juga dengan wilayah wilayah atau nama-nama tempat seperti Webua, Kada, Namfalus, Welauas, Litamali, Halibot, Moruk Ren. Raja pertama yang memerintah Lakekun bernama Banu Lorok Raja raja yang pernah memerintah Lakekun setelah raja pertama Banu Lorok, raja kedua Balok Lorok, raja ketiga Hoar Teti, raja keempat Moru Lebok dan raja ke lima Tahu Lekik⁸⁷

14). Kerajaan Tahakae

Tahakae adalah salah satu kerajaan kecil di Belu. Kerajaan ini merupakan kerajaan orang Melus yang terletak antara Maukatar, Fehalaran dan Lamaknen. Dalam dokumen Sarzedas Tahakae diidentikan dengan Tafaqui yang merupakan salah satu dari 46 kerajaan diawah Wesei Wehali. Kemudian berada dbawah pengaruh Portugis.

Disebutkan adanya peperangan antara kerajaan Fehalaran dan Lamaknen melawan Tahakae pada pertengahan abad ke19. Pada waktu terjadi pertukaran wilayah antara Portugis dan Belanda tahun 1893, Belanda menerima dari Portugis wilayah Tahakae, Tamiru Ailala, Maubesi, Mau Besa, Lakmaras dan Noemuti. Sedangkan Portugis menerima Maukatar. Tahakae kemudian menjadi Dirun sebagai salah satu Onder distrik Lamaknen.⁸⁸

⁸⁶ Widiyatmika M.dkk 2007hal 59

⁸⁷ Widiyatmika M.dkk 2007 Hal 250

⁸⁸ Widiyatmika M dkk 2007 hal.82.

15). Kerajaan Kobalima

Kerajaan Kobalima termasuk sebuah kerajaan yang cukup tua di Belu. Kata koba menurut istilah Tetun Fehalaran dan Kabir menurut istilah Tetun Wehali artinya seniping yaitu tempat sirih pinang. Jadi Kobalima berarti lima tempat sirih pinang. Hal ini terkait dengan jumlah kerajaan Kobalima memiliki lima bagian kerajaan yakni yakni Fatumea dan Dakolo yang berada di wilayah Timor Leste dan Lookeu, Maudemu dan Sisi berada di wilayah Belu⁸⁹

Pada waktu perjanjian pembagian pulau Timor antara Belanda dan Portugis tahun 1893 mengenai perbatasan Tamiru Ailala termasuk yang ditukarkan dengan Maukatar. Sejak saat itu Tamiru Ailala masuk wilayah Belanda, ia kemudian dimasukkan sebagai salah satu sub distrik dari distrik Lakekun, swapraja Malaka. Pada awalnya Tamiru Ailala berstatus setingkat dato bagian dari kerajaan Dakolo. Suku-suku pendukung kerajaan ini adalah: Leowalu, Manehat, Niiha, Lahoan, Ati Oan, Koli Bein, Besi Bein dan Siri Bein (ketiga terakhir berasal dari kerajaan Maukatar. Hubungan mereka dengan Dakolo adalah hubungan perkawinan dengan Dato Hoar. Raja Alas yang pertama bernama Klobar Nai yang memerintah sejak awal abad 19 (Widiyatmika M.dkk 2007)⁹⁰.

Kontak pertama antara Klobar Nai dengan Misionaris Yesuit di Lahurus pada tahun 1902. Pada waktu itu terjadi kekurangan bahan makanan. Oleh karena itu di utus seorang bruder ke Alas dalam rangka mencari bahan bantuan jagung. Janji tersebut ditepati tanggal 24 Juli 1902, ketika Klobar Nai dengan rombongan mengantarkan jagung 77 kayu setara 77.000 bulir dan 6 ekor ayam. Kontak kedua terjadi sebagai kunjungan balasan oleh paer A Mathijsen ke Alas (Kobalima). Ketika pulang pater Mathijsen membawa salah satu kemenakan Klobar Nai mengikuti sekolah di Lahurus. Kemenakan tersebut bernama Leki kemudian dipermandikan dengan nama Wilhelmus. Pada bulan April tahun 1905 Klobar Nai datang ke Lahurus membawa persembahan seekor kerbau, seekor babi dan 6 ekor ayam. Ia diajak dipermandikan tetapi pada waktu itu ia belum bersedia. Pada waktu itu telah ada seorang juru bahasa Guru Bantu Saan bernama Johanes Leki. Putranya nanti menjadi seorang Uskup bernama Gabriel Manek. Klobar Nai yang kemudian bernama Mauk Banani dibaptis dengan nama Alosius Mauk Banani di Weuain tanggal 26 Oktober 1905, Setelah wafat ia digantikan kemenakannya bernama Wilhelmus Leki pada tanggal 28 Juli 1917. Pada waktu itu Tamiru Ailala masuk dalam distrik Lakekun swapraja Malaka.⁹¹

Distrik Ailala yang semula merupakan bagian dari kerajaan Dakolo/Kobalima kemudian berkembang menjadi kenaihan Alas yang terdiri dari dua belas temukung yakni: Ailala, Fatusakar, Kota Biru, Kota Bot, Fatu Hat, Ai malirin, Fatu Leki, Ai Tama, Fatuk Leten, Au Ren, Hadi rend an Webora.

⁸⁹ Widiyatmika M.dkk 2007 hal 80.

⁹⁰ Widiyatmika M.dkk.2007 hal 80-81

⁹¹ Widiyatmika M.dkk.2007 hal 81.

16). Kerajaan Insana Sebelum 1642

Laporan Pigafetta tahun 1522 dari empat kerajaan di Timor yakni yang disebutkan salah satunya adalah Lichsana atau Insana. Jadi pada tahun 1522 Insana telah menjadi sebuah kerajaan penting di Pantai Utara Timor. Pada tahun 1630 pastor Miguel da Crus Rangel ditemani 12 biarawan pergi ke Solor. Kemudian ia melanjutkan usaha memenangkan upaya memikat hati para raja di Timor. Ia mengirimkan Pater Antonio S Jacinto ke Timor antara lain ke Mena tetapi kurang berhasil. Seorang biarawan lain Christavao Rangel berhasil membaptis raja Silibao dan ia mendapat nama Christavao. Kemudian Pastor Rafael Rangel juga berhasil membaptis raja Amabi dan Amarasi. Seperti dijelaskan di atas ratu Mena membantu serangan Captain Mayor Ambrosio Dias kepada Liurai Sonbai.

Karena persaingan perdagangan Cendana antara Portugis, Belanda dan Goa, pada bulan Januari 1641 Kraeng Tallo melakukan serangan ke Mena dan membakar tempat tinggal ratu dan perkampungan, penduduknya ditangkap sebagai budak. Ratu beserta keluarganya mengungsi ke gunung. Kekalahan Mena ini memberi peluang baik bagi Portugis untuk membangun kekuatan. Pada bulan Mei 1641 Pastor Antonio Jacinto dikirim kembali ke Mena ditemani 2 biarawan Dominikan dan dikawal 70 prajurit. Portugis menawarkan perlindungan menghadapi Makasar. Tanggal 24 Juni 1641 Pada upacara Hari St. John, Pastor Antonio Jacinto membaptis ratu Mina beserta para bangsawan dan rakyatnya (Taeixeira 1961 dalam Tom Therik, 1995)⁹². Kekalahan ratu Mina menjadi pembuka jalan bagi Portugis memperluas pengaruh kekuasaannya di Timor

Berdasarkan tuturan lisan tentang asal usul leluhur raja Maubes Insana raja yang pertama bernama Usi Neno Mnanu yang tinggal dipuncak bukit Maubes. Raja Maubes Insana pada suatu ketika melakukan perjalanan keliling pulau Timor dalam rangka mencari pusat pulau Timor. Pada waktu mengadakan perjalanan keliling ke Timur raja meninggalkan adiknya bernama Luni Mnasi yang tetap tinggal di bukit Maubes. Akan tetapi sewaktu kembali dari Timur daerah Maubes Insana dikuasai Sonbai. Luni Mnasi menyembunyikan diri di lubang batu bukit Maubes (Kubat Maubes). Namun karena Sonbai bertindak kejam, setiap tahun orang mengirimkan upeti. Sonbai selalu membunuh orang untuk dikorbankan. Akhirnya raja Maubes Insana menyuruh para meo dan amaf mengusirnya. Sonbai kemudian terbunuh dan dikuburkan di Keun (Baki Sonbai).

Perjalanan mengelilingi pulau Timor dalam rangka mencari pusat pulau Timor, sehingga di setiap tempat pemberhentian dibuat timbangan wilayah. Baru di Maubes (Fauna Maubes, Neki Neofanu) timbangan tersebut seimbang (*Ton No'haek*) antara utara selatan, serta barat dengan timur. Sehingga ditetapkan Maubes sebagai pusat seluruh pulau Timor yang disebut *Paha Usan, Paha Tnanan*.

⁹² Tom Therik, 1995 hal 63

Kemudian sebagai simbol di sonaf Maubes didirikan tiang liurai di sebelah timur dan tiang Sonbai di sebelah barat yang disebut *Ni an pupu ma ni an matani* dengan kayu penghubung bubungan atap yang disebut *Tidur apinat aklahat* (Alexander Un Usfinit, 2003).⁹³

Penentuan pusat pulau dan bumi sebagai pusat kedudukan raja adalah terkait dengan sistem klasifikasi kosmos, di mana raja sebagai penjelmaan dan keturunan dewa, kedudukannya yang sakral dipandang sebagai poros bumi atau poros pulau. Tempat kedudukan raja ditata seperti tiruan surga di dunia. Kosmos yang dianggap memiliki 4 pintu gerbang memunculkan pembagian atas klasifikasi 4 atau 5 dengan poros vertikal Utara Selatan dan horisontal Barat Timur yang menstabilkan dunia berpusat pada poros pulau (Pigeaud 1924 dan Nash 1984/197 dalam Widiyatmika M.dkk (2008)).⁹⁴

Kalau dilihat dari silsilah raja Maubes Insana, raja pertama Usi Neno Mnanu mempunyai putra 3 orang dan satu putri yakni: Malafu Neno, Atolan Neno, Pou Neno dan Bee Pala Finit. Pada masa pemerintahan Malafu Neno sebagai generasi kedua, raja Malafu Neno menanda tangani kontrak dengan Belanda pada tanggal 22 September 1879 dengan Mal Sulip (Alexander Un Usfinit, 2003)75.⁹⁵ Dengan angka tahun tersebut maka generasi pertama yakni masa Usi Neno Mnanu berarti satu generasi sebelumnya. Kalau selang generasi 30 tahun, maka masa pemerintahan Usi Neno Mnanu sekitar 1849. Ini berarti sudah pada masa keresidenan Timor Dan Daerah Takluknya. Dan hal ini juga cocok apabila kerajaan ini berkembang kembali setelah Sonbai yang kejam dibunuh. Dari catatan sumber Barat pemberontakan kepada Sonbai yang kejam dan lalim dipelopori Amkono dan Mollo terjadi pada tahun 1781 (Schulte Nordholt, 1971)⁹⁶. Pada hal dalam tahun 1522 Antonio Pigafetta telah menyebutkan salah satu dari 4 kerajaan yang ada di Timor adalah Insana. Artinya Insana sudah ada pada tahun 1522. Dalam perkembangan raja menggunakan gelar Kolnel dan usif menggunakan gelar kesel. Kata Kolnel dari bahasa Portugis coronel dan kesel dari bahasa Belanda keizer. Dalam dokumen sejarah pemberian gelar-gelar oleh Portugis dimulai pada masa Capitao mor di Timor dijabat Simao Luis yang kejam. Kepada para raja yang tidak melarikan diri dan tunduk pada perintah Simao Luis diberi tongkat Simao Luis dan gelar. Tongkat sebagai tanda kewenangan pemegang tongkat mengumpulkan dan menjual cendana kepada Portugis (Ataupah, 1992)⁹⁷. Simao Luis adalah Capitao

⁹³ Usfinit Un Alexander, 2003 hal.36,37

⁹⁴ Widiyatmika M.2008 dkk Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Utara.UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Propinsi NTT hal.97

Lihat Nash Pieter J.M. 1984. Settlements as Symbols: The Indonesian Town as Field of Anthropological Study, dalam P.B. de Josselin de Jong(ed) University in Diversity, Indonesian as Field of Anthropological Study,Foris Publications, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-USA hal. Hal 127-134

⁹⁵ Usfinit Un Alexander, 2003 hal. 45

⁹⁶ Schulte Nordholt H.G. hal.201

⁹⁷ Ataupah H.1992 hal. 165

Mor di Timor yang ditunjuk Francisco Viera de Figueiredo sekitar tahun 1656 sampai wafatnya tahun 1663/1664. Kemudian juga para usif di daerah-daerah menggunakan gelar fetor.

Secara tradisional penggantian raja didasarkan atas garis kebapaan patrilineal yakni biasanya putra laki-laki pertama dari permaisuri raja.

a. Struktur Kerajaan Insana Maubes

1. Pemerintahan eksekutif

Struktur pemerintahan di Maubes Insana dikemukakan oleh Aleksander Un Us Finit (2003)⁹⁸ sebagai berikut:

Pemerintahan eksekutif sehari-hari dijalankan oleh Kolne Bala salah satu suku raja besar dalam (Kolne, Abainpah, Manikin, Maun, Naijuf) karena Atupas tidak aktif memerintah kerajaan sehari-hari. Hanya dalam upacara ritual saja Atupas hadir, dimana dia biasanya hanya memberikan petunjuk kalau diminta. Dalam rapat-rapat adat yang berbicara adalah para tetua adat dari amaf bsar di bawah pimpinan kolne. Tupas tidak boleh berbicara sembarangan, maka dijuluki bisu tuli (*Amonot ma Laektono, Ka mafefa ma Ka mahana*). Setiap hari Atupas hanya didampingi oleh satu orang dari suku Tatuin (penyangga, ajudan).

Struktur pemerintahan di Maubes Insana dibedakan dalam dua yakni jalur pemerintahan adat dan jalur pemerintahan eksekutif. Struktur jalur pemerintahan tersebut seperti diuraikan Aleksander Un Usfinit (2003) ⁹⁹ sebagai berikut:

Jalur pemerintahan Adat.



⁹⁸ Us Finit Un, 2003 hal 54-70

⁹⁹ Us Finit Un, 2003 hal 59



Jalur pemerintahan eksekutif



Struktur adat menurut hierarkhie diungkapkan oleh Aleksander Un Usfinit (2003)¹⁰⁰ adalah sebagai berikut:

Kelompok usif

- 1). Usif Us Finit sebagai raja tertinggi digelar Atupas dan Aneket (yang hanya tidur dan istirahat saja). Ia bergelar kesel. Tugas kesel dalam pemerintahan dan tata cara adat didelegasikan secara operasional kepada para usif dan amaf. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh salah satu raja dalam yakni Kolne. Kesel hanya menerima laporan dan memberi instruksi melalui Kolne kepada seluruh usif dan amaf.

¹⁰⁰ Us Finit Un, 2003 hal.54-65

- 2). Usif besar dalam terdiri dari 4 raja dalam yakni Kolne, Abainpah, Manikin, dan Moen Naijuf. Ia bertugas sebagai pengawas dan pengatur amaf serta menjadi pnghubung dengan raja besar luar. Yang bertugas di istana (sonaf) dan mendampingi Atupas. Maubesi. Kolne sebagai pelaksana eksekutif dari kesel. Dalam melaksanakan tugasnya kolne dibantu para amaf dalam yakni: Nopala, Mataufina, Nai Tkanain, dan banusu Dalam. Serta beberapa amaf dan usif lainnya.
- 3). Usif Besar luar. Raja besar luar adalah: Us Fal, Us Taolin, Us Pupu dan Us Tonbes. Mereka yang menguasai wilayah di 4 penjuru mata angin (saen tesan) di Utara Us Pupu dan Us Tonbes, di Timur Us Tolin, di Barat Us Fal dan di Selatan Us Taolin. Us Taolin menguasai dua wilayah sekaligus Selatan dan Timur. Ia pernah memegang kolne dan pernah menjabat Atupas berkat bantuan Belanda.

Semula wilayah Selatan dipimpin Us Pupu tetapi kemudian Us Pupu pindah ke Uatara bergabung dengan Us Tonbes. Wilayah Selatan di bawah pengawasan Atupas. Wilayah Selatan pernah dipimpin langsung keturunan Atupas yitu Atupas III Atolan Baaf (Tuamoko).

Para usif besar ini mengatur sendiri wilayahnya sebagai wilayah otonom. Pada masa penjajah dibentuk distrik yang kemudian diubah menjadi kefetoran dikepalai usif besar dengan gelar fetor. Untuk melaksanakan tugas usif besar luar dibantu oleh sebuah suku besar yakni: Suku Besar Banusu Luar untuk wilayah Uatara, suku besar Saijao untuk wilayah Barat, suku besar Taboy untuk wilayah selatan dan suku besar Hitu untuk wilayah Timur. Masing-masing suku besar didukung oleh *nefu hala* dan amaf lainnya.

- 4). Usif menetap

Para raja menetap (*usif pah bal ina*) yakni raja-raja yang telah lama menetap dan berdiam lebih dahulu di wilayah kerajaan Maubesi Insana. Peran mereka tidak begitu menonjol Peran mereka sebagai pendukung usif besar. Yang termasuk kelompok ini: Balnai, Honnai, Teufnai, Kisnai dan Teunnai.

- 5). Usif Tengah

Para raja tengah (*usif tengah, usif tnana*) menjadi perantara antara usif besar dalam dan usif besar luar Di antara wilayah Pusat dengan wilaya luar. Mereka disebut meo naek. Mereka mempunyai tugas untuk membantu usif besar. Yang termasuk raja tengah adalah: Ataupah, Anapah, Afanpah, dan Abainpah. Dalam melaksanakan tugas mereka dibantu oleh para suku amaf yakni suku-suku tua (*Ama Mnasi, Aina Mnasi*) dan suku suku pemagar (*Bilu Baha*) di samping suku penerang (*Pauk Pinfina*) yang tinggal di wilayah tengah. Dalam tuturan adat para raja tengah ini merupakan raja-raja pertama (Sonaf Mnasi Pano Mnasi) sebelum raja Usfinit datang. Pada waktu pembentukan distrik, wilayah tengah bagian Barat dan wilayah Pusat menjadi satu distrik kefetoran Maubesi. Semula

fetor dipegang keturunan Usfinit dari Sonaf Kiu tetapi kemudian dipercayakan kepada salah satu raja tengah Afanpah.

6). Usif kecil

Raja-raja kecil disebut uis a paltina merupakan keturunan raja-raja diatas yang berdiam di lingkungan amaf. Mereka mendirikan sonaf sendiri karena pindahan dari tempat lain atau karena alasan lain. Yang termasuk raja kecil: Us Subun di Utara, Laemfatun di wilayah sonaf maubes, Tneklau di Barat, Noe Tnana di timur dan lainnya.

7). Usif pendatang

Usif pendatang (uis amnemat) berasal dari luar kerajaan Maubes Insana kemudian bergabung dengan para usif besar sehingga status hampir sama dengan usif besar. Bahkan diantara mereka ada yang memberikan putrinya kepada Us Finit. Yang termasuk dalam kelompok ini: Us Kono Teuknono, Us Kono Siatnoni. Mereka datang mengikuti putri raja Miomaffo Tuan, Oennaem Tuan yaitu Bee Sani Us Kono yang dinikahi raja Maubes Tuan. Hubungan kerajaan Insana dengan Miomaffo dipererat dengan istilah Salu Maubes.

8). Usif Penerang.

Para raja usif penerang (uis *pauk pinfina*) mempunyai tugas sebagai pembawa obor dan penunjuk jalan dalam perjalanan pada waktu para usif berkeliling ke seluruh wilayah kerajaan. Para usif penerang mengantar para usif luar dengan para amaf serta para amaf tengah pada waktu mereka membawa upeti kepada atupas di sonaf Maubes. Yang termasuk raja penerang adalah: Us Taku, Us Talua, Us Asolan, dan Us Akunut.

9). Usif Sehari

Raja sehari (uis neon mese) sebenarnya termasuk amaf suku tertua (Ama mnasi aina mnasi) bertugas sebagai pemagar (Bilu ban). Atas mandat dari Atupas, mereka ditugaskan berkeliling menyampaikan perintah atupas supaya seluruh usif dan amaf berkumpul misalnya melaksanakan upacara mohon hujan (*toet Upu Unu*) pada musim paceklik di puncak bukit Maubes. Pada waktu berkeliling mereka membawa para suku tua (Bah mau Tui mau) yakni: Saban, Tasoe, Muna, Oeleu sebagai pendamping. Yang termasuk kelompok ini adalah: Kofi, Saunoah, Finsau dan Lamasi.

Kelompok amaf

Kelompok amaf terdiri dari amaf naek yang terdiri dari suku besar dalam dan suku besar luar, nefu hala (amaf sukif) yaitu suku-suku pendamping amaf naek, amaf yakni suku-suku kecil atau golongan pekerja, tobe kalili (penguasa dan pengatur tanah),

meo sapan (para bala tentara dan amaf amnemat suku-suku pendatang yang datang bersama raja rajanya dari luar.

17). Kerajaan Miomaffo

Leluhur yang mendirikan kerajaan Miomaffo datang dari Belu Selatan yakni Wehali. Seperti telah dijelaskan di uraian tentang Sonbai, salah satu saudara termuda Sonbai yang datang dari Wehali adalah Kono. Kedatangan mereka bersamaan dengan kedatangan Sonbai dan Oematan. Oematan sebagai kakak mendapat bagian wilayah Mollo dan Kono mendapatkan wilayah Miomaffo (Van Wouden, 1985)¹⁰¹. Pada periode ini kerajaan Miomaffo sebenarnya masih dalam lingkungan liurai Sonbai. Oleh karena itu kerajaan Miomaffo berdiri tidak berselisih jauh dari pada kerajaan Sonbai.

Pada pusat kerajaan terdapat dua raja yakni di bagian pusat bagian Barat yang sakral tinggal raja yang bergelar Atupas dan hanya tidur dan makan, tidak secara langsung memerintah. Sedangkan di pusat bagian Timur tinggal raja pelaksana (eksekutif) yang bergelar Us Bala.

Schulte Nordholt (1971)¹⁰² mengemukakan lebih lanjut tentang istana dan pusat pemerintahan sebagai berikut:

Sonaf kono dilengkapi dengan dua pintu yakni pintu lelaki tempat lelaki masuk (*eno atoni nesu atoni*) ia berada di depan tenggara dinding sedangkan pintu wanita dimana para wanita masuk disebut *eno bifel nesu bifel* ia berada dekat bagian utara dinding. Sonaf dikawal oleh klen Sonlai yang terbagi dalam dua bagian yakni: Sonlai mone menjaga pintu lelaki dan mempersilahkan tamu laki-laki masuk, dan Sonlai fetu menjaga pintu wanita serta mempersilahkan tamu wanita masuk. Mereka menerima upeti yang akan dipersembahkan epad Atupas. Para amaf yang membawa upeti tidak akan diterima selama belum komplit setelah diperiksa. Setelah disetujui upeti dibawa masuk dan diterima Sonlai fetu. Di samping Sonlai fetu dan Sonlai mone terdapat terdapat juru bicara Us Kono (mafefa). Mereka adalah klen dari Hakase dan Faimnasi, Mereka berdiri masing-masing di samping dan memiliki kedudukan sederajat. Mafefa juga mengurus kepentingan urusan kerajaan dari Uskono. Apabila upeti tidak dibawa datang maka salah satu dari mereka pergi menyelidiki yang satu tinggal menjaga istana apabila ada tamu yang datang mereka yang menerimanya. Dalam beberapa urusan mereka juga bertindak sebagai penasihat raja.

Us Thaal berada di pintu kerajaan bagian Utara sedangkan Us Ulin di bagian pitu sebelah Selatan di Naktimun. Mereka masing-masing dikelilingi 4 suku. Us Thaal dikelilingi Natun- Tamelak , Naki Nali. Sedangkan Us Ulin dikelilingi 4 suku: Tati Taek,

¹⁰¹ Van Wouden F.A.E, 1985 hal.50,51

Lihat Kruyt, A.C. Verslag van Een reis door Timor, T.A.G. 38 1921 hal.780

¹⁰² Schulte Nordholt, H.G. 1971, hal 286

Luin-Tuindja'as. Mereka menjadi penjaga pertahanan kerajaan dan juga digunakan sebagai pintu masuk usif Tunbaba di Timur apabila mereka datang dengan rakyatnya membawa upeti. Mereka menginap semalam baru kemudian dikawal menghadap Us Kono hari berikutnya. Demikian pula Usif Bikomi menjalankan cara yang sama pada waktu membawa upeti.

Di bagian Tengah terdapat 4 pejabat bagian Utara 4 yakni: Banu-Ola dan bagian Selatan 4 yakni: Babu Bifel, Kofe Tabin. Empat suku yang mengelilingi sonaf Kono di Noeltoko, namun kemudian berkembang menjadi 8 suku yakni: Banu-Ola, Suan-Talaub, Babu-Bifel dan Kope-Tabin. Babu-Bifel adalah bapak besar Kono dan sebagai klan pemberi wanita. Sedangkan usi Thaal dibagian utara untuk menjadi penjaga pintu pertahanan antara kerajaan, Ambenu dan Amfoan. Thaal dan Kono merupakan olif tatar yang saling menghormati. Dalam kaitan hubungan fetu mone, Kono sebagai penguasa ritual (wanita) sedangkan Thaal sebagai penguasa militer (laki-laki).

Di bagian sudut Timur laut terdapat Ablal ada 4 suku pula: dua Tefa Nabon. Di Bagian Barat Kaut terdapat Us Bais yang dikeliling 4 suku: Tua-Heni, Banu -Ponis.

18). Kerajaan Biboki Sebelum tahun 1642

a. Nama Biboki

Pendapat tentang nama Biboki menurut Yohanes Tnesi yang dikutip W. Silab W dkk 2002)¹⁰³ adalah sebagai berikut:

Kata Biboki terdiri dari 2 kata yakni Bi=di. Boki=timbangan/ukuran. Biboki artinya di tengah, pusat bumi/sentrum pulau Timor. Hal ini dikaitkan dengan mitologi nama Biboki sangat bervariasi.

Dahulu kala ada metode untuk menemukan poros tengah/pusat bumi pulau Timor. Metode untuk menentukan sesuai eksistensi Atoni Pah Meto di Biboki (ternyata metode ini juga berlaku di Maubes Insana seperti diuraikan Us Finit 2002).¹⁰⁴

Pertama: Menggunakan tali dan tangga Tuhan yang disebut : *Tufe Uisneno Elak Uis Neno*. Tufe Uis Neno adalah sejenis tali utan yang sangat kuat yang menghubungkan langit dengan bumi. Elak uis Neno adalah tangga Tuhan. Ada sebuah tangga yang menghubungkan bumi dengan langit. Setiap saat manusia bisa turun naik melewatinya. Namun usaha melalui Tufe Uis Neno, Elak Uis Neno untuk menemukan pusat pulau Timor gagal akibat ulah manusia yang menyebabkan Uis Neno memutuskan tangga tersebut.

Kedua: Pengukuran dengan metode langkah kaki Neno Bali. Neno Bali adalah seorang manusia raksasa, karena bangun tubuhnya yang besar dan tinggi mencapai

¹⁰³ Silab W dkk, 2002. Biboki, Insana dan Miomaffo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten TTU, hal..63

¹⁰⁴ Us Finit, 2002 hal. 23-35

langit. Ketika Wilayah Timor masih digenangi air, maka Neno Bali diberi tugas mengukur dalamnya air serta dapat menentukan pusatnya pulau Timor. Untuk melaksanakan tugasnya ia cuma melangkahkan kakinya dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Sehingga ia dijuluki Balineno Lakpah (Neno Bali menjelajahi daratan). Namun untuk melaksanakan tugasnya terlalu berat karena matahari bersinar sangat terik, sangat dekat dengan bumi. Belum ada kehidupan. Maka dengan kekuatan yang luar biasa Neno Bali mendorong langit ke atas bersama matahari, bulan, bintang sehingga memungkinkan manusia hidup. Namun mitos ini kiranya tidak bisa dijadikan acuan mengingat sampai dewasa ini di Timor belum ditemukan fosil manusia apalagi fosil raksasa.

Ketiga: Metoda penentuan dengan alat timbangan yang disebut Boki. Boki adalah sejenis alat timbangan yang berupa potongan kayu pendek. Biasanya dipakai untuk menyangga beban yang dibawa seekor kuda. Jika muatan belum seimbang maka boki belum dipasang. Demikian pula jika Boki ditusukkan di tanah, akan terjadi perputaran Barat ke Timur dan Timur ke Barat, Utara ke Selatan, Selatan ke Utara. Karena itu Atoni Biboki tidak hanya mengakui matahari, bulan terbit dari Timur, tetapi bisa terbit dari Barat. Hal ini lazim disebut Fuan Aknelo, Neno Aknelo karena ditikam boki di Tanah Timor. Untuk mengenang peristiwa tersebut nama kekaisaran/kerajaan pusat pulau Timor disebut Biboki yang mengandung makna di tengah atau pusatnya bumi.

Versi lain: Nama Biboki sesuai otoritas Uis Neno yang mengutus Taek neno ke daratan yang disebut Mutis Babnai, Kopan Olain, Bau bau Pah Muti, sebagai Uis Neno In Tipun In Olin. Di tempat tersebut ia dikenal dengan nama Taek Neno/Taek Funan yang juga disebut Taek Leu. Ketika Taek Neno sudah ada, Uis Neno mengutus pula Malafu Neno ke daratan yang sama tempatnya dan ia dikenal sebagai Sue Neno (Bintang Siang). Waktu pendirian kerajaan Biboki diperkirakan tidak berselisih jauh dari pendirian kerajaan Sonbai. Apalagi pengukuran mencari pusat bumi atau pulau adalah konsekwensi kepercayaan pada mitos terkait dengan klasifikasi kosmos dimana pusat kerajaan adalah pusat bumi dan pulau dalam kerangka mengacu pada rotasi kosmos terkait dengan solar sistem (Pigeaud, 1924, Nash, 1984 dalam Widiyatmika.M.dkk 2008) ¹⁰⁵. Boki yang merupakan unsur dari kayu sebagai perlengkapan pelana kuda, berarti perjalanan menurut mitos ini sudah mengenal kuda. Berarti perjalanan ini dari segi periodisasi belum terlalu lama karena kuda adalah hewan yang dimasukkan para pedagang Hindu untuk pengangkutan cendana di Timor (Ormeling, 1955).¹⁰⁶

¹⁰⁵ Widiyatmika M.dkk 2008 hal.97

Lihat Eliade M.1962. *Het gewijde en het profane*, Hilversum: Paul Brand hal 23 dalam Nash, Pieter J.M. 1984 hal 130

¹⁰⁶ Ormeling, F.J. 1955 hal. 114

Dari perkawinan Taek Neno dengan Malafu Neno melahirkan 7 raja yakni:

- a). Boki Taek tokoh yang mendirikan kerajaan Biboki ia bergelar Neno Biboki-Funan Biboki.
- b). Sana Taek, tokoh ini yang mendirikan kerajaan Insana.
- c). Mafo Taek, tokoh ini yang mendirikan kerajaan Miomaffo.
- d). Natun Taek, tokoh ini yang mendirikan kerajaan Amanatun (bandingkan dengan cerita di Amanantun bahwa leluhur mereka yang mendirikan kerajaan Amanantun adalah Muti Banunaek, (Melkisedek Taneo, 1998 dalam Widiyatmika M.dkk 2008)¹⁰⁷
- e). Bete Ana, tokoh ini yang menurunkan orang: Belu Mau, Ti Mau , Sabu Mau. (bandingkan sumber di Sabu leluhur mereka adalah Hu Kika, Miha Ngara yang datang dari arah Barat melalui laut. Dari keturunan mereka antara lain Hawu Miha. Dari Hawu Miha inilah akhirnya nama pulau Sabu (Rai Hawu) diambil (Niko L Kana, 1983_) ¹⁰⁸
- f). Buik Ikun (Us Feotsala, Tubaen Saa. Buik Ikun menurunkan Atoni Poa Metan, Mata Metan.

Dari tuturan adat makaoan di Builaran pada waktu bumi telah kering datang 10 lelaki (*mane sanulu*) datang turun dari matahari di Wehali. 4 lelaki tinggal di Wehali yang kemudian tinggal di Wewiku, Haitimuk, Dirma dan Lakekun. dan 6 lelaki pergi meninggalkan Wehali. Mereka yang pergi adalah: Loro tertua pergi ke Likusaen Baboen, seorang pergi ke Biboki, seorang pergi ke Insana, seorang pergi ke Amanuban, seorang pergi ke Amanatun dan seorang pergi ke Amarasi.

b. Raja raja yang memerintah Biboki

Dari silsilah raja/kaisar di Biboki yang dimuat oleh Silab, W dkk, (2002) ¹⁰⁹ dari kaisar pertama Biboki yang bernama Mneka Kuluan sampai kaisar terakhir Tnesi Iba (kaisar yang sekarang) terdapat 27 generasi. Tentunya gelas kaisar tidak digunakan sejak awal pemerintahan karena gelar kaisar diberikan kepada para raja di Timor pada jaman Simao Luis.

Nama-nama kaisar yang pernah memerintah Biboki menurut Silab dkk (2002) ¹¹⁰ adalah:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Mneka Kuluan | 15. Abatan Boko |
| 2. Taeke Kuluan. | 16. Tabesi Boko |

¹⁰⁷ Widiyatmika M.kk 2008 hal. 97

¹⁰⁸ Niko Kana N.L. 1983, Dunia Orang Sawu. Penerbit Sinar Harapan. 111-11115

¹⁰⁹ Silab W.dkk 2002 hal 78

¹¹⁰ Silab W dkk, 2002 hal 78

- | | |
|--|---------------------|
| 3. Ane Kuluan | 17. Tnesi Boko |
| 4. Neno Uskuluan | 18. Te'I Iba |
| 5. Tabesi Uskenat. | 19. Oenunu Tabesi |
| 6. Nila Tusala. | 20. Taek Tautpah |
| 7. Tabes Tusala | 21. Te'I Taek |
| 8. Tahoni Iba | 22. Tnesi Neon Mese |
| 9. Tnesi Tautpah.(Sanam Mnasi-Sonaf Makono). | |
| 10. Tnesi Finit | 23. Kono Usboko |
| 11. Poni Aumus. | 24. Te'i Usboko |
| 12. Poni Sespah | 25. Tnesi Usboko |
| 13. Beli Matnoni | 26. Iba Ane |
| 14. So Boko | 27. Tnesi Iba |

Yang menarik bahwa silsilah tersebut sangat sulit untuk merekonstruksi kapan Mereka memerintah , kapan awal mula berdirinya kerajaan Biboki. Pada hal salah satu indikator tokoh menjadi tokoh sejarah karena periodisasinya.

Dalam perjanjian Paravicini, Biboki tidak ikut dalam daftar para raja yang menanda tangani perjanjian tahun 1756. Hal ini disebabkan Biboki pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Wesei Wehali. Yang menanda tangani perjanjian adalah Hiacijntoe Corea raja besar Belu yang membawahi 29 wilayah. Biboki sebagai bagian dari kekuasaan raja Belu disebutkan dalam dokumen perjanjian dengan nama: Sakoenaba Baybohie (Biboki) (Tom Therik, 1995)¹¹¹ Beberapa ketentuan dalam perjanjian Paravicini sebagai imbalan perlindungan Belanda antara lain : para raja di Timor masing-masing harus menyumbangkan pasukan untuk kepentingan pertahanan Belanda di Kupang; 100 prajurit, 500 bulu kapas, 40 penunggang kuda. Para raja 2 kali setiap tahun harus mengirimkan 200 orang pada waktu musim memungkinkan untuk menjadi tenaga kerja penggali bijih emas di sungai Miomaffo dan Sungai Tepas di Amanuban (Ataupah H.1992)¹¹².

Biboki sebelum kedatangan kekuasaan kolonial Portugis dan Belanda merupakan suatu kerajaan dengan status loro di lingkungan kerajaan Wesei Wehali. Biboki dibangun oleh pendatang dari Wesei Wehali. Terdapat dua gunung yang merupakan simbol dualisme kosmis. Di bagian kaki kedua bukit terletak wilayah Oetasi. Gunung di bagian Barat disebut Oe Puah (mata air dekat pohon pinang) dan di bagian Timur

¹¹¹ Tom Therik, 1995, hal.53

¹¹² Ataupah H, 1992 hal 189

disebut Tapen Pah (pengawal kerajaan). Sebenarnya Oe Puah adalah nama sebuah mata air dekat bukit, sedangkan nama bukitnya adalah tubu Soanmuhole (Schulte Nordholt, 1971) ¹¹³. Tapenpah merupakan pusat pemujaan paling sakral. Hanya dalam kasus sangat luar biasa seperti epidemi dikorbankan babi putih atau kambing putih yang dipersembahkan untuk penebus dosa atau kesalahan dalam upacara.

Raja yang suci dan bersifat pasif yang bergelar Atupas berada pada sisi bagian Barat pusat, sedangkan raja eksekutif sebagai pelaksana yang bergelar Us Bala berada pada sisi Timur pusat. Pusat kerajaan Tamkesi yang dianggap suci ditata berdasarkan lasifikasi. Sebagai pusat geografis bumi didapati dua gunung batu dipandang sebagai bukit kembar simbol dualisme kosmis yang dimanifestasikan dalam hubungan. Klasifikasi timur barat. Gunung dibagian Timur mewakili unsur lelaki, sebagai bayang-bayang lelaki yang juga pengawal kerajaan. Di bagian barat terdapat mata air Oe Puah keduanya membentuk pah nifu (tanah air) sebagai tempat asal usul.

Karenanya raja yang sakral membangun istana di bagian barat untuk statusnya sebagai bagian wanita yang pasif ia tidak pernah meninggalkan pusat kedudukannya dan bergelar Atupas Di depan istananya di samping terdapat mata air sebagai simbol bumi, juga dibangun Neno Biboki (Surga Biboki) sebagai rumah upacara tempat menyimpan benda pusaka. Di depan istana terdapat altar sebagai pusat persembahan. Mata air yang sebagai simbol wanita dan bumi dilengkapi oleh lelaki dengan bangunan suci melambangkan surga lelaki. Di bagian Timur di bagian kaki Tapenpah tinggal lelaki yang memegang kekuasaan seluruh kerajaan. Sebagai representasi lelaki yang aktif di sisi pusat. Ia yang pergi menjelajah keluar (mone) dan ia bertugas mempertahankan tanah air serta memimpin penyerangan.

c. Sonaf (Istana)

Di bukit Tamkesi terdapat beberapa istana/sonaf. Di Tamkesi terdapat dua puncak bukit kembar yang melambangkan dualisme Kosmis yang dimanifestasikan dalam segala hubungan. Gunung yang di Timur sebagai sisi lelaki dan bayang-bayang lelaki. Sedangkan dibagian barat lambang sisi wanita dan bayang-bayang wanita (Schulte Nordholt, 1971) ¹¹⁴. Keduanya membentuk pah nifu (tanah air). Yang dipercaya sebagai tempat asal usul. Dalam kerangka ini raja yang sakral membangun istana di bagian Barat untuk perannya sebagai unsur wanita dan pasif. Ia tidak pernah meninggalkan pusat kedudukannya. Ia bergelar Atupas. Di bagian depan istana di samping mata air sebagai simbol bumi. Di bagian tersebut dibangun Neno Biboki (Surga Biboki) sebagai bangunan paling sakral dan menjadi dasar pembinaan solidaritas wilayah kerajaan. Pada tahun 1946 menurut Schulte Nordholt, 1980) ¹¹⁵ di depan bangunan ini terdapat batu pengorbanan. Mata air secara alamiah sebagai

¹¹³ Schulte Nordholt H.G.1971 hal 243

¹¹⁴ Schulte Nordholt, H.G.1971 hal. 244

¹¹⁵ Schulte Nordholt, H.G.1971 hal.246,247

simbol bumi yang dipandang sebagai unsur wanita, yang dilengkapi oleh unsur lelaki dengan bangunan keagamaan yang melambangkan surga unsur lelaki. Di bagian Timur Tapen Pah tinggal lelaki yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan eksekutif kerajaan. Salah satu tugasnya adalah mempertahankan wilayah dan mengorganisasikan para meo.

Pada bagian ini yakni: Sonaf induk yang disebut Neno Biboki (surga Biboki) merupakan bangunan paling sakral dan menjadi sumber kekuatan penguasa /kolnel. Bangunan ini terletak pada bagian paling tinggi ada pada bagian barat. Sedangkan sonaf-sonaf lain adalah: Sonaf Namnu, sonaf Unu, Sonaf Nana (di tengah), sonaf Uskenat dan sonaf Sul Nuaf (paling bawah). Di dekat sonaf agak ke bawah terdapat tiang pemujaan yang disebut *tola naek atau hau monef* dengan tiga cabang dan batu plat sebagai tempat sesaji. Tidak jauh dari hau monef terdapat batu datar agak lebar yang merupakan tempat pengorbanan. Komplek sonaf Tamkesi memiliki dua buah pintu gerbang yakni pintu matahari naik (Fai San Nionu) dan pintu matahari terbenam (Bel Sikone). Terdapat 4 mata air dan 2 dianggap paling suci yakni Haonini dan Kuluan Namnuni. Sedangkan batu keramat Tapenpah, Tamkesi, Oepuah, Pua Mes, Petu vanben, van Keun, Son Mahole.

Yang menarik dari laporan Silab W et.al (2002)¹¹⁶ kompleks Tamkesi dari bawah sampai atas sebagai bangunan berundak terdapat 7 tingkatan. Ke 7 Tingkatan dari bawah ke atas adalah:

- Tangga I Lopo Ksalna sebagai tempat Tasanut Kap Naijuf.
- Tangga II Sonaf Muni-Najufkole.
- Tangga III Sonaf Nai Ha-Mone Ha, unsur pemerintahan eksekutif.
- Tangga IV Sonaf Ana Leu, Neno Biboki-Funan Biboki In Mataen'na.
- Tangga V Sonaf Uskenat (juru bicara raja).
- Tangga VI Lopo Tainlasi –Lopo Taitoni (Tempat musyawarah).
- Tangga VII Pupna (Puncak) ada 7 bangunan:
 - a. Paon Leu
 - b. Neno Biboki
 - c. Lopo ha'o
 - d. Lopo Tasu Nai Bukae
 - e. Soan Bes'se
 - f. Soan Unu
 - g. Fatu Sonbai (tugu perpisahan) Neno Biboki-Funan Biboki dengan Sonbai.

¹¹⁶ Silab W dkk, 2002 hal. 90-91

Di atas bukit Tapenpah terdapat Ustetu, Batu pengadilan berbentuk jantung sebagai tempat eksekusi.

Parera (1971) dalam Widiyatmika dkk 2008,¹¹⁷ mengemukakan tentang Biboki sebagai berikut: Dahulu kala loro Biboki mempunyai sonaf di gunung Tamkesi. Sebagai pelayan istana tercatat Tapenpah-Us Kenat-Us Kuluan dan Us Nisoni. Loro Biboki juga bergelar Kesel. Pembantu-pembantu utama dalam pemerintahan adalah Kornel Mone Mnasi yang berdiam di Hauteas-Samala. Ke 10 kluni yang membantunya adalah Banu-Anonat- Nuku- Tunbain. Mereka dibantu 4 meo yakni: Tnesi-Aluman-Eban-Tautpah. Empat serangkai yang lain adalah: Tahaf-Nafanu-Bukifan-Taitoh. Sisanya dua kluni yang selalu bertentangan yakni: Harneno-Manlea. Berasal dari 4 meo Tnesi-Aluman-Eban-Tautpah terciptalah 4 raja (usif): Us Tusala-Us Tetu-Us Satkele-Us Pobasa. Di samping itu ada 4 penguasa yakni: Otepah-Aluanpah-Tautpah-Seonpah.

Dari 10 suku hanya Taitoh yang terbukti berkembang dan membagi diri atas 4 serangkai baru yakni: Liit-Saineno-Tebatiu- Asulan di sebelah Timur yang membagi diri atas: Muni-Sanan-Kani-Nufe. Mereka melayani pemimpin Taitoh Tuan Di sebelah Barat 4 serangkai: Bnani-Toleo-Tatoab-Liab manas. Koordinator usif Mauk-Abatan. Harneno terbagi atas bagian Harneno dan Manlea yang selalu bersaing. Harneno berpusat di Kuan feu berbahasa Dawan/Uab Meto dan Manlea berpusat di Oekusi berasal dari Fatuaruin. Ia terbagi atas ume tola dan ume meo. Segenap kerajaan Biboki dinamakan Nesi-Alunan, Teban-Tautpah. Dahulu Biboki mempersembahkan bunga hasil panen ke Wehali.

Silab.W.dkk (2002)¹¹⁸ mengemukakan pembagian wilayah Biboki disebutkan dengan istilah Klunin Boes Baat Boes terdiri atas 10 bagian yakni:

1. Us Teta: Amteme, Tsiompah, Naiobe, Ahainnai, Kaesnube (Sonamnasi/saku), Naitak, Cunino, Maet, Taekab.
2. Tautpah: Tiu, Tatoa, Kbiti, Tasekab, Mannen, Amsaku, Ambenu.
3. Us Tnesi: Natasi, Ampate, Ambone, Tulasi, Balibo, Afeanpah.
4. Us Aluman: Hanmina
5. Nafanu: Toasu, Ampolo, Amfotis.
6. Taito Tua: Atitus, Ambasan, Humoen, Aisaef, Makuntuan, Tabati, Asulan, Saeneno, Liit, Niputuan, Kuanaus, Manehat, An Muni.
7. Harneno: Besteas, Amsele, Amleu, Amnain, Anaet, Manlimas, Madopor, Oefauk, Oetpuah, Upsaen, Asaef Bepsu, Am Manfui, Amsele, Baetesneo, Amnatun, Usfahik, Santeaf, Siuk Tanmenu, Naes, Fatbea
Bukifan: Totnai, Akafa, Sibui, Kau Mnanu, Takeleb, Haumaet, Mula, Mapa, Oetpuah,

¹¹⁷ Widiyatmika M.dkk.2008., Hal 108.

¹¹⁸ Silab W dkk.2002, hal.82-84

Matbesi.

9. Suni Banuan: Loma Tamlafu, Bibaon Asuni, Tanis Oetasi, Tunu Pailasa.
10. Sifa Tua-Sifa Beatan-Salu Tahoni: Amnantun, AmsakuAmnain, Anaet, Tiu, Tatoa, Kbiti, Tasekab, Fatbea, Akbenu, Haerneno, Besteas, Amsele, Amleu, Mankinat, Mandor, Matkase, Oefauk, Oetpuah, Upsean, Amselu, Besteas Neo, Santeaf, Puus, Siuk Taumenu, Naes, Ambenu. Manehat, Aumuni, Bidasi, Makakbas (Lasiolat), Dua Mone, Niha, Fatuketi, Manlea, Ahaimus (Monemnasi), Tautpah (Afu Naijan), Naju Molo, Naju Mtan, Amtahan, Naekleu (Susne).

Bahwa para raja bawahan (usif) dan kepala suku (amaf) setiap tahun harus mempersembahkan hasil panen kepada raja tertinggi atau Atupas. Upeti sebagai bunga panen dengan istilah mausufa. Semula upeti ini hanya berupa padi dan juga cendana, namun pada akhir abad ke 17 diperkirakan jagung sudah menjadi salah satu bagian penting dari upeti. Hal ini terkait bahwa jagung yang diperkenalkan VOC dalam rangka memperbaiki bahan makanan pada tahun 1672 dengan cepat menyebar ke seluruh pulau Timor (Ormeling, 1955).¹¹⁹

2.2 Dinamika perbatasan Dalam Kancan Persaingan Wilayah Kekuasaan sampai Tahun 1810

2.2.1. Kedatangan VOC dan Pusat kedudukan VOC di Solor.

1. Benteng VOC di Solor

Portugis telah membangun sebuah benteng di Lohayong pulau Solor pada tahun 1566. Pembangunan dibiayai para pedagang cendana dari Makau.¹²⁰ Solor merupakan pusat kedudukan Portugis di Nusa Tenggara Timur. Atas permintaan Sultan Ternate, Gubernur Jendral VOC Pieter Both menginstruksikan kepada Kapten Loji Belanda di Pulau Makian bernama Apollonius Scotte untuk menyerang benteng Portugis di Solor. Apollonius Scotte berangkat dari Tidore pada tanggal 12 November 1612 dan tiba di Buton pada tanggal 17 Desember 1612, sesuai saran Sultan Ternate. Sebelum berangkat Sultan Ternate berjanji akan memberikan bantuan tambahan pasukan dan perahu kora-kora demikian pula raja Buton. Tetapi bantuan-bantuan yang dijanjikan sampai di Solor setelah benteng direbut. Apollonius Scotte berlayar dari Buton menuju Solor pada tanggal 9 Januari 1613 dengan dua buah kapal masing-masing bernama: *der Veer* dan *de Halve Maen*, dan sebuah perahu kora-kora serta pasukan bantuan dari Ternate yang sama-sama berangkat dari Maluku. Rombongan armada VOC tiba di Solor pada tanggal 17 Januari 1613. Mereka langsung menembaki benteng Portugis di Lohayong dari kapal *der Veer*. Tetapi upaya mereka untuk meruntuhkan

¹¹⁹ Ormeling, F.J., hal 106-107

¹²⁰ Ataupah H. 1922.

benteng tidak berhasil dan bahkan pasukan Portugis dalam benteng membalas dengan tembakan meriam. Pasukan yang terlanjur mendarat terpaksa ditarik kembali ke kapal. (Syarifudin Gomang, Widiyatmika M dan Tahir Luth (2008)¹²¹. Di pihak Belanda kehilangan seorang pasukan tewas dan beberapa pasukan menderita luka-luka. Penyerangan benteng dilakukan kembali pada tanggal 21 dan 29 Januari 1613. Apollonius Scotte mendaratkan pasukan yang dibantu pasukan-pasukan lokal menyerang sambil berlari. Dalam penyerangan ini mereka berhasil menghancurkan sebagian besar perkampungan dekat benteng dengan membakar rumah-rumah yang ada. Pada tanggal 5 April 1613 mereka melakukan pendaratan secara paksa dan pada tanggal 7 April 1613 pasukan penyerang menembaki bagian luar benteng yang terbuat dari kayu dan tanah kapur yang letaknya dekat sebuah dusun dengan dua buah meriam. Pada tanggal 9 April mereka mendaratkan lagi dua buah meriam buatan Perancis. Pasukan penyerang melakukan tembakan meriam yang merontokkan sebagian menara pertahanan di sudut-sudut benteng. Pasukan Portugis yang bertahan dari menara-menara ini banyak menimbulkan korban dipihak Belanda. Pasukan Apollonius Scotte melanjutkan serangan dalam beberapa hari. Apollonius Scotte mengancam akan membunuh setiap orang yang ada dalam benteng. Dalam rangka merebut benteng Lohayong, sebagai pusat kedudukan Portugis, pasukan penyerang menembaki dengan 800 tembakan meriam dari kapal. Apollonius Scotte menghabiskan separo persediaan amunisi untuk menembaki benteng Solor dengan meriam¹²²

Keadaan benteng kacau balau sehingga pada tanggal 20 April 1613 dilakukan penyerahan benteng oleh Portugis kepada Apolonius Scotte. Namun Apolonius Scotte bertidak lunak karena ia tahu armada Portugis akan segera kembali dari Timor untuk membantu. Oleh karena itu ia ingin segera menyelesaikannya sebelum kapal bantuan tiba (Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid I 1972)¹²³.

Portugis datang dari Timor. Syarat penyerahan: orang Portugis boleh membawa orang-orangnya berangkat dengan meninggalkan separo barang dagangan dan seluruh perbekalan perang. 1000 orang harus meninggalkan benteng di antaranya 81 orang kulit putih, 450 peranakan Indo Portugis. Mereka berangkat ke Malaka. Beberapa di antaranya pergi ke Larantuka. Yang pergi ke Larantuka di antaranya Pastor Augustinho de Magdalena karena ia mendapat ijin pergi ke Larantuka¹²⁴

Sebagaimana telah dicatat di depan bahwa setelah jatuhnya benteng ini pada tanggal 20 April 1613, namanya diganti menjadi Fort Henricus mengikuti nama pangeran Frederick Hendrik. Benteng ini sempat beberapa kali diserbu kemudian diduduki kembali oleh Portugis. Tetapi sejak tahun 1646 Belanda menguasai benteng

¹²¹ Syarifudin Gomang, Widiyatmika M dan Tahir Luth. 2008

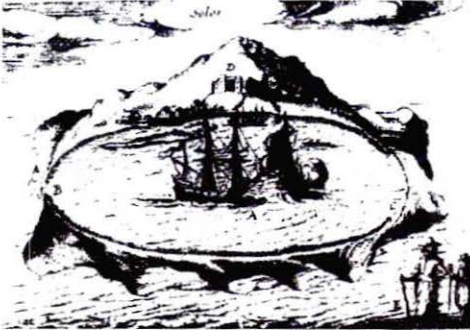
Lohayong Solor Refleksi Menuju Masa Depan, Yayasan Gewayang Tanah Keluarga Besar Lohayong, Solor, hal. 21-2.

¹²² Sejarah Gerja Katolik Indonesia jilid I, 1974 hal. 381

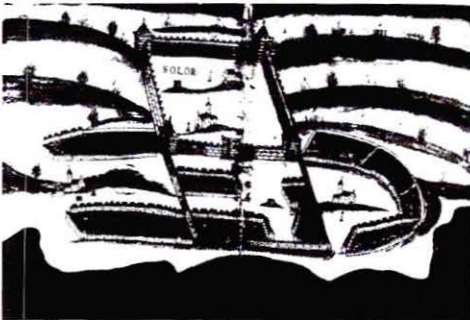
¹²³ Sejarah Gereja Katolik Indonesia Jilid I, 1974. hal. 371

¹²⁴ Sejarah Gereja Katolik Indonesia Jilid I, 1974, hal. 281

ini sampai dengan VOC dibubarkan dan dijadikan tempat untuk mengontrol jalur perniagaan di Indonesia Timur dan menempatkan seorang opsir sebagai komandan benteng. Walaupun secara resmi sudah jatuh ke tangan Belanda, Portugis dalam berbagai kesempatan, juga ingin menguasai kembali. Untuk menjaga keamanan dalam benteng VOC menetapkan seorang komandan benteng sebagai penanggung jawab.



Gambar 2.2
Benteng Fort Hendrikus, Lohayong, ¹²⁵



Gambar 2.3
Denah Fort Hendricus, Lohayong, ¹²⁶

1. Strategi perluasan dan penguasaan wilayah oleh VOC dan Portugis

Strategi yang dilakukan oleh penguasa kolonial dalam memperluas wilayah dan kekuasaan di Timor adalah:

Untuk memperoleh tempat berpijak dan mendapatkan wilayah dari penguasa lokal dilakukan beberapa hal:

- Baik VOC maupun Portugis menjalin kerja sama dengan para penguasa lokal dan mengikat dengan perjanjian. Pada awalnya perjanjian bersifat lisan kemudian perjanjian bersifat tertulis. Inti perjanjian para penguasa lokal bersedia bekerja sama dengan penguasa kolonial dan tidak menjalin hubungan dengan bangsa lain.

¹²⁵ Bareto de Resenden.635Bibliothique Nationale Paris dikutip dari Barnes 1987 hal.212

¹²⁶ Bibliothique Nationale Paris dikutip dari Barnes 1987 hal.211

- Penguasa lokal memberikan hak penguasa kolonial memanfaatkan tanah diwilayahnya untuk kepentingan penguasa kolonial, termasuk membangun benteng dan kedudukan penguasa kolonial. Bahkan dalam hal-hal tertentu penguasa kolonial melakukan perjanjian dengan licik. Kasus Pembangunan benteng Portugis di Kupang, berdasarkan tuturan rakyat Portugis dengan licik hanya meminta tanah seluas selembar kulit kerbau. Ternyata lembaran kulit kerbau tersebut diiris dijadikan tali untuk mengukur tanah yang diperlukan (Widiyatmika M.2008) ¹²⁷
- Para penguasa yang telah mengikat kerja sama diberi hadiah berupa perhiasan emas, perak, dan tongkat berkepala emas atau perak lambang kerajaan sebagai tanda kuasa. Bagi penguasa yang melakukan perjanjian dengan Belanda di samping diberikan plakat perjanjian, tongkat tanda kuasa, medali lambang kerajaan yang harus dibawa pada upacara resmi oleh raja juga diberikan bendera kerajaan.
- Khusus penguasa Portugis di samping perjanjian dan pemberian tingkat tanda kuasa, Portugis juga memberikan gelar-gelar kehormatan seperti Don, kolonel/ kornel, tenente, kapitan dsb. Para pemuda Portugis menjalin perkawinan dengan putri para tokoh kunci seperti raja dan para bangsawan sehingga lahir keturunan campuran yang disebut Kase Metan. Para raja, keluarganya dan kemudian juga warga kerajaan dibaptis menjadi pemeluk agama katolik oleh para padri Portugis.
- Bagi para penguasa lokal/raja dan tokoh-tokoh lokal seperti para panglima perang/meo yang tidak mau tunduk di lakukan paksaan dengan perang. Para tokoh yang kalah kemudian melakukan perjanjian atau diasingkan ke tempat lain. Bahkan di kalangan penguasa Portugis yang dikenal kejam adalah capitao mor Simao Luis bertindak sangat kejam dan brutal bagi yang tidak mau tunduk. Penguasa raja/usif Pitai yang tidak mau tunduk ditangkap kemudian dibunuh dan badannya digantung, tubuhnya dicincang dan dipaksa dimakan dan darahnya diminum oleh anak buah raja. Wanita dan anak-anak dibunuh. Akibatnya terjadi pengungsian besar-besaran ¹²⁸
- Sering para penguasa kolonial dengan akal yang licik menipu bahkan memanfaatkan pendekatan dengan menggunakan adat dan tradisi lokal. Dalam perjanjian yang dilakukan dengan upacara kebesaran bahkan dengan dentuman meriam, dilakukan sumpah suci/sumpah darah bagi para raja yang ikut menanda tangani perjanjian (sumpah darah adalah sumpah sakral berdasarkan adat karena para peserta sumpah darah harus meiris salah satu jari agar meneteskan darah yang ditampung bersama-sama dan dicampur

¹²⁷ Widiyatmika M.2008 hal.44

¹²⁸ Middelkoop.P.1968. The Group and the Question of Kase Metan or Overseas Black Foreigners, or Migrations of Timorese Group. International Arcives of Ethnography, vol II, Leiden.E.J.Brill hal 77

dengan sopi untuk diminum bersama-sama. Hal ini menandakan para peserta yang meminum darah bersama sama dipercaya darahnya masing-masing telah masuk ke darah peserta bersama-sama dan pantang mengkhianti perjanjian. Bagi yang melanggar dipercaya akan kena tulah leluhur dan akan mati.

- Pagi para raja yang menanda tangani perjanjian juga dalam kasus-kasus tertentu harus menyediakan tenaga kerja untuk kepentingan keamanan dan tenaga kerja yang diperlukan bagi kepentingan kolonial. Dalam kasus perjanjian Paravicini para raja dari Rote dan Sabu harus menyediakan pasukan berkuda dan infantri setiap tahun sejumlah dan raja lainnya menyediakan tenaga kerja masing-masing 100 orang¹²⁹

2. Pembangunan benteng Portugis di Kupang

Portugis pertama kali mendarat di pulau Timor pada tanggal 6 Januari 1514¹³⁰ Namun pada waktu itu belum banyak kegiatan yang dilakukan oleh Portugis. Kapan sebenarnya Portugis melakukan aktivitas di pulau Timor. Berdasarkan sebuah tugu di Lifao pada tanggal 18 Agustus 1515 Portugis telah sampai di Timor¹³¹. Di tugu tersebut terdapat tulisan Portugis: *A Qui Tambenu e Portugal Aqui Desembar Caram Os Portugues Em XVIII DE Agosto De MD XV*, artinya : Di sinipun wilayah Portugis, disini mendarat orang-orang Portugis pada tanggal 18 Agustus 1515. Sebenarnya tugu tersebut sebagai tanda penghormatan atas terbunuh nya 3 orang Padri korban pertempuran di Lifao yang melibatkan seorang raja dari Alor¹³². Pada tahun 1515 Portugis telah mengadakan kontak dengan Flores, Solor dan Timor. Pada tahun 1520 Portugis telah membuat pemukiman di Lifao¹³³.

Sekitar tahun 1620 P.Antonio S Jacinto dikirimkan ke pulau Rote. Dia tinggal disana beberapa tahun untuk menyebarkan agama katolik. Namun dia kurang berhasil dan tidak betah tinggal di pulau Rote karena gangguan para gadis dan wanita yang kerap kali berkunjung kepadanya. Ia kemudian dengan sebuah perahu kecil berlayar ke pulau Timor dan mendarat di Batuputih. Ia membaptis raja Amabi dan rakyatnya. Kemudian Padri Antonio S Jacinto bekerja di Amarasi selama 6 tahun. Ia membaptis raja Amarasi dan rakyatnya. Raja Amarasi yang pertama dibaptis oleh Padri Antonio S Jacinto bernama Dom Agustino (*Rais Jam*), sedangkan raja Amabi bernama Don Sebastiao yang juga kemungkinan bernama Saroro Neno atau raja sebelumnya bernama Funan. Sejak itu Amabi dan Amarasi menjadi sekutu Portugis. Sumber lain yang dikutip Hagerdal (tanpa tahun) tokoh padri yang membaptis raja

¹²⁹ Fox,J.J.1977 hal.114.

Lihat Widiyatmika M.2010 hal. 91

¹³⁰ Timor: Pequena Manografia, 1970.Agencia Geral do Ultramar.,Lisboa hal.57

¹³¹ Ataupah H.1995 hal. 154

¹³² Widiyatmika M.2010. Kupang Dalam Kancan Persaingan Hegemoni Kolonial Tahun 1653-1917, Pusat Pengembangan Madrasah NTT.Hal.15

¹³³ Parimartha ,I Gede.2002.hal.91-92.

Amabi dan Amarasi adalah Padri Rafael de Vega. Mereka dikirimkan oleh pimpinan padri Dominikan di Solor bernama Miguel Rangel pada tahun 1630¹³⁴.

Pater Antonio S. Jacinto pada waktu berkunjung ke Kupang ingin membangun sebuah benteng kecil bagi Portugis. Ia berhasil membuat kontrak dengan raja Kupang yang bernama Dom Duarte dimana pada waktu itu raja Kupang beserta rakyatnya menyatakan sebagai kawula Portugis. Isi perjanjian antara lain: Pater diperbolehkan mendirikan benteng dengan sebuah gereja. Kapal-kapal bangsa lain dan kapal Islam tidak diperbolehkan masuk pelabuhan Kupang. Disebutkan bahwa raja yang memerintah pada waktu itu masih buta huruf. Oleh karena itu sewaktu menanda tangani perjanjian pada tanggal 25 Desember 1645 membuat tanda salib di bawah naskah kontrak¹³⁵.

Disebutkan dalam cerita rakyat bagaimana Portugis mendapatkan sebidang tanah untuk membangun benteng dengan cara yang licik. Portugis meminta sebidang tanah kepada raja Kupang yang kebetulan tinggal di Buni Ana di dekat muara sungai Kupang. Karena Buni Ana juga digunakan sebagai tempat penjualan cendana maka ia juga dinamai *Kai Salun*. Dalam cerita rakyat disebutkan Portugis sewaktu menghadap raja Kupang yang bernama Lahi Kudang Laiscodath I hanya meminta tanah seluas kulit kerbau. Raja Kupang tidak berkeberatan menjual tanahnya. Ternyata di balik permintaan tersebut Portugis berlaku curang karena kulit anak kerbau yang dijadikan ukuran luas tanah calon benteng tersebut bukan digelar atau dihamparkan di tanah, tetapi kulit anak kerbau tersebut diiris kecil tipis memanjang menjadi sebuah tali dari kulit kerbau yang panjang. Dengan tali kulit kerbau itulah tanah yang akan dijadikan tempat membangun benteng diukur dengan cara membentangkan tali tersebut sehingga hasilnya cukup luas¹³⁶. Pater Antonio S Jacinto membangun sebuah benteng kecil hanya cukup untuk menampung 3-4 orang saja. Benteng dibangun pada tahun 1642 sumber lain menyebutkan pembangunan Benteng berlangsung pada tahun 1647. Pater Antonio Jacinto tahun 1648 dipanggil pulang ke Goa. Kapten Major Fransisco Carneiro mengambil alih benteng. Sumber Sejarah Gereja Katolik Indonesia menyebutkan kapten Portugis yang datang bernama Kapitan Jendral Joao Caleca Tenreiro. Namun kemudian benteng ditinggalkan karena masalah intern¹³⁷. Pater Antonio S Jacinto sebelumnya pada tanggal 24 Juni 1641 telah mempermandikan ratu Mena dengan putra mahkotanya. Putra mahkota diberi nama D.Joao. Dari Mena Pater Antonio S Jacinto bersama pater lainnya pergi ke Lifau. Pada bulan Juli 1641 Pater Antonio S Jacinto memandikan ratu yang sudah janda beserta putra mahkotanya yang diberi nama Dom Pedro. Pada tahun 1657 Lifau menjadi sekutu Portugis. Namun raja Don Pedro I wafat pada tahun 1670. Pada waktu upacara pemakamannya terjadi keributan sehingga terdapat misionaris Portugis yang tewas.

¹³⁴ Widiyatmika M.2007b hal 186

Lihat Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid I.1974 hal 367

¹³⁵ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid I.1974 hal 395

¹³⁶ Widiyatmika M.2010. hal.44

¹³⁷ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid I 1974 hal 395

Keributan terjadi ketika misionaris berusaha mencegah upacara pemakaman sesuai dengan adat kepercayaan. Raja baru di Lifau/Ambenu yang telah diangkat menggantikan Don Pedro khawatir akan terjadi balas dendam dari pihak Portugis. Oleh karena itu ia mengirimkan putranya ke Kupang mencari perlindungan¹³⁸

3. Pembangunan benteng VOC di Kupang

Laporan Appolonius Scotte pada tanggal 27 Februari 1613 mengirimkan Willem Jacobz dengan kapal Halve Moon yang dikawal perahu kora-kora ke Timor untuk melawan Portugis. Duarte Barros 15 menyebutkan: kapal Halve Moon berangkat ke Timor pada tanggal 4 bulan Juni 1613. Appolonius Scotte melaporkan bahwa tujuan ke Timor ingin melakukan perjanjian dengan para raja di pedalaman Timor. Ia mendarat di Mena dan ingin bertemu raja Mena dan raja Asson. Ia mau mencoba menerapkan sistem perjanjian seperti yang diterapkan terhadap raja di Ternate, Buton, dan Solor. Ia meminta membeli cendana kepada raja. Kepada raja ditawarkan barang dagangan yang dibawa sebagai hadiah. Raja kemudian menawarkan agar kapal Halve Moon memuat cendana. Scotte juga menawarkan kepada raja Mena untuk membangun benteng. Pada waktu berlayar Appolonius Scotte dibantu para penerjemah termasuk Jean G. de Vriye. Ikut bersama Appolonius Scotte 2 agen bernama William Jacobz dan Melis Andries yang mengadakan kontak dengan Amanuban (Barros, 1984)¹³⁹. Pada waktu itu Appolonius Scotte juga bertemu dengan rombongan raja Kupang. Raja menawarkan sebidang tanah untuk membangun benteng dan raja beserta rakyatnya ingin memeluk agama kristen. dengan raja Amanuban. Namun tawaran tersebut tidak ditanggapi secara serius. Ternyata niat Scotte membangun benteng di Kupang pada tahun 1613 ditentang oleh salah seorang Staff VOC yang bernama A van de Velde. Karena ia berpendapat lebih baik mereka harus memikirkan menghadapi Portugis di Solor. Kupang juga dipandang berada di laut terbuka dan tidak punya pelabuhan yang baik, para raja di Timor masih animis dan belum mengenal Tuhan, serta Portugis telah lama menguasai wilayah tersebut. Appolonius Scotte menempatkan seorang koopman Jan Gijsbertszoon de Vrije di Timor untuk mengatur perdagangan cendana dan lilin. Tetapi pedagang tersebut meninggal di Fatumean di Pantai Selatan Timor dalam tahun 1615 (Schulte Nordholt, 1971)¹⁴⁰. Sampai 40 tahun kemudian VOC tidak mempunyai kedudukan tetap di Kupang. Namun kenyataan beberapa kapal dagang VOC datang secara reguler ke Kupang antara lain tahun 1626 sampai 1637¹⁴¹

Kemudian diketahui ada upaya VOC merebut benteng Portugis di Kupang pada tahun 1642 tetapi baru berhasil tahun 1646. Laporan Dagregister tahun 1647/1648 menyebutkan Willem van der Beeck dikirimkan ke Solor dengan sebuah yacht untuk

¹³⁸ Hagerdal, Hans. Tanpa Tahun hal. 20

¹³⁹ Barros, Jorge Duarte. 1984 hal. 28

¹⁴⁰ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 166

¹⁴¹ Schulte Nordholt, H.G. 1971 hal 166

mempelajari berita bahwa Portugis telah membangun sebuah benteng di Kupang. Ketika ia singgah dan menyelidiki berita tersebut bahwa VOC berkepentingan menguasai Kupang karena Kupang berdasarkan laporan Boxer, disebutkan Kupang merupakan tempat yang cocok dan pelabuhan terbagus dan kunci yang strategis di Pulau Timor. Hogendorp dalam laporannya pada abad ke 18 menyebutkan bahwa pelabuhan terbaik di Timor adalah Kupang dan Dili. Di sepanjang Pantai banyak pedagang Melayu dan pedagang asing lain yang datang. Maka dapat dimengerti kalau Kupang menjadi sasaran Kompeni Belanda untuk menjadikan pusat kekuasaan di Nusa Tenggara¹⁴². Berdasarkan perjanjian Den Haag tanggal 12 Juni 1642 antara Belanda dengan Portugis disebutkan orang-orang Belanda boleh datang ke Pulau Bali dan Lombok, sedangkan pulau Sulawesi dan Timor terbuka bagi orang-orang Belanda dan Portugis¹⁴³. Ternyata kemudian VOC berhasil merebut lokasi yang disebut benteng di Kupang hanya sebuah rumah untuk 3 atau 4 orang saja. VOC kemudian berhasil mengambil alih benteng Kupang tanpa perlawanan dari Portugis. Pada tahun 1653 VOC mulai serius melakukan kegiatan di Timor. Pada tanggal 2 Februari tahun 1653 Kapten Johan Burgers mulai membangun benteng di bekas benteng Portugis. Pembangunan benteng Concordia mendapat bantuan para penguasa Sonbai dan Amabi. Sedangkan raja Kupang ogah-ogahan mengerahkan rakyatnya membantu karena mereka berpendirian tugas membantu pembangunan benteng adalah tugasnya raja Amabi dan raja Sonbai. Benteng yang telah selesai dibangun diberi nama Fort Concordia (Middelkoop.P.1968)¹⁴⁴. Benteng Concordia terletak di dekat muara sungai Kupang, di atas tanah Karang pada ketinggian antara 5-10 m dari permukaan Laut. Secara astronomis Benteng Concordia terletak pada garis 10 derajat 81/2 deti LS dan 123 derajat 35 detik Bujur Timur 113. Kapten Johan Burger meninggalkan benteng menuju Solor dengan meninggalkan sepasukan kecil di benteng Concordia. Benteng Concordia tersebut juga dikenal dengan nama *Maadu Lasi*¹⁴⁵. Benteng Concordia di Kupang dihuni personil VOC, budak, orang-orang mardijker, Burger

Tidak ada informasi bagaimana bentuk benteng, berapa luas, bangunan apa saja yang ada di dalamnya. Laporan Dampier yang kebetulan singgah di Kupang pada tahun 1699 menyebutkan bahwa di dalam tembok benteng terdapat sebuah gereja kecil, dalam benteng tinggal 50 prajurit kulit putih dan beberapa prajurit pribumi. Para prajurit pribumi menanam sayur di kebunnya di luar benteng dan menjadi suplai kebutuhan sayur dalam benteng. Benteng yang terletak di atas karang di muara sungai Kupang sangat strategis. Namun pelabuhan Kupang selalu menghadapi masalah pada musim angin Barat yakni angin dan gelombang yang besar. Belanda juga mencadangkan

¹⁴² Widiyatmika M.2010 hal 47

¹⁴³ Widiyatmika M.2010 hal 47.

¹⁴⁴ Middelkoop P.1968.Migrations of Timorese Goups and The Question of the Kase Metan or Overseas Black Foreigners E.J.Brill,Leiden hal.97

¹⁴⁵ Middelkoop P.1968 hal. 98

dua teluk untuk berdagang dengan penduduk Pantai Timor ¹⁴⁶.



Gambar 2.4 perahu di pelabuhan Kupang

4. Portugis Hitam Sebagai Persaing VOC

a. Lahirnya Portugis Hitam

Strategi Portugis dalam memperluas wilayah adalah di tempat-tempat strategis dibangun benteng. Portugis juga melakukan politik perkawinan dengan anak tokoh-tokoh kunci seperti anak para raja dan bangsawan setempat. Di daerah-daerah yang telah dikuasai disebarkan kegiatan misionaris yakni menyebarkan agama Katolik yang diawali para raja dan keluarganya.

Kebijakan perkawinan campuran sebenarnya bermula dari strategi kependudukan yang diusulkan Alfonso da Albuquerque sebagai raja muda Portugis di Goa. Untuk mengatasi masalah kependudukan di daerah-daerah taklukan di seberang lautan dianjurkan agar para pemuda Portugis kawin dengan wanita lokal. Dengan demikian keturunannya akan menjadi warga Portugis dengan demikian akan mengatasi kekurangan tenaga kerja yang pada waktu itu kondisi penduduk Portugis yang tidak banyak, tidak memungkinkan mengirimkan seluruh kebutuhan tenaga kerja di daerah jajahan dari Portugis. Kebijakan tersebut semula ditolak, namun sepeninggal Alfonso da Albuquerque, secara diam-diam kebijakan tersebut dijalankan di daerah-daerah jajahan. Dari perkawinan ini lahirkan keturunan campuran (*mestisos*) yang dikenal pula dengan istilah *topasses* atau *Larantuqairos*, atau *kase metan*, *Noemutyer* di pulau Timor dan *Sina nggeo* di pulau Rote. Portugis juga mengembangkan persahabatan atau aliansi dengan para penguasa lokal yang telah memeluk agama Katolik. Para penguasa lokal ini diikat dengan perjanjian, diberi tongkat dan gelar-gelar seperti Don, Kornel, Kaisar, Tenente, dsb ¹⁴⁷

¹⁴⁶ Widiyatmika, M. 2010 hal. 48

¹⁴⁷ Ataupah, H. 1992 hal. 165

b. Istilah Portugis Hitam

Istilah Portugis Hitam (*Black Portuguese*), *Tupasses* dan *Kase Metan* digunakan untuk menyebutkan keturunan campuran Portugis dengan penduduk lokal. Kaum keturunan campuran tersebut sering juga disebut *Larantuqairos* (orang Larantuka) dan *Noemutiyer* (orang Noemuti) Middelkoop (1968).¹⁴⁸ Portugis sebagai penganut paham kolonialisme kuno dalam mengembangkan wilayah jajahan mengemban tiga misi utama yakni: *gold, glory, gospel* atau *feitaria, fortaleza* dan *a igreja* (Tom Therik, 1995)¹⁴⁹. Kebijakan politik Portugis yang mendorong lahirnya keturunan campuran dilandasi kebijakan kependudukan yang dirintis oleh Alfonso da Albuquerque. Seorang tokoh yang menjadi pemimpin pasukan Portugis dalam merebut bandar Malaka pada tahun 1511. Ia kemudian menjabat sebagai raja Muda Portugis berkedudukan di Goa, India. Mengingat wilayah jajahan Portugis di seberang lautan (*Ultra mar*) semakin banyak dan berpotensi besar mendatangkan kekayaan serta kejayaan, semakin banyak dibutuhkan tenaga pria dewasa untuk bekerja sebagai pedagang, pelaut dan awak kapal, pegawai pemerintah termasuk prajurit, pastor dan pemukim tetap. Pada hal penduduk Portugal amat sedikit. Menurut da Silva Rego yang dikutip Ataupah¹⁵⁰. Kekurangan tenaga pria dewasa dapat dipenuhi dengan jalan:

Sedapat mungkin hanya dikuasai dan dipertahankan daerah-daerah strategis dan atau yang banyak sumber daya alam dan manusia yang menguntungkan. Alfonso de Albuquerque sebagai raja muda Portugis di Goa mengemukakan gagasan dan memprakarsai perkawinan pemuda-pemuda Portugis dengan wanita-wanita India dengan harapan agar keturunan para pemuda itu kelak menghuni daerah jajahan, mempertahankannya, mengolah tanahnya dan memanfaatkan berbagai sumber daya alam dan manusianya demi kejayaan mahkota Portugal dan gereja.

Mula-mula gagasan Alfonso de Albuquerque tersebut ditentang oleh banyak pemimpin Portugis. Tetapi setelah ia meninggal dunia, gagasan dan prakarsanya ditetapkan diterima secara resmi oleh raja Portugal melalui suatu *regimento* atau ordonansi untuk diperlakukan di semua jajahan Portugis di seberang lautan. Ordonansi yang dikeluarkan dalam dasa warsa kertiga abad ke 16 menyebabkan terciptanya orang peranakan Portugis yang dinamakan *Mestizo* atau nama lainnya. Di Nusa Tenggara Timur keturunan campuran Portugis dengan wanita lokal disebut dengan istilah: *Kase Metan, Portugis Hitam, Tupasses, Sinanggeo*. (Middelkoop, 1968)¹⁵¹ Di antara kelompok yang dikategorikan sebagai *Kase metan* adalah kelompok yang disebut *Larantuqairos* (orang Larantuka) dan *Noymutier* (orang Noemuti).

Runtuhnya bandar Malaka pada tanggal 14 Januari 1641 ke tangan VOC sangat

¹⁴⁸ Middelkoop P.1968. hal 96

¹⁴⁹ Tom Therik. 1995 hal 60

¹⁵⁰ Ataupah.H.1992 hal. 152

¹⁵¹ Middelkoop P.1968 hal. 100

berpengaruh terhadap berkembangnya keturunan campuran Portugis dengan penduduk lokal yang juga dikenal sebagai orang Larantuka (*Larantuqairos*). Bandar Malaka yang dikuasai Portugis sejak tahun 1511, tumbuh pesat sebagai pusat kedudukan Portugis di Asia Tenggara, pusat perdagangan dan pusat agama Katolik. Pada tahun 1641 di Malaka berdiam kurang lebih 20.000 orang Katolik. Jatuhnya bandar Malaka ketangan VOC menyebabkan orang Katolik harus keluar dari Malaka dan yang tinggal hanya 1.361 saja. Orang-orang katolik yang tersisa itupun diperintahkan Belanda meninggalkan Malaka. Pada tahun tersebut orang Katolik yang mengungsi ke Makasar mencapai 3000 orang. Pasca kejatuhan Bandar Malaka, Makasar berkembang sebagai bandar yang ramai juga menjadi pusat kegiatan Katolik¹⁵²

Adanya kebijakan politik terbuka dari Sultan Hasanudin menyebabkan bandar Makasar berkembang pesat. Para pedagang asing dari berbagai bangsa seperti Inggris, Portugis, Spanyol bebas berdagang di Makasar. Kenyataan ini dianggap akan menjadi saingan dan membahayakan kepentingan Belanda. Oleh karena itu pecah perang antara pedagang asing di Makasar dengan VOC tahun 1653. Sultan Hasanudin membantu lawan-lawan Kompeni Belanda. Tahun 1653 dan tahun 1660 diadakan perjanjian antara VOC dengan Sultan Hasanudin. Dalam perjanjian tersebut Sultan Hasanudin tidak akan mengijinkan orang Portugis tinggal di pelabuhan Makasar. Dalam waktu 1 tahun orang Portugis harus diusir dari Makasar. Namun masih ada orang Portugis yang tetap tinggal di Makasar yakni saudagar kaya raya Fransisco Vierra de Vigueirredo. Ia kawin dengan saudara perempuan Sultan yang telah memeluk agama Katolik bernama Dona Jasinta da Costa. Ketika istrinya wafat ia menikah lagi dengan saudara perempuan Sultan yang lain bernama Dona Catarina de Noronha (Antonio Pinto da Franca, 2000)¹⁵³. Pada tahun tahun 1665 saudagar Portugis kaya raya ini juga harus meninggalkan Makasar.

Orang-orang Katolik dari Malaka yang mengungsi ke Makasar kemudian juga harus meninggalkan Makasar menuju Larantuka. Keturunan pengungsi dari Malaka inilah yang melahirkan orang Larantuka yang disebut *Larantuqairos* yang merupakan keturunan campuran yang dikenal pula dengan sebutan Portugis Hitam atau *Tupasses*. Mereka tinggal di Larantuka, Konga dan Wure (da Franca, 2000).¹⁵⁴ Mereka kemudian juga pergi ke Lifau di pulau Timor Kelompok Portugis Hitam atau *Tupasses* yang merupakan keturunan campuran Portugis dengan penduduk pribumi pada umumnya telah menganut agama katolik dan menggunakan nama-nama Portugis seperti: da Costa, da Hornay, da Silva, da Cruz, Fernandes, Parera, Melo, Gonzalves, Diaz, de Rosari dan sebagainya. Pemimpin Portugis Hitam atau *Kase Metan* yang sangat menonjol adalah keluarga da Hornay dan da Costa. Dalam sejarah di Timor mereka dikenal dengan istilah *Kosat Olnai*

¹⁵² Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid I 1974 hal 318-321

¹⁵³ Pinto da Franca, Antonio 2000. Pengaruh Portugis di Indonesia. Pustaka Sinar Harapan Jakarta hal. 29

¹⁵⁴ Pinto da Franca, Antonio 2000 hal. 69-71

Lihat Widiyatmika M.2010 hal55

yang merupakan gabungan dua keluarga yakni da Costa dan da Hornay. Seorang tokoh bernama Matheus da Costa adalah seorang putra pedagang Portugis di Malaka yang kawin dengan putri usif Amanuban (Schulte Nordholt, 1971)¹⁵⁵ Antonio da Hornay putra Yan de Hornay (Joao de Ornay) seorang bekas *opperhoofd* VOC di pulau Solor yang membelot ke pihak Portugis bersama-sama bekas komandan benteng Solor Thomas Dayman di Larantuka pada tahun 1629. Namun tidak lama kemudian Thomas Dayman wafat. Sedangkan Yan da Hornay kawin dengan putri sulung usif Ambenu yang dibaptis pastor Antonio de Sao Jasinto dan menetap di wilayah kekuasaan mertuanya dan menguasai wilayah sekitar pelabuhan Lifao. Namun baik da Costa maupun da Hornay mereka sama-sama kawin dengan putri raja Ambenu di Oekusi. Menurut Spillet dalam Hagerdal (tanpa tahun)¹⁵⁶ putri raja Benu yang kawin dengan Dominggus da Costa bernama Filomena Benu da Cruz. Adiknya bernama Anita Benu da Cruz kawin dengan Ugo da Costa. Yan de Hornay mempunyai 2 orang putra yakni Antonio da Hornay dan Fransisco de Hornay. Sesudah Yan de Hornay wafat jandanya kawin dengan seorang Indo dari Macao. Kedua anak laki-lakinya tumbuh besar di Larantuka. Anak sulung Antonio da Hornay dikenal sangat cakap, cekatan, bersemangat. Sedangkan adiknya hidup di Larantuka (Sejarah Gereja Katolik di Indonesia, jilid I, 1974)¹⁵⁷. Antonio da Hornay tumbuh menjadi pemimpin sebuah pasukan orang Larantuka dalam operasi melawan pasukan Belanda.

Portugis hitam atau *kase metan* mendapat julukan demikian karena dahulu terdapat kebiasaan orang Portugis menggunakan topi hitam dan pakaian hitam. Istilah daerahnya dikenal dengan sebutan *kaes metan soib metan* (Schulte Nordholt, 1971)¹⁵⁸. Kediaman utama kaum *Kase metan* atau *tupasses* adalah di Larantuka, Konga, Wure, Oekusi (Lifao, Nunuhenu, Tulang Ikan atau Tulicao, Animata dan Noemuti. Keluarga da Costa dibedakan dua yakni da Costa yang di Lifao disebut da Costa Air atau *Kosat Oe* sedangkan da Costa yang di Noemuti disebut da Costa darat atau *Kosat meto*. (Ataupah, 1992)¹⁵⁹

Pada waktu pusat kedudukan Portugis dipindahkan ke Larantuka karena benteng Solor jatuh ketangan VOC kembali pada tahun 1646, pemimpin resmi Portugis adalah Kapitan Jenderal Joao Caleca Tanreiros. Sedangkan kelompok Portugis hitam/*tupasses* yang pertama di Larantuka adalah seorang pater Dominikan bernama Agostinho de Magdaleno. Kemudian Simao Luis ditunjuk sebagai captain mayor di Timor dengan kedudukan di Lifao. Pada tanggal 25 September 1658 Simao Luis melakukan serangan mendadak ke kerajaan Sonbai. Kamp di Mollo yang merupakan kamp pasukan Amabi, Sonbai dan VOC diserang dan dikepung selama 4-5 hari. Raja Amabi yang gemuk dan saudara lelakinya tewas dalam pertempuran

¹⁵⁵ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 174

¹⁵⁶ Hagerdal, Hans hal 130

¹⁵⁷ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid I 1974 hal.386

¹⁵⁸ Schulte Nordholt H.G. 1971 454

¹⁵⁹ Ataupah H. 1992 hal.454

bersama 4000-5000 penduduk. Pemimpin Sonbai dapat ditangkap dan dipenjara oleh Portugis (Hagerdal Hans) ¹⁶⁰

Simao Luis membawahi dua tokoh Portugis hitam Antonio da Hornay dan Matheus da Costa. Simao Luis menjabat sebagai pimpinan Portugis sampai tahun 1664. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat kejam. Pada masa kepemimpinannya banyak penduduk melarikan diri karena kerja rodi yang berat di Nunuhenu untuk membangun bendungan dan membuat persawahan.. Di samping kerja rodi di Nunuhenu kemudian pada tahun 1702 sekitar 200 orang dengan 2 orang pangeran pribumi membantu berkerja untuk membangun benteng Lifao. Simao Luis mencincang usif Pitay, menggantung tubuhnya dan memaksa rakyatnya meminum darah dan memakan dagingnya sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani menentang Portugis. Akibatnya kawula Pitay dan Sonbai mengungsi ke Kupang (Middelkoop 1968).¹⁶¹

Kekacauan dan kekalutan akibat kekejaman Simao Luis diupayakan diimbangi dengan kebijakan membagi bagikan tongkat Simao Luis kepada para usif yang mengungsi sebagai tanda pengenalan sebagai pihak yang berhak mengumpulkan cendana dan lilin dan dijual kepada Portugis. Ia juga menghadiahkan gelar-gelar: Keser, Kornel, Mayor, Kapitan.¹⁶² Pada tahun 1664 Kekosongan hegemoni politik di Timor pasca kehancuran liurai Sonbai dan Maromak Oan memberi kesempatan Portugis hitam atau kase metan menggantikan kedudukan dalam percaturan politik di Timor. Simao Luis wafat dan sebagai gantinya ditunjuk Antonio da Hornay sebagai captain mayor di Timor. Pengangkatannya berkat bantuan seorang pedagang Portugis kaya raya yang menguasai perdagangan cendana dari Timor, Solor, Makasar, Malaka, Macao dan Pantai Coromandel di India. Pengangkatannya mendapat protes dari saingannya Matheus da Costa bahkan Matheus da Costa melakukan perlawanan.¹⁶³

Karena pengaruhnya yang kuat para pejabat Portugis yang diangkat tidak berfungsi, dengan demikian Matheus da Costa praktis menjalankan tugas-tugas sebagai kapitan Mayor di Timor. Karena ia mampu menjalankan tugas dengan baik, raja Muda Portugis di Goa membatalkan pengangkatan Jose de Melo de Castro sebagai kapitan Jendral di Timor. Keadaan berlangsung sampai dengan kematian Matheos da Costa pada tahun 1673. Kematian Matheus da Costa menyebabkan Antono da Hornay menjadi penguasa tunggal di Timor. Ia aktif berdagang cendana tidak saja dengan Portugis tetapi juga dengan VOC di Batavia. Ia menjadi tokoh yang kaya raya. Karena kekayaannya melimpah ia mampu menyumbang kepada raja muda Portugis di Goa setiap tahun 23.000 xarafin (Schulte Nordholt, 1971).¹⁶⁴

¹⁶⁰ Hagerdal Hans, 39--30

¹⁶¹ Middelkoop.P.1968 77

Lihat Ataupah H.1992 hal. 160

¹⁶² Ataupah H.1992 hal 165

¹⁶³ Schulte Nordholt H.G.1971 hal. 173

Lihat Hagerdal Hans 121-130

¹⁶⁴ Schulte Nordholt H.G.1971 hal. 174,175

Kekayaannya melimpah dan memiliki berpikul-pikul emas murni, perhiasan dari Cina dan permata yang diperoleh dari berdagang cendana. Ia bertindak tangan besi sehingga sangat ditakuti para raja di Timor dan Portugis. Ketika raja muda Portugis di Goa bernama Conde de Alvares mencoba mengangkat gubernur baru tahun 1681-1686 bernama Joao Antunes Portugal dapat digagalkan dengan menentang kedatangan gubernur baru di Larantuka tidak boleh mendarat dengan tidak memberi kayu api dan air, serta tidak sudi menerima surat pengangkatan gubernur asing yang tidak tinggal di Timor. Beberapa kali raja muda Portugis mencoba mengangkat pejabat baru tetapi selalu gagal karena takut kepada Antonio da Hornay. Antonio da Hornay wafat tahun 1695.¹⁶⁵

Antara keluarga da Costa dan da Hornay walaupun saling bersaing, tetapi juga saling membutuhkan. Persaingan tidak selalu menjadi permusuhan karena adanya upaya perbaikan hubungan melalui perkawinan. Domingus da Costa I putra Matheus da Costa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam politik dan militer di Timor pada tahun 1697—1722 kawin dengan seorang putri raja Ambenu bernama Filomena Benu. Ia juga menjalin hubungan keluarga dengan Fransisco da Hornay II karena Fransisco da Hornay II mengawini putri Domingus da Costa I yang bernama Dona Agostinha. Sedangkan Domingus da Costa I di samping memiliki seorang putri yang kawin dengan Fransisco da Hornay II, ia juga memiliki putra bernama Gaspar da Costa III dan Domingus da Costa II dan Antonio da Costa. Gaspar da Costa III menjabat sebagai tenente jendral Portugis Hitam di Timor tahun 1734-1749. Sedangkan Domingus da Costa II memegang kekuasaan tahun 1757-1795 (Hagerdal).¹⁶⁶ Fransisco da Hornay II lebih banyak tinggal di Larantuka dan Lifao. Ia oleh VOC dijuluki pula sebagai raja Oekusi tahun 1757, ia juga disebut Tua Amu. Sedangkan Antonio da Costa dijuluki raja Noemuti (Haga :1882).¹⁶⁷

c. Noemuti sebagai pusat kekuasaan Kase Metan/Portugis Hitam di Timor.

1). Berdirinya Kota Noemuti

Serangan Fransisco Fernandes atas pusat kedudukan raja Wewiku Wehali yang bergelar Maromak Oan, dominasi politik yang sebelumnya dipegang Maromak Oan dan Liurai Sonbai runtuh dan tidak mampu bangkit kembali seperti semula (Schulte Nordholt, 1971).¹⁶⁸ Ataupah (1992).¹⁶⁹ mengungkapkan keruntuhan Wesei Hehali sebagai *ai dadoko ma ai kae koli* (pohon beringin besar lagi rindang yang telah kehilangan daunnya dan pohon besar yang bersedih) karena mengalami kehilangan kekuasaan dan kewibawaan karena para usif bawahan tidak lagi tunduk kepadanya dan

¹⁶⁵ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 176

¹⁶⁶ Hagerdal Hans. hal. 135

¹⁶⁷ Haga A. Lt. Kol. De Slag bij Penefoei en vandrig LIP. Uit T.B.B. deel 27 Hal 400

¹⁶⁸ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 164

Lihat Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid I 1974 hal. 393-394

¹⁶⁹ Ataupah H. 1992 hal 156

membayar upeti. Maka sejak itu terjadi kekosongan pemegang hegemoni kekuasaan di Timor. Kehancuran kekuasaan politik tersebut diikuti dengan kekacauan sosial akibat kekejaman Portugis di pedalaman terhadap para raja dan rakyatnya yang tidak mau tunduk sehingga menyebabkan pengungsian penduduk dari berbagai kerajaan ke Sekitar Kupang. Beberapa raja beserta sebagian besar rakyatnya yang mengungsi ke Kupang antara lain: Amabi, Sonbai, Serviao, Pitay, Benu.

Noemuti pada awalnya merupakan nama sebuah sungai yang mengalir di dataran yang kemudian diberi nama pula Noemuti. Kata Noemuti awalnya adalah dari kata Noemutis yakni sungai yang bermata air dari gunung Mutis. Tetapi sebenarnya hal itu tidak tepat karena Noemuti bermata air di Baknes di atas Noetoko dan di Binoni. Awal penamaan Noemuti ketika penjajah bertanya nama sungai tersebut apa, lalu di jawab Noel Mutis. Air Noemuti dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Orang-orang yang mandi di Noemuti dipercaya lama-lama kulitnya akan menjadi bersih dan putih¹⁷⁰

Noemuti dibangun oleh Dominggus da Costa pada akhir abad ke 17 dengan memindahkan pusat pemukiman yang dibangun ayahnya di Elo Abi di tepi sungai Honbet, anak cabang sungai Benain di kaki bukit Banam yang merupakan pusat pemukiman usif-usif Amanuban. Noemuti dibangun di tepi sungai Naek (salah satu cabang utama sungai Benain) dekat bukit Maelam yang diakui sebagai bekas pusat pemukiman usif-usif Sonbai yang kocar kacir akibat kekejaman Simao Luis. Ditinjau dari sudut politik dan perdagangan menurut Ataupah (1992)¹⁷¹ Noemuti merupakan pengganti pusat Wewiku Wehali yang dihancurkan pasukan Fransisco Fernandes tahun 1642. Noemuti sekaligus menggantikan pusat-pusat kekuasaan usif-usif Meto di bagian tengah sungai Benain yang kocar kacir akibat kekejaman Simao Luis.

Sumber tradisi (cerita rakyat menyebutkan riwayat Noemuti yang dilaporkan Kosat et al (2000) dalam Widiyatmika M.dkk (2008)¹⁷² sebagai berikut: Leluhur orang Noemuti adalah Labut Melo yang datang dari Belu Selatan. Labut Melo memiliki anak antara lain: Jose Melo, Marcela (Matsael Meol), Juan Melo, Rominus Melo, Christu Melo, Louis Melo, Abilio Melo, Joao Melo (dilihat dari nama-nama anak Labut Melo dapat dipastikan nama-nama tersebut adalah pengaruh budaya Portugis). Dengan demikian apabila dikaitkan dengan kedatangan Labut Melo ke Kote Noemuti berlangsung pada masa pengaruh Portugis sudah ada di Timor. Suku Hanoe datang pada gelombang kedua ke kote dan membuat rumah adat. Rumah adat/*Ume Leu Bini Basan* di Banfanu (suku Fios), Anin Smen di Kiuola yang dimiliki suku Kosat, Anin, Koa Mauboe, Binautali di Noebaun. Rumah adat itu dimiliki suku Tuka Almet, Kase Nahas, lalus Bijael. *Ume leu*

¹⁷⁰ Widiyatmika M.dkk.2008. Sejarah Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan. UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional NTT hal.139

¹⁷¹ Ataupah H.1992 hal 166

¹⁷² Widiyatmika M.dkk.2008 hal. 140-145

Noe Neno Naheun yang dimiliki suku Kosat Arik-Taeko Sokbanae. Sirilus Rafia Costa memakai *leu Kino Finisba* bersama Sirwistu Hanoë pada waktu menjadi panglima perang.

Schulte Nordholt (1971)¹⁷³ mengemukakan: Pada jaman dahulu terdapat 4 bersaudara, Kosat Ornai, Liurai-Sonbai. Mereka datang dari bumi matahari terbit. Setelah melakukan perjalanan mereka mengambil tempat tempat yang berbeda-beda. Kosat-Ornai datang di Lifao dan menjadi penguasa kerajaan. Mereka diikuti oleh kelompoknya. Empat klen Bikomi mendarat di dekat Oinun di Pantai Malaka. Berbeda dengan Kosat-Ornai mereka menuju ke arah Barat. Tetapi Kosat-Ornai kemudian tinggal di Noemuti. Kemudian Portugis datang. Mereka diterima dengan tangan terbuka oleh Kosat-Ornai dan menjadi sekutunya. Mereka disebut *kase metan soib metan*. Sesudah itu baru datang *kase muti soib muti*..

Antonio da Costa menurut sumber laporan VOC yang dikutip (Hagerdal)¹⁷⁴ disebutkan ia ikut bernegosiasi dalam perang dengan Hans Albrecht von Pluskow di Pantai Lifao bersama saudara iparnya yakni Fransisco da Hornay II. Antonio da Costa menjadi raja Noemuti tahun 1761-1769)¹⁷⁵

Jadi kalau Antonio terkait dengan awal kedatangan Portugis selisih waktunya terlalu jauh karena awal aktivitas Politik Portugis sejak kedatangan pasukan Fransisco Fernades tahun 1642, kegiatan Pater Antonio S de Jacinto memandikan ratu Mena dan keluarga serta ratu Lifao dan keluarga pada tahun 1642. Saudara lelakinya Gaspar da Costa III menjabat sebagai Tenente General tahun 1734-1749. Selanjutnya dari sumber Portugis dan VOC Richard Luis Sonbai saudara Baob Sonbai oleh Portugis ditetapkan sebagai raja Noemuti sesudah tahun 1702. Baob Sonbai yang dikenal pula sebagai Don Alfonso Solema memerintah sesudah tahun 1752. Sesudah kematian Baob Sonbai Noemuti berada dibawah pemerintahan keluarga da Costa¹⁷⁶

2). Struktur Kote dan sistem pemerintahan Noemuti.

Noemuti letaknya sangat strategis karena hanya berada sekitar radius kurang lebih 35 km ke Lifao/Pante Makasar, maupun ke daerah-daerah penghasil teras cendana dan lilin di Insana, Amanantun, Amanuban, serta wilayah hulu dan hilir sungai Benain. Karena itu Noemuti menjadi tempat penumpukan cendana dan lilin yang dikeluarkan melalaui Pante Makasar/Lifao dan menjadi pasar penjualan parang, kampak, pedang, mesiu, senapan lantak dan lain-lain. Tenaga pengangkut komoditi relatif banyak, karena banyak penduduk hidup terkonsentrasi di daerah persawahan dekat Noemuti. Penduduk yang banyak tersebut dikerahkan pula untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Noemuti. Bagian terpenting Noemuti adalah benteng yang

¹⁷³ Schulte Nordholt.H.G.1971 hal. 454

¹⁷⁴ Hagerdal Hans,hal 127

¹⁷⁵ Hagerdal Hans hal 136

¹⁷⁶ Ataupah H.1992 hal 171

disebut Kota yang mencakup istana da Costa, bangunan gereja, tempat penimbunan cendana serta lapangan upacara kemenangan dan pemajangan tengkorak musuh.¹⁷⁷

Schulte Nordholt (1971)¹⁷⁸ menguraikan tentang keadaan Noemuti sebagai berikut: raja da Costa mendiami sebuah istana dekat sebuah gereja yang disebut gre (dari bahasa Portugis *igreja*). Di Noemuti terdapat dua wilayah distrik yang disebut *Noenakan* (daerah hulu sungai) yang diperintah oleh Kosat dan Anin. Wilayah hilir yang disebut *Noehain* diperintah oleh Salem. Masing-masing kepala wilayah disebut serjintomor atau *sarentu mor* (dari bahasa Portugis *Sargento-mor*). Setiap wilayah distrik memiliki 8 kepala desa dan setiap kepala desa bergelar *Mastre Campo* atau *Mestre Posto*. Di seluruh Noemuti terdapat 18 buah posto yakni 16 buah posto dari wilayah hulu dan hilir dan 2 posto Crus dan Sarah. Ke 18 posto itu disebut dengan istilah: *Postoh boe'sam faon* dengan pusatnya postoh Crus.. Kemudian setiap desa dibagi kedalam 4 bagian yang masing masing bagian dikepalai oleh kabu (dari bahasa Portugis *cabo* artinya kepala atau sersan). Noemuti sebagai sebuah benteng konstruksinya merupakan hasil karya *Topasses* atau *Kase metan* disebutkan merupakan sebuah kota yang besar yang merupakan sebuah benteng atau kota ber dinding atau tembok batu dimana setiap klen atau keluarga memiliki *ume mnasi* sendiri. Kota Noemuti merupakan refleksi wilayah Noemuti keseluruhan yang dibagi dalam dua parohan setiap parohan 9 kali bagian dibuat memanjang ke arah jalan. Dimana semua tempat penting berada antara lain: gereja dan istana da Costa. Disini penduduk dengan mudah direkrut pada waktu perang. Gedung mesiu terletak dekat gereja yang disamakan dengan *ume leu* dimana *leu musu* disimpan. Di Noemuti memang *leu musu* tidak digunakan tetapi upacara sebelum perang tetap dilakukan mengambil tempat di gereja yang dipandang pula sebagai *leu naek*. Sedangkan tempat menggantung tengkorak lawan berada di luar dekat gedung mesiu¹⁷⁹ 4 pengawal gereja terdiri dari 4 suku yang dalam syair disebutkan sebagai Meol Laklus, Meol Salem (yang merupakan kata dari bahasa Portugis Melo, Salem dan La Cruz). Ke 4 pengawal gereja yang berada di pusat kedudukan di Noemuti perannya sebanding dengan penjaga istana kerajaan di Insana. Mereka inilah yang menerima persembahan tahunan dalam bentuk hasil panen yang disebut *manus sufa* yang dipersembahkan setiap tahun oleh setiap tobe dari: Tnone-Metkono, Bani-Laot (Schulte Nordholt, 1971).¹⁸⁰

Sebagian dari penduduk Noemuti dan para penguasa di wilayah tetangga setiap tahun mempersembahkan lilin untuk gereja. Dahulu mereka juga memberikan persembahan berupa kayu cendana. Sedangkan dibagian hilir sungai terdapat keluarga Bani, Salem dan Laot. Pada bagian hulu sungai terdapat keluarga Tnone, Kosat Anin dan Metkono. Posto di daerah hilir sungai disebut *sio noe nakan* menurut

¹⁷⁷ Ataupah H. 1992 166

¹⁷⁸ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 450

¹⁷⁹ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal 450

¹⁸⁰ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal 450

A.W. da Costa et.al, (1984)¹⁸¹ ditempati keluarga: Fiso-Snoe, Kosat-Anin, Tuka-Almet, Piris-Ratrigis, Mel-La Crus, Cenai-Tunfini, Alib-Berkanis, Menhitu Koronto dan Bas-Faria. Sedangkan Sio Noe haen (daerah hulu) terdiri dari: lam Widiyatmika M dkk (2008)-Arik, Mona-Tapeun, Soera-Hausufa, Meko-Anin, Bois-Tfunai, Silab-Mandosa, Salem Barbay, Fretis-Taneo, Funan-Oetpah.

Kosat Et.al (2000) dalam Widiyatmika M dkk (2008)¹⁸² mengungkapkan puncak pimpinan tertinggi Atupas kaiser Sonbai (Sobe Sonbai I di Bijela melalui pengawas wilayah adat Noemuti raja Richardus Louis Sonbai. *Usif nanan* (bangsawan dalam: Melo Crus, Melo Salem (*anibu, abua*). Costa (*Atikan pah atikan nifu* (penguasa keamanan). Da Costa sebagai tangan kanan. Pengatur/pembantu rumah tangga Sonbai (amaf nanan yakni Kune-Moni, Anibu lete *noo, nunuh noo*. Pengatur upeti (*bah mau ma biul mau tuakin*) terdiri dari tobe ha yakni Tnone, Metkono, Bani, Laot dan sebetulnya termasuk *Sasi pan misa*-utusan raja Amanuban untuk memelihara gereja dan Kosat Anin yang menjadi utusan pembantu Sonbai yakni Kono Oematan. Mereka membawa lilin dari raja-raja sekitar. Daerah khusus Sonbai (pusuf kelef)/Bakikatila-Baki Noni Koten yang dipercayakan kepada: Fios, Snoe, kemudian ditambah dengan Rusae-Fernandes. Surentu mor: *hau mnanu ma fani hau mnanu tuakin*. Terdiri dari *sarentu sio noe nakan* oleh Anin sebagai Koordinator. Sedangkan *sarentu mor sio noe haen* dengan Koordinator Salem.

Anggota *surentu mor sio noe haen* terdiri dari:

- 1). Fiso-Snoe = Banfanu.
- 2). Kosat-Anin = Kiuola.
- 3). Tuka-Almet = Noehaun.
- 4). Piris-ratrigis = Bijeli.
- 5). Meol-Crus = Nifuboke.
- 6). Canai-Tunfini = Manikin.
- 7). Alib-Berkanis
- 8). Manhitu-Koronto = Manikin
- 9). Bas-Faria.

Anggota *surentu mor sio neo nakan* terdiri dari:

- 1). Subaris-Arik = Sikbelu.
- 2). Moina -Tapeun = Nai abas.
- 3). Soera-Hausufa = Oebeo
- 4). Meko-Anin = Nibaaf.
- 5). Bois-Tfunai = Seungkoa.
- 6). Silab-Mendosa = Fatumuti.

¹⁸¹ Widiyatmika M.dkk 2008 hal 150

¹⁸² Widiyatmika M.dkk 2008 hal 151

- 7). Salem Barbeyu =Oenak.
- 8). Fretis Taneo
- 9). Funan-Oetpah=Naiola.

Kapitan sebagai petugas kehakiman/peradilan (*Akeut lasi*) terdiri dari :

- 1). Kapitan Ninu.
- 2). Kapitran Rusae (Kokleo).
- 3). Kapitan Taboy
- 4). Kapitan Runa.

Disamping itu terdapat jabatan *alferis* (temukung). Terdiri dari:

- 1). *Amaf sio noe nakan* adalah; Juniuk Taimenas.
- 2). Temukung *amaf sio noe haen*: Luis Bois.

Pemerintah Portugis melaporkan bahwa mereka tidak memiliki otoritas di Noemuti. Di daerah tersebut tidak ada hukum dan raja pemimpin mereka disebut Tenenty General. Sebenarnya latar belakang mengapa kondisi Noemuti dilaporkan demikian karena seringnya terjadi peperangan, pembunuhan dan kematian mendadak. Bahkan dalam lembar tulisan lepas Hagerdhal (koleksi Anton da Costa V) dalam Widiyatmika M.dkk (2008)¹⁸³ disebutkan Noemuti merupakan "*sarang Penyamun*". Pada tahun 1668 terjadi serangan pada penduduk di Oirata pulau Kisar dimana 200 penduduk terutama wanita dan anak-anak tewas dan 450 orang ditangkap sebagai budak. Sebagian besar dari mereka kemudian diselamatkan oleh Jacob Cops yang dikirimkan oleh gubernur Banda (Middelkoop, 1968).¹⁸⁴

Portugis Hitam tidak saja mempunyai tempat kedudukan di Noemuti tetapi juga di Lifao dan Larantuka. Dominggus da Costa sendiri mempunyai tempat kedudukan di dekat Lifao yakni di Tulang Ikan atau Tulicao dan Animata. Rupanya pimpinan Kase Metan baik Metheus da Costa, Antonio da Hornay, Dominggus da Costa, Fransiscus da Hornay memiliki mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi dimungkinkan karena mereka menguasai sumber daya yang merupakan sumber kemakmuran lewat perdagangan yakni cendana. Ataupah (1992)¹⁸⁵ mengemukakan bahwa daya jelajah pasukan semakin jauh dikarenakan: mereka memiliki kuda sebagai kuda tunggang para prajurit. Kuda dimasukkan ke Timor oleh para pedagang Hindu untuk melancarkan pengangkutan kayu cendana (Ormeling, 1955)¹⁸⁶ jagung yang dimasukkan oleh VOC ke Timor tahun 1672 dengan cepat menyebar ke seluruh Timor. Jagung *uk* yang dijadikan bekal lebih tahan lama dibandingkan umbi-umbian dan mendorong daya jelajah pasukan lebih jauh. Mereka tidak saja beraktifitas di Larantuka, Lifao, Noemuti

¹⁸³ M.Widiyatmika M.dkk 2008 hal 153

¹⁸⁴ Middelkoop P.1968 hal 103

¹⁸⁵ Ataupah H.1992 hal. 166

¹⁸⁶ Ormeling F.J.1955 hal.114

tetapi juga menjelajahi sebagian besar wilayah Timor bagian Barat dari Noemuti sampai di wilayah sekitar Kupang.

Yang menarik bahwa dari sumber laporan VOC Noemuti sebagai kota beberapa kali terjadi pergantian kekuasaan. Pada tahun 1702 Noemuti baru bergabung dengan keluarga da Costa. Berdasarkan cerita rakyat yang dihimpun dan dilaporkan Hans Hagerdal¹⁸⁷, Kelompok Kase Metan atau Tupasses menempatkan Pangeran Sonbai Richard Luis Sonbai sebagai pemimpin Noemuti. Ia saudara lelaki Baob Sonbai (Don Alfonso Salema). Sumber laporan VOC menyebutkan Alfonso Salema sekitar tahun 1749-1752. Sesudah kematiannya Noemuti dibawah kekuasaan keluarga da Costa. Talus Sonbai saudara lelaki dari Neno Sonbai kawin dengan Bi Manlea Kosad (Manuela da Costa) sekitar tahun 1711. Tokoh wanita ini disebutkan sebagai tokoh wanita yang pintar menyanyi pujian Tuhan dalam bahasa asing. Ternyata menurut laporan VOC Noemuti pernah menjadi bagian dari kekuasaan Amarasi selama beberapa tahun. Pada tahun 1761-1769 Noemuti berada dibawah kekuasaan Antonio da Costa yang merupakan saudara lelaki Dominggus da Costa II dan juga saudara Tenente General Topasses Gaspar da Costa III (Hagerdal)¹⁸⁸. Tokoh Fransisco Hornay II adalah menantu dari Dominggus da Costa I. Anak lelaki tertuanya Antonio da Hornay yakni Pedro da Hornay dalam catatan VOC sering disebutkan sebagai raja Oekusi. Pedro Hornay dengan 2 orang lainnya terbunuh oleh suruhan Gubernur Portugis Antonio de Mesquita Pimentel. Pedro mempunyai putra lelaki bernama Jose Hornay. Pada tahun 1835 –1847 yang memerintah Oekusi adalah Dom Filipe Hornay.

Dari laporan Portugis pada tahun 1702 Gubernur Coelho Guerreira berusaha mengamankan Noemuti karena Noemuti dipandang sangat strategis. Noemuti pada waktu itu dipimpin oleh seorang bernama Manuel Fernandes dengan titel Capitao. Ia diperintahkan gubernur pergi ke Lifao dengan membawa 50 orang pengikutnya untuk menggantikan prajurit yang sakit di pelabuhan. Ternyata kemudian Manuel Fernandes dipersalahkan karena bekerja sangat lamban. Kelambanan Manuel Fernandes yang tidak bisa aktif karena ia sedang menderita sakit. Namun ia dianggap memiliki kesalahan yang fatal dan harus ditangkap. Captain Fransisco Caldeira yang merupakan saudara ipar raja Sonbai dikirimkan ke Noemuti untuk menangkap Manuel Fernandes. Ia datang ke Noemuti pada hari Minggu tanggal 26 Maret 1702. Manuel Fernandes ditangkap dan diikat tangannya. Namun beruntung ia dibebaskan oleh seorang padri bernama Frei Antonio das Angustias. Ternyata captain Manuel Caldera tidak berani melawan padri yang dianggap memiliki jabatan keramat dan dihormati. Gubernur akhirnya mengirimkan orang lain untuk menangkap Manuel Fernandes. Manuel Fernandes tumbuh jiwa perlawanannya. Ia mendapat bantuan Frei Antonio Made Deus seorang tokoh yang menjadi penggerak perlawanan terhadap

¹⁸⁷ Hagerdal Hans.hal 71

¹⁸⁸ Hagerdal Hans hal.,136

gubernur Antonio de Mesquito Pememtel 5 tahun sebelumnya. Ia juga dibantu Sonbai, Ambeno, orang Rote dari Bilba dan Ringgou. Terjadilah pertempuran hebat melawan pasukan gubernur. Dalam pertempuran ini captain Dom Antonio Caldeira tewas. Kepalanya dipotong dan dikirimkan kepada Domingus da Costa di Larantuka¹⁸⁹

Kelompok Dacosta dari Noemuti menjadi ujung tombak menjadi motor berbagai pertempuran dari Di Timor Barat Kupang sampai di Belu. Mulai tewasnya Opperhoof VOC van der Heyden tahun 1655, pertempuran di Amarasi tahun 1667, perang Penfui tahun 1749. Perang Oni Mabun tahun 1759-1760¹⁹⁰

Pada tahun 1900 raja Don Matheus da Costa dari Oekusi oleh Portugis ditetapkan sebagai raja Noemuti. Noemuti dari tahun 1900-1915 diperintah oleh raja Don Dомуинггus da Costa. Noemuti sampai sebelum tahun 1910 menjadi wilayah Enclave Portugis di wilayah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1910 Noemuti dimasukkan dalam wilayah kekuasaan Belanda dan menjadi bagian dari kerajaan Miomaffo. Pada waktu Noemuti dimasukkan ke wilayah Belanda, Noemuti dimasukkan dalam swapraja Miomaffo dan berstatus sebagai sebuah kefetoran dengan fetornya Koko Salim dari tahun 1915. 1940¹⁹¹ Kemudian sebagai Fetor digantikan oleh Gaspar Sali sampai tahun 1940. Sejak 1940 yang dikukuhkan sebagai fetor adalah Raja Don Matheus V da Costa yang memegang jabatan fetor sampai tahun 1953.¹⁹²



Gambar 2.5
bekas Istana da Costa

d. Ancaman Portugis Hitam di Kupang

Kedudukan VOC di Kupang dianggap sebagai ancaman bagi Portugis di Timor baik dalam mengembangkan kekuasaan dan monopoli perdagangan terutama perdagangan cendana. Timor disebut oleh Portugis juga disebut sebagai Island of Santa Cruz (Barros, 1984).¹⁹³ Kupang letaknya dianggap strategis karena tidak saja mempunyai pelabuhan alam di muara sungai Kupang. Kupang juga tidak terlalu jauh dari Selat Pukuafu yang dapat digunakan mengontrol pelayaran dalam rangka berdagang cendana di Pantai

¹⁸⁹ Hagerdal Hans hal 124.

¹⁹⁰ Widiyatmika M.2006. Noemuti Dalam Kancah Perjuangan Melawan Kolonialis. UPTD Arkeologi. Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional NTT Kupang hal.66-74

¹⁹¹ Hagerdal Hans hal.137

¹⁹² Hagerdal Hans hal. 153

¹⁹³ Barros, Jorge Duarte. 1984 26

Selatan Timor. Portugis telah mengalami kekalahan pahit akibat serangan Belanda yakni Pada tahun 1613 benteng Lohayong di Solor diserang dan dapat diduduki dan pada tahun 1641 bandar Malaka yang strategis juga jatuh ke tangan Belanda. Oleh karena itu kedudukan Belanda di Kupang menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kekuasaan Portugis di Timor. Itulah sebabnya Portugis dengan segala daya dan cara ingin melenyapkan Belanda dari Kupang..

Ancaman pihak Portugis/Portugis Hitam di wilayah sekitar Kupang telah terjadi sebelum VOC membangun benteng Concordia pada tanggal 2 Februari tahun 1653. Dalam surat VOC tahun 1649 wilayah Sorbian, Amarang di Amfoan, Mena dan wilayah lain minta bantuan kepada pihak VOC untuk melawan saudara leluhurnya Amma Sonbai yang dibantu Portugis. Pejabat lokal VOC diperintahkan memberikan bantuan kepada para raja yang mencari perlindungan walaupun pada waktu itu VOC belum mempunyai kedudukan tetap di Kupang. Ada rumor yang berkembang bahwa di wilayah Sonbai ada sungai yang mengandung deposit emas atau bahan tambang yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh VOC apabila memungkinkan (Hagerdal).¹⁹⁴

Pada tahun 1649-1650 Sonbai tiba-tiba muncul sebagai sekutu Portugis yang berjuang melawan raja Kupang. Pada tahun 1650 *Capitao mor* Timor yang bernama Carneiro de Sequera mengawal pasukan Sonbai ke Amfoan Sorbian dan menghancurkan 12 desa. Banyak penduduk Amfoan Sorbian yang tewas dalam serangan tersebut. Kemudian berkat bantuan VOC Amfoan Sorbian dapat dipulihkan kembali. Pejabat VOC Ter Horst mengirimkan surat ke Batavia mohon bantuan segera apabila tidak ingin Portugis akan segera menaklukkan seluruh pulau Timor di bawah panji-panji Sonbai. Selanjutnya pada tahun 1651 banyak pengungsi dari Sorbian datang mengungsi ke wilayah Pro VOC di Kupang untuk menyelamatkan diri dari tekanan Portugis dan Sonbai. Serangan selanjutnya terjadi di wilayah Amarang yang merupakan tempat tinggal utama raja Amfoan dihancurkan oleh sekutu Portugis. Portugis membunuh kepada siapa saja yang dijumpai berdagang dengan VOC. Pasca penghancuran Amarang seorang staf VOC bernama Bijlagh tiba di Amarang. Kepada penduduk yang menyingkir menyelamatkan diri dan dijumpainya ketika ditanya mereka mengatakan tidak akan kembali lagi ke tempat asalnya. Ternyata kemudian Portugis Hitam juga menyerang Sulamu. Beberapa orang Sorbian membantu VOC bertahan untuk mempertahankan bendera Belanda tetapi mereka dapat dikalahkan musuh bahkan bendera Belanda dirobek musuh. Raja Amapono di Kupang ternyata juga menderita kekalahan dari pasukan Portugis dan Sonbai. Namun kemudian mereka menawarkan berdamai (Hagerdal).¹⁹⁵

Pada awal pembangunan benteng Concordia, VOC mendapat tantangan dari Portugis. Ketika Portugis mendengar VOC membangun benteng di Kupang, *Capitao mor* Fernandes yang kebetulan sedang berada di wilayah kerajaan Sonbai segera

¹⁹⁴ Hagerdal, Hans hal.35

¹⁹⁵ Hagerdal, Hans hal. 9,10

bereaksi. Karena ia tidak mungkin mendesak Sonbai menyerang Kupang, Fernandes pergi dengan kekuatan 180 pasukan ke wilayah Amabi, tetapi tidak mendapati rakyat di sana. Mereka kemudian melakukan penipuan dan berhasil menangkap raja dimasukkan ke penjara bersama 300-400 wanita termasuk istri raja muda Kupang.. Tempat penahanan para tawanan dilakukan di Amanuban. Fernandes kemudian menarik diri ke wilayah Sonbai dimana terdapat benteng Portugis (Hagerdal,) ¹⁹⁶

Opsir Kompeni Kapten Burger menawarkan bantuan kepada Amabi pada bulan Februari 1653. Tetapi mereka harus berunding dengan Amabesi. Amabesi akan mengusir keluar semua orang Portugis dari tempat tinggalnya apabila VOC mengirimkan 5-6 prajurit untuk bermarkas disana. Namun Burger tidak menginginkan memecah kekuatan pasukannya yang kecil. Namun pada tanggal 16 Mei 1653 sebuah ekspedisi meninggalkan Kupang ke Amabesi. Bagian terbesar prajurit adalah penduduk Kupang, di samping itu terdapat 25 orang Belanda untuk melindungi sekutu VOC. Pada malam hari mereka tiba di Amabesi dan berhasil membunuh 18 orang Portugis termasuk seorang wanita muda. Pada hari berikutnya mereka kembali ke Kupang membawa kepala lawan yang telah dibunuh dan melakukan pesta sampai tengah malam. Pada hari berikutnya tanggal 18 Mei 1653 raja Kupang dengan hati-hati melakukan serangan kepada Portugis di Amabi ¹⁹⁷

Kebijakan Portugis untuk lebih mengefektifkan perlawanan dengan pihak Belanda menunjuk seorang pejabat yang diberi nama *Capitao mor* yang bertugas mengkoordinir perlawanan terhadap kekuasaan Belanda di Timor. *Capitao mor* yang pertama ditunjuk oleh Raja Muda Portugis di Goa adalah: Carneiro de Sequera pada tahun 1648 (Hagerdal). ¹⁹⁸ Namun pada waktu itu Capitao mor Fernandes telah kembali ke Larantuka. Pasukan Portugis kemudian dipimpin oleh Padri Jordao. Komandan Portugis melakukan perjalanan mendekati Kupang turun di kediaman utama Amabesi. Pada tanggal 18 Juli 1653 Ter Horst tiba di Kupang, namun pasukan dalam kondisi menyedihkan. Pada waktu itu Portugis baru saja melakukan serangan ke Atrray tempat tinggal raja Amapono dan berhasil menewaskan dan memancung 206 orang sebagian besar wanita dan anak-anak. Mereka tidak mampu mengungsi dengan cepat Karena keberatan dengan kalung tembaga di lehernya. Raja Amapono dan raja Amabesi bersama-sama meminta bantuan kepada Ter Horst untuk menyeberangkan mereka beserta pengikutnya ke pulau Semau. Permintaan tersebut kemudian disetujui. Musuh berkekuatan 500 orang lelaki yang kuat terdiri dari 100 pasukan Portugis Hitam dan Putih, pribumi pemeluk agama kristen, rakyat Amarasi dan Taebenu. Pasukan musuh menyeberangi sungai menuju Amabesi membakar sepanjang jalan menuju Oiletta. Komandan Padri Portugis berkata bunuh semua tanpa kecuali wanita dan anak-anak

¹⁹⁶ Hagerdal Hans hal 10

¹⁹⁷ Hagerdal, Hans hal.10

¹⁹⁸ Hagerdal, Hans hal. 9

dengan alasan penduduk pendukung Burger menodai gereja (Hagerdal) ¹⁹⁹. Pada tanggal 19 Maret 1651 dilakukan pembaharuan perjanjian lama oleh VOC.

Setelah peristiwa pembunuhan tersebut 50 pasukan Belanda dan 200 pasukan penduduk Kupang pada malam hari telah tiba di Amabesi ketika Pasukan Portugis sedang berkemah. Pasukan Belanda melakukan tembakan tetapi tembakan tidak mengenai sasaran. Namun kemudian pasukan Portugis di bawah Mateus da Costa meninggalkan wilayah tersebut. 5 prajurit tewas dan beberapa terluka. Di pihak Belanda 11 pasukan kulit putih tewas dan dua prajurit pribumi tewas. Portugis menarik pasukan dari Amabesi tanggal 16 Juli 1653. Penduduk Amabesi merasa tidak aman dan kemudian pergi ke Kupang. Kemudian raja Kupang dan Amabesi setuju para pengungsi bermukim di pulau Semau agar mereka dapat berkebun di sana ²⁰⁰.

Akibat perlakuan kejam Portugis dan hadiah-hadiah dari VOC, Amabi sebagai sekutu Portugis kemudian cepat berbalik bersekutu dengan VOC. Demikian juga Sonbai yang semula bersekutu dengan Portugis tidak nyaman lagi sejak menolak ajakan Portugis menyerang Kupang. Kemudian Sonbai memaklumkan siap bekerja sama dengan VOC di Kupang pada tahun 1655. Sebuah perjanjian ditanda tangani di Kupang pada tanggal 2 Juli 1655 antara Ammasse dari Sonbai, Ceroroneno dari Amabi, Tamatako dari Sigy dan Ammasok dari Roury. Perjanjian berisi 7 pasal yakni:

- a. Pasal 1 Penghentian perang (permusuhan) antara orang Timor dengan orang Belanda.
- b. Pasal 2 Para raja mengizinkan tanah dan rakyatnya untuk Kompeni dan akan setia serta patuh atas semua keinginan Kompeni. Para raja berjanji tidak akan bersekutu dengan musuh kompeni atau memberikan bantuan, serta akan melawan bila kompeni menghendakinya.
- c. Pasal 3 Mereka akan senantiasa mendukung pelaksanaan kebijakan Gubernur Jendral dalam semua urusan dan akan selalu patuh dan menghormati hak konfederasi Belanda.
- d. Pasal 4 Mereka bersedia menolak musuh Kompeni dari wilayah dan pantai mereka, serta tidak memberikan hak berbagai produk seperti emas, perak, logam, kulit penyu dan budak. Mereka memberikan hak kepada Gubernur Jendral membangun benteng di manapun dalam wilayah mereka atau wilayah keturunan mereka serta membantu pembangunan benteng tersebut di wilayah mereka.
- e. Pasal 5 Mereka setuju memberikan perlakuan yang baik kepada semua orang Belanda dalam urusan dengan Kompeni untuk berdagang dengan jujur sesuai

¹⁹⁹ Hagerdal, Has hal. 11

²⁰⁰ Hagerdal, Hans hal. 11

adat mereka tentang tanah termasuk pohon, ternak, buah-buahan dan bumi dengan sepenuh hati.

- f. Seluruh kerajaan, tanah dan penduduknya setia pada pemerintahan tunggal Kompeni dan menghormati Kompeni yang membuat perdamaian dengan Portugis secara seimbang dan bebas
- g. Pasal 7 penegasan kembali atas pasal-pasal yang telah ditetapkan diperkuat dengan sumpah darah (Hagerdal)²⁰¹

Pada tanggal 15 September 1655 meletus pertempuran besar antara VOC dengan sekutunya yang dipimpin Jacob van der Heyden yang melakukan ekspedisi melawan kekuatan Portugis Hitam di bawah pimpinan Antonio de Ornay. Dalam pertempuran ini Opperhoofd Jacob Van der Heyden, Sangaji Trong, Lamahala dan Lamakera tewas dalam pertempuran. Untuk membalas kekalahan tersebut VOC mengirim Arnold de Vlamingo van Oudhorn yang diikuti kompi kapten Tahalile dan kapitan Jonker 94. Mereka berangkat dari Ambon tanggal 24 Mei 1656 (Nanulaita., 1966)²⁰² dan tiba bulan Juni di Kupang untuk memperkuat kekuasaan VOC. Sebenarnya pasukan dengan kekuatan 800 orang ini dalam perjalanan ke Batavia tetapi singgah di Kupang untuk membantu pertahanan Kupang dari serangan Portugis Hitam. Arnold de Vlaming van Oudshoorn melakukan serangan ke Amarasi dua kali untuk mematahkan perlawanan Amarasi yang bersekutu dengan Antonio da Ornay dan Matheus da Costa. Namun upayanya gagal karena mereka dapat dikalahkan pasukan gabungan Portugis hitam dan Amarasi. Pasukan VOC kehilangan banyak prajuritnya tewas.

Pada tahun 1659 akibat tekanan politik para raja di pedalaman merasa terancam akibat kekejian pasukan Portugis. 20.000 penduduk pedalaman dan para raja mereka mengungsi di sekitar Kupang. Di antaranya raja Sonbai Kecil²⁰³. Pada tahun tersebut Raja Sonbai, Amabi, Kupang pergi ke Batavia bersama Ter Horst untuk meminta pertolongan. Ternyata mereka hanya diberikan seorang guru Kristen bernama Manuel Pais.²⁰⁴

Mengingat ancaman yang bertubi-tubi terhadap benteng Concordia di Kupang opperhoofd Ters Horst merencanakan memindahkan pusat kedudukan VOC di benteng Concordia, dengan membangun benteng baru di pulau Rote. Benteng yang direncanakan dibangun di Pantai Utara pulau Rote di Namo Dale. Termanu yang dapat menampung 60 sampai 70 prajurit (Fox, 1977)²⁰⁵. Namun rencana pemindahan tersebut tidak dapat direalisasikan. Pulau Rote penting artinya bagi VOC karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari Kupang, bisa dengan mudah dicapai dan menjadi tempat

²⁰¹ Hagerdal, Hans hal. 11, 12

²⁰² Nanulaita, I. O. Timbulnya Militarisme Ambon. Sebagai Persoalan Politik, Sosial, Ekonomi. Bhratara. Jakarta hal. 93, 94.

Lihat Chijms J. A. vd. 1883. Een biografie van Jonker. TBG XXVIII hal. 351-473 dan XXX hal. 1-234

²⁰³ Schulte Nordholt H. G. hal 172

²⁰⁴ Schulte Nordholt H. G. 1971 hal 172

²⁰⁵ Fox, J. J. 1977 hal 92

bertahan. Pulau Rote mempunyai pelabuhan yang strategis. Pulau Rote dapat dijadikan sumber pemenuhan bahan makanan alternatif dimana VOC di Kupang yang suplai bahan makanan tergantung dari suplai dari Jawa yang sangat rawan kelangsungannya di samping karena faktor cuaca juga faktor keamanan. Pulau Rote juga sangat cocok dijadikan sumber pemenuhan tenaga kerja bagi VOC untuk kepentingan pertahanan dan penghasil komoditi antara lain: lilin, budak dan kemudian juga kacang hijau.

Sebelum VOC pindah ke Kupang, pada tanggal 19 Juni 1657 telah dilakukan perjanjian antara VOC dengan raja Amabi, dengan dua temukung di Kupang dan raja Sonbai. Nama-nama yang menanda tangani perjanjian antara lain: A.Seki, A.Hobbo, H.Tesse dan raja Kupang Bissi. Kemudian juga terjadi perjanjian kembali pada tanggal 30 Juni 1674 yang ditanda tangani A.Bessie raja Kupang, A.Sousang raja Kupang, A.Bane temukung Besar Kupang, A.Daeng Temukung Kupang, A.Temnano raja Sonbai dan SA.Tanam raja Amabi (Coolhas, 1948) dalam Widiyatmika M.(2010) ²⁰⁶. Kepindahan kedudukan VOC dari benteng Hendrikus di Lohayong, Solor menimbulkan ketidakpuasan sementara pegawai VOC di Lohayong. Akibatnya 5 orang Belanda dan 3 orang budak wanita melakukan desersi. Seorang pelaut ditangkap dalam upaya melarikan diri, ia diancam ditembak dan kemudian setelah ditangkap dijatuhi hukuman kerja selama 2 tahun (Widiyatmika M.(2010).²⁰⁷

Pada tahun 1658 *capitao mor* Simao Luis tiba di Timor. Ia kemudian memimpin pasukan menyerang wilayah Sonbai. Seperti telah diuraikan di atas terjadi pertempuran Gunung Mollo. Raja Amabi Aiputu tewas bersama ribuan rakyatnya. Dalam laporan Ter Horst tanggal 8 November 1659 menyebutkan Portugis di Solor dan Timor telah mengambil alih seluruh tanah termasuk yang berada di bawah pengawasan benteng Kompeni di Kupang. Hal tersebut menyebabkan para sekutu VOC mengundurkan diri dengan kehilangan 2000 jiwa penduduk umum. Ketika bahaya kemudian telah lewat pada tanggal 19 Oktober 1661 kekuatan pasukan VOC dibantu pasukan Sonbai, Amabi dan Kupang dikirimkan ke pulau Rote (Fox, 1977) ²⁰⁸. Capitao Simao Luis dikenal sangat kejam dalam menumpas para pembangkang. Usif Petai di Oekusi yang membangkang melakukan kerja rodi dibunuh kemudian badanya digantung di lapangan, Tubuhnya di sayat-sayat dan darahnya diambil dan para rakyat usif harus memakan dan meminum darahnya. Untuk menghindari kekejaman Simao Luis pada tahun 1664 ada 249 orang lelaki, wanita dan anak-anak mengungsi ke Kupang ²⁰⁹

Sebaliknya bagi para raja/usif yang taat, ia diberi gelar-gelar kehormatan seperti

²⁰⁶ Widiyatmika M.2010 hal.62

²⁰⁷ Widiyatmika M.2010 hal.46

²⁰⁸ Fox J.J. 1977 hal.96

Lihat Widiyatmika M.2007b hal 216

²⁰⁹ Middelkoop. P. Migration of Timores Goups and the Question of Kase Metan or overseas Black Foreigners. 1968 Reprint from International Archives of Ethnography, vol.LI, E.J.Brill, Leiden. Hal.77.

Lihat Ataupah H.1992 hal.41

Dom, Keser, Kornel, Capitan. Mereka juga diberi tongkat sebagai tanda kuasa terutama dalam penebangan cendana. Tongkat ini dikenal sebagai tongkat Simao Luis.



Gambar 2.6 Tongkat Sima luis dan Tongkat VOC Koleksi Raja Kono

Ternyata Simao Luis diyakini berada dibelakang layar sebagai pembunuh misterius Talus Sonbai karena ia menolak berdagang cendana dengan Portugis (ia dijuluki Sabo Neno Anan Kanan (Pelenyap nama putra langit). (Ataupah, 1992) ²¹⁰. Dari dokumen VOC yang dikutip Hagerdal serangan terhadap Kupang dari pihak Portugis Hitam tidak kunjung berhenti. Dari laporan VOC pada tanggal 7 Juni 1695 pasukan Amkono di bawah kekuasaan Portugis datang ke dataran Poney dan Bisepu dengan jarak sekitar 6 mil Jerman dari benteng Concordia. VOC dan para raja sekutunya antara lain: Noni Sonbai beserta warganya karena ia tidak ingin ditangkap musuh. Seorang fetor Amabi, dan Ama Kobo dari Sonbai Kecil berbicara dengan Pimpinan Topasses dari Amkono yang dijumpai di jalan. Ia mengatakan ia datang untuk membuat wilayah tersebut menjadi lebih baik. Pada tanggal 12 Juni 1695 musuh telah berada di Fafome dengan 200 pasukan terdiri dari tiga kelompok di bawah Portugis Hitam dan Sekutunya. Mereka merusak pagar di Fafome, merusak tanaman dan rumah penduduk. Pada hari berikutnya tiba-tiba musuh menarik diri ke tempat asalnya. Tetapi beberapa bulan kemudian musuh muncul kembali di wilayah Taebenu dan Amabi. Mereka diperintahkan menebang pohon cendana untuk dibawa ke Lifau. Nai Sui seorang saudara lelaki dari fetor Ama Babo dari Sonbai Kecil sempat berbicara dengan Topasses dari Amkono. Mereka mengatakan bahwa wilayah kekuasaan VOC tidak lebih dari jarak jangkauan tembakan meriam dari benteng Concordia. Mereka datang ingin melumpuhkan benteng Concordia ²¹¹

Pada tahun 1697 pasukan Topasses (Kase Metan) dipimpin seorang Kapitan dari Topasses dari wilayah Amkono melakukan serangan terhadap para sekutu VOC.

²¹⁰ Ataupah H.1992 hal 180

²¹¹ Widiyatmika M.2010 hal 76

Dalam tahun tersebut sebuah kapal Portugis dari Macao membuang jangkar di Teluk Babau. 12 orang turun ke Pantai untuk mencari air minum. Tetapi di Pantai tiba-tiba mereka disergap 200 pasukan gabungan Ambenu, Taebenu dan Amkono. Dalam serangan ini 4 orang tewas, 2 hilang atau terbunuh. Serangan ini terjadi karena mereka salah sangka. 12 orang Portugis tersebut dikira sebagai orang Belanda. Raja Amkono ketika berada di Lifao diperintahkan oleh Gubernur Portugis untuk membunuh orang-orang Belanda dan Sekutunya. Tetapi raja Amkono gagal melaksanakan perintah tersebut. Karena khawatir akan reaksi Dominggos da Costa sebagai Pimpinan Portugis Hitam di Noemuti karena kegagalannya lalu memerintahkan rakyatnya memotong kayu cendana dan mempersembahkan kepada Kapitan Portugis. Suatu kenyataan lain yang tidak dihindari adalah pada tahun 1697 Amkono harus bertempur dengan Sonbai yang telah bersekutu dengan VOC dan mereka masih keluarga sendiri. Dalam pertempuran yang terjadi 45 orang lelaki termasuk para meo terbaik Amkono terbunuh. Sedangkan di pihak VOC dan sekutunya gugur 6 orang (Hagerdal) ²¹².

Selanjutnya Kapten Bareta segera terjun dalam pertempuran melawan pasukan Topasses dan sekutunya yang sedang membangun benteng di Bilpo 3-4 mil dari Kupang. Rencana mereka melakukan serangan tiba-tiba, tetapi mereka membatalkan serangan karena terjadi kematian raja Amkono pada tanggal 25-26 Juni 1697. Namun pasukan Amkono dan Portugis Hitam membakar rumah-rumah sehingga tempat tinggal Nai Pitai di Lelo menjadi abu. Pada tahun 1690 terjadi peristiwa penting Dominggos da Costa mengambil alih kedudukan Antonio da Ornay sebagai *Capitao Mor* Portugis di Timor. Kemudian ia digantikan oleh Gaspar da Costa yang berkedudukan di Animata. Animata berlokasi beberapa kilo meter di sebelah Selatan Lifao. Di Animata terdapat 1800 keluarga Portugis, Portugis Hitam dan pribumi (Widiyatmika M.22007b) ²¹³

Tidak ada kejelasan mengenai klaim kerajaan Ternate di Timor sejak kapan kerajaan ini berpengaruh. Tetapi menurut dokumen Pulau Timor secara resmi diserahkan kepada VOC oleh Ternate pada tahun 1683. Yang menarik raja Kupang yang bernama Karel Buni yang menanda. tangani perjanjian Paravicini tahun 1756 disebutkan oleh Detaq (1972) berasal dari Ternate. Middelkoop (1968) dalam Widiyatmika (M.2007b) ²¹⁴ menyebutkan tokoh dari Amanatun yang bernama Banunaek dan yang mengintrodusir *head hunting* datang dari Ternate disebutkan pula dalam salah satu uraiannya tempat sirih pinang pemberian ayahnya yang di bawa oleh Sonbai ke Timor dibawa dari Ternate.

Di tengah-tengah ancaman Portugis Hitam atas kedudukan Belanda di Kupang, pada tahun 1697 Benteng Concordia di Kupang mendapat serangan kapal bajak laut Perancis. Para bajak laut menyerang benteng dan membakar kota Kupang. Selanjutnya para bajak laut meninggalkan Kupang menuju Lifao dan melakukan penjarahan di

²¹² Hagerdal Hans, hal. 34

²¹³ Widiyatmika M.2007b hal 201

²¹⁴ Widiyatmika M.2007 b hal.106

Lifao (Barros, 1984) ²¹⁵. Pada tahun 1699 sebuah kapal yang dinahkodai William Dampier berlabuh di Kupang. Sebelum berlabuh William Dampier dengan kapalnya bolak balik di Pantai Utara Timor Bagian Barat antara tanggal 21 September sampai 27 Oktober 1699 untuk mencari air dan perbekalan serta berlabuh di Teluk Kupang antara tanggal 28 Oktober sampai 12 Desember 1699 untuk memperbaiki kapalnya (Ataupah, 1992) ²¹⁶

Pengganti Lahi Manas yang bernama Kudang Laiscodath II gugur bersama 7 orang pengikutnya dan 6 pengikut raja Taebenu di Sulamu pada tahun 1786 ketika diserang oleh Usif Sonbai yang masih muda (Roo van Alderwerelt, 1904 dalam Ataupah 1992).²¹⁷ Gugurnya lahi Helong tersebut mendorong bagi orang Helong menetap di Pulau Semau. Suatu informasi lain dalam (Hagerdal),²¹⁸ pada waktu menjelang perang Penfui tahun 1749, raja Kupang menuju pulau Semau dibuat suatu perjanjian dengan Amabi, Amarasi, Taebenu dan Sonbait Kecil tentang tanah wilayah kerajaan Kupang yang ditempati para raja tersebut dengan rakyatnya, tetap diakui sebagai wilayah milik raja Kupang. Apabila mau menebang cendana dan lain-lainnya para raja yang bersangkutan harus memberitahukan kepada raja Kupang. Namun kemudian terjadi masalah tentang tanah tersebut dan residen Timor H.C. Humme telah menetapkan tanah di Balkam, Banne dan Oepaha pada tanggal 1 Desember 1858. Bahwa tanah tersebut milik gubernemen tetapi hutan-hutannya milik raja Kupang. Oleh karena itu yang ingin memotong cendana harus seijin raja Kupang. Namun kemudian terjadi masalah kembali. Raja Kupang mengadukan kepada residen bahwa raja Amabi telah memotong kayu cendana di Bonne dekat dengan kampung Balkamo tanpa minta ijin kepadanya. Residen dengan musyawarah dengan para raja Amabi, Taebenu, Sonbai Kecil, Funai, Kupang dan Amarasi, mereka mengakui bahwa wilayah yang dipersengketakan memang diakui dulunya wilayah raja Kupang. Maka akhirnya ditetapkan oleh residen tanggal 15 Oktober 1873 tanah-tanah Balkam dan Oepaha sebagai tanah gubernemen. Barang siapa raja dan orang lain yang tinggal di atas tanah tersebut menurut batas yang telah ditentukan dan ditunjukkan, tidak boleh memotong kayu cendana atau kayu *fanie* jika sudah mendapat seijin residen Kupang lebih dahulu maka tidak perlu lagi ijin dari raja Kupang ²¹⁹

2.6. Perdamaian Antara VOC dan Sekutunya dengan Portugis Hitam Tahun 1704

Upaya perdamaian antara VOC dengan Sekutunya dan Portugis Hitam dengan sekutunya mulai dirancang pada tahun 1700. Pada tahun tersebut terwujud perdamaian

²¹⁵ Barros, Jorge Duarte 1984 hal.31

²¹⁶ Barros, De, 1984 hal.31

²¹⁷ Ataupah H. 1992 hal.209

²¹⁸ Hagerdal Haans, hal. 83

²¹⁹ Hagerdal Hans, hal. 19

antara Amarasi dengan VOC dengan Sekutunya. Perdamaian berlangsung beberapa tahun. Dominggos da Costa pemimpin Kase Metan di Noemuti menyadari bahayanya persaingan antara VOC dengan Sekutunya dan Portugis dengan Sekutunya yang saling berperang. Pada tahun 1704 dilakukan pendekatan antara Da Costa dan Amkono di satu sisi dengan VOC dan Sekutunya. Orang yang menjadi tokoh kunci dalam upaya perdamaian adalah Raja Sonbai Kecil di Kupang Noni Sonbai. Ia membuat prakarsa mengirim pesan dengan Antonio Alves da Costa. Mereka menganjurkan membuka perdagangan dengan Sonbai-Amkono dan menjadikan satu dengan yang lain sebagai kawan seperti pada jaman dahulu. Domingos da Costa mengirimkan utusan bernama Nai Polo ke Kupang. Nai Polo setelah sampai di perbatasan wilayah VOC meletakkan pakaian dan *bolca* (tas) yang kemudian diletakkan di depan Opperhoofd. Lalu mereka ditanya mengapa ia tidak membawa surat dari da Costa sehingga ia tidak dipercayai.

Salah pengertian tersebut tidak menghentikan upaya perdamaian. Bersama kaisar Dom Pedro dari Sonbai dan raja Dom Fransisco de Tainube dari Amkono, Dominggos da Costa kemudian menulis sepucuk surat ke Noni Sonbai di Kupang secara serius. Surat tertanggal 14 September 1704 ditulis di Tulang Ikan suatu kediaman Portugis Hitam dekat dengan Animata tempat kediaman Portugis Hitam. Surat tersebut kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Portugis oleh Ama Lise Nai. Da Costa dan para raja sekutunya mengatakan bahwa utusan yang membawa surat agar diterima. Da Costa juga mengirimkan para bangsawan Sonbai, Sitenoni, Nai Banao dan Manubait. Mereka dikawal Antonio Alves dengan prajurit. Isi Naskah surat menyebutkan saudara perempuan dari Noni Sonbai yang membawa hadiah telah diterima oleh Da Costa. Oleh karena itu ia mengucapkan terima kasih atas hadiah tersebut. Kemudian ia menyebutkan bahwa sebuah sarao (sarung) dari sang putri juga dihadiahkan kepadanya. Kemudian Da Costa memberikan kepadanya sebuah muti salak. Da Costa sangat senang dan mengharapkan dan Sonbai menghubungi sahabatnya.

Noni Sonbai menunggu beberapa bulan kemudian akhirnya ia mengemukakan kepada tiga raja dengan surat terbaru tanggal 17 Juli 1704 yang ditanda tangani Pejabat VOC di Benteng Concordia tanggal 30 Juli 1704. Surat dikirimkan dengan utusan temukung Ama Tomnanu dan Taysiko. Kemudian surat tersebut juga diperlihatkan kepada opperhoofd dan Dewan di Benteng Concordia sebagai penjelasan atas tugasnya. Ia sangat senang bahwa Domingos da Costa mengharapkan hidup berdamai dengan penduduk seperti dahulu kala dan menghentikan pertikaian darah. Untuk memperkuat upaya damai tersebut perlu dibuat kesepakatan antara Raja Kupang, Amabi, Taebenu dan Amfoan dan Kompeni. Mereka meminta Ama Baki saudara lelaki Kaisar Sonbai dan Kasi Nobe temukung besar Amkono datang ke Kupang. Utusan berjanji kepada Noni Sonbai dalam waktu 20 hari akan kembali ke Kupang. Kemudian dicapai kesepakatan antara pihak Noni Sonbai, Kompeni dan Sekutunya dengan Da Costa. Utusan dari Kupang membawa bendera perdamaian berupa

palang merah namun hal itu dinilai sangat asing. Ketika pemimpin pengawal Don Francisco ditanyakan tentang hal itu, ia menjawab bahwa Dominggos da Costa tidak memerintahkan hal itu, tetapi itu adalah inisiatifnya yang dipandang suatu kesalahan. Tetapi salah tafsir itu sudah dimaafkan oleh Noni Sonbai. Maka sejak itu berlakulah perjanjian damai yang berlangsung sampai tahun 1711 (Hagerdal)²²⁰

Upaya perdamaian yang membawa hasil perdamaian telah berlangsung selama 7 tahun. Namun pada tahun 1711 perdamaian berantakan akibat ulah Bishop Malaka di Lifau yang ambisius. Ia merusak hubungan baik antara Dominggos da Costa dengan Liurai Sonbai. Pada tahun 1711 Kaisar Sonbai berkunjung ke Lifau menghadiri upacara pemakaman seorang putri Dominggos da Costa. Pada waktu upacara sedang berlangsung, Bishop Malaka memerintahkan kepada Dominggos da Costa menculik istri Liurai Sonbai. Melalui seorang pelayannya istri Sonbai berhasil diculik. Peristiwa ini menyebabkan Liurai Sonbai sangat marah dan meninggalkan Lifau. Ia secara diam-diam mulai melakukan pemberontakan melawan Portugis. Pasukan Sonbai dibawah komando Manbait. Tetapi perlawanan tersebut berhasil dikalahkan. Pasukan pemberontak menarik diri ke Kupang di bawah kaisar Dom Pedro (Hagerdal).²²¹

Pada bulan November tahun 1711 raja Sonbai Kecil di Kupang menerima pesan dari Manubait, bahwa Portugis Hitam, Amanuban, Amkono dan Belu mengumumkan perang dengannya. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri adalah mundur ke Kupang dan meminta bantuan kepada VOC. Oleh karena itu ia beserta keluarga dan rakyatnya mohon pertolongan. Manubait mengharapkan raja Noni Sonbai dapat mengatasi kesulitannya. Jam 5 dini hari Manubait dan keluarganya dan usif Sonbai Nai Domingo memberikan jawaban bahwa pertama-tama ia harus berkonsultasi dahulu dengan Dewan di Kupang. Setelah itu ia berjanji akan kembali memberikan jawaban esok harinya. Beberapa raja lain yang tinggal tidak jauh dari benteng Concordia tidak ada waktu untuk melakukan musyawarah. Ternyata Pejabat VOC melarang para sekutunya menerima Manubait. Mereka tidak ingin mencampuri urusan pertikaian dengan Portugis. Apabila mereka tidak mau menuruti nasehatnya, maka para raja sekutunya akan menanggung sendiri akibatnya. Oleh karena itu mereka tidak bisa mengharapkan bantuan VOC. Ternyata kemudian para raja sekutu VOC tidak menghiraukan anjuran Pejabat VOC. Didasari atas hubungan baik antara dua kelompok Sonbai, Sonbai Pergi ke dataran Ponai mengambil bendera Portugis yang telah dicampakkan. Ia kemudian kembali pada tanggal 7 Desember. Dua hari kemudian Nai Domingo, raja Ama Koke dari Kupang dan beberapa sahabatnya bertemu di Batu Karang dimana para pengungsi berkumpul sekitar tanggal 5 Desember. Disana terdapat Manubait, Amaneno, Oematan dan Sonbai Jumlah mereka 14.000 orang diantaranya 20 orang Portugis Hitam yang bertindak sebagai pengawal pribadi Maubait. Kemudian mereka berdiam di Teluk Babau

²²⁰ Hagerdal Hans hal. 36

²²¹ Hagerdal Hans, hal. 36

sambil melakukan pendekatan dengan Sekutu VOC²²²

Peristiwa tersebut membuat pejabat VOC tidak senang. Mereka menerima surat dari Lifao yang dibawa sebuah sampan Cina. Gubernur Portugis di Lifau Dom Manuel de Sotto Mayor menyatakan bahwa Manubait adalah pemberontak. Dalam beberapa kali Manubait terlibat pembunuhan dan perampokan. Pasukan gubernur Portugis telah menangkap beberapa orang diantaranya. Dua dari Kupang dan dua dari Oematan dan Amaneno. Oleh karena itu orang Kupang adalah campuran pasukan Manubait. Raja Amarasi melansir adanya rumor bahwa raja Kupang telah mengirimkan 2000 prajurit menolong Manubait. Sotto Mayor meminta kepada VOC agar memerintahkan raja Kupang untuk tidak membantu para pemberontak dan tidak membiarkan mereka tinggal di wilayahnya. Ternyata para raja Sekutu VOC di Kupang tidak merasa sebagai bawahan VOC tetapi sebagai sekutu atau sahabat. Oleh karena itu VOC akan mengatakannya apa yang dimintakan gubernur Sotto Mayor.

Ternyata raja-raja Sekutu VOC di Kupang mengirimkan surat ke Batavia tanggal 21 Mei 1712 yang menyatakan bahwa mereka adalah berhubungan darah dengan para pendatang baru oleh karena itu tidak mungkin menolaknya memberikan bantuan. Manubait dan pengikutnya tidak ada pilihan agar bisa tetap hidup mereka meminta bantuan kepada raja sekutu VOC di Kupang. Oleh karena dalam suratnya para raja Sekutu VOC di Kupang mengharapkan Batavia agar mengizinkan Manubait tinggal sebagai sekutu VOC. Namun maksud baik sekutu VOC mengalami nasib buruk. Pada tanggal 11 Desember 1712 tiba-tiba muncul pasukan Dominggus da Costa dan pasukan Portugis Hitam atas perintah gubernur Sotto Mayor melakukan serangan ke pihak raja Sekutu VOC dan Manubait. Pertempuran hebat meletus. Raja Manubait dan saudara lelakinya, putra Nai Domingo Sonbai, temukung Paneo dan putranya serta sejumlah besar pengikutnya tewas di medan tempur. Sisanya tetap berjuang melawan musuh. Dominggos da Costa membakar dan membunuh siapa saja yang dijumpai termasuk wanita dan anak-anak. Mereka menyebarkan teror ketakutan luar biasa. Dalam suratnya ke Batavia para raja Sekutu VOC menyebutkan pasukan Domingus da Costa berkemah dalam jarak di luar jangkauan tembakan meriam di luar Benteng Concordia. Secara sistematis mereka merusak apa saja termasuk tanaman di ladang, pohon buah-buahan, kerbau, babi dan anjing. Bahkan mayat yang telah dikuburkan dibongkar. Korban sangat banyak dan tidak dapat dihitung diantara orang-orang Timor. Tak ada satupun orang berani memotong cendana karena takut kepada Portugis Hitam. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa terburuk selama setengah abad yang dialami para raja di Kupang di bawah pemerintahan VOC (Hagerdal)²²³

Dalam keadaan yang serba susah Manubait tidak memungkinkan tetap tinggal di Kupang. Sebagian besar dari rakyatnya kembali menarik diri ke pedalaman. Sebagian

²²² Hagerdal Hans hal. 78

²²³ Hagerdal Hans hal. 78

dari penduduk Kupang berpindah ke sebelah Timur mencari kehidupan yang lebih aman. Amtiran suatu kelompok yang berafiliasi dengan Amarasi tiba tahun 1700, mereka kembali ke Amarasi pada bulan Januari 1713. Penduduk dari Kupang, Sonbai, Amabi, Amfoan dan Taebenu menarik diri sebagian ke Amarasi, tetapi sebagian besar kembali ke wilayah Amkono. Manubait pada awal melakukan pendekatan dengan Noni Sonbai untuk mendapatkan bantuan ternyata lebih besar jumlahnya dari yang diperkirakan Belanda. Itulah sebabnya pantas saja apabila para raja sekutunya dalam surat ke Batavia tanggal 17 April 1713 menyatakan kemarahannya. Raja Noni Sonbai dengan dua pejabatnya dan raja Taebenu menyimpulkan bahwa kepemimpinan Opperhoofd Reiner Leers di Benteng Concordia Kupang sangat jelek. 10 bulan sebelumnya Reiner Leers meminta jagung kepada raja sekutunya. Raja Noni Sonbai sedapat mungkin membantunya dengan harga 9 real setiap 40 pound. Tetapi ketika kemudian para rakyatnya memerlukan makanan karena kelaparan mereka harus membeli kembali dengan harga 18 pieces setiap 40 pound. Mereka terpaksa menjual apa saja demi untuk mempertahankan hidup keluarganya. Tidak ada tindakan perlindungan apapun bagi rakyat yang menghadapi serangan dari Amakono.

Ternyata masih ada 330 rakyat Manubait berdiam di Kupang sebagian besar para wanita. Pada tahun 1714 terjadi konflik antara raja Sonbai dan raja Kupang. Mereka berpendapat bahwa rakyat yang datang menetap di Kupang sebenarnya adalah rakyatnya sebelum mereka datang ke Kupang. Tetapi raja Kupang menyatakan bahwa mereka adalah rakyatnya karena mereka telah berhutang padanya. Ia mengharapkan mereka membayar upeti kepadanya. Opperhoofd VOC di Kupang kemudian melakukan mediasi atas pertikaian tersebut dan berhasil. Semua kemudian berjalan harmonis kembali setelah musuh berhasil dikalahkan (Hagerdal tanpa tahun)²²⁴

2.7. Tragedi tahun 1722.

Tragedi ini terjadi di wilayah Amkono dan wilayah Dominggos da Costa. Dominggos da Costa mempunyai masalah dengan raja Amkono sebagai bagian dari kerajaan Sonbai selama beberapa tahun. Pada tahun 1720 Dominggos da Costa menangkap 3 pemimpin pemberontak dari Amkono. Dominggos da Costa melakukan serangan ke wilayah Amkono. Usif Sonbai Nai Sao Domingo memberikan informasi kepada opperhoofd VOC di Kupang berdasarkan keterangan temukungnya yang bernama Nai Niki. Temukung tersebut sedang berada di wilayah Amkono ketika serangan terhadap Amkono terjadi. Dalam serangan ke wilayah Amkono, Dominggos da Costa dan pasukan Topasses/Portugis Hitam bertindak sangat kejam. 3000 rakyat Amkono terbunuh dalam serangan tersebut. Istri, anak-anak yang masih hidup ditawan dan dibawa ke Tulang Ikan tempat tinggal Dominggos da Costa di dekat Lifao²²⁵

²²⁴ Hagerdal Hans hal. 80

²²⁵ Hagerdal, Hans hal 38.

Peristiwa tersebut juga dimanfaatkan oleh Bishop Dominggos Soares dari Manatuto, Capitaio mor Belu yang pro Portugis yang disuruh memerangi musuh-musuh Portugis di Timor. Pada waktu bersamaan Bishop Malaka ingin menyerang Dominggos da Costa. Hal ini disebabkan dimata Bishop Malaka Dominggos da Costa telah banyak melakukan kejahatan melawan hukum, melawan gereja dan mahkota Portugis. Mereka menyuruh raja Serviao bernama Atopa/Tepa untuk menjalankan aksinya. Atopa mulai berkampanye dibantu Bishop Malaka. Untuk itu diperbantukan komandan detasemen Martinho Ferreira de Arago. Pada waktu bersamaan Dom Ventura da Costa dari kerajaan Viqueq, Capitaio mor Lifao. Mereka berangkat menuju Tulang Ikan tempat kedudukan Dominggos da Costa. Mendengar akan upaya penyerangan terhadap Tulang Ikan, Dominggos da Costa dengan cepat bereaksi menghadapi rombongan pasukan musuh. Terjadi pertempuran hebat. Raja Atopa tewas dalam pertempuran. Sekutunya Martinho Ferreira de Arago menyingkir kembali ke wilayah tempat tinggal sisa detasemen pasukannya di Belu ²²⁶

Sepuluh hari setelah penyerangan ke Amkono, disebutkan Dominggos da Costa pada malam tanggal 23 Februari 1722 meninggal dunia. Pada waktu upacara penguburan disebutkan rambut Dominggos da Costa dipotong. Hal ini menyesuaikan dengan adat budaya Timor, karena Dominggos da Costa lebih merasa dekat dengan budaya Timor dari pada budaya Portugis. Ada satu rumor bahwa kematian Dominggos da Costa bukan mati wajar tetapi dibunuh oleh Bishop Malaka dengan kekuatan supra natural/gaib. Kematian Dominggos da Costa sangat dirahasiakan. Namun diketahui bahwa ia digantikan oleh menantunya bernama Fransisco da Hornay II. Pada waktu ia menggantikan kedudukan mertuanya, para tawanan perang dari Amkono dibebaskan dan boleh kembali ke wilayah Amkono agar bisa mengumpulkan cendana dan lilin (Hagerdal).²²⁷

2.8. Perang Penfui 1749

Perang Penfui merupakan akumulasi persaingan antara VOC dan Sekutunya dengan Portugis dan Portugis Hitam dan Sekutunya. Kaum Topasses atau Portugis Hitam dan Amkono di pedalaman melakukan perlawanan besar yang ditujukan kepada Sonbai Kecil di Kupang secara terus menerus. Ekspedisi dilakukan pada tahun 1735. Kaisar Sonbai mengirimkan peringatan kepada Sonbai Kecil di Kupang sebelum terjadinya serangan oleh Topasses pada tahun 1735 karena alasan hubungan keluarga. Untuk kepentingan pertahanan dan ekspansi Portugis dan Portugis Hitam/Topasses mengumpulkan banyak penduduk untuk melawan VOC dan sekutunya. Namun kelompok-kelompok mereka sering berjalan sendiri-sendiri. Unsur Portugis putih memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak kepada Topasses atau Portugis Hitam di Timor di bawah kendali keluarga da Hornay dan da Costa. Pada

²²⁶ Hagerdal, Hans hal. 36

²²⁷ Hagerdal Hans.hal 40

tahun 1740 mereka melakukan perdamaian dengan para penguasa di Belu ²²⁸

Portugis Hitam nampaknya mempunyai *grand desain* melumpuhkan VOC dan Sekutunya di Kupang. Pada tahun 1748 opperhoofd VOC di Kupang dijabat oleh van den Burg. Pada masanya VOC di Kupang menghadapi masalah yang serius. Ancaman keamanan dari Portugis Hitam semakin besar tetapi kondisi kekuatan pasukan VOC di Kupang sangat terbatas. Waktu itu pasukan kulit putih di Kupang hanya berjumlah 20 orang saja. Oleh karena itu keamanan sangat tergantung dari bantuan pasukan sekutu VOC di sekitar Kupang termasuk pasukan orang merdeka, pasukan Sabu, Solor dan Rote. Persaingan antara VOC dengan Portugis mencapai puncaknya pada tahun 1749. VOC telah berhasil membangun aliansi dengan para raja di pulau Rote, Solor Lima Pantai, Sonbai Kecil, Kupang, Taebenu, Fatuleu, Amabi, Funay ²²⁹, sedangkan Portugis dengan sekutunya: Ambenu, Amarasi, Amkono. Pada tahun 1735 dan 1745 telah dilakukan serangan terhadap VOC di Kupang. Pada tahun 1748 Amfoan Sorbian meminta bantuan VOC di Kupang untuk melawan Portugis Hitam. Tetapi opperhoofd VOC Van Den Burg tidak meluluskan permintaan tersebut. Karena mereka mengharapkan para raja tersebut mampu melakukan perlawanan sendiri. Amfoan kemudian melakukan serangan ke wilayah Portugis dan panji-panjinya dikibarkan di Animata dimana Letnan Jendral Gaspar da Costa III tinggal ²³⁰.

Kemudian para prajurit Amfoan Sorbian dibantu para prajurit yang dikirimkan VOC yang terdiri dari orang-orang mardijkers. Suatu hal yang menarik mengapa VOC membantu melawan kekuatan Portugis Hitam secara diam-diam? Dalam serangan ini beberapa prajurit Gaspar da Costa III tewas. Kenyataan tersebut memperkuat niat Amfoan Sorbian untuk bersekutu dengan VOC, oleh karena itu bersurat ke Kupang dengan memberi persembahan. Karena faktor tersebut memperkuat keinginan Letnan Jendral Gaspar da Costa III meningkatkan upaya tangan besinya mengikat persekutuan dengan para raja di sekitarnya. Costa Sandalo (Pasqual da Costa) saudara lelaki Gaspar da Costa III dan Tenente wilayah Amanuban, telah membunuh 2 temukung Amanuban. Sesudah itu pasukan Portugis hitam berupaya menyerang Amfoan Sorbian dan Amanuban. Tidak tahan menderita tekanan orang-orang Amanuban mengungsi ke wilayah VOC diikuti Amkono. Pada awal tahun 1749 sejumlah raja Amkono meminta bantuan ke wilayah VOC melawan Portugis Hitam: Neebe Noni, Kayba Taiboko, Aukemal Natung, Aakenat Tamella, Lamoeeme Pitai, No Ebesi Banoni, Tousala Amaneno, Kloe Taka, Taka Lupan, Ta-eka Manoene dan Tanessi Benoe (Hagerdal) ²³¹

Dalam salah satu surat yang lain tahun 1749 disebutkan raja Amkono yang

²²⁸ Schulte Nordholt H.G.1971 hal.42

²²⁹ Schulte Nordholt H.G.1971 hal 178

²³⁰ Schulte Nordholt H.G.1971 hal. 181

²³¹ Hagerdal Hans hal. 42

bernama Alfonso Salema atau Nabi Bahoe ditundukkan Portugis Hitam, ia kehilangan 120 orangnya tewas. Ia mengungsi ke Kupang diikuti 2.305 pengikutnya bersenjata dengan keluarganya meminta perlindungan VOC. Faksi Portugis Hitam pimpinan Gaspar da Costa III menghimpun kekuatan untuk melawan VOC. Serangan besar dirancang ditujukan ke pusat kedudukan VOC di Kupang. 40.000 sampai 50.000 pasukan berhasil dihimpun untuk menyerang Kupang Pasukan gabungan berkumpul di Amarasi. Pasukan gabungan dipimpin Letnan Jendral Gaspar da Costa, Tenente de Profincia Pasqual da Costa, Tenente Cooronel Siko Bras, Capitaio Mor da Pauvoacao Dominggo de Faria, *Capitao mor da Compo* Simao Luis, Kaisar baru Amkono Bastiano, bersama-sama jendral, kolonel, raja Ambenu Paulo, Januario Fernandes Varello kepala orang Lantoka, raja-raja Belu, Amanatun dan Amanuban (Schulte Nordholt, 1971)²³². Di pihak VOC pasukan gabungan dipimpin oleh: vandrigh Chrisstoffel Lip, dibantu seorang sersan, 2 kopral, 23 prajurit kulit putih, 240 prajurit Sabu, 60 prajurit Solor yang dipimpin Atulaganama, 30 prajurit Rote, 130 pasukan mardijkers dipimpin Frans Maukana/Monkana dan para sukarelawan dari para raja sekutu VOC.

Dalam rangka melakukan serangan ke Kupang kekuatan pasukan Portugis dan para Sekutunya membangun 5 buah benteng kecil yang disebut Pagger sebagai pertahanan. Dalam kondisi demikian sebenarnya posisi VOC dan Sekutunya dan kondisi terkepung. Oleh karena itu diatur suatu strategi yang tepat mengalahkan musuh dengan kekuatan besar dan telah mengepung benteng Concordia. Opperhoofd VOC van den Burg sebelum melakukan serangan balasan melakukan doa bersama di gereja. Serangan terjadi pada tanggal 9 November 1749 tengah malam. Pertempuran dikenal dengan sebutan Perang Hanoni yang kemudian dikenal sebagai perang Penfui. Mereka memutuskan tidak melakukan serangan balasan secara serentak tetapi dengan taktik serangan mendadak di tengah malam tatkala musuh lengah. Dengan strategi ini membawa hasil. Pasukan VOC dengan sekutunya berhasil merebut satu demi satu pagger Portugis. Pimpinan Pasukan Portugis yang bernama Gaspar da Costa III karena terdesak berusaha melarikan diri dengan kudanya diikuti oleh pasukannya. Tetapi mereka dikejar oleh pasukan Belanda dan Sekutunya (Widiyatmika M.2010)²³³. Komandan pasukan dan beberapa pengikutnya terbunuh.

Pada waktu Portugis berada di Kupang, kedudukan Portugis berada di Fonteijn. Sedangkan Nai Kopan berada di Fatufeto yakni di Buni Baun. Portugis memanggil Nai Kopan tetapi Nai Kopan tidak hadir. Kemudian dipanggil lagi tetap tidak hadir. Pada waktu itu Kampung merdeka sudah ada dipimpin oleh Kapten Frans. Nai Kupang berhubungan dengan Kapten Frans di Kampung Merdeka. Ia meminta bantuan pada kapten Frans. Sebelum terjadi serangan Portugis ke pusat kedudukan VOC di Kupang, terdapat dua orang bekas pembantu Pimpinan Portugis yang dipecat

²³² Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 178

Lihat van der Chijs, 1970 hal. 112

²³³ Widiyatmika M.2010 hal 80

dan diusir bernama Sipora dan Silva. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan Kapten Frans mendekati kedua bekas pembantu tersebut. Akhirnya kedua bekas pembantu tersebut mau diajak bekerja sama. Karena kedua bekas pembantu tersebut telah dikenal oleh Portugis mereka bebas kemana saja. Kedua bekas pembantu tersebut disuruh Kapten Frans secara sembunyi-sembunyi untuk menutup lubang penyulut api/sumbu meriam Portugis. Meriam Portugis ditutup dengan paku agar tidak berfungsi. Kedua pembantu tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan melaporkan tugasnya kepada kapten Frans. Kapten Frans melaporkan hal itu kepada pimpinan pasukan VOC Vandrig Christoffel Lip²³⁴

Dalam perang Penfui para prajurit pribumi sekutu Portugis dinilai kurang aktif, sehingga pasukan Portugis berhasil dipukul mundur. Mereka melarikan diri bersama komandan Portugis tetapi akhirnya berhasil ditundukkan. Perang Penfui merupakan perang hebat dan menentukan baik bagi Belanda maupun Portugis. Sejak kekalahan dalam perang Penfui bagi Portugis merupakan pukulan hebat. Kekuatannya semakin surut. Sebaliknya kekuasaan VOC semakin berkembang kekuasaannya di Timor.

Dalam pertempuran ini tidak saja komandan pasukan Portugis Gaspar da Costa III terbunuh, ikut tewas pula raja Amkono Don Bastiano dengan 2 raja sekutu Portugis lainnya. Gaspar da Costa III kemudian diketahui dikuburkan di Nasi Panaf dekat Bandara El Tari Kupang. Korban di pihak pasukan VOC 19 orang pasukan pribumi tewas, 1 orang merdeka dan 2 orang Schutery tewas. Tak terhitung jumlah yang menderita luka-luka. Namun dalam perang ini tidak disebutkan berapa pasukan orang Rote, Sabu dan Solor yang tewas (A.Haga, 1882).²³⁵

Ada dua peristiwa menarik dalam perang Penfui di Kupang pada tanggal 9 November 1749 yakni peran kerajaan Amarasi dan Helong/Kupang dalam kancah pertempuran. Ataupun dalam disertasinya tahun 1992 mengemukakan sebagai berikut: Raja Amarasi sebagai sekutu Portugis Hitam sebenarnya telah turun dari Amarasi, beserta para meo dan prajuritnya. Namun Raja Amarasi dan para pembesarnya berhasil dibujuk oleh Usif Amabi bersama usif Manbait yang waktu itu menghadang pasukan Kase Metan dan membantu pasukan merdeka. Akhirnya raja Amarasi dan pasukannya hanya menonton saja peristiwa peperangan yang terjadi dimana pasukan Kase Metan porak poranda. Ternyata Usif Amabi waktu itu adalah mertuanya raja Amarasi. Sejak saat itu Pihak keluarga Da Costa di Noemuti memutuskan hubungan dengan Amarasi. Hanya meo Foni di kelompok Ataupun yang masih diperbolehkan berkunjung ke Noemuti sampai abad ke 19. Jill Joliffe (1978)²³⁶ mengemukakan bahwa pada waktu meletus perang Penfui kelompok pasukan dari Rote dan Sabu nyaris meninggalkan pertempuran. Tetapi pimpinan VOC berhasil mencegahnya

²³⁴ Widiyatmika M.2010 hal.78

²³⁵ Haga A.1882 hal.397-398

²³⁶ Jill Joliffe 1978 hal.29-30

dengan pendekatan yang halus. Di samping itu agar tidak terjadi pelarian keluar pulau perahu-perahu yang sedang ditambah di pelabuhan diputuskan tali tambatnya dan meriam-meriamnya ditenggelamkan.

Heymering (1847) menyebutkan raja Helong tidak turut aktif dalam perang Penfui bahkan meninggalkan Kupang menuju pulau Semau. Menurut G.Fios dalam Ataupah (1992) ²³⁷ mengemukakan keangggan Raja/Lahi Kupang, karena ibu Gaspar da Costa yang memimpin perang Penfui dari pihak Portugis Hitam adalah Johana Helong seorang putri Lahi Helong. Perkawinan terjadi karena ayah Gaspar da Costa, Domingus da Costa biasa beroperasi tidak terlalu jauh dari Benteng Concordia..

Setelah kekalahan Portugis dalam perang Penfui, disebutkan bahwa Kapten merdeka Frans Monkana oleh Belanda dianggap sebagai pahlawan karena ia dianggap tokoh yang paling berjasa memenangkan peperangan. Ia bersama adiknya Herman Monkana serta orang merdeka mendapat perlakuan istimewa. Ternyata kemenangan VOC dalam Perang Penfui masih menyisakan persoalan yang perlu diselesaikan. Gubernur Portugis yang baru di Timor bernama Manuel Doutel de Figueiredo yang menjadi gubernur di Timor dari 1751-1759, berupaya menyelamatkan gengsi Portugis kembali di mata para raja bekas sekutunya. Pada masa kedatangannya pada bulan April 1751, kemudian ia membuat kebijakan baru. Ia menghubungi raja Sonbai dan beberapa raja lain di Kupang. Para raja bekas sekutunya yang telah mengungsi ke Kupang meminta perlindungan kepada VOC dimohon kembali ke tempat asalnya. Mereka diberi pengampunan atas kesalahannya melakukan perlawanan terhadap Portugis. Upaya tidak sia-sia Amarasi, Amkono dan Sonbai kembali bersahabat dengan Portugis. Tanggal 13 Juni 1751, Belanda memerintahkan 4000 penduduk asal Rote dan Sabu dikirim ke Kupang untuk membantu sekutu VOC antara lain Sonbai dan raja sekutu VOC lainnya. Pasukan bantuan tersebut melakukan serangan kepada sisa-sisa sekutu Portugis yang masih loyal pada Portugis dan berada di sekitar Kupang. Kekuatan sisa sekutu Portugis berhasil dihancurkan. Sejak kekalahan dalam Perang Penfui terjadi titik balik kekuatan politik di Timor ²³⁸

Pada tahun 1752 ternyata Amarasi kembali melakukan perlawanan. Raja Amarasi de Gaspar da Mascarenha datang ke Kupang untuk menyatakan tunduk. Ia dituduh tidak mengabdikan kepada usif Amabi mertuanya. Dalam ungkapan disebutkan: Seperti ternak berekor panjang yang tidak bertanda milik di telinganya karena telah berbaikan kembali dengan Kase Metan sehingga menjadi musuh Amabi. Raja Amarasi ditawan dan dibuang ke Batavia bersama raja Amanasi Anas dan Amanette. Oleh karena itu Amarasi melakukan perlawanan kembali. Untuk menaklukkan perlawanan Amarasi, pasukan Belanda dibantu pasukan Rote, Sabu. Amarasi akhirnya berhasil ditundukkan kembali. Raja Esu tewas. 1000 penduduk Amarasi ditangkap. Mereka

²³⁷ Ataupah H.1992 hal. 209

²³⁸ Widiyatmika M 2010 hal. 80

kemudian dikirimkan ke pulau Rote dan Sabu dijadikan budak sebagai imbalan bantuan pasukan Rote dan Sabu yang membantu menumpas perlawanan Amarasi. Raja Amarasi dan Alfonso beserta para pembesar dipaksa keluar Amarasi dan mereka di kucilkan di Selatan Kupang selama 4 tahun Kemudian mereka dikembalikan ke Amarasi (Schulte Nordholt, 1971) ²³⁹

Pasca perang Penfui kekuatan Belanda di Kupang semakin berkembang sebaliknya kekuatan Portugis dan Portugis hitam semakin surut. Kalau sebelum Perang Penfui VOC dengan kedudukan di Kupang bersifat defensif dengan pusat pertahanan di benteng Concordia. Serangan secara bertubi-tubi dan bergelombang dilancarkan oleh Portugis, Portugis Hitam dan Sekutunya ditujukan ke Kupang. Namun sesudah Perang Penfui, Belanda di Kupang dapat melakukan offensif melakukan serangan ke pedalaman terhadap Portugis, Portugis Hitam dan sekutunya.

2.9. Perjanjian /Kontrak Paravicini

Gubernur Jendral VOC Jacob Mossel menunjuk Johannes Andreas Paravicini sebagai Komisaris VOC di Kupang. Pada bulan Maret J.A.Paravicini berangkat dari Batavia dengan kapal VOC *Osdrop*. 26 hari kemudian J.A.Paravicini tiba di Kupang dan disambut dengan tembakan meriam (van der Chijs, 1972)²⁴⁰. Salah satu kebijakan Paravicini adalah meneguhkan kembali seluruh perjanjian yang telah dibuat dengan berbagai raja. Perjanjian yang dibuat selama ini adalah bersifat lisan. Hagerdal (tanpa tahun) menyebutkan di samping upaya meneguhkan kekuasaan VOC dalam perjanjian ini Paravicini juga menyelipkan suatu propaganda. Dalam pasal-pasal Paravicini mencantumkan suatu pendekatan psikologi yang diharapkan menarik simpati para raja. Disebutkan bahwa bahwa mereka sejak saat itu dibawah perlindungan VOC di Kupang. Dimaklumkan bahwa antara orang kulit putih dan kulit berwarna tidak ada perbedaan lagi. Baik orang kulit putih maupun kulit warna dimata hukum adalah sama. Mereka perlu mendapat perlakuan sebagai manusia secara manusiawi. Semua manusia bersaudara. Kesengsaraan selama ini adalah akibat ulah kekejaman Portugis. Oleh karena itu sebagai imbalan atas perlindungan VOC terhadap mereka mereka meminta imbalan.

Perjanjian atau kontrak baru dibuat secara tertulis dengan 48 raja di Timor, Rote, Sabu, Solor dan Sumba. Perjanjian ditanda tangani tanggal 17 Juli 1756 berisi 23 pasal, Fox, 1977 dalam Widiyatmika M (2010). ²⁴¹ Isi perjanjian antara lain:

- a. Penegasan kembali para raja yang menanda tangani kontrak mengakui kedaulatan VOC.
- b. Mereka mendapat perlindungan VOC
- c. Sebagai imbalan perlindungan para raja diwajibkan membantu pertahanan

²³⁹ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 181

²⁴⁰ Van Der Chijs, van, 1972 hal. 222

²⁴¹ Widiyatmika M. 2010 hal 91

Kupang dengan menyediakan tenaga kerja. Harus disediakan 100 prajurit terbaik oleh setiap raja dengan 500 orang pembawa beban dan 40 orang berkuda.

- d. Setiap raja harus mengirimkan 200 orang dua kali dalam setahun apabila musim memungkinkan untuk menambang emas di sungai Miomaffo di wilayah Amkono dan di sungai Tepas di Amanuban. menyediakan 100 orang. Ketentuan ini dicantumkan karena VOC akan melakukan penambangan emas di Tepas, Amanuban dan di Gunung Miomaffo wilayah Amkono.
- e. Khusus untuk para raja di pulau Rote dan Sabu harus membantu menyediakan sejumlah tenaga kerja untuk VOC berjumlah 785 pasukan jalan kaki dan 785 pasukan berkuda bagi para raja di Rote, sedangkan para raja di pulau Sabu menyediakan 380 pasukan jalan kaki dan 380 pasukan berkuda.
- f. Para raja harus mewajibkan rakyatnya menanam lada dan indigo (upaya ini gagal).

Dari perjanjian tersebut juga diketahui VOC berhasil memantapkan monopoli perdagangan cendana di Timor karena para raja yang menandatangani perjanjian dan di wilayahnya terdapat pohon cendana hanya boleh dijual kepada Kompeni Belanda.

Para raja yang menandatangani kontrak Paravicini 48 raja di Timor, Rote, Sabu, Sumba dan Solor. Diantaranya untuk wilayah perbatasan di Belu ditandatangani oleh raja besar Belu Hyacinto Correa raja besar Belu atas nama 29 raja di bawahnya. Ikut tanda tangan Don Bernardo raja Amkono, Sousale raja Sorbian (Tom Therik, 1995)²⁴². Ke 29 raja di lingkungan kerajaan yang ditandatangani Hijcintoe Coerea adalah:

Kerajaan	Nama sekarang	Lokasi sekarang
1. Bahale	Wehali	Distrik Malaka Tengah/Beli
2. Bany Bany	Bani Bani	Distrik Malaka Tengah/Belu
3. Wyiwiko	Wewiku	Distrik Malaka Barat/Belu
4. Dirman	Dirma	Distrik Malaka Timur/Belu
5. Lakeko	Lakekun	Distrik Koba Lima/Belu
6. Tehalara	Fialaran	Distrik Tasifeto Timur/Belu
7. Lidacdoalilu	Lidak, Jenilu	Distrik Tasifeto Tengah/Belu
8. Lamkne	Lamaknen	Distrik Lamaknen/Belu
9. Sakoenaba Baybohie	Biboki	Kabupaten Timor Tengah Utara
10. Maubara	Maubara	Regensi Likusi/Timtim
11. Satoletie	Daro Lete	Regensi Likusi/Timtim
12. Letitoely	Leten Telu	Regensi Likusi Timtim
13. Botoboroo	Baibau	Regensi Likusi Timtim
14. Lakoele	Laclo/Lakulo	Regensi Manatuto, Timtim
15. Samoro	Samoro	Regensi Manatuto Timtim
16. Lankero	Laicore, Laceu	Regensi Kova Lima

²⁴² Tom Threik, 1995 hal. 51

Lihat Schulte Nordholt H.G. 1971 hal 164

17. Soeway	Suai	Regensi Kova Lima
18. Reywea	Raimean	Regensi Kova Lima Timtim
19. Samayottasabe	Same Atsabe	Regensi Same Timtim
20. Atasluca	Alas Luca	Regensi Same Timtim
21. Corora	Kowa	Regensi Bobonaro
22. Maboro	Marobo	Regensi Bobonaro Timtim
23. Layonea	Ailomea	Regensi Bobonaro Timtim
24. Laymea	Leimea	Regensi Ermera Timtim
25. Diroewaty	Deribite	Tak diketahui/Timtim
26. Loabaly	Loa Bali	Tak diketaahui
27. Junisama	Tak diketahui	Tak diketahui
28. Mamefay	Tak diketahui	Tak Diketatahui
29. Thieries	Tidak diketahui	Tak diketahui

Dalam laporan Paravicini didapati para Schutterij (semacam hansip) dalam kondisi kocar kacir. Mereka kurang disiplin dan banyak berhubungan dengan para raja. Pada waktu Paravicini datang para mardijker dibagi dua yakni *Oedale* yang berasal dari Rote dan *Subadale* yang berasal dari Sabu. Paravicini juga melaporkan bahwa dari 5 raja sekutu VOC di Kupang, raja Kupang yang paling tidak menyenangkan. Raja Kupang waktu itu bernama Way Manas. Ia kemudian dibuang ke Batavia tahun 1785 karena ia menuntut ganti rugi kepada 4 raja sekutu VOC atas tanah-tanah yang mereka diami yang sebenarnya milik raja Kupang. Kemudian Paravicini juga membuat kebijakan tentang tanah di Kupang di lingkungan *zes palen gebied* yang dianggap tanah gubernemen./VOC. Semua orang yang mendiami tanah gubernemen/VOC harus memiliki surat hak milik jual beli. Untuk itu harus membayar kepada VOC sebesar f.10.284.²⁴³

Seorang tokoh dari keluarga Funay bernama Laffu Funay seorang amaf, ia bersama 400 pengikutnya baru diijinkan bermukim di sekitar benteng Concordia setelah membayar 100 ringgit pada tanggal 25 Mei 1756 kepada J.A.Paravicini. Amaf Funay baru diakui sebagai usif setelah perang Amanuban dalam abad ke 19 (Middelkoop 1952, Haga, 1992, Jun Talan 1901 dalam Ataupah 1992)²⁴⁴

2.10. Ekspedisi Ke pedalaman Timor tahun 1758-1760

Ternyata pasca perjanjian Paravicini VOC tidak yakin atas para raja yang telah menyatakan tunduk kepada VOC. Oleh karena itu pada masa opperhoofd VOC van Pluskow pada tahun 1758-1760 VOC melakukan ekspedisi ke pedalaman antara lain ke Noemuti, Ambenu, Insana, Taito dan Dirma di Belu. Di Noemuti mereka mendapat perlawanan di bawah pimpinan da Costa terjadi perang Oni Mabun. Dalam ekspedisi tahun 1760 opperhoofd Hans Albrecht von Pluskow tewas dalam pertempuran di

²⁴³ Ataupah H.1992 hal.187

²⁴⁴ Ataupah H.1992 hal. 188

Lihat Hagerdal, Hans hal.46

pinggir Pantai Lifao (Pantai Makasar) dengan Fransisco de Ornay di Lifao (Schulte Nordholt, 1971) ²⁴⁵

Setelah ekspedisi van Pluskow dalam rangka penaklukan pedalaman Timor, pada tahun 1760 dilakukan penggalian emas di Tepas. Untuk penggalian emas diperlukan tenaga kerja penggali tambang 2.700 orang yang harus dikerahkan oleh 15 amaf dari Liurai Sonbai dan Kono dan 1 amaf Amabi. Pekerjaan ini sangat berat dan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Pada tahun 1767 terjadi pembunuhan juru bahasa G.Gheesen dan 30 orang merdeka di bawah pimpinan Kapten Josep Kana yang dilakukan oleh Musu Neno seorang kemenakan Saubaki Sonbai. Penyerangan ini berakibat Belanda menuduh Saubaki Sonbai yang harus bertanggung jawab. Akhirnya Saubaki Sonbai ditangkap tahun 1771 dan dibuang ke Capetown, Afrika Selatan (Schulte Noedholt, 1971) ²⁴⁶. Ia memiliki putra yang kebetulan masih anak-anak bernama Adrianus Sonbai atau Ana Leu yang dididik di kediaman residen Willem Adriaan van Este. Namun ia melarikan diri karena akan dibunuh orang. Ia melarikan diri ke pedalaman dan diterima sebagai usif di Kuala Sungai Talmanu di bekas wilayah Sonbai. Putranya bernama Baob Sonbai alias Don Alfonso Salema, saudara lelakinya bernama Luis Ricardus Sonbai kawin dengan seorang putri pemimpin Portugis Hitam Da Costa dari Noemuti ²⁴⁷

Pada tahun 1847 Manbait merusak dan membakar desa Babau sebagai salah satu desa di daerah penyangga yang dihuni orang Mardijker dan orang Rote. Penyerbuan ke Babau dilakukan oleh Manbait dengan membakar rumah-rumah yang ada. Ketika penyerbuan dilakukan orang-orang Babu sedang panen di persawahan. 148 rumah dibakar habis. Jumlah korban terbunuh 60 orang. Pada tanggal 1 November 1847 Belanda mengerahkan pasukan mardykers di bawah Kapten de Rooy dengan kekuatan 2000-3000 pasukan yang terdiri dari pasukan merdijka, Papanger, Burger dan orang-orang Rote dan Sabu serta rakyat kerajaan Tabenu, Funay, Amabi dan Sonbait Kecil. Untuk membalas serangan Manbait, Camplong diserang pasukan gabungan. Untuk mengantisipasi serangan balasan Belanda, Manbait telah mengungsikan orang tua, wanita dan anak-anak ke pondok-pondok di ladang ²⁴⁸

2.1.1. Pemindahan pusat kedudukan Portugis dari Lifau ke Dili.

Pada tahun 1769 pusat kedudukan Portugis di Lifao terpaksa harus dipindahkan ke Dili. Pemindahan ini disebabkan karena beberapa hal yakni:

Fransisco da Ornay III melakukan perlawanan terhadap kekuasaan gubernur Portugis di Lifao. Pada tahun 1768 datang gubernur baru Portugis bernama Antonio Jose Teles Meneses di Lifao. Dia melakukan tindakan yang dianggap bodoh yakni:

²⁴⁵ Schulte Nordholt H.G.hal183

²⁴⁶ Schulte Nordholt H.G.1971 hal.183

²⁴⁷ Atupah H.1992 hal. 165

²⁴⁸ Widiyatmika M.2010 hal.127

membunuh 23 orang Portugis hitam. Yang masuk tanpa ijin pada waktu ada suatu gejangan senjata. Kejadian ini sangat menyakitkan hati Fransisco da Ornay. Ia dengan pasukannya mengepung Lifao selama setahun. Gubernur yang terkepung dalam kota Lifao harus memberi makan 1.200 orang termasuk wanita dan anak-anak. Keadaan menjadi semakin sangat sulit dan tidak ada harapan. Pada malam hari tanggal 10 dan 11 Agustus 1769 gubernur memuat bahan makanan, meriam-meriam dan sebagainya di sebuah kapal dan dengan sebuah pasukan terdiri dari 15 orang, mereka berlayar menuju ke Timur. Apa saja yang tertinggal dibakar habis. Pada tanggal 10 Oktober 1769 dia mendarat di Dili sebuah desa nelayan di sebuah raawa-rawa yang tidak sehat, tempat penyakit malaria. Suatu keuntungan disana tenang tidak ada gangguan dari orang Belanda, tidak ada gangguan dari keluarga Fransisco da Ornay yang selalu memberontak (Sejarah Gereja Katolik Indonesia I, 1974)²⁴⁹

Pemindahan juga dilandasi Portugis ingin menghindari serangan langsung dari kekuatan Belanda (Barros, 1984)²⁵⁰

2.12. Hubungan antar kerajaan di Wilayah Perbatasan

Hubungan masyarakat berdasarkan ikatan rumah/adat: di wilayah perbatasan dikenal beberapa jenis hubungan yang didasarkan atas ikatan uma/rumah adat menurut A.A. Bere Tallo (1968)²⁵¹ yakni:

Ikatan persahabatan dalam bahasa Tetun *Alin Maun*, dalam bahasa Buna *kau kan, hulo lep*. Ikatan sumpah setia. Dalam bahasa Tetun disebut *koruk metan*, bahasa Bunak *per molok*, Hubungan karena perkawinan dalam ba-lam bahasa Tetun disebut *uma mane fetu sawa*, bahasa Dawan/Uab Metto: *Feto Mone*, bahasa Bunak *Malu ai*. Hubungan atas dasar pemerintahan dalam bahasa Tetun disebut *sasia tatanen* dan bahasa Bunak *Dasa Rak*.

Dalam kaitan dengan hubungan antar kerajaan, dikenal hubungan berdasarkan garis keturunan/leluhur antara lain: Para raja yang bergelar Liurai di lingkungan kerajaan Wesei Wehali antara lain: Liurai Sonbai di Timor Barat/matahari Turun/Loro Toba, Liurai Likusaen di bagian Timur/matahari terbit/Loro Sae dan di Pusat di Belu Liurai Fatuaruin. Beberapa raja di lingkungan kerajaan Wesei Wehali yang bergelar loro seperti loro Biboki, loro Insana, loro Miomaffo dan beberapa loro di wilayah Belu mengakui leluhurnya berasal dari Malomak Oan di Belu. Beberapa kerajaan di Belu yang mengaku masih mempunyai hubungan keluarga dikenal beberapa kerajaan dengan istilah: Malaknen (enam piring untu anak raja), Lamak Senulu (delapan piring unuk anak raja), dato hitu (tuju datu atau raja), datu hat (empat raja), dasi sanulu (delapan dasi/raja). Dalam hubungan perkawinaan antar kerajaan dikenal beberapa

²⁴⁹ SejarahGereja Katolik I..1974 hal 407

²⁵⁰ Barros, Jorge Duarte, 1984 hal.44,45

²⁵¹ Bere Tallo.A.A. 1868 hal 1

kerajaan seperti: Hubungan keluarga beberapa raja di Belu dengan raja di Oekusi.

Putra Matheos da Costa yakni Dominggus da Costa nantinya membangun pusat kedudukan baru di Noemuti. Putri keturunan da Costa dari Oekusi yang bernama Donna Petronela da Costa menjadi istri raja Jenilu yang wafat tahun 1855 dan baru dikuburkan tanggal 9 Juli tahun 1875. Ia mempunyai putri bernama Dato H.M. Donna Marianna Rosa da Costa kawin dengan raja Lidak. Putranya yang bernama Don Basinti menjadi raja Naitimu dari tanggal 27 November 1894-1910. Sedangkan seorang putri lain dari raja Jenilu bernama Donna Marianna da Costa kawin dengan raja Bauho bernama Leo Dasi Atok tanggal 21 Mei 1911, namun putri ini wafat sewaktu melahirkan²⁵²

Berdasarkan silsilah da Costa generasi III Dominggus da Costa dan istrinya Helena de Rosari menjadi raja Manufahi di Timor Portugis. Generasi ke IV Matheos da Costa dan Dominggus da Ornay juga memerintah kerajaan Manufi. Luis Baob Sobai kawin dengan Petronela da Costa di Bijela. Putra Matheos da Costa yakni Dominggus da Costa nantinya membangun pusat kedudukan baru di Noemuti. Putri keturunan da Costa dari Oekusi yang bernama Donna Petronela da Costa menjadi istri raja Jenilu yang wafat tahun 1855 dan baru dikuburkan tanggal 9 Juli tahun 1875. Ia mempunyai putri bernama Dato H.M. Donna Marianna Rosa da Costa kawin dengan raja Lidak. Putranya yang bernama Don Basinti menjadi raja Naitimu dari tanggal 27 November 1894-1910. Sedangkan seorang putri lain dari raja Jenilu bernama Donna Marianna da Costa kawin dengan raja Bauho bernama Leo Dasi Atok tanggal 21 Mei 1911, namun putri ini wafat sewaktu melahirkan²⁵³. Ayah Jendral Gaspar da Costa III pemimpin perang Penfu tahun 1749, mempunyai istri putri raja Helong /Kupang bernama: Yohana Helong. Karena faktor perkawinan ini kerajaan Helong bersifat netral dalam perang Penfui: Boxer, 1847 dalam Ataupah H., (1992),²⁵⁴. Da Hornay mempunyai istri dari kerajaan Amanuban. Da Costa dan da Hornay sendiri istrinya putri raja Ambenu. Raja Luis Sonbai istrinya putri da Costa dari Noemuti bernama Ritha da Costa kawin dengan Richardus Luis Sobai kemudian menjadi raja Noemuti. Ayah komandan Kase Metan dari Noemuti bernama Gaspar da Costa III, sebagai pemimpin perang Penfui tahun 1749, istrinya putri raja Helong. Simao da Costa kawin dengan putri Amanuban bernama Bi Noni Nope. Putri Gaspar da Costa III yang bernama Maria da Costa kawin dengan Luis Insana Tuan di Oelun. Sedangkan putrid yang lain Maria Simao da Costa kawin dengan Loro Besin Raja Jenilu. Putrinya bernama Dona Maria Bikan Suri kawin dengan Dom Jacobus Alexander Mesak Rinuk raja Lidak. Adik Dominggus da Costa III bernama Petronela da Costa I kawin dengan Luis Baob Sonbai di Bejala²⁵⁵.

²⁵² Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid I. 1974 hal. 330

²⁵³ Ataupah H. 1972 hal 249

²⁵⁴ Ataupah H. 1992 hal 249.

²⁵⁵ Widiyatmika M. dkk. 2010. Noemuti Dalam Kancan Perjuangan Melawan Kekuasaan Kolonial. UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. NTT hal. 90-91

Kaing Saku dari kerajaan Alor kawin dengan putrid raja Manatutu bernama Bia Besi. Hubungan antar kerajaan yang diikat dengan sumpah suci/sumpah darah: kerajaan Alor menjalin aliansi berdasarkan sumpah darah yang disebut Bela Baja dengan raja Manatutu ²⁵⁶. Para liurai di wilayah perbatasan Timor Portugis menjalin ikatan sumpah darah dalam kaitan pemberontakan melawan Portugis yang dikenal dengan Pakta Kamanasa. Mereka bersumpah tidak akan berhenti berperang sampai Portugis keluar dari Timor (Jill Joliffe, 1978)²⁵⁷

Di Belu juga dikenal hubungan pemberian raja secara adat kepada raja lain yang tidak mempunyai keturunan dikenal istilah *faen*. Raja Naitimu Don Basinti adalah putra raja Lidak Petronela da Costa (Sejarah Gereja Katolik di Timor) ²⁵⁸

²⁵⁶ Syarifudin Gomang,R. 1993,hal.96.

²⁵⁷ Jill Joliffe, 1978, hal.29

²⁵⁸ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid I hal.
Lihat Widiyatmika M. 2007 hal.330

**BAB 3 | Dinamika Perbatasan
Masa Kerasidenan Timor
dan Masa Pendudukan
Jepang Sampai tahun
1810 - 1945**

3.1. Perbatasan Masa Keresidenan Timor dan Daerah Takluknya 1810-1942

3.1.1. Kebijakan residen Timor menjangkau wilayah Perbatasan

1. Penyerangan pelabuhan Atatapupu

Sesurutnya pemerintahan Kongsi Dagang Belanda (VOC) di Timor pada tahun 1810 penguasa terakhir VOC Opperhoofd PStopkeert, digantikan oleh residen pertama Timor J.A.Hazaart¹. Salah satu kebijakan penting dan strategis bagi wilayah kekuasaan Belanda di Timor adalah penyangkut pelabuhan Atatapupu yang letaknya di dekat perbatasan Portugis yang dianggap sangat strategis.

Menyadari pentingnya Atatapupu sebagai salah satu pelabuhan yang strategis di pedalaman pulau Timor, yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Portugis, pada tahun 1819 residen Hazaart mengirimkan pasukan ekspedisi merebut Atatapupu dari tangan Portugis². Duarte Barros (1984)³, menyebutkan bahwa serangan yang dilakukan atas perintah residen J.A.Hazaart terjadi pada tanggal 20 November 1818. J.A.Hazaart mengirimkan pasukan berjumlah 30 prajurit untuk merebut Atatapupu dari tangan Portugis. Serangan ini menimbulkan protes Gubernur Portugis di Dili yakni: de Azevedo e Sousa. Protes tersebut diperkuat dengan dukungan para raja dan pembesar yang memperkuat bahwa Atatapupu wilayah Portugis. Mereka membuat pertemuan tanggal 10 Mei 1818 dan menanda tangani dukungan bahwa mereka termasuk dalam wilayah Atatapupu dan Batugede bagian dari wilayah kekuasaan Portugis. Para penguasa yang menanda tangani dukungan adalah: Dona Ursula ratu Liquisa, Mone Tha, Agustino Carvalho dato yang memerintah Liquisa, Sole Crae dan beberapa temukung. Surat dukungan tersebut juga ditanda tangani gubernur Portugis di Dili tanggal 20 November 1818. Dalam protesnya mereka menuntut ganti rugi atas kehilangan harta benda di Atatapupu. Bahkan mereka mengancam apabila protes tidak diindahkan mereka akan melakukan serangan dengan 1000 pasukan bila perlu dengan 8000 pasukan. Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia setelah menerima surat protes akhirnya memanggil residen J.A.Hazaart ke Batavia. Gubernur Jendral juga mengirimkan komisi penyelidikan ke Timor. Sementara J.A.Hazaart berada di Batavia, pemerintahan di Kupang dipegang oleh Komisaris Taerts van Amerongen yang bertugas melakukan penyelidikan. Kemudian sebagai pejabat residen ditempatkan Haleweijn dari tahun 1818-1819. Laporan komisi pencari fakta menyimpulkan tindakan J.A.Hazaart benar. Oleh karena itu J.A.Hazaart direhabilitasi dan dikembalikan sebagai residen di Kupang pada tahun 1820.⁴

¹ Roo van Alderwerelt I.De, Aanteekeningen over Timor en Onderhoorigheden, UIT TBG deel 47, hal 223

² Ormeling F.J. 1955. The Timor Problem. A Geographical Interpretation of an Underdeveloped Island. J.B. Wolters-Djakarta, hal.39

³ Barros, Jorge Duarte. 1984. History of Timor, Ritos Mitos and Atauros. Ministerio da Educacio, Lisboa, hal. 72

⁴ Barros, Jorge .Duarte, 1984, Timor Riitos and Mitos Atauro, Lisboa: Miniesterio da Educacao : hal. 72

2. Pembentukan daerah Penyangga bagi keamanan Kupang

Walaupun Portugis yang dimotori Jendral Gaspar da Costa III dengan sekutunya kalah dalam perang Penfui tahun 1749 tetapi keamanan kota Kupang masih mendapat ancaman raja pedalaman. Tanggal 7 Oktober 1816 raja Amanuban dengan 6000 pasukan melakukan penyerangan ke Kupang. Residen J.A. Hazaart didukung 10.000 pasukan untuk menghadapi serangan musuh⁵. Untuk pengamanan Kota Kupang residen J.A.Hazaart menetapkan kebijakan pembentukan daerah penyangga bagi keamanan kota Kupang. Daerah penyangga dibangun dengan mendatangkan penduduk asal pulau Rote sejak tahun 1819 yang ditempatkan di wilayah Pantai sepanjang Pantai Utara Teluk Kupang dari Sulamu sampai Noesina⁶. Di tempat tersebut dimukimkan para penduduk asal pulau Rote dalam bentuk desa kembar Rote-Timor dan Rote Helong. Pembentukan daerah penyangga dimaksudkan: apabila terjadi serangan musuh dari para raja pedalaman ke kedudukan Belanda di Kupang, akan terhambat oleh daerah penyangga sebelum menyerang Kupang. Daerah penyangga yang berada di dataran Oesao Pariti sangat subur bisa menjadi persawahan untuk sumber pemenuhan beras bagi Kupang yang tergantung beras dari Jawa dan pada musim angin Barat sulit diperoleh. Dengan pemukiman di Daerah penyangga yang subur dan banyak ditumbuhi hutan gawang tidak lagi menjadi tempat persembunyian musuh Belanda di Kupang⁷. Apabila diperlukan dengan mudah Belanda memperoleh sumber tenaga kerja bagi Kupang dari daerah penyangga. Pelaksanaan Pembentukan Daerah penyangga dilakaukan dengan memindahkan secara paksa penduduk asal pulau Rote.

Pada tahun 1819 pertama kali dipindahkan penduduk dari Hoeledo, Rote ke Oesao yang kemudian diikuti dengan Rote. Pada tahun 1819 pertama kali dipindahkan penduduk dari Hoeledo, Rote ke Oesao yang kemudian diikuti dengan kedatangan penduduk dari Pulau Rote yang lainnya di daerah pemukiman di sepanjang Pantai Utara Teluk Kupang. Pemindahan secara paksa ini mendapat kritikan sebagai tindakan yang brutal. Pembentukan daerah penyangga menimbulkan reaksi para penguasa di wilayah dataran Oesao Pariti yang semula menjadi daerah penggembalaan ternak terutama kerbau. Untuk mengatasi perlawanan pada tahun 1853 didatangkan penduduk asal pulau Rote sebanyak 1.300 orang dengan menggunakan kapal Celebes dan Lancier pada tanggal 9-13 September 1853 ke Takaep⁸.

3. Kupang sebagai pelabuhan bebas.

Residen J.A.Hazaart memberikan alternatif pembebasan pajak apabila Kupang

⁵ Barros, Jorge Duarte. 1984, hal 72

⁶ Fox, J.J. 1977. *The Harvest of the Palm*, an Ecological Change in Eastern Indonesia, Harvard University Press hal.138

⁷ Ataupah, Hendrik. 1992. *Ekologi Persebaran Penduduk dan Pengelompokan Orang Meto di Timor Barat*, Disertas Universitas Indonesia, Jakarta, hal.221

⁸ Fox, J.J. 1977. hal. 143, 144.

Lihat Widiyatmika M. 2008. hal. 127

dijadikan pusat pasar di Daerah Timor yang mengharuskan semua lili dan kayu cendana yang keluar memiliki keterangan dari Kupang. Di tempat-tempat penting seperti Atapupu, Solor perlu ditempatkan seorang petugas yang cakap untuk memungut pajak ekspor. Selain itu untuk mendukung pelaksanaannya perlu difungsikan perahu penjelajah guna membersihkan pedagang-pedagang selundupan yang terdapat di pantai yang sampai saat ini merugikan pemasukan pemerintah Hindia Belanda⁹. Salah satu komandan kapal Cepat Bangka letnan Laut Hendrick Clabech van der Dus terbunuh di dalam perang Lidak dan dimakamkan di Nularan, Atapupu Widiyatmika M dkk (2005)¹⁰.

4. Perjanjian Lisabon

Pada Tahun 1848 terjadi perlawanan beberapa raja di wilayah Oekusi dengan para raja di wilayah perbatasan Timor Belanda. Belanda mengirimkan Steyn Parve untuk melakukan penanganan masalah perbatasan dengan pihak Portugis. Pihak Portugis diwakili Gubernur Timor Steyn Parve membentuk Komisi Perbatasan bersama dengan pihak Portugis¹¹. Sebenarnya sebelum perjanjian Lisabon telah dilakukan rapat persiapan tahun 1848 antara wakil Portugis dipimpin gubernur Timor Julio Jose da Silva Viera dan wakil Belanda Steyn Parve. Pada bulan November tahun 1850 Menlu Portugal Vicconde de Costelhoes menginstruksikan kepada gubernur Timor Jose Joaquim Lopez da Lima untuk mengadakan kontak perdagangan dengan negara mana saja kecuali soal perbatasan wilayah harus dengan pemerintah pusat. Kemudian diadakan konpromi pada tahun 1851 antara wakil Belanda dan Portugis. Pada masa ini Lopez da Lima mengadakan pembicaraan dengan residen Timor Baron van Lynden yang mengadakan kunjungan ke Dili. Pada tahun 1851 diadakan perjanjian perbatasan sebagai tindak lanjut rapat tahun 1848. Portugal diwakili oleh Gubernur Lopez da Lima sedangkan Belanda diwakili oleh Steyn Parve¹².

Keputusan antara lain:

Mulai Maubara sampai Mota Masin Babulu di Suai ditukar dengan gugusan Pulau Flores, Solor, Adonara, Lomblen, Pantar dan Alor. Sebagai imbalan untuk Portugis atas luasnya wilayah yang diserahkan kepada Portugis maka Belanda wajib menyerahkan imbalan uang kepada Portugis sebesar 200.000 florin. Pembayaran imbalan uang diserahkan dalam jangka waktu 3 tahun dan tahap pertama pembayaran 80.000 florins langsung dibayarkan pada bulan November 1851. Isi perjanjian tersebut menimbulkan skandal dalam tubuh pemerintah Portugal. Hal ini mengakibatkan Lopez da Lima dicopot dari jabatannya sebagai gubernur. Ia digantikan oleh Don Manue da

⁹ Parimarta, I Gede, 2002, hal. 179

¹⁰ Widiyatmika, M. dkk. 2005. *Belu Dalam Kancah Perjuangan Melawan Kekuasaan Kolonial*. Kupang: UPTD Arkeologi NTT, hal. 122

¹¹ Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Jilid 2. Percetakan Arnoldus, Ende, Flores, hal. 143

¹² Widiyatmika M. Lintasan Sejarah Bumi Cendana, 2007. Pusat Pengembangan Madrasah NTT, Kupang hal. 254. Bandingkan dengan Sturler, Jaques Eduard de. 1881. *Tractaat van 20 April 1859 tot regeling van het weder Zijds grond gebied van Nederland en Portugal op Timor en Onder hoorigheden*. In *his het grondgebied van Nederlandsch Oost Indie in verband met de tractaten*

Saldanha pada tanggal 8 September 1852. Menurut Montalo de Jesus yang dikutip Barros (1984)¹³. Jose da Lima dideportasi dari Timor dan meninggal dalam perjalanan menuju Batavia bukan karena penyakit malaria tetapi karena tekanan mental/stres.

Pada tahun 1851. Komisi merencanakan perjanjian Lisabon pada tanggal 1 Oktober 1854. Tetapi rencana itu tidak dapat dilaksanakan karena ditolak Tweede Kamer dari Staaten General di Negeri Belanda. Pada rapat tanggal 6 Oktober 1854 antara pihak Belanda dan Portugis, Kemudian pada tanggal 20 April 1859 diadakan perjanjian di Portugal dan diputuskan bahwa garis-garis perbatasan pulau Timor adalah: Yang Pihak Portugal keberatan atas hasil kesepakatan tahun 1851. Tetapi Belanda tetap pada pendiriannya yaitu kesepakatan bulan November tahun 1851. termasuk wilayah Portugis yaitu: Kova, Balibo Lamak Hitu, Tahakae, Fatumean, Laqueo Dacolo, Tamiru Ailala, Suai, Oecusi, Ambenu dan Noemuti¹⁴.

Wilayah Belanda yaitu Djenilu, Silawan, Fialaran, Lamaksenulu, Lamaknen, Naitimu, Mandeu, Dirma, Lakekun, dan Maukatar¹⁵. Salah satu dari tindak lanjut perjanjian Lisabon wilayah Kui, Mademang dan Kolana di Alor yang dikuasai Portugis diserahkan kepada Pihak Belanda. Pulau Atauro di wilayah Timor Timur diserahkan kepada pihak Portugis, van Lynder 1851 dalam Gomang (1992)¹⁶, diuraikan dengan penyerahan wilayah tersebut terdapat persoalan kependudukan, karena 400 KK penduduk di pulau Kambing/Atauro tidak mau dikuasai Portugis. Mereka berpendirian kalau Pulau Atauro harus diserahkan kepada Portugis, mereka lebih baik dipindahkan ketempat lain yang tidak dikuasai Portugis. Namun yang menjadi persoalan kemana mereka akan dipindahkan. Gomang (1992)¹⁶, mengemukakan Panitia bersama (*join committee*) pelaksanaan perjanjian Lisabon mengundang raja-raja di Galiyao (Alor, Pantar) dan raja-raja di Kepulauan Solor (Solor, Adonara, Lomblen/Lembata) mengadakan pertemuan di Sagu, Adonara untuk membicarakan masalah tersebut. Semua raja yang hadir tidak memberikan pendapat karena menempatkan 400 KK pada waktu itu bukan persoalan kecil. Raja Bunga Bali dari Alor menyatakan kesediaannya menerima mereka. Kemudian atas perintah raja Bunga Bali, kepala Syahbandar Alor di Alor Kecil yang dijabat ayahanda Imam Langko Panara yang bergelar anakoda mengangkut orang-orang Atauro dan dimukimkan di Kampung Latakae, Alor Kecil. Perjanjian baru yang disetujui pada tanggal 20 April 1859 yang tercantum dalam *Indische Staatblads* 1860 no.101 dan disahkan tanggal 23 Agustus tahun 1860 dikenal sebagai Perjanjian Lisabon tahun 1859.

¹³ Barros, Jorge Duarte, 1984, History of Timor, Ritos Mitos and Atauros. Ministerio da Educacio, Lisboa, hal 74
Lihat Tractaten met Spanje, England en Porugal. Leiden hal.356.

Lihat pula Riedel, J.G.F. de Timor Tractaten van 1859 en 1893. Indische Gids. Amsterdam 902-905.

¹⁴ Sejarah Gereja Katolik di Timor, tanpa tahun, jilid 1, hal.103 Bandingkan Hejman, Abertoa. De Timor Tractaten 1859 en 1893. Leiden, SC. van Doeslaugh. (Doctoral Thesis Leiden 1893).

¹⁵ Widiyatmika M dkk, 2007 Sistem Pemerintahan Tradisional di Belu, UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Propinsi NTT, hal.177

Lihat Heijnen, J.G.F. 1895. De Timor tractaten 1859 en 1893. Leiden, SC. van Doesburgh. Doctoral Thesis.

¹⁶ Gomang, S.R. 1992. hal. 86

Salah satu pasal perjanjian yakni pasal 10 disebutkan: di daerah-daerah yang diambil alih dalam perjanjian para penduduk pribumi diberi kebebasan beragama¹⁷.

5. Penghapusan perdagangan budak

Perdagangan budak di Timor telah berlangsung beberapa abad. Peperangan antara suku dan kerajaan salah satu sebab ada kaitannya dengan perbudakan. Para tawanan perang dijadikan budak. Duarte Barbosa dalam laporan tahun 1516 menyebutkan bahwa diantara kapal-kapal dagang yang datang dari Malaka dan Jawa ke Timor tidak hanya mengambil barang dagangan berupa cendana dan lilin tetapi juga budak. Pada abad ke 17 dan 18 VOC dan Portugis ikut dalam perdagangan budak. Bahkan beberapa kerajaan yang ditundukkan VOC di pulau Rote harus didenda dengan sejumlah emas dan budak yang harus diberikan kepada VOC. Fox, (1977)¹⁸. Para budak dipekerjakan dalam kegiatan rumah tangga, pertanian dan pertukangan serta pekerjaan kasar lainnya. Kapal-kapal VOC sampai di Mauritius dan Bourbon untuk membeli budak. Pada tahun 1823 para pedagang dari Ende secara teratur dengan 10-30 perahu pergi ke Sumba setiap tahun untuk berdagang budak. Demikian pula para pedagang Cina aktif dalam perdagangan budak. Orang-orang Cina yang keluar dari tanah leluhurnya tidak membawa istri atau wanita, banyak diantara mereka kawin dengan wanita budak¹⁹.

Ormeling (1955)²⁰, mengemukakan Timor dan Sumba merupakan salah satu sumber budak yang penting. Budak dari Timor dikenal sebagai budak yang terbaik. Harga seorang budak bisa mencapai 30 sampai 40 dolar seorang. Atapupu di pantai Utara Timor dikenal sebagai salah satu pasar budak penting di Timor. Dagregisters menyebutkan setiap kapal yang datang ke Batavia dari Timor membawa budak. Van De Chijs (1871) dalam Fox (1971)²¹ menyebutkan bahwa kekurangan tenaga kerja di benteng Concordia dan sekitarnya sudah berlangsung sejak jaman VOC. Para pegawai VOC yang dikenal korup memperlakukan para orang bebas seenaknya dan menangkap mereka untuk dijual sebagai budak. Pada tahun 1838 dalam rangka memberantas perdagangan budak di Sumba residen van den Dungen Gronovius melakukan penyerangan ke Ende. Ende berhasil ditundukkan dan menanda tangani kontrak tanggal 1 Mei 1839. Perdagangan budak dinyatakan dilarang. Gede Parimartha (2002)²², menyebutkan pada tahun 1845-1846 perdagangan budak masih terjadi meskipun di bawah pengejaran pihak pemerintah kolonial Belanda semakin keras. Pada bulan September tahun 1846 dua perahu dagang pribumi sedang dalam pelayaran dari Buton ke Solor. Di dekat Adonara perahu itu dicegat lima perahu perompak. Perompak

¹⁷ Vriens G.S.J. 1972, Sejarah Gereja Katolik Indonesia, jilid 2 hal. 143

¹⁸ Fox, J.J. 1977 hal. 69

¹⁹ Parimartha I Gede. 2002. hal. 269.

Lihat ANRI. Algemeen verslag der Residentie Timor 1850 (Timor I/15).

²⁰ Ormeling, F.J. 1955 hal 180

²¹ Fox, J.J. 1977 hal 71

²² Parimartha, I Gede. 2002 hal 270

Lihat Logan J.N. TGS (Ed) The Piracy and Slave Trade of Indian Archipelago. JIAEA5. 1851 hal 374-379

mengemukakan tiap-tiap fetor mengepalai sendiri rakyat pekerja rodinya untuk menyelesaikan ruas jalan raya yang melintasi daerahnya atau ruas jalan tertentu di wilayah usif tetangganya dan untuk memvbangun jembatan. Untuk pembukaan jalan raya itu setiap pekerja rodi bekerja selama tiga bulan dan untuk pemeliharaan selama 15 hari dalam setahun. Kawula usif Taebenu dari kesatuan kerabat Bani dan Ora melarikan diri ke Amarasi ketika disuruh residen J.A. Hazart bekerja rodi untuk membangun jalan raya dari Kupang menuju Babau sehingga pembangunan jalan raya macet. Apabila para fetor tidak mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja pembangunan jalan yang melintas di wilayahnya, ia harus meminta bantuan penguasa lain yang memiliki cukup tenaga kerja. Kemudian untuk memelihara jalan tersebut penduduk yang tinggal ditempat yang jauh dipindahkan di dekat jalan²⁹. Jalan raya menuju perbatasan di Atapupu diperlebar pada tahun 1914³⁰, namun jalan diperbatasan ke Maaubesi dan Wini dengan Oekusi baru dikerjakan tahun 1952³¹.

b. Larangan perdagangan senjata api

Gede Parimatha (2002),³² mengemukakan bahwa di Timor sebagai daerah bergolak dan banyak terjadi perang, maka pemilikan senapan juga penting. Sesungguhnya jenis senjata api di daerah Timor telah lama diperkenalkan oleh VOC. Pada abad ke 16 ketika terjadi usaha penanaman pengaruh VOC di Timor, sejumlah senjata api telah diberikan kepada tokoh-tokoh yang mau bekerja sama terutama orang-orang Rote yang membantu Kompeni di Timor melawan penduduk yang pro Portugis atau Portugis Hitam. Kemudian senjata api diperoleh dengan cara membeli dari para pedagang luar yang datang ke Kupang. Sejumlah senapan diimpor di Kupang pada tahun 1830an. Selama tiga tahun (1834-1836) telah masuk Kupang 116 buah senapan tahun 1834, 23 buah tahun 1835 dan 700 buah tahun 1836. Dalam hubungan ini senapan atau mesiu dapat ditukar dengan kuda kepada kapal-kapal yang datang dari Jawa atau Bourbon. Pada tahun 1837 masuk 340 buah senapan dan tahun 1838 menjadi 2.675 buah, tahun 1839 menjadi 1.229 buah. Sementara mesiu masuk berturut-turut 2.750 pond tahun 1834. Pada tahun 1836 sebanyak 2.500 pond, tahun 1837 sebanyak 1.950 pond, tahun 1838 sebanyak 27.280 pond. Pada tahun 1876 pemerintah Belanda melakukan larangan perdagangan senjata api dan mesiu. Larangan ini bertujuan untuk mengendalikan kekuatan pasukan tradisional dan dalam rangka memperlemah para pembangkang serta dan memberantas tradisi perang suku. Larangan ini kemudian diperkuat pada tahun 1911, adanya perintah pengumpulan senjata api milik masyarakat kepada pemerintah³³.

²⁹ Ormeling F.J. 1955 hal 77

Lihat Exodus, Abr. De Groote weg op Timor. Indische Gids, Amsterdam, From Soerabaya Handel blads 1916. Hal. 593-595.

³⁰ Parimatha I Gede. 2002. hal 318.

³¹ Ormeling F.J. hal 213.

³² Parimatha I Gede. 2002 hal. 319

Lihat Kolonial Verslag 1882 hal 52

³³ Widiyatmika, M. Dkk. 2005. Belu Dalam Kancan Perjuangan Melawan Kekuasaan Kolonial. Kupang: UPTD

3.1.2. Terbentuknya Sistem pemerintahan keresidenan Timor dan Daerah Takluknya di wilayah Perbatasan

1. Awal pemerintahan afdeeling Timor dan Pulaunya di wilayah Perbatasan di Belu.

Atapupu yang letaknya strategis di pantai Utara dan dekat perbatasan wilayah Timor Portugis direbut oleh pasukan Belanda pada tahun 1819 atas perintah residen pertama J.A.Hazaart. Sampai tahun 1852 di Atapupu belum menjadi pusat kedudukan Belanda di Belu. Pasca perang Lidak tahun 1854 Pemerintah kolonial Belanda di wilayah Perbatasan di Belu memberlakukan perintah Ukun Sanulu³⁴. Pada tahun 1850 laporan van Huvel (1851) dalam Gede Parimarta, (2002)³⁵, telah ada 7 post Houders yakni Atapupu, Babau, Pariti, Baun, Lohayong, Ombai/Alor dan Pulau Rote 20. Kedudukan tetap pemerintahan Belanda di perbatasan dimulai dengan penempatan pejabat sipil/Gezaghebber Rogge pada tahun 1862. Tahun 1893 ia diangkat sebagai Kontrolir. Sejak tahun 1869 tangsi militer Belanda ditutup, benteng tua di Atapupu ditempati oleh kontrolir dan urusan Departemen Dalam Negeri³⁶.

Sesuai dengan kebijakan Belanda pada waktu itu dengan diberlakukannya pelabuhan bebas Kupang, semua aktivitas perdagangan dikendalikan dari Kupang. Kapal-kapal dagang harus singgah di pelabuhan pelabuhan yang telah dikuasai Belanda dan harus membayar pajak. Untuk memberantas para pembangkang, Belanda menghadirkan kapal penjelajah atau kapal cepat untuk memberantas penyelundupan dan kapal-kapal yang tidak mau tunduk. Kapal-kapal cepat ini secara berkala berlayar melakukan patroli ke berbagai pelabuhan penting yang dikuasai Belanda termasuk di Atapupu.

Untuk menghadapi ancaman Portugis, Belanda menempatkan pasukan reguler sekitar 30 orang di Atapupu. Apabila pasukan reguler tidak mampu mengatasi masalah keamanan akan dimintakan bantuan pasukan dari Kupang³⁷.

Laporan seorang penjelajah dari Perancis bernama Louis de Freycinet yang dikutip Barros, Jorge Duarte (1984)³⁸ pada tahun 1818 Timor dibagi dalam dua bagian/propinsi yakni yang dibagian Barat Daya disebut Belu dan yang lain disebut Vaikenos atau Serviao-Vaikonos yang memberikan upeti kepada Portugis, sedangkan yang di bagian Barat Daya kepada Belanda. Pada tahun 1879 residen Riedel melakukan ekspedisi dalam rangka mencari tahu apakah daerah-daerah yang dikunjungi masih ingat akan Perjanjian Paravicini tahun 1756. Residen beserta rombongan mengunjungi

Arkeologi NTT.hal.127.

Lihat Parimarta, I Gede. 2002 hal.318 dan 319

³⁴ Widiyatmika M.dkk 2005 hal. 2005

³⁵ Parimarta, I Gede. 2002 hal.252

Lihat ANRI, Politiek verslag der Residentie Timor 1855 (Timor2/2)

³⁶ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 2 hal.824

³⁷ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid 2.,hal.151

³⁸ Barros, Jorge De, Duarte hal 73

Manbait, Besiana, Netpala, Bijaupunuf, Noeltoko, Insana, Biboki, Naitimu, Mandeu, Dirma, Kusa, Weain³⁹.

Pada tahun 1830 kekuasaan Belanda di Timor dapat dibedakan menjadi tiga bagian yakni: 1. Kerajaan kerajaan yang langsung berada dibawah kekuasaan kolonial Belanda antara lain Kupang dan Atapupu. 2 Kerajaan-kerajaan dan pulau yang diakui/tunduk kepada kekuasaan kolonial Belanda seperti kerajaan Sonbai Kecil, Tabenu, Tonei/Funai dan pulau-pulau sekitar Kupang seperti Semau, Rote, Sabu, Sumba, Ende, Alor dan Solor. 3 Kerajaan-kerajaan di pulau yang merdeka. Kerajaan kerajaan sebagian besar berada di pulau Timor antara lain: Amarasi, Amanuban, Amanatun, Sonbai, Amfoang, Wewiku Wehali dan beberapa kerajaan kecil lain di Belu⁴⁰.

Pada waktu pemerintahan Residen di Kupang memberlakukan secara sepihak sistem pemerintahan di Timor pada tahun 1887 secara penguasa kolonial Belanda di Timor dan sekitarnya ditetapkan afdeeling dari Keresidenan Timor dan Daerah Takluknya yang terbagi dalam 4 bagian yakni: 1. Kupang terdiri atas daerah landschappen: Kupang, Tabenu, Amabi, Sonbai Kecil, Babau dan pulau Semau. 2. Amfoang terdiri atas daerah/landschappen: Pariti, Takaep, Pitai, Amfuang, Sorbian dan Ambenu. 3. Belu terdiri atas landschappen Insana, Biboki, Naitimu, Lidak, Fialarang, Lamaknen, Lamak Senulu, Jenilu, Harneno, Silawan, Mandeo, Maukat, Kusa, dan Wewiku Wehali, Daerah landschappen Oematan terdiri atas: Mollo (Oematan), Amkono, Amanuban, dan Amarasi⁴¹.

Mengingat pentingnya pengendalian para raja di lingkungan sistem pemerintahan baru kolonial Belanda, pada tahun 1899 para raja dilingkungan afdeeling Timor diundang ke Kupang untuk mendapatkan pengarahan dari residen G.G. De Villeneuve tanggal 11 Februari 1889. Residen juga menaruh perhatian pelabuhan Atapupu di perbatasan wilayah Timor Portugis. Pada tanggal 13 Mei tahun 1889 residen Belanda G.G. De Villeneuve melakukan kunjungan ke Atapupu dan menginap dalam benteng⁴² Kontrolir di Belu yang pertama Rogge sejak tahun 1893 ia digantikan oleh H.J. Gysen pada tahun 1904.



Gambar 3.1
Pertemuan residen G.G. De Villeneuve dengan raja-raja Timor di Kupang 11 Februari 1889.

³⁹ Schulte Nordholt H.G. 183

⁴⁰ Parimarta, I Gede. 2002 hal 111

⁴¹ Parimarta, I Gede. 2002 hal. 247

⁴² Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid hal 270

Pertama kali kedudukan kontrolir Belanda di Atapupu, Laporan H.J.Grisen yang dikutip Parimartha (2002)⁴³ dari 4 onder afdeling di Timor hanya satu yang dipegang oleh kontrolir sedangkan yang lainnya hanya dijabat oleh seorang Post Houder. Para penjaga pos pada umumnya diangkat dari orang kulit putih kelahiran Timor yang bisa berbahasa Timor. Tetapi posisi mereka tidak bisa mempengaruhi raja karena ia sering bertindak kasar. Mereka hanya sekedar sebagai pemegang bendera. Struktur pasukan Belanda di Timor termasuk di Atapupu pada umumnya terdiri dari para prajurit yang direkrut dari prajurit pribumi. Setelah perang Penfui tahun 1749, para prajurit yang membantu Belanda adalah dari orang Rote, Sabu, Solor dan orang Merdeka. Hanya para pimpinan umumnya terdiri dari orang kulit putih baik yang berpangkat letnan maupun sersan untuk kepentingan patroli ataupun perang⁴⁴.

Belanda memanfaatkan para pemandu lokal ataupun orang Cina yang biasa berdagang keluar Masuk Kampung dan mengetahui medan sebagai pemandu. Dalam setiap pergerakan prajurit selalu didukung para penduduk pribumi yang dikerahkan sebagai tenaga kerja rodi untuk membawa perbekalan bagi prajurit.

Dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya dari Atapupu para pejabat sipil yang dikawal pasukan bersenjata melakukan kunjungan ke berbagai wilayah kerajaan dalam rangka menjajagi melakukan perluasan pengaruh baik secara halus maupun kasar. Pada setiap kunjungan di pusat kerajaanyang dikunjungi rombongan pejabat Belanda selalu mengibarkan bendera Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Bagi penguasa wilayah kerajaan apabila menolak akan dilakukan pemaksaan dengan kekuatan bersenjata Mobilitas prajurit Belanda ke medan pertempuran menggunakan kuda ataupun berjalan kaki⁴⁵.

Kebijakan pengajaran telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tanggal 3 Mei 1871 pasal 4 disebutkan pengajaran agama pada sekolah pribumi dilarang. Pada 1 April 1871 ditetapkan hanya kepada sekolah yang tidak memberikan pelajaran agama di luar jam pelajaran yang diberikan subsidi⁴⁶.

Struktur pasukan Belanda di Timor termasuk di Atapupu pada umumnya terdiri dari para prajurit yang direkrut dari prajurit pribumi. Setelah perang

Penfui tahun 1749, para prajurit yang membantu Belanda adalah dari orang Rote, Sabu, Solor dan orang Merdeka. Hanya para pimpinan umumnya terdiri dari orang kulit putih baik yang berpangkat letnan maupun sersan. Untuk kepentingan patroli ataupun perang, Belanda memanfaatkan para pemandu lokal ataupun orang Cina yang biasa

⁴³ Parimartha I Gede, 2002 hal. 358

Lihat H.J.Grijzen, Een praetie over de Zelfbesturende Landshappen in de Buiten gewesten, KT. 12 (10230 hal. 471

⁴⁴ Vriens G. 1972. hal. 143.

⁴⁵ Vriens G. 1972. hal. 143.

⁴⁶ Vriens G. 1972 hal. 138

berdagang keluar masuk Kampung dan mengetahui medan sebagai pemandu. Dalam setiap pergerakan prajurit selalu didukung para penduduk pribumi yang dikerahkan sebagai tenaga kerja rodi untuk membawa perbekalan bagi prajurit. Mobilitas prajurit Belanda ke medan pertempuran menggunakan kuda ataupun berjalan kaki ⁴⁷.

Pertempuran di Pariti-Manbait Tahun 1847

Pada waktu residen J.A.Hazaart melakukan ekspedisi ke pedalaman tahun 1829 yang diikuti oleh seorang ahli bernama Muller, dalam rangka eksploitasi biji tambang dan melakukan pendekatan dengan Sonbai kelompok pasukan yang digunakan antara lain adalah pasukan Rote dan pasukan merdeka. Raja Amanuban dan raja Manbait berusaha menyerang pusat kedudukan Belanda di Kupang. Pada tahun 1847 Manbait merusak dan membakar desa Babau sebagai salah satu desa di daerah penyangga yang dihuni orang Mardijker dan orang Rote. Penyerbuan ke Babau dilakukan oleh Manbait dengan membakar rumah-rumah yang ada. Ketika penyerbuan dilakukan orang-orang Babu sedang panen di persawahan, 148 rumah dibakar habis. Jumlah korban terbunuh 60 orang. Pada tanggal 1 November 1847 Belanda mengerahkan pasukan merdeka di bawah pimpinan Kapten de Rooy dengan kekuatan 2000-3000 pasukan yang terdiri dari pasukan merdika, Papanger, Burger dan orang-orang Rote dan Sabu serta rakyat kerajaan Tabenu, Funay, Amabi dan Sonbait Kecil. Untuk membalas serangan Manbait, Camplong diserang pasukan gabungan. Untuk mengantisipasi serangan balasan Belanda, Manbait telah mengungsikan orang tua, wanita dan anak-anak ke pondok-pondok di ladang.

Pasukan gabungan Belanda mengejar orang-orang Manbait yang menyembunyikan di hutan. Pada waktu serangan pasukan Belanda mendapat rintangan yang berat karena sedang musim penghujan, sungai-sungai banjir yang dilakukan Manbait. Pasukan Belanda yang mengejar ke hutan dihadang pasukan Manbait. Sehingga serangan yang ditujukan ke Manbait mengalami kegagalan. Bahkan serombongan pasukan mardijkers terjebak dalam perangkap yang diatur oleh meo Mus Neno dan Tain Suan di Benu. 30 orang mardijkers tewas dalam penyerbuan kedua meo tersebut. Akhirnya pasukan yang dipimpin Kapten de Rooy ditarik kembali ke Kupang. Pada tanggal 30 November 1847, kekuatan Manbait berhasil menyerang dan membakar salah satu desa penyangga di Nunkurus. Penyerangan ini menurut Fobia (2003) ⁴⁸ dipimpin sendiri oleh Sobe Sonbai II. Penyerangan ini dipicu pencurian ternak milik Manbait yang dilakukan oleh orang-orang Rote. Rumah-rumah penduduk di Nunkurus dibakar habis. 75 orang penduduk Nunkurus menjadi korban tewas oleh serangan Manbait. Kemudian raja Sobe Sonbai II mendorong Takaib Pitai menyerang Pariti. Pariti diserang pada bulan April 1848 sesudah masa panen. Serangan balasan pasukan Belanda dilakukan pada bulan Agustus 1848. Dalam serangan ini 37 pasukan Belanda tewas. Pada tahun 1849

⁴⁷ Fox,J.J.1977 hal. 143,144

⁴⁸ Fobia,F.H.2003. Pahlawan Sonbai. (tidakditerbitkan) hal.100

residen Baron van Lynden berusaha berunding dengan Liurai Sonbai, namun gagal. Oleh karena itu dikirimkan ekspedisi baru yang terdiri dari 3000-4000 pasukan ke pedalaman dilengkapi 2 meriam. Dalam serangan di pedalaman, pasukan Belanda berhasil menangkap 80 orang pasukan Sonbai. Diantara yang tertangkap tersebut terdapat Baob Sonbai, Bi Sulat Sonbai dan Lete Manbait (kemenakan Sobe Sonbai II). Mereka ditawan dan dibawa ke Kupang. Baob Sonbai, Bi Sulat Sonbai dan Lete Manbait setelah disidangkan di buang ke seberang. 10 orang yang lain setelah disidangkan dihukum di Kupang selama 10 tahun. Sisanya dibebaskan kembali. Ke Kauniki. Namun upaya menaklukkan Sonbai selalu gagal ⁴⁹. Pada tanggal 4-18 Oktober 1850 dilakukan ekspedisi ke Amanatun. Untuk memantapkan pengamanan pulau Timor, Belanda memperluas pengawasan ke Atapupu, Babau, Pariti, Mollo dan Baun.

Bagi daerah-daerah yang telah bersahabat dan mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di tempat-tempat yang strategis ditempatkan penjaga pos atau post houders. Penjaga pos militer biasanya dipimpin oleh seorang peranakan Belanda yang mengerti bahasa lokal. Penjaga pos tidak boleh melakukan perubahan statusquo bagi wilayah kerajaan yang berada di sekitarnya. Namun ia harus mengawasi kerajaan-kerajaan di sekitar dan mempelajari sosial budaya masyarakat di kerajaan di sekitarnya. Namun peran mereka tidak begitu besar apalagi umumnya mereka sangat kasar kepada para raja disekitarnya. Baun dijadikan pimpinan Pos penjagaan Afdeeling Timor dibawah pimpinan seorang gezaghebber pada tahun 1843.

Atapupu pada tahun 1819 direbut dari tangan Portugis dan dijadikan pos militer atau pos houder, pada tahun 1862 di Atapupu ditempat seorang *gezaghebber* Rooge yang pada tahun 1893 ditingkatkan statusnya menjadi *Controleur*. Pada tahun 1850 menurut laporan van Hoevell (1851) dalam Parimatha (2002) ⁵⁰, telah ada 7 post.

Pada tahun 1855 orang-orang Rote dari Pariti mencuri kerbau milik orang-orang Takaip. Ia ditangkap dan harus mengembalikan 2 ekor kerbau yang telah dicuri. Feto Takaip Bakekooi tidak puas dengan peristiwa tersebut dan menyatakan perang. Mereka meletakkan kepala kerbau di sebuah tiang dekat Pariti. Ini diinterpretasikan sebagai deklarasi Bakekooi tanah itu milik mereka. Feto kemudian pada malam harinya mencuri semua ternak di wilayah gubernemen di sekitar Pariti. Seperti diketahui wilayah gubernemen disebut dengan wilayah 6 pal. Di wilayah tersebut rakyat tunduk pada hukum pemerintah gubernemen. Akibat peristiwa tersebut residen di Kupang mengirimkan ekspedisi untuk menghadapi perlawanan tersebut. Dikirim 2 buah kapal yakni Celebes dan Lansier yang membawa 1.300 orang Rote ke Timor. Mereka mendarat di dekat Pariti pada tanggal 9-13 September 1855. Mereka menyerang Takaip dan menembaki dengan canon dan membakar desa Batuiki. Pada tanggal 15 September orang-orang Rote kemudian ditarik setelah satu minggu

⁴⁹ Fobia, F.H.2003 hal. 101

⁵⁰ Parimatha I Gede.2002 hal 358

berada di wilayah tersebut⁵¹. Di daerah-daerah yang telah dikuasai diberlakukan pembayaran pajak kepala, pajak jalan dan pajak hewan. Pada tahun 1901 telah ada 40 raja yang menanda tangani kesediaan membayar pajak kepada pemerintah Belanda.

Untuk mengefektifkan penarikan pajak, raja menjadi salah satu mata rantai penting dalam penagihan pajak.

Penagihan pajak kepada setiap warga yang dewasa dibebankan kepada kepala kampung yang harus menyetorkan kepada raja⁵². Untuk memperoleh kepastian jumlah penduduk yang terkait dengan pembayaran pajak, pemerintah kolonial Belanda melakukan upaya pendaftaran penduduk pada tahun 1907. Kewajiban membayar pajak ini sangat memberatkan bagi rakyat mengingat pada waktu itu sistem uang belum beredar. Di beberapa wilayah sementara uang belum beredar pembayaran pajak dilakukan melalui natura atau barang berupa hasil bumi dan ternak. Untuk mempermudah pembayaran pajak pemerintah Belanda memperkenalkan sistem uang gulden baik yang berupa uang logam dan uang kertas.

Pembayaran pajak dan kerja rodi yang berat menjadi salah satu pemicu timbulnya perlawanan diberbagai tempat. Pada tahun 1903 Belanda berhasil memadamkan perlawanan di Bipolo. Raja Sobe Sonbai III di Kauniki berhasil ditawan. Dengan demikian upaya memperluas kekuasaan di pedalaman pulau Timor semakin lancar. Pada tahun 1904 Aut Sae dan Toin Taneo membunuh seorang anak pedagang Cina yang masuk di Babuin untuk berdagang cendana dan lilin. Peristiwa tersebut menimbulkan reaksi Lie Bun Sui dan Tjung Su Fat. Mereka pergi meminta bantuan Belanda di Kupang untuk menyerang Babuin. Peristiwa ini merupakan kesempatan baik bagi Belanda memperluas pengaruhnya di pedalaman. Namun Belanda mengajukan syarat bahwa Belanda tidak akan membantu kalau tidak dibantu Amanuban. Oleh karena itu kedua orang Cina tersebut menghadap raja Bil Nope menyampaikan pesan Belanda dari Kupang. Permintaan Belanda diterima dengan janji Amanuban akan membantu menyerang Babuin karena kebetulan antara Amanuban dan Babui terjadi permusuhan. Raja Bil Nope menyuruh anaknya Koko Nope bersama kedua pedagang Cina menghadap pimpinan Belanda di Kupang. Akhirnya pada tahun 1905 Belanda mengirimkan ekspedisi ke Mollo dan mendapat perlawanan Boi Kaunan dan Kau Fobia di Nefokoko. Perlawanan Kau Fobia dan Boi Kaunan dapat dipatahkan. Selanjutnya pasukan ekspedisi melanjutkan perjalanan ke Kapan. Kapan diduduki dan dijadikan pusat kedudukan Belanda di pedalaman pulau Timor khususnya di wilayah Timor Tengah Selatan pada tahun 1907⁵³.

Ekspedisi pasukan Belanda pada tahun 1906 ditujukan ke Amanuban dan menyerang Babuin. Setelah Babuin berhasil ditaklukan, ekspedisi dilanjutkan ke

⁵¹ Fox,J.J.1977 hal.14

⁵² Parimmartha,I.Gede.2002 hal.362

⁵³ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal.185

Amanatun untuk memadamkan perlawanan meo Seki Tafuli di Fotilo. Fotilo berhasil diduduki dan perlawanan Seki Tafuli dapat dipatahkan. Pada tahun 1907 pasukan Belanda dikirimkan ke Kolbano untuk menundukkan perlawanan Meo Boi Kapitan/ Boimau, Esa Taneo dan Paha Neolaka. Dalam perlawanan di Kolbano, walaupun akhirnya perlawanan berhasil dipadamkan namun pasukan Belanda menderita kehilangan 17 prajuritnya terbunuh. Pada tahun 1909 diadakan perjanjian pembagian batas wilayah Amanuban dan Amanatun yang dikenal dengan istilah *Surat Iqrar*. Namun dalam perjanjian tersebut tidak dikonsultasikan lebih dahulu dengan raja Amanuban Bill Nope sehingga raja tersinggung dan berupaya mengusir Belanda. Akhirnya pecah perang Niki-Niki tahun 1910 dipimpin raja Bil Nope yang didukung meoa: Tof Bali, Tuno Tse, Mol Tube, Molo Telnoni dan Timo Banamtuan. Dalam perlawanan ini raja Bill Nope bertahan di pusat pertahanan di istana di Niki Niki dalam perlindungan di bawah tanah yang diperkuat benteng. Namun karena tidak mau menyerah, Bill Nope mati dalam lubang perlindungan yang dibakar Belanda. Sebagai ganti raja Amanuban diangkat adik raja Bil Nope Noni Nope yang tinggal di Neke. Sebagai raja baru Amanuban ia dibantu Feto Boy Isu dan Sanu Nakamnanu. Belanda mengadakan korte verklaring dengan raja Benu, Tefnai, Manbait, Takaep dan Kauniki. Pada tahun 1913 wilayah Benu, Manbait, Kauniki dan Takaep dipersatukan kedalam swapraja Fatuleu dibawah pimpinan raja Taiboko. Sedangkan para raja yang wilayahnya digabungkan diturunkan statusnya menjadi feto⁵⁴. Di Wilayah Belu setelah Atapupu dengan kerajaan Jenilu, yang mendapat giliran pertama ditaklukkan adalah kerajaan Lidak. Hal ini mengingat letak kerajaan Lidak yang strategis bagi perluasan kekuasaan tidak saja di seluruh Belu Utara tetapi juga jalan ke Belu Selatan.

Penaklukan terhadap berbagai kerajaan yang belum tunduk segera dilakukan penyerangan. Pada tahun 1915 upaya pasifikasi telah berhasil. Dengan demikian seluruh Belu telah berhasil dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Keberhasilan pasifikasi diikuti dengan penataan wilayah kerajaan-kerajaan yang ada di Belu. terjadi tahun 1852-1857. Selanjutnya penaklukan Belu Selatan tahun 1906, Naitimu tahun 1913.

Residen Riedel pada tahun 1879⁵⁵, melakukan ekspedisi dalam rangka mencari-tahu apakah daerah-daerah yang dikunjungi masih ingat akan perjanjian Paravicini yang telah ditanda tangani pada tahun 1756. Residen beserta rombongan mengunjungi Manbait, Besiana, Netpala, Bijapunuf, Noeltoko, Insana, Biboki, Naitimu, Mandeu, Dirma, Kusa, Weain.

Dalam rangka lebih memantapkan penaklukan daerah pedalaman Belanda melakukan ekspedisi ke Nenometan dan Anas di Amanatun melalui Rabasa. Upaya perlawanan di Wewiku diawali tahun 1900 terhadap rombongan kontrolir yang

⁵⁴ Widiyatmika, M. dkk. 2008. Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Utara. UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, NTT, hal. 215.

⁵⁵ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 184

berkunjung ke Belu Selatan. Namun pada waktu itu walaupun penduduk bereaksi tidak terjadi perlawanan. Demikian pula sewaktu terjadi kunjungan kembali kontrolir pada tahun 1903 ke Belu Selatan penduduk mengepung rombongan kontrolir yang dikawal 30 prajurit dibawah pimpinan seorang sersan. Namun karena prajurit Belanda hanya 30 orang kontrolir memilih tidak meladeni tantangan penduduk dan kembali ke Atapupu. Namun pada tahun 1906 perlawanan Wewiku dibawah pimpinan Nahak Maroe Rai berupaya dipadamkan dengan mengirimkan ekspedisi pasukan besar. Pada tanggal 11-12 November 1906 terjadi pertempuran besar dibawah pimpinan Nahak Maroe Rai di Keletek As. Dalam sumber Belanda nahak maroe Rai disebutkan sebagai raja Rabasa ⁵⁶. Dalam pertempuran hebat di Keletek As Nahak Maroe Rai mati terbunuh beserta beberapa pembantu setianya dan beberapa prajurit. Dalam pertempuran ini jatuh korban 32 orang prajurit lokal dan 3 prajurit Belanda ⁵⁷. Untuk pengamanan Belu bagian Selatan di Besikama ditempatkan sebuah Pos Militer. Pada tahun 29 Juli 1852 terjadi perlawanan di Lidak yang dipimpin Meo Moruk Pah Sunan dibantu meo Meo Asa Natun, meo Abekun Natun, meo Anin. Dalam pertempuran tersebut seorang Letnan Angkatan Laut Belanda, komandan kapal cepat Bangka dan 2 orang prajurit Belanda tewas dan mayatnya dikuburkan di Nu Laran, Atapupu. Perlawanan Lidak di bawah pimpinan meo Moruk Pah Sunan baru berhasil dipadamkan pada tahun 1857. Pasukan Belanda mengirimkan ekspedisi besar tahun 1857 untuk menaklukkan perlawanan meo Moruk Pah Sunan. Dalam pertempuran tersebut meo Moruk Pah Sunan sendiri tewas terbunuh dalam pertempuran. ⁵⁸. Di Naitimu juga timbul perlawanan dipimpin raja Kau Besin pada tahun 1913 ⁵⁹. Dalam perlawanan ini raja Kau Besin dibantu para meo antara lain: meo Laboi, meo Fatukiik, meo Lau Siberu, meo Taek Labeo, meo Buk Afena, meo Bauk Natesa, meo Hoar Lauk dan dato Frans Manek serta meo Kehi Seran.

Pertempuran besar terjadi di benteng Nanaet ketika Belanda mengirimkan pasukan ke Naitimu dalam dua gelombang yakni tanggal 30 Januari 1913 dan tanggal 1 Februari 1913 untuk memadamkan perlawanan raja Kau Besin di Naitimu. Dalam penyerangan tanggal 31 Januari di lereng bukit Nanaet 2 pasukan Belanda tewas yakni W.J.A.N. Ten Roode bersama seorang prajurit lainnya. Kedua pasukan Belanda yang tewas tersebut dimakamkan di pesanggrahan Belanda di Fatu Malaka ⁶⁰. Setelah benteng Nanaet yang dipertahankan para meo dan prajurit dikepung pasukan

⁵⁶ Gerard Francillon. 1980. *Incurtion upon Wehali, Modern History of Ancient Empire*. Dalam Fox J.J.(ed). *The Flow of Life Essays on Eastern Indonesia*. Crambrige, Massachusetts and London, England: Harvard University Press. Hal.252. Lihat Kolonial Verslag. 1907 pp.79-84.

⁵⁷ Widiyatmika dkk.2005. *Belu Dalam Kancan Perjuangan Melawan Kekuasaan Kolonial*. Kupang:UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Hal. 121
Lihat Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid I hal.673

⁵⁸ Widiyatmika dkk.2005. *Belu Dalam Kancan Perjuangan Melawan Kekuasaan Kolonial*. Kupang:UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Hal. 121

⁵⁹ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid I hal 814

⁶⁰ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid I hal 848

Belanda, akhirnya kekurangan persediaan bahan makan dan air minum dan akhirnya dengan mudah ditaklukkan. Beberapa meo berhasil ditangkap dan dibuang ke Jawa. Sedangkan raja Kau Besin yang kalah dalam perlawanan harus menanda tangani korte verklaring dan kemudian kerajaannya dilikwidasi disatukan dengan kerajaan Jenilu pada tahun 1914 dalam sebuah kerajaan baru dengan nama Kakuluk Mesak.

Perlawanan terhadap kekuasaan Belanda masih terjadi pada tahun 1913 dipimpin raja wanita Lidak bernama Petronela da Costa da Ornay. Dalam perlawanan ini ia dibantu para meo diantaranya: meo Lau Siberu, Bauk Afena dan Kehi Banani. Namun perlawanan ini berhasil dikalahkan oleh pasukan Belanda. Raja Petronela da Costa meminta berhenti sebagai raja Lidak pada tanggal 25 Maret 1913. Kerajaan Lidak kemudian digabungkan dengan kerajaan Jenilu dibawah pemerintahan raja Don Josef da Costa ⁶¹.

3.1.3. Pembentukan Zelf Bestuurs

Setelah perdamaian berhasil diwujudkan oleh pemerintah Belanda, pemerintah Belanda melakukan penataan pemerintahan dengan memberlakukan *Zelf Bestuur Regelen* tahun 1909, 1919, 1927 dan 1938. Pemerintahan keresidenan Timor dan Daerah Takluknya (*Residentie Timor on Onderhoorigheden*) serta pembagian daerah administrasinya ditentukan dalam Indische Staatsblad 1916 no.372 ⁶². Keresiden Timor dan Daerah Takluknya yang diperintah oleh seorang residen dengan kedudukan di Kupang terbagi dalam 3 afdeeling yakni Afdeeling Sumba, Afdeeling Flores dan Afdeeling Timor dan Pulau-pulainya. Setiap Afdeeling diperintah oleh Asisten Residen. Setiap Afdeeling terdiri dari onder Afdeeling yang diperintah oleh seorang kontrolir atau gezaghebber. Untuk Afdeeling Timor dan Kepulauannya terdiri dari Onder afdeeling: Kupang, Zuid Midden Timor, Nord Midden Timor, Belu, Alor dan Rote. Pada tahun 1916 kekuasaan Belanda membagi distrik sebagai kesatuan administrasi di Timor Tengah yakni Belu Tasifeto dibawah raja Jenilu dan Malaka Selatan dibawah Liurai Tere Seran. Pada waktu itu pusat kedudukan Administrasi Belanda di Belu berpusat di Atapupu. Pusat kedudukan Belanda kemudian dipindahkan dari Atapupu ke Atambua. ⁶³. Pada tahun 1924 dua distrik tersebut digabungkan menjadi satu regensi dibawah Keser atau raja Baria Nahak sebagai kepala swaprja Belu. Sebagai konsekwensi harus ditanda tangani korte verklaring. Pada waktu raja Seran Nahak wafat, sebagai gantinya ditetapkan Seran Nahak dari Haitimuk sebagai raja baru dengan kedudukan di Laran. Pada tahun 1926 ia diundang ke Atambua menanda tangani korte verklaring. Untuk memperkuat kedudukannya diundang beberapa pemimpin antara lain raja Atok Samara dari Bauho. Onderafdeeling Timor Tengah Utara dibentuk tahun 1913 semula ibu kotanya di Noetoko kemudian pada tahun 1916 dipindahkan ke

⁶¹ Widiyatmika M.dkk.2005,hal. 185-186

Lihat Beretallo A.A.1968 hal 4

⁶² Parimarta, I Gede.2002 hal. 362.

Lihat Bruijnes,Twee Landschappen op Timor,hal.175

⁶³ Widiyatmika dkk.2007. Srajarah Pemerintahan Tradisional di Belu.UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Propinsi NTT.. Hal, 2201-203

Kefamnanu⁶⁴. Kekuasaan Belanda di Belu yang semakin luas, pusat kekuasaan Belanda dipindahkan dari Atapupu ke Berdao pada tahun 1911 kemudian dari Berdao dipindahkan ke Atambua pada tahun 1916⁶⁵.



Gambar 3.2 Perahu penduduk dari Timor Portugis di Atapupu



Gambar 3.3 Kapal Sandar di Pelabuhan Atapupu

Pada tahun 1854 jumlah kerajaan yang diakui Belanda 15 kerajaan tahun 1904 menjadi 20 kerajaan (Tom Therik 1995)⁶⁶.

⁶⁴ Widiyatmika M.dkk.2008. Sejarah Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Utara. UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Propinsi NTT.hal.218.

Lihat Silab Wilfridus dkk.2005.Dari Noetoko ke Kefamnanu.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten TTU hal.78-94

⁶⁵ Widiyatmika dkk.2007. Sejarah Pemerintahan Tradisional di Belu.UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Propinsi NTT.. Hal, 201-203

⁶⁶ Tom Therik,1995 hal.19



Gambar 3.4 Perahu Layar di Pelabuhan Atapupu

Pasca selesainya Politi Pasifikasi tahun 1915 di Timor, Belanda melakukan perubahan sistem pemerintahan Zelf Bestuur Regelan dibentuk Onder Afdeling Zuid Miden Timor mencakup swapraja Insana, Biboki dan Miomaffo. Pimpinan pertama pemerintah Belanda dijabat Letnan Stinmetz dengan istilah Controleur Landschiodf Noord Miden Timur dengan kedudukan di Noetoko. Markas pertama Belanda dibangun oleh letnan Senmetz tahun 1909. Dari Noetoko markas Belanda pindah ke Oeekam selama 2 tahun. Pimpinan pasukan Belanda adalah Letnan Teb Tebes atau Letnan Sketel Silab, (2005) ⁶⁷. Kemudian markas Belanda dipindahkan ke Tele yang kemudin dikenal dengan nama Kefamnanu. Kefamnanu menjadi pusat pemerintahan Belanda tanggal 22 September 1922. Sesuai dengan perkembangan situasi keamanan yang semakin baik, pemerinthan militer digantikan oleh pemerintahan sipil berdasarkan Zelf Bestuur regelen tahun 1938 dalam Indische Stadblaad no.372. Letnan Stenmetz digantikan oleh pejabat sipil yakni seorang Kontrolir bernama Eddemars. Ia menjabat *controleur Nord Midden Timor* sampai Desember 1939. Pada bulan Desember 1939 sampai Mei 1942 ia digantikan controleur H..Schulte Nordholt. Setelah jaman pendudukan Jepang usai ia menjabat kembali sebagai Kontrolir pada September 1945 sampai Juli 1947. Namun kantor Kontrolir di Kefa dibangun baru tahun 1923 ⁶⁸. Pada tahun 1935 disamping dibangun kantor kontrolir dibangun pula bangunan tangsi Tentara, penjara dan Gereja Katolik di Kefamnanu. Pusat Pemerintahan Belanda di Timor Tengah Utara.⁶⁹

3.1.4. Kerajaan-kerajaan di wilayah Perbatasan

a. Kerajaan-kerajaan di wilayah Perbatasan pada awal abad ke 19.

Kerajaan-kerajaan diperbatasan pada awal abad ke 19 mencakup 15 kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu adalah:

⁶⁷ Silab W.dkk 2005. Dari Noetoko ke Kefamnanu. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara hal.89-.93

⁶⁸ Silab W.dkk.2005. hal. 99,100

⁶⁹ Silab W.dkk.2002 hal. 101

Pada tahun 1882 jumlah kerajaan Berdasarkan laporan kontrolir Belu pada tahun 1904 Belu sebagai sebuah Onder afdeeling berada dibawah kontrolir Grijsen yang dikutip Thom Therik 68. Pemerintah Belanda mencatat 20 swapraja sebagai bagian dari Onder Afdeeling Belu. Ke 20 swapraja tersebut adalah:

Tabel Nama swapraja di Belu pada tahun 1904

1. Wehali	6. Lekekun	11. Harneno	16. Naitimu
2. Wewiku	7. Dirma	12. Maukatar	17. Lidak
3. Haitimuk	8. Mandeu	13. Fialaran	18. Lamaknen
4. Fatuaruin	9. Insana	14. Jenilu	19. Makir
5. Nenometa	10. Biboki	15. Silawan.	20. Lamaksenulu

Sumber: Thom Therik, (1995)⁷⁰

Dalam kekuasaan kontrolir di Belu sebagian besar wilayah perbatasan ada di lingkungan wilayah kontrolir di Belu. Pada bulan Oktober 1909 ditetapkan kerajaan-kerajaan diatur dalam ketentuan Zelfbestuur. Peraturan Zelf bestuur beberapa kali mengalami perubahan dalam bentuk Zelf Bestuur Regelen tahun 1909, 1919, 1927 dan 1938. Keresiden Timor dan Daerah Takluknya diperintah seorang residen dengan kedudukan di Kupang dan terbagi atas 3 Afdeeling yakni: Afdeeling Sumba, Afddeling Flores dan Afdeeling Timor dan Pulau-Pulaunya. Afdeeling Timor dan Kepulauannya terdiri atas onder afdeeling: Kupang, Zuid Midden Timor, Noord Midden Timor, Belu (Parimatha, (2002) ⁷¹.

Kerajaan yang pertama kali ditundukkan di perbatasan adalah kerajaan Lidak tahun 1857. Komandan Kapal Cepat Bangka Letnan Hendrick Clabeck vander Does dan 2 prajuritnya tewas dalam pertempuran.⁷²

Kerajaan-kerajaan yang diakui di wilayah Belu ada 15 buah kerajaan yakni: Wewiku, Wehali, Lakekun, Dirma, Mandeu, Biboki, Insana, Harneno, Naitimu, Lidak, Jenilu, Fialaran, Silawan, Lamaknen, Lamak Senulu, Maukatar. Pada tahun 1882 bertambah dengan kerajaan Makir dan tahun 1890 tambah 4 buah yakni Wewiku, Haitimuk, Anas dan Fatuaruin ⁷³

Sesuai dengan statistik pada tahun 1887 data penduduk di Atapupu berjumlah 338 jiwa terdiri dari Cina 180 orang, Rote 29 orang, Merdeka 63 orang dan bebas 28 orang, kaum berdinan hanya 40 orang dan warga kota 18 orang ⁷⁴

Portugis disamping berkuasa di wilayah Wesei Wehali, juga menguasai beberapa

⁷⁰ Tom Therik, 1995 hal.79

⁷¹ Parimatha I Gede 2002 hal.237

⁷² Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 2 hal.673

⁷³ Widiyatmika M dkk.2007 hal 240

⁷⁴ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 1 hal.672

wilayah Belu di dekat perbatasan. Di beberapa tempat di perbukitan yang strategis Portugis membangun benteng dan pos penjagaan. Pada tahun 1904 di perbatasan Timor Portugis bendera Portugis berkibar di pos penjagaan. Pasukan penjaga pos sering keluar pos untuk pergi ke kampung di Bukit Fatubesi di perbatasan.



Gambar 3.5 Tafatik Laran

b. Berbagai Perubahan di bidang pemerintahan di Belu

Pada tahun 1910 Swapraja Anas (Neno Metan) digabungkan dengan swapraja Amanatun dan disahkan berdasarkan Beslit Gubernemen tanggal 14/1/1913 no.2.⁷⁵

Dari 20 swapraja di lingkungan Onder Afdeeling Belu ,yang mempunyai wilayah perbatasan adalah: kerajaan Maukatar, Fialaran, Jenilu, Lamaknen, Lamaknen dan Lamaksenulu. Pada tahun 1913 ketika raja Lidak Petronela da Costa mengundurkan diri , pada tanggal 23 Maret 1913 kerajaan Lidak digabungkan dengan kerajaan Jenilu. Pada tanggal 31 Juli 1913 raja Jenilu Don Josef da Costa menanda tangani korte verklaring yang isinya antara lain: Musuh raja Belanda adalah musuh saya, sahabat raja Belanda adalah sahabat saya,⁷⁶. Wilayah saya adalah sebagian dari wilayah kerajaan Belanda. Saya tidak boleh menanda tangani sesuatu persetujuan dengan negara lain.

Dengan besluit Gubernemen tanggal 7 Oktober 1914 no.30 kerajaan Naitimu digabung dengan kerajaan Jenilu dan Lidak dan diberi nama kerajaan Kakuluk Mesak dibawah perintah raja Jenilu Don Yosef da Costa. Kerajaan Kakuluk Mesak pada tahun 1916 dihapuskan. Ketiga kerajaan Lidak, Jenilu dan Naitimu beserta kerajaan Fialaran, Lamaknen, Makir dan Lamak Senulu digabungkan dalam sebuah swapraja baru Belu Tasifeto. Sehingga pada waktu itu di Belu bagian Utara dari 8 kerajaan berubah menjadi 2 swapraja yakni Swapraja Belu Tasifeto dan swapraja Maukatar⁷⁷. Sesuai dengan perjanjian internasional tentang perbatasan antara Belanda dan Portugis tahun 1904 dan berlaku

⁷⁵ Schulte Norholt H.G.1971 hal. 310

⁷⁶ Tom Therik, 1995 hal.20

⁷⁷ Tom Therik, 1995 hal.19

efektif tahun 1916, maka swapraja mengalami perubahan. Sesuai dengan artikel I Undang-Undang tahun 1909. kerajaan Maukarat diserahkan kepada Portugis. Sebaliknya pemerintah Belanda memperoleh Noemuti, Tahakae dan Tamiru Ailala. Noemuti digabungkan dengan swapraja Miomaffo, Tahakae dimasukkan kedalam wilayah kerajaan Nualain dan Tamiru Ailala dimasukkan kerajaan Lakekun.. Dengan demikian di wilayah Belu Utara tinggal satu swapraja yakni Belu Tasifeto. (Bere Tallo, A.A. 1968).⁷⁸

Dengan surat tanggal 7 Januari 1916 no.32/5 Residen Timor dan Daerah Takluknya mengusulkan membentuk swapraja Malaka. Tanggal 1 April 1915 Swapraja Insana, Biboki, Harneno, dimasukkan dalam wilayah Timor Tengah Utara. Dengan demikian di wilayah Belu tinggal 14 buah swapraja.⁷⁹ Tanggal 29 Mei 1915 *Civiel en Militair Assistent Resident* Cramberg mengadakan rapat di Besikama. Rapat ini dihadiri oleh Keiser Wehali Baria Nahak, dan Liurai Fatuaruin Tei Seran, serta para kepala Swapraja Waihale, Waiwiku, Haitimuk, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, Mandeu. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk secara bersama-sama membentuk satu Swapraja Malaka. Tahun 1916, dengan Surat Tanggal 7 Januari 1916 No.32/15 Residen mengajukan usulan membentuk Swapraja Malaka. Dengan demikian jumlah Swapraja di Belu tinggal 7 buah.⁸⁰ Tanggal 19 Januari 1916 para raja Kakuluk Mesak, Fialaran, Lamaknen, Silawan, Makir, Lamaksenuku mengadakan musyawarah sepakat membentuk swapraja Tasifeto. Tanggal 10/5/1916 dengan *Beslit* Gubernemen No.22 Stbl. 1916 No.372 diangkat Tei Seran sebagai *Liurai* Malaka dan Don Josef da Costa sebagai Kepala Swapraja Belu Tasifeto. Keduanya menanda tangani *korte verklaring*. Dalam tahun 1916 ibu kota wilayah Belu dipindahkan ke Atambua. Belu terdiri dari 2 swapraja yakni: Malaka, Belu Tasifeto.⁸¹

Nama-nama distrik dan sub distrik serta para raja di swapraja Belu Tasifeto adalah :

Disrik	Sub Distrik	Nama Raja
Naitimu	-	Hale Kin
Lidak	-	Asa Nesin
Jenilu	-	Josef Faericianus Parera
Silawan	-	Koli Atok
Bauho (Fialaran)	Bauho	Atok Samara
Takirin	-	Siku Suri
	Dafala	W.Ati
	Manleten	Sili Saka
	Umaklaran	Seran Kehik

⁷⁸ Bere Tallo A.A. 1968 hal.4

⁷⁹ Bere Tallo, A.A. 1968 hal.4

⁸⁰ Bere Tallo A.A. 1968 hal.5

⁸¹ Bere Tallo A.A. 1968 hal. 5,6.

Lasiolat	- Tohe Asumanu Maumutin Aitoun	Don Cajetanus da Costa Manek Siku (Mau Siki) Atok Moruk Lau Besin Suri Lulik
Lamaknen	Kewar Lakmaras Nualain Leowalu Fulur Ekin Lo'onuna Dirun	Bau Liku Bere Tae Lesu Bere Bere Taek Mauk Asa Fahik Taek Luan Bau (Mau Loko) B.Dato Manu
Makir	-	Tes Bau(Leo Bele)
Lamaksenulu	-	Leto Asa

Sumber: G.Tom Therik, (1995) ⁸²

Sedangkan kerajaan di lingkungan Swapraja Malaka pada tahun 1916 adalah seperti dalam tabel di bawah:

Kerajaan	Nai	Nama Raja
Wewiku	Rabasa Umalor Wederok	Bere Seran Bere Klau Klau Fahik
Haitimuk	-	Klau Kloit
Wehali	-	Edmunus Bria Taek
Fatuaruin	- Manlea Bani-Bani	Seran Asit Fatin - -
Lakekun	Litamali	Loro Tahu Leki Atok Lakuan Wilhelmus Leki
Dirma	- Mandeu Kusa	Fatin Nekin Nino Besi Bara Tuna Berek

Sumber: Tom Therik, (1995) ⁸³

⁸² Tom Therik, 1995 hal. 21

⁸³ Tom Therik, 1995 hal 22

Tanggal 28 Juli Tahun 1917, berdasarkan surat keputusan Gubernemen Tanggal 28/7/1917 no.31: ditetapkan Noemuti masuk wilayah Timor Tengah Utara, Tahakae masuk wilayah distrik Lamaknen dari swapraja Belu Tasifeto dan Tamiru Ailala masuk distrik Dirma dari swapraja Malaka.⁸⁴

Tanggal 1 April 1920 raja Don Josef da Costa minta berhenti karena sakit. Oleh karena itu dalam tugasnya ia dibantu Fettor Jenilu Josef Parera. Tanggal 1 Agustus 1920 Seran Asit Fatin ditunjuk sebagai pembantu *Liurai* Tei Seran yang sudah lanjut usianya. Sesudah kematian Liurai Tei Seran, tanggal 3 September 1922, ia diangkat sebagai wakil kepala Swapraja Malaka. Sebagai pengganti Tei Seran anaknya yang bernama Antonius Tefa Tei Seran. Tanggal 10/9/1920 Don Josef da Costa sebagai raja Belu Tasifeto meninggal dunia. Josef Parera bertindak sebagai wakil raja Belu Tasifeto⁸⁵

Tahun 1923 Josef Parera meninggal dunia. Loro Bauho Atok Samara ditunjuk sebagai Kepala Swapraja Belu Tasifeto dengan SK Residen tanggal 26 /6/1923 Non 414. Tanggal 20 September 1923 terbit memori Kontrolir Von Raesfeld Meyer, yang mengusulkan penghapusan Swapraja Malaka dan Swapraja Belu Tasifeto. Berdasarkan *Beslit* Gubernemen tanggal 28 /11/1924 no.39, Swapraja Malaka dan Swapraja Belu Tasifeto dihapuskan. Wilayah Belu dijadikan satu Swapraja Belu dibawah *Maromak Oan* Baria Nahak dan Liurai Seran Asit Fatin. Tanggal 9/10/1924 *Maromak Oan* Baria Nahak meninggal dunia. Tanggal 8 Januari 1925 Semua *loro* dan *nai* di seluruh Belu mengakui Seran Nahak, kemenakan Baria Nahak sebagai *Maromak Oan* kecuali Loro Bauho Atok Samara dan Loro Lamaknen Bauliku⁸⁶

Dengan *Beslit* Gubernemen tanggal 6/3/1926 No.17 Seran Nahak diangkat secara resmi sebagai *Maromak Oan*. Tanggal 10 Mei 1926 Seran Nahak dilantik sebagai *Maromak Oan* dan menanda tangani *korte verklaring*. Loro Bauho Atok Samara yang tidak setuju, tidak menghadiri upacara pelantikan. Sehingga Kontrolir melaporkan dengan surat tanggal 19 Mei 1926 No.14 /Rahasia. Tanggal 1 Juni 1926 *Maromak Oan* baru mengadakan perjalanan kemuliaan ke Lamaknen. Loro Lamaknen Bau Liku tidak mau memberi penghormatan kepada Seran Nahak sebagai *Maromak Oan*. Akibatnya *loro* Bauho Atok Samara diberhentikan dari jabatannya sebagai *loro* tanggal 12 Juni 1926. Sementara mengisi jabatan lowong, ditunjuk fettor Takirin Kasa Taek. Berdasarkan SK Residen tanggal 25/9/1926 no.445 Seran Sit Fatin diakui sebagai *Liurai* di samping *Maromak Oan* Seran Nahak.⁸⁷

Tahun 1927 untuk menggantikan Loro Bauho yang kosong karena Atok Samara diberhentikan, ditunjuk Hendricus Besin Siri. Karena waktu itu ia masih kecil ia

⁸⁴ Bere Tallo A.A. 1968 hal.5

⁸⁵ Berre Tallo A.A. 1968 hal. 5

⁸⁶ Berre Tallo, A.A. hal. 5

Lihat Tom Therik 1995 hal.23-24

⁸⁷ Berre Tallo A.A 1968.hal 5

diwakili oleh fettor Takirin Kasa Taek. Tanggal 23 /11/1928 terbit laporan Bestuur Asistent J.S.Kedoh. Ia menyimpulkan bahwa swapraja Belu tidak dapat dipertahankan, dan harus dibentuk kembali 3 swapraja yakni: Malaka, Belu Tasifeto dan Lamaknen. Usulan tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh kontrolir W.Ch.J.J. Buffart tanggal 20 Juli 1940 kemudian residen menindak lanjuti usulan tersebut dengan surat usulan tanggal 12/2/1941 No.382/4/3. Akhirnya berdasarkan keputusan tanggal 13/2/1941 No.8/XIII/I.R dikeluarkan peraturan pengadilan Swapraja menghapuskan swapraja Belu dan membentuk swapraja Malaka, Belu Tasifeto dan Lamaknen⁸⁸.

Tanggal 8 Januari Tahun 1929 *Maromak Oan* Seran Nahak meminta berhenti sebagai *Maromak Oan* Belu. Kemudian berdasarkan Beslit Gubernemen tanggal 8/4/1930 No.39 Seran Nahak diberhentikan sebagai *Maromak Oan*. Dan berdasarkan beslit Residen tanggal 14/5/1930 No.142 Seran Asit Fatin ditunjuk sebagai *Liurai* Kepala Swapraja Belu seorang diri. Tanggal 9 November 1931 Seran Asit Fatin meninggal dunia. Dengan beslit Residen tanggal 2 Mei 1932 No.842 Swapraja Belu diperintah oleh suatu Panitia Pemerintahan Swapraja Belu yang terdiri dari 3 orang anggota tanpa ketua yakni: *Loro Fialaran*, *Loro Lakekun* dan *Loro Wewiku*. Sementara itu diperintahkan untuk mengadakan penyelidikan tentang struktur pemerintahan swapraja Belu. Dengan beslit Gubernemen tanggal 14/9/1938 no.29 Stbl.1938 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Kerajaan Tahun 1938, dimana diatur tugas dan wewenang para kepala swapraja dengan kontrak pendek. Pada tanggal 12 Februari 1942 residen Timor dan Daerah Takluknya Niboer menulis surat kepada gubernur Timur besar di Makasar memohon persetujuan menghapuskan swapraja Belu dan mendirikan kembali 3 swapraja Tasifeto, Malaka dan Lamaknen (De Han 1947 dalam Tom Therik⁸⁹). Tetapi permintaan tersebut belum sempat direalisasikan keburu pada tahun 1942 pasukan pendudukan Jepang datang.

c. Perubahan kerajaan di Timor Tengah Utara.

Pada tahun 1887 beberapa kerajaan di Timor Tengah Utara masuk dalam dua onder afdeeling yang berbeda yakni: Insana dan Biboki masuk Belu dan Amkono masuk Mollo atau Oematan. Namun sistem pemerintahan di lingkungan keresidenan Timor dan Daerah Taklukannya beberapa kali mengalami perubahan baik dalam lingkungan afdeeling dan onder afdeeling serta landschapnya. Sejalan dengan ditanda tangani berbagai perjanjian antara para raja dengan penguasa Belanda maka para raja yang menanda tangani kontrak otomatis tunduk dibawah kekuasaan Belanda. Kontrak itu juga dijadikan dasar Belanda melakukan kebijakan berbagai perubahan dalam bidang pemerintahan. Beberapa kontrak yang ditanda tangani para raja dari wilayah Timor Tengah Utara adalah:

⁸⁸ Berre Tallo A.A. 1968 hal.5,6

⁸⁹ Tom Therik, 1995 hal. 24

1) Kerajaan Biboki

Perjanjian Kerajaan Biboki dengan Belanda :⁹⁰

- Tanggal 20 Agustus 1900 raja Biboki Oesi Anapaha menanda tangani Timor Verklaring (VI).
- Tanggal 20 Agustus raja Oesi Anapaha menanda tangani Contract betreffende mijnrechten.
- Tanggal 12 September 1901 raja Oesi Anapaha menanda tangani Verklaring betreffende belastingheffing.
- Tahun 1916 kerajaan Biboki dikukuhkan oleh Belanda dengan Beslit Gubernur Jendral tanggal 1 Agustus 1916 no.34 dan mengangkat Kornel Manlea Kau Mauk sebagai raja.
- Tanggal 10 Mei 1926 raja Kaoe Maoek menanda tangani Korte verklaring I.
- Kerajaan Insana mengadakan perjanjian dengan Belanda ⁹¹
- Tanggal 22 September 1879 raja Malavoe menanda tangani Timor Verklaring (VI).
- Tanggal 24 Desember 1916 raja Kaha Lassi Tau Lin menanda tangani Korte verklaring I
- Perjanjian kerajaan Miomaffo dengan Belanda ⁹²
- Tanggal 1 Juli 1908 raja Oei Nono Kono menanda tangani korte verklaring I
- Tanggal 10 Oktober 1917 raja Oes Kono menanda tangani Korte verklaring I
- Tanggal 7 Maret 1920 raja Kefi Lelan menanda tangani Korte verklaring

Jumlah Penduduk

Berdasarkan laporan misionaris P. Kraijvaanger tahun 1890 jumlah penduduk di kerajaan Biboki 9.412 jiwa, Insana 13.118 jiwa. Berdasarkan data tahun 1930 jumlah penduduk di 3 swapraja di Timor Tengah Utara berjumlah 57.656 jiwa dengan rincian penduduk yang terbesar adalah di swapraja Miomaffo 31.641 jiwa. Sedangkan swapraja lainnya yakni: swapraja Insana 13.428 jiwa dan swapraja Biboki 13.587 jiwa ⁹³



Gambar 3.6

Foto raja Biboki Us Mes Boko

⁹⁰ Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurs Zaken der Buitengewesten van Het Departemen van Binelanddsch Bestuur Seri A no.3 Landsdrukkerij Weltervreden 1929 hal 668

⁹¹ Buitengewesten, 1929 hal. 671, 672

⁹² Buitengewesten, 1929 hal. 690

⁹³ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid I hal. 204

Pada awalnya Kerajaan Biboki merupakan sebuah kerajaan dibawah pengaruh Wesei Wehali. Pada waktu Perjanjian Paravicini tahun 1756 raja Boboki tidak ikut menanda tangani perjanjian. Raja Yang menanda tangani perjanjian adalah raja Besar Belu Hiacijnto Corea. Biboki waktu itu ada diantara 29 daftar kerajaan yang berada dibawah kekuasaan Belu. Dalam dokumen perjanjian nama Biboki disebutkan sebagai: Sakunaba Baibohe.

Schulte Nordholt (1971)⁹⁴. mengemukakan pada tahun 1725-1775 untuk pertama kali ditetapkan seorang loro di Biboki semenjak merosotnya liurai Sonbai akibat serangan Portugis tahun 1642. Segenap kerajaan Biboki disebut Nesi-Aluman, Teban-Tautpah. Menurut catatan Dr.S.Muller Biboki dahulu masuk Oekusi dan pada tahun 1850 masuk Wehali. Catatan gezaghebber Letnan Stenmetz tahun 1916 menyebutkan percampuran suku-suku di Biboki terlalu besar dapat dikatakan simpang siur beradukan. Hal ini disebabkan oleh peperangan yang dilancarkan Biboki kepada Insana dan Oekusi. Biboki memasukkan bunga hasil panen kepada Liurai Wehali dan Liurai Sonbai. Pada rumah pemali di Tamkesi terdapat pula dua tiang agung tempat membawa persembahan yaitu sebelah selatan untuk Wehali dan sebelah utara untuk liurai Sonbai. Satu cabang Sonbai dari Kauniki berhubung pertengkaran dengan saudaranya mengungsi ke Keon di perbatasan Biboki Insana (Keun'm Ta'sona). Di sana rakyat memasukkan hulu hasil panennya. Tetapi karena ia bertindak kejam ia diusir rakyat kembali ke Miomaffo terus ke Mollo terakhir Tua Sonbai.

Dilaporkan bahwa pada tahun 1781 terjadi pemberontakan Biboki dan Miomaffo melawan Liurai Sonbai. Sonbai dinilai memerintah terlalu kejam.

Amakono yang semula tinggal di Silo di lereng Gunung Miomaffo yang tingginya 1400 m. Kemudian sonaf pindah ke Blipun, kearah lereng yang lebih rendah. Pada waktu itulah pemberontakan melawan Liurai Sonbai yang lalim dimulai. Pemberontak berusaha mengirim kembali Sonbai ke Belu. Tetapi atoni amafnya Mella menyembunyikannya di Bijeli agar bisa mengungsi ke Kauniki. Ketika Sonbai mengungsi Amakono pergi ke Kupang menyatakan keberatan kepada Kompeni. Ia diberi dua tongkat berkepala emas dan bendera sebagai simbol kebebasan dari Sonbai dan bersekutu dengan Kompeni. Ketika Kono kembali dari Kupang, ia kemudian mengumpulkan penduduknya. Ia menyampaikan kita lagi berurusan dengan Sonbai tetapi dengan kompeni. Seluruh amaf yang hadir menyetujuinya. Kemudian cendana, lilin dan emas dipersembahkan kepada Kompeni sebagai upeti ⁹⁵.

Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan pembagian wilayah antara Kono dan Oematan, tetapi batas wilayah tidak diputuskan karena kedua bangsa tersebut adalaf mempunyai hubungan olif tataraf dan wilayah berasal dari Kune Uf. Kejadian

⁹⁴ Schulte Nordholt H.G.1971 hal. 241

⁹⁵ Schulte Nordholt H.G.1971 hal. 281

tersebut menurut dokumen Belanda berkaitan dengan upaya penambangan emas pada tahun 1781. Sejak itu Oematan dan Miomaffo berdiri sebagai sebuah kerajaan sendiri terlepas dari Liurai Sonbai. Kejadian ini juga dianggap menjadi salah satu sebab mengapa Sonbai mengangkat perlawanan kepada Belanda pada tahun 1785, setelah Sonbai kembali lagi ke Oenam.

Seorang Maromak Oan dari Wehali pernah mengungsi dan menetap di Biboki yakni Maromak Oan Doon Felix.⁹⁶ Pada tanggal 19 November 1913 dilaporkan pastor Verstraelen dan Pastor P.C.Noyen melakukan kunjungan ke pusat kerajaan Biboki di Sufa. Pada waktu itu dilaporkan telah ada seorang pedagang Cina bernama Lay tinggal di sana. Pastor menginap di pesanggrahan di Sufa yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Oleh raja pastor diberi hadiah ayam, telur, beras, nenas. Kunjungan pastor kesana didampingi raja Mandeu yang mengenakan gelang perak seharga 30 gulden, ikat pinggang dihiasi dengan 21 dinar emas murni. Raja mengenakan jas sutra dari Cina hadiah dari seorang sahabat. Tanggal 21 November rombongan pastor menuju Maubesi dengan menunggang kuda selama 5 jam. Di tengah jalan pastor telah melihat patok-patok untuk pembuatan jalan raya telah dipasang. Di tengah jalan di sebuah bukit pastor melihat sebuah tiang kayu bercabang dua yang digunakan memancang kepala pencuri ternak yang tertangkap.⁹⁷

Dahulu Harneno Biboki termasuk dalam wilayah Oekusi, tetapi tahun 1850 dimasukkan dalam wilayah Wehali. Tahun 1916 kerajaan Biboki ditetapkan sebagai kerajaan dengan beslit Gubernur Jendral tanggal 21 Agustus 1916 no.34 dengan mengangkat Kornel Manlea, Kau Mauk menjadi raja dengan membawahi 5 kefetoran yakni: Ustetu, Petasi, Bukifan, Taitoh dan Harneno.⁹⁸

Wilayah Kerajaan Biboki

Manamas

Manamas ditetapkan sebagai distrik tersendiri pada tahun 1912. Lebih dari 400 penduduk merupakan pelarian dari wilayah Portugis yang mencari perlindungan di wilayah kekuasaan Belanda.⁹⁹

Bikomi

Berdasarkan mitologi leluhur Bikomi terdiri dari 4 bersaudara datang dari Belu Selatan. Empat bersaudara tersebut Lake, Sanak, Ato dan Bana. Mereka keluar dari Belu Selatan untuk mencari tempat yang cocok. Ke empat bersaudara tersebut datang dengan melewati jalur tengah pedalaman pulau Timor yang dikenal sebagai

⁹⁶ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal.280

⁹⁷ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid I hal. 235

⁹⁸ Schulte Nordholt H.G. 291

⁹⁹ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal.292

jalur panas karena harus banyak bertempur melawan penduduk asli yang disebut Nija Bosaf di setiap tempat yang dilewati. Dalam istilah adat jalur tersebut disebut Maputu-Malala. Schulte Nordholt melaporkan leluhur Bikomi dari Belu sampai di Nunu Koba. Di tempat ini perjalanannya terhalang sebuah pohon beringin besar. Sonbai yang pada waktu itu bersamanya, kemudian dengan pedangnya memotong dahan-dahan besar. Ia kemudian menyeberang Senak dimana terdapat seorang sedang duduk di pohon Taupi Senak. Senak bertanya kepada Sonbai apakah ia kenal dengannya. Sonbai mengenalinya dan memberinya nama Senak. Kemudian secara bersama-sama mereka memindahkan batang-batang besar pohon beringin sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka menaiki bukit yang bernama Kaumone Tapen Pah dan melihat ke sekeliling tanah. Kemudian Sonbai memutuskan pergi ke Oenam ketempat yang bernama Molo dimana sonafnya berada. Ke empat saudara meninggalkan Sasi di sebelah Utara Bikomi yang dikenal sebagai batu pemali Senak.¹⁰⁰

Dekat Nunu Koba di wilayah Liurai, Soi Liurai seorang wanita yang bertindak sebagai penunjuk jalan memutuskan kembali ke Liurai tetapi kemudian wafat. Ia dikuburkan di dekat Nunu Koba. Disini mereka bertemu dengan 8 saudara yang datang dari Wehali, wilayah liurai. Mereka menikah dengan 8 saudara tersebut. Senak kawin dengan Sani Bantene di sasi, bana kawin dengan Oba Uki di naineno, Lake kawin dengan Bitnani Tpoi di Bitaik dan Atok kawin dengan Nebe Lite di Anab. Cerita versi lain: Senak melihat asap dan pergi menyelikinya. Kemudian ia bertemu Kisnai dimana putrinya Soni Kisnai dikawinnya. Mereka mempunyai putri bernama Komi Senak. Bi Komi Senak mencari air untuk banyak penduduk yang malas. Ia kemudian sampai di danau. Ia kemudian jatuh dan berubah menjadi buaya. Ketika penduduk datang mencarinya ia dipanggil : Bikomi dan Naijam Bikomi, Usif Bikomi. Sejak itu Senak sebagai penguasa suku di wilayah tersebut dan diberi nama dan buaya menjadi totemnya. Kemudian datang bana, Ato dan lake an Kisnai pergi ke Barat, Pertama ia tinggal bersama Lake di sasi dan kemudian pergi ke wilayahnya sendiri. Di sana telah ada penduduk yang tinggal yakni Lete-Banef, Uki-bantene. Bantene kemudian kawin dengan putri Atok, Bana dan Lake. Sedangkan critra versi banak: Mereka semua berkumpul di Naineo ditempat leunya. 8 bersaudara: Uki-Bantene, Lite-Bana dan kame-Tpoi yang tinggal di tempat tersebut dan mendapat tanah kebun. Kemudian Atok-Banak, lake Senak pergi ke Netnoni Oilfoan tidak jauh di perbatasan Molo. Disini ia menyeberang wilayah Sonbai. Mereka memotong pokok bambu. Di bambu tersebut ditaruh bulu ayam merah, batu basah dan senapan. Nai Bani Tobe seorang lelaki dari Biukomi diperintahkan meluncurkan bambu ke arah Liurai. Bambu tersebut melalui sungai Benain setelah berjalan beberapa hari tiba di Umalor di tempat sakral Liurai. Ayam berkokok dan berteriak: Saya telah mendapatkan tanah. Dengan demikian liurai mengetahui bahwa adiknya telah mendapat tanah¹⁰¹.

¹⁰⁰ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 293-294

¹⁰¹ Schulte Nordholt H.G. 1971 295-296

2. Kerajaan Insana

Kerajaan Insana Maubes pada periode ini termasuk wilayah pengaruh kerajaan Wesei Wehali. Pada waktu terjadi perang Penfui tahun 1749 Maubes Insana ikut berperang ke Penfui atas undangan Sonbai. Rombongan sukan maubes Insana dipimpin oleh Usi Pou Neno (adik terkecil Malafu Neno, Atupas ke II). Namun ia terbunuh dalam perang di Penfui akibat persekongkolan Sonbai dengan Belanda. Dalam perjanjian Paravicini tahun 1756 kerajaan Amubes Insana tidak ada dalam daftar para raja yang menanda tangani perjanjian maupun daftar raja di lingkungan bawahan Hiacijntoe Corea. Mereka yang tewas dikubur di Penfui (Aleksander Un Usffinit, 2003)¹⁰² Pasca Perang Penfui dan perjanjian Paravicini Oppperhoofd von Pluskow dua kali melakukan ekspedisi ke pedalaman tahun 1758-1761 salah satu kerajaan yang diserang dan harus menanda tangani perjanjian dengan VOC adalah Insana (Schulte Nordholt, 1971).¹⁰³

Kerajaan Insana semula masuk wilayah Belu pada tahun 1905 ia dimasukkan wilayah Timor Tengah Utara. Kemudian tahun 1916 Insana ditetapkan berdasarkan beslit Gubernur Jendral sebagai kerajaan Insana dengan raja Uis Kaha Lasi Taolin dengan 5 wilayah keketoran yakni: Fafinesu, Maubesi, Oelolok, Subun dan Ainan.¹⁰⁴

Raja Maubes Insana yang menjadi raja dalam periode 1810-1942 berturut-turut adalah: Malafu neno sebagai Atupas II yang pada tahun 1879 mennda tangani perjanjian dengan pemerintah Belanda. Ia digantikan oleh Atupas ke III Atolan Baaf (Tuamoko). Pada masa pemerintahannya raja eksekutif (usif bala) diambil alih Kaha Lassi Taolin yang ada tahun 1916 menanda tangani Korte verklaring I. Sebagai Atupas IV dikenal Malafou Tasaeb. Sedangkan Atupas ke V 1934-1936¹⁰⁵



Gambar 3.7
Raja Insana Laurentius Taolin

¹⁰² Usfinit, Alexander, Un, 2003. Maubes Insana. POenerbit Kanisius, Joyakarta hal. 44

¹⁰³ Usfinit, Alexander, Un 2003 hal.44

¹⁰⁴ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal.291

¹⁰⁵ Usfinit Alexander, Un.2003 hal.44

Tasaeb Malafu. Atupas ke VI tahun 1936-1938 Atolan Malafu (lal Uala). Pada tahun 1938-1940 memerintah Atupas ke VII Malafu Atolan (Hae Koto). Dan Atupas ke VIII tahun 1940-1942 memerintah Afu Tasaeb.

Pada tahun 1915 ketika kerajaan Insana dibawah kekuasaan raja Kahlas Taolin ia mempunyai dua orang meo yakni meo Missa dan pembantunya Malafu Naek, meo Keke dengan pembantunya Saku Eban. Para meo ini mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda disebabkan Belanda mau membangun jalan raya dari Noetoko ke Wini dengan melewati wilayah kerajaan Insana. Namun dalam perlawanan ini para meo yakni Meo Misa dengan pembantunya Malafu Naek dan meo Keke dengan pembantunya Saku Eban berhasil ditangkap Belanda. Mereka dibuang ke luar pulau Timor yakni ke Ende. Setelah menjalani hukuman di Ende, meo Missa dan Saku Eban kembali ke kampung halamannya. Namun Meo Keke dan Malafu Naek tidak mau kembali. Mereka menitipkan pesan kepada sukunya di Timor: *Au keso lo keso piuta* yang artinya saya jantan, tetap jantan untuk selama-lamanya (Widiyatmika M.dkk.2008).¹⁰⁶

Perlawanan terhadap kekuasaan Belanda juga muncul dipelopori bangsawan (usif) Afoan Thal berkedudukan di Aplal, Nun Baku berkedudukan di Naikaki dan Kloe Rosi berkedudukan di Kuan Lete. Mereka melakukan perlawanan karena Belanda tidak menghormati kekuasaan mereka dan bertindak keras terhadap rakyat. Kloe Rosi melakukan serangan dari Oel Nunung dengan dibantu para meonya. Namun dalam serangan ini mereka dikalahkan pasukan Belanda. Mereka terpaksa mengundurkan diri ke Sitrana di Oekusi. Dalam pertempuran dua meonya yakni Puni Fallo dan Puni Tamelab gugur dalam pertempuran. Untuk segera menangkap pimpinan perlawanan, Belanda menjalankan siasat yang licik. Dengan menggunakan jasa Bait Kenat, Afoan Thal mereka dibujuk agar menyerah dan kembali ke istana seperti sedia kala untuk memerintah rakyatnya. Ternyata setelah mereka bersama pengikutnya Kelu Fatin Kil Ana dan Molo Kila akan menyerah. Sampai di kampung Oel Fae ternyata mereka akan ditangkap. Di Kuan Lete mereka akan ditangkap. Bai Uuf dan Nofu Kusi bisa lolos karena menyamarkan diri. Karena gagal ternyata Bait Kenat ditangkap sebagai pengganti. Para tawanan yakni Kelu Fatin, Kil Ana, Molo Kila dan Bait Kenat ditawan dikirimkan ke Kupang. Dalam perjalanan Bait Kenat meninggal dikuburkan di Bogon.

Peristiwa Kaeslaat.

Semasa penundukan Belanda di Oeekam sempat terjadi peristiwa heroik yang dikenal sebagai Peristiwa Kaeslaat. Kaeslaat dari kata kase=tuan, sementara Laat=duduk/menunggu tidak karuan. Menurut Silab (2005) pada waktu itu hidup seorang panglima raja Sakunab bernama Olat Tanhai yang menentang kekuasaan Belanda. Sebagai seorang panglima kerajaan Tunbaba atau Panglima Tun Mesen Las Mesen ia merasa bertanggung jawab atas nasib rakyat dan wilayahnya. Karena ia

¹⁰⁶ Widiyatmika M.dkk.2008 hal.192

membangkok, Belanda berupaya mencari siasat menjebak dan membunuh sang panglima. Ia pernah dibakar dengan onggokan dedaunan kering dengan tangan terikat. Ia pernah juga dibakar di malam hari ketika tidur di kediamannya. Namun semua upaya Belanda tersebut gagal. Ia tetap selamat. Namun Belanda tidak surut. Belanda semakin menekan dan menindas rakyat. Akibatnya banyak rakyat yang sebagian besar keluarga Sakunab yang tinggal di pusat kerajaan Tunbaba, Kuantana melarikan diri ke Nipaen di Ambenu. Namun sebagai panglima Olat Tanhai tetap teguh tidak mengungsi dan bertahan di Kuantana demi menjaga dan mempertahankan raja yang juga bertahan. Karena tekanan Belanda semakin gencar, Olat Tanhai meminta bantuan kakaknya yang tinggal di Saen bernama Amaina Tanhai. Dengan bantuan kakaknya yang dikenal sakti dan dipercaya memiliki indra keenam, diatur siasat membuat jebakan / ranjau di jalan yang akan dilalui pasukan Belanda. Mereka melakukan penyembelihan hewan korban untuk mendapatkan kekuatan magis. Ternyata siasat ini membawa hasil. Pasukan Belanda yang akan menangkap Olat Tanhai jatuh dalam ranjau dan 2 orang tewas. Di Tanhai karena dipatuk ular. Belanda dua kali melakukan pengejaran dan dua kali gagal. Kemudian Belanda menganggap tidak perlu dilakukan pengejaran terus, sehingga perlahan-lahan situasi menjadi aman. Penduduk yang mengungsi kemudian kembali ke kampungnya ¹⁰⁷

3. Kerajaan Miomaffo

Raja Miomaffo yang memerintah pada tahun 1909-1917 Oenono Kono I. Kemudian ia digantikan oleh Oenono Kono II dari tahun 1917-1920. Dan sejak tahun 1920 sampai tahun 1933 yang menggantikan sebagai raja adalah Kefi Lelan. Sejak tahun 1933 -1938 Sobe Sanak. Kemudian sejak tahun 1938 yang menjadi raja adalah Gaspar Afoan Kono.

Swapraja Miomaffo dalam tahun pemerintahan tahun 1933 terdiri dari kepala swapraja yang dipegang Kefi Lelan. Di samping itu terdapat Tuan Tanah besar yang dipegang oleh Kune Uf dan para fetor yakni: Fetor Ablal: Afoan Thaal, fetor Noil Toko: Taeki Leolmin, fetor Naktimun: Foen Olin, Fetor Bikom: Malafu bana, fetor Nilulat: Snoe Lake.

Tanggal 28 Juli Tahun 1917, berdasarkan surat keputusan Gubernemen Tanggal 28/7/1917 no.31: ditetapkan Noemuti masuk wilayah Timor Tengah Utara, Tahakae masuk wilayah distrik Lamaknen dari swapraja Belu Tasifeto dan Tamiru Ailala masuk distrik Dirma dari swapraja Malaka. Noemuti kemudian berstatus sebagai sebuah keketoran di lingkungan kerajaan Miomaffo. Yang menjadi fetor Noemuti tahun 1915 adalah Koko Salem kemudian tahun 1940 Gaspar Salem dan kemudian tahun 1940 Don Mattheus V da Costa sebagai fetor sampai tahun 1953.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya kerajaan Miomaffo pada tahun 1781 melepaskan diri dari kerajaan Liurai Sonbai bersama-sama dengan kerajaan Oematan. Raja Miomaffo bergelar Atupas.

¹⁰⁷ Silab VV.dkk.2005 hal. 84,85

Pada tahun 1920 raja Miomaffo Us Kono wafat, pada waktu itu putranya belum dewasa sehingga ia digantikan oleh pejabat raja yakni Us Senak (Schulte Nordholt, 1971).¹⁰⁸ Kemudian yang naik sebagai raja adalah Kefi Lelan.

Wilayah-wilayah yang kemudian dimasukkan ke Swapraja Miomaffo adalah:

Tunbaba

Nama Tunbaba pertama kali disebutkan dalam sumber tertulis tahun 1760 ketika raja Tunbaba ikut menanda tangani perjanjian dengan VOC (De Roo van Alderwerelt, 1904). Pada waktu itu disebutkan Tunbaba merupakan sebuah kerajaan merdeka. Namun demikian Tunbaba mempunyai hubungan sangat erat dengan Sonbai dan Kono. Berdasarkan mitos Tunbaba berasal dari Malaka (Belu Selatan) dimana dua orang leluhur mendarat di Oinun dalam perjalanan dari Kmuno Klakam. Mereka datang bersama-sama dengan Liurai. Kemudian datang pula Sonbai dan Kono di Biinain di Tunbaba di kaki gunung Bifelnasi. Disini dikenal Antoin Lulai an Tub Lulai dua bersaudara yang tinggal ditempat tersebut. Mereka dikenal sebagai pendiri Tunbaba.¹⁰⁹

Kote Noemuti

Pada tahun 1916 Noemuti diserahkan oleh Portugis kepada pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1917 Noemuti dimasukkan dalam swapraja Miomaffo.¹¹⁰



Gambar 3.8
Kantor Kontrolir di Kefamnanu dibangun
tahun 1923



Gambar 3.9
Penjara Belanda di Kefamenanu tahun 1923

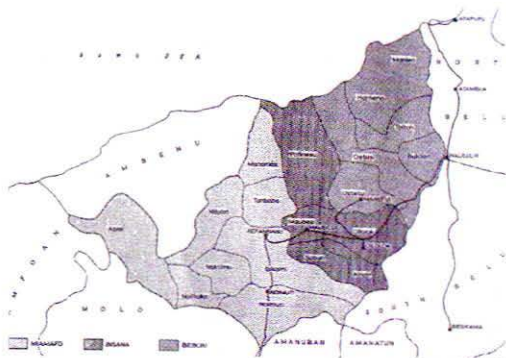
¹⁰⁸ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 290

¹⁰⁹ Schulte Nordholt H.G. 1971 289-290

¹¹⁰ SchulteNordholt H.G. 1971 hal.291



Gambar 3.10
Peta Wilayah Kerajaan di Timor



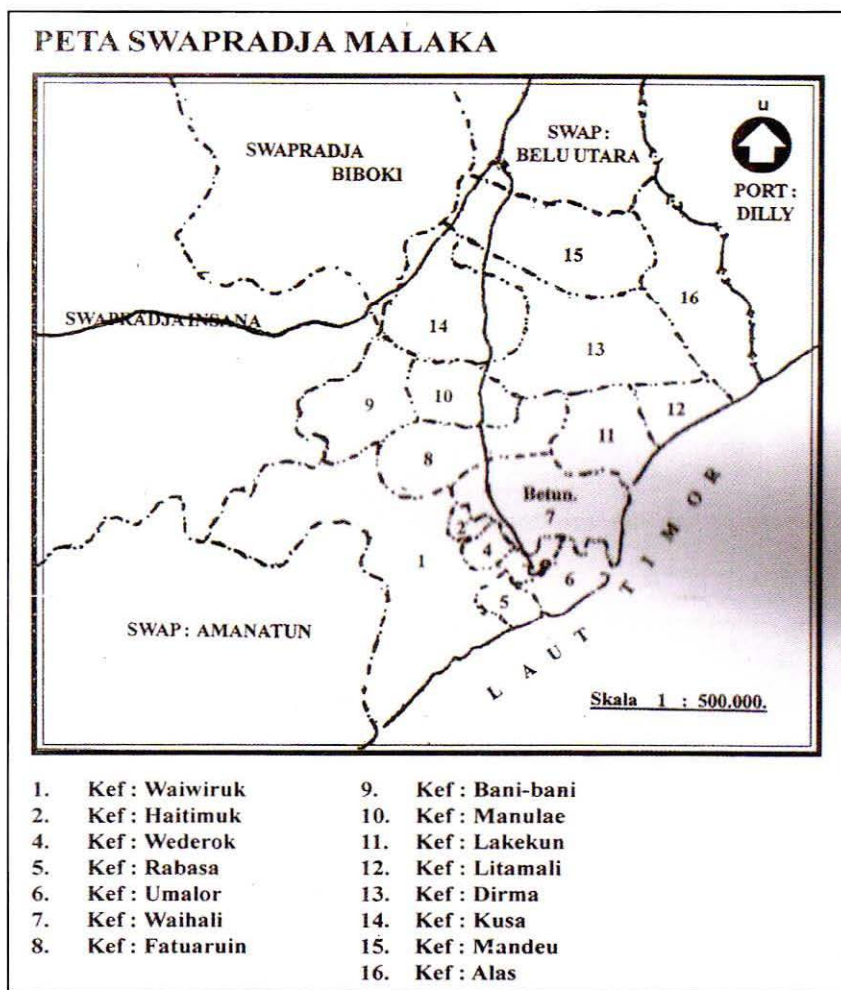
Gambar 3.11
Peta Wilayah Kerajaan Biboki, Insana,
Miomafo



Gambar 3.12
Gedung asisten Residen di Kupang



Gambar 3.13
Kantor Residen Timor di Kupang



Gambar 3.14 Peta Swa Praja Malaka

d. Jumlah Penduduk dan Perpindahan penduduk di wilayah Perbatasan

Berdasarkan laporan misionaris P.J.Kraijvangers Ap.Sj¹¹¹. tahun 1880 wilayah dari beberapa kerajaan antara lain adalah:

Fialaran raja berkedudukan di Bauho penduduk 4.131 jiwa wilayah mencakup: Kerajaan Klusien dengan pusat di Takirin, 350 jiwa. Kerajaan Dafala dengan pusat di Fatubaa. 970 jiwa, Kerajaan Manukleten dengan pusat di Fatubesi 81 jiwa. Kerajaan Umaklaran dengan pusat di Fatumean 145 jiwa. Kerajaan Sorbau dengan pusat di Sorbau 120 jiwa. Kerajaan Lasioat berpusat di Lafuli 1226 jiwa. Kerajaan Asumanu dengan pusat di Nieluli

¹¹¹ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 2 hal. 68-

380 jiwa. Kerajaan Tohe dengan pusat di Liku Bauk 285 jiwa. Kerajaan Maumutin dengan pusat di Siarain 310 jiwa. Kerajaan Aitong dengan pusat di Nuahai. 480 jiwa.

Kerajaan Lamaknen dengan jumlah penduduk 8.056 jiwa 31. Penduduk tersebut mencakup wilayah: Kerajaan Lakmaras 219 jiwa, Kerajaan Henes. 261 jiwa, Kerajaan Abis 336 jiwa, Kerajaan Dirum 213 jiwa, Kerajaan Loronuna 303 jiwa, Kerajaan Elkin 354 jiwa, Kerajaan Nualain 364 jiwa. Kerajaan Leowalu 291 jiwa, Kerajaan Duwa Dato 1379 jiwa, Kerajaan Podor Kewar 5347 jiwa.

Kerajaan Jenilu dengan jumlah penduduk 1008 jiwa mencakup wilayah: Lialuli 154 jiwa, Webetun 77 jiwa, Fatukaduwa 65 jiwa, Dumalous 81 jiwa, Barluli 33 jiwa, Karbao 120 jiwa, Fatuwali 155 jiwa, Haiklaran, Waeai, Bomok, Uwe Auk dan Kehiren.

Kerajaan Maukatar dengan wilayah: Berebeen 650 jiwa, Oeborok 3060 jiwa, Karentoh 1.010 jiwa, Labaraire 5.600 jiwa, Pohoruwa 5.710 jiwa, Mutuin 3.254 jiwa.

Pada tahun 1884 jumlah penduduk di berbagai kerajaan di Belu yakni: Jenilu 1.348 jiwa, Naitimu 1.140 jiwa, Insana 13.008 jiwa, Silawan 180 jiwa, Lamaknen 10.362 jiwa, Makir 3.389 jiwa, Wewiku 10.432 jiwa, Mandeu 3.693 jiwa, Lidak 4.219 jiwa, Beboki 9.402 jiwa, Harneno 1.344 jiwa, Fialaran 7.913 jiwa, Lamaksenulu 5.839 jiwa, Maukatar 17.345 jiwa, Wehali 17.345 jiwa, Kusa/Dirma 14.599 jiwa ¹¹²

Sedangkan penduduk Atapupu berjumlah 338 jiwa terdiri dari cina 180 orang, Rote 29 orang, Merdeka 63 orang, bebas 18 orang, berdinan 40 orang dan warga kota 8 orang. Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 3 ¹¹³. Penduduk berdasarkan sensus tahun 1920. Adalah sebagai berikut: Onder Afdeeling Noord Midden Timor 54.694 jiwa, Onder Afdeeling Belu 36.796 ¹¹⁴

Sedangkan data penduduk pada tahun 1930 berdasarkan catatan Schulte Nordholt ¹¹⁵. Adalah:

Kerajaan Miomaffo 31.649 jiwa, Insana 13.428 jiwa, Biboki 13.585 jiwa. Tahun 1949 Miomaffo 42.519 jiwa, Insana 13.428 jiwa dan Biboki 17.875 jiwa. Sedangkan penduduk Belu tahun 1920, tahun 1930 93.142 jiwa 36.796 jiwa dan tahun 1949 97.651 jiwa.

Perpindahan penduduk di wilayah Perbatasan

Perpindahan penduduk di wilayah perbatasan terjadi karena kebijakan kolonial dan peperangan Perpindahan itu antara lain:

Perpindahan penduduk akibat kebijakan kolonial dan peperangan terjadi beberapa

¹¹² Sejarah Gereja Katolik di Timor Jilid 1 hal 242.

¹¹³ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid 3 hal. 1972 hal. 33

¹¹⁴ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 155

Lihat Sensus Tahun 1920 hal. 234. Reprint International Population Dynamic Program Department Demography, Research School of Social Sciences, The Australian National University 1981.

¹¹⁵ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 155

kali daan telah berlangsung cukup lama. Penduduk dari Lakulo, Manatuto (kerajaan Lakul Samoro) wilayah Timor Portugis mengungsi kewilayah kerajaan Wehali di Belu. Di tempat baru mereka menamakan tempat yang dihuni sesuai dengan nama tempat aslinya.

Di antaranya nama Lakulo Kabukalaran, Lakulo Weain, Lakul Webriamata, Lakulo Sunan. Perpindahan ini sebagai akibat kebijakan Portugis membentuk dua propinsi yakni propinsi Dos Belos dan Serviao pada abad ke 18¹¹⁶. Kemudian terjadi perpindahan akibat perang antara Leimea dan Sanirin pada tahun 1867. Ribuan penduduk etnis Kemak dari kerajaan tersebut mengungsi ke wilayah Belu lalu menempati beberapa lokasi antara lain: Di Fatukmetan 4 km sebelah Timur Atapupu. Mereka berasal dari Katubaba. Di Wehor mereka berasal dari Sanirin. Pada waktu Pater Eftemaiyer mengunjungi Wehor pada bulan November 1913 dicatat penduduknya 2.000 orang¹¹⁷. Penduduk di Tenubot berasal dari Diruwaty Marobo, Leimea dan Atabae. Penduduk yang menetap di Sadi sejak tahun 1901 berasal dari Leolima, Leohitu dan Atabae. Pada waktu pater Efttemeyer mengunjungi Sadi bulan November 1913 penduduknya tercatat 800-900 jiwa. Penduduk Sadi banyak memelihara kuda dan kerbau. Kepala kampungnya bernama Kes. Terdapat penduduk yang menghuni kerajaan Tohe, dan Maumutin serta Lamaksenulu berasal dari Sanirin. Akibat perang perbatasan tahun 1911 antara Belanda dan Portugis penduduk dari K=Lolotoi wilayah Timor Portugis sebanyak 500 orang mengungsi dan menempati Mota Buik dan Asu Ulun. Pertukaran wilayah Portugis dan Belanda tahun 1893 penduduk asal Timor Portugis mengungsi ke wilayah Lakekun, Alas, Litamali Demikian juga penduduk Kamanasa Suai berpindah menempati wilayah Kamanasa, Kletek dan Wanibesak¹¹⁸.

Penduduk dari pulau Atauro sebanyak 300 KK pasca perjanjian Lisabon tahun 1859 mengungsi ke Alor¹¹⁹.

e. Gereja Katolik di wilayah Perbatasan

Pada tahun 1873 dan 1878 Pater Dijman tiba kali meninjau wilayah perbatasan di Timor. Di Fialaran dulu telah ada orang yang dipermandikan tetapi sudah tidak ada sisanya lagi. Tetapi di Kota kewan orang memperlihatkan kepada Pater sebuah buku tua yang berupa buku bacaan rohani terbitan Lisboa tahun 1657. Di Fialaran Pater Dijman mempermandikan beberapa anak. Di Jenilu di Pantai dekat Atapupu dijumpai beberapa orang kristen. Akhirnya Mgr. Claessen pada tanggal 31 Januari 1881 mengajukan permohonan kepada Pemerintah Belanda untuk menempatkan pos Misi di Atapupu. Pusat kegiatan MISI katolik akhirnya diresmikan pada tanggal

¹¹⁶ Widiyatmika M.dkk.2007 hal.182-183

¹¹⁷ Schulte Nordholt,1971,hal. 155

¹¹⁸ Widiyatmika,M.Dkk,2007,hal.183

¹¹⁹ Gomal Sarifudin S.1993 hal.86

21 April 1883¹²⁰. Pada 1 Agustus 1883 Pater Kraayvanger mulai menetap di Atapupu dan membangun sebuah gereja tahun 1884. Pada tahun tersebut raja Fialaran yang berusia 90 tahun dipermadikan. Pada tahun 1888 pastor pertama yang menempati gereja di Atapupu pater de Kruyver namun namun baru bekerja 6 bulan meninggal dunia. Ia digantikan pater W. Voogel tetapi karena ia penakut ditipu orang tidak berani keluar pastoran. Oleh karena itu ia dipindahkan dan digantikan pastor H.A. Jansen. Pada waktu Pater Kraayvanger datang ke Timor jumlah orang katolik 300 orang saat ia meninggal tahun 1889 umat katolik bertambah menjadi 1.100 orang. 700 di Atapupu dan 400 di Fialaran.¹²¹

Pada tahun tahun pertama abd ke 20 pusat Misi kemudian dipindahkan ke Lahurus di kerajaan Fialaran Pembesar Misi waktu itu P. Matheijssen 1890-1913 dibantu pater Erftemeyer tahun 1905. Gereja di Lahurus dibangun tahun 1902 Yang sekarang tempat itu bernama Nualain. Pada tanggal 20 Januari tahun 1913 Mgr. Noyen SVD datang ke Timor dan sejak itu Misi katolik berpindah dari Serikat Yesus (SJ) kepada Serikat Sabda Alah atau SVD.¹²² Pusat MISI SVD mulai di Atapupu dengan pastor Yohanes Kreiten dan bruder Sales. Tetapi karena malaria mereka tidak tahan dan setelah 9 bulan meninggalkan Atapupu. Maka tugasnya digantikan Pater Wilhelm Baack pada 20 April 1914 sampai tahun 1915. Umat katolik di Atapupu ada 1.000 orang¹²³

Pater Konstantijn van den Hemel beserta bruder Lambertus Schoten tiba di Atapupu tanggal 14 Maret 1914, Mereka bekerja di Atapupu dan Tubaki. Dari sini mereka melakukan perjalanan jauh mengunjungi umat di Wini, Manamas, Noemuti, Kefamnanu, Noetoko dan Naikliu. Gereja Noemuti yang semulaa berup kapela dibangun raja da Costa kemudian dibangun dengan bantuan kontrolir M. Peddemors. Geredja Noemuti sebagai gereja pertama di Timor Tengah Utara diresmikan bulan November 1929¹²⁴ Di Belu di daerah Lahurus dan Nualain Pastor Yosef Heib dan Hendrik Yan sejak tahun 1926 dan Yam Somhorst sejak tahun 1931 menjalankan tugas pembinaan umat. Sedangkan Yacobus Pesser tahun 1924 dan Yosef Duffels tahun 1930 bertugas di Halilulik. Sedangkan Bruder Augustinus tahun 1931 mulai pembangunan di Atambua dan membangun susteran, sekolah dan gereja.



Gambar 3.15
Gereja Katolik di Noemuti

¹²⁰ Sejarah Katolik di Timor jilid 3, hal. 151

¹²¹ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 1 hal.253

¹²² Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 1 hal.264

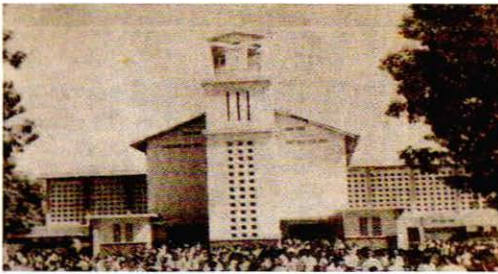
¹²³ Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 1 hal.256

¹²⁴ Vriens G.1972 Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid 2 hal 151



Gambar 3.16 Gereja Katolik St.Theresia di Kefamnanu dibangun tahun 1935

Tanggal 1 Januari 1937 Pater Yakobus Pessers diangkat sebagai Uskup Vikaris Apostolik pertama Timor Belanda. Gereja di Atambua yang didirikan bruder Augustinus Grobben menjadi Kathedral Vikariat Timor. Sedangkan tinggal Uskup di Haliluli sampai tahun 1948 Atambua yakni susteran, sekolah putri dan gereja. Jumlah umat katolik tahun 1936 meningkat menjadi 42.000 jiwa dengan 19 imam, 3 bruder dan 12 suster¹²⁵.



Gambar 3.17
Gereja Katedral di Atambua



Gambar 3.18 Gereja Lahurus /sekarang Nualain dibangun tahun 1903

3.1.4. Perang di perbatasan

1. Perang Lidak.

Widiyatmika M.dkk 2007¹²⁶ menguraikan perang Lidak sebagai perang pertama di Belu dalam rangka menaklukkan para raja di perbatasan Belu adalah sebagai berikut:

¹²⁵ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid 3a hal. 1301

¹²⁶ Widiyatmika M.dkk 2005 hal 122-126

Lihat Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 1 hal. 673

Dari hasil penelusuran laporan misionaris dapat dipastikan awal perlawanan terjadi pada tahun 1852. Periodisasi tahun 1852 tepatnya tanggal 29 Juli tahun 1852 di mana pada tanggal tersebut komandan kapal cepat Bangka yang bernama Letnan laut Hendrich Clabeeth van der Does tewas dalam pertempuran di Lidak. Pada tahun 1857 Belanda melaksanakan hukuman badan kepada rakyat Lidak. Angka tahun 1857 digunakan sebagai angka akhir perlawanan, setelah Belanda berhasil menundukkan perlawanan rakyat Lidak, Belanda harus mengenakan hukuman badan sebagai pelajaran agar tidak ada lagi yang berani melakukan perlawanan menentang kekuasaan Belanda.

Latar belakang perlawanan.

Pada tahun 1852 kekuasaan Belanda di Belu baru memiliki tempat kedudukan di pelabuhan Atapupu. Atapupu diduduki pasukan Belanda sejak tahun 1819. Di Atapupu ditempatkan sepasukan militer dibawah seorang komandan militer Belanda. Dari pelabuhan Atapupu yang strategis inilah kekuasaan Belanda ingin memperluas daerah kekuasaan di pedalaman Belu. Salah satu wilayah yang strategis sesudah pelabuhan Atapupu adalah wilayah kerajaan Lidak. Lokasi wilayah kerajaan Lidak tidak terlalu jauh dari Atapupu dan sangat strategis bagi perluasan kekuasaan Belanda ke kerajaan-kerajaan lain di Belu. Kerajaan Lidak, kerajaan Naitimu, kerajaan Jenilu dan kerajaan Mandeu secara adat mempunyai hubungan erat dengan istilah: *oa natar hat, oa laluan hat, basa isin hat kaer kadun hat, taka ulu sebeo hat* yang artinya: anak rumpun empat, anak kandung empat, tepuk badan empat, pegang susu empat, tudung kepala empat, topi empat. Istilah adat tersebut mengindikasikan 4 kerajaan mempunyai hubungan persaudaraan saling berdampingan dalam menjalankan tugas adat. Keempat kerajaan tersebut merupakan wilayah luar dari wilayah *dasi sanulu aluk sanulu* dari kerajaan Fialaran yang bertugas sebagai penjaga keamanan. Dengan menaklukkan kerajaan Lidak artinya akan mematahkan persekutuan 4 bersaudara yang bertugas menjaga keamanan sehingga akan memudahkan Belanda menguasai kerajaan pasangannya dan kerajaan sekitarnya dan kerajaan Fialaran.

Sejak Kompeni Belanda telah menerapkan monopoli perdagangan di wilayah kerajaan yang menanda tangani *korte verklaring*. Raja dan rakyat tidak bebas lagi berdagang dan berhubungan dengan bangsa lain kecuali dengan Kompeni Belanda. Kenyataan ini masih ditambah lagi dengan kebijakan yang dirintis residen J.A. Hazaart dalam rangka menjadikan Kupang sebagai pusat pasar seluruh cendana dan lilin yang keluar harus memiliki surat keterangan dari Kupang dan di tempat-tempat penting seperti Atapupu ditempatkan seorang petugas yang cakap untuk menarik pajak ekspor. Untuk memberantas kapal dagang yang tidak tunduk diberlakukan pelayaran kapal penjelajah/kapal cepat (Gede Parimatha, 2002). Ini berarti 2 aturan baru yang merugikan para raja dan rakyat yakni: tidak bebas lagi menjual barang dagangan. Pada hal cendana dan lilin merupakan salah satu sumber kemakmuran raja dan masyarakat.

Kompeni Belanda juga memberlakukan 10 hukum atau *ukun sanulu* yang harus ditaati oleh seluruh penduduk tidak pandang bulu. Barang siapa yang melanggar akan ditindak tegas. Raja, meo dan rakyat kerajaan Lidak tidak mau kehilangan kedaulatan dan jatuh dalam penjajahan Belanda, karena hal itu akan tambah menyengsarakan rakyat. Demi membela martabat, kedaulatan dan kebebasan tiada jalan lain kecuali mengangkat senjata melawan pasukan Belanda.

Proses perlawanan

Para pemimpin perlawanan di Lidak

Tokoh yang menjadi motor penggerak perlawanan di Lidak adalah meo Moruk Pah Sunan. Meo Moruk Pah Sunan dalam melakukan perlawanan dibantu oleh beberapa meo yang lain antara lain: meo Asa Natun, Meo Abekun Natun, meo Niki dan meo Anin. Siapa raja yang memerintah di kerajaan Lidak pada masa perang Lidak tahun 1852-1857. Dari sumber misionaris raja yang diketahui tahun pemerintahannya adalah raja Petronela da Costa da Ornay. Pada tahun 1891 ia telah menjadi raja sampai tahun 1913. Dari silsilah raja di kerajaan Lidak raja yang memerintah sebelum raja Petronela da Costa da Ornay adalah raja Leon Bete. Simon Fouk (1991) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa raja yang memerintah kerajaan Lidak pada masa perang Lidak adalah raja Alexander Sandri. Dalam silsilah raja Lidak nama tersebut tidak dijumpai. Alexander Sandri dari nama tersebut merupakan nama Kristen. Laporan misionaris menyebutkan bahwa pada tahun 1891 raja Lidak dan raja Naitimu telah memeluk agama Katolik.

Awal perlawanan.

Belanda dengan kedudukan di Atapupu aktif melakukan pendekatan dengan para raja di pedalaman dengan mengirimkan utusan atau mengundang para raja dan meo ke Atapupu dengan harapan para raja mau tunduk dengan sukarela kepada kekuasaan Belanda. Di antara para meo yang diundang adalah para meo dari kerajaan Lidak. Belanda menjanjikan bahwa apabila mereka mau tunduk akan diberikan kedudukan yang lebih tinggi. Namun meo Moruk Pah Sunan tidak percaya akan janji Belanda tersebut. Apalagi berdasarkan pengalaman beberapa meo dari Alas, setelah menyerah bukan memperoleh kedudukan tetapi malah dipenjara. Itulah sebabnya meo Moruk Pah Sunan telah membulatkan tekad untuk melawan kekuasaan Belanda. Mereka melawan bukan untuk mencari kedudukan, tetapi membela kedaulatan, martabat dan nasib rakyat Lidak. Para keluarga dan sahabatnya yang memberi nasehat agar mengurungkan niatnya melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, karena pasukan Belanda lebih kuat dan modern persenjataannya. Meo Moruk Pah Sunan tidak surut dan gentar. Oleh karena itu ia menjawab kepada yang menasehatinya apabila takut pada Belanda agar menyingkir saja. Ia sebagai meo yang bertanggung jawab atas keamanan di Lidak tidak akan tinggal diam melihat kerajaan Lidak menghadapi

ancaman. Biarlah ia sendiri yang akan menghadapi Belanda. Mendengar tekad meo Moruk Pah Sunan akhirnya para sahabat dan keluarganya ikut tergerak bertekad ikut berjuang menegakkan kedaulatan Lidak dari campur tangan Belanda. Meo Moruk Pah Sunan, dibantu meo Abekun Natun, meo Asa Natun dan meo Anin. Meo Moruk Pah Sunan melihat bahaya yang mengancam kerajaan Lidak dari kekuatan pasukan Belanda segera mempersiapkan diri.

Strategi Meo Moruk Pah Sunan

Pasukan Meo Moruk Pah Sunan diperkirakan juga tidak terlalu besar mengingat kondisi penduduk kerajaan Lidak berdasarkan statistik yang dibuat misionaris pada tahun 1889 hanya berjumlah 4.219 jiwa. Van Wouden melaporkan (1985) bahwa di dalam organisasi kerajaan Lidak terdapat *fukun lima*, di samping raja yang memerintah terdapat lima dato fukun. Jadi rata-rata setiap dato fukun membawahi sekitar 840 orang. Tentunya pada tahun 1852 jumlah penduduk lebih kecil dari angka tersebut. Kalau dengan asumsi rata-rata setiap kepala keluarga memiliki 6 jiwa, berarti jumlah kepala keluarga sekitar 700 KK. Maka dari kepala keluarga tersebut tidak mungkin seluruhnya menjadi prajurit. Paling tidak seorang yang menjadi prajurit berusia antara 20-40 tahun. Oleh karena itu prajurit di Lidak tidak akan lebih dari 300-400 orang. Keterangan tentang pasukan tradisional dari misionaris disebutkan bahwa para prajurit tradisional terdiri sekitar 50 orang dengan senjata tombak dan bedil. Apabila terjadi dua kerajaan bermusuhan, seorang prajurit musuh berani melewati garis batas wilayah musuh, ia akan membayar mahal dengan kehilangan kepalanya. Waktu menyerang musuh mereka akan membumi hanguskan kampung. Kalau berhasil mereka akan merampok apa saja termasuk ternak kuda dan kerbau lawan. Mereka akan berusaha memenggal kepala lawan yang gugur di medan tempur dan membawanya pulang sebagai tanda kemenangan. Apabila telah ada beberapa orang musuh yang tewas di medan tempur biasanya musuh kemudian akan menghindari.

Memang dalam perang Lidak yang dihadapi bukan prajurit tradisional Timor tetapi pasukan Belanda yang lebih modern persenjataannya dan didukung dengan perbekalan yang lebih baik. Namun pasukan Lidak berada dalam posisi bertahan yakni menghadapi pasukan Belanda yang melakukan penyerangan. Oleh karena itu strategi yang digunakan adalah strategi serangan mendadak. Dengan memanfaatkan penguasaan medan yang lebih baik dari musuhnya, pasukan Meo Moruk Pah Sunan akan memanfaatkan keunggulan penguasaan medan untuk mengatasi kekalahan dalam persenjataan. Dengan serangan mendadak bisa dilakukan pertempuran jarak dekat dimana kelewang dan tombak bisa berfungsi dengan baik. Namun strategi serangan mendadak ini tidak bisa digunakan secara terus menerus karena musuh lama-lama akan mengerti dan semakin menguasai medan. Di samping serangan mendadak strategi yang lazim digunakan adalah bertahan di perbentengan batu di puncak bukit. Di Lidak terdapat benteng Tukuneno, Rubena dan Kuabesi. Benteng-benteng tersebut

dipandang suci diperlengkapi dengan pagar batu dan batu batu besar yang bisa digunakan sebagai senjata dengan jalan menggelindingkan dari atas bukit ke bawah menuju ke sasaran lawan di lereng. Namun kelemahan strategi bertahan di benteng, tidak efektif untuk perang dalam jangka waktu yang lama sebab akan rawan terhadap kekurangan bahan makan dan air minum. Musuh yang lebih kuat bisa menerapkan strategi mengepung benteng dalam waktu yang lama dengan tujuan agar musuh kehabisan persediaan bahan makan dan air minum sehingga akhirnya dengan mudah dapat ditundukkan.

Setiap prajurit tradisional Timor termasuk prajurit Lidak yang dipimpin para meo di bawah kendali meo Moruk Pah Sunan sebagai panglima, dalam setiap akan maju ke medan tempur harus melaksanakan upacara *hasae aik kakaluk* yakni upacara untuk memperoleh kekuatan magis/kekebalan tubuh dan keberanian agar memperoleh kemenangan dalam peperangan. Dalam upacara *hasae ai kakaluk*, yang diupacarakan tidak saja para prajurit tetapi juga senjata yang akan digunakan untuk berperang di medan tempur. Meo Moruk Pah Sunan memiliki dua senjata andalan yakni senapan tumbuk yang diberi nama *kukur* (guntur) dan *mameran* (kilat/petir), di samping sebuah pedang. Meo Moruk Pah Sunan sebagai pemimpin perang dikenal dan dipercaya memiliki kesaktian lebih dari para prajurit dan meo lainnya. Ia dikenal tidak mempan senjata lawan bahkan ia tidak akan mudah tewas dalam pertempuran sekalipun ia telah terluka parah. Pada waktu Moruk Pah Sunan menjalankan upacara *hasae ai kakaluk*, malam harinya terjadi gerhana bulan (*asu maromak tata fulan*) artinya anjing tuhan menggigit bulan. Setelah gerhana bulan selesai, upacara dilanjutkan. Namun peristiwa gerhana bulan dipercaya sebagai firasat akan jatuhnya korban. Di samping melakukan upacara *hasae aik kakaluk*, untuk menambah semangat dan membangkitkan keberanian dan semangat juang juga digunakan semboyan-semboyan perang yang disebut: *fanon*. Semboyan-semboyan yang digunakan dalam perang Lidak antara lain sebagai berikut:

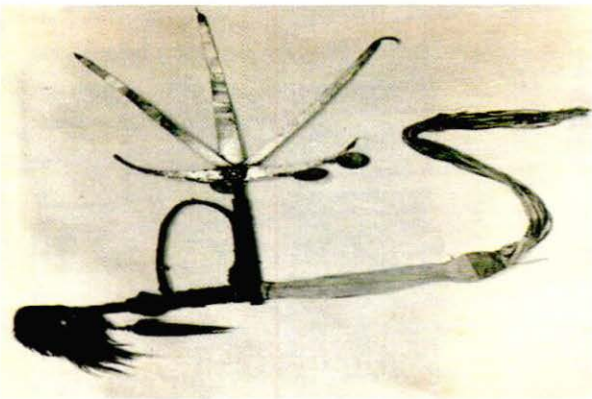
Betak ama lalet karau aman metan dikur no'i lur Laen artinya bangsa Belanda bagaikan seekor kerbau jantan bertanduk yang dalam keadaan terjebak, dalam perburuan dan harus dihabiskan nyawanya pada saat itu juga.

Timur fuik maak fuik la ukun ami hakara ran mean suli ba rai, ami maak ema oan atu ukun duuk an artinya kami tidak senang diperintah bangsa asing, kami rela mengorbankan nyawa sampai titik darah penghabisan, karena kamilah tuan tanah dan hendak memerintah negeri sendiri.

Ami ho nai Lidak no renu siam, ,eo no fkun sia iha rai Tasifeto la lo'u ba ema mata mutin, ami hakara hatuda malu to'o ran mean suli barai artinya: kami bersama raja Lidak, rakyat Lidak dan para meo serta tua adat tidak senang diperintah bangsa asing, kami rela mengorbankan nyawa sampai titik darah penghabisan.



Gambar 3.19
Meo dengan pakaian kebesaran



Gambar 3.20
Pedang Leu Musu Meo

Pasukan Belanda di Atapupu mendapat laporan bahwa rakyat Lidak dibawah pimpinan meo Moruk Pah Sunan tidak mau tunduk dan bersiap melakukan perlawanan. Untuk memadamkan perlawanan rakyat di kerajaan Lidak yang mengangkat senjata tidak mau tunduk pada kekuasaan Belanda, pasukan Belanda di Atapupu yang waktu itu jumlahnya terbatas, maka menunggu kedatangan kapal cepat yang secara rutin berlayar ke Atapupu. Kapal cepat Banka di bawah komandan Letnan laut Hendrick Clabeech van der Does. Setelah kapal cepat Banka merapat di Atapupu, komandan kapal cepat mendapat laporan adanya perlawanan rakyat Lidak. Oleh karena itu diputuskan sang komandan langsung memimpin pasukan melakukan penyerangan ke kerajaan Lidak. Jarak Atapupu dengan Lidak dapat ditempuh dalam sehari perjalanan. Pasukan berangkat dari Atapupu diperkirakan tanggal 28 Juli 1852 langsung menuju Lidak. Letnan Hendrick Clabeech van der Does sebagai komandan pasukan penyerbu belum pernah mengetahui medan di kerajaan Lidak yang sedang bergolak. Ia hanya mengandalkan pada penunjuk jalan. Para pejuang Lidak memiliki tiga benteng penting yakni: Tukuneno, Rubena dan Kuabesi. Pada serangan pertama rombongan pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Hendrick Clabeech van der Does telah sampai di kaki bukit Tukuneno. Pasukan rakyat Lidak yang telah siap perang dan sebelumnya telah melakukan upacara *Ai hasae kakaluk* dalam rangka memperoleh keberanian dalam perang, telah menyiapkan berbagai strategi perang. Benteng pertahanan terdapat di Rubena, Kuabesi dan Tukuneno secara tradisional dianggap sebagai tempat suci. Benteng yang terletak di atas bukit diperkuat dengan pagar batu, dan batu-batu besar yang bisa digunakan sebagai senjata dengan menggulingkan ke bawah. Senjata yang dipergunakan berupa senapan tumbuk yang secara tradisional menjadi senjata andalan. Senapan tumbuk/lantak yang banyak diperjual belikan di pasar berasal dari wilayah Portugis dan ada juga yang berasal dari para pedagang Bugis Makasar. Senjata lain yang digunakan adalah pedang, tombak. Secara tradisi

penduduk percaya bahwa tabuhan atau lebah bisa dijadikan senjata melawan musuh.

Pasukan Belanda yang mendekati pusat pertahanan pasukan rakyat tiba-tiba mereka mendapat serangan mendadak dari pasukan rakyat Lidak yang dipimpin meo Moruk Pah Sunan, meo Abekun Natun, Meo Anin dan meo Asa Nantun. Para prajurit Lidak di bawah pimpinan para meo menggunakan senjata senapan tumbuk, parang dan batu yang digelindingkan dari atas bukit. Rombongan pasukan Belanda tidak menduga kalau akan mendapat serangan mendadak, sehingga pasukan Belanda kocar kacir. Dalam serangan tanggal 29 Juli 1852 dua orang prajurit Belanda tewas. Diantara yang tewas adalah letnan Hendrick Clabeeth van der Does. Ia tertembak dan mati karena luka-lukanya. Tokoh yang berhasil menembak letnan Hendrick Clabeeth van der Does ada yang menceritakan meo Moruk Pah Sunan, namun ada pula yang menceritakan yang membunuhnya adalah meo Abekun Natun. Kehilangan letnan Clabeeth van der Does merupakan pukulan telak bagi pasukan Belanda. Dengan pertahanan yang kocar kacir mereka segera mengundurkan diri dan membawa korban kembali ke Atapupu. Letnan Hendrick Clabeeth van der Does dan seorang prajurit yang tewas dikuburkan di Nularan Atapupu.

Pihak Belanda di Atapupu tidak tinggal diam dengan kekalahan telak tersebut harus dibalasnya. Untuk itu perlu persiapan yang lebih matang dan jumlah pasukan yang lebih besar. Maka persiapan dan bantuan pasukan memerlukan waktu sehingga tidak bisa segera dilakukan penyerangan kembali. Setelah persiapan dianggap mencukupi dan tambahan pasukan telah tiba dilakukan ekspedisi kedua menyerang pasukan Lidak. Ekspedisi kedua yang dilakukan dengan persiapan lebih baik, jumlah pasukan lebih besar dipimpin oleh seorang opsir kulit putih dan didukung persenjataan lengkap dan perbekalan yang cukup. Pengalaman pahit kekalahan dalam ekspedisi pertama dijadikan pelajaran berharga. Namun kenyataannya gerakan pasukan Belanda yang bergerak ke Lidak telah tercium lebih dahulu oleh Meo Moruk Pah Sunan dan para meo yang membantunya berkat laporan mata-mata yang ditempatkan di daerah yang strategis untuk mengamati gerakan musuh. Meo Moruk Pah Sunan memutuskan tidak menunggu pasukan Belanda, tetapi mencegatnya di Kuabesi-Tanhai. Pada waktu pasukan Belanda sampai di Kuabesi-Tanhai, tanpa diduga-duga mereka mendapat serangan mendadak dari pasukan Lidak yang dipimpin meo Moruk Pah Sunan. Serangan mendadak tersebut menimbulkan kepanikan pasukan Belanda, bahkan Opsir pasukan Belanda tertembak dari belakang walaupun tidak sampai tewas. Pasukan Belanda kembali mengalami kekalahan dan harus menarik pasukannya kembali ke Atapupu.

Kenyataan dua kali mengalami kekalahan, komandan pasukan Belanda di Atapupu harus bekerja keras mencari akal bagaimana segera mengalahkan pasukan Lidak. Sebelum melakukan serangan dilakukan beberapa hal agar penyerangan berhasil baik. Langkah pertama diselundupkan mata-mata untuk mengetahui kelemahan meo Moruk Pah Sunan sebagai pemimpin perang di Lidak. Kedua diperlukan tambahan

pasukan dari Kupang yang lebih besar. Ketiga memanfaatkan kekuatan pasukan lokal yang bisa diajak kerja sama dan melalui strategi adu domba. Dalam rangka melaksanakan strategi tersebut ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Melalui utusan yang dikirimkan ke Lidak, Belanda membujuk raja Lidak agar mau menyerah dan apabila menyerah akan diampuni. Raja Lidak melihat perkembangan yang terjadi melaksanakan musyawarah dengan para meo dan tokoh masyarakat. Inti musyawarah agar tidak menimbulkan pertumpahan darah yang lebih besar diputuskan akan menyerah kepada kekuasaan Belanda. Sebagai tindak lanjut raja Lidak beserta para pembesar istana menghadap pimpinan pasukan Belanda di Atapupu. Mereka menyatakan diri beserta rakyatnya menyerah dan bersedia tunduk kepada Belanda. Mendengar kenyataan ini pimpinan pasukan Belanda di Atapupu sangat senang. Dengan demikian satu langkah positif kearah penguasaan Lidak semakin mulus. Kekuatan musuh telah terpecah dan secara psikologis telah mulai turun semangatnya. Walaupun kekuatan pasukan di Lidak telah pecah, tetapi meo Moruk Pah Sunan dan para meo pembantu setianya tetap tidak ingin mundur dalam melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Dari mata-mata diketahui bahwa meo Moruk Pah Sunan sangat sakti kebal senjata. Maka untuk mengalahkannya harus menetralkan kesaktiannya antara lain dengan peluru dari taring babi. Informasi dari mata-mata juga menyangkut kondisi benteng pertahanan pasukan meo Moruk Pah Sunan. Dengan mengetahui lebih rinci kekuatan dan kelemahan lawan, pasukan Belanda mengatur strategi dengan lebih mudah.

Setelah segala persiapan telah dianggap mencukupi maka diputuskan melakukan ekspedisi ketiga dengan mengirimkan pasukan yang lebih besar untuk melumpuhkan perlawanan pasukan meo Moruk Pah Sunan. Pasukan Belanda yang dikirimkan sekitar tahun 1857 langsung menuju pusat pertahanan meo Moruk Pah Sunan di bukit Rubena. Kali ini strategi serangan mendadak sudah tidak bisa dilakukan lagi. Musuh sudah mulai mengenal medan lebih baik. Di Lidak telah timbul ketidak kompakkan. Sehingga strategi yang digunakan untuk menghadapi serangan pasukan Belanda adalah bertahan di benteng Rubena. Dengan bertahan di benteng Rubena, sebenarnya inisiatif serangan dipegang oleh pasukan Belanda. Strategi bertahan di benteng memang memudahkan bertahan dan dengan memanfaatkan ketinggian bukit, batu-batu besar bisa dijadikan senjata tambahan melawan musuh yang akan naik bukit. Namun strategi bertahan di bukit sangat riskan apabila dikepung dalam jangka waktu lama akan kehabisan bahan makanan dan air minum dan melemahkan kemampuan tempur. Pada waktu pasukan Belanda maju ke arah benteng, meo Moruk Pah Sunan dari dalam benteng berhasil menembak dua prajurit Belanda yang berasal dari Rote bernama Tar Hane dan Bai Tuli sehingga tewas. Namun pengepungan pasukan Belanda ke arah benteng semakin ketat. Meo Moruk Pah Sunan dan para meo pembantunya dan para prajurit mempertahankan benteng mati-matian agar tidak jatuh. Desingan tembakan baik dari pasukan Meo Moruk Pah Sunan maupun pasukan Belanda semakin seru. Namun

pasukan Meo Moruk Pah Sunan yang memiliki peluru dari kawat atau timah yang sangat terbatas persediannya akhirnya kehabisan peluru. Dalam situasi yang genting tersebut senjata andalan tinggal kelewang dan tombak. Tembakan pasukan Belanda dari berbagai penjuru yang diarahkan ke benteng akhirnya melemahkan kemampuan tempur pasukan Meo Moruk Pah Sunan yang bertahan dalam benteng. Meo Moruk Pah Sunan sendiri yang dengan gigih memberikan perlawanan kena tembak. Tertembaknya meo Moruk Pah Sunan salah satu disebabkan karena peluru yang ditembakkan dibuat dari taring babi.

Pada waktu meo Moruk Pah Sunan tertembak, yang kena pahanya. Namun pasukan Belanda terus memberondong meo Moruk Pah Sunan dengan tembakan dan lemparan batu. Akibatnya daya tahan meo Moruk Pah Sunan habis. Pasukan Belanda tidak ada yang berani mendekat. Pada waktu meo Moruk Pah Sunan terjatuh karena daya tahan telah habis, muncullah pasukan Belanda dan mengayunkan parangnya menebas leher meo Moruk Pah Sunan. Namun terdapat beberapa versi kematian meo Moruk Pah Sunan. Setelah tenaga habis dan jatuh, pasukan Belanda mendatangi meo Moruk Pah Sunan dan menebas lehernya. Kepala terlepas putus dari lehernya. Namun setelah pasukan Belanda yang berasal dari orang pribumi tersebut menoleh ternyata kepala meo Moruk Pah Sunan menyatu kembali dan hidup kembali. Kejadian ini terjadi berulang-ulang. Akhirnya pedang diberikan kepada istri meo Moruk Pah Sunan. Istri meo Moruk Pah Sunan tidak tega melihat penderitaan suaminya, akhirnya menerima pedang tersebut. Pedang di susupkan dari atas kepala ke tanah melalui kain bagian depan. Kejadian ini dipercaya bisa menetralkan kesaktian meo Moruk Pah Sunan. Kemudian pedang tersebut digunakan menebas leher meo Moruk Pah Sunan dan akhirnya tewas. Namun orang masih percaya bahwa apabila kepala dan tubuh dikuburkan menjadi satu, maka meo Moruk Pah Sunan akan hidup kembali. Itulah sebabnya kepala dengan tubuh dikuburkan secara terpisah. Kepala dikuburkan di Teluk Gurita dekat Atapupu. Sedangkan bagian tubuh dikuburkan di Sambene dekat Nabe dalam posisi berdiri menghadap gunung Lakaan. Ternyata cara penguburan dengan berdiri ini juga pernah dilakukan terhadap raja ketiga Neno Meta di Amanatun yang bernama Luis Neno Meta. Sewaktu meninggal dikuburkan dalam posisi berdiri menghadap matahari terbit (Neno Meta, 2003).

Akhir perlawanan.

Akhir dari perlawanan meo Moruk Pah Sunan, kerajaan Lidak berhasil ditundukkan di bawah kekuasaan Belanda. Para meo yang secara tradisional merupakan tulang punggung kekuatan pertahanan kerajaan, di hilangkan peran karena penanggung jawab keamanan adalah pasukan Belanda. Dengan demikian peran sosial budaya meo menjadi semakin surut. Untuk memberi pelajaran bagi siapapun yang berani melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, dan menimbulkan efek jera, maka pada tahun 1857 Kompeni Belanda melaksanakan hukuman badan kepada rakyat Lidak. Dengan patahnya perlawanan rakyat Lidak di

bawah pimpinan meo Moruk Pah Sunan, maka patahlah mata rantai empat serangkai peran 4 kerajaan secara adat yakni: kerajaan Naitimu, kerajaan Jenilu, kerajaan Lidak dan kerajaan Mandeu. Dengan sendirinya peluang kekuasaan Belanda memperluas kekuasaan ke seluruh Belu semakin terbuka lebar. *Ukun sanulu* yang diberlakukan dan harus dipatuhi semua lapisan masyarakat semakin efektif. Dengan sendirinya akan semakin menguntungkan kekuasaan Belanda. Pada waktu Belanda memberlakukan pengenaan pajak kepada penduduk, dan wajib kerja rodi untuk membangun jalan raya harus diikuti oleh rakyat. Kedaulatan kerajaan Lidak runtuh dan menjadi bagian dari kedaulatan kerajaan Belanda.

f. Perjuangan Raja Bere Bau di Lakmaras, Lamaknen Melawan Kekuasaan Kolonial Portugis

Perang Raja Bere Bau diungkapkan oleh Widiyatamika M dkk 2007 sebagai berikut:¹²⁷

Perjuangan melawan kekuasaan kolonial Portugis di Lakmaras, Lamakanen dipimpin oleh raja Bere Baru. Perjuangan raja Bere Bau melawan kekuasaan kolonial Portugis terjadi pada tahun 1913. Perlawanan ini sering juga disebut Perang Lakmaras.

Latar belakang perang

Terjadinya aksi pencurian ternak oleh penduduk di wilayah Timor Portugis dan juga penduduk dalam wilayah kekuasaan raja Bere Bau di kenai Lakmaras. Penduduk Lakmaras melakukan pencurian ternak sapi, kerbau dan kuda di wilayah Timor Portugis untuk kepentingan pesta dan konsumsi keluarga. Sebaliknya Orang-orang dari Timor Portugis yang melakukan pencarian ternaknya yang hilang juga melakukan pencurian ternak sapi, kuda dan kerbau di Lakmaras. Bere Bau yang merasa dirinya terancam akibat ulah orang Portugis yang mencuri ternak secara besar-besaran mulai mengumpulkan rakyatnya agar bersiap-siap melakukan perang melawan Portugis yang mencuri ternak di wilayahnya. Secara tradisional pencurian ternak di Belu menjadi salah satu pemicu terjadinya perang antar kampung dan antar wilayah kerajaan.

Bere Bau bersama rakyatnya kerap kali membunuh orang-orang Portugis yang mencuri ternak, menjual perhiasan dan uang berupa plat, ringgit, gelang, muti dan perhiasan lainnya di Lolo Goni On. Barang-barang yang ditawarkan dianggap tidak cocok dengan selera dan kemampuan pembeli sehingga barang tersebut di rampas dan pemiliknya dibunuh. Mayatnya dimasukkan ke lubang tanah merah (*muk buleen tubuk*) yang terletak di bagian Timur Lakmaras. Karena kekejaman dan kebengisannya ia diberi nama Bere Bau alis Bere Buis yang berarti berani, jago, kuat, kejam dan bengis tanpa takut menghadapi berbagai tantangan. Peristiwa pembunuhan tersebut dilaporkan oleh keluarga dan teman korban kepada pihak Penguasa Portugis.

¹²⁷ Widiyatamika M.dkk.2005 hal 100-112

Perselisihan antara Leto Loe, Tae Mau dan Bere Bau di lingkungan suku Rato Gubul. Melihat perbuatan Bere Bau yang dinilai kejam, merampas harta dan membunuh para pedagang Portugis, bahkan salah seorang anggota keluarga mereka menjadi korban kekejaman tersebut menyebabkan Leto Loe tidak tenang dan merasa terancam. Oleh karena itu Leto Loe tidak setuju atas perbuatan Bere Bau dan menentang apabila Bere Bau menjadi raja Lakmaras yang mencakup Kampung Henes, Lakmaras dan Abis. Leto Loe berusaha menjatuhkan Bere Bau dan ia ingin menggantikannya sebagai raja. Untuk memperlancar maksud tersebut ia melarikan diri ke wilayah Portugis dan meminta bantuan rakyat di Lebos, Bobonaro dan Ai Asa untuk berperang melawan Bere Bau sebagai raja Lakmaras.

Tae Mau yang datang dari wilayah Suai ke Lakmaras menagih bagian uang upeti sebanyak 15 ringgit (*batata tomak*) kepada raja Bere Bau. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh raja Bere Bau dengan alasan Tae Mau sebagai *dato* di lingkungan kerajaan Lakmaras tidak mempunyai hak dengan ucapan: engkau tidak mempunyai rakyat di kenaiian Lakmaras dan tidak berhak untuk memperoleh bagian upeti kenaiian.

Bere Bau sebagai raja Lakmaras tidak menginginkan kedaulatan wilayahnya dicampuri kekuasaan Portugis. Demi mempertahankan kedaulatan wilayahnya Bere Bau melawan kekuasaan Portugis.

Proses perang

Mengingat ancaman dari kekuasaan Portugis yang bisa datang setiap saat, maka raja Bere Bau mempersiapkan 100 prajurit yang selalu siap siaga melawan setiap serangan yang akan dilakukan Portugis. Pasukan Portugis terdiri dari *Sinor*, *Kafir* dan *Kabalaria* (pasukan Portugis dari kalangan pribumi).

Peristiwa pembunuhan para pedagang dan pencuri ternak, serta permintaan bantuan Leo Loe dan Tae Mau dijadikan alasan yang kuat oleh Portugis untuk menyerang raja Bere Bau dan rakyatnya di Lakmaras. Maka meletuslah perang Lakmaras atau Perang Lolo Gonio pada tahun 1911. Sebelum pertempuran terjadi, ratusan Pasukan Portugis dan para sekutunya antara lain: Tae Mau, Leto Loe dan penduduk asal Wesalu, Sasa, Lebos, Aiasa, Mape, Lotas, Lakus, Sabulai, Lela Maugatal dan Bobonaro melakukan perundingan (*mon metan*) di lapangan besar di kampung Selebul wilayah Timor Portugis. Hasil musyawarah menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1). Raja Bere Bau beserta para pendukungnya di wilayah kerajaan Lakmaras dan beberapa kenaiian yang ada di sekitarnya harus dihancurkan dan merampas harta benda mereka untuk dibawa ke wilayah Timor Portugis.
- 2). Setiap prajurit yang ikut berperang yang telah memiliki kesaktian berkat *kakaluk* dan menyatakan diri sebagai meo harus menancapkan salah satu tombak (*bat*) di atas Bukit Lebos dan Mape sebelum melakukan penyerangan. Para prajurit

dan meo yang selamat dari medan perang dan berhasil membawa kepala lawan yang dibunuh berhak mengambil tombak tersebut untuk memikul kepala lawan serta akan mendapat penghargaan khusus melalui upacara kemenangan perang di *Mot* (batu megalit persembahan). Sedangkan para meo yang tewas dalam medan perang dianggap tidak memiliki kesaktian, dan kemampuan meloloskan diri di medan perang, sehingga tombaknya yang tertancap di bukit tidak diambil kembali.

Setelah selesai melakukan musyawarah maka rombongan besar prajurit dari wilayah Timor Portugis dipimpin oleh panglima perang Kapir Batu Mali dan Sinor Taekunus dengan persenjataan senapan lantak (*kilat hai niren*) dan senapan yang di kokang yang disebut *Meren Gebu Hora*, melakukan serangan ke kampung Lakmaras, Henes dan Abis. Serangan mendadak dilakukan pada malam hari dengan kekuatan prajurit yang sangat besar dibandingkan dengan kekuatan pasukan raja Bere Bau yang hanya 70 prajurit dengan senjata panah, tombak dan kelewang. Menyadari kekuatannya kalah jauh baik dari jumlah maupun peralatan, raja Bere Bau memerintahkan rakyatnya meninggalkan Lakmaras mengungsi ke Nualain, Loonuna, Ekin, Dua Rato dan Wetear. Raja Bere Bau sendiri menyelamatkan diri ke lokasi di bagian Ujung Selatan Lakmaras. Ketiga kampung yang telah ditinggalkan penghuninya oleh para penyerang dibumi hanguskan dan harta benda dijarah termasuk hewan ternak sapi, kerbau, kuda, kambing dan bahan makan seperti padi, jagung, kacang-kacangan dirampas dibawa ke wilayah Timor Portugis.

Perang ini berlangsung selama 10 hari pada tahun 1911.

Pada hari pertama Kampung Lakmaras, Henes dan Ekin dibumi hangus oleh pasukan Portugis. Pada hari kedua pasukan Portugis dan sekutunya melakukan serangan ke wilayah kampung Nualain, Loonuna, Ekin, Duarato, dan Leowalu. Raja beserta para meo dan rakyat di lingkungan kenaian Lakmaras berkumpul melakukan upacara *Ai kakaluk* menurut istilah tetun.

Proses upacara *ai kakaluk* adalah sebagai berikut:

Penyembelihan ayam jago warna merah di tempat pemali yang didalamnya tersimpan benda pusaka peninggalan leluhur dan selalu diberi persembahan. Pemimpin upacara yakni ketua suku menyembelih seekor ayam jago kemudian darah ayam tersebut ditetaskan pada *taka* (benda pusaka), atau disiramkan di atas kuburan leluhur dan kemudian diambil untuk dioleskan dalam bentuk salib pada dahi, dada, sendi kaki dan lutut prajurit yang akan maju perang, ditambah dengan akar-akar dan daun-daunan, kulit dari pohon tertentu yang diberikan kepada pemegang *kakaluk* dan harus dibawa sebagai jimat ke medan perang yang disebut *kaba hasae*. Para prajurit yang menerimanya harus menjalankan larangan berupa:

- Tidak boleh mengambil barang orang.
- Tidak boleh mengambil perhiasan dan uang perak, muti salak, emas (*tumbelis*

buleen) dan uang kertas.

- Tidak boleh saling mengejek antar sesama prajurit.
- Tidak boleh mengganggu anak wanita.
- Tidak boleh saling mengejek antar prajurit di medan tempur.

Bagi prajurit yang melanggar larangan resikonya akan tewas oleh peluru atau senjata lawan di medan perang. Setelah para prajurit yang selamat dan kembali dari medan perang *kakaluk* yang dibawa dibuka kembali dengan memotong ayam merah dan menyerahkan sejumlah uang perak kepada yang memberi *kakaluk* sebagai tanda terima kasih.

g. Perlawanan rakyat Gewal.

Perang ini dijelaskan Widiyatmika M.dkk 2005 sebagai berikut ¹²⁸

Pada hari kedua setelah meletusnya perang Lakmaras pada tahun 1911, Kampung Lakmaras, Henes dan Abis dibumi hanguskan oleh musuh. Kejadian tersebut mendorong kesetiakawanan rakyat Gewal di bawah pimpinan Meo Asa Bere untuk ikut mengangkat senjata. Untuk maksud tersebut mereka mengadakan pertemuan (*mon metan*) di atas *Mot Gewal* dan sekaligus melaksanakan upacara *Ai kakaluk*. Setelah upacara selesai Meo Asa Bere dengan para pengikutnya berjalan melalui kali Berdao menelusuri Bukit Orel. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari prajurit Portugis: hai orang Gewal, persoalan kami dengan Lakmaras bukan urusan Gewal, oleh karena itu jangan mengganggu dan menghasut kami, pulanglah segera ke Gewal. Teriakan tersebut menimbulkan kegusaran sebagian anggota rombongan yang mau ikut maju perang dan kembali ke kampungnya. Kejadian ini sangat mengecewakan meo Asa Bere dan para pengikut setianya. Tetapi semangat mereka untuk ikut berjuang tidak surut apalagi melihat hancurnya kampung Lakmaras, Henes dan Abis. Meo Asa Bere tetap maju ke medan perang pantang mundur menyerang musuh-musuhnya. Namun perlawanan gigih mereka tidak mampu membendung kekuatan musuh yang lebih besar dan tidak seimbang dengan pasukannya. Akhirnya meo Asa Bere berhasil ditangkap di medan pertempuran dan dibawa ke Bobonaro. Ia dijebloskan ke penjara dan mengalami penyiksaan. Kemudian ia tewas di penjara karena kelaparan.

h. Perlawanan rakyat Nualain, Loonuna, Ekin dan Dirun

Perang ini diuraikan Widiyatmika dkk.2005 sebagai berikut ¹²⁹

Raja Mali Beleq *suku Umametan*, yang biasa dipanggil Bei Malirin merupakan raja ke 7 dari Nualain. Raja Bei Malirin mengumpulkan rakyatnya pada malam hari menjelang terjadinya serangan pasukan Portugis ke Lakmaras. Mereka melakukan tarian *bidu* bersama rakyat kampung Nualain dan Tebe sepanjang malam. Sambil

¹²⁸ Widiyatmika M.dkk 2005 hal. 105-108

¹²⁹ Widiyatmika Mdkk 2005 hal.108-111

menari mereka menyanyikan syair-syair perang semalam suntuk. Menjelang pagi tiba-tiba mereka mendengar letusan senjata serta bunyi gong bertalu-talu yang kemudian disusul terbakarnya kampung Lakmaras, Henes dan Abis. Melihat keadaan tersebut raja Bei Malirin memerintahkan para orang tua, wanita dan anak-anak mengungsi ke daerah pedalaman. Sedangkan raja bersama para prajurit maju ke medan perang membela dan membantu perjuangan saudaranya Bere Bau untuk menghadapi pasukan Portugis. Keberanian dan semangat juang yang berkobar, tidak mengenal takut melawan musuh. Keberanian dan semangat perang yang berkobar merupakan hasil dari upacara *ai kakaluk* yang mereka telah lakukan sebelum maju perang.

Bei Malirin beserta para meo dan para prajuritnya maju ke medan pertempuran melalui Gelanon. Kemudian rombongan pasukan menyelusuri sungai Berdao terus mendaki bukit Abis. Di puncak bukit Abis mereka bertemu dengan musuhnya yakni pasukan Portugis yang telah siap siaga menanti kedatangannya. Pertempuran hebat terjadi. Namun kekuatan raja Bei Malirin kalah dalam hal kekuatan persenjataan dan posisi yang kurang menguntungkan. Akhirnya mereka menderita kekalahan. Dalam pertempuran di bukit Abis ini Raja Bei Malirin beserta 1 orang meo dan prajuritnya tewas dalam pertempuran dan kepala mereka dipancung lawan dan dibawa ke Lolotoi di wilayah Timor Portugis. Para korban yang tewas di samping raja Bei Malirin mencapai 13 orang. Mereka yang tewas adalah: meo Bere Ati alias Bere Laka dan meo Bau dari suku Reu Kaluk. Feto Mau Laku dari suku Mone Walu Lalgomo, meo Bau dari suku Walu Kaluk, meo Bau Mali dari suku Giral Bagal Reu Masak, meo Hasuk dari suku Leo Rawan, meo Mali dari suku Sakarai. Di samping itu korban lainnya adalah: Bei Tes, Nuak, Bei Mau Asa, Bei Bau Loe, Mali Asa dan Bele Mau. Para prajurit yang tewas tanpa kepala ini akhirnya diambil jasadnya oleh rakyat Nualain kemudian dimakamkan secara masal melalui upacara *Lolai* (upacara kematian karena kecelakaan, tewas dalam pertempuran atau terbunuh). Mereka dikuburkan di kubur besar di Nualain *Tas* di bagian Utara *Mot*. Sedangkan Asa Uka yang selamat tidak tewas dalam pertempuran ditawan musuh dan kemudian dibunuh di wilayah Timor Portugis.

Pada hari kedua pertempuran di Lakmaras, rakyat dari Loonuna, Dirun, Ekin dan Leowalu, ikut berjuang membantu perjuangan rakyat Lakmaras di bawah pimpinan raja Bere Bau. Sebelum pergi ke medan pertempuran para meo dan prajurit melakukan upacara *ai kakaluk* untuk mendapatkan keberanian, kekuatan dan kesaktian. Rakyat Loonuna, Ekin, dan Leowalu dipimpin oleh masing-masing meonya sedangkan rakyat Dirun dipimpin sendiri oleh rajanya Laku Mali dan pengawalnya Bere Meo. Rombongan meo dan prajurit tersebut setelah selesai melakukan upacara *ai kakaluk*, pergi ke medan perang melewati kali Berdao menuju Joiltoei salah satu kampung yang masuk wilayah raja Bei Malirin. Setiba rombongan pasukan di perbatasan antara Joiltoei dengan Kotasai, tiba-tiba muncul raja Bere Bau beserta para meo dan prajuritnya keluar dari hutan persembunyian. Kemudian seluruh rombongan prajurit

setuju mengangkat raja Bere Bau alias Bere Buis sebagai panglima perang melawan pasukan Portugis.

Rombongan pasukan menyeberangi kali Berdao menyerang kedudukan musuh untuk merebut kembali wilayah yang ada disekitar *kenaian* Lakmaras yang telah diduduki musuh. Terjadilah pertempuran sengit antara prajurit dan meo yang dipimpin raja Bere Bau melawan pasukan Portugis. Dalam pertempuran hebat raja Bere Bau kehilangan beberapa meo dan prajuritnya yang tewas dalam pertempuran. Di antara prajurit yang tewas dalam pertempuran adalah dari Loonuna: Mali Beljon dari suku Mau Gonion, Koi Mautasi dari suku Oes Gatal, Koi Bakurai dari suku Oes Gatal, Leto Kura Hobu dari suku Mau Gonion, Asa Sirai dari suku Mali Gatal, Tes Santi dari suku Mau Gonion, Bau Santi dari suku Julpor dan Rinbesi dari suku Lianain. Para korban prajurit yang tewas yang berasal dari Loonuna akhirnya dimakamkan secara masal di pusat *kenaian* Loonuna di Loonuna tas. Dari Ekin yang tewas adalah meo Bei Tae Bau dari suku Dasi Gatal, jenasahnya dimakamkan di Ekin Tas. Sedangkan raja Dirun: Laku Mali berhasil ditawan musuh dan kemudian dibunuh di Maukira dan Bei Bere Meo yang tewas jenasahnya dimakamkan di Benteng Makes, Dirun. Sedangkan dari pihak Lakmaras: Bei Loe Bere dari suku Lakanmau juga ditawan musuh oleh pasukan Timor Portugis karena adanya hubungan *hulo lep* (hubungan darah).

Dari pihak pasukan Portugis yang tewas dalam pertempuran antara lain: pemimpin perang Kafir Batu Mali yang tewas ditembak oleh raja Bere Bau di medan tempur dengan senjata senapan tumbuk. Di samping itu berhasil ditawan pula seorang pemimpin pasukan Portugis bernama Sinor Taekunus dan sementara ditawan di luar wilayah perang Lakmaras. Pertempuran masih berkobar terus di kawasan perbatasan Lakmaras dan Nualain, Loonuna dan Duarato. Para prajurit gabungan Lakmaras dengan sekutunya menghadang pasukan Portugis agar tidak masuk ke wilayah *kenaian* di sekitar Lakmaras. Namun korban dan kehancuran kampung-kampung tidak terhindarkan. Melihat kenyataan itu, raja Bere Bau alias Bere Buis beserta para meo besar dari Lakmaras, Nualain, dan Loonuna yang masih hidup, berupaya menghubungi kekuasaan Belanda di Atapupu. Raja Bere Bau dengan pakaian kebesaran perang beserta para meo menuju Atapupu dengan mengendarai kuda. Dari Lakmaras mereka melewati Nualain, Ekin dan Leowalu menuju *kenaian* Aitoh terus ke Atapupu.

Rombongan di bawah pimpinan raja Bere Bau menghadap pimpinan Belanda di Atapupu. Mereka melaporkan peristiwa yang dialaminya diserang pasukan Portugis dan wilayahnya dibumi hanguskan dan banyak menelan korban jiwa. Pihak pemerintahan Belanda di Atapupu merasa perlu segera melakukan tindakan membantu raja Bere Bau. Hal ini tidak saja untuk melindungi wilayah Lakmaras yang telah menjadi wilayah kekuasaan Belanda, tetapi juga Portugis telah berani melakukan penyerangan di wilayah kekuasaan Belanda. Belanda tidak ingin kehilangan wilayahnya jatuh ketangan kekuasaan Portugis. Oleh karena itu Belanda di Atapupu segera menyiapkan pasukan ,

perlengkapan senjata, dan logistik. Satu rombongan pasukan Belanda segera berangkat menuju Lakmaras, Lamaknen untuk mengusir Portugis. Pasukan Belanda membangun pos di tepi sungai Berdao yang berbatasan dengan wilayah yang dikuasai pasukan Portugis. Kemudian pasukan Belanda dengan persenjataan yang lebih modern bersama pasukan raja Bere Bau dibantu para meo dari Loonuna, Nualain menyerang kedudukan pasukan Portugis. Dalam pertempuran ini pasukan Portugis terdesak dan akhirnya mundur dari Lakmaras. Dalam pertempuran kali ini pemimpin pasukan Portugis Sinor Taekunus berhasil ditembak mati. Sedangkan Ajudan Batu Mali berhasil ditawan kemudian dikembalikan kepada pasukan Portugis di Batugede. Pada hari ke 10 pertempuran berangsur-angsur reda, pasukan Portugis telah mundur ke wilayah Timor Portugis kembali. Pasukan Belanda bersama raja Bere Bau membangun pos pengamanan di Lokon Belis, kampung Abis. Rakyat raja Bere Bau yang mengungsi berangsur-angsur setelah kondisi aman kembali ke kampung halaman yang telah hancur dan membangun kembali ke tiga kampung yang telah hancur. Raja Bere Bau kemudian dinobatkan kembali menjadi raja di Lakmaras.

Akhir peperangan

Dalam pertempuran antara raja Bere Bau dibantu beberapa raja dan meo di sekitar Lakmaras. Dalam pertempuran tersebut jatuh korban: 25 orang termasuk satu raja dan para meo serta prajurit dari Lakmaras tewas. Sedangkan dari pihak pasukan Portugis 2 orang tewas yakni pemimpin pasukan Portugis. 3 kampung Lakmaras, Abis dan Ekin hancur dibumi hangus. Sebagai tindak lanjut konsolidasi kekuasaan Belanda, akhirnya setelah berhasil membantu perjuangan raja Bere Bau, kekuasaan Belanda di Lamaknen semakin kokoh.

5. Perlawanan Fialaran

Perlawananan di Fialaran ini diuraikan Maxi Mura dalam Widiyatmika M.dkk 2005 sebagai berikut: ¹³⁰

Perjuangan ini dilatar belakangi kebijakan Portugis yang menerapkan monopoli perdagangan cendana dan lilin serta menentukan sendiri harga cendana dan lilin secara sewenang wenang dan sangat merugikan kerajaan Fialaran.

Oleh karena itu raja Fialaran memerintahkan pasukannya mengempur kedudukan Portugis di dua tempat yakni Nu Badak dan Kuit Namon. Pasukannya Fialaran dipimpin seorang meo wanita bernama Meo Baru. Dalam pertempuran banyak menimbulkan korban kedua belah pihak. Karena peperangan ini Portugis bergeser ke arah Oekusi Sebagai bukti peperangan ini sebuah meriam Portugis yang dirampas dan kini menjadi milik kerajaan Dasi Sanulu.

¹³⁰ Widiyatmika M dkk.2005 hal 29

6. Perang Wewiku Wehali

Perang Wewiku dikenal pula sebagai perang Rabasa. Hal ini diuraikan Widiyatmika M.dkk 2005¹³¹ sebagai berikut:

Pemberontakan ini dilatar belakangi wilayah Belu Selatan belum berhasil ditundukkan Belanda yang waktu itu berkedudukan di Atapupu. Di samping itu perang ini juga sebagai reaksi atas pemberlakuan pajak yang dianggap oleh rakyat memberatkan.

Pada awalnya sepasukan kecil Belanda diberangkatkan dari Atapupu dengan kekuatan 30 prajurit menuju Belu Selatan. Rombongan dipimpin kontrol Belanda di Atapupu disertai Pater Adrianus Mathijssen S.J. pada tahun 1803. Namun sesampai di sana mereka mendapat reaksi keras dari raja Rabasa yang dikenal sebagai Meo Nahak Maroe Rai. Karena kalah dalam hal jumlah rombongan pasukan Belanda dikepung dan tidak bisa berbuat apa apa hanya sekedar bertahan saja.

Belanda terpaksa meminta bantuan pasukan dari Kupang yang diberangkatkan melalui laut selatan dan mendarat di Pantai Besikama. Peperangan terjadi di Kletek As setelah pasukan Belanda dari Kupang mendarat dari kapal dan langsung menuju benteng pertahanan Naahak Maroi Rae di Busut di dekat Kletek As. Pertempuran terjadi di atas sungai We Liman dan dalam penyerangan di Kletek As Meo Nahak Maroe Rae tewas tertembak di lubang perlindungannya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 dan 12 November 1906.

7. Pemberontakan anti Pajak di wilayah Perbatasan Timor Portugis 18601-1912

a. Pemberontakan Maubara¹³²

Pemberontakan di Maubara melawan Portugis terjadi pada tahun 1893. Pemberontakan ini terjadi sebagai reaksi atas kenaikan pajak pada waktu Portugis mengalami kemerosotan keuangan di Timor. Pemberontak menyerang Dare dan Fatuboro dan berhasil membunuh beberapa prajurit Portugis. Pemberontakan ini juga mendapat dukungan Belanda di Timor Barat. Untuk memudahkan pemberontakan dikirimkan kala meriam Diu dari Macau tanggal 13 Juni 1893 dan tiba di Dili 8 hari kemudian. Kapal meriam Diu kemudian segera membombardir Fatuboro kemudian dilanjutkan ke Dare Untuk menumpas pemberontak Portugis mengirimkan 37 prajurit Afrika, 220 prajurit dari Licuisa, 60 dari Maubara, 96 para narapidan, dan 204 prajurit lainnya. Pasukan Portugis berhasil menaklukkan pemberontak, menurunkan bendera Belanda yang telah berkibar dan menegaskan kekuasaan Portugis di Maubara. Pasukan Portugis kemudian melanjutkan penyerangan ke Atabai, kemudian

¹³¹ Widiyatmika M.dkk 2005 hal. 163,167

Lihat Gerald Francellon, 1980, hal. 252.274

¹³² Barros, Jorge Duarte 1984 hal 88

ke Kotabato. Akhirnya tanpa pertumpahan darat pemberontak menyerah dan mau memberikan imbalan berupa uang, kerbau dan babi. Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan kapal Meriam Diu kembali ke Macao tanggal 2 Agustus 1893.

b. Perang Manufahi 1894-1912 ¹³³

Pemberontakan Manufahi terjadi beberapa kali. Yang pertama terjadi tahun 1894 dipimpin liurai Dom Duarte dari Manufahi tahun 1894 akibat kondisi keuangan di Portugis yang merosot dan menaikkan pajak 2 kali lipat serta kondisi terjadinya akhir pada masa pemerintahan gubernur Portugis Celestino da Silva (1894 -1908). Liurai Manufahi mengadakan perjanjian sumpah darah dengan raja Raimean dan Suai. Liurai Dom Duarte mengirimkan anaknya Dom Boaventura ke Cailako, Atsabe dan Balibo dengan beberapa raja lainnya untuk mendukung perlawanan. Perlawanan berhasil dipadamkan pada tahun 1900 dan liurai Manufai menyerahkan diri.

c. Pemberontakan Cova 1868 ¹³⁴

Di wilayah Pantai Utara Timor berdekatan dengan wilayah Timor Belanda, kerajaan Cova penduduknya berbahasa Tetum. Pemberontakan di Cova mendapat dukungan beberapa raja kecil di bagian Barat dan kerajaan Pedalaman yang loyal kepada penguasa Belanda. Gubernur Timor Portugis Teixeira da Silva mengumumkan kebijakan untuk mengorganisasi kekuatan melawan pemberontak Benteng Batuede yang berlokasi di kerajaan Cova dimobilisasi mendukung operasi militer. Pada tanggal 20 Agustus 1868 kekuatan Portugis menyerang dan menghancurkan tiga kampung pemberontak yang diperkuat dengan benteng. Dengan pasukan reguler dari Dili dan didukung pasukan dari Manatuto, Viqueque dan Luca dibawah komando raja Manatuto yang loyal. Portugis langsung menyerang pusat kedudukan pemberontak dengan bom dan roket yang membuat kerusakan berat bagi pemberontak. Dengan kekuatan 1.200 prajurit dan para raja kecil yang loyal pada Portugis seperti Lalela, Barique, Ermera, Cailako dan Alas. Strategi penyerangan bergerak ke Cova oleh 800 prajurit dari bagian Utara Batugede yang didukung penyerangan dari arah lainnya. Satu bulan kemudian ddatangkan pula pasukan pendukung dari Oecusi, Ambenu, Cailaco dan Ermera yang bergabung di Batugede untuk menyerang pemberontak. Akhirnya pemberontak berhasil dilumpuhkan. Pada bulan Mei 1871 gubernur Joao de Carvalho datang ke Batugede bersama ratu Cova dan ratu Balibo yang sebelumnya berada di pihak pemberontak. Mereka disambut dengan upacara tradisional. Tetapi pada waktu yang telah ditetapkan ratu Balibo dan pengiringnya tiba tanggal 29 Mei 1871. Tetapi ratu Cova Dona Maria Pires ternyata tidak datang. Ratu Balibo akhirnya berada di bawah perintah Portugis menetapkan tanggal 1 Juni 1871 ratu Balibo Dona Maria Michaelia Doutel berkuasa penuh ¹³⁵

¹³³ Barros, Jorge Duarte, 1984 hal. 88,89

¹³⁴ Barros, Jorge Duarte 1984 hal.88

¹³⁵ Barros, Jorge Duarte 1984 hal 87

d. Pemberontakan Oekusi ¹³⁶

Pada pertengahan abad ke 19 raja Oekusi berada i di Batugede tangal lihda Costa ketangan keluarga da Costa. Pada tahun 1893 terdapat 2 orang pedagang Cina dan pembantunya terbunuh. Menurut berita ia dibunuh oleh liurai da Costa. Ia memerintah Oekusi sampai tahun 1879. Ia digantikan oleh cucunya bernama Matheus da Costa (Dom Joao Matheus da Costa. Pedagang Cina yang dibunuh kepalanya dipenggal dan digantung di gerbang gereja di Oekusi. Penguasa Portugis menegirinkan Komandan dari Batugede untuk menangkap Dominggus da Costa. Tahun 1894 da Costa digantikan oleh Dom Alexander Hornay dos Santos da Costa pada tahun 1879. Putrinya yang bernama Helena pada tahun 1929 dikenal sebagai istri dari raja terakhir Oekusi tahun 1948 bernama Hugo da Costa.

Pada tahun 1896 Dominggus da Costa mengirim putranya Jose Antonio da Costa sebagai komandan detasemen yang mendukung Portugis dalam melawan para pemberontak musuh-Portugis.

3.1.5. Kebijakan Pasca Pasifikasi di Wilayah Perbatasan

3.1.5.1. Dinamika Enclave wilayah Perbatasan dan Penyelesaian Perbatasan

1. Bikomi dan Tunbaba

a. Bikomi ¹³⁷

Berdasarkan mitologi leluhur Bikomi terdiri dari 4 bersaudara datang dari Belu Selatan Empat bersaudara tersebut Lake, Sanak, Ato dan Bana. Mereka keluar dari Belu Selatan untuk mencari tempat yang cocok. Ke empat bersaudara tersebut datang dengan melewati jalur tengah pedalaman pulau Timor yang dikenal sebagai jalur panas karena harus banyak bertempur melawan penduduk asli yang disebut Nija Bosaf di setiap tempat yang dilewati. Dalam istilah adat jalur tersebut disebut Maputu-Malala. Schulte Nordholt melaporkan leluhur Bikomi dari Belu sampai di Nunu Koba. Di tempat ini perjalanannya terhalang sebuah pohon beringin besar. Sonbai yang pada waktu itu bersamanya, kemudian dengan pedangnya memotong dahan-dahan besar. Ia kemudian menyeberang, Senak dimana terdapat seorang sedang duduk di pohon Taupi Senak. Senak bertanya kepada Sonbai apakah ia kenal dengannya. Sonbai mengenalinya dan memberinya nama Senak. Kemudian secara bersama-sama mereka memindahkan batang-batang besar pohon beringin sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka menaiki bukit yang bernama: Kaumone Tapen Pah dan melihat ke sekeliling tanah. Kemudian Sonbai memutuskan pergi ke Oenam ketempat yang bernama Molo dimana sonafnya berada. Ke empat saudara meninggalkan Sasi di sebelah Utara Bikomi yang dikenal sebagai batu pemali Senak.

¹³⁶ Barros, Joge Duarte 1984 hal. 77-78

¹³⁷ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 292-293

Dekat Nunu Koba di wilayah Liurai, Soi Liurai seorang wanita yang bertindak sebagai penunjuk jalan memutuskan kembali ke Liurai tetapi kemudian wafat. Ia dikuburkan di dekat Nunu Koba. Disini mereka bertemu dengan 8 saudara yang datang dari Wehali, wilayah liurai. Mereka menikah dengan 8 saudara tersebut. Senak kawin dengan Sani Bantenene di sasi, bana kawin dengan Oba Uki di naineno, Lake kawin dengan Bitnani Tpoi di Bitaik dan Atok kawin dengan Nebe Lite di Anab. Cerita versi lain: Senak melihat asap dan pergi menyelidikinya. Kemudian ia bertemu Kisnai dimana putrinya Soni Kisnai dikawinnya. Mereka mempunyai putri bernama Komi Senak. Bi Komi Senak mencari air untuk banyak penduduk yang malas. Ia kemudian sampai di danau. Ia kemudian jatuh dan berubah menjadi buaya. Ketika penduduk datang mencarinya ia dipanggil: Bikomi dan Naijam Bikomi, Usif Bikomi. Sejak itu Senak sebagai penguasa suku di wilayah tersebut dan diberi nama dan buaya menjadi totemnya. Kemudian datang bana, Ato dan lake an Kisnai pergi ke Barat, Pertama ia tinggal bersama Lake di sasi dan kemudian pergi ke wilayahnya sendiri. Di sana telah ada penduduk yang tinggal yakni Lete-Banef, Uki-bantene. Bantene kemudyan kawin dengan putri Atok, Bana dan Lake. Sedangkan critra versi banak: Mereka semua berkumpul di Naineo ditempat leunya. 8 bersaudara: Uki-Bantene, Lite-Bana dan kame-Tpoi yang tinggal di tempat tersebut dan mendapat tanah kebun. Kemudian Atok-Banak, lake Senak pergi ke Netnoni Oilofoan tidak jauh di perbatasan Molo. Disini ia menyeberang wilayah Sonbai. Mereka memotong pokok bambu,. Di bambu tersebut ditaruh bulu ayam merah, batu basah dan senapan. Nai Bani Tobe seorang lelaki dari Bikomi diperintahkan meluncurkan bambu ke arah Liurai. Bambu tersebut melalui sungai Benain setelah berjalan beberapa hari tiba di Umalor di tempat sakral Liurai. Ayam berkokok dan berteriak: Saya telah mendapatkan tanah. Dengan demikian liurai mengetahui bahwa adiknya telah mendapat tanah.

b. Tunbaba ¹³⁸

Nama Tunbaba pertama kali disebutkan dalam sumber tertulis tahun 1760 ketika raja Tunbaba ikut menanda tangani perjanjian dengan VOC (De Roo van Alderwerelt, 1904). Pada waktu itu disebutkan Tunbaba merupakan sebuah kerajaan merdeka. Namun demikian Tunbaba mempunyai hubungan sangat erat dengan Sonbai dan Kono. Berdasarkan mitos Tunbaba berasal dari Malaka (Belu Selatan) dimana dua orang leluhur mendarat di Oinun dalam perjalanan dari Kmuno Klakam. Mereka datang bersama-sama dengan Liurai. Kemudian datang pula Sonbai dan Kono di Biinain di Tunbaba di kaki gunung Bifelnasi. Disini dikenal Antoin Lulai an Tub Lulai dua bersaudara yang tinggal ditempat tersebut. Mereka dikenal sebagai pendiri Tunbaba. Karena adanya perkawinan antara putri raja/ pemimpin Oekusi Tua Amu da Costa da Hornay yang bernama Maria da Costa da Hornay dengan putra raja (Naijuf) Insana bernama Louis Taolin. Karena hubungan perkawinan tersebut

¹³⁸ Schulte Nordholt H.G.1971 hal.288-289

Tanah Hamusu dihadiahkan kepada Insana sebagai hadiah perkawinan kepada Insana. Wilayah tersebut termasuk wilayah Tunbaba.

c. Manamas ¹³⁹

Manamas ditetapkan sebagai distrik tersendiri pada tahun 1912. Lebih dari 400 penduduk merupakan pelarian dari wilayah Portugis yang mencari perlindungan di wilayah kekuasaan Belanda.

Menurut catatan Muller dalam Parera (1971) dahulu Harneno Biboki termasuk dalam wilayah Oekusi, tetapi tahun 1850 dimasukkan dalam wilayah Wehali. Tahun 1916 kerajaan Biboki ditetapkan sebagai kerajaan dengan beslit Gubernur Jendral tanggal 21 Agustus 1916 no.34 dengan mengangkat Kornel Manlea, Kau Mauk menjadi raja dengan membawahi 5 keketoran yakni: Ustetu, Petasi, Bukifan, Taitoh dan Harne ¹⁴⁰

d. Oekusi-Ambenu ¹⁴¹

Leluhur pertama di kerajaan Ambenu menurut laporan Spillett (bernama Saet Toto Benu. Pada generasi ke 7 yang bernama Tua Kole dibabtis oleh padre Antonio Taveiro dengan nama Pedro da Cruz. Oekusi-Ambenu. Ia menjadi raja Oekusi-Ambenu dan menyatakan diri bersekutu dengan Portugis.

Dibagian Pantai Utara Pulau Timor yang kemudian dikenal sebagai enclave Oekusi-Ambenu pada abad ke 17 mempunyai kaitan penting dengan beberapa kerajaan. Salah satu kerajaan terkenal dan berpengaruh bernama Mena yang pusat kerajaan berada di muara sungai Mena yang terletak dibagian Timur Oekusi. Pada pertengahan abad ke 16 raja Mena diidentifikasi sebagai raja Timor. Pada tahun 1615 dikenal seorang raja bernama Reya yang pada waktu itu melakukan hubungan dengan VOC dalam perdagangan cendana. Berdasarkan sumber VOC kerajaan lain di wilayah ini bernama Assem/Asson dan Lifao. Pada tahun 1641 kerajaan Asson dan Mena diserang oleh kerajaan Ga/Makassar. Kemudian Portugis mengirimkan pasukan dipimpin captao mor Fransisco Fernandes yang kemudian juga menyerang dan menaklukkan kerajaan Wesei Wehali di Belu Selatan. Pada waktu Mena diperintah seorang ratu Mena kemudian dialihkan kepada putranya. Portugis memaksa ratu dan keluarga beserta 2000 pengikutnya kembali ke pusat kerajaan di muara sungai Mena. Raja dan keluarganya dibabtis oleh padre Antonio S Jacinto pada tahun 1641. Putranya setelah dibabtis dengan nama Dom Joao. Di tempat tersebut dibangun sebuah gereja dan pemukiman di dekat Pantai dan yang lainnya di pedalaman. ¹⁴²

Keturunan generasi ke 7 yang memerintah Ambenu bernama Tua Kole yang juga disebut Pedro da Cruz. Putrinya Neno Benu yang juga disebut Pedro da Cruz

¹³⁹ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal.291

¹⁴⁰ Schulte Nordholt H.G. 1971 hal. 250

¹⁴¹ Barros, Jorge de, 1984 78,77

¹⁴² Barros, Jorge Duarte 1984 hal. 393

mempunyai dua putri yakni Filomena Benu da Cruz dan Anita Benu da Cruz. Filomena da Cruz kawin dengan Dominggus da Costa sedangkan Anita da Cruz kawin dengan Ugo da Costa. Keturunan mereka kemudian menjadi penguasa di Ambenu dan Oekusi/ Lifau/. Pada tahun 1812 Pedro da Hornay terlibat dalam pertempuran dengan kerajaan Amanuban karena persoalan penebangan kayu cendana. Gubernur Portugis yang bernama Victorino da Cunha e Gosmao (1812-1815) memerintahkan raja Likusaen untuk melakukan penyerangan ke Alor Besar yang didukung dua raja lainnya yakni Oekusi dan Ambenu. Laporan Solomon Muller tahun 1828 Oekusi diperintah oleh Hornay. Pada tahun 1835 diketahui nama penguasa tersebut bernama Dom Filippe da Hornay. Raja ini diperintahkan Portugis untuk memerangi pemberontakan di Boibao di wilayah Selatan Likusaen tetapi gagal. Laporan Muller 1828 menyebutkan bahwa Ambenu diperintah oleh Dominggus Francisco yang secara adat bernama Koleanobais yang pada waktu itu sedang berperang dengan Amkono. Pada tahun 1847 Hornay berkuasa di Pantar dan Alor. Raja-raja tersebut minta bantuan militer namun oleh residen Belanda di Kupang karena Belanda menganggap wilayah tersebut menjadi bagian wilayah Belanda. Atas protes tersebut raja Oekusi menarik diri dari Alor dan Pantar.¹⁴³

Pada tahun 1847 Oekusi tetap loyal kepada Portugis. Pada tahun 1848-1849 terjadi pemberontakan di kerajaan Ermera Raja yang anti Portugis terbunuh. Pada tahun yang sama di lingkungan kerajaan di Batugede termasuk Balibo melakukan pemberontakan. Untuk memadamkan pemberontakan Portugis meminta bantuan raja Oekusi. Kemudian disekitar pertengahan abad ke 19 terjadi krisis di Ambenu, Beberapa anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Amfoan. Raja Ambenu sebelumnya yang bernama Usi Toli memohon kepada raja Amfoan untuk mendiami wilayah Musu. Sebelum tahun 1870. Pada tahun 1870 raja Usi Toli melakukan pertemuan dengan penguasa Belanda bernama Gramberg dan Sonbai dan raja Amfoan. Kemudian raja Usi Toli menanda tangani perjanjian dengan Belanda. Sejak itu Musu menjadi wilayah enclave dari Ambenu. Berdasarkan laporan tahun 1881-1882 Oekusi, Ambenu dan Noemuti masuk wilayah kekuasaan Portugis. Walaupun demikian para raja tersebut tidak memberikan finta sebagai pajak regular. Diperintah oleh Matheus da Costa yang merupakan saudara dari raja Oekusi Dominggus da Costa.

Pada akhir abad ke 19 Noemuti diproteksi Oekusi dan melakukan hubungan dengan Portugis dan pada waktu itu Raja da Hornay digantikan oleh da Costa. Pada tahun 1893 terdapat 2 orang pedagang Cina dengan pembantunya terbunuh. Ia dibunuh oleh Liurai Dominggus da Costa. Pedagang cina yang dibunuh kepalanya digantung di gerbang gereja di Oekusi. Karena masalah ini Penguasa Portugis di Dilly mengirimkan komandan brigade dari Batugede untuk menangkap Dominggus da Costa. Pada tahun 1894 ia digantikan oleh Dom Alexandra Hornay das Santos da Costa. Putrinya yang bernama Helena tahun 1929 dikenal sebagai istri raja terakhir Hugo da Costa.

¹⁴³ Gomang, Sarifudin S. 1992 hal.96

Pada tahun 1896 Dom Dominggus da Costa mengirim putranya Jose Antonio da Costa sebagai komandan detasemen yang mendukung Portugis melawan para pemberontak. Pada waktu hampir bersamaan Liurai Ambenu Dom Benardo memerintah seluruh Oekusi.-Ambenu. Pada tahun 1896 Dom Antonio das Santos Cruz yang dikenal sebagai seorang pemimpin Oekusi yang berhubungan dengan keluarga Ambenu. Dominggus da Costa yang bersekutu dengan Portugis melawan pemberontak orang-orang Timor pada tahun 1898.

Beberapa tahun kemudian seorang Liurai dari Oekusi menawan pemimpin Tunbaba di wilayah Belanda. Karena itu residen Timor melakukan protes kepada Portugis karena Tunbaba masuk wilayah Portugis. Ternyata protes tidak ditanggapi dan penguasa Tunbaba ditawan oleh Portugis.

Pada tahun 1912 terjadi pemberontakan besar Dom Boaventura di Manufahi, Timor Timur. Ia bersekutu dengan beberapa raja tetangganya. Pemberontakan lain muncul di Ambenu. Liurai Don Joao da Cruz da Hornay membunuh dua orang pembantu opsir. Pada waktu itu Ambenu dikenal sangat berkuasa di di Enclave, ketika Liurai Oekusi Dom Hugo telah kehilangan sebagian besar suku-suku mereka ke wilayah Belanda dan tinggal di dekat perbatasan Portugis dan Belanda. Menurut tradisi lisan Dom Hugo adalah putra dari Dominggos da Costa. Namun menurut laporan Peter Spillet (1999) Dom Hugo (Ugo Hermengildo da Costa adalah cucu dari Antonio da Costa. Menurut tuturan keluarga da Costa, mertua Dom Hugo raja Ambenu yang bernama Carlos da Cruz yang kemenaankannya bernama Dom Joao da Cruz sebagai pemberontak ¹⁴⁴.

Dom Joao ternyata berhubungan dengan pemberontak secara tidak langsung yakni dengan tokoh pemberontak Dom Boaventura di bagian Timur dan raja Ambenu. Walaupun demikian Dom Hugo dari Oekusi tetap loyal dengan mahkota Portugis. Namun ia melarikan diri ke Batugede. Penguasa Portugis di Dilly mengirimkan kapal meriam dan sejumlah prajurit Mozambiq untuk menumpas pemberontakan di Ambenu. Para pemberontak Ambenu masuk ke pelabuhan utama Oekusi, Pante Makasar. 1000 pasukan pemberontak Ambenu membuat pertahanan menghadapi pasukan Portugis. Namun pada bulan Maret 1911 Portugis berhasil menaklukkan pemberontak. Pante Makasar dibumi hangus. Dom Hugo yang merupakan kawan Portugis tinggal dekat Pantai dimana tidak jauh dari mereka 500-1000 pasukan pemberontak mengawasi mereka dekat hutan di dekatnya. Sedangkan pemimpin pemberontak Dom Joao tinggal di wilayah Belanda. Pada tahun 1913 enclave dihapuskan dengan kekuatan militer pada tahun 1913. 600 pengikut pemberontak beserta Dom Joao melarikan diri ke wilayah Belanda dengan 2000 pengikutnya. Mereka tinggal di Oepoli di wilayah Belanda. Ratu Bi Sani Taeki terbunuh dalam pertempuran dengan Don Joao. Ia kemudian berada di Kefa dan kemudian dikirimkan ke Kapan. Para pendukungnya

¹⁴⁴ Hagerdal Hans, hal. 130

terbecah menjadi tiga bagian tinggal di Momaffo, Mollo dan Benlutu-Fatumean-Boentuka. Sedangkan Dom Joao da Cruz tinggal di Kefa sampai wafatnya pada tahun 1961 dalam usia 83 tahun. Sedangkan raja Hugo da Costa yang memerintah Oekusi mempunyai istri Helena Hornay da Cruz seorang putrid dari raja Ambenu Alexander Hornay dos Santos da Cruz. Ia wafat tahun 1948. Dua putranya dari istri yang lain: Joao Hermengildo da Costa dan Jose Hermengildo da Custa.¹⁴⁵



Gambar 3.21 Pasukan Pribumi Tropes di Timtim

3.1.5.2. Masalah Enclave dan Penyelesaian Perbatasan

Sebuah konvensi baru yang disebut konvensi Lisabon ditanda tangani tanggal 10 Juni 1893 yang dilanjutkan dengan sebuah deklarasi tanggal 1 Juli 1893. Konvensi ini menetapkan sebuah proposal Komisi Tenaga Ahli untuk mengklarifikasi lebih jelas tentang tanda batas di beberapa enclave. Secara lebih khusus merumuskan mengatasi masalah enclave yang sekarang masih ada yang akan dihapuskan. Konvensi juga menggaris bawahi persoalan lalu lintas persenjataan yang akan diidentifikasi dan para nelayan tradisional yang akan dilindungi dan memperoleh hak kemudahan yang akan diberikan oleh kekuasaan kedua belah pihak. Belanda akan melakukan usulan ulang menghadapi Portugis karena adanya insiden /masalah sebelumnya. Kedua belah pihak diberikan wewenang tentang hak-hak di Timor¹⁴⁶

Pada tanggal 29 Oktober tahun 1896 gubernur Portugis yang bernama Jose Cristiano de Almedia sebagai anggota komisi meninggal dunia. Mereka bekerja sama di daerah perbatasan. Pada hal anggota komisi gabungan telah bekerja sejak tahun 1898-1899. Komisi mengalami kegagalan karena tidak ada kesepakatan. Kemudian kedua belah pihak kembali bergabung bertemu dalam konferensi The

¹⁴⁵ Hagerdal, Hans hal. 134, 135

¹⁴⁶ Barros, Jorge Duarte 1984 77.78

Hague pada tahun 1902 untuk mengatasi permasalahan. Titik permasalahan utama yang dibahas oleh komisi gabungan tentang masalah Oekusi-Ambenu yang dalam persetujuan tahun 1893 menyangkut perubahan enclave. Portugis menjawab argumentasi Belanda agar menyerahkan wilayah atas pertimbangan historis wilayah Lifau termasuk beberapa pelabuhan dan wilayah Sepanjang Pantai yang dianalogikan seperti Belgia atau Portugal. Persoalan yang agak mudah adalah persoalan Noemuti yang telah disepakati dalam perjanjian tahun 1893. Disamping Noemuti, Portugis juga menawarkan penghapusan perbatasan Tahakay, Tamiru-Ailala, Maubessi Mau Busa dan Lakmaras. Sebagai gantinya Belanda melepaskan Maukatar. Kemudian Komisi Belanda mengendorkan tuntutan kepada Oekusi-Ambenu, tetapi tidak mau melepaskan klaim mereka atas hutancendana di bagian Timur berjarak setengah bagian wilayah. Namun Portugis juga mengklaim hal itu. Oleh karena itu masalah ini diajukan ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Hasil keputusan dibicarakan dalam Konvensi The Hague pada tanggal 1 Oktober 1904 yang kemudian ditanda tangani di The Hague. Dalam klausul perubahan penghapusan wilayah kedua belah pihak menyerahkan kepada pihak ketiga. Dengan memberikan hak menjamin kehidupan keberagamaan baik Protestan maupun Katolik di wilayah yang akan ditukarkan. (Sejarah Gereja Katolik Indonesia)¹⁴⁷

Parlemen Portugis kemudian meratifikasi konvensi the Hague dan saling menukarkan hasil ratifikasi sebulan kemudian dalam tahun 1909. Perselisihan muncul kembali atas hasil survey bagian sebelah Timur Oekusi Ambenu atas garis batas yang ditentukan pada tahun 1904. Yang jadi persoalan utama adalah masalah enclaver Noemuti dan daris batas Bikomi. Persoalan menjadi sangat rumit akibat liurai Oekusi menawan pemimpin Tunbaba. Pada tahun 1911 persoalan semakin rumit karena persoalan sejarah masa lalu selama beberapa abad. Kemudian muncul masalah baru dimana kekuatan militer Belanda sangat dominan sehingga pemecahan persoalan dilakukan secara militer. Hal ini terjadi pada masa gubernur jendral A.W.F. van Idenburg (1909-1916) ketika Pasukan Portugis menyerang Maukatar di berbatasan pada bulan Februari 1911, pada bulan Juni 1911 pada bulan Juni pasukan kulit putih didukung pasukan infantri dari Ambon, maka wilayah segera dilakukan tindakan militer mengontrol wilayah melalui rute diantara Maukatar melewati Lakmaras. Akhirnya terjadi pertempuran dimana 3 prajurit Portugis dari Mosambi tewas, Pembantu letnan Francisco da Costa beserta pengikutnya berhasil ditawan pasukan Belanda. Atas peristiwa ini Portugis meminta perundingan dengan Belanda. Dipiha lain terjadi pertukaran catatan antara Lisabon dengan The Hague. Akhirnya disepakati secara umum Konvensi tahun 1904. Status Bikomi dan Tunbaba dibagian Timur perbatasan Ambenu belum ada kepastian. Demikian pula Noemuti, Tamiru Ailala, Tahakae dan Maukatar Permasalahan berlanjut dengan mengungsinya 500 penduduk dari

¹⁴⁷ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid I 1974 hal. 419

wilayah Portugis ke wilayah Belanda. Pada akhir tahun 1911 di wilayah Portugis timbul pemerontakan Manufahi.¹⁴⁸

Kedua belah pihak menyetujui membawa persoalan ke Pengadilan Arbitrase di The Hague (Konvensi Arbitrasi tanggal 3 April 1913). Pada tanggal 25 Juni 1914, Charles Lardy, anggota pengadilan Arbitrase telah memutuskan putusan arbitrase. Semua enclave dilingkungan wilayah Belanda dihapuskan kecuali Oecusi. Maukatar dipindahkan menjadi wilayah Portugis sedangkan Noemuti, Tahakae, Tamiru Ailala dimasukkan wilayah Belanda. Walaupun demikian kerja Komisi Pertabatasan baru menyelesaikan kegiatan padaa bulan April 1915 Namun pelaksanaan pertukaran wilayah baru berlangsung secara efektif pada 21 November 1916. Tetapi pendirian masing-masing raja sangat berlainan. Penduduk Tamiru Ailala ingin tetap tinggal di wilayah Portugis, sedangkan peduduk Tahakae diterima diterima di wilayah Belanda/ Sedangkan di Maukatar 5000 penduduk mengungsi ke dataran di wilayah Belanda. Sedangkan penduduk Noemuti loyalitasnya terpecah menjadi dua bagian. Padang penggembalaan, migrasi spontan dari suku-suku diperbatasan melakaaukan protes terhadap hasil arbitrase garis perbatasan dipaksa oleh penguasa Portugis.¹⁴⁹



Gambar 3.22
Liurai/Raja di Timtim



Gambar 3.23
Raja dan Istri di Timtim

Tanggal 10 Juni 1893 kedua penguasa kolonial di Timor Belanda dan Portugis meninjau kembali hasil kesepakatan tahun 1859 dengan keputusan baru. yang

¹⁴⁸ Barros, Jorge Duarte, 1984 hal.88,89

¹⁴⁹ Timor Pequena Monografia 1970hal. 63,64

dilaksanakan di Lisabon dan dikenal sebagai Konvensi Lisabon yang diumumkan pada tanggal 1 Juli 1893. Isi Keputusan tersebut adalah: Portugal mengembalikan kepada Belanda Tahakae, Noemuti dan Tamiru Ailala dan menerima dari Belanda seluruh dataran Maukatar. Kesepakatan ini disahkan melalui konvensi Internasional di Denhag tanggal 1 Oktober 1904. tercantum dalam Indische Staatblad 1894 no.81 tanggal 1 Oktober 1904 yang ditanda tangani di S' Gravenhage¹⁵⁰. Perjanjian tersebut tercantum dalam Indische Staatblad Tahun 1906 no.194.. Parlemen Portugis meratifikasi Konvensi The Hague dan memperbaiki instrumen dalam waktu satu bulan pada tahun 1909. Kemudian dilakukan survey bersama perbatasan bagian Timur Oekussi Ambenu. Termasuk yang dibicarakan adalah enclave Noimuti dan wilayah Bikomi. Selanjutnya pada tahun 1917 Tahakae dimasukkan dalam wilayah distrik Lamaknen swapraja Tasifeto dan Tamiru Ailala sementara itu terjadi sebuah masalah karena seorang liurai dari Oekusi menawan penguasa Tunbaba. Tahun 1911 Portugis dan Belanda sepakat membicarakan ulang masalah perbatasan yang selama 100 tahun sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan militer Belanda. Gubernur Jendral A.W.F van Idenburg (1909-1916) dalam Widiyatmika M.2010¹⁵¹ memutuskan melakukan perlawanan ketika Portugis melakukan serangan ke Maukatar pada bulan Februari 1911. Belanda mengirimkan pasukan Infantri yang terdiri dari orang-orang Ambon. Pada bulan Juni 1911 terjadi pertempuran antara pasukan Portugis dan Belanda. Pada tanggal 18 Juli 1911 Portugis menduduki Lakmaras. Pasukan Belanda dikirimkan tanggal 18 Juli 1911 via Atapupu. Dalam pertempuran di Lakmaras 3 prajurit Portugis asal Mozambiq tewas. Pembantu letnan Francisco da Costa dan pengikutnya ditawan. Kemudian dilakukan perdamaian kembali antara Portugis dan Belanda yang memadukan hasil Perjanjian Lisabon dan Konvensi the Hague. Dalam perjanjian ini status Tunbaba dan Bikomi masih mengambang demikian juga Noemuti, Tamiru Ailala, Tahakay dan Maukatar. Akhirnya masalah perbatasan diputuskan mahkamah arbitrase Liga Bangsa-Bangsa di Swiss tanggal 25 Juni 1914. Diputuskan seluruh enclave dihapuskan kecuali Oekusi. Maukatar diserahkan ke Portugis dan Noemuti serta Taffaroe kepada Belanda. Masalah perbatasan dianggap selesai pada April 1915 dan efektif tanggal 20 November 1916 dengan resmi dilaksanakan pertukaran wilayah. Sebagai akibat persetujuan tersebut Penduduk Tamiru Ailala meminta tetap sebagai penduduk wilayah Portugis tetapi Tahakai menjadi penduduk wilayah Belanda. Sedangkan di Maukatar sekitar 5000 penduduk meninggalkan dataran dan pergi ke wilayah Timor Belanda. Sedangkan penduduk Noemuti setia terhadap perjanjian. Pada tanggal 28 Juli 1917 berdasarkan keputusan gubernemen tanggal 28/7/1917 no.31 ditetapkan Noemuti masuk wilayah Timor Tengah Utara, Tahakae masuk wilayah distrik Lamaknen, swapraja Belu Tasifeto dan Tamiru Ailala masuk dalam distrik Dirma swapraja Malaka. Barros 1984¹⁵².

¹⁵⁰ Widiyatmika M.2010 hal. 158-159

¹⁵¹ Widiyatmika M.2010 hal.158

¹⁵² Barros, Jorge Duarte J.1984 hal.

Lihat Timor Pequena Monografia 1970 hal 65,66

Perbatasan darat antara wilayah Afdeeling Timor dan Pulu-pulaunya dengan Timor Portugis membentang sepanjang 239 km yang terdiri dari perbatasan di sebelah Barat yakni dengan enclave Oekusi sepanjang 101 km dan perbatasan di sebelah Timur yakni antara kabupaten Belu dengan wilayah Timor Portugis sepanjang 138 km. Menurut Djawahir et.al (2002) perbatasan di sebelah Barat (Oekusi) sepanjang 101 km, 74 km mengikuti Thalweg dan 27 km mengikuti watershed dan lembah. Sedangkan garis batas bagian Timur sepanjang 138 km, 117 km mengikuti Thalweg dan 21 km mengikuti Watershed dan lembah. Menurut Villanueva 2001 dalam Djawahir et.al (2002) dalam Widiyatmika M.2007c¹⁵³ perbatasan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yakni:

1. Water shed sepanjang lembah yang relatif mudah dikunjungi dan didelineasi mencapai kurang lebih 15%.
2. Watershed sepanjang pegunungan bukit yang sulit dikunjungi dan didelineasi mencapai kurang lebih 15%.
3. Thalweg sepanjang alur sungai yang diduga akan membawa kerumitan baik dalam penerapan prinsip-prinsip penarikan garis batas maupun dalam pelaksanaan penarikan garis batas di lapangan mencapai kurang lebih 70%. Kerumitan tersebut disebabkan tipe sungai di wilayah perbatasan yang dominan adalah sungai musiman yang sebagian tetap mengalir dan sebagai kering pada musim kemarau. Alur sungai berubah ubah dari waktu ke waktu sehingga garis batas wilayah dengan Thalweg juga berubah-ubah atau bersifat dinamik. Terdapat river island di sebagian sungai terutama di daerah hilir yang dimanfaatkan oleh penduduk dari kedua belah pihak. Di beberapa tempat ada upacara adat yang dilaksanakan di sungai. Masyarakat mengetahui dan mengakui sungai sebagai batas yang memisahkan wilayah Timor bagian Barat dengan Timor bagian Timur. Mereka juga mengakui aliran air terbesar sebagai batas sesaat dan apabila alur aliran terbesarnya bergeser. Mereka mengakui dan menerima pergeseran tersebut.

Garis batas antara wilayah Timor Belanda dengan wilayah Timor Portugis menurut perjanjian tahun 1904 antara Portugis dan Belanda yang dikutip Djawahir et.al (2002) dalam Widiyatmika 2007c¹⁵⁴ menyebutkan beberapa nama sungai dan gunung serta bukit yang menjadi dasar batas. Sungai-sungai pada batas antara wilayah enclave Oekusi dengan wilayah kabupaten Timor Tengah Utara dan kabupaten Kupang adalah: Noel Meto, Noel Besi, Noel Niema, Bijael Sunan, Noel Miumafo, Nono Boni, Noel Pasab, Nono Sunu, Fatu Besin, Noel Ekan, Sonou, Nivo

Lihat Grensaangelegen heden op Timor: Kolonial Verslag, The Hague 1911.

N.J.F. Eenegrens regeling tusschen Nederlandsch-Timor een Portugeesch Timor Met een Schetskaart. I. G. 1894. 115-116.

¹⁵³ Widiyatmika M2007c hal. 5

¹⁵⁴ Widiyatmika M.2007c hal.4

Nono dan Nono Balena. Sedangkan nama nama sungai dalam perbatasan antara wilayah Belu dengan wilayah Timor Portugis adalah: Mota Beku (Silaba), Oe Bedain, Mota Asodat, Muda Sorun, Talau, Malibaka, Mareca (Lolu), Tafara, Mota Haliboli, We Dick, Mota Babulu, Mota Talas, Mota Masin, We Bedain, Tafara, We Merak, We Nu dan Mota Halibli.

Adapun nama gunung dan bukit yang tercantum sebagai tanda batas adalah: pada wilayah perbatasan Oekusi dengan kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara serta wilayah kabupaten Belu adalah: gunung Bulu Hulu, Puncak Dato Miet, Pegunungan Tahi Fehu, Fatu Sdata, Fatu Rusa, Puncak Uas Lulik, Fatu Rokou, Puncak Fitun Monu, Debu Kasabauk, Ainun Matan, Lali Fuin, Puncak Aikakae dan Takis.¹⁵⁵

3.1.5.3. Pemantapan kebijakan pendukung Pasifikasi di Perbatasan

a. Pembangunan jalan raya,

Seperti telah diuraikan pembangunan jalan raya lintas Timor (Timor Weg) yang telah berjalan terus dilanjutkan untuk kepentingan pertahanan dan pengendalian pemerintahan yang lebih efektif. Pembangunan jalan Lintas Timor selesai pada tahun 1923¹⁵⁶. Namun jalan raya menuju wilayah Selatan Perbatasan baru dibangun pada masa Jepang. Dan jalan ke perbatasan di Wini baru dibangun tahun 1953. Demikian kerja rodi untuk membangun jalan lintas Timor tetap berjalan. Untuk mendukung pemeliharaan jalan raya Lintas Timor Penduduk dari pegunungan dipindahkan ke sekitar jalan raya¹⁵⁷

b. Pelarangan perang antar suku dimantapkan

Kebijakan pelarangan perang antar suku tetap dilakukan agar Pasifikasi berjalan lancar. Dengan kebijakan ini mendukung tertib keamanan di perbatasan¹⁵⁸. Namun hal ini berdampak kepada peran meo (panglima perang adat) tersingkir dari kehidupan sosial ekonomi, karena tanggung jawab keamanan diambil alih oleh penguasa kolonial Belanda.

c. Untuk lebih mengefektifkan pengendalian keamanan dan efisiensi pemerintahan kolonial, pusat pemerintahan Onder Afdeeling di Belu dipindahkan dari Berdao ke Atambua pada tahun 1916. Sedangkan di pusat Onder Afdeeling Timor Tengah Utara di pindahkan dari Noeltoko ke Kefamnanu. Pembangunan kantor onder afdeeling diikuti dengan pembangunan tangsi militer dan penjara di dekatnya¹⁵⁹.

¹⁵⁵ Wiidiyatmika M.2007c hal.6

¹⁵⁶ Ormeling F.J.1955 hal.44

¹⁵⁷ Ormeling F.J.1955 hal.78

¹⁵⁸ Ormeling F.J.1955 hal.85

¹⁵⁹ Silab W.dkk.2005 hal. 80

d. Kebijakan Cendanan

Pada tahun 1916 diberlakukan larangan penebangan cendana secara bebas.¹⁶⁰ Penebangan cendana dikuasai pemerintah Kolonial. Dengan demikian cendana yang dahulu menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat dan kerajaan surut karena semua dikuasai pemerintah kolonial. Akibatnya rakyat hanya menjadi penonton dan bersikap apatis. Kebijakan ini diikuti dengan Oronance Cendana pada tahun 1925¹⁶¹. Yang diikuti dengan sensus cendana selama 10 tahun.

e. Pada tahun 1912 Belanda mengintroduksi masuknya ternak sapi di Timor terutama sapi Bali. Pemasukan sapi disebar ke seluruh wilayah Timor termasuk wilayah perbatasan dengan sistem kopel dan bergulir. Setiap pimpinan lokal/fetor, temukung, usif yang wilayahnya memiliki padang penggembalaan diberi 10 ekor sapi betina dengan 1 ekor sapi jantan¹⁶². Tahun 1921 telah tersebar 1000 ekor sapi Bali¹⁶³. Penyebaran sapi Bali dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah sehingga akhirnya berdampak menurunnya ternak kerbau. Karena pemeliharaan ternak sapi yang longgar di padang penggembalaan, agar para pemilik ternak, ternaknya tidak bercampur dibuat aturan dengan membuat cap ternak (malak) yang merupakan tanda milik suku masing-masing ternak. Namun mengingat iklim di Timor yang kering pada musim kemarau padang rumput meranggas sehingga sapi kekurangan pakan ternak. Kenyataan ini mendorong dilakukan pembakaran padang di musim kemarau untuk memicu tumbuhnya rumput muda.

3.1.5.4. Kebijakan Pasifikasi Portugis.

Pemerintah colonial Portugis di Timor Timur melaksanakan kebijakan Pasifikasi tahun 1863 pasca perjanjian Lisabon tahun 1859¹⁶⁴. Kerajaan-kerajaan kecil yang berjumlah 50 buah dirasionalisasi. Pada tahun 1896 Pemerintahan Timor Portugis di Timor dipisahkan secara administratif dari Macao¹⁶⁵. Pada tahun 1912 dibentuk sistem pemerintahan di seluruh wilayah Timor Portugis. Kesatuan terkecil administrasi yang merupakan kelompok desa disebut povoacao. Kemudian dalam sistem administrasi bulan November 1963 dibentuk sistem administrasi yang lebih besar disebut Concelho semacam distrik yang membawahi Posto Administrativo. Terdapat 11 concelhos dan 56 postos administrativo¹⁶⁶.

¹⁶⁰ Ormeling F.J. hal. 174.

¹⁶¹ Ormeling F.J. 1955 hal. 175

¹⁶² Ormeling F.J. 1955 hal. 155

¹⁶³ Ormeling F.J. 1955 hal. 155

¹⁶⁴ Barros, Jorge de. 1984 hal. 80

¹⁶⁵ Jill Jolliffe, 1978 hal. 39.

¹⁶⁶ Timor Pequena Monografia 1970 hal. 81

Dalam rangka Pasifikasi dilakukan pula pelaksanaan pajak yang disebut finta dan penanaman kopi yang diberlakukan kepada seluruh kerajaan. Bagi raja setiap kerajaan wajib menanam kopi tanpa mendapat sosialisasi yang memadai setiap raja harus menyerahkan hasil kopi 20 % kepada pihak Portugis. Pemberlakuan pajak yang dianggap berat menimbulkan pemberontakan pajak di seluruh wilayah Timor Portugis sejak tahun 1861 sampai 1912 ¹⁶⁷



Gambar 3.24 Peta Perbatasan Portugis

3.2. Perbatasan Masa Pendudukan Jepang

3.2.1. Pulau Timor Yang Strategis

Pulau Timor mempunyai arti strategis bagi Jepang, karena letaknya yang berdekatan dengan Australia, sehingga bisa menjadi batu loncatan ke Australia. Sebaliknya bagi pasukan Sekutu, pulau Timor merupakan salah satu kunci strategis sebagai pertahanan terakhir dalam rangka membendung invasi pasukan Jepang agar tidak melaju ke Australia. Itulah sebabnya dalam peta strategi Admiral Kurita yang berjudul: *Eastern Octopus Amphibious Movements* Januari-Februari 1942, Kebijakan pulau Timor merupakan salah satu pulau yang digapai tangan Octopus Admiral Kurita ¹⁶⁸.

Jepang sebelum menginvasi wilayah Indonesia termasuk pulau Timor, mempropagandakan semboyan 3A (Jepang Saudara Tua Asia, Jepang pelindung Asia dan Jepang Pemimpin Asia). Dengan slogan tersebut secara psikologis, Jepang berusaha

¹⁶⁷ Barros, Jorge de, 1984 hal.81-90.

Lihat uraian pemberontakan anti pajak dari tahun 1860-1912. Yang telah diuraikan dimuka.

¹⁶⁸ Widiyatmika M.2007b Lintasan Sejarah Bumi Cendana. Pusat Pengembangan Madrasah NTT.hal.334

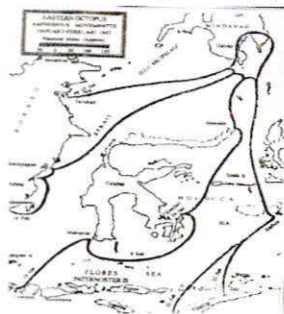
menarik simpati rakyat yang telah lama tertindas oleh penjajahan. Untuk memuluskan pendaratan pasukan, jauh sebelum melakukan invasi Jepang juga menyelundupkan mata-mata di berbagai wilayah dengan menyamar sebagai pedagang atau petani. Dengan demikian Jepang mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang daerah-daerah yang akan diinvasi.¹⁶⁹

Selebaran yang dilakukan Jepang ke kota Dili berlangsung mulai tanggal 21 Februari 1942. Jepang merencanakan menghancurkan sistem administrasi pemerintahan Portugis di Timor dirancang dalam satu bulan¹⁷⁰

Setiap hari dilakukan pemboman secara sistematis di kota Dili. Propaganda diarahkan langsung kepada simpatisan Australia di Timor. Mereka tidak saja mendapat ancaman bahkan pembunuhan. Gubernur Timor Portugis Manuel Abreu Ferreira Carvalho mengirimkan telegram ke Lisabon tentang kondisi darurat. Mereka kemudian diperintahkan menolak tuntutan Jepang untuk menghukum para Perwira Portugis dan pegawai Portugis.

Untuk membendung pasukan Jepang pada pertengahan Desember 1941 Australia mendaratkan pasukan di Kupang dan Dili. Pasukan Sekutu membentuk operasi Lancer atau Sparrow Force yang anggotanya terdiri dari Pasukan Australia dan Pasukan Belanda yang disebut Royal Netherlands East Indies Army (RNEIA) dengan kekuatan 800 pasukan. Kemudian kembali datang pasukan di Dilly pada 17 Desember 1941. Namun akhirnya pada 10 Januari 1943 kekuatan pasukan ditarik karena kekalahan mereka dari pasukan Jepang. Gerakan perlawanan dilakukan dengan gerilya dilakukan oleh Brigade Internasional anti Facis yang dijuluk Red Brigade yan anggotanya terdiri dari gabungan para Jurnalis, para opsir dan masyarakat (Barros, 1984).¹⁷¹

Kemudian pada tanggal 14 Mei 1942 pasukan Sekutu dengan kekuatan 2000 orang mendarat di Kupang dipimpin oleh Brigadir Jendral Veal.¹⁷² Namun upaya membendung invasi Jepang tidak mendapatkan hasil.



Gambar 3.25
Peta Admiral Kurita

¹⁶⁹ Widiyatmika M.dkk.2007. Sistem Pemerintahan Tradisional Kabupaten Belu.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional..Kupang hal.209

¹⁷⁰ Barros,Jorge Duarte.1984 hal.122

¹⁷¹ Barros,Jorge Duarte.1984.Timor Ritos en Mitos.Atauros. Ministerierio da Uducacao, Lisboa hal.124

¹⁷² Barros,Jorge Duarte 1984 hal. 124

Kemudian pada tanggal 14 Mei 1942 pasukan Sekutu dengan kekuatan 2000 orang mendarat di Kupang dipimpin oleh Brigadir Jendral Veal.¹⁷³

Untuk merebut wilayah Indonesia dari tangan pemerintah Hindia Belanda, di wilayah bagian Barat seperti pulau Sumatra dan Jawa, Jepang mengerahkan pasukan Angkatan Darat atau Kaigun, sedangkan untuk menguasai Indonesia Timur, termasuk pulau Timor diserahkan kepada Angkatan Laut atau Rikugun Pulau Sumatra berada di bawah komando Tentara Ke Dua Puluh Lima, pulau Jawa oleh tentara Ke Enam Belas dan wilayah Indonesia Timur oleh Armada Selatan Kedua. Di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 Letnan Jendral H. Ter Poorten sebagai panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, menanda tangani piagam penyerahan tanpa syarat kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letnan Jendral H. Imamura.¹⁷⁴ Sejak itu secara resmi Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Jepang atau *Gunseikanbu*. Di pulau Timor, dalam rangka merebut kota Kupang, pasukan Jepang mendarat di Batulesa tanggal 19 Februari 1942. Sedangkan pasukan Udara diterjunkan di Babau dan Penfui. Pasukan Jepang memasuki Kupang dari 4 jurusan: Mantasi, Bakunase, Baun dan Penfui. Pasukan Jepang yang mendarat di bawah komando Jendral Hayakawa berhasil mematahkan perlawanan Pasukan Sekutu.¹⁷⁵

Pasukan Sekutu (dalam hal ini Australia) terpaksa mengundurkan diri ke arah pedalaman Timor ke arah Camplong. Di Belu pasukan Jepang mendarat pada bulan April 1942. Seperti pada invasi di Kupang, di Belu pasukan Jepang tidak banyak mengalami perlawanan yang berarti. Itulah sebabnya dengan cepat pasukan Jepang dapat menundukkan Tentara Sekutu dan dengan mudah menguasai Belu.¹⁷⁶

Sedangkan Pasukan Jepang mendarat di Dili tanggal 19 Februari 1942 dengan jumlah pasukan 1000 orang dan di Kupang dengan 5000 pasukan. Sehari berikutnya diikuti dengan pasukan lain secara bergelombang. Pasukan Angkatan Laut Jepang mendarat di Baulesa tanggal 19 Februari 1942 kemudian diikuti pasukan Payung di Penfui dan Babau. Pimpinan Pasukan Jepang Jendral Hayakawa. Pasukan Jepang kemudian mendaratkan pasukan marinir di Dilly dengan kekuatan 5.000 pasukan. Pasukan Jepang semakin ditambah dan kekuatan mencapai 12.000 orang.¹⁷⁷

Pertempuran hebat terjadi di Oesao perang satu lawan satu. Pasukan Jepang yang mendarat di Dili tewas 40 orang. Sedangkan dalam pertempuran di Kupang data September 1943 dan April s.d. Agustus 1944 berjumlah 24 pasukan Sekutu/Australia tewas di Kupang dan 65 tewas di pertempuran Oesapa Besar. 16 orang ditawan

¹⁷³ Barros, Jorge Duarte 1984 hal. 125

¹⁷⁴ Widiyatmika M.dkk.2007 hal. 210.

¹⁷⁵ Barros, Jorge Duarte, 1984 hal. 125.

Lihat I.H.Doko, 1974. Nusa Tenggara Timur: Dalam Kancan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Masa Baru. Bandung, hal.80

¹⁷⁶ Widiyatmika M.dkk.2007 hal. 210

¹⁷⁷ Barros, Jorge Duarte hal 1984 hal. 125

kemudian di tembak oleh Jepang ¹⁷⁸

Pemboman oleh Sekutu terjadi mulai bulan Juni 1942. Perintah pemboman berasal dari US Commander-Chief South West Pacifik: Major Jenderal R.K. Sutherllin. Pemboman terutama diarahkan di Dili dan Kupang. Bantuan pasukan Sekutu melawan pasukan Jepang dari Sparrow Force Australia dan didukung orang-orang Timor, para desersir, kelompok anti facis, para jurnalis mereka membentuk Brigade Merah. Mereka bekerja sama dengan komando Australia selama peperangan. ¹⁷⁹

3.2.2 Sistem Pemerintahan Jepang di Timor

Sistem Pemerintahan pada masa pendudukan Jepang secara umum didasarkan atas *Osamu Sirei* no. 27 tahun 2602 (1942). Di Jawa sistemnya Syu Coe (keresidenan), Syu (kota praja) dan ken (kabupaten) dikepalai ken Coe, gun (kawedanan) dikepalai gun coe, son (kecamatan) dikepalai son coe, ku (desa) dikepalai Ku Coe. Struktur di luar Jawa menyesuaikan yang ada di Jawa. Semua bekas pegawai Hindia Belanda di Timor dipanggil kembali untuk bekerja. Di Timor terdapat struktur pemerintahan disebut Minseibu di bawah pimpinan Angkatan Laut Jepang dengan 4 bagian yakni: Bagian Umum di kepalai F. Runtuwene, bagian Ekonomi dikepalai Drh. Sihombing, Bagian Sosial Penerangan dikepalai C.Frans. Pada akhir masa pendudukan Jepang tahun 1944 membentuk Sjo Sunda shu (propinsi Sunda Kecil dengan ibu kota di Singaraja). ¹⁸⁰ Pada tahun 1944 juga dibentuk pula Dewan keresidenan (Syu Sunda Shu Kai lin) yang mewakili wilayah Timor adalah raja Amarasi H.A.Koroh dan I.H.Doko.

Masa pendudukan Jepang sistem pemerintahan kerajaan tidak mengalami perubahan. Hanya saja nama onder afdeeling mengalami perubahan menjadi bunken yang dikepalai Bunken Karikan Sedangkan kerajaan disebut suco. Desa disebut ku yang dikepalai Ku coe. Sebagai masa pemerintahan pendudukan yang orientasi militer, maka kebijakan pertahanan menjadi unsur yang dominan. Jepang merekrut dengan paksa tenaga kerja paksa yang disebut romusha untuk membangun gua-gua pertahanan Untuk mengawasi keamanan Jepang memiliki polisi rahasia yang sangat kejam dikenal dengan istilah Kempetai ¹⁸¹

Orang Timor harus membantu Dai Nippon dalam perang Asia Timur Raya supaya selekas mungkin mencapai kemenangan agar *Hakko Ichi-u* dapat diwujudkan (Widiyatmika M.2007b). ¹⁸² Rakyat dituntut berkorban sebanyak –banyaknya dengan ikhlas dan rela. Dengan pengorbanan itu maka dibentuk pula: *seinendan*. Kebijakan tersebut di atas menjadi acuan Jepang dalam menjalankan berbagai pemerintahan

¹⁷⁸ Barros, Jorge Duarte 1984 hal. 130

¹⁷⁹ Barros, Jorge de, 1984 hal. 124

¹⁸⁰ Doko.I.H. 1974. Nusa Tenggara Timur Dalam Kancah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Masa Baru, Bandung, hal.80

¹⁸¹ Widiyatmika M.2007b hal.338

¹⁸² Widiyatmika M.2007b hal.336

di daerah-daerah termasuk di pulau Timor. Struktur pemerintahan di bawah Jepang adalah sebagai berikut:

Di seluruh Nusa Tenggara berada di bawah *Minseibu* berkedudukan di Singaraja. Ken *Karikan* berkedudukan di ibu kota bekas *afdeeling* semasa penjajahan Belanda. Untuk *Afdeeling Timor* yang disebut *Timor Ken*, berkedudukan di Kupang. Pada setiap *Onder afdeeling* berada dibawah *Bunken Karikan*. Sedangkan raja disebut *suco* ¹⁸³

Di Belu, Jepang tidak banyak mencampuri urusan intern kerajaan yang ada. Dalam 3 tahun periode pendudukan Jepang wilayah Belu dibagi dalam 2 bagian yakni Swapraja Tasifeto dan Swapraja Tasimane termasuk Harneno yang pada masa sebelum Jepang Harneno masuk wilayah Timor Tengah Utara. Sebagai raja pertama swapraja Tasifeto ditunjuk Nikolas Mane dan Hendrikus Siri da Costa dari Bauho sebagai raja kedua. Namun pada tahun 1944 Nikolaus Manek diberhentikan, dan ia digantikan oleh Hendrikus Siri da Costa dari Bauho sebagai *Nai Bot* Tasifeto. Sedangkan swapraja Tasimane diperintah oleh Arnoldus Klau putra dari Loro Wewiku Bere Nahak sebagai raja pertama dan Edmundus Tey Seran dari Fatuaruin sebagai raja kedua ¹⁸⁴

Raja Tasimane dan raja Fatuaruin Edmundus Tey Seran disiksa Jepang dengan alasan, raja Tasimane menyembunyikan kontrolir Belanda yang bernama Danu. Jepang marah besar dan memanggil raja Tasimane Edmundus Tey Seran bersama temukung Boni Alexander Nuak. Mereka disiksa, dengan cara diberi minum, kemudian dipukul sehingga selaput suara Alexander Nuak rusak. Karena kerusakan pita suara tersebut Alexander Nuak tidak bisa bicara secara normal lagi ¹⁸⁵.

Sebagai pemerintahan pendudukan, pemerintahan Jepang di Belu statusnya sebagai *Bunken Karikan*. Pemerintahan pendudukan yang orientasinya pertahanan, dominasi kaum militer Jepang sangat kuat. Banyak para pekerja paksa yang disebut *romusa* dikerahkan untuk kepentingan pertahanan. Pada waktu pasukan Jepang mendarat dan berkuasa, seluruh orang kulit putih, termasuk para pastor ditawan dan diinternir. Ternyata walaupun Jerman merupakan sekutu Jepang, tetapi para pastor berkebangsaan Jerman tidak luput dari penangkapan dan internir pasukan Jepang. Beberapa pastor yang mengalami nasib diinternir dan juga yang menjadi korban keganasan Jepang atau penyakit yang diakibatkan penindasan Jepang antara lain: Pastor Jacobus de Bruin tidak bisa mengatasi sakit desentri dan meninggal 4 Desember tahun 1944. Pastor Mathias Berschbach meninggal dunia di India tidak lama setelah dibebaskan dari Kamp Daerah Dun. Dalam Kamp Inggris yang sama terdapat: pastor Josef Heib, Heinrich Yanssen, Ernst Barth, Franz Beule dan bruder Petrellus Klug. Di Indonesia mereka diinternir di kamp-kamp yang tidak baik, akhirnya ke India. Di dalam kamp, kondisinya tidak terlalu buruk. Cuma mereka harus menunggu lama

¹⁸³ Widiyatmika M.2007 b.343

¹⁸⁴ Widiyatmika M.dkk.2007 hal.211

¹⁸⁵ Widiyatmika M dkk.2007 hal.211

baru dibebaskan. George Schulz tenggelam di lautan Indonesia, karena kapal yang mengangkut dibombardir. Satu kapal Belanda kemudian mendekat, tetapi tidak mau menolong orang-orang yang masih hidup, karena mereka berkebangsaan Jerman. Pastor Heinrich Schroder dan pastor Hubert Schmitz yang mula-mula ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda, kemudian dibebaskan. Namun oleh Jepang kemudian diinternir ¹⁸⁶.

Walaupun Jepang dan Jerman bersahabat, tetapi pastor Jerman tetap ditangkap dan diinternir. Kemudian setelah bebas pastor Heinrich Schroder kembali ke Halilulik. Pastor-pastor berkebangsaan Belanda antara lain: Hendrik Yan Somhorst dan Cor Martens berhasil menyelamatkan diri ke Australia. Nikolas Bot dari Besikama bersama tentara Australia dan Belanda yang tertangkap ditawan di kamp tahanan di Oesao. Guru Z Makalo sewaktu-waktu menghantar para misionaris yang ditahanan seekor sapi. Pastor van den Tillart menjadi tukang bantai sapi dari kawanan gereja ketempat tahanan mereka. ¹⁸⁷

Kota Atambua hampir setiap hari kena bombardir sehingga penduduk sebagian besar mengungsi sehingga hampir kosong. Para raja di Belu selalu diganggu pasukan Jepang dengan permintaan agar menyediakan gadis-gadis untuk memuaskan nafsu pasukan Jepang. Pasukan pendudukan Jepang tidak saja menginternir para pastor dan bruder, tetapi barang-barang gereja dan barang milik pastor juga dirampas. Jepang berusaha beberapa kali mau mengambil akordion pastor Petrus Koning. Pastor Petrus Koning akhirnya tidak bisa mencegahnya. Pasukan Jepang marah besar dan datang bersama pasukan Jepang lainnya. Melihat kenyataan yang dianggap berbahaya pastor Anton van Haren kemudian lari menuju kepala pasukan Jepang. Seorang tentara Jepang mengejanya dan melempari dengan batu sehingga jatuh. Pastor yang telah jatuh ditindih dan akan ditampar. Pastor van den Tillart yang melihatnya berusaha mencegah dengan memegang tangan si Jepang. Tentara Jepang marah dan mengucapkan kata-kata: ini sudah keterlaluan, pastor-pastor melawan Jepang, berarti melawan kaisar Jepang. Ternyata upaya pastor van den Tillart melindungi diri sudah dianggap sebagai melawan. Akhirnya semua pastor dibawa ke kantor komandan pasukan Jepang. Pastor Henk van Wissing dan Theodorus Lavrijsen yang sebelumnya tidak ikut terlibat membela kasus akordion gereja diikat tangannya. Yan Smit, Niko van Ammers, Theodorus van den Tillart, Petrus Koning, bruder Augustinus Grobben semuanya dibawa menghadap komandan pasukan Jepang. Komandan pasukan Jepang berkata: "He kristo, kristo, banyak orang salah, satu mati. Nippon, he: satu orang salah, banyak orang yang mati" ¹⁸⁸.

¹⁸⁶ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid 3b, 1974. Bagian Dokumentasi Penerangan Wali Gereja Indonesia, Jakarta. Arnoldus Ende Flores hal. 1310

¹⁸⁷ Widiyaatmika M. dkk 2007 hal. 213

¹⁸⁸ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid 3a hal. 1313

Seorang juru bahasa tentara Belanda yang mengetahui bahasa Jepang, menasehati pastor agar bertobat secara serani. Kemudian pastor-pastor saling memandang. Antoon van Haren mengusulkan sembahyang confiteor. Dengan muka sopan santun mereka menyebutkan kata-kata itu, walaupun dalam batin mereka berpendapat lain. Para pastor yang tidak tahu salah apa-apa selama 3 hari dikunci dalam sebuah kamar kecil dan tidak ada ruang lantai yang cukup. Selama 3 hari mereka harus berdiri dengan tidak diberi makan dan tidak boleh mandi. Satu kali mereka mendapat pisang dari Bonaventura Kenjam, satu kali mendapat sisa makanan tentara. Mereka makan dengan piring kulit pisang. Pada hari ke 4 dan ke 5 mereka baru boleh mandi. Dari seorang mata-mata para pastor mendengar bahwa mereka dituduh sebagai mata-mata. Dan hukuman mati merupakan konsekwensi tuduhan mata-mata.

Komandan pasukan mengumpulkan penduduk kota dan memberitahukan keputusan hukuman mati bagi para pastor. Semua penduduk yang datang terkejut mendengar keputusan tersebut. Tiba-tiba Ambrosius Tjung Djung Kie berbicara: kami sudah mengenal lama para pastor kami. Mereka selalu menolong kami. Mereka tidak pernah melawan kami. Kami menganggap mereka orang baik. Semua yang hadir mengiyakan dengan serentak. Jepang kurang senang mendengar pembelaan tersebut. Tetapi berkat pembicaraan yang berani berhasil menyelamatkan nyawa ke 7 pastor yang akan dihukum mati. Tentara yang telah disiapkan untuk menghukum mati akhirnya dibubarkan.¹⁸⁹

Beberapa hari kemudian para pastor dan bruder diantar ke kantor Jepang. Disana telah terkumpul barang-barang mereka termasuk piala dan pakaian misa. Tetapi pasukan Jepang sebelumnya telah menghukum mati tanpa melalui proses 2 pastor Portugis. Terdapat seorang pemuda bernama Marcellus Sirimain yang lahir di Kamanasa, Wehali tanggal 20 April 1920. Bapaknya Leo Renu diangkat sebagai guru agama tahun 1919. Marcellus Sirimain dikenal berkelakuan baik. Ia kemudian mendapat tugas di Aihun. Berkat jasa Marcellus, karena pengaruhnya sebagai guru kampung Aihun menjadi terbuka untuk agama Katolik. Marcellus kemudian juga mengajar di Kletek, Suai. Tanggal 23 Agustus 1943 Marcellus menikah dengan Susana dengan saksi Wilhelmus Nahak. Waktu Jepang berkuasa Marcellus dan Wilhelmus Nahak menjadi juru tulis di wilayah Portugis. Pada bulan September 1943 Marcellus dan Wilhelmus dipanggil kapitan Bobonaru untuk mengurus nona-nona cantik dari Suai dan Kamanasa.¹⁹⁰

Demi melindungi para gadis mereka menjawab bahwa di Suai dan Kamanasa tidak ada nona cantik, semua wanita telah tua-tua. Sewaktu pulang dari rumah Kapitan Bobonaro, mereka ketemu raja Suai yang menuju Bobonaro. Pertanyaan

¹⁸⁹ Sejarah Gereja Katolik di Indonesia jilid 3a, 1974 hal. 1312

¹⁹⁰ Sejarah Gereja Katolik Indonesia ilid 3 a 1974 hal 1314

yang sama ditanyakan kepada raja Suai. Ternyata raja Suai menjawab bahwa ada 5 atau 6 nona cantik. Dengan demikian juru tulis Marcellus dan Wilhelmus Nahak dianggap berbohong. Bahkan mereka menyarankan mereka dibunuh saja karena telah berbohong. Marcellus dan Wilhelmus lebih baik mati dari pada mengorbankan wanita kepada Jepang. Pada waktu Marcellus dan Wilhelmus tidak ada di Bobonaro, raja tua menyerahkan dua nona, satu nona dari Kamansa bernama Kolo Nelin dan satu dari Suai bernama Abuk Lotuk. Kedua juru tulis (raja muda) menerangkan kepada tentara Jepang: kalau mau nikah dengan pemuda-pemudi kami tidak keberatan, tapi kami tidak akan menyerahkan pemuda untuk tujuan yang lain karena melawan adat dan agama.¹⁹¹

Pada tanggal 22 September 1943 kedua raja muda (juru tulis) dipanggil ke Bobonaro bersama raja daerah itu. Setiba di Bobonaro Marcellus dan Wilhelmus diikat dengan kawat tilpun dan dijemur di terik matahari. Proses pemeriksaan dan pembelaan tidak terjadi, Jepang cuma berteriak "Emi lisan la diak artinya kamu bohong". Terpisah dari mereka, berdiri para raja menunggu di panas terik. Paulus Fahik Nai Okes berdiri sendiri tidak terikat dan ditegur tentara Jepang, kamu jangan ikut teladan buruk dari Marcellus dan Wilhelmus. Karena Paulus Fahik yang melaporkan secara tertulis tentang pembunuhan dan menyerahkan 2 nona kepada Jepang, nyawanya selamat. Orang kampung disuruh menggali kuburan untuk Wilhelmus dan Marcellus. Masing-masing diikat pada pohon dekat kuburan mereka. Wilhelmus dibunuh lebih dahulu dengan ditembak mati kemudian menyusul Marcellus. Marcellus ditembak sewaktu berlutut sembahyang dengan 7 tembakan dan Wilhelmus dengan 3 tembakan. Setelah mereka dikuburkan, Jepang membeli seekor kerbau dan seekor babi disembelih untuk pesta dengan para raja.¹⁹²

Kemudian kedua jenazah tersebut dipidahkan ke Kamanasa di dalam Kapela. Melihat kekejaman Jepang dan perlakuan yang semana-mena terhadap rakyat dan wanita, muncul seorang pejuang yang berusaha melawan kekejaman Jepang. Tokoh ini bernama Nahak Amerika, memimpin perjuangan di Wewiku/Weoe melawan pendudukan Jepang. Upaya perlawanan yang dilakukan seperti menembus tembok raksasa kekuasaan Jepang yang pada tahun 1942 berhasil melindas pasukan Sekutu. Perlawanan Nahak Amerika berhasil dipadamkan. Menurut laporan misionaris ia ditangkap dan dibawa ke Atapupu dan akhirnya dihukum pancung di Atapupu (versi lain ia dibunuh di pasar Weoe).¹⁹³

Pada masa pendudukan Jepang di Timor beberapa pasukan Australia lolos dari penangkapan Jepang, melarikan diri ke pedalaman Timor dan membentuk kekuatan

¹⁹¹ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid 3a hal. 1314

¹⁹² Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid 3a 1974 hal. 1316

¹⁹³ Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid 3 1974 hal. 1316

Lihat Widiyatmika M.dkk.2007 hal.216

anti Jepang dengan melakukan gerilya. Mereka bergabung dengan pasukan kecil brigade internasional yang disebut *Deportados* yakni para napi yang ditangkap dan diasingkan Portugis karena anti pemerintahan Salazar. Pasukan gerilya membangun transmisi dan berhasil melakukan hubungan radio ke Darwin Kontak radio pertama berlangsung pada tanggal 22 April 1943 ¹⁹⁴.

3.2.3. Akhir Masa Pendudukan Jepang

Sebelum masa akhir pendudukan Jepang pada tanggal 5 Agustus 1945 dilakukan suatu Pertemuan Umum di Kewar dipimpin raja Bauho Hendrikus Besin Siri da Costa. Dalam pertemuan tersebut diputuskan kerajaan Lamaknen dipisahkan dari Tasifeto dan menjadi sebuah swaprja sendiri. Untuk pertama kali ditetapkan raja Kewar A.A.Bere Tallo ditunjuk sebagai raja kerajaan Lamaknen menggantikan raja Bau Liku. Kerajaan Lamaknen terdiri dari 8 kerajaan yakni: Kewar, Lakmaras, Nualain, Makir, Leowalu, Lamaksenulu, Dirun dan Loo Nuna (Bere Tallo, 1957 dalam Tom Therik 1995).¹⁹⁵

Dengan demikian rancangan 3 kerajaan pada masa akhir pemerintahan Belanda sebelum jatuh ke tangan Jepang dihidupkan kembali. Tiga kerajaan tersebut direalisasikan pada awal pemerintahan Indonesia yang dinamakan sistem pemerintahan asli di Belu yang terdiri dari 3 kelompok etnis yakni: Lamaknen diperintah seorang raja dengan gelar Bein Bot, Tasifeto diperintah seorang raja dengan gelar Astanara dan Malaka diperintah seorang raja dengan gelar Maromak Oan (Tom Therik, 1995) ¹⁹⁶Raja Tasifeto dipegang oleh Nikolas Manek yang kemudian digantikan Hendrikus Besin Siri yang dikenal pula sebagai Manek da Costa. Sedangkan Tasimane dipegang oleh Arnoldus Klau putra Bere nahak dari Wewiku. Kemudian ia digantikan oleh Edmundus Tei Seran raja dari Fatuaruin.

Yang menarik dalam situasi kedudukan Jepang yang semakin terdesak di berbagai medan pertempuran, pada tanggal 29 April 1945 dilakukan rapat Raksasa di Air Nona Kupang yang dihadiri Ketua Dewan Raja Raja Timor, H.A.koroh diterima bendera merah putih dan dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang. Pada waktu itu juga berkumpul Pengurus Dewan raja raja di Timor ¹⁹⁷

Pendudukan Jepang yang telah berlangsung dari tahun 1942-1945 akhirnya berakhir. Hal ini didahului jatuhnya bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada tanggal 8 dan 14 Agustus 1945. Akhirnya pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945.

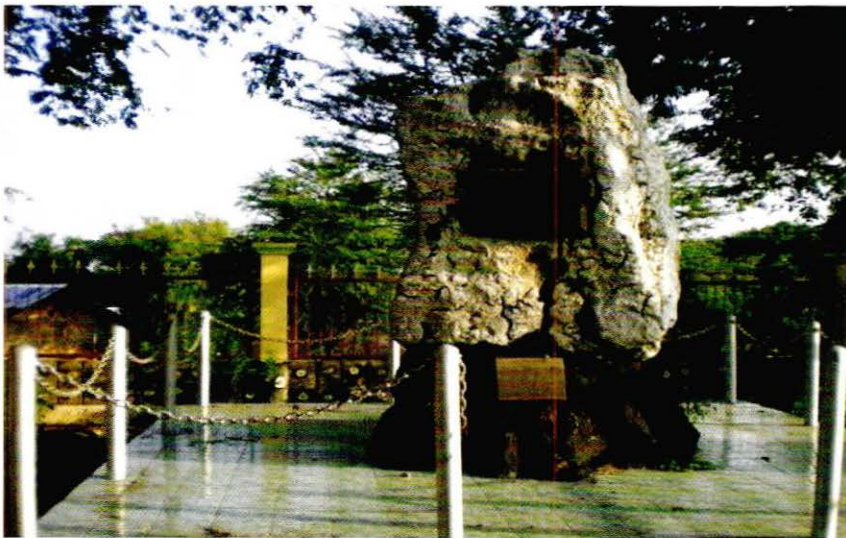
¹⁹⁴ Jill Jolliffe. 1978. East Timor, Nationalism and Colonialism. University of Queensland, Australia hal.45

¹⁹⁵ Tom Therik Gerzon. 1995. Wehali The Four Corner Land, Cosmology and Traditions of A Timorese Ritual Centre.. The Australian National University, hal. 24

¹⁹⁶ Tom Therik., Gerzon, 1995, hal. 24

¹⁹⁷ Doko.I.H. 1974. Hal.82.83

Pasukan-pasukan yang tergabung dalam AFNEI hanya bertugas di Sumatra dan Jawa. Sedangkan pendudukan daerah Indonesia selebihnya termasuk pulau Timor diserahkan kepada Angkatan Perang Australia. Pasukan Australia mendarat di Kupang pada tanggal 11 September 1945 dibawah komando Jendral Sir Thomas Blamey. Setelah mendarat segera dilakukan pelucutan senjata pasukan Jepang dan mengambil alih pemerintahan sipil. Sejak itu berakhirilah masa pendudukan Jepang. Setelah pemeritahan pendudukan Jepang diambil alih, maka pemerintahan sipil Belanda (NICA) yang membonceng tentara Sekutu akhirnya kembali mengambil alih pemerintahan di bekas wilayah jajahan termasuk di residensi Timor. Penyerahan secara langsung kekuasaan Jepang kepada Sekutu dilakukan di dua tempat yakni di Kupang dan di Dili. Serah tima dilakukan diatas deck kapal perang HMAS Morseby di Kupang tanggal 11 September 1945 dan di Dili tanggal 23 September 1945. Pihak Sekutu diwakili Brigadir Jendral Lewis Dyke. Dengan diserahkan kekuasaan Jepang pemulihan kekuasaan baik di Kupang maupun di Dili. Gubernur Ferraira de Carvalho kembali memimpin Propinsi Timor Portugis.¹⁹⁸



Gambar 3.26 Monumen Perang Dunia II di Oesao

¹⁹⁸ Barros, Jorge Duarte 1984 hal. 128



Gambar 3.27
Monumen Tugu Jepang di Aerbaru



Gambar 3.28
Meriam Australia



Gambar 3.29
Perlucutan senjata Jepang di Kupang



Gambar 3.30 Kuburan Tentara Australia di
Kupang

**BAB 4 | Perbatasan Negara
Republik Indonesia dan
Timor leste**



4.1 Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste Tahun 1945 - 1975

Salah satu persyaratan berdirinya sebuah Negara atau bangsa adalah memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Batas-batas wilayah tersebut harus diakui oleh Negara-negara lain, terutama harus diakui oleh Negara-negara di sekelilingnya. Dalam menentukan batas-batas Negara terkadang menimbulkan konflik dengan negara tetangganya karena saling mengklaim wilayah perbatasan. Untuk itu dalam menentukan garis perbatasan perlu dikelola secara baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Pulau Timor dijajah oleh dua bangsa barat, yaitu Timor bagian barat dijajah oleh Belanda, sedangkan Timor bagian timur dijajah oleh Portugis. Agar tidak terjadi peperangan antara kedua bangsa kolonial itu mereka telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian yang memiliki sejarah yang panjang. Pada bab III ini akan membahas mengenai perjanjian perbatasan yang dilakukan oleh Belanda dan Portugis.

Sebelum menjelaskan mengenai perjanjian yang telah dilakukan oleh Belanda dan Portugis, perlu diperjelas pengertian dari istilah perbatasan. Secara sederhana perbatasan dapat diartikan sebagai suatu unit legal-politis yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus strategis bagi suatu Negara.¹ Dalam konteks pemahaman seperti ini perbatasan memiliki fungsi militer strategis, ekonomis, konstitutif, identitas, kesatuan nasional, pembangunan Negara, dan kepentingan domestik.²

Berkaitan dengan fungsi militer strategis, perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer strategis suatu Negara terutama pembangunan sistem pertahanan laut, darat, dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal. Dalam hal ini suatu negara harus memiliki kekuatan nasional untuk menangkal setiap kemungkinan serangan dari negara luar. Untuk itu perlu memiliki personil yang profesional, persenjataan yang memadai serta system dan strategi pertahanan yang tepat.

Berkaitan dengan fungsi ekonomi, perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu di mana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar negara, investasi asing, dan pergerakan barang antar negara. Fungsi ekonomis perbatasan juga memberikan patokan bagi suatu negara untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber alam secara legal pada wilayah tertentu.

Berkaitan dengan fungsi konstitutif, berdasarkan konsep hukum internasional modern suatu negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefiniskan dengan jelas. Artinya perbatasan menetapkan posisi konstitutif negara tertentu di dalam komunitas internasional. Suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah yang merupakan teritorialnya sebagaimana ditetapkan oleh perbatasan yang ada.

¹ Jean, Marc F. Blanchard, *Linking Border Disputes and War, An Institutional Statist Theory*, Geopolitics, No 10, 2005, hal 691.

² Wuryandari, Ganewati, dkk, 2009. *Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste, sumber ancaman dan pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Berkaitan dengan fungsi identitas nasional, perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritorial tertentu. Kesamaan pengalaman dan sejarah, secara langsung maupun tidak langsung, telah mengikat masyarakat secara emosional untuk mengklaim identitas dan wilayah tertentu. Fungsi persatuan nasional terkait dengan pembentukan identitas nasional, perbatasan ikut menjaga persatuan nasional. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional, para pemimpin negara biasanya mengkombinasikan simbol dan jargon dengan konsep teritori dan perbatasan. Konsep-konsep geopolitik seperti kekuatan maritim dan kekuatan darat biasanya dipakai untuk mendorong warga agar mejadi persatuan dan kesatuan nasional.

Berkaitan dengan fungsi pembangunan suatu negara, perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan negara-bangsa karena memberikan kekuatan bagi negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan simbol-simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama secara normatif maupun kultural.

Fungsi pencapaian kepentingan domestik, perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, social, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi, dan sebagainya. Perbatasan juga menetapkan sampai sebatas mana Negara dapat melakukan segala upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya.³

Berbicara mengenai perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, harus mengawalinya dengan pembahasan sejarah Pulau Timor. Sebelum kedatangan bangsa barat di Pulau Timor dikuasai oleh sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Wesei Wehali yang berpusat di Laran Betun Belu bagian Selatan. Wilayahnya mencakup seluruh pulau Timor. Kerajaan Wesei Wehali membawahi banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Pulau Timor. Kerajaan Wesei Wehali berhasil dihancurkan oleh ekspedisi yang dilancarkan oleh Portugis di bawah pimpinan Fransisco Fernandes pada tahun 1641. Setelah Wesei Wehali berhasil dihancurkan oleh Portugis maka pecahan dari Kerajaan Wesei Wehali berdiri banyak kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Pulau Timor. Kerajaan-kerajaan kecil tersebut dengan gampang dikuasai oleh Portugis dan Belanda. Timor bagian barat dikuasai oleh Belanda, sedangkan Timor bagian timur dikuasai oleh Portugis. Untuk kepentingan penjajah Belanda dan Portugis seenaknya mereka membagi dua Pulau Timor, dengan batas-batas yang kurang jelas. Untuk membuat perbatasan yang agak jelas membutuhkan waktu yang panjang untuk merumuskannya.

Belanda dan Portugis sangat berkepentingan atas Pulau Timor. Pulau Timor menghasilkan komoditi dagang yang sangat penting yaitu kayu cendana. Kayu cendana

³ Wuryandari, Ganewati, dkk, 2009. Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste, sumber ancaman dan pengelolaannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

pada waktu itu menjadi komoditi dagang yang istimewa. Perdagangan kayu cendana membawa keuntungan besar bagi bangsa yang memperdagangkannya. Hal itulah yang menarik Belanda dan Portugis untuk berkuasa di Pulau Timor.

Berdasarkan dokumen peta yang dibuat Rui de Brito menyebutkan Portugis mendarat pertama kali di Pulau Timor pada tanggal 6 Januari 1514. Namun perdagangan cendana baru dimulai tahun 1535 dan 1556.⁴ Berdasarkan bukti tertua yakni sebuah Tugu Monumen di muara sungai Lifao yang didirikan oleh Portugis, diketahui bahwa Portugis telah terlibat dalam pertempuran dengan raja lokal yang dibantu raja dari Alor sehingga beberapa padre tewas. Untuk itu dibuat sebuah monumen di Lifao pantai utara pulau Timor pada tanggal 18 Agustus tahun 1515.⁵ Berdasarkan pendapat di atas bahwa mulai sejak tahun 1515 Portugis telah melakukan aktivitas politik di Pulau Timor. Aktivitas politik Portugis tersebut mendapat perlawanan keras dari rakyat Timor.

Bangsa Barat berikutnya yang datang ke Pulau Timor adalah bangsa Belanda. Pada tahun 1613 Belanda berhasil merebut benteng Portugis di Pulau Solor. Pada tahun itu juga armada Belanda mengunjungi Kupang. Pada tanggal 2 Februari tahun 1653 Belanda berhasil merebut Kupang dari tangan Portugis. Sejak saat itu Belanda memiliki kedudukan tetap di Kupang.⁶ Kehadiran Belanda di Pulau Timor mendapat perlawanan sengit dari raja-raja pedalaman Pulau Timor. Belanda tidak pernah tidur nyenyak karena selalu diserang oleh Kerajaan Amarasi yang bersekutu dengan Portugis Hitam. Desa-desa yang terletak di sekitar Kupang diserang oleh Amarasi. Belanda berusaha untuk membalas serangan Amarasi dengan menugaskan Arnold de Vlaming melakukan ekspedisi sebanyak dua kali untuk menundukkan Kerajaan Amarasi.

Selama berada di Pulau Timor antara Belanda dan Portugis selalu bermusuhan. Puncaknya adalah pada tahun 1749 di mana raja-raja pedalaman Pulau Timor membantu Portugis untuk menyerang kedudukan Belanda di Kupang. Serangan Raja-raja Timor yang bersekutu dengan Portugis dihadapi di Penfui sehingga terjadilah perang besar yang dikenal dengan Perang Penfui tahun 1749. Dalam perang itu Belanda berhasil mengalahkan lawannya.

Seusai perang Penfui Belanda mengirimkan Comisaris yang bernama Paravicini untuk mengadakan kontrak dengan raja-raja pribumi di Pulau Timor dan sekitarnya, serta mengadakan perjanjian perbatasan dengan Portugis pada tahun 1755. Belanda dan Portugis menanda tangani Contract of Paravicini tahun 1755 yang membagi Pulau Timor menjadi dua bagian, yaitu Bagian Barat (yang berpusat di Kupang) menjadi milik Belanda, dan bagian Timur (yang berpusat di Dili) menjadi milik Portugis.⁷

⁴ Rui de Brito, 1970. Timor Pequena Monografia.

⁵ Widiyatmika, Munandjar 2007. Lintasan Sejarah Bumi Cendana. Kupang: Pusat Pengembangan Madrasah. 180

⁶ Widiyatmika, Munandjar 2007. Lintasan Sejarah Bumi Cendana. Kupang: Pusat Pengembangan Madrasah hal. 212.

⁷ Lamoureux, Flo, 2004. East Timor: the World Newest Country. Makalah yang tidak diterbitkan, Centre for Southeast Asian Studies: University of Hawaii at Manoa, Hal. 8.

Walaupun keduanya telah menanda tangani kontrak, tetapi penetapan tapal batas tidak pernah dinegosiasikan secara jelas. Kontrak Paravicini hanya menyebutkan bahwa Timor dibagi menjadi dua bagian saja, tanpa menyebutkan detail tapal batas yang ada.⁸

Perjanjian Paravicini yang tidak jelas tersebut tidak memecahkan masalah perbatasan antara daerah yang dikuasai Belanda dan Portugis. Untuk itu Belanda dan Portugis melakukan perundingan lanjutan pada tahun 1846, menghasilkan kesepakatan di mana Portugis mempertukarkan wilayah Flores (yang tadinya merupakan wilayah kekuasaannya) dengan sebuah daerah *enclave* di pantai Utara, yang kini dikenal dengan nama Oecusse (Oekusi) serta dua pulau kecil di lepas pantai Utara yakni Atauro dan Jaco.⁹

Pada tahun 1850 hingga 1859 Belanda dan Portugis melakukan perundingan-perundingan intensif untuk membahas garis batas antara Timor Barat dan Timor bagian Timur. Perjanjian tapal batas baru ditandatangani dalam bentuk Treaty di Den Haag, tahun 1859. Namun demikian penetapan tapal batas yang benar-benar pasti belum dapat dilakukan, mengingat kedua belah pihak masih tidak menyepakati detail tapal batasnya. Dalam perjanjian di Den Haag tersebut Portugis masih bertahan pada pendiriannya yaitu tidak mau melepas daerah *enclave*-nya yang berada di Timor Barat seperti *enclave* Noemuti dan *enclave* Oecussi. Perjanjian Den Haag tersebut sesungguhnya tidak mendefinisikan suatu proses demarkasi dalam pengertian modern. Perjanjian ini lebih menyangkut pada upaya melakukan delimitasi secara umum tentang perbatasan internasional dengan berdasarkan pada wilayah darat yang kebetulan berada dibawah kekuasaan Portugis dan Belanda. Namun demikian, hal penting yang perlu dicatat dalam perjanjian ini adalah adanya penetapan Timor Barat dan Timor Timur sebagai daerah yang terpisah.

Pada 1859 Portugis dan Belanda melakukan lagi perjanjian yang diselenggarakan di Lisabon Portugis. Dalam perjanjian Lisabon tersebut ditetapkan: Pasal 1 menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan yang berada di Timor Barat merupakan milik Belanda, dan kerajaan-kerajaan di Wilayah Timor Timur merupakan milik Portugis. Pasal 2 menyebutkan Belanda masih menguasai daerah *enclave* Maucatar (Calunie) di wilayah sebelah timur garis perbatasan, sedangkan Portugis menguasai *enclave* Oecusse di wilayah sebelah barat perbatasan. Pasal 4 memuat ketentuan bahwa Portugis mengakui kedaulatan Belanda disejumlah kerajaan di wilayah timur. Sebaliknya Belanda juga menyatakan pengakuannya atas kedaulatan Portugis di Kerajaan Moubara (Maubara), dan daerah Ambenu (Sutrana) yang sudah sejak lama selalu mengibarkan bendera Portugis. Pasal 5 Belanda memberikan wilayah Pulau Kambing kepada Portugis. Pasal 6 menyebutkan Portugis mengakui kedaulatan Belanda disejumlah kerajaan wilayah Timor Timur seperti yang diatur dalam Pasal 8. Pasal 9 memuat ketentuan tentang

⁸ Wuryandari, Ganewati, dkk 2009, Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, hal. 68.

⁹ Nicol, Bill, 2002. Timor: a Nation Reborn. Singapura: Equinox Publishing.

pembayaran dari pihak Belanda sebesar 200.000 Florin Belanda (mata uang Belanda pada saat itu) kepada pihak Portugis sebagai kompensasi pengakuan Portugis atas kedaulatan Belanda disejumlah kerajaan di wilayah Timor Timur.¹⁰

Di samping perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Belanda dan Portugis juga membuat konvensi-konvensi lain yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan demarkasi perbatasan Timor Timur dan Timor Barat. Konvensi yang disebut dengan istilah *Convention to Regulate the Most Vavourable Conditions for the Development of Civilization and Trade in the Dominions on the Solor and Timor Archipelago and the Relevant Declaration*, yang ditanda tangani di Lisabon, yaitu masing-masing pada 10 Juni dan 1 Juli 1893 dan diratifikasi pada 31 Januari 1894.

Pasal 1 Konvensi tersebut menyatakan pentingnya demarkasi, yaitu sebagai berikut: *In order to enable them to exercise their sovereignty rights, the higher contracting parties deem it necessary to establish the demarcation of their dominions on the island of Timor in clearer and more accurate manner, and to do awl with the existing enclaved territories*. Pasal 2 menjelaskan tentang proses demarkasi Pulau Timor yang akan dilakukan dengan cara membentuk komisi ahli bersama, yang bertugas untuk menformulasikan proposal demarkasi yang akan disepakati bersama oleh Parlemen masing-masing Negara. Pasal 7 mengatur hal penting yang menyangkut kemungkinan dilakukannya arbitrase, jika kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam penentuan garis batas dan persoalan antar koloni yang kemungkinan akan terjadi di Timor. Bila hal itu terjadi, maka sebuah Komisi Arbitrase akan segera dibentuk yang terdiri dari orang-orang dalam jumlah yang seimbang dan dipilih oleh lembaga tinggi di Belanda maupun Portugis.

Ketentuan tentang arbitrase lebih lanjut diatur di dalam perjanjian lain, yakni *An Agreement by Exchange of Diplomatic Notes Regarding the Composition of Any Arbitrational Commission to Which Rescource May be Requered Throughout the Period of Validity*, yang dilakukan pada 19 Februari 1895. Nota Diplomatik ini, secara tegas menyatakan bahwa jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai hal tertentu, maka keputusan harus dilakukan melalui sebuah *joint agreement* untuk mengangkat arbitrator ketiga yang pada gilirannya bertugas mengambil keputusan.¹¹

Rangkaian proses persetujuan antara Belanda dan Portugis berlanjut pada tahun 1898 dan 1899 ketika kedua Negara mencapai kesepakatan penetapan garis batas di hampir seluruh daerah yang dipersengketakan. Ada satu *enclave* yang berhasil disepakati yakni *enclave* Oecusse yang hingga saat ini masih dalam kondisi *status quo* di bawah kekuasaan Portugis. Sempat terjadi kegelisahan di antara pemimpin-pemimpin lokal di bagian timur Oecusse, sehingga menyebabkan beberapa bagian

¹⁰ Deeley, Neil 2001. *The International Boundaries of East Timor. Boundary and Territory Briefing*, 3 (5), hal. 5.

¹¹ Deeley, Neil 2001. *The International Boundaries of East Timor. Boundary and Territory Briefing*, 3 (5), hal. 6.

dari daerah tersebut tidak dapat disurvei hingga tahun 1899. Terlepas dari gangguan tersebut, kedua negara bersepakat untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Den Haag pada tanggal 23 Juni 1902. Pada tanggal 3 Juli 1902 para delegasi berhasil merumuskan draf perjanjian untuk disetujui oleh masing-masing Negara. Maka pada tanggal 1 Oktober 1904, sebuah konvensi bernama *A Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor*, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Den Haag, yang kemudian dilanjutkan proses ratifikasi secara serentak (oleh pihak Portugis dan Belanda) pada tanggal 29 Agustus 1908.

Ada beberapa hal penting yang diatur di dalam Konvensi 1904 tersebut. Pasal 1 misalnya menyatakan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatannya di daerah *enclave* Maucatar (Timor Timur) kepada Portugis. Sementara itu Pasal 2 menyatakan bahwa sebagai balasan Portugis menyerahkan wilayah Timor Bagian Tengah, Tahakay dan Tamiru Ailala, kepada Belanda. Di samping itu Portugis juga menyerahkan kedaulatannya di wilayah bagian selatan Oecusse, yakni Noemuti, kepada Belanda. Pasal 3 mengatur secara detail tentang delimitasi di wilayah *enclave* Oecusse. Pada bagian akhir pasal ini menyebutkan bahwa bagian timur laut perbatasan (daerah yang belum sempat disurvei tahun 1898-1899) akan dilakukan pengukuran dan penetapan tapal batas pada kesempatan pertama (*to be measured and marked out on the territory at the earliest possible opportunity*).¹²

Konvensi yang ditandatangani pada tahun 1904 inilah yang dianggap sebagai perjanjian legal yang telah menyelesaikan berbagai perbedaan seputar masalah perbatasan wilayah jajahan antara Belanda dan Portugis di Pulau Timor. Namun hingga beberapa tahun kemudian beberapa daerah yang tidak sempat disurvei (termasuk daerah Oecusse) masih sibuk dibicarakan oleh tim khusus yang dibentuk oleh kedua Negara. Pada Juni 1909, misalnya Komisi Perbatasan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda dan Portugis tiba dibagian timur *enclave* Oecusse dengan tugas untuk mengukur dan menentukan tapal batas. Tetapi mereka gagal mencapai kata sepakat dalam menentukan tapal batas khususnya di daerah yang disebutkan di dalam Pasal 3 Konvensi 1904. Tim ini juga telah mensurvei daerah sungai Noel Meto, tetapi penetapan tapal batas tetap tidak berhasil dilakukan. Salah satu alasannya adalah topografi tepian sungai yang bertebing sehingga tidak memungkinkan tim untuk turun ke sungai. Maka yang dapat mereka lakukan adalah meletakkan tapal batas di pinggiran sungai.

Kegagalan untuk menetapkan tapal batas di atas, kemudian membawa Belanda dan Portugis ke Peradilan Internasional. Pada 3 April 1913, Belanda dan Portugis menanda tangani konvensi berisi tentang kesepakatan mereka untuk membawa kasus sengketa perbatasan ini ke *Permanent Court of Arbitration* (Pengadilan Arbitrasi) di Paris. Dalam keputusannya pada 26 Juni 1914 Pengadilan Arbitrasi memutuskan untuk

¹² Deeley, Neil 2001. *The International Boundaries of East Timor. Boundary and Territory Briefing*, 3 (5), hal 9.

memenangkan klaim Belanda atas daerah-daerah yang masih dipersengketakan.¹³

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa perbatasan dan Timor Barat dan Timor Leste ditetapkan melalui serangkaian konvensi yang tidak saja melibatkan Belanda dan Portugis, tetapi juga pihak ketiga yakni Pengadilan Arbitrasi yang berkantor di Paris. Di samping itu nampak bahwa penetapan perbatasan antara kedua wilayah koloni tersebut merupakan proses panjang yang memakan waktu lama. Garis batas yang ditetapkan dalam konvensi tahun 1904 dan penetapan Pengadilan Arbitrasi pada tahun 1914 dipakai terus oleh Belanda dan Portugis sampai tahun 1945 ketika Indonesia merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan. Wilayah yang diklaim sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Garis batas yang dijadikan sebagai perbatasan untuk memisahkan dengan negara tetangga adalah garis perbatasan yang telah dibuat oleh Belanda. Khususnya diperbatasan Timor Barat dengan Timor Portugis tetap mempertahankan hasil konvensi tahun 1904 dan Keputusan Pengadilan Arbitrasi di Paris tahun 1914. Hal ini berlangsung sampai tahun 1976 ketika pemerintah Republik Indonesia dan sebagian rakyat Timor Timur berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka masalah perbatasan antara Timor Barat dengan Timor Portugis sering menimbulkan masalah. Masalah tersebut disebabkan beberapa bagian wilayah perbatasan (khususnya yang menyangkut tepian sungai) telah mengalami berbagai perubahan topografi, sebagai akibat faktor alam. Selain itu beberapa patok penanda yang dipakai dalam pengukuran sebelumnya, ternyata tidak bisa dipakai dalam pengukuran berikutnya karena hilang atau tertimbun tanah. Belum lagi persoalan tukar guling secara adat yang dilakukan penduduk terhadap tanah garapan, yang membuat makin sulitnya untuk menerapkan secara kaku garis batas sesuai dengan konvensi 1904.

4.2 Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste tahun 1975 - 1999

Tahun 1974 hingga 1976 terjadi beberapa peristiwa penting di wilayah Timor Portugis. Peristiwa-peristiwa tersebut seperti terjadi Revolusi Bunga Merah, berdirinya partai-partai politik, pernyataan kemerdekaan oleh Fretelin, perang saudara, larinya Pemerintah kolonial Portugis di Timor Timur, Deklarasi Balibo, keterlibatan Indonesia dalam masalah Timor Timur. Peristiwa-peristiwa tersebut mengantarkan sebagian rakyat Timor Timur menyatakan untuk berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagian lagi meneruskan perjuangan untuk melawan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Ketika Timor Timur

¹³ Wuryandari, Ganewati, 2009. Keamanan di Perbatasan Indonesia – Timor Leste, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 73.

berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Timor Timur menjadi bagian integral dari wilayah Republik Indonesia. Wilayah Timor Timur dijadikan sebagai Propinsi yang 27. Masalah perbatasan menjadi tidak relevan lagi. Batas wilayah perbatasan yang dibuat Belanda dengan Portugis tahun 1904 menjadi batas Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Propinsi Timor Timur. Namun proses berintegrasinya Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia menempuh proses yang panjang dan rumit. Untuk itu perlu dijelaskan peristiwa-peristiwa bersejarah yang melatar belakangi integrasi Timor Timur dengan Indonesia.

4.2.1 Revolusi Bunga Merah

Perkembangan politik di Timor Timur pada zaman penjajahan Portugal tidak lepas dari situasi politik yang terjadi di Lisbon. Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh perwira muda dalam wadah *Movimento das Forças Armadas (MFA)* dengan nama sandi *Revolucion dos Trabouos Vermelhos* atau Revolusi Bunga Merah pada tanggal 25 April 1974. Revolusi tersebut berhasil menumbangkan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu..

Perubahan politik yang terjadi banyak berpengaruh terhadap perkembangan politik di Timor Portugal, terutama dalam proses Dekolonisasi. Dua jenderal masing-masing Jenderal De Spínola dan Jenderal Da Costa yang ikut serta dalam perebutan kekuasaan, telah melahirkan proses Dekolonisasi itu. Hal ini disebabkan pengalaman pahit yang dialami perwira muda yang bertempur langsung menghadapi para pejuang di daerah jajahan Portugal di Afrika.¹⁴ Jenderal De Spínola yang pernah menjadi panglima pasukan Portugal di Guineau Bissau. Ia menyadari perang kolonial yang dilancarkan di daerah jajahan tidak menunjukkan titik terang untuk mencapai kemenangan. Sebaliknya Portugal harus menanggung biaya perang yang besar dalam waktu yang berlarut-larut.

Dalam masa penjajahan Portugal sebelum berlangsungnya Revolusi Bunga Merah, di Timor Portugal hanya diijinkan berdiri satu partai, yaitu *Partido Uniao Nacional* atau Uni Partai Nasional yang merupakan alat kolonial. Partai ini kemudian berubah nama menjadi *Action Nacional Popular (ANP)* atau Aksi Nasional Rakyat yang didirikan oleh Ir. Mario Carrascalao, seorang kepala jawatan Pertanian dan Kehutanan. Partai *Action Nacional Popular (ANP)* dibubarkan oleh pemerintah baru Portugal, karena dianggap sebagai alat rezim lama. Lahirnya pemerintah baru Portugal telah membawa perubahan di Timor Portugal dengan diijinkannya pembentukan multi partai.

4.2.2 Penentuan Nasib Sendiri

Rakyat Timor Portugis yang sudah sejak tahun 1515 berada di bawah cengkeraman dan belenggu penjajah Portugis memperoleh harapan baru setelah terbentuknya pemerintahan baru Portugal sebagai hasil Revolusi Bunga. Harapan baru tersebut

¹⁴ Subroto, Hendro, 1997. Saksi mata perjuangan integrasi Timor Timur: Jakarta: Sinar Harapan, hal. 15-16.

berupa diperbolehkannya penentuan nasib sendiri rakyat Timor Portugis. Penentuan nasib sendiri rakyat Timor Portugis berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541 tahun 1960 memberikan tiga pilihan bagi masa depan politik Timor Portugis, yaitu:

- a. Menjadi suatu wilayah otonom dalam federasi dengan Portugal, menuju ke merdeka sendiri secara progresif.
- b. Langsung merdeka sendiri secara *de jure* sebagai negara berdamai.
- c. Merdeka melalui integrasi dengan Republik Indonesia secara *de facto* dan *de jure*.

Mulai saat itu berdirilah beberapa partai politik di Timor Portugal dengan platform partai yang berbeda-beda. Ada partai yang menghendaki kemerdekaan penuh tanpa tergantung pada negara lain, ada partai yang menghendaki berintegrasi dengan Indonesia, dan ada juga partai yang menghendaki kemerdekaan secara bertahap sampai rakyat Timor Timur betul-betul siap untuk membentuk pemerintahan sendiri.

4.2.3 Berdirinya Partai Partai Politik

Dalam rangka pelaksanaan proses dekolonisasi, pemerintah Portugal memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Portugal untuk membentuk partai-partai politik. Peluang ini tidak disia siakan oleh tokoh-tokoh masyarakat Timor Portugis sehingga secara cepat wilayah tersebut tumbuh dan berkembang. Sejalan dengan penjelasan di atas proses dekolonisasi ini disambut di Timor Portugis dengan pembentukan partai-partai politik, masing-masing dengan aspirasinya sendiri.¹⁵ Lima partai politik yang dibentuk adalah :

4.2.3.1 UDT (Uni Demokratik Timor)

Partai *Uni Demokratik Timor* (UDT) didirikan pada tanggal 11 Mei 1974 oleh 23 orang. Tiga orang di antaranya ialah mantan anggota partai ANP. Francisco Xavier Lopes da Cruz seorang pribumi yang berpangkat Letnan I Angkatan Darat di Timor Portugal dipilih menjadi Ketua Partai, dan Domingos Oliveira sebagai Sekretaris Jenderal. UDT sebagaimana dilaporkan Pemerintah Portugis sebagai penguasa administratif kepada PBB serta diakui oleh para pengamat independen, merupakan partai besar di antara partai-partai lainnya karena mewakili lebih dari 50% jumlah penduduk Timor Portugis.

Pada awalnya, UDT merupakan partai politik terbesar di koloni. Dukungan terhadapnya datang dari pejabat teras pegawai pemerintahan, berbagai kepala suku yang bertugas sebagai pegawai daerah, para penduduk yang masih setia kepada Portugis, pengusaha Cina, dan komunitas Portugis di Timor. Meskipun partai ini terus berubah posisinya, khususnya dalam hal menentukan waktu yang tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri dan kemudian merdeka, pada dasarnya ia merupakan

¹⁵ Komisi kebenaran dan persahabatan Indonesia Timor Leste, 2008, *Per Memoriam Ad Spem*. Denpasar.

partai yang berpandangan anti komunis. Hal ini dibenarkan oleh Dominggus Olivera ketika ia berpendapat bahwa ideologi UDT didasarkan pada realitas-realitas Negara itu. Kita, katanya, tidak bisa mengimpor ideologi negara-negara lain ke Timor. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah belajar dari pengalaman mereka sendiri.¹⁶

UDT mula-mula menghendaki suatu federasi dengan Portugal sebagai dasar untuk menuju suatu kemerdekaan secara progresif. Tetapi kemudian partai ini berdasarkan watak demokratiknya dan mempertimbangkan aspirasi mayoritas rakyat mendukung integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Portugal secara tidak bertanggungjawab melarikan diri dari Timor Portugis yang sedang dilanda perang saudara.¹⁷

Pimpinan yang sangat berpengaruh dari Partai UDT adalah Mario Carrascalao, yang dalam perjalanan partai membentuk aliran tersendiri. Meskipun menyatakan bersahabat dengan Portugis, tetapi ia punya visi bahwa rakyat harus menentukan nasibnya sendiri. Anggota inti lainnya dari UDT adalah Fransisco Lopez da Cruz, Dominggus de Olivera, dan Caesar Augusto da Costa Mousinho, serta Joao Carascalao. Mereka juga menganut aliran politik yang berbeda, meski tetap terbungkus dengan rapi. Caesar Augusto da Costa Mousinho misalnya lebih condong pada sikap status quo. Sementara Dominggus da Olivera lebih suka jika Timor Timur berfederasi dengan Portugis. Apa pun nama Carascalao lebih menonjol ketimbang yang lainnya. Sikap partai ini lebih adaptif, atau mungkin lihat-lihat angin. Suatu ketika berkolaborasi dengan Fretelin, tetapi pada saat lain justru membuat jarak yang tegas. Walaupun begitu ruh partai ini sebagaimana manifestonya adalah berintegrasi dengan Portugis.¹⁸

4.2.3.2. Fretilin (*Frente Revolucionariade Timor Leste Independente*)

Partai Fretilin atau Front Radikal Timor Merdeka, sebelumnya adalah *Associao Social Demoratica de Timor (ASDT)*. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1974. Pada tanggal 20 September 1974 berubah nama menjadi *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Fretilin). Inilah partai politik yang radikal, berhaluan keras dan gesit. Partai ini setelah berubah nama menisbikan keberadaan partai-partai lainnya.¹⁹ Partai yang condong ke kiri ini diketuai oleh Francisco Xavier do Amaral, seorang pejabat Bea dan cukai Dili, mantan informan Polisi Rahasia Portugal di Timor. Jabatan Sekretaris Jenderal Presidium dipegang oleh Alarico Jorge Fernandez. Tujuan Partai Fretilin adalah memperjuangkan kemerdekaan secara penuh tanpa tergantung dari negara mana pun.

Fretilin makin bergeser ke kiri setelah kedatangan lima orang mahasiswa berhaluan komunis aliran Maoist yang datang ke Timor Portugal dari Lisabon bulan

¹⁶ Nicol, Bill, 2002. *Timor: a Nation Reborn*. Singapura: Equinox Publishing, hal 7.

¹⁷ Fransisco X Lopez da Cruz, 1999. Status kewarganegaraan Indonesia masyarakat eks Timor Timur pasca jajak pendapat ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 (Makala). Kupang, hal 7.

¹⁸ Jasmi, Khairul, 2002. Eurico Guterres melintas badai politik Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, Hal. 22.

¹⁹ Jasmi, Khairul, 2002. Eurico Guterres melintas badai politik Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, Hal. 22.

Agustus 1974 untuk mengelola partai itu. Mereka adalah Abilio Concaicao Araujo Abrantas, Francisco Borges da Costa, Antonio Duarte Cavarino, Vinancio Gomez, dan Hamis Bassarewan.

Abilio Concaicao Araujo Abrantas yang menjabat Menteri Perekonomian dan Sosial pada apa yang menamakan dirinya Pemerintah Republik Demokrasi Timor Timur, melarikan diri ke Australia bersama Jose Manuel Ramos Horta yang menjabat menteri Luar Negeri, satu atau dua hari sebelum Dili dibebaskan. Nicaolau Lobato, Perdana Menteri yang kemudian melakukan perebutan kekuasaan terhadap Presiden dan Antonio Duarte Cavarino yang menjabat sebagai Menteri Peradilan Sosial, akhirnya tewas sebagai Gerombolan Pengacau Keamanan Timor Timur.²⁰

4.2.3.3. APODETI (*Associacao Popular Democratica de Timor*)

Apodeti atau Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor didirikan pada tanggal 27 Mei 1974. Pendirinya adalah Fernando Osorio Soares, Arnaldo Dos Reis Araujo, Hermenegildo Martins, Casimiro dos Reis Araujo. Sebelumnya dikenal sebagai *Associacao Integracao de Timor Indonesia* (AITI) atau Perhimpunan Integrasi Timor Indonesia. Apodeti didirikan oleh para tokoh pribumi yang melakukan pemberontakan di Lospalos 1945 – 1949 dan pemberontakan Viqueque 1959. Di antara para tokoh itu ialah Arnaldo Dos Reis Araujo seorang mantan guru sekolah yang kemudian dipilih menjadi Ketua Partai. Jabatan Sekretaris Jenderal partai dipegang oleh Jose Fernando Osorio Soares. Sebelum mendirikan partai APODETI, Jose Fernando Osorio Soares turut pula mendirikan ASDT bersama beberapa orang pemimpin partai di Timor Portugis pada waktu itu. Pada waktu penyusunan Anggaran Dasar ASDT, beberapa butir usulan dari J. Fernando Osorio Soares ditolak untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar partai. Butir-butir yang ditolak berbunyi : (1) pelajaran bahasa Indonesia diwajibkan di seluruh Sekolah Dasar di Timor Portugis; (2) perjuangan kemerdekaan untuk Timor Portugis harus dibantu oleh pemerintah Indonesia dan Australia; dan (3) apabila kemerdekaan untuk Timor Portugis tidak dapat dicapai dengan mayoritas keinginan rakyat Timor Portugis, maka suatu integrasi dengan Republik Indonesia adalah hal yang perlu dipikirkan.²¹

Pada saat berdirinya APODETI, ditanda tangani pula Manifesto Partai oleh Sekjen Partai, J. Fernando Osorio Soares dan Presiden Partai Arnaldo dos Reis Araujo. Isi Manifesto Politik Partai APODETI antara lain: (1) Suatu integrasi otonom ke dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum internasional; (2) Perlu diajarkan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah menengah, serta perlunya dibuka Sekolah-sekolah Dasar berbahasa Indonesia tanpa dihapuskannya sekolah-sekolah Portugis yang sudah ada; (3) Hak serta kebebasan esensi manusia;

²⁰ Neonbasu, P.G. 1997. Peta Politik dan dinamika pembangunan Timor Timur. Jakarta: Yansense Mitra sehati.

²¹ Jasmi, Khairul, 2002. Eurico Guterres melintas badai politik Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, hal 22-23

(4) Pembagian anggaran yang adil oleh pemerintah; (5) Pemberian pekerjaan yang adil dengan penetapan gaji minimum; (6) Hak mogok kaum pekerja sebagai hak yang sah; (7) Pendidikan dan bantuan kesehatan gratis kepada segala lapisan masyarakat; (8) Kebebasan beragama dengan penghormatan khusus kepada gereja Katolik yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menyangkut kemanusiaan, jika mungkin dapat dibantu karena doktrinnya mengkonsolidasi sosial politik APODETI; (9) Kebebasan berpikir, serta mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab; (10) Pemilihan dengan pemberian suara langsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan; (11) APODETI menentang secara terbuka : (a) paktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan serta anti sosial dalam tangan para pejabat-pejabat pemerintah di dalam menentukan kaum pekerja, (b) korupsi serta tindakan memeras, (c) diskriminasi ras; dan (12) Syarat-sarat untuk menjadi anggota APODETI : (a) kelahiran Timor Portugis, baik yang berdiam di Timor Portugis ataupun di luar, (b) jika bukan kelahiran Timor Portugis haruslah menerima prinsip-prinsip partai dan ikut serta menyebarluaskan APODETI.

Dari butir-butir Manifesto Politik Partai APODETI menegaskan bahwa rakyat Timor Portugis secara konkrit : (1) Integrasi ke dalam masyarakat (bangsa) Indonesia; (2) Kebebasan keadilan sosial; dan (3) Integrasi yang berdasarkan hukum internasional berstatus propinsi otonom.

Anggaran Dasar APODETI pada Bab II Pasal 2 tentang Azas dan Tujuan partai dijelaskan bahwa partai APODETI berazaskan pada : (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Kesatuan kultur, genealogis, persamaan sejarah, dan persamaan nasib; (4) Permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial.

Tujuan Partai APODETI adalah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bagi rakyat Timor Portugis serta berintegrasi dengan Indonesia demi kesejahteraan rakyat Timor Portugis (Rusdi, dkk, 1997).

4.2.3.4 KOTA (Klibur Oan Timor Aswain)

Partai KOTA atau Kelompok Orang-orang Timor Pemberani didirikan pada tanggal 10 Nopember 1974, yang diketuai oleh Jose Martins. Partai KOTA bertujuan untuk menempatkan Liurai (Raja) sebagai pimpinan tradisional rakyat, karena ia dipilih dalam musyawarah rakyat sesuai dengan tradisi yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun. Partai KOTA akhirnya mendukung integrasi dengan Indonesia dan menanda tangani Petisi Integrasi bersama UDT di Batugade yang disampaikan kepada Presiden Suharto (Neonbasu, 1997).

4.2.3.5 PartidoTrabalhista atau Partai Buruh

Partai Trabalista didirikan pada bulan Oktober 1974, di ketuai oleh A.Abrao. Partai ini menghendaki bentuk kemerdekaan seperti *Commonwealth* di bawah naungan Portugal.

Partai UDT, KOTA, dan Tabalhistas akhirnya mendukung integrasi dengan Indonesia dan menandatangani Petisi Integrasi bersama UDT di Batugade pada tanggal 7 September 1975 yang disampaikan kepada Presiden Suharto. Apodeti tidak ikut menandatangani Petisi Integrasi bersama ketiga partai lainnya, karena sejak awal partai ini telah mencanangkan integrasi dengan Indonesia sebagai program utama partainya.

Mengingat bahwa Fretilin sebagai lawan yang dihadapi berhaluan komunis, maka Partai UDT, KOTA, dan Tralabista mendirikan *Movimento Anti Comunista* atau Komite Politik Gerakan Revolusioner Anti Komunis yang diketuai oleh Francisco Xavier Lopez da Cruz.

Dalam proses de kolonisasi dalam pemerintahan Otonomi Seberang Lautan Timor Portugal, maka pemerintah Lisbon merencanakan untuk menyelenggarakan Referendum yang semula akan dilakukan pada bulan Maret 1975. Referendum itu akhirnya tidak dapat terwujud disebabkan oleh terjadinya perubahan politik yang dilakukan oleh Gubernur baru Timor Portugal Kolonel Limos Pires, seorang anggota *Movimento* yang condong pada golongan sosialis. Ia menggantikan Gubernur lama Fernando Alves Aldeia pada bulan November 1974.

4.2.4 Perang Saudara

Sejak semula proses dekolonisasi tidak berjalan mulus disebabkan Fretilin yang menganggap dirinya sebagai satu-satunya wakil rakyat Timor Portugis dan tidak mengakui partai yang lain, tidak ingin memberikan kontribusinya bahkan mengganggu dan menghambat proses tersebut. Dengan dibantu oleh beberapa elemen komunis dalam pemerintahan Portugis dan diperkuat oleh unsur-unsur merah lainnya dalam tubuh Angkatan Bersenjata, Fretilin mulai melancarkan tindakan-tindakan intimidasi, gangguan dan teror terhadap anggota-anggota partai. Di samping itu Fretilin juga memboikot pertemuan tingkat tinggi di Macau, Juni 1975. Namun pertemuan yang diprakarsai oleh Portugal guna membicarakan peralihan kekuasaan secara damai tetap berjalan dengan partai yang lain tanpa kehadiran Fretilin.

Dalam perkembangan selanjutnya keadaan politik di Dili semakin buruk. Partai UDT dan Fretilin membentuk koalisi yang mengakibatkan partai Apodeti semakin terpojok. Pada tanggal 17 Mei UDT membubarkan koalisi secara sepihak, karena Fretilin makin jelas menganut paham komunis. Dalam tubuh UDT juga terjadi perpecahan antara UDT golongan pribumi dan golongan keturunan Portugal. Francisco Xavier Lopez da Cruz sendiri pernah ditangkap oleh Joao Carrascalao seorang keturunan Portugis yang menjabat sebagai Panglima Perang UDT. Lopez da Cruz dikenakan tahanan rumah. Carrascalao mengatakan kepada da Cruz dalam keadaan revolusi ketua UDT tidak perlu berbicara dengan rakyat. Panglima perang berbicara dengan rakyat.

Pada waktu Lopez da Cruz ditahan, maka dua kompi Tropaz masing-masing satu

kompil dari Lospalos, dan satu kompil lainnya dari Baucau yang semula bergabung dengan UDT, kemudian menyeberang berpihak pada Fretilin. Berbalikny dua kompil ini disebabkan mereka tidak mau berada di bawah pimpinan orang keturunan Portugis. Situasi berkembang makin gawat. Joao Carrascalao kurang mendapat dukungan dari anggotany. Akhirnya Lopez da Cruz terpaksa dibebaskan setelah seminggu dalam tahanan rumah.

Lopez kembali memimpin partainya dengan mendapat dukungan dari sebagian besar anggotany, terutama golongan pribumi. Pada tanggal 9 Agustus pukul 22,00 UDT menyerbu markas Polisi dan menahan komandanny. Dari hasil penyerbuan ini UDT mendapat senjata. Pada tanggal 10 Agustus UDT melakukan demonstrasi yang ditujukan kepada Fretilin dengan tema anti komunis. Para demonstran UDT juga menuntut kepada Gubernur agar para perwira yang menjadi pembantunya masing-masing Mayor Rodrigues de Mota, Kepala Kabinet Urusan Politik, Kapten Ramos Cavarinho Kepala Intelijen Militer dan Mayor Jonatas agar segera dipulangkan ke Lisabon, karena ketiga perwira itu adalah anggota Partai Komunis Portugal.

Toko-toko di Dili ditutup, dan kegiatan pelayanan masyarakat banyak berhenti.. Pada tanggal 10 Agustus lepas tengah malam yaitu pada pukul 01.00 UDT melakukan perebutan kekuasaan. Pasukan reguler di Dili menjadi terpecah belah. Sebagian berpihak kepada UDT, sebagian lainnya berpihak kepada Fretilin. Tembak menembak sporadis yang terjadi pada tanggal 15 Agustus berkembang menjadi pertempuran di dalam kota.

Pada saat itu Arsenio Ramos Horta yang baru sekitar satu bulan tiba dari Australia memutuskan mengangkat senjata untuk UDT, meskipun kakak kandungny Jose Manuel Ramos Horta berada di pihak Fretilin. Tanggal 17 Agustus pagi, kompil Maubisse dikuasai Fretilin, dan malam harinya kompil pendidikan di Aileu juga jatuh ke tangan partai Fretilin. Fretilin banyak mendapat bantuan senjata secara diam-diam dari angkatan Darat Portugal. Di kemudian hari ternyata bantuan senjata itu mencapai 15.000 pucuk. Apodeti tergolong partai yang hanya memiliki senjata terbatas jumlahnya, karena partai itu tidak pernah mendambakan kemenangan perjuanganny melalui kekuatan senjata.

Dalam bentrokan senjata antara UDT dengan Fretilin, Apodeti bermaksud mengambil sikap netral. Namun demikian basis Apodeti di Atsabe diserang oleh 1.000 orang UDT, sehingga terjadi pertempuran. Serangan itu berhasil digagalkan, demikian pula serangan UDT ke basis Apodeti di Lalea dan Balibo. Dalam pengepungan terhadap Kota Dili, Fretilin bekerjasama dengan Apodeti yang sebenarnya hanya merupakan suatu langkah *Contre coup*.

Tanggal 20 Agustus Fretilin berhasil menguasai separuh Kota Dili. Fretilin mendesak UDT ke luar kota, mundur ke arah Liquica. Setelah itu pertempuran sengit terjadi disepanjang jalan antara Dili ke Maubara. Sehubungan dengan terjadinya

perang saudara, maka kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah Portugal telah hilang akibat tidak mampu mengatasi keadaan.

Di Rai Cortu, 20 Kilo meter dari Dili, terjadi pertempuran tujuh hari tujuh malam. Fretilin menggunakan LCM untuk menembakkan mortir 80 mm terhadap kedudukan pertahanan UDT. Ketika pertempuran sengit sedang berlangsung di Liquica, UDT menyerukan kepada Indonesia untuk membantu mengatasi masalah yang sangat mendesak yaitu mengangkut sekitar 700 pengungsi yang terdiri dari wanita dan anak-anak dari Maubara. UDT bertempur di dua palagan. Sebagian bertempur di Ermera, Maliana, Balibo, sampai ke Batugade di bawah pimpinan Lopez da Cruz. Ia menjadi orang terakhir yang meninggalkan Maliana ibu kota Concelho Bobonaro. Joao Carrascalao panglima Perang UDT bertempur dari Liquica dan mundur ke Maubara.

Di tengah berkecamuknya pertempuran, Joao Carrascalao melarikan diri meninggalkan anak buahnya dengan menggunakan perahu motor tempel menuju Motaain. Lepas Tengah malam, ia mendarat di Motaain dengan membawa mata uang kertas Portugal Escudo sebanyak 7 karung. Ia tidak mengetahui bahwa mata uang Portugal tidak mempunyai nilai tukar lagi di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah matahari terbit, Joao Carrascalao bersama kakak kandungnya Ir. Mario Vegas Carrascalao, Manuel Carrascalao serta beberapa orang pimpinan UDT yang telah berada di Motaain sejak beberapa waktu sebelumnya, menuju ke perahu motor tempel yang ditinggalkan di pantai. Sementara mereka sedang bercakap-cakap, sebagian uang kertas Portugal yang berceceran di perahu itu diterbangkan angin. Uang kertas itu menjadi rebutan anak-anak untuk dijadikan sebagai mainan.

Dalam perjalanan mundur ke Batugade, pasukan UDT di bawah pimpinan Lopez da Cruz menawan 23 orang tentara Portugal yang sedang menuju ke Dili. Di antara tawanan itu adalah Mayor Antonio Ivo Nascimento Vicaso, Kapten Deriera, Letnan Antonio Carlos, Letnan Hendrique Nefdie, Sersan Cristoforo, dan anggota Angkatan Darat lainnya. Mereka ditahan di dalam benteng Batugade.

Pada tanggal 1 September John Tavares, Ketua Pengurus Partai UDT daerah Maliana mengadakan pertemuan dengan Sekjen UDT Domingus Oliveira dan para pemimpin masyarakat Maliana, Ermera, dan Balibo menghendaki integrasi dengan Indonesia. Hasil keputusan itu disampaikan kepada Lopez da Cruz selaku Ketua Partai UDT yang pada saat itu sedang berada di Batugade.

Pernyataan yang sama juga bermunculan dari pengurus UDT daerah-daerah lain di Timor Portugal, sehingga keputusan seluruh pengurus UDT daerah menjadi keputusan partai UDT. Tanggal 13 September Arsenio bersama dengan tiga orang anggota UDT disergap oleh Fretilin. Dua orang rekannya tewas, kemudian ia dibawa ke Maubara.

Pada tanggal 7 Juli 1976 Lopez da Cruz memimpin perutusan *Governo Provisorio*

Timor Lorosae (Pemerintah Sementara Timor Timur) dalam Perundingan Bangkok II dengan Pemerintah Portugal. Perutusan itu diketuai oleh Lopez da Cruz, didampingi oleh Ir. Mario Vegas Carrascalao dan Domingo de Oliveira. Portugal diketuai oleh Vilas Boas, dengan dua orang anggota masing-masing Dr. Pinto de Franca, dan Mayor Revera.

Di antara materi perundingan ialah pembebasan 23 anggota militer Portugal yang ditawan oleh Pemerintah Sementara Timor Timur dan warga Portugal yang ingin kembali ke Lisabon. Dalam perkembangan selanjutnya 23 orang anggota militer Portugal dan 113 orang lainnya dikembalikan ke Lisabon. Salah seorang yang ikut dipulangkan ke Lisabon adalah Joao Carrascalao yang menjabat sebagai Panglima Perang UDT. Beliau meninggalkan kancah peperangan karena tidak sepeham dengan Keputusan Partai UDT yang menghendaki berintegrasi dengan Indonesia. Setelah selesai upacara penyerahan tawanan, Lopez da Cruz memberikan tanda mata kepada Joao Carrascalao berupa cincin emas dengan lambang Bhinneka Tunggal Ika yang dibelinya di Bangkok. Sambil menunjuk lambang pada cincin itu Laopez da Cruz berpesan kepada Joao Carrascalao "Joao, jika suatu hari nanti kamu ingin menjelek-jelekkan Timor Timur dan Indonesia, ingatlah pada cincin ini. Rakyat Timor Timur telah memilih berintegrasi dengan Republik Indonesia". Setelah Joao Carrascalao berada di Lisabon dan Sidney, pesan perpisahan dari Lopez da Cruz tidak dihiraukan. Ia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sumbang terhadap Timor Timur.

Setelah Batugade jatuh ke tangan Fretilin, kemudian mereka menggunakan sebagai basis untuk melakukan tembakan mortir ke Motaain. Tembakan mortir 80 mm yang dilakukan menewaskan beberapa penduduk NTT dan pengungsi Timor Timur. Tulang punggung senjata yang dimiliki UDT terdiri dari senapan otomatis G-3, senapan Mauser Carbin, Standgun, dan mortir 60 mm. Hampir seluruh anggotanya berambut gondrong, dan banyak di antara mereka yang berjanggut panjang dan kumis tebal.

4.2.5 Pemerintah Kolonial Portugis Melarikan Diri di Timor Portugis

Sementara pertempuran sengit terjadi di Dili antara Fretilin melawan UDT, Gubernur Timor Portugal Limos Pires melarikan diri naik kapal laut ke Pulau Atauro. Sebelum melanjutkan perjalanannya dengan pesawat ke Australia, ia berkata dalam bahasa Portugis kepada Kopral (Tropaz) Francisco Monsinho *Eu regressarei* yang artinya saya akan kembali.

Sementara pertempuran sengit masih berlangsung di Dili antara Fretilin dan UDT, maka pada tanggal 23 Agustus pemerintah Portugal meminta bantuan kepada Indonesia untuk membantu mengungsikan warga Portugal dan warga asing lainnya dari Dili. Permintaan Portugal ini diulangi kembali pada tanggal 25 Agustus mengingat gawatnya situasi di Dili. Lepas tengah malam pada tanggal 27 Agustus, Frigat KRI Monginsidi di bawah Mayor Laut Harianto sebagai Komandan membawa satu kontingen yang dipimpin oleh Kolonel Art. Soebijakto untuk melaksanakan perintah

menjemput pengungsi di Dili memenuhi permintaan Portugal. Frigate KRI Monginsidi dengan awak 175 orang diikuti oleh 4 kapal dagang yang diperbantukan dari Indonesia Timur untuk mengangkut pengungsi.

Menjelang pukul 03.00 pagi sebuah kapal meninggalkan dermaga Dili. Ternyata Kapal itu bernama MC Dili milik Portugal. Kapal itu mau berlayar menuju Pulau Atauro dengan membawa sekitar 200 pengungsi warga Portugal, termasuk Gubernur Limos Peres beserta pengawalnya yang terdiri dari Pasukan Angkatan Darat yang merupakan Pasukan Elit Portugal. Dalam pelayaran itu Gubernur Limos Peres mengirim pesan kepada Konsul Jenderal Portugal di Darwin Dr. Jose de Melo Gouveia, dan Gubernur Macao Kolonel Garcia Liandro, bahwa ia telah memindahkan pemerintahannya ke Pulau Atauro terhitung mulai tanggal 27 Agustus 1975.

Pada tanggal 15 Nopember 1975 Kopral Mozinho mengantar Gubernur Limos Peres menuju ke landasan pesawat dengan Unimog (yaitu truk kecil serba guna peninggalan Angkatan Darat Portugal). Tetapi pada hari itu Limos Peres tidak jadi berangkat. Keesokan harinya baru ada pesawat. Kemudian Limos Peres berangkat dengan pesawat itu pada hari itu juga. Gubernur Limos Peres mengatakan kepada Mozinho bahwa ia akan pergi untuk kembali. *Eu regerasserei* (saya akan kembali). Tetapi setelah pergi ternyata Limos Pires tidak pernah kembali sampai hari ini.²²

4.2.6 Faktor-faktor Pendorong Sebagian Besar Rakyat Timor Timur Berintegrasi dengan Indonesia

4.2.6.1 Faktor Geografis

Wilayah Timor Portugis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Wilayah Timor Portugis terletak di Pulau Timor bagian Timur. Pada jaman sebelum kedatangan penjajah bangsa Barat, wilayah Timor Timur merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Timor Barat. Wilayah Timor Timur merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Wewiku Wehali di Timor Barat. Sejak dahulu masyarakat Pulau Timor baik Timor Barat (bagian dari wilayah Propinsi NTT) maupun Timor Timur memiliki hubungan geneologis dan sosiologis yang telah berakar secara mendalam, namun lebih dari 400 tahun lalu pola hubungan tersebut telah dipisahkan oleh keinginan politik kolonialisme Portugis dan Belanda.²³

4.2.6.2 Persamaan Pengalaman Sejarah

Rakyat Timor Portugis dan rakyat Timor Barat memiliki persamaan sejarah. Kedua wilayah sama sama merasakan ditindas dan dijajah oleh Bangsa Barat. Rakyat Timor Barat dijajah oleh Bangsa Belanda, sedangkan rakyat Timor Timur dijajah oleh Portugis. Sebagai rakyat yang dijajah oleh bangsa asing kedua daerah mengalami nasib

²² Tomodok, E.M., 1994. Hari-hari akhir Timor Timur Portugis. Jakarta: Pustaka Jaya, hal. 306.

²³ Pemda NTT, 2001. Pelayanan kemanusiaan dalam dan dengan pelbagai keterbatasan. Kupang, hal. 35.

yang sama, yaitu, dikuasai politiknya, dieksploitasi dengan segala cara kekayaannya, dan budayanya ditindas, direndahkan, dan dianggap kolot.

4.2.6.3 Persamaan Budaya

Rakyat di Timor Barat dan Timor Timur memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasa serta sistem politik tradisional yang sama. Tetapi karena keserakahan, kesewenang-wenangan, dan kepentingan penjajah Portugis dan Belanda maka Pulau Timor seakan-akan menjadi milik mereka. Mereka dengan seenaknya melakukan perjanjian Lisabon pada 1859 yang membagi dua Pulau Timor. Timor bagian barat dimiliki oleh Belanda, sedangkan Timor bagian timur dimiliki oleh Portugal. Di Timor Barat Belanda menjalankan sistem politik pemerintahan tidak langsung. Dalam hal ini adat istiadat, budaya, bahasa, dan sistem politik kerajaan-kerajaan tradisional masih tetap berjalan sebagaimana biasa. Lain halnya dengan penjajah Portugis yang menjalankan politik asimilasi, yaitu politik yang ingin memportugiskan wilayah jajahannya. Dalam hal ini adat istiadat, budaya, bahasa, dan sistem politik kerajaan-kerajaan tradisional sama sekali tidak berkembang. Semuanya harus diatur dan mengikuti kemauan Portugis. Wilayah Timor Timur dijadikan bagian integral dari wilayah Portugal dengan nama Propinsi Portugal di seberang lautan. Walaupun Timor Timur merupakan bagian integral dari wilayah Portugis, tetapi perlakuan terhadap rakyatnya sangat kejam, sangat tidak adil, dan sangat diskriminatif dengan warga Portugis asli. Pembangunan dan kesejahteraan rakyat Timor Timur di bidang pendidikan, infrastruktur, perekonomian, politik, dan kesehatan sangat tertinggal. Kebiasaan dan cara hidup orang Portugal dijadikan model terbaik untuk ditiru dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4.2.6.4 Faktor Politik

Setelah terjadi Revolusi Bunga Merah pada tahun 1974 Portugis mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dengan memperbolehkan berdirinya partai-partai politik di wilayah Timor Timur, dan mengadakan referendum. Partai-partai yang muncul ternyata memiliki platform partai yang saling bertentangan. Antara partai satu dengan partai lainnya saling melakukan persaingan dan permusuhan yang berujung kepada terjadinya perang saudara. Sementara pemerintah Kolonial Portugis tidak mampu mengatasi perang saudara tersebut. Begitu juga referendum yang dijanjikan Portugis tidak mampu dilaksanakan oleh Portugis karena situasi keamanan yang tidak terkendali. Dalam situasi yang tidak menentu itu masing-masing partai mengeluarkan Proklamasi kemerdekaan. Pertama Fretelin mengeluarkan Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975 secara sepihak tanpa mengikut sertakan 4 partai lainnya yang memiliki pendukung mayoritas rakyat Timor Timur. Sebagai Reaksi atas Proklamasi Ala Fretelin itu maka pada tanggal 30 November 1975 keempat partai UDT, APODETI, KOTA, dan Trabalhista mengumandangkan Proklamasi Balibo bagi Republik Indonesia.²⁴

²⁴ Jasmi, Khairul, 2002. Eurico Guterres melintas badai politik Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar harapan, hal 24.

4.2.6.5 Faktor Psikologis

Faktor psikologis ini dipicu oleh sikap pengecut pemerintah Portugis yang melarikan diri dari wilayah yang dijajahnya selama kurang lebih 450 tahun. Malah pemerintah Kolonial Portugis memihak partai Fretilin dengan menyerahkan semua persenjataan yang dimilikinya. Dengan persenjataan itu Fretilin membantai dan membunuh rakyat pendukung keempat partai lainnya. Rakyat Timor Timur merasa sangat kecewa kepada pemerintah Portugal yang tidak mampu mengendalikan keamanan, malah melarikan diri meninggalkan rakyat dalam keadaan saling membunuh dan saling bermusuhan. Rakyat menganggap bahwa pemerintah Portugis hanya ingin menghisap kekayaan bumi Timor Timur, dan meninggalkan begitu saja apabila mereka mengalami kesulitan. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat dan merasa anti kepada Portugal. Di pihak lain, keempat partai politik bersama rakyat pendukungnya menyatakan diri berintegrasi dengan Indonesia. Keinginan itu dimanifestasikan dalam bentuk Proklamasi Balibo.

4.2.7 Integrasi Timor Timur ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Untuk mengatasi situasi politik Timor Timur yang semakin kacau karena perang saudara, maka pada tanggal 7 September 1975 ketiga partai politik yang bersatu yakni: UDT, KOTA, dan TRABALHISTA, mengajukan petisi kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan suatu kemungkinan kemerdekaan Timor Timur melalui integrasi berdasarkan beberapa persyaratan.

Terhadap petisi 7 September 1975, Fretilin melancarkan serangan balik dengan menangkap, menahan dan membantai tokoh-tokoh Apodeti pada tanggal 4 Oktober 1975. Sikap Fretilin ini sebagai aksi protes terhadap isi Petisi 7 September untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menghadapi situasi dan kondisi yang semakin tidak memberi harapan, pada tanggal 1 Nopember 1975 Indonesia dan Portugal kembali mengadakan pertemuan di Roma untuk membahas situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat Timor Timur. Namun, tampaknya pertemuan ini tidak menghasilkan kata sepakat sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Pada tanggal 28 Nopember 1975 terjadilah Proklamasi sepihak oleh Fretilin di bawah nama Republik Demokratik Timor Timur. Proklamasi Fretilin ini berkaitan dengan kemenangan tak terduga dari partai gabungan UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA, yang dibantu oleh beberapa sukarelawan yang datang dari Indonesia. Mulanya, kekuatan gabungan ini hanya memiliki sebidang tanah di Batugade, namun perlahan-lahan wilayahnya mulai meluas ke Balibo, Maliana, Atabae, Dili, dan seterusnya ke sektor Timor Timur bagian Timur. Terhadap tindakan sepihak dari Fretilin tersebut, maka pada tanggal 30 Nopember 1975 kekuatan Gabungan mengeluarkan perintah kepada Komite Politik Gerakan Revolusioner Anti Komunis dan APODETI untuk

menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Timor-Timur melalui Integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa bersejarah ini berlangsung di Balibo. Dalam Proklamasi tersebut terungkap dengan sangat tegas hasrat rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan saudara-saudaranya dengan Indonesia.

Teks Proklamasi keempat Partai Politik untuk berintegrasi dengan RI dibuat dalam bahasa Inggris dan Portugal, yang kemudian diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Adam Malik pada tanggal 1 Desember 1975. Isi Teks tersebut dalam bahasa Inggris sebagai berikut:²⁵

PROCLAMATION

We, the People of Portuguese Timor and its Dependencies here in represented by APODETI - Associacao Popular Democratica de Timor, UDT - Unio Demokratica de Timor, KOTA -Klibur Oan Timur Aswain, and Parthido Trabalhista after acarefully analyse has been made after the unilateral action of Fretilin materialized through the "Proclamation of Independence" concerning the teritory of Portuguese Timor, being such attitude considered consented under the rule of the government of Portugal, being such facts by their meanings in full contradiction to the real interest of Portuguese Timor People:

Having in mind the fact that several initiative have been evidenced as a proof towards to meet a just and peacefull political solution on the Timorese question mainly:

- *The Macao meeting to wich Fretilin was voluntarily absent although the Government of Portugal did invite their representative to be present.*
- *Readines of the Government of Australia in order to provide condition for a dialogue concerning the Timor question ar its own teritory.*
- *The Rome meeting for mutual consultation held between the Foreign Affairs Minister of Portugal and Indonesia which final conclusion was the issue of the Memorandum of UnderStanding between the two countries.*

Effort carried out by the Indonesian Government in sending over the bordering area The Minister of Foreign Afaairs Mr. Adam Malik in order to implement the spirit of the Rome meeting.

Consequently, being achieved the conclusion that the Fretilin deliberately ignored all the mentioned efforts.

Adding yet the fact that Fretilin has assumed illness attitudes that criminally avoid the Timor Portuguese people to express its legitimate aspirations;Attending the situation built

²⁵ Noor, Machmudin, dkk. 1977. *Lahirnya Propinsi Timor Timur*. Jakarta : Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia/BP.Alda.

up by Fretilin when declaring unilaterally the independence of Portuguese Timor draining out completely at the possibilities towards a peaceful solution of this problem according to the wishes of the people.

Feeling that owing the Colonialist action of Portugal and Holland which during almost 500 years has deeply separated the blood links, ethnical affinities moral and cultural with the Indonesian people of the island of Timor.

Attending that his moment is to be considered quite opportune to reestablish the strong traditional links with the Indonesia nation;

In the name of the All Mighty, and by the reasons previously referred, we do proclaim solemnly the Integration of the whole territory of the ex-portuguese colony of Timor with the Indonesian Nation, as this proclamation means the most highly expression of the Portuguese Timor people feelings.

In accordance with the contents of the present Proclamation of Integration the Government of Indonesia and the people the Indonesian are requested to take the necessary steps in order to protect peoples lives who themselves now are considering part of the Indonesian people yet living under the terror and fascist practices of Fretilin allowed by the Government of Portugal.

Dated at Balibo, November 30, 1975

On behalf of APODETI

On behalf of UDT

Ttd

Ttd

Guilherme Maria Goncalves

Francisco X Lopez da Cruz

Membro de Presidium

Presidente

Ttd

Ttd

Alexandrino Borromeu

Domingos de Oliveira

Membro de Presidium

Secretario -Geral

On Behalf of KOTA

On Behalf of Partido Trabalhista

Ttd

Ttd

Jose Martins

Domingos C. Pareira

Presidente

Membro the Directorio.

Proklamasi Balibo kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:²⁶

PROKLAMASI

Kami rakyat Timor Portugis yang diwakili oleh APODETI – *Associacao Popular Democratica de Timor*, UDT – *Uniao Democratica de Timor*, KOTA – *Klibur Oan Timor Aswain*, dan *Partido Trabalhista*, setelah mempertimbangkan dengan seksama aksi sepihak Fretilin yang terwujud melalui “Proklamasi kemerdekaan” mengenai wilayah Portugis yang dinyatakan yang disetujui oleh pemerintah Portugis; kenyataan semacam itu bertentangan dengan keinginan nyata dari rakyat Timor Portugis;

Menimbang bahwa persyaratan untuk menentukan nasib sendiri secara bebas dari rakyat Timor Portugis tidak sesuai dengan tindakan tersebut.

Mengingat kenyataan bahwa, beberapa inisiatif telah ditempuh untuk memperoleh penyelesaian politik secara damai dalam masalah Timor terutama:

- Pertemuan Macao, di mana dengan sengaja Fretilin tidak hadir walaupun pemerintah Portugis mengundang wakil mereka.
- Kesiadaan pemerintah Australia untuk mengusahakan keadaan yang memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah Timor di wilayahnya.
- Pertemuan Roma untuk saling konsultasi antara menteri-menteri luar negeri Portugis dan Indonesia, yang telah menghasilkan Memorandum Saling Pengertian di antara kedua negara.
- Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Adam Malik ke daerah perbatasan untuk menyampaikan semangat pertemuan Roma.

Akibatnya tercapailah kesimpulan bahwa Fretilin dengan sengaja tidak mau tahu usaha-usaha tersebut.

Tambahan lagi Fretilin telah menunjukkan sikap salah bahwa dengan tindakan kriminalnya telah menghalangi rakyat Timor Portugis untuk menyatakan kehendak berdasarkan hukum yang sah.

Mengingat situasi yang disebabkan oleh Fretilin dengan pernyataan sepihak kemerdekaan Timor Portugis telah menggagalkan semua kemungkinan ke arah pemecahan damai seperti yang diinginkan rakyat.

Merasakan bahwa aksi kolonialis Portugis dan Belanda yang selama hampir 500 tahun telah memisahkan hubungan darah, ikatan moral bangsa dan kebudayaan

²⁶ Neonbasu, P. Gregor, 1997. Peta politik dinamika pembangunan Timor Timur, Jakarta:Yanense Mitra Sejahti, hal. 54-56.

antara bangsa Indonesia dan Timor Portugis.

Mengingat bahwa saat ini adalah kesempatan paling baik untuk menyampaikan secara kokoh hubungan tradisi dengan bangsa Indonesia.

Atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan dengan alasan-alasan di atas, kami dengan khidmat menyatakan penyatuan seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan negara Indonesia; Proklamasi ini adalah pernyataan paling sungguh-sungguh dari keinginan rakyat Timor Portugis.

Berhubung dengan isi proklamasi penyatuan ini, pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kehidupan rakyat, yang kini merupakan bagian bangsa Indonesia, yang berada di bawah teror dan fasis yang dilakukan oleh Fretilin dan direstui oleh Portugis.

Balibo, 30 November 1975

Atas nama APODETI

Ttd

Guilherme Maria Goncalves

Anggota Presidium

Ttd

Alexandrino Borromeu

Anggota Presidium

Atas nama KOTA

Ttd

Jose Martins

Presiden

Atas nama UDT

Ttd

Francisco X Lopes da Cruz

Presiden

Ttd

Domingos de Oliveira

Sekretaris Jenderal

Atas nama Partido Trabalhista

Ttd

Domingos C. Pereira

Anggota Direktur.

Selanjutnya bertitik tolak pada tekad proklamasi Balibo, keempat partai politik berjuang keras untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa seluruh rakyat Timor Timur berada dalam tangan mereka. Dalam upaya tersebut, keempat partai politik ini juga berusaha memantapkan dan meningkatkan stabilitas politik di wilayah Timor Timur. Untuk merealisasi secara hukum tujuan luhur itu, pada tanggal

17 Desember 1975 dibentuklah Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat dan PSTT, disepakati bersama antara kekuatan gabungan dan Komite Politik Gerakan Revolusioner Anti Komunis serta APODETI untuk menghapus partai-partai politik yang ada di Timor Timur. Kesepakatan ini bermaksud memberikan tanggung jawab penuh kepada DPR dan PSTT untuk mengambil alih tugas menangani pemerintahan Portugis yang tidak mungkin diteruskan lagi, sekaligus menangani proses de kolonisasi Timor-Timur selanjutnya sampai kepada penentuan nasib sendiri.

Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR wilayah Timor Timur mengadakan sidang paripurna di Dili yang menghasilkan sebuah Petisi yang mendesak pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menerima dan mensahkan proses bersatunya rakyat serta wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Naskah Petisi tersebut sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat

Wilayah Timor Timur

PETISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kami atas nama seluruh rakyat Timor Timur memberikan kesaksian atas keputusan sidang paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Timor Timur pada tanggal 31 Mei 1976 di Dili, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kehendak rakyat sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Integrasi Timor Timur pada tanggal 30 November 1975 di Balibo. Dengan ini, mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu sesingkat-singkatnya menerima dan mengesahkan integrasi rakyat serta wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya tanpa referendum.

Dili, 31 Mei 1976

Pemerintahan Sementara Timor Timur

Dewan Perwakilan Rakyat Tim.Tim

Kepala

Ketua

Ttd

Ttd

Arnoldo Dos Reis Araujo

Guilherme Maria Goncalves

Pada tanggal 5 Juni 1976, Petisi Integrasi tersebut disampaikan kepada Pemerintah

Republik Indonesia di Jakarta (Neonbasu, 1976). Hari Senin tanggal 7 Juni 1976 50 orang Delegasi rakyat Timor Timur menemui Presiden Suharto di Jakarta. Kedatangan Delegasi yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pemerintahan Sementara Timor Timur, Dos Reis Araujo itu adalah untuk menyampaikan Petisi Pengintegrasian wilayah dan rakyat Timor Timur ke dalam Republik Indonesia. Petisi ini merupakan penegasan kembali Proklamasi Integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diumumkan di Balibo pada tanggal 30 November 1975.²⁷

Kepada para pemimpin rakyat Timor Timur itu, Presiden Suharto mengatakan bahwa ia merasa seperti bertemu kembali dengan saudara-saudara sekandung yang telah sangat lama terpisah. Ratusan tahun kita telah dipisahkan oleh pagar-pagar buatan pemerintah-pemerintah penjajah. Selama tiga setengah abad Indonesia menjadi bangsa yang terjajah, tertindas lahir dan batin dan terperas raganya. Salah satu akibat dari penjajahan itu adalah terpisahnya bangsa Indonesia dari saudara-saudara sekandungnya. Menyambut Petisi, Presiden Suharto mengatakan bahwa rakyat Timor Timur sedang membuat sejarah baru, setelah ratusan tahun menderita di bawah penjajahan asing. Rakyat Timor Timur akan bergabung dengan saudara-saudara sekandungnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah resmi bergabung nanti rakyat Timor Timur akan diajak berjuang bahu membahu membangun bersama-sama masa depan kita bersama.²⁸

Untuk mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timor Timur sebagaimana terungkap dalam Petisi tadi pemerintah Republik Indonesia membentuk sebuah Tim yang berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 113/LN, Tahun 1976. Tim tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Tim itu dikirim ke Timor Timur dengan tugasnya, menyaksikan serta memperoleh gambaran langsung mengenai hasrat dan niat tulus rakyat Timor Timur untuk bersatu ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada minggu ketiga bulan Juni 1976, Delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri disertai sejumlah Duta Besar Asing, Wartawan luar dan Dalam Negeri, meninjau Timor Timur. Tanggal 26 Juni 1976 Delegasi tersebut melaporkan hasil kunjungannya ke Timor Timur kepada Presiden Suharto di Jakarta.²⁹

Dengan berpedoman pada hasil kunjungan delegasi tersebut Petisi Rakyat Timor Timur dibahas dalam sidang Kabinet. Pihak Republik Indonesia dengan hangat menyambut baik Petisi Integrasi tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 17 Juli 1976 dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Pernyataan Rakyat Timor Timur untuk bergabung ke dalam NKRI, dan sekaligus Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (sebagai Propinsi yang ke-27) dari RI.

²⁷ Neonbasu, P. Gregor, 1997. Peta politik dinamika pembangunan Timor Timur, Jakarta: Yanense Mitra Sejati, hal. 58.

²⁸ Tim Dokumentasi Presiden RI, 1991. Jejak langkah Pak Harto, Jakarta: Cipta Lamtoro Gung Persada, hal. 367-368.

²⁹ Neonbasu, P. Gregor, 1997. Peta politik dinamika pembangunan Timor Timur, Jakarta: Yanense Mitra Sejati, hal. 59.

4.2.8 Tanggapan Pemerintah Indonesia tentang Integrasi Timor Timur dengan Indonesia

Sikap, tanggapan, dan pandangan negara kesatuan Republik Indonesia terhadap integrasinya Timor Timur dengan Indonesia, antara lain:

- a. Republik Indonesia selalu bersikap terbuka dalam menjalin dialog demi mencari cara terbaik menyelesaikan setiap persoalan di wilayah Timor Timur.
- b. Dengan sikap tulus Republik Indonesia juga berupaya menjelaskan masalah yang sedang terjadi di wilayah tak bertuan Timor Timur sejak pemerintahan Limos Pires lari ke Atauro.
- c. Telah berulang kali Republik Indonesia menjelaskan kepada negara-negara luar bahwa masalah Timor Timur pasca integrasi sepenuhnya adalah persoalan dalam negeri, sehingga penanganannya tidak boleh dicampuri oleh negara manapun.
- d. Pembahasan masalah Timor Timur akan berhasil sampai tuntas jika dilakukan di wilayah Timor Timur, dan bukan hanya menyoroti dari luar tanpa menyaksikan realitas yang sesungguhnya di Timor Timur.
- e. Dalam menjalin relasi dan komunikasi dengan Portugal (jika siapapun yang berkepentingan dengan Timor Timur), Republik Indonesia selalu menghormati hak-hak azasi dan kewajiban azasi rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.
- f. Republik Indonesia tidak pernah melecehkan Portugal dalam hal ini Gubernur Limos Pires sebagai wakil pemerintahan Portugal di daerah seberang lautan (Timor Timur).

Keenam prinsip dasar ini sebetulnya merupakan implikasi dari politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif. Dalam perspektif prinsip dasar ini pula Frans Seda seorang tokoh politik senior yang terlibat aktif dalam proses de kolonisasi Timor Timur menyatakan bahwa sesungguhnya para pemimpin Portugal sendiri menginginkan suatu opsi realistik bagi masyarakat Timor Timur yakni integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Sikap awal Republik Indonesia yang menganjurkan suatu dialog terbuka, tulus dan terbuka untuk mencari jalan keluar yang lebih baik, yang diterima secara positif oleh Portugal. Bahkan Portugal menyetujui keterlibatan RI dalam proses dekolonisasi Timor Timur dengan mengadakan kampanye integrasi di Kota Dili dan sekitarnya.

Dengan demikian, tuduhan bahwa RI mencaplok wilayah Timor Timur merupakan suatu fitnahan terhadap Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan, RI tetap

³⁰ Neonbasu, P. Gregor, 1997. Peta politik dinamika pembangunan Timor Timur, Jakarta:Yanense Mitra Sehati, hal. 59.

menghormati kedaulatan dan tanggung jawab Portugal terhadap keselamatan masyarakat Timor Timur selain itu juga menghargai aspirasi dan inspirasi masyarakat Timor Timur yang menginginkan kemerdekaan.

Indonesia secara resmi menyatakan tidak memiliki ambisi territorial apapun atas Timor Timur, namun menganggap Deklarasi Balibo sebagai pernyataan keinginan politik rakyat yang syah. Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan "Proklamasi Fretelin", dan menyatakan menghargai hak bersimpati dan memahami sedalam-dalamnya pernyataan partai-partai UDT, APODETI, KOTA, TRABALHISTA yang atas nama rakyat Timor Portugis menyatakan menyatukan diri ke dalam Negara Republik Indonesia.³¹

Sikap resmi Republik Indonesia mengenai Timor Timur diungkapkan oleh Delegasi Republik Indonesia dalam Sidang Komite 24 PBB (Komite de Kolonisasi) pada tanggal 19 September 1976 sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial
2. Sikap dan tindakan Republik Indonesia merupakan tanggapan terhadap Petisi Rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Republik Indonesia maupun PSTT (Pemerintahan Sementara Timor Timur) berpendapat bahwa PBB dapat berperan lebih positif dalam proses de kolonisasi Timor Timur.
4. Berdasarkan butir ketiga di atas pemerintahan Republik Indonesia dan PSTT telah berulang kali mengundang Sekjen PBB, Dewan Keamanan, dan Ketua Komite 24 untuk berkunjung ke Timor Timur dalam rangka pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri rakyat Timor Timur. Selain itu juga mengadakan kerja sama dengan utusan khusus Sekjen PBB ketika berkunjung ke Timor Timur.³²

Pada tanggal 5 November 1976 dalam sidang Komite IV Majelis Umum PBB Delegasi Republik Indonesia telah menegaskan kembali sikapnya bahwa : empat partai politik yang menginginkan bersatu dengan Republik Indonesia (UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA) mewakili mayoritas rakyat Timor Timur, oleh karena itu mereka berhak membentuk PSTT, dan melalui wakil-wakil terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur, mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Menunjuk pada piagam PBB, Delegasi RI menegaskan bahwa keinginan penduduk terjajah adalah yang paling pokok dan paling penting dalam proses de kolonisasi. Rakyat Timor Timur dengan jelas dan tegas telah melaksanakan keinginan mereka melalui wakil-wakil yang bergabung dalam 4 partai politik tersebut. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541 (XV) sama pentingnya dengan Resolusi Nomor

³¹ Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, 2008. Per Memoriam Ad Spem. Dempasar: hal. 38.

³² Neonbasu, P.Gregor, 1997. Peta politik dinamika pembangunan Timor Timur, Jakarta:Yanense Mitra Sejati, hal. 60.

1514 (XV), yang mengakui bahwa integrasi dengan suatu negara merdeka adalah satu bentuk sah, dan bahwa PBB tidak harus terlibat dalam proses pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri di daerah-daerah terjajah.

Dalam sidang-sidang Komite 24 PBB, Delegasi RI terus berupaya menjawab tuduhan dari berbagai pihak dengan menjelaskan pokok permasalahan yang sebenarnya, juga dalam setiap pertemuan di Forum internasional lainnya, RI tetap berpedoman pada perkembangan serta kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi termasuk perubahan-perubahan yang paling akhir di wilayah Timor Timur, dalam bidang keamanan, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Menurut Lopes da Cruz, (1994 : 85) terlepas dari sikap yang telah ditunjukkan oleh RI selama ini, sebetulnya masih diharapkan suatu sikap yang lebih tegas, dan lugas untuk mengubah opini dunia mengenai belum tuntasnya persoalan Timor Timur di Forum Internasional. Untuk itu memang dibutuhkan sikap luwes dan akomodatif dari pihak RI dalam upaya menampung berbagai kepentingan atau kebutuhan Portugal dan orang-orang Timor Timur di luar negeri, yang secara prinsipil belum dapat menerima realitas integrasi Timor Timur.³³

Timor Timur yang berintegrasi dengan Indonesia selama 23 tahun akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999 terpaksa terlepas kembali dari pangkuan ibu pertiwi melalui jajak pendapat, di mana pihak pro kemerdekaan memenangkan jajak pendapat dengan hasil 78,5%. Pertanyaannya mengapa rakyat Timor Timur kembali melepaskan diri dari Indonesia, dan siapakah yang bersalah dalam hal ini.

Untuk menjawab pertanyaan ini penulis mengutip pendapat Singh³⁴ yang mengatakan bahwa selama integrasi ada beberapa hal yang terjadi, yaitu (1) tidak jujurny Portugal akan kesalahan yang dibuat selama 450 tahun menjajah di Timor Timur, terutama di tahun 1974 / 1975; (2) Sikap tidak adil dan tidak jujurny PBB menyelesaikan masalah Timor Timur; (3) kekalahan diplomasi politik luar negeri Indonesia; (4) sikap egois dan rasa dendamnya antara orang Timor Timur yang pro kemerdekaan dan pro integrasi; (5) pendekatan militer di Timor Timur yang sangat berlebihan; (6) perencanaan kurang matang dalam hal menentukan daerah Timor Timur sebagai daerah terbuka untuk umum pada tahun 1989; dan (7) perkembangan pembangunan di Timor Timur yang berkembang sangat cepat.

4.2.9 Tanggapan Portugis atas Integrasinya Timor Timur dengan Indonesia.

Setelah intervensi militer Indonesia di Timor Timur pada 7 Desember 1975, Portugis langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia dan menyerahkan soal ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam suratnya

³³ Fransisco X Lopez da Cruz, 1999. Status kewarganegaraan Indonesia masyarakat eks Timor Timur pasca jajak pendapat ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 (Makala). Kupang, hal 5.

³⁴ Singh, Bilveer, 1998. Timor Timur Indonesia dan dunia mitos dan kenyataan, Jakarta: Citra Kahrisma Bunda.

kepada Presiden Dewan Keamanan Portugis menyatakan mengembalikan ketertiban di Timor atau menjamin bahwa proses dekolonisasi akan dilaksanakan melalui cara-cara damai. Sesuai dengan Piagam dan Resolusi PBB.

Portugis juga meminta agar Dewan Keamanan mengadakan pertemuan penting sehingga agresi militer Indonesia dapat dihentikan dan kondisi dapat dipulihkan untuk memungkinkan proses dekolonisasi berlanjut. Portugis juga menuduh Indonesia melakukan aneksasi atas Timor Timur dengan tujuan untuk meniadakan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Timor Timur.³⁵

4.2.10 Tanggapan Perserikatan bangsa Bangsa (PBB)

Keterlibatan PBB dalam soal Timor Portugis secara efektif dimulai sejak 15 Desember 1960 ketika melalui Resolusi Majelis Umum 1542 (XV) Deklarasi Pengakuan Kemerdekaan atas Negara dan Bangsa Terjajah, Timor dinyatakan sebagai Negara yang tidak berdaulat (*non-self governing state*). Resolusi ini ditolak oleh Portugis, pihak yang memerintah wilayah tersebut. Portugis mengatakan bahwa Timor adalah Provinsi Portugis. Karena itu menurut mereka pasal XI, Piagam PBB tersebut tidak berlaku atas Timor Portugis, dan untuk itu Lisbon tidak mengakui Resolusi 1542 itu.

Setelah terjadi intervensi militer Indonesia di Timor Portugis pada 7 Desember 1975 Portugis membawa masalah itu ke PBB. Atas permintaan Portugis itu PBB membicarakan tiga soal utama, yaitu intervensi Indonesia di Timor Timur, hak untuk menentukan nasib sendiri bagi penduduk Timor Timur, dan aneksasi sepihak Indonesia atas wilayah tersebut. Pada 12 Desember 1975, Majelis Umum dalam Resolusinya No. 3485 mencatat: Mendengar pernyataan perwakilan Portugis, sebagai pihak yang berkuasa, mengenai perkembangan di Timor Timur (Sidang Umum) sangat menyedihkan intervensi militer Angkatan Bersenjata Indonesiadi Timor Portugis... meminta pemerintah Indonesia untuk ... segera menarik mundur angkatan bersenjataanya dari wilayah tersebut, sehingga memungkinkan penduduk wilayah tersebut bebas melaksanakan hak mereka untuk menentukan diri sendiri dan merdeka... (dan Dewan Keamanan) agar mengambil tindakan segera untuk melindungi integritas wilayah Timor Portugis dan hak penduduknya yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib diri sendiri. Resolusi tersebut disetujui oleh 72 suara mendukung, 10 menolak, dan 43 abstain.³⁶

Indonesia menolak Resolusi Majelis Umum No. 3485, dan menganggap hal tersebut tidak berlaku. Dewan Keamanan mengajukan Resolusi No. 384 pada 22 Desember 1975 yang diterima dengan suara bulat. Resolusi ini menyerukan agar

³⁵ Singh, Bilveer, 1998. Timor Timur Indonesia dan dunia mitos dan kenyataan, Jakarta: Citra Kahrisma Bunda, hal. 93.

³⁶ Singh, Bilveer, 1998. Timor Timur Indonesia dan dunia mitos dan kenyataan, Jakarta: Citra Kahrisma Bunda, hal. 93-94.

pemerintah Indonesia segera menarik mundur seluruh angkatan bersenjataanya dari wilayah tersebut. Dewan Keamanan juga memutuskan untuk mengirimkan utusan khusus ke Timor Timur guna memperoleh pengamatan langsung atas situasi yang berkembang sebagai langkah awal untuk menjamin pelaksanaan resolusi tersebut. Resolusi lain disusun oleh Dewan Keamanan pada 22 April 1976. Kedua resolusi tersebut menyerukan penarikan mundur Angkatan Bersenjata Indonesia dari Timor Timur dan menyarankan semua Negara untuk menghormati integritas wilayah Timor Timur serta hak penduduknya dalam menentukan nasib sendiri.

Dalam kaitan dengan aneksasi sepihak oleh Indonesia atas Timor Timur pada 17 Agustus 1976, Majelis Umum menerima Resolusi lain pada 1 Desember 1976 dengan suara 68 mendukung, 20 menolak, dan 49 tidak memberikan suara. Dalam Resolusi ini Majelis Umum mengakui hak rakyat Timor-Timur untuk menentukan nasib sendiri dan untuk merdeka serta keabsahan perjuangan mereka untuk mencapai hak-hak tersebut. Resolusi ini juga menolak klaim bahwa Timor-Timur telah berintegrasi dengan Indonesia. Pada 10 Nopember 1977, terjadi lagi pemungutan suara di Komisi De Kolonisasi PBB. Komisi ini menolak klaim bahwa Timor Timur telah berintegrasi dengan Indonesia, sebab penduduk wilayah itu belum dapat menggunakan secara bebas haknya untuk menentukan nasib sendiri dan untuk merdeka. Resolusi itu diterima dengan hasil 61 mendukung, 26 menolak, dan 47 abstein. Sejak itu Timor Timur tetap menjadi agenda PBB dengan resolusi-resolusi serupa sebagaimana telah dibicarakan dan diterima oleh mayoritas.³⁷

Resolusi tentang Timor di Majelis Umum PBB dari tahun 1975 hingga 1982 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tahun	Mendukung	Menolak	Abstein	Tidak	Jumlah
1975	72	10	43	NA	NA
1976	68	20	49	NA	NA
1977	67	26	47	8	148
1978	59	31	44	25	149
1979	62	31	45	13	151
1980	58	35	46	NA	NA
1981	54	42	46	14	156
1982	50	46	50	10	156

Sumber: Dikutip dari Singh, Bilveer, 1998. Timor Timur Indonesia dan dunia mitos dan kenyataan, hal 106.

Keterangan: NA : Data tidak ada.

³⁷ Singh, Bilveer, 1998. Timor Timur Indonesia dan dunia mitos dan kenyataan, Jakarta: Citra Kahrisma Bunda, hal. 97-105.

Berkaitan dengan penyelesaian masalah Timor Timur, sejak tahun 1992 Majelis Umum meminta Sekretaris Jenderal untuk memulai konsultasi dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif. Seluruhnya terdapat 10 resolusi, dua dari Dewan Keamanan, dan delapan dari Majelis Umum. Status Timor Timur dalam PBB adalah sebagai *Non Self Governing Territory* (wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri) sehingga tercantum dalam Agenda Komite Dekolonisasi PBB. Oleh karena itu persoalan Timor Timur selalu dibahas dalam agenda Majelis Umum di bawah butir agenda *The Question of East Timor*. Inisiatif Sekretaris Jenderal PBB berlanjut menjadi permulaan dialog tri partit antara Indonesia dan Portugis di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB.³⁸

4.2.11 Kebijakan Indonesia di Timor Timur

Setelah berintegrasinya Timor Timur dengan Indonesia, maka Indonesia melakukan langkah-langkah penting untuk memajukan Propinsi Timor Timur. Pemerintah Indonesia berusaha menggelontorkan dana yang cukup besar kepada Timor Timur agar dapat sejajar dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di Timor Timur selama berintegrasi dengan Indonesia sebagai berikut (1) operasi pengamanan militer; (2) pemerintahan di Timor Timur; (3) Pembangunan ekonomi.

4.2.11.1 Operasi Pengamanan Militer

Ketika Operasi Seroja dilancarkan pada Desember 1975, para pemimpin ABRI berkeyakinan bahwa Fretelin dan pasukan bersenjataanya akan dengan mudah ditaklukkan, mungkin hanya beberapa minggu saja. Namun kenyataan di lapangan lain. Setelah hampir dua dasawarsa, perlawanan di Timor Timur belum sepenuhnya berhasil diredam. Menurut A. Barbedo de Magalhaes, kemampuan bertahan pasukan Fretelin yang mengejutkan itu disebabkan oleh dua alasan. **Pertama** perbedaan-perbedaan kultural yang memisahkan rakyat Timor Timur dengan orang-orang Jawa. **Kedua** perlakuan kasar oleh ABRI yang alih-alih mengupayakan ketundukan musuh lewat teror, telah memicu sentimen yang mendalam dan luas untuk mengadakan perlawanan.³⁹

Analisis mengenai situasi militer di Timor Timur sejak Juli 1976 hingga November 1991 akan menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang lebih penting dan menentukan, yang dapat menjelaskan berlarut-larutnya perlawanan di atas. Menurut Singh dimensi militer dari pemberontakan dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Fase **pertama** yang efektif dimulai 7 Desember 1975 dan berakhir pada Agustus

³⁸ Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste, 2008. Per Memoriam Ad Spem, Denpasar, hal 39-40.

³⁹ Magalhaes, A. Barbedo, 1992. East Timor: Indonesian Occupation and genocide. Portugal: Oporto University, hal. 39.

1977, adalah fase paling menentukan dari kemacetan operasi militer, di mana ABRI berhasil menduduki kota-kota besar sementara Fretilin menduduki daerah-daerah pedalaman dan pegunungan. Fase ini merupakan saat-saat yang mudah bagi para pemimpin militer dan politik Fretilin, karena ABRI lebih menaruh perhatian kepada upaya mengkonsolidasikan kontrolnya di pusat-pusat pemerintahan terpenting dalam propinsi itu. Pada masa-masa ini ABRI meletakkan prioritas pada upaya untuk menciptakan situasi normal di daerah itu, yang sudah dianggap sebagai propinsi Indonesia yang ke 27. Nicolao Lobato secara efektif bertindak sebagai pemimpin Gerakan Perlawanan dan ahli strategi militernya yang utama. Sementara Amaral lebih tertarik kepada urusan-urusan politik. Fretilin mengawali perlawanannya menentang pasukan ABRI dengan menerapkan strategi perang konvensional yang sudah klasik. Belakangan mereka mengubah taktik itu dengan cara menyerang pasukan ABRI secara tiba-tiba dan mengadakan serangan-serangan mendadak terhadap kota-kota yang sudah diduduki tentara Indonesia. Fretilin secara rutin mengganggu orang-orang Indonesia di kota-kota khususnya di Ermera, Bazar, Teta, dan Liquisa. Fase pertama ini Fretilin menguasai banyak daerah pedalaman, mengenal kondisi geografisnya, dan mendapat pasokan bahan makanan.

Fase **kedua** berlangsung September 1977 hingga Desember 1978. Fase ini merupakan salah satu periode operasi militer paling intensif yang dilancarkan ABRI terhadap Fretilin yang sangat melemahkan pasukan Fretilin pada tahun 1978. Ini disebabkan perintah M. Yusuf (Panglima ABRI saat itu) agar ancaman militer di Timor Timur harus ditumpas secepat mungkin. Pada September 1977 dilancarkan operasi-operasi militer berskala besar untuk menumpas Fretilin. Operasi ini dimaksudkan untuk memutus hubungan Fretilin dengan basis penduduk-penduduk sipil. Akibatnya Fretilin mendapat tekanan berat. Fase ini diakhiri dengan banyak kekalahan Fretilin termasuk pemimpinnya Nicolau Lobato tewas dalam pertempuran di Maubisse, dekat Turriscail.

Fase **ketiga** berlangsung sejak 1979 hingga 1980, menandai periode kehancuran sangat parah di pihak Gerakan Perlawanan, mereka tanpa pemimpin yang jelas, dan tanpa kontak antara Fretilin dengan dunia luar. Menjelang 1980 operasi-operasi militer ABRI menambah beban berat bagi Fretilin di mana banyak pemimpin senior mereka terbunuh atau tertangkap, dan jalur bantuan terhadap mereka dipotong berkat strategi pengepungan. Antara 1976 dan 1980 lebih dari 100.000 orang rakyat Timor Timur mati akibat aksi-aksi militer, penyakit, atau kelaparan.

Fase **keempat** dimulai dengan terpilihnya Xanana Gusmao sebagai Ketua Dewan Revolusioner untuk perlawanan nasional pada Maret 1981. Fase ini berakhir dengan gagalnya gencatan senjata pada Agustus 1983. Antara Juli dan September 1981 ABRI melancarkan operasi militer baru. Dalam operasi ini dilibatkannya penduduk lokal Timor Timur dalam strategi "pagar betis", yakni dengan meletakkan orang

Timor Timur untuk berjalan dibarisan paling depan dari pasukan ABRI yang sedang menuju ke posisi pasukan Fretelin. Lewat operasi ini ABRI berhasil merampas 13.228 pucuk senjata termasuk 6.000 senjata jenis Mauser, 5.000 senapan G3, 3.500 granat tangan, 2.817 senjata anti tank, 857 pistol, 214 senapan mesin, 17 senjata berat, dan 4 alat peledak.

Fase **Kelima** berlangsung antara Agustus 1983 hingga Desember 1989. Periode ini memperlihatkan makin intensifnya upaya ABRI menumpas habis sisa-sisa pemberontak Fretelin. Banyak dilakukan operasi, dan terakhir operasi bersih yaitu operasi untuk menumpas habis sisa-sisa Fretelin. Namun Fretelin tetap memberikan perlawanan di mana pada tahun 1983 pada 16 Agustus Fretelin menggempur Bandar Udara Dili. Pada fase ini Gerakan Perlawanan mengubah taktiknya dengan lebih banyak berjuang secara politik.

Fase berikutnya berlangsung sejak “pembukaan” Timor Timur pada Januari 1990 hingga pecahnya “Insiden Dili” pada November 1991. Pada masa ini Fretelin memperkuat persatuan nasionalnya dan jaringan bawah tanah mereka dengan tujuan melancarkan perlawanan. Selama periode ini kekuatan Fretelin makin mengecil dengan hanya tinggal beberapa ratus orang, dan Pemerintah Indonesia menyebut Fretelin dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Pada fase ini Xanana berhasil mengadakan kontak dengan para pemuda Timor Timur di kota-kota besar dan kebijakan perlawanan tanpa kekerasan pun dimulai. Perlawanan ini meliputi protes-protes masyarakat, di mana para pemuda Timor Timur mengecam kehidupan politik dan kebudayaan Indonesia, dan memprotes kurangnya keuntungan yang diperoleh dari pembangunan ekonomi di wilayah ini. Xanana Gusmao mengubah strategi perjuangan, ia bertindak bukan sebagai seorang pejuang Fretelin tetapi ia sebagai wakil rakyat Timor Timur. Ia mengubah strategi perjuangan dari strategi militer ke strategi politik. Tujuannya adalah menjadikan propinsi itu tidak bersahabat secara politis terhadap Indonesia dan bukan mencoba mengalahkan pasukan Indonesia. Strategi ini memancing demonstrasi-demonstrasi politik yang makin intensif, yang memuncak dalam Insiden Dili pada 12 November 1991.⁴⁰

4.2.11.2 Pemerintahan di Timor Timur

Dalam periode yang ditandai dengan dimulainya kehadiran militer Indonesia, pada 17 Desember 1975, ketika Pemerintah Sementara Timor Timur (*Temporary Administration of East Timor* (TAET) dibentuk di bawah kepemimpinan Arnaldo Dos Reis Araujo, Pemimpin Apodeti, wakilnya adalah Francisco Lopes Da Cruz, pemimpin UDT. Pemerintahan ini berjalan sampai 30 Juli 1976, ketika Undang-Undang No. 7 tahun 1976, dan Peraturan Pemerintah No. 19 mengenai Pembentukan Pemerintahan

⁴⁰ Singh, Bilveer, 1998. *Timor Timur Indonesia dan dunia mitos dan kenyataan*. Jakarta: Citra Kahrisma Bunda, hal. 116-124.

Daerah Tingkat I Propinsi Timor Timur diterapkan. Sebagai propinsi ke 27 negara Indonesia, pemerintahan Timor Timur pun diindonesiakan.

Peraturan Pemerintah No. 19 membagi Timor Timur mejadi 13 kabupaten, 61 kecamatan, dan 1.739 desa, dengan gubernur sebagai kepala propinsi. Selama masa berintegrasi dengan Indonesia, Propinsi Timur mengalami empat pemerintahan gubernur, yaitu pertama Gubernur Arnaldo Dos Reis Araujo 1976 sampai 1978, kedua Gubernur Guilherme Maria Goncalves, September 1978 sampai September 1982, ketiga Gubernur Ir. Mario Vegas Carrascalao 1982 sampai 1992, dan yang keempat Abilio Yose Soares memerintah dari 1992 hingga 1999.

Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur, memegang jabatan sipil tertinggi di tingkat propinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di propinsi. Dalam menjalankan tugasnya Gubernur memiliki hubungan fungsional dengan DPRD yang kewenangannya ada di bidang legislatif. Pada tingkat propinsi juga terdapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Muspida merupakan forum konsultasi dan koordinasi yang terdiri dari Gubernur, Komandan Resort Militer (Danrem), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi, dan sebagai penasehat adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Struktur Muspida juga terdapat pada daerah Tingkat II bertindak sebagai lembaga koordinasi pada masing-masing kabupaten antara Bupati, Komandan Distrik Militer (Dandim), Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Sistem serupa juga terdapat di tingkat kecamatan yang disebut Tri Pimpinan Kecamatan (Tripika).

Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur, empat Pembantu Gubernur, seorang Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda), serta sejumlah anggota staf yang tugasnya adalah untuk menangani bidang masing-masing. Selain itu di tingkat propinsi terdapat badan-badan pembantu seperti: Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BP7, dan BKPM. Gubernur secara langsung memimpin unit-unit pelaksana daerah, kantor-kantor daerah dan fasilitas pemerintah, bupati, dan walikota, serta pembantu-pembantu gubernur untuk mengkoordinasi, mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pemerintah oleh para Bupati.

Untuk memfasilitasi koordinasi pengawasan dan pengembangan fungsi-fungsi umum pemerintah dan pembangunan oleh semua Bupati pada Tingkat II, Timor-Timur dibagi menjadi tiga wilayah kerja. Masing-masing wilayah dikoordinasi oleh seorang Pembantu Gubernur, dan posisi tersebut biasanya diisi oleh seorang perwira militer.

Di Propinsi Timor Timur juga terdapat kantor-kantor wilayah yang mewakili departemen-departemen pemerintah pusat tingkat propinsi atau kabupaten. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tingkat propinsi, kantor-kantor tersebut berada di bawah pengawasan dan kendali gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten fungsi

ini dijalankan oleh Bupati. Pejabat publik pada masa Orde Baru dipilih oleh DPRD. Jabatan eksekutif terpenting kedua di tingkat propinsi adalah Sekretaris Wilayah daerah (Sekwilda) yang ditunjuk sebagai bagian dari birokrasi sipil. Sekwilda memiliki kendali atas anggaran daerah, oleh karena itu jabatan itu sangat berpengaruh.

DPR merupakan badan legislatif pada beberapa tingkatan struktur pemerintah di seluruh Indonesia. Lembaga ini ada pada tingkat pusat (DPR), propinsi (DPRD Tingkat I), dan kabupaten (DPRD Tingkat II). Ketua DPRD dan Gubernur memiliki kekuasaan tertinggi pada tingkat propinsi. DPRD pertama Timor Timur dibentuk tahun 1976. Tiga puluh anggota DPRD ditunjuk. Ketika itu DPRD Tingkat II juga dibentuk dengan persetujuan Muspida. Tahun 1982 Pemilihan Umum pertama diselenggarakan di Timor Timur. Sebanyak 311.375 warga Timor Timur memberikan suara. Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pertama ini 36 orang memperoleh kursi DPRD Propinsi, sementara 8 orang mewakili Timor Timur di DPR Pusat Jakarta.⁴¹

Di bawah pemerintahan propinsi adalah pemerintahan kabupaten dan kecamatan yang dikepalai oleh Bupati. Seorang Bupati adalah kepala pemerintahan tingkat kabupaten. Bupati bertanggung jawab atas pemerintahan kabupaten dan bertugas mengkoordinasi seluruh kecamatan dalam wilayah kabupatennya. Pemerintah tingkat kabupaten terdiri dari kantor-kantor dinas yang dikoordinasi melalui propinsi. Sebagian besar bupati-bupati pada masa awal berasal dari atau memiliki hubungan dengan Partai Apodeti, dan UDT, atau merupakan mantan anggota partisan.

Di bawah pemerintahan kecamatan adalah pemerintahan desa. Desa-desanya di Indonesia diperintah oleh Kepala Desa yang berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Setelah periode pemindahan dan pemukiman ulang antara tahun 1978 dan 1980, Indonesia mulai membangun kembali struktur desa di Timor Timur. Tahun 1980 pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sesuai Keputusan Menteri Dalam negeri No. 25 LKMD di Timor Timur dibentuk tahun 1982. Penyelenggara LKMD berasal dari desa dan diberi tugas untuk melaksanakan program pembangunan pemerintah di tingkat desa.

4.2.11.3 Dinamika Pemerintahan Sipil

Kompleksitas pemerintahan sipil di Timor Timur dapat digambarkan melalui berbagai contoh dinamika penyelenggaraan pemerintah pada masa tugas sebagai Gubernur. Contoh-contoh berikut secara singkat menunjukkan bagaimana struktur dan sistem yang digambarkan di atas berfungsi dari waktu ke waktu serta bagaimana aspek-aspek tertentu dari konflik tahun 1999 berhubungan dengan tema-tema, atau masalah-masalah khusus terkait penyelenggaraan pemerintahan sipil pada masa-masa awal.

⁴¹ Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste, 2008. Per Memoriam Ad Spem, Denpasar, hal 41-42.

Masing-masing masa pemerintahan Gubernur menggambarkan kesulitan-kesulitan sistem pemerintah dalam memenuhi kebutuhan lokal, sementara pada saat yang sama juga memenuhi kepentingan kebijakan pemerintah pusat dan militer. Dinamika berbagai periode pemerintahan Gubernur juga menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan sipil tidak memiliki mekanisme untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan politik secara damai yang menimbulkan pergeseran-pergeseran aliansi politik dan meningkatkan ketegangan berdasarkan identitas politik dari waktu ke waktu. Terakhir pendekatan ekonomi berbagai pemerintahan sipil menunjukkan bagaimana anggaran sipil dapat didominasi oleh kepentingan keamanan dan militer.

Antara periode tahun 1976 sampai 1999, Timor Timur dipimpin oleh 4 gubernur berbeda yang semuanya adalah Putera Timor Timur. Dinamika masa pemerintahan dua Gubernur pertama memperlihatkan bagaimana sistem politik di Timor Timur tidak dibekali untuk menangani perbedaan politik. Kebijakan umum pemerintah daerah termasuk pembangunan ekonomi, direncanakan dan dijalankan dibawah pengaruh kuat militer dan kebijakan keamanan pemerintah pusat. Penyimpangan atau kritik terhadap sasaran serta kebijakan strategi yang sentralistis tidak mudah diterima oleh pemerintah pusat. Selama masa pemerintahan ini, rezim Orde Baru juga mempolitisasi pemerintahan sipil, dan hal ini lebih lanjut berakar dalam konteks Timor Timur di mana warga Timor Timur dengan latar belakang pro integrasi lebih mendapat kesempatan dibandingkan dengan orang lain. Situasi tersebut menciptakan kesempatan bagi orang-orang Timor yang ada dalam pemerintahan sipil untuk memikirkan kembali loyalitas politik mereka dari kedua sisi, yakni dari kalangan pro integrasi dan pro kemerdekaan. Oleh karena nya, ketika mengkaji aliansi politik pada tahun 1999, perlu diperhatikan demi menghindari asumsi bahwa loyalitas politik selalu konstan selama masa kehadiran Indonesia.

Pada masa pemerintahan Gubernur ketiga, Presiden Suharto secara resmi mengakhiri periode wilayah tertutup dengan menormalisasi status Timor Timur serta menyatakan terbuka bagi dunia luar. Walaupun pengaruh militer tetap kuat, kendali militer di Timor Timur berkurang. Normalisasi wilayah dan pemerintahan sipil member gerakan kemerdekaan Timor Timur lebih banyak kesempatan untuk mengungkapkan aspirasi politiknya melalui demonstrasi dan unjuk rasa. Akan tetapi aspirasi kemerdekaan yang disuarakan terbuka ini menumbulkan konflik-konflik baru termasuk korban jiwa yang tidak perlu dalam peristiwa di pemakaman Santa Cruz pada tanggal 12 Nopember 1991.

Sampai tahun 1999 menjelang Jajak Pendapat, pemerintahan sipil terus dipengaruhi secara signifikan oleh kepentingan keamanan. Dwi Fungsi ABRI berlanjut sehingga pemerintahan sipil terus dipengaruhi secara kuat oleh berbagai pertimbangan keamanan, termasuk pada masa pemerintahan Gubernur keempat. Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan

Negara RI menetapkan konsep “Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta” (Sishankamrata). Sistem tersebut member peran kepada penyelenggara pemerintahan sipil yang pada tahun 1999 membuat mereka harus mendukung kelompok-kelompok keamanan, seperti Pamswakarsa.

Dengan demikian, normalisasi pemerintahan sipil pada tahun 1992 tidak juga member mekanisme baru yang mampu menyelesaikan masalah dan perbedaan politik yang dihadapi pemerintahan sebelumnya. Tumpang tindih antara pemerintahan sipil dan sektor keamanan dalam hal pasukan keamanan sipil terus berlangsung, bahkan menjadi semakin kentara semasa pemerintahan gubernur terakhir. Ketika muncul kesempatan baru untuk mengurangi kehadiran militer dan membuka peluang mengungkapkan perbedaan politik pada tahun 1999, struktur-struktur dan proses-proses pemerintah masih belum berubah secara memadai dalam waktu yang ada untuk mencegah kekerasan.

Selain itu kemungkinan sumber ketegangan lainnya adalah persepsi sebagian orang Timor Timur bahwa mereka tidak dilibatkan secara penuh dalam fungsi-fungsi pemerintah, khususnya jabatan senior penting dalam pemerintahan sipil. Pada akhir tahun 1998 dan selama 1999, lembaga pelayanan publik telah terpolitisasi sedemikian rupa terkait dengan persoalan penentuan nasib sendiri.⁴²

4.2.11.4 Dinamika Pembangunan di Timor Timur oleh Pemerintah Indonesia

Salah satu aspek penting dari integrasi Timor Timur ke Indonesia berkaitan dengan pembangunan ekonomi di propinsi itu. Hal ini erat hubungannya dengan berbagai upaya yang dilakukan sejak Juli 1976 untuk memperluas infra struktur. Sejak awal Propinsi Timor Timur sangat rentan dilihat dari sisi ekonomi, pemerintah pusat dihadapkan kepada berbagai persoalan pembangunan di Timor Timur yang saat itu berada pada titik nol. Ketika berintegrasi dengan Indonesia, Timor Timur adalah propinsi yang termiskin dan terbelakang di Indonesia dalam hal infrastruktur, dengan penduduk yang hampir semuanya buta huruf.

Meurut Singh, pada tahun 1974, setelah empat abad dijajah, Timor Timur hanya memiliki 47 buah Sekolah Dasar, dua sekolah menengah, satu sekolah tingkat atas, dan tidak ada satupun universitas. Sekarang Propinsi Timor Timur terdapat 574 Sekolah Dasar, 99 Sekolah Menengah Pertama, 14 sekolah Menengah Atas, dan tiga Perguruan Tinggi. Tahun 1974 Timor Timur hanya memiliki dua rumah sakit, dan 14 klinik kesehatan. Sekarang propinsi itu memiliki 10 rumah sakit, dan 197 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pada tahun 1974, di Timor Timur hanya ada 20 km jalan beraspal, seluruhnya di Dili. Sekarang propinsi itu memiliki 428 km jalan

⁴² Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste, 2008. Per Memoriam Ad Spem, Dempasar, hal 43-44.

berasal yang tersebar di berbagai penjuru.⁴³

Melihat kondisi nyata masyarakat Timor Timur pada awal integrasi tahun 1976 yang begitu tertinggal, maka pemerintahan Indonesia bertekad untuk membangun Propinsi Timor Timur agar dapat sejajar dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Untuk itu dana besar digelontorkan untuk membangun Timor Timur. Menurut Neonbasu, strategi awal pembangunan di Timor Timur ditempuh dengan crash program, yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu (1) tahap pembangunan rehabilitasi yang berlangsung Oktober 1976 sampai Maret 1977. Sasaran utama pembangunan dalam tahap ini adalah merehabilitasi seluruh prasarana dan sarana umum seperti rumah sakit, balai pengobatan, sekolah, sarana telekomunikasi, dan perhubungan. Selain itu diperhatikan juga peningkatan ketrampilan kepada para pegawai agar dapat memahami sistem administrasi pemerintah yang berlaku di Republik Indonesia; (2) Tahap pembangunan konsolidasi yang berlangsung April 1977 hingga Maret 1978. Sasaran utama adalah melanjutkan serta meningkatkan langkah-langkah pembangunan sebelumnya sehingga menjangkau penataan dan perbaikan yang lebih luas. Misalnya peningkatan dan pemantapan aparatur pemerintahan, meningkatkan dan pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, dan lain sebagainya; dan (3) tahap pembangunan stabilisasi yang berlangsung April 1978 sampai Maret 1979. Sasaran utamanya langsung diarahkan kepada pemantapan serta kemampuan dan ketrampilan aparatur pemerintahan daerah secara menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di Propinsi Timor Timur sangat pesat. Menurut laporan Majalah Tempo tahun 1991 menyebutkan jumlah Sekolah Dasar (SD) yang sudah dibangun sebanyak 580 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 94 buah, Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) sebanyak 44 buah, sebuah universitas, dan institute Pastoral.⁴⁴ Hasil-hasil pembangunan yang telah diperbuat oleh pemerintah Indonesia sampai tahun 1999 jauh lebih banyak lagi. Hasil pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia dinilai miring oleh rakyat Timor Timur, terbukti pada jajak Pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka.⁴⁵

4.2.12 Tuduhan-tuduhan Internasional kepada Indonesia

Salah satu aspek yang paling banyak dibahas diberbagai tulisan mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia, khususnya yang beredar di Barat antara lain isu pembantaian (*genocide*), penduduk yang hilang, dan pelanggaran Hak Azasi Manusia

4.2.12.1 Pembantaian Massal di Timor Timur

Setelah keterlibatan militer Indonesia di Timor Portugis pada 7 Desember

⁴³ Singh, Bilveer, 1998. Timor Timur Indonesia dan dunia mitos dan kenyataan, Jakarta: Citra Kahrisma Bunda, hal. 141-142.

⁴⁴ Majalah Tempo, Edisi 23 Nopember 1991.

⁴⁵

1975, pemerintah Indonesia telah menginvasi sebuah wilayah secara tidak sah. Invasi Indonesia itu dianggap sebagai mencaplok wilayah daerah lain secara paksa untuk dimasukkan dalam wilayah Republik Indonesia. Invasi Indonesia itu banyak ditentang dan didiskusikan terutama di kalangan negara-negara barat. Segala konsekuensi negatif dari terjadinya peristiwa tersebut dituduh disebabkan oleh pemerintah Indonesia. Tuduhan-tuduhan itu dilancarkan oleh Fretelin ke seluruh dunia.

Dalam kaitan dengan integrasi Timor Timur dengan Indonesia Ramos Horta menyampaikan tuduhan yang tidak masuk akal dengan mengatakan kematian 100.000 hingga 200.000 rakyat Timor Timur yang berarti 10 hingga 20 persen jumlah penduduk wilayah ini, tidak bisa dinisbatkan sebagai kelalaian atau kesembronoan. Jika ada pembunuhan dan kerusakan yang dilakukan dalam suatu pola, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun, maka pasti didorong oleh keinginan untuk membinasakan penduduk asli di wilayah ini, sebagai "penyelesaian" atas masalah politik dan militer. Pola kekerasan dan penindasan ini menunjukkan bahwa jenderal-jenderal Indonesia mempunyai kebijakan yang dipikirkan masak-masak untuk menyelesaikan masalah Timor timur lewat pembunuhan massal. Pola-pola tersebut mencakup: (1) memindahkan rakyat secara paksa dari tanah nenek moyang mereka dan pemusatan mereka dalam kamp-kamp pemukiman tanpa pelayanan medis, sanitasi atau lahan untuk persawahan (kelaparan dan penyakit telah membunuh ribuan orang di kamp-kamp ini; (2) sterilisasi pria dan wanita dengan paksa; dan (penahanan secara sewenang-wenang, penculikan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang tidak bersenjata, penggunaan senjata kimia seperti napalm terhadap daerah-daerah yang dicurigai.⁴⁶

4.2.12.2 Penduduk yang Hilang

Banyak orang menuduh terutama negara-negara Barat terutama dilancarkan oleh Fretelin menyatakan bahwa Timor Timur kehilangan banyak penduduk akibat invasi dan pendudukan Indonesia, dan penerapan kebijakan pembantaian. Dinyatakan Indonesia percaya bahwa pemusnahan sejumlah orang itu akan dapat mengakhiri masalah ekonomi, politik, dan keamanan di Propinsi Timor Timur.

Berkaitan dengan tuduhan-tuduhan tersebut di atas, sejak tahun 1974 berlangsung tarik ulur tentang soal jumlah penduduk seperti dinyatakan oleh James Dunn bahwa satu sisi ekstrim tampak jelas telah berupaya meminimalisasi jumlah korban untuk tujuan mengurangi daya tarik tragedi ini. Sementara sisi ekstrim lainnya berusaha membesarkan konsekuensi-konsekuensi kemanusiaan dari invasi Indonesia, untuk menyedot lebih banyak perhatian internasional terhadap nestapa rakyat Timor Timur.⁴⁷

⁴⁶ Horta, A. Ramos. 1981. *The Eyewitness: Bitter Moments in East Timor Jungles*. Singapore : Usaha Quality Printers, hal 175.

⁴⁷ Dunn, J.S. 1974. *Portuguese Timor before and after the Coup: Options for the Future*. Canberra: Legislative Research Service, Australian Parliament, 1974.

Dilihat dari kecenderungan dan perkembangan sejarah, penduduk Timor Portugis tumbuh sangat lambat dan berfluktuasi secara drastis. Menurut angka perkiraan resmi Portugis, penduduk Timor Portugis tahun 1974 berjumlah 650.000 orang. Saldanha menyatakan bahwa fluktuasi dalam tingkat pertumbuhan penduduk Timor Timur disebabkan oleh enam faktor, yaitu (1) wilayah ini tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar selama 450 tahun sehingga tidak ada imigran yang masuk; (2) tingkat nutrisi masyarakat sangat rendah yang memperpendek tingkat harapan hidup mereka; (3) pola hidup di daerah-daerah terpencil di pegunungan, tanpa akses fasilitas kesehatan yang memadai, kematian sering terjadi karena penyakit terutama malaria; (4) banyak orang terbunuh dalam peperangan menentang kolonialisme Portugis; (5) pertumbuhan negatif berlangsung antara 1936 – 1948 disebabkan oleh Perang Dunia II ketika tentara Jepang menduduki Timor Timur, dan (6) pertumbuhan negatif 1,6% terjadi antara tahun 1973 dan 1980 karena perang saudara dan operasi-operasi militer ABRI untuk menumpas Fretilin. Selama dasawarsa 1970-an diyakini bahwa lebih dari 200.000 orang rakyat Timor timur mati, selain itu ribuan orang menyingkir ke Portugal atau Australia.⁴⁸

4.2.12.3 Pelanggaran Hak Azasi Manusia di Timor Timur

Sejak Pemerintah Indonesia melakukan intervensi militer di Timor Portugis 7 Desember 1975, maka sejak itu dunia menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur. Tuduhan itu sering dilontarkan oleh Fretilin, Negara-negara barat, dan juga badan-badan internasional seperti Amnesty Internasional, *Asia Watch* lewat berbagai publikasi mereka. Tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur oleh pemerintah Indonesia seperti pembunuhan massal, pembunuhan-pembunuhan tanpa melalui proses pengadilan. Penangkapan sewenang-wenang, praktek penyiksaan penduduk, penawanan, penculikan, kebijakan pemukiman kembali penduduk di daerah-daerah yang dikontrol ABRI. Tuduhan-tuduhan itu sangat membebani politik luar negeri Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kusaeni bahwa beban Timor Timur bagi Indonesia di tingkat internasional, Timor Timur merupakan batu kerikil yang mengganjal sepatu diplomasi Indonesia. Timor Timur menjadi sasaran hujatan internasional atas tuduhan pelanggaran hak azasi manusia. Peristiwa apa saja yang terjadi di Timor Timujr, apalagi yang sekaliber Santa Cruz 1991, menjadi sorotan internasional yang makin sensitif terhadap soal hak azasi. Indonesia di dunia internasional dipandang sebagai penjajah dan penindas rakyat Timor Timur. Di tingkat nasional Timor Timur menjadi beban yang luar biasa. Perang di Timor Timur telah menguras kantong Indonesia. Dana untuk membangun Timor timur selama 24 tahun itu juga jauh lebih banyak.⁴⁹

⁴⁸ Saldanha, Joao Mariano, D.S., 1994. *The Political Economy of East Timor Development*. Jakarta: Sinar harapan, hal 256.

⁴⁹ Kusnaeni, Ahmad, 2000. *Kerikil dalam sepatu diplomasi penyelesaian kasus Timor Timur di PBB (Kesaksian wartawan)*. Jakarta: Antara, hal. 2-3

4.2.13 Peristiwa Insiden Dili 12 Nopember 1991

Sejak tahun 1989 pemerintah Indonesia optimis bahwa masalah Timor Timor hampir dapat diselesaikan secara tuntas. Gerakan perlawanan Fretilin sudah berhasil ditumpas. Pembangunan diberbagai bidang sudah dijalankan. Opini dunia tentang integrasi Timor Timur dengan Indonesia makin lama makin positif. Karena kondisi yang makin kondusif maka pada tahun 1989 Propinsi Timor Timur dinyatakan sebagai propinsi yang terbuka sama dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia.

Kondisi yang demikian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Gerakan Perlawanan untuk merubah strategi perjuangannya dari perjuangan lewat konfrontasi senjata berubah menjadi perjuangan melalui politik dengan memanfaatkan pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk melakukan gerakan protes pada berbagai situasi dan kondisi. Dalam keadaan yang demikian gerakan perlawanan merancang sebuah demonstrasi yang memancing militer Indonesia untuk bertindak sehingga terjadilah sebuah peristiwa yang dikenal dengan Insiden Dili atau peristiwa Santa Cruz tanggal 12 Nopember 1991. Insiden itu terjadi ketika sebuah perubahan besar tengah berlangsung di mana Timor Timur sedang mengalami transformasi lewat pembangunan infrastruktur. Rakyat sedang menikmati keuntungan pembangunan. Ketika propinsi itu mengalami normalisasi lewat kebijakan keterbukaan, ABRI makin akomodatif di mana pendekatan keamanan diganti dengan pendekatan operasi-operasi territorial, dan ketika kemakmuran dan niat baik mulai dilihat sebagai kunci penyelesaian masalah Timor Timur. Dengan terjadinya peristiwa itu maka semua apa yang sudah dilakukan menjadi tidak berarti bahkan menjadi kontra produktif bagi penyelesaian secara tuntas masalah Timor Timur.

Menurut Singh, terjadinya Insiden Dili 12 Nopember 1991 disebabkan oleh tiga faktor, yang saling berkaitan, yaitu (1) perubahan strategi Fretilin/Gerakan Perlawanan dari pendekatan militer ke pendekatan yang pada dasarnya lebih bercorak politis, (2) keputusan dan konsekuensi "dibukanya Timor Timur"; dan (3) keputusan untuk mengundang delegasi Parlemen Portugal yang dibatalkan pada menit-menit terakhir.⁵⁰

Kronologis peristiwa berdarah Insiden Dili atau Insiden Santa Cruz menurut Nevins bahwa pada pagi hari itu Pastor Ricardo menyelenggarakan misa untuk Sebastiao Gomes, seorang aktivis pro kemerdekaan yang dibunuh oleh tentara Indonesia dua minggu sebelumnya di Gereja Motael. Sebastiao Gomes dan sejumlah pemuda lainnya berlindung dari militer Indonesia pada akhir Oktober. Dalam persiapan untuk kedatangan delegasi resmi Parlemen Portugal ke Timor Timur (yang akhirnya tidak pernah terjadi). TNI mulai banyak mencari pemuda yang dicurigai mendukung kemerdekaan. Dan sangat banyak melarikan diri ke gereja yang mereka pikir adalah tempat aman. Pada 28 Oktober tentara menyerang gereja tidak lama

⁵⁰ C 157.

setelah tengah malam, menembak Sebastiao Gomes. Setelah misa peringatan yang diselenggarakan dua minggu sesudahnya, para hadirin berjalan ke Pekuburan Santa Cruz di mana Sebastiao dikuburkan. Ketika orang banyak itu membanjiri jalan-jalan Dili, mereka membentangi berbagai spanduk dan meneriakkan semboyan pro kemerdekaan. Banyak orang meninggalkan tempat kerja dan rumah mereka untuk bergabung dengan rombongan yang berubah menjadi demonstrasi massa melawan kekuasaan Indonesia. Pada waktu arak-arakan tersebut mencapai tujuan, jumlahnya sudah membengkak menjadi ribuan. Di sana mereka mengadakan upacara singkat. Ketika kerumunan damai itu mulai terpecah, militer Indonesia tiba dan menghadang di sebuah ujung jalan. Tanpa peringatan dan menurut para saksi mata, tanpa provokasi, para tentara berbaris menuju kerumunan orang tersebut dan menembak dengan senapan M-16 buatan Amerika Serikat, membunuh lebih dari 250 orang.⁵¹

Kronologis mengenai kejadian Insiden Dili itu antara satu sumber dengan sumber lainnya banyak kesamaan, tetapi ada juga perbedaan. Kronologi yang telah diuraikan di atas dilaporkan oleh Joseph Nevins yang intinya tulisan lebih pro kepada kelompok pendukung kemerdekaan. Kronologis kejadian sebagaimana yang dilaporkan oleh Singh bahwa Insiden Dili adalah konsekuensi langsung tewasnya Sebastiao Gomes Rangel pada 28 Oktober. Di pagi buta 12 Nopember, sebuah misa suci diselenggarakan di Gereja Motael. Setelah upacara, sekitar 2.500 pemuda bergerak dalam sebuah prosesi ke pemakaman Santa Cruz, untuk mengadakan “Bunga manis” penaburan bunga di hari ke 14 tewasnya Sebastiao Gomes. Ribuan orang hadir menandakan bahwa ini jelas bukan merupakan sebuah upacara biasa, tetapi sesuatu yang diorganisasikan secara politis. Belakangan gejala ini tampak jelas. Pada awalnya para pengunjung rasa yang sekaligus berkabung itu bermaksud menabur bunga di Pemakaman Santa Cruz, dan kemudian dari situ, berpawai menuju Hotel Turismo di mana Peter Kooijmans menginap, untuk melakukan unjuk rasa menentang Indonesia dan integrasi. Namun demikian dalam perjalanan menuju Pemakaman Santa Cruz, rombongan tersebut mulai mengibarkan bendera fretilin, poster-poster Xanana, serta membentangi spanduk besar dengan slogan seperti “Bebaskan Timor Timur” dan “Hidup kemerdekaan”. Sementara prosesi itu berlangsung damai, meskipun hingar-bingar, di tengah perjalanan terjadi kekacauan – yang detail ceritanya simpang siur. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sejumlah demonstran menyerang seorang Mayor ABRI hingga luka parah. Versi lain berpendapat bahwa rombongan pawai terpancing ketika sejumlah anggota ABRI berusaha merampas poster-poster Xanana dan bendera Fretilin. Terlepas bagaimana persisnya peristiwa itu, yang pasti adalah terjadi ketegangan dan tindak kekerasan antara pasukan keamanan dengan rombongan yang ikut pawai. Dua puluh menit kemudian, prosesi itu tiba di pemakaman dan barisan tentara datang dari arah yang berbeda dan melepaskan tembakan ke

⁵¹ Nevins, Joseph, 2008. *Pembantaian Timor Timur, Horor masyarakat Internasional*, Yogyakarta: Galang Press, hal. 43

arah prosesi itu. Setelah sekitar dua sampai tiga menit berlangsung penembakan oleh senjata otomatis, lalu berlangsunglah penembakan secara sporadis selama 50 menit. Insiden ini merupakan tragedi berdarah dengan banyak orang terbunuh dan luka berat. Tujuh orang asing hadir di pemakaman itu. Seorang warga Selandia Baru terbunuh, dua wartawan Amerika terluka, dan seorang fotografer berkebangsaan Inggris ditangkap, meskipun kemudian dilepas kembali. Orang-orang asing itulah yang belakangan menjadi saksi mata utama atas Insiden Dili itu.⁵²

Mengenai jumlah korban yang tewas, banyak versi dan jumlahnya berbeda-beda. Menurut Nevins jumlah yang tewas adalah 250 orang lebih. Menurut penyelidikan yang dilakukan perlawanan bawah tanah mendapatkan 273 tewas. Laporan pemerintah Indonesia semula menyatakan bahwa yang tewas sebanyak 19 orang, dan setelah dibentuk Komisi Penyelidik menyatakan bahwa yang tewas berjumlah 53 orang. Namun laporan Indonesia itu dibantah oleh para wartawan yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Menurut investigasi resmi PBB menyatakan bahwa korban yang tewas dalam insiden Dili sebanyak 100 orang. Insiden Dili 12 Nopember 1991 sangat memukul kebijakan Indonesia atas Timor Timur. Apalagi para wartawan asing memutar ulang rekaman kejadian Insiden Dili yang sangat menyudutkan pemerintah Indonesia. Laporan resmi pemerintah Indonesia dianggap bohong jika disesuaikan dengan rekaman video yang mereka punya. Dunia mengkritik Indonesia karena dianggap telah melakukan pelanggaran hak azasi manusia.

4.2.14 Penyelesaian Masalah Timor Timur secara Tuntas

Setelah terjadinya Insiden Dili 12 1991 tekanan internasional terhadap Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur bertambah keras. Indonesia dituduh oleh dunia internasional telah melakukan pelanggaran hak azasi manusia secara serius di Timor Timur. Pemerintah Indonesia boleh berkaok-kaok dengan mengklaim bahwa integrasi Timor Timur telah final, tetapi PBB tetap menganggap Timor Timur bukan wilayah sah Indonesia. Di forum internasional, Timor Timur merupakan batu sandungan bagi diplomasi Indonesia.

Di dalam negeri pada tahun 1997 Indonesia dilanda oleh krisis moneter. Krisis moneter tersebut memicu terjadinya krisis politik, krisis ekonomi dan krisis moral, krisis kepercayaan dan krisis multi dimensional di Indonesia. Pada Mei 1998 Presiden Suharto lengser keprabon. Ini menandai tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang merupakan arsitek integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Wakil Presiden Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Suharto. Dalam kondisi yang serba sulit akibat terjadinya krisis multi dimensi di Indonesia negara-negara barat berkonspirasi untuk semakin memperkeras tuduhan bahwa Indonesia telah

⁵² Singh, Bilveer, 1998. Timor Timur Indonesia dan dunia mitos dan kenyataan, Jakarta: Citra Kahrisma Bunda, hal.171.

melanggar hak azasi manusia yang berat di Timor Timur dan menuntut Indonesia untuk segera menuntaskan masalah Timor Timur yang diterima secara internasional. Tekanan internasional yang bertubi-tubi itu memaksa pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur.

Diplomasi penyelesaian kasus Timor Timur memasuki tahapan baru pada 6 – 7 Agustus 1998 saat diadakan dialog segi tiga Timor Timur di Markas PBB New York. Ketika itu setelah berunding selama dua hari, Pemerintah Republik Indonesia dan Portugal berhasil menyepakati untuk membahas gagasan pemberian otonomi untuk Timor Timur. Kofi Anan menggambarkan kesepakatan itu sebagai titik balik upaya penyelesaian masalah Timor Timur yang telah memakan waktu 15 tahun.⁵³

Setelah selesai sidang Kabinet pada tanggal 27 Januari 1999 Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan adanya Opsi II bagi penyelesaian Timor Timur, yakni Indonesia akan melepas Timor Timur jika rakyat menolak tawaran Opsi I. Yang dimaksud Opsi I adalah kepada Timor Timur akan diberikan Otonomi Khusus yang Luas.

Pada bulan Maret 1999 diadakan perundingan Tri Partit antara Indonesia, Portugal, dan PBB di mana disepakati untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat di Timor Timur untuk menentukan apakah Otonomi luas akan diterima atau ditolak. Pertemuan ini merupakan kesepakatan awal sebelum kesepakatan 5 Mei 1999.

Pada tanggal 5 Mei 1999, Indonesia, Portugal, dan PBB mencapai kesepakatan mengenai Timor Timur di Markas PBB di New York. Kesepakatan New York ini terdiri dari tiga pokok. Pertama, kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Portugal mengenai masalah Timor Timur. Kedua, kesepakatan mengenai Penyelenggaraan Keamanan bagi Penentuan Pendapat Rakyat di Timor Timur. Ketiga, kesepakatan mengenai Modalitas Penentuan Pendapat Rakyat Timor Timur melalui pemberian suara langsung.⁵⁴

Sesuai dengan hasil kesepakatan 5 Mei 1999, pada tanggal 11 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB membentuk UNAMET melalui Resolusi No. 1246/1999. Misi dan tujuan UNAMET adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Penentuan Pendapat yang akan memutuskan apakah rakyat Timor Timur menerima atau menolak tawaran konstitusional otonomi khusus bagi Timor Timur di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan misi UNAMET mengikuti tahap-tahap operasional Penentuan Pendapat sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan mengenai Modalitas Penentuan Pendapat rakyat Timor Timur melalui Pemberian Suara Langsung. Tugas operasional UNAMET terbagi dalam:

- a. Tahap penyebarluasan Informasi:

⁵³ Kusaeni, Ahmad, 2000. Krikil Dalam sepatu-Diplomasi Penyelesaian Kasus Tim Tim di PBB (Kesaksian wartawan). Jakarta: Pustaka Antara.

⁵⁴ Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste, Permemoriam Ad Spem, Denpasar: Hal. 60.

- PBB mempersiapkan dokumen mengenai Kesepakatan Dasar dan Dokumen Otonomi.
- PBB akan menyebarluaskan dan menjelaskan isi Kesepakatan Dasar dan Dokumen Otonomi secara tidak memihak dan faktual di dalam dan di luar Timor Timur.
- PBB akan menjelaskan kepada para pemilih proses pemilihan dan prosedur-prosedur serta implikasi dari “menerima” atau “menolak” opsi yang ditawarkan.

b. Pendaftaran:

- PBB akan menyelenggarakan pendaftaran di dalam maupun di luar Timor Timur secara terus menerus selama 20 hari.
- PBB juga melaksanakan penyebaran informasi mengenai kegiatan pendaftaran.

c. Kampanye:

- PBB akan mengusulkan suatu aturan perilaku yang dibahas dengan para pendukung dan penentang proposal otonomi.

d. Pemungutan Suara di Timor Timur maupun di luar Timor Timur

- PBB akan menyelenggarakan pemungutan suara di 200 tempat pemungutan suara (yang sama dengan pusat pendaftaran) di Timor Timur dan tempat pemungutan suara di luar Timor Timur.

e. Peninjau

- Indonesia dan Portugal berhak mengirimkan wakil-wakil mereka dengan jumlah yang sama untuk mengamati seluruh tahapan kegiatan proses Penentuan Pendapat baik di dalam maupun di luar Timor Timur.
- Peninjau internasional akan dapat mengamati proses Penentuan Pendapat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disusun oleh PBB guna mengatur kehadiran mereka.

f. Pendanaan

- Sekjen PBB akan meminta persetujuan Dewan Keamanan pelaksanaan operasi tersebut guna menjamin pendanaan anggaran yang diperlukan. Onstribusi sukarela akan disalurkan melalui sebuah Dana Perwalian yang ditetapkan untuk maksud ini.⁵⁵

Pemungutan suara Penentuan Pendapat Rakyat Timor Timur dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasil Penentuan Pendapat diumumkan pada tanggal 4 September 1999, dimajukan dari rencana awal tanggal 7 September 1999. Pada tanggal

⁵⁵ Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste, Permemoriam Ad Spem, Denpasar: Hal. 60-61.

4 September 1999 Sekretaris Jenderal PBB mengumumkan bahwa 78,5 persen dari 450.000 pemilih telah menolak tawaran otonomi luas, yang kemudian membuka pintu bagi kemerdekaan Timor Timur.

Pengumuman hasil Penentuan Pendapat, walaupun sudah ada perintah dari Presiden Habibie kepada TNI dan Polri untuk menegakkan hukum dan ketertiban, namun kekerasan dengan intensitas yang mengawatirkan mulai terjadi. Meningkatnya kekhawatiran masyarakat internasional mengenai adanya kekerasan ini sebelumnya pernah diungkapkan oleh Sekjen PBB Kofi Anan.

Guna mengendalikan situasi yang semakin memburuk, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keputusan Nomor 107/1999 mengenai Keadaan Darurat Militer di Propinsi Timor Timur pada tanggal 6 September 1999. Pemerintah Indonesia kemudian setuju untuk mengundang PBB ke Timor Timur dan hal ini ditandai dengan serah terima tanggung jawab keamanan atas Timor Timur dari Panglima Darurat Militer Mayor Jenderal Kiki Syahnakri kepada Mayor Jenderal Peter Cosgrove sebagai komandan pasukan INTERFET (International Force for East Timor) PBB pada tanggal 27 September 1999.⁵⁶

⁵⁶ Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste, Permemoriam Ad Spem, Denpasar, hal. 63.



**BAB 5 | Dinamika Perbatasan
sebagai Pintu Gerbang
matahari Terbit
(loro Sae)**

5.1 Panjang Garis Batas, Pilar dan Pos di Perbatasan

Panjang garis batas dan kondisi garis batas

Perbatasan darat antara Negara Republik Indonesia (RI) dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL) membentang sepanjang 239 km yang terdiri dari perbatasan di sebelah Barat yakni dengan enclave Oekusi sepanjang 101 km dan perbatasan di sebelah Timur yakni antara kabupaten Belu dengan wilayah RDTL sepanjang 138 km. Menurut Djawahir et.al (2002) dalam Widiyatmika 2007¹ perbatasan RI-RDTL di sebelah Barat (Oekusi) sepanjang 101 km, 74 km mengikuti Thalweg dan 27 km mengikuti watershed dan lembah. Sedangkan garis batas RI-RDTL bagian Timur sepanjang 138 km, 117 km mengikuti Thalweg dan 21 km mengikuti Watershed dan lembah. Menurut Djawahir et.al (2002) dalam Widiyatmika M.2007c² batas RI-RDTL dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yakni:

- a. Water shed sepanjang lembah yang relative mudah dikunjungi dan didelineasi mencapai kurang lebih 15%.
- b. Watershed sepanjang pegunungan.bukit yang sulit dikunjungi dan didelineasi mencapai kurang lebih 15%.
- c. Thalweg sepanjang alur sungai yang diduga akan membawa kerumitan baik dalam penerapan prinsip-prinsip penarikan garis batas maupun dalam pelaksanaan penarikan garis batas di lapangan mencapai kurang lebih 70%. Kerumitan tersebut disebabkan tipe sungai di wilayah perbatasan RI-RDTL yang dominan adalah sungai musiman yang sebagian tetap mengalir dan sebagai kering pada musim kemarau. Alur sungai berubah ubah dari waktu ke waktu sehingga garis batas wilayah dengan Thalweg juga berubah-ubah atau bersifat dinamik. Terdapat river island di sebagian sungai terutama di daerah hilir yang dimanfaatkan oleh penduduk dari kedua belah pihak. Di beberapa tempat ada upacara adat yang dilaksanakan di sungai. Masyarakat mengetahui dan mengakui sungai sebagai batas yang memisahkan wilayah RI-RDTL. Mereka juga mengakui aliran air terbesar sebagai batas sesaat dan apabila alur aliran terbesarnya bergeser. Mereka mengakui dan menerima pergeseran tersebut.

Garis batas antara wilayah Negara Republik Indonesia dengan wilayah Timor Leste menurut perjanjian tahun 1904 antara Portugis dan Belanda yang dikutip Djawahir et.al (2002) dalam Widiyatmika M.2007c³ menyebutkan beberapa nama sungai dan gunung serta bukit yang menjadi dasar batas. Sungai-sungai pada batas

¹ Widiyatmika M.2007c. Masalah Sosial Budaya di Perbatasan (Laporan Penelitian) hal. 28

² Widiyatmika M.2007c hal. 29

³ Widiyatmika M. 2007c hal. 30

antara wilayah enclave Oekusi dengan wilayah kabupaten Timor Tengah Utara dan kabupaten Kupang adalah: Noel Meto, Noel Besi, Noel Niema, Bijael Sunan, Noel Miumafo, Nono Boni, Noe Pasab, Nono Sunu, Fatu Besin, Noel Ekan, Sonou, Nivo Nono dan Nono Balena. Sedangkan nama nama sungai dalam perbatasan antara kabupaten Belu dengan wilayah RDTL adalah: Mota Beku (Silaba), Oe Bedain, Mota Asodat, Muda Sorun, Talau, Malibaka, Mareca (Lolu), Tafara, Mota Haliboli, We Dick, Mota Babulu, Mota Talas, Mota Masin, We Bedain, Tafara, We Merak, We Nu dan Mota Halibli.

Adapun nama gunung dan bukit yang tercantum sebagai tanda batas adalah: pada wilayah perbatasan Oekusi dengan kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara serta wilayah kabupaten Belu adalah: gunung Bulu Hulu, Puncak Dato Miet, Pegunungan Tahi Fehu, Fatu SData, Fatu Rusa, Puncak Uas Lulik, Fatu Rokou, Puncak Fitun Monu, Debu Kasabauk, Ainun Matan, Lali Fuin, Puncak Aikakae dan Takis.

Secara Administratif wilayah perbatasan mencakup 3 wilayah kabupaten yakni kabupaten Belu, kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang. Di ke tiga wilayah kabupaten yang dijadikan lokasi penelitian meliputi kecamatan dan desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL). Jumlah kecamatan perbatasan 9 buah dengan 47 buah desa. Sebaran kecamatan dan desa dari ke tiga kabupaten perbatasan adalah: 5 kecamatan perbatasan di kabupaten Belu yakni: kecamatan Lamaknen, kecamatan Renhaat Timur, kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Tasifeto Barat dan kecamatan Kobalima. Jumlah desa perbatasan dari 5 kecamatan tersebut 28 desa. Kecamatan di kabupaten Timor Tengah Utara 3 buah kecamatan perbatasan yakni: kecamatan Miomaffo Barat, kecamatan Miomaffo Timur dan kecamatan Insana Utara. Jumlah desa perbatasan dari ke tiga kecamatan tersebut: 18 desa. Sedangkan kecamatan perbatasan di kabupaten Kupang yakni kecamatan Amfoang Utara dengan sebuah desa perbatasan. Nama-nama desa perbatasan di 9 kecamatan dari 3 kabupaten perbatasan di sajikan dalam tabel 1, 2 dan 3 dibawah.

Tabel 1

Nama-nama desa dan kecamatan perbatasan di kabupaten Belu.

No	Kecamatan /Desa	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km2)
I	Kec. Lamaknen	Weluli	
	Lamaksenu	Builalu	9,33
	Makir	Tahon	14,09
	Mahuitas	Nibora	9,10
	Kewar	Kewar	21,64
	Duarato	Duarato	3,42

	Henes	Henes	6,22
	Lakmaras	Sabulmil	21,39
	Loonuna	Nokarwek	45,04
	Nualain	Nualain	11,82
	Debululik	Beiuru	12,00
	Maudemu	Beisurik	17,00
II	Renhaat Timur	Haekesak	
	Maumutin	Turiskain	9,56
	Tohe	Sikutren	32,55
	Asumanu	Raibubu	22,95
III	Tasifote Timur	Wedomu	
	Takirin	Hasmetan	930
	Dafala	Dubasa	1.970
	Fatubaa	Taeksoruk	3.400
	Fatulotu	Ailomea	925
	Maneikun	Halibete	910
	Sarabau	Tunimaut	1.260
	Sadi	Sadi	1.800
	Talakadi	Dubanas	1.595
	Silawan	Nanaiklot	3.000
	Bauho	Nubelu	32.450
IV	Kec. Tasifeto Barat	Kimbana	
	Fohoeka	Laktutus	1.221
	Nanaenoe	Nanaenoe	1.222
	Laokeu	Batulu	2.521
V	Kec. Kobalima	Wemasa	
	Alas Utara	Fatusakar	1.840
	Kotabiru	Kotabiru	2.005
	Alas	Kotabot	2.706
	Alas Selatan	Lalebun	3.060

Sumber: Bappeda NTT. 2002. Rencana Penataan Ruang wilayah Perbatasan.

Tabel 2

Nama –nama desa dan kecamatan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Kecamatan /Desa	Ibu Kota	Luas Wilayah (km2)
I	Miomaffo Barat	Eban	447,3
	Oeiole		15,00
	Badnes		11,17
	Noelfoko		11,00
	Saenam		10,00
	Manusasi		9,00
	Tasinifu		50,00
	Naekake A		20,00
	Naekake B		11,00
	Noelelo		9,50
II	Kec. Miomaffo Timur	Nunpene	447,33
	Tubu		10,00
	Haumenei Ana		11,00
	Sunkaen		9,00
	Nainaban		25,00
	Inbate		16,00
	Buk		29,00
	Napan		5,68
	Saenoni		6,70
	Banain A		11,00
	Banain B		8,00
	Banain C		9,00
	Sunsea		28,00
	Bakitolas		25,00
	Benus		25,00
	Manamas		25,00
III	Ke.Insana Utara	Wini	106,72
	Humusu C		14,00

Sumber: Bappeda NTT. 2002. Rencana Penataan wilayah Perbatasan. Kupang

Tabel 3

Nama-nama desa dan kecamatan perbatasan di Kabupaten Kupang

No	Kecamatan /Desa	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km2)
I	Amfoang Utara	Naikliu	911,80
	Netemenanu Utara	Oepoli	104,65

5.1.2 Pilar Batas

Semula masalah Perbatasan berdasarkan penyelesaian sengketa perbatasan yang disepakati berdasarkan A Conventional for Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions the Island of Timor yang ditanda tangani di The Hague pada tanggal 1 Oktober 1904 yang 4 tahun kemudian diratifikasi tanggal 29 Agustus 1908 dan selanjutnya berdasarkan Hasil Pengadilan Arbitasi (Permanent Court of Arbitration) di Paris tanggal 26 Juni 1914 memutuskan penyelesaian perbatasan antara Belanda dengan Portugis di Timor. Namun setelah Lahir Negara RDTL tahun 2002 perlu dilakukan kesepakatan kembali. Kesepakatan ditanda tangani Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dan Kepala United Nations Administration in East Timor (UNTAET) Sergio de Mello di Denpasar tanggal 2 Februari 2002, Kemudian kedua Negara menyepakati Persejuaan Sementara (Provisional Agreement) mengenai perbatasan darat pada tanggal 8 April 2005 yang ditanda tangani Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hasan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Timor Leste di Dili.⁴ Panjang Garis perbatasan antara NTT dan Timor Leste sepanjang 268,8 kilo meter yang membelah wilayah Timor Barat dan Timur serta wilayah Oekusi. Melalui Perjanjian tersebut baru berhasil disepakati 907 koordinat titi batas atau 97%. Titik, Dari 907 titik baru 163 titik terealisasi dibuat pilar batas.⁵ Pilar batas pertama dalam bentuk prasasti dilakukan di PLB Motaian dan Batugede yang ditanda tangani pada bulan Juli 2005. antara Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirayuda dengan Menteri Luar Negeri Timor Leste DR. Jose Ramos Horta di Motaian pada tanggal 30 Agustus 2005. Untuk mengisi kekosongan pilar batas dibentuk Boder Sign (BSP).



Gambar 5.1
Prasasti Pilar Batas di Motaian

⁴ Henuk, Jusuf Lenard 2012. Timor Express 7 Juli 2012 hal.4.

⁵ Pos Kupang 18 Desember 2012.



Gambar 5.2
Prasasti Pilar Batas di Napan Kabupaten TTU



Gambar 5.3
Pilar batas biasa di Desa Haaumeni Ana
Kabupaten TTU

5.1.3 Pos Perbatasan

Di wilayah Perbatasan terdapat 9 PLB yang resmi diberlakukan di wilayah perbatasan di Weai-Sakto dan Mtamauk Salele. 9 Titik PLB perbatasan yang diberlakukan mencakup:

1. Motaian-Batugede.
2. Metamauk-Salele
3. Napan Bawah-Bobometo
4. Builalo –Meno
5. Haekesak-Turiskain
6. Hamusu/Wini-Sakalo
7. Laklutas-Belulik Leten
8. Haumeniana-Passabe
9. Pos Oepoli Sungai- Citrana ⁶

Sedangkan Pos Satgas Pengamanan Batas (Pamtas) di perbatasan terdiri dari 38 buah Pos yang meliputi Pos Satgas Pamtas di Belu meliputi 25 Pos dan wilayah

⁶ Pos Kupang 18 Desember 2011

⁷ Pos Kupang 12 Januari 2012.

kabupaten TTU meliputi 13 Pos Satgas Pamtas. Setiap Pos Satgas Pamtas dijaga antara 15-17 anggota TNIAD.⁷ Para prajurit di lingkungan Satgas Pamtas terdiri dari prajurit dari Jonif 743 PSY dan Jonif 312 Kala Hitam.

5.1.4. Pulau Batek sebagai Pulau Terluar

Pulau Batek merupakan pulau yang strategis karena posisinya sebagai jalur 3 dari wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Letaknya dalam wilayah kecamatan Amfoang Utara, kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi, RDTL. Kondisi fisik pulau Batek yang memiliki luas 24 hektar (saat air surut) dan 20 hektar saat air pasang. Memiliki garis Pantai sepanjang 1.869 meter., Kedalaman 70 meter dan kemiringan 45 sampai 60 derajat⁸ Mengingat letaknya yang strategi tersebut di pulau Batek dibangun Daerah Latihan Tembak TNI AL sekaligus menjadi pos pemantauan. Di pulau Batek terdapat fasilitas berupa Pos TNI AL. Penara Pengawas dan memiliki sebuah halipet.



Gambar 5.4 Pulau Batek.



Gambar 5.5 Papan Daerah Lapangan Tembak TNI AL di Pulau Batek

⁸ Piet A Tallo.2005. Memahami Dengan Hati Dalam Membangun Nusa Tenggara Timur. Tabloit Bentara, Jakarta hal.187.



Gambar 5.6 Menara Pengawas TNI AL di pulau Batek

5.2 Kawasan Perbatasan RI-Timor Leste Sebagai Pintu Gerbang Matahari Terbit (*Loro Sae*): Arti Penting, Keadaan dan Permasalahannya

Presiden B.J. Habibie tahun 1999 mengumumkan secara resmi dua opsi bagi masyarakat Timor Timur untuk menentukan pilihan mereka, apakah akan menerima sebuah tawaran otonomi khusus dari Jakarta ataukah akan memilih untuk menentukan nasib sendiri (merdeka).



Gambar 5.7

Pintu Gerbang Perbatasan RI-RDTL di Napan, dilihat dari wilayah Timor Leste. Tampak seorang perajurit anggota Satgas Pantas Perbatasan RI-RDTL Yonif 312 Kala Hitam sedang diwawancarai oleh peneliti.



Gambar 5.8

Pos Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312 Kala Hitam di Napan, yang terletak di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT)-Distrik Oekusi (RDTL). Tampak seorang mahasiswa Undana yang melakukan pengamatan di daerah tersebut, tampak mengagumi karya lukisan perajurit Satgas yang baru saja diselesaikan beberapa hari sebelumnya.

Kawasan perbatasan Ri-Timor Leste, yang oleh penduduk setempat, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun yang berada di Timor Leste biasa disebut Loro Sae, yang berarti matahari terbit. Bagi orang Timor, jauh sebelum penjajah datang, tanah inilah yang memberi kehidupan dan menerbitkan harapan-harapan hingga ke anak cucu. Tanah tempat matahari terbit ini, yang sekarang terbelah menjadi dua negara, sebagai daerah perbatasan, akan menimbulkan banyak masalah jika tidak dikelola dengan semestinya. Di beberapa tempat, masih belum terselesaikan batas-batasnya, sehingga sering menimbulkan pertikaian antara dua pihak.

Secara umum, dalam konsep garis batas (*border lines*), perbatasan satu negara dengan negara lain tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antarnegara, tetapi juga merupakan *contact point* (titik singgung) struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan. Dalam konsep ini, garis batas mempunyai arti penting, yaitu (1) intern, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) ekstern, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional, maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Dalam konsep perbatasan sebagai sempadan (*boundary*), merujuk pada tapal batas yang pasti, baik secara alami seperti gunung dan sungai. Juga benda-benda buatan manusia, seperti pilar, tugu dan sebagainya. Kombinasi antara batas alami dan buatan manusia, juga sering digunakan. Konsep yang merujuk pada perbatasan sebagai *frontier* (daerah depan), dahulu dianalogikan sebagai daerah tempur yang harus dikosongkan untuk melaksanakan pertempuran. Pada dewasa ini, daerah depan tersebut lebih dimaknai atau seharusnya dimaknai sebagai "daerah etalase" untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu negara.

⁹ Ganewati, Wuryandari, 2008: 59-60.

Pada wilayah perbatasan NKRI-Timor Leste, konsep *border lines* dan *boundary* menjadi tidak terpisahkan, ketika muncul persoalan ketidakjelasan tapal batas, baik mengenai wilayah maupun sumber daya alam yang terdapat di sekitar perbatasan tersebut. Klaim atas wilayah tertentu yang dilakukan secara sepihak, baik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia maupun Timor Leste di perbatasan kedua negara, hingga saat ini menyebabkan belasan kali konflik dan kekerasan fisik di antara warga setempat.

Yang terbaru adalah yang terjadi pada warga lima desa di Kecamatan Bikomi Nailulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Propinsi Nusa Tenggara Timur, saling serang dengan warga Distrik Oekusi, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Selasa (31/7/2012). Pertikaian fisik menggunakan batu itu akibat ulah warga RDTL menyerobot dan menggusur lahan di zona netral (zona damai) untuk membangun Kantor Bea dan Cukai.

Saling serang menggunakan batu dilakukan dua kali. Pada pukul 13.00 Wita, warga lima desa dari kecamatan Bikomi Nailulat melempari warga dan operator eskavator yang sedang menggusur lahan. Perang batu hanya berlangsung sekitar lima belas menit. Sebab aparat TNI Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dibantu aparat Polres TTU datang melerai Warga yang terlibat perang batu berasal dari Desa Haumeni Ana, Desa Sunkaen, Desa Nailulat, Desa Tubu dan Desa Batnes melawan ratusan warga dari beberapa desa di Distrik Pasabe, RDTL. Senjata tajam yang dibawa warga disita oleh aparat TNI dibantu polisi. *Sweeping* senjata tajam dipimpin langsung Komandan Kodim 1618/TTU, dibantu Wakapolres TTU.

Aksi saling lempar batu pecah lagi pukul 17.30 Wita, ketika hari sudah mulai gelap. Selain itu ketika warga sedang berkumpul di Polindes Haumeni Ana, mendengarkan arahan dari Dandim 1618/TTU, agar warga dengan tertib pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba seorang anggota Civpol (*Civil Police*) dari RDTL memimpin warga RDTL menyerang warga di Polindes Haumeni Ana. Wargapun membalas lemparan batu itu. Perang batu hanya berlangsung 15 menit, karena berhasil dilerai aparat TNI dan Polisi.¹⁰

Tahun sebelumnya, Selasa (12/6/2011), warga di Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nailulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), bersitegang dengan warga Ambenu, Oekusi, RDTL. Ketegangan dua kelompok masyarakat yang berada di daerah perbatasan kedua negara tersebut terjadi akibat aktivitas masyarakat Ambenu dan pembangunan jaringan listrik solar sel oleh Pemerintah RDTL di wilayah steril/daerah netral.

Ketegangan dua kelompok masyarakat terjadi karena warga Humaeni Ana menilai warga Ambenu, RDTL melakukan aktivitas di zona steril atau zona netral.

¹⁰ Pos Kupang, 2012, "Warga RI dan Timor Leste Saling Serang: Di Tapal Batas TTU", 1 Agustus, hal: 1, kolom 4-7.

Demikian pula pemasangan gapura dari warga Timor Leste telah memasuki wilayah NKRI, dan pemasangan jaringan atau tiang-tiang lampu solar sel oleh Pemerintah RDTL di zona steril. Pelanggaran batas wilayah NKRI tidak hanya di Humaeni Ana tetapi juga Inbate. Pihak Timor Leste, membangun Pos Perbatasan di Wilayah NKRI. Masyarakat dari dua negara yang ada diperbatasan sudah beberapa kali bersitegang soal perbatasan. Bahkan tahun 2005, sempat terjadi rebut besar antara kedua kelompok. Warga Timor Leste seenaknya membuat kebun di daerah steril, tetapi warga RI ditekan untuk tidak masuk ke sana.¹¹

Seperti uraian di bagian 5.1 Perbatasan antarnegara di NTT terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Leste Utara (TTU). Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekusi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah Indonesia (*enclave*). Garis batas antarnegara di NTT ini terletak di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kupang, 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten TTU, dan 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belu.

Pintu perbatasan di NTT terdapat di beberapa kecamatan yang berada di tiga kabupaten tersebut, namun pintu perbatasan yang relatif lengkap dan sering digunakan sebagai akses lintas batas adalah di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Fasilitas perbatasan yang ada seperti CIQS, sudah cukup lengkap walaupun masih darurat, seperti kantor kantor bea cukai yang belum dilengkapi dengan alat detektor/*scan* bagi barang yang masuk dan keluar NTT, kantor imigrasi yang masih sangat sederhana, karantina hewan dan tumbuhan, serta pos keamanan yang juga masih sederhana.

Prasarana pasar di perbatasan yang terletak di dekat pintu perbatasan rusak berat akibat kerusakan oleh sekelompok orang dalam insiden yang terjadi pada tahun 2003, sehingga dipindahkan ke tempat lain dan saat ini masih dalam kondisi darurat, sedangkan sarana dan prasarana lain seperti sekolah dan pusat kesehatan masyarakat telah tersedia walau dalam kondisi yang belum baik. Fasilitas-fasilitas sosial yang telah ada dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kebutuhan para pengunjung.

Sarana dan prasarana perhubungan darat maupun laut ke pintu perbatasan Timor Leste cukup baik, sehingga akses kedua pihak untuk saling berkunjung relatif mudah dan cepat. Kondisi jalan dari Atambua, ibukota Belu, menuju pintu perbatasan cukup baik kualitasnya, sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu satu setengah jam. Hal ini dapat dimengerti karena kedua daerah NTT dan Timor Leste sebelumnya merupakan dua propinsi yang bertetangga, sedangkan hubungan udara telah dipenuhi oleh maskapai penerbangan Merpati yang memiliki penerbangan reguler dari Bali ke Dili.

¹¹ Pos Kupang, 2011, "Sengketa Tapal Batas: Warga RI-RDTL bersitegang di Humaeni Ana", 15 Juni, hal: 6 kolom 1-7.



Gambar 5.9

Pintu Gerbang Perbatasan RI-RDTL di Motaain Kabupaten Belu (NTT) dilihat dari wilayah Timor Leste. Garis merah di bagian bawah foto adalah garis batas dua negara, yang terletak di tengah-tengah sungai yang membatasi dua negara.



Gambar 5.10

Pintu Gerbang Negara Timor Leste di Motaain, yang memang kontras dengan pintu gerbang NKRI di tempat yang sama yang nampak seadanya.



Gambar 5.11

Kantor Bea Cukai di Motaain Kabupaten Belu (NTT)



Gambar 5.12

Pos. Satgas Pamtas TNI dengan kondisi sederhana di Napan Kabupaten Timor Tengah Utara



Gambar 5.13

Jembatan di sebuah sungai kecil di depan Pintu Gerbang RDTL di Motaain dilihat dari wilayah Indonesia, tampak berdiri megah.

Kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi sebagian besar adalah perdagangan kebutuhan alat-alat rumah tangga dan bahan makanan lainnya yang tersedia di kawasan perdagangan atau di Atambua, ibukota kabupaten Belu. Kegiatan lintas batas lainnya adalah kunjungan kekerabatan antar keluarga karena banyaknya masyarakat eks pengungsi Timor Leste yang masih tinggal di wilayah Atambua, sedangkan warga Indonesia lainnya yang berkunjung ke Timor Leste adalah dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan bahan makanan dan komoditi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste.

Kegiatan lintas batas non perdagangan yang sering terjadi adalah lintas batas tradisional melalui jalan masuk yang dahulu pernah digunakan sebagai jalan biasa sewaktu Timor Leste masih menjadi salah satu propinsi Indonesia, seperti yang ada di perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (Propinsi NTT) dan Oekusi (Timor Leste). Untuk memfasilitasi warganya di Oekusi mengunjungi wilayah Timor Leste lainnya, Pemerintah Timor Leste mengusulkan adanya ijin bagi warga Oekusi untuk menggunakan prasarana jalan dari Oekusi ke wilayah utama Timor Leste. Namun usulan ini masih belum ditanggapi oleh pihak Republik Indonesia

Potensi sumberdaya alam yang tersedia di kawasan perbatasan NTT pada umumnya tidak terlalu besar, mengingat kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong kurang baik bagi pengembangan pertanian, sedangkan hutan di sepanjang perbatasan bukan merupakan hutan produksi atau konversi serta hutan lindung atau taman nasional yang perlu dilindungi.

Kondisi masyarakat di sepanjang perbatasan umumnya miskin dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan tinggal di wilayah terisolir. Sumber mata pencaharian utama masyarakat di kawasan perbatasan adalah kegiatan pertanian lahan kering yang sangat tergantung pada hujan. Dengan demikian, kawasan perbatasan di NTT khususnya di lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun daerah NTT secara keseluruhan perlu diperhatikan secara khusus karena dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara masyarakat NTT di perbatasan dengan masyarakat Timor Leste, khususnya penduduk Belu yang sebagian besar masih miskin.

Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang digelar 28 April 2010 di Jakarta, Kabupaten Belu dari NTT membawa banyak usulan rencana pembangunan di daerah perbatasan NTT-RDTL, dengan total anggaran Rp. 476.592.490.000,00.¹² Secara spesifik, Kabupaten Belu meminta pemerintah pusat memperhatikan pembangunan sarana penunjang jalan raya, pengembangan Bandara Haliwen dan Pelabuhan Atapupu. Ketua Bappeda, Valens, menyatakan, Kabupaten

¹² Anonimous, "Musrenbangnas 2010 di Jakarta: Perhatikan Perbatasan Indonesia-RDTL" dalam *Pos Kupang*, 29 April 2010, hal: 6.

Belu sejak ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan PP Nomor 29/2007, hingga waktu itu belum mendapat sentuhan yang signifikan sebagai kota terluar dan terdepan dari NKRI.

Dalam suatu dialog publik dikatakan, meskipun sudah ada aturan tentang perlintasan barang dan orang di perbatasan negara Republik Indonesia dan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), masih ada saja pelanggaran-pelanggaran.¹³ Selain Paul Liyanto, pemateri lain dalam dialog ini adalah Dr. John Goru (akademisi) dengan materi Strategi Pertahanan Kemanan di Daerah Perbatasan Indonesia-Timor Leste-Australia yang Berbasis Potensi Lokal, dan Ferdi Tanoni (Yayasan Peduli Timor barat/YPTB) dengan materi Laut Timor dalam Upaya Memajukan Pembangunan Ekonomi Nasional. Tema dialog adalah: Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perpestif Hukum, Hankam dan Ekonomi.

Dalam dialog itu terungkap, pelanggaran terjadi karena kurang ketatnya pengawasan, sehingga perlintasan barang tidak terkontrol. Hal ini juga disebabkan pihak RDTL belum siap menjalankan berbagai kesepakatan dengan pemerintah RI. Masalah lainnya, perdagangan di daerah perbatasan lebih banyak dilakukan pelaku bisnis dari luar NTT. Juga karena proses perizinan belum berjalan maksimal karena keterbatasan sarana dan fasilitas yang ada di wilayah perbatasan.

Tapal batas Indonesia (Belu, TTU dan Kupang)–RDTL (termasuk daerah *enclave* Oekusi) masih bermasalah pada beberapa titik karena adanya penolakan dari masyarakat (Indonesia) di sekitar tapal batas, kejahatan transnasional seperti imigran gelap dan peredaran narkoba. Wilayah NTT diperkirakan akan tetap menjadi korban “luapan” imigran gelap asal Afganistan dan Timur Tengah. Sedangkan tentang narkoba, menurut dialog tersebut, saat ini mafia peredaran narkoba tidak lagi menjadikan Indonesia sebagai target peredaran narkoba, melainkan sudah berupaya menjadikan Indonesia sebagai produsen. Penanganan masalah di perbatasan antar negara selama ini belum maksimal dan terpadu. Timbulnya konflik antara berbagai pihak, baik secara horizontal, sektoral, maupun vertikal, tidak dapat dihindari.

Menanggapi hal di atas, Pemerintah Pusat kembali menyatakan komitmennya mempercepat pembangunan daerah perbatasan RI–RDTL. Lintas Kementerian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) akan “mengeroyok” kawasan perbatasan agar lebih cepat maju dari kondisi saat ini. Dukungan pemerintah pusat itu melalui dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil, dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, mulai tahun 2012. Wujud perhatian lintas kementerian itu diharapkan bersinergi dengan program Pemerintah Propinsi NTT dan Kabupaten

¹³ Abraham Paul Liyanto, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), materi tentang Kajian kritis DPD RI terhadap Penyelesaian Permasalahan di daerah Perbatasan Indonesia-Timor Leste-Australia dalam dialog publik yang dihadiri anggota PMKRI Cabang Atambua di Aula Hotel Ina Boi Kupang, Rabu (24/3/2010), dikutip Pos Kupang, “Masih Banyak Persoalan di Perbatasan RI dan RDTL”, 25 Maret, 2010, hal: 14.

Belu yang dituangkan melalui rekomendasi pada rapat koordinasi nasional (rakornas) perbatasan yang diselenggarakan tanggal 12-13 April 2011. Wujud perhatian pusat ke wilayah perbatasan di NTT itu sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden SBY ke NTT, Februari 2011. Selama ini perhatian pusat belum maksimal.¹⁴

Usai membuka rakornas, Menteri Helmy Faisal menyerahkan dana bantuan dari KPDT untuk Kabupaten Belu berupa bantuan dana Rp. 7 miliar lebih, yakni DAK bidang Sarana Prasarana Pedesaan Rp. 988.500.000, dari Deputy I berupa bantuan pemberdayaan masyarakat melalui pengusaha potensi sumber daya mineral Rp. 50 juta, fasilitas layanan pendidikan alternatif daerah tertinggal Rp. 200 juta; bantuan dari Deputy II berupa bantuan dana sarana air bersih Rp. 1 miliar; bantuan sarana pendidikan dan belajar masyarakat Rp. 250 juta; bantuan peningkatan infrastruktur ekonomi pasar desa Rp. 750 juta, bantuan infrastruktur PLTS SHS 50 senilai Rp. 1.725.000.000; bantuan infrastruktur dan telekomunikasi Rp. 400 juta; bantuan jalan poros desa Rp. 500 juta. Selain itu bantuan dari Deputy IV berupa bantuan dana sosial lembaga ketenagakerjaan Rp. 100 juta; bantuan sosial lainnya Rp. 100 juta dan bantuan dari Deputy V berupa dana bantuan tugas perbantuan percepatan pembangunan daerah perbatasan senilai Rp. 1 miliar.

Permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) aspek, yaitu kebijakan pembangunan, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, kelembagaan dan kewenangan pengelolaan, serta kerjasama antarnegara.

5.2.1 Kebijakan pembangunan.

Walaupun Pemerintah Pusat telah menyatakan komitmennya mempercepat pembangunan daerah perbatasan RI-RDTL, melalui lintas Kementerian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang akan “mengeroyok” kawasan perbatasan agar lebih cepat maju, namun hal itu masih dikeluhkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah, melalui Frans Salem, Sekretaris Daerah NTT, selalu berharap agar pemerintah pusat lebih serius mengurus wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di wilayah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara (TTU), agar cepat maju dan tidak menjadi bahan olok-olok masyarakat RDTL.¹⁵

Masih dirasakan oleh warga perbatasan, sejak berdirinya Negara Timor Leste, masalah perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-

¹⁴ Helmi Faisal, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, disampaikan pada Rakornas Perbatasan (12-13 April 2011), dikutip *Pos Kupang*, “Pusat Komit Bangun Perbatasan RI-RDTL”, 12 April, 2011, hal: 1.

¹⁵ *Pos Kupang*, 2011, “Pemerintah Pusat Harus Serius Urus Perbatasan RI-RDTL”, 19 Maret, hal: 18 kolom 1-4.

daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan RI-Timor Leste masih belum diprioritaskan.

Sebelumnya, Sarah Lery Mboeik, anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur menyatakan, eks pengungsi Timor Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), baik yang menempati kamp darurat maupun perumahan bantuan pemerintah, masih banyak yang belum menikmati pelayanan listrik. Selain pemukiman yang jauh dari akses listrik, juga warga eks pengungsi tidak memiliki kemampuan untuk membayar pemasangan listrik, jika tidak ditanggung pemerintah. Warga eks pengungsi yang menetap di Kupang saja, sulit memperoleh akses listrik, apalagi ribuan orang yang tinggal di Kabupaten Belu, wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste.¹⁶ Negara belum memenuhi hak-hak dasar eks pengungsi, terutama mereka yang menetap di daerah perbatasan. Situasi ini, katanya, tidak boleh berlangsung terus menerus, karena bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak. Jangan heran, katanya, kalau dari sekarang saja ada warga eks pengungsi yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka ke negara lain, karena situasi yang mereka hadapi. Atambua menjadi satu-satunya kota di NTT yang mempunyai pengemis anak-anak dari kalangan eks pengungsi. Situasi yang dialami warga eks pengungsi ini, jika dibiarkan terus akan menghambat Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), karena masalah eks pengungsi adalah masalah kemiskinan dan kelaparan, persoalan lingkungan, kemitraan global untuk pembangunan, masalah pendidikan anak-anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Memang Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Atambua telah mengadakan program listrik SEHEN (Super Ekstra Hemat Energi). Namun minat masyarakat di perbatasan RI-RDTL terhadap program listrik SEHEN dari Manajemen PT PLN hingga pertengahan tahun 2012 masih seret. Kondisi ini terjadi karena warga kesulitan ekonomi sehingga dari waktu ke waktu PLN akan terus melakukan sosialisasi agar perbatasan negara menjadi terang benderang. Hingga Juni 2012 baru terpasang 1.880 pelanggan dari target 21.000 pelanggan bagi masyarakat di perbatasan Ri-RDTL.¹⁷

Manager PLN Rayon Atambua mengungkapkan, sesuai dengan target PT PLN bahwa dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, sekitar 21.000 pelanggan akan terlayani. Untuk itu, dari waktu – ke waktu ke depan PLN Atambua terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan agar memanfaatkan keunggulan lampu SEHEN tersebut sambil menunggu dalam jangka panjang terpasang listrik konvensional. Kendala yang utama adalah masalah ekonomi. Pada waktu sosialisasi pemasangan, hampir semua warga datang mendengarkan, tetapi pada saat pemasangan hanya puluhan orang saja yang melakukan. General manager PLN Wilayah NTT,

¹⁶ Sarah Lery Mboeik Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT), disampaikan kepada *Pos Kupang*, "Banyak Eks Pengungsi Belum Nikmati Listrik", 1 Juli 2010, hal. 20.

¹⁷ Anonimous, 2012, "Sehen di Perbatasan Masih Seret", dalam *Pos Kupang*, 5 Juli, hal: 12.

punya mimpi untuk membuat perbatasan RI-RDTL terang benderang.

Selain listrik, seorang koordinator kamp pengungsi eks Timtim di Tuapukan, sekitar 20 km arah timur Kupang, Marcilino Lopez juga mengeluhkan air bersih. Dikatakannya, belum pernah ada bantuan air bersih untuk mereka di kamp Tuapukan. Mereka berusaha menggali sumur dan akhirnya dapat satu sumur sedalam 30 meter, yang dipakai selama ini untuk berbagai keperluan. Dalam situasi tertentu warga kamp juga sangat merasakan kesulitan pangan. Dari sekitar 250 kepala keluarga di kamp Tuapukan, sebagian besar bekerja sebagai buruh tani untuk bisa mendapatkan pangan dari para tuan tanah warga lokal.¹⁸

Tentang keinginan eks pengungsi untuk mencari suaka ke negara lain, menanggapi Sarah Lery Mboeik, Komandan Korem 161/Wirasakti saat itu, membantah ada 396 warga eks pengungsi Timor Timur (Timtim) di Timor bagian barat, meminta suaka politik kepada Portugal. Komandan Korem mengaku telah melakukan pengecekan langsung kepada warga eks pengungsi Timtim di Desa Tuapukan dan juga mendapat pesan singkat melalui telepon seluler dari sejumlah tokoh eks pengungsi, yang menyebutkan bahwa tidak ada warga yang meminta suaka. Menurutnya, sejumlah orang yang menyampaikan keinginan untuk meminta suaka hanya untuk mencari perhatian dari pemerintah, apalagi isu itu dihembuskan dan dikait-kaitkan dengan pembagian rumah bagian eks pengungsi. Warga eks pengungsi yang menyampaikan keinginan untuk meminta suaka ke Portugal itu memang mempersoalkan rumah yang belum mereka peroleh. Dikatakan juga oleh Danrem Wirasakti saat itu, yang mengutip pernyataan seorang warga eks pengungsi Timtim, jika aparat keamanan tidak serius menangani masalah ini, biar pengungsi minta suaka saja.¹⁹

Senada dengan Danrem Wirasakti, seorang tokoh eks pengungsi Timtim, Armindo Soares yang juga anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Gerindra, tanggal 18 Maret 2010, mengatakan, niat warga untuk meminta suaka ke Portugal hanya untuk menarik perhatian pemerintah, karena prosedur pengurusan suaka berbelit-belit dan tidak mudah disetujui negara penerima. Armindo mengatakan, permintaan suaka itu tidak berdasar, karena tidak ada konflik yang mengancam keberadaan eks pengungsi di Timor bagian barat, juga tidak ada persoalan dengan pemerintah dan masyarakat NTT. Alasan yang sama disampaikan eks pengungsi, menurut dia, tidak benar, mungkin mereka hanya emosi saja.²⁰

Ungkapan bernada kekecewaan tentang masalah perbatasan yang masih dirasakan belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah, diungkapkan oleh masyarakat

¹⁸ Wawancara Marcilino Lopez dengan *Pos Kupang*, Rabu (30/6/2010), dimuat dalam *Pos Kupang*, 1 Juli 2010, hal: 20, kolom 1-4.

¹⁹ Lihat *Pos Kupang*, 20 Maret, 2010, memuat pernyataan Danrem 161/Wirasakti Kolonel Inf Dody Usodo Hargo "Tidak Ada Eks Pengungsi Minta Suaka Portugal".

²⁰ Pernyataan Armindo Soares, dimuat dalam *Pos Kupang*, 20 Maret, 2010, hal: 14.

Haumeni Ana kepada Komite I DPR RI yang berkunjung ke daerah yang berbatasan dengan Distrik Oekusi, Negara Timor Leste itu, Rabu (7/12/2011). Menurut mereka, Indonesia sudah merdeka 66 tahun, namun masyarakat di Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat yang berbatasan dengan Distrik Oekusi, Negara RDTL, tidak pernah merasakan kemerdekaan itu. Bagi mereka, kemerdekaan Indonesia tidak pernah memberi dampak bagi kehidupan mereka. Mereka tetap tertinggal baik infrastruktur, akses informasi, akses pembangunan, air bersih, maupun listrik.

Mewakili warganya, salah satu tokoh masyarakat di daerah itu mengungkapkan, warga Haumeni Ana merindukan sentuhan pembangunan. Sebagai warga yang mendiami daerah perbatasan, mereka ingin seperti warga Timor Leste di perbatasan.²¹ Mereka meminta, melihat Indonesia jangan hanya Jakarta, tetapi cobalah melihat Indonesia dari Haumeni Ana. Buatlah mereka bangga menjadi warga negara Indonesia. Mereka mengaku iri melihat kemajuan warga Timor Leste di perbatasan Haumeni Ana. Setiap malam tetangga sebelah terang karena ada lampu solar sel, sedangkan daerah perbatasan di wilayah Indonesia gelap. Padahal mereka hanya dibatasi jalan. Air bersih juga susah didapatkan. Wilayah perbatasan Indonesia jauh tertinggal. Padahal Timor Leste baru 12 tahun merdeka. Sedang Indonesia sudah 66 tahun merdeka.²²



Gambar 5.14

Tiang-tiang listrik (solar cel) tampak di kejauhan di wilayah, yang membuat pada malam hari wilayah RDTL tampak terang benderang, sedang pada malam hari di Haumeni Ana (TTU) gelap gulita. Daerah yang tampak gundul adalah zona bebas, yang masih menjadi sengketa, yang membatasi wilayah RI-RDTL di Haumeni Ana (Gambar diambil dari Pos Satgas Pamtas RI-RDTL di Haumeni Ana TTU, Selasa, 21/8/2012).

Selain listrik dan air bersih, warga perbatasan juga meminta pemerintah membantu memperbaiki infrastruktur jalan dan telekomunikasi untuk membuka isolasi wilayah perbatasan dan memperlancar lalu-lintas jalan dan jasa. Menurut warga, di bidang informasi mereka tertinggal. Kalau mereka mau menelpon harus jalan puluhan kilometer agar pulsa tidak cepat habis. Kalau telepon di Haumeni Ana, hanya sebentar pulsa ratusan ribu tinggal Rp. 50,- karena berada pada jaringan telpon

²¹ Pernyataan Asuat dimuat dalam *Pos Kupang*, 9 Desember, 2011, hal: 7 kolom 4-7, dengan judul "66 Tahun Merdeka: Haumeni Ana Seperti Dilupakan".

²² *Pos Kupang*, 2011, "66 Tahun Merdeka: Haumeni Ana Seperti Dilupakan", 9 Desember, hal: 7 kolom 4-7.

selulernya Timor Leste. Begitu juga aparat keamanan yang menjaga perbatasan, kesulitan mendapatkan informasi. Mereka minta kalau bisa pemerintah memikirkan hal itu.

Di depan para anggota Komite I DPD RI, warga juga meminta agar DPD RI memfasilitasi warga perbatasan untuk mendapat rumah layak huni. Warga juga meminta Komite I DPD RI mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan batas wilayah kedua negara agar masyarakat di perbatasan bisa hidup aman dan tenang. Selama ini warga perbatasan dengan warga Timor Leste terlibat kekacauan terus karena masalah batas wilayah. Warga Indonesia di perbatasan mengenal ada zona netral, tetapi warga dari Timor Leste tidak mengenal/peduli hal itu. Warga Indonesia di perbatasan dilarang beraktivitas di zona netral, tetapi warga Timor Leste tidak. Hal itu yang membuat kekacauan. Sekarang ini, kata warga perbatasan, memelihara ayam di perbatasan saja susah. Kalau ayam warga Indonesia mencari makan melewati garis perbatasan, langsung ditangkap warga Timor Leste. Warga Indonesia di perbatasan mengaku kecewa dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mereka mengatakan, sudah banyak pejabat baik pusat maupun daerah yang berkunjung ke daerah itu dan sudah banyak janji yang dilontarkan di depan masyarakat. Namun tidak satupun terealisasi dan Haumeni Ana tetap tidak berubah. Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji.

Para guru di perbatasan menggunakan kesempatan pertemuan dengan anggota DPD RI untuk menyampaikan berbagai keluhan. Satu di antara keluhan itu soal tunjangan guru di perbatasan. Salah seorang guru di perbatasan mewakili teman-temannya, meminta agar nasib dan kesejahteraan guru-guru di perbatasan diperhatikan. Selama ini, mereka hanya mendengar ada tunjangan untuk guru-guru di perbatasan. Namun realisasi tidak ada. Mereka meminta kalau bisa, guru-guru di perbatasan RI-RDTL juga mendapatkan tunjangan perbatasan.

Kekecewaan senada juga disampaikan oleh anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Sarah Lery Mboeik di Kupang, yang mengatakan, negara belum memenuhi hak-hak dasar eks pengungsi, terutama mereka yang menetap di daerah perbatasan.²³ Pemerintah pusat, menurut Lery, masih memandang wilayah perbatasan RI-RDTL hanya dengan sebelah mata. Komitmen politik anggaran tidak berpihak kepada masyarakat di perbatasan, tetapi lebih banyak digelontorkan di Jawa. Untuk itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini tengah berusaha merevisi kembali soal perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga julukan Belu sebagai serambi depan NKRI tidak sebatas nama. Kalau perhatian pemerintah masih seperti ini, jangan

²³ Sarah Lery Mboeik, Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur, dalam seminar nasional tentang Perbatasan Damai yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang dan CIS Timor, di Gereja Polycarpus Atambua, Sabtu (7/5/2011), dikutip *Pos Kupang*, "Perbatasan RI-RDTL: Pusat Pandang Sebelah Mata", tanggal 9 Mei 2011, hal. 18.

heran kalau ke depan ada warga Belu yang harus pindah menjadi warga Timor Leste. Lery mengharapkan, ke depan Pemerintah NTT maupun Belu dengan dibentuknya Badan Pengelola Perbatasan (BPP) diharapkan komitmen membangun wilayah perbatasan ini secara lebih baik. Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat semestinya mendapatkan prioritas perhatian.

Tentang terbatasnya fasilitas di daerah perbatasan, juga disampaikan oleh orang nomor satu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes. Bupati TTU ini mengungkapkan, sepanjang perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) terdapat 43.373 rumah tidak layak huni yang masih ditempati warga Indonesia, sementara rakyat Timor Leste sudah menikmati rumah sehat dan mentereng.²⁴ Perbedaan mencolok soal kemajuan pembangunan rumah di antara dua negara tetangga, ini, kata Bupati Fernandes, bisa menimbulkan iri hati bahkan melunturkan semangat nasionalisme warga negara Indonesia. Selain kurangnya akses warga terhadap rumah sehat dan layak huni, infra struktur jalan raya pun sangat terbatas termasuk sarana air bersih. Bupati Fernandes juga mengungkapkan warga negara RDTL di perbatasan sudah menikmati listrik siang dan malam hari, sementara warga Indonesia hanya mengandalkan lampu *teblok* (lampu minyak).

Komentar serupa, juga disampaikan oleh pengamat perbatasan RI-RDTL lainnya, yaitu Adiana, yang mengatakan, jangan minta untuk dihargai atau pun berharap untuk disegani. Menuntun diri sendiri saja masih meraba-raba. Mungkin hanya pantas mendapat belas kasihan, kalau bukan cemoohan, itu gambaran singkat tentang kondisi riil wajah teras Indonesia di tapal batas Timor Leste. Enam puluh lima tahun Indonesia merdeka tak mampu berbuat banyak di teras depan rumah bangsa yang berhadapan dengan Timor Leste, sebuah negara kecil tang baru lahir 10 tahun lalu. Jika dianalogkan dengan manusia, maka Timor Leste itu “anak kemarin” yang baru “belajar” bernegara katimbang NKRI yang sudah makan asam garam selama 60-an tahun. Tapi dalam sekejap Timor Leste mampu membangun berbagai fasilitas publik yang memadai untuk masyarakatnya. Sedang masyarakat wilayah perbatasan hanya bisa berdecak kagum melihat kemajuan “di sesebelah sana” dan bersyukur memperoleh pantulan cahaya dari sana agar bisa melihat di mana berpijak.²⁵

Di perbatasan harga diri dipertaruhkan. Tidak perlu bicara tentang teknologi tinggi, urusan listrik dan air saja Indonesia kalah. Pos-pos pengamanan perbatasan, yang dibangun sejak Timor Leste melepaskan diri, hingga kini belum dilengkapi fasilitas umum yang memadai. Di Napan (Kabupaten TTU), salah satu titik perbatasan wilayah RI-Timor Leste, masyarakat Indonesia dan prajurit TNI yang menempati pos pengamanan, kesulitan untuk mengambil air bersih, hidup dalam keprihatinan.

²⁴ *Kupang Pos*, 2012. “49.373 Rumah Tidak layak Huni di Perbatasan RI-RDTL”, 15 Juni, hal: 9.

²⁵ Ahmad, Adiana, 2011, “Kontras di Perbatasan RI-Timor Leste: Lampu Minyak vs Solar Cell”, dalam *Pos Kupang*, 22 Juni, hal: 1 kolom 1-5.

Sementara hanya sekitar 700 meter dari pos pengamanan perbatasan Napan, mulai dari garis perbatasan hingga Pos Pengamanan Perbatasan Timor Leste, jaringan listrik solar cell dengan voltase besar berjejer rapi. Pada malam hari, lampu-lampu tenaga surya milik Timor Leste itu memancarkan cahaya hingga ke wilayah NKRI. Suatu kondisi yang sangat kontras jika dibandingkan dengan cahaya lampu pelita dari gubug-gubug warga dan Pos Perbatasan Indonesia yang dijaga prajurit TNI.

Itu soal penerangan. Selama ini para prajurit dan pegawai kantor pemerintah di Pos Perbatasan Napan harus berjalan menuruni lembah sekitar satu kilometer untuk mengambil air bersih dari sungai, untuk mandi dan cuci. Sedangkan untuk minum dan masak mengharap belas kasihan mantan Kepala Desa Napan yang rumahnya tidak jauh dari Pos Perbatasan Napan, yang airnya terbatas ada kalau musim hujan. Krisis air bersih juga terjadi di Pos Perbatasan Haumeni Ana. Seorang prajurit di sana mengaku setiap hari bolak-balik dua sampai tiga kilometer untuk mengambil air bersih dari desa tetangga.

Menanggapi hal tersebut, Tim Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) dalam kunjungan kerja di perbatasan RI (Kabupaten Timor Tengah Utara/TTU) dengan Republik Demokratik Timor Leste (Distrik Oekusi), tanggal 13 Juni 2012, melihat dan mendengar langsung serta mencatat semua kendala pembangunan yang dihadapi warga Indonesia di perbatasan dua negara bertetangga tersebut.²⁶

Tim dipimpin Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Dody Hugo, yang juga mantan Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang (2009-2010) Tim Wantanas berkunjung ke beberapa titik di perbatasan terutama di pos batas kedua negara. Tujuan kedatangan Tim Wantanas adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang masalah sosial ekonomi maupun masalah pertahanan keamanan di perbatasan kedua negara bertetangga tersebut. Semua informasi dicatat untuk dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai Ketua Wantanas. Dan ditindaklanjuti rapat koordinasi bersama departemen terkait guna membahas isu paling aktual di perbatasan RI-RDTL

Isu dan informasi di perbatasan yang menjadi perhatian Wantanas adalah yang memiliki kriteria strategis, krusial dan mendesak, yang harus diselesaikan secepatnya. Brigjen Dody mencontohkan, isu yang kini mendapat perhatian utama Wantanas adalah kebijakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), kasus penembakan misterius di Papua, serta isu tentang masalah pembangunan sosial dan ekonomi di perbatasan, termasuk di perbatasan Timor Leste. Presiden SBY punya program bahwa tahun 2014 nanti tidak ada lagi masalah sosial ekonomi yang dialami warga di perbatasan Timor Leste. Program ini selaras dengan dihentikannya seluruh bantuan PBB di Timor Leste.

²⁶ Anonim, 2012. "Kami Catat dan Laporkan SBY", dalam *Kupang Pos*, 16 Juni, hal: 2.

Walaupun belum memuaskan banyak pihak, sebenarnya pemerinrah, baik pusat maupun daerah juga sudah melakukan berbagai hal. Untuk mengantisipasi meningkatnya lalu lintas antar negara, yang ditandai dengan banyaknya bus-bus penumpang yang melayani rute Kupang Dili, Pemerintah Kota Kupang telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, untuk membangun terminal bus antarnegara. Terminal itu dimaksudkan agar bus-bus dari Timor Leste atau sebaliknya, menyinggahi terminal tersebut.²⁷ Padahal banyak sekali bus-bus yang melayani rute Kupang-Dili, Ibu Kota Timor Leste, namun belum ada terminal internasional, sehingga bus-bus antar negara tersebut berada di pangkalan pribadi, atau keliling kota untuk menjemput penumpang.

Sementara di garis perbatasan di Motaain, Kabupaten Belu, Pemerinrah Pusat sudah membangun terminal bus antarnegara, namun di Kota Kupang justru belum ada terminal. Padahal sebagian besar penumpang dari dan ke Dili, selalu menyinggahi Kupang. Para pengamat yang melakukan pengamatan wilayah perbatasan belum lama ini, juga menyaksikan Pemerintah Timor Leste sudah membangun pasar perbatasan, namun belum membangun terminal untuk disinggahi bus-bus dari dan ke wilayah Indonesia. Penumpang bus hanya melapor pos penjagaan Batugade (Timor Leste), untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah Indonesia atau Dili.



Gambar 5.15

Di sebelah kanan adalah pasar perbatasan Timor Leste, yang terletak di Batu Gade RDTL.



Gambar 5.16

Terminal Bus Antar negara di Motaain di Atambua Kabupaten Belu.

²⁷ Daniel Adu, Wali Kota Kupang, dikutip *Pos Kupang*, "Kupang Bangun Terminal Bus Antarnegara", dalam *Pos Kupang* 12 Maret.2012, hal 12.

Dalam usaha mengubah perbatasan menjadi beranda terdepan wilayah negara, Pemerintah Kabupaten Belu berencana dalam tahun 2012 ini, sesuai pembangunan terminal penumpang Bandara Haliwen, dilanjutkan dengan peresmian nama Bandara AA Bere Talo (Bupati Belu pertama). Pemberian nama ini sudah disetujui masyarakat Belu, karena sosok AA Bere Talo merupakan perintis berdirinya Kabupaten Belu. Pengajuan nama Bandara ini segera diajukan ke Pemerinrah Pusat melalui Pemerintah Proinsi NTT.²⁸

Sampai saat ini upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu adalah memperpanjang landasan pacu dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter, dan dari 1.400 meter menjadi 1.600 meter agar bisa didarati pesawat jenis Fokker 50. Untuk saat ini, armada pesawat yang melayani penerbangan Kupang-Atambua setiap hari adalah Susi Air, Merpati Cassa 212 juga melayani penumpang ke Kisar terus ke Ambon. Selain itu ada NBA dengan rute Atambua- Kupang. Bandara Haliwen ke depan akan menjadi pilihan pengguna jasa, baik dari Atambua maupun dari TTU, Oekusi, RDTL dan Distrik Maliana. Bagi Pemerintah Kabupaten Belu, dengan bertambahnya armada penerbangan, diharapkan mampu menunjang perekonomian di daerah perbatasan.

5.2.2 Ekonomi dan Sosial Budaya

Selepas Referendum Timor Leste pada 30 Agustus 1999 yang diikuti kekerasan, pembakaran, dan penjarahan oleh militer dan milisi, gelombang pengungsi yang berjumlah kurang lebih 300.000 orang memenuhi sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT): Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Alor. Pemerintah RI dan PBB memberikan tiga pilihan: tinggal di NTT, bertransmigrasi di Indonesia, atau ikut program pemukiman kembali sementara (*temporary resettlement*). Hasilnya: 98% memilih tinggal di Indonesia. Sejumlah masalah tetap muncul: bagaimana bertahan hidup di NTT setelah segala subsidi dihentikan oleh Pemerintah RI, ketidakjelasan koordinasi program transmigrasi dan *temporary resettlement*. Paket bantuan kemanusiaan dihentikan sejak Januari 2002.

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "halaman belakang" wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik di masa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Di samping itu secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, serta seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.

Ketersediaan prasarana dan sarana di perbatasan RI-RDTL, baik sarana dan

²⁸ Anonymous, 2012, "Bandara Haliwen 'Berganti Baju': Namanya Bandara AA Bere Talo ", dalam *Pos Kupang*, 7 Juli, hal: 12.

prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan, karena kurang memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi prasarana dan sarana komunikasi RI-RDTL seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon di kawasan ini umumnya masih relatif minim.

Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (*external threat*) dan cenderung memosisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (*security belt*). Hal ini telah mengakibatkan kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam, terutama yang dilakukan oleh investor swasta.

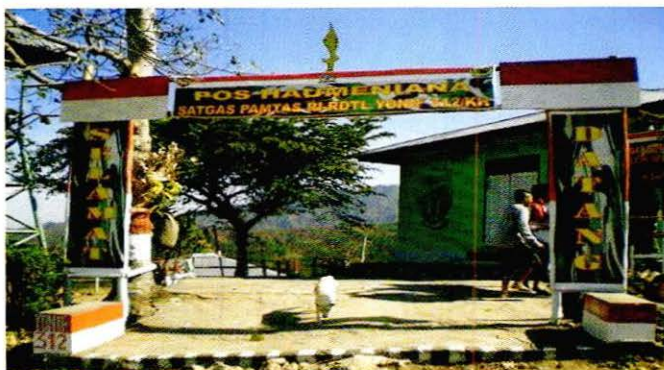
Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan RI-RDTL yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga. Secara jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik.

Seperti juga dilakukan oleh Satgas-Satgas Pamtas sebelumnya, setelah Satgas Pamtas RI-RDTL Batalyon (Inf) SYB digantikan oleh Batalyon (Inf) 312 Kala Hitam (Kalahkan Lawan Hidup atau Mati) Siliwangi awal Agustus 2012, di Pos Perbatasan Haumeni Ana juga mengadakan pengobatan kepada warga. Pada bulan pertama pergantian pasukan, obat-obatan yang disediakan untuk prajurit pengaman perbatasan di Pos Haumeni Ana, habis untuk masyarakat setempat. Tetapi Komandan Pos Perbatasan Haumeni Ana mengatakan tidak terlalu masalah, karena para prajurit di pos itu dalam keadaan sehat semua, jadi saat itu tidak terlalu memerlukan obat.²⁹

Jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas sebagai Satgas Pamtas RI-RDTL, Batalyon Infanteri (Yonif) 312 Kala Hitam juga menyumbang 46 Kantong Darah. Donor darah ini dalam rangka HUT ke-64 Yonif 312/Kala Hitam. Sebelumnya, Komandan Batalyon, Mayor Hengki mengatakan, kehadiran mereka (Prajurit Yonif 312/Kala Hitam) di perbatasan RI-RDTL memang hanya enam bulan. Selama penugasan ini, selain kegiatan pengamanan perbatasan, pihaknya juga membantu masyarakat perbatasan dalam bidang lainnya seperti kesehatan, pendidikan, peningkatan usaha pertanian.³⁰

²⁹ Wawancara dengan Letda (Inf) Imam, Komandan Pos Satgas Pamtas RI-RDTL Haumeni Ana, tanggal 21 Agustus 2012 di Pos Perbatasan. Pengobatan terhadap warga menjadi lebih mudah, karena Komandan Pos Perbatasan, selain sebagai prajurit juga berlatar belakang pendidikan D-3 Keperawatan.

³⁰ Anonimus, 2012, "TNI Sumbang 46 Kantong Darah: HUT Yonif 312 Kala Hitam", dalam *Pos Kupang*, 28 Agustus, hal: 13, kolom 4-7.



Gambar 5.17

Pos Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312 Kala Hitam Siliwangi di Haumeni Ana (Kabupaten TTU)

Masalah ekonomi yang menjadi keprihatinan jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah di perbatasan RI-RDTL adalah masalah penyelundupan. Penyelundupan barang berupa sembilan bahan pokok/sembako dan bahan bakar minyak/BBM ke wilayah Oekusi, Negara Timor Leste semakin marak dilakukan oknum tertentu akhir-akhir ini. Pasalnya, pengeluaran barang tersebut ke wilayah Oekusi tanpa dokumen dan tanpa izin Kantor Dinas Perindagkop, dan tanpa izin Kadin Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Dalam waktu dekat Kadin TTU dan instansi terkait akan melakukan operasi penertiban di pintu masuk Wini, Insana Utara dan di pintu masuk Napan, Kecamatan Miomafo Timur.³¹

Sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi), Kadin TTU mengawasi perdagangan dalam dan ke luar negeri. Dalam sehari minimal ada delapan truk barang masuk ke Oekusi lewat pintu batas Skato dan Napan. Itu baru dari dua pintu masuk, belum lagi dari daerah Haumeni Ana dan Manusasi serta pintu masuk tapal batas lainnya. Kadin TTU menyayangkan Dinas Perindagkop yang belum memanfaatkan pasar tapal batas di Wini, Napan dan Haumeni Ana. Tiga Pasar di tapal batas itu sudah dibangun sejak tahun 2004 lalu. Tetapi sayang fasilitas pasar itu belum dimanfaatkan oleh sepenuhnya oleh masyarakat. Bahkan fasilitas pasar itu kini menjadi tempat berteduh kambing dan babi. Halaman tempat jual juga kini ditumbuhi rumput dan perdu setinggi pinggang orang dewasa. Ini satu penyebab terjadi perdagangan gelap dan penyelundupan di perbatasan Okusi.

³¹ Anonimous, 2009, "Marak, Penyelundupan Barang ke Oecusse" dalam *Pos Kupang*, 21 Oktober, hal: 9, kolom 1-4.



Gambar 5.18

Pasar perbatasan Napan yang tampak kosong karena belum berfungsi secara maksimal. Pasar perbatasan Napan hanya ramai pada hari Jumat, sedang pasar Perbatasan Haumeni Ana hanya ramai pada hari Sabtu. Pasar Haumeni Ana sejak kerusakan perbatasan antara warga RI dengan RDTL di wilayah tersebut awal Agustus 2012 praktis dihentikan kegiatannya untuk waktu yang belum ditentukan, sampai keadaan kondusif kembali (Gambar diambil Selasa, 21/8/2012).

Kehadiran pasar perbatasan juga diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar perbatasan. Artinya, dengan pembukaan dan peresmian pasar dan koperasi perbatasan ini diharapkan pada publik Indonesia terutama yang ada di sekitar perbatasan bahwa segala aktivitas yang selama ini melalui jalan tikus segera dihentikan dan menggunakan fasilitas yang tersedia, dan tidak boleh lagi menggunakan fasilitas yang tidak disiapkan oleh pemerintah.

Untuk diketahui, di perbatasan ada delapan titik pasar. Di Kabupaten Belu meliputi Motaain, Metamauk, dan Turiskain; Kabupaten TTU: Napan, Haumus, dan Haumeni Ana. Serta di Kabupaten Kupang: Oepoli-Amfoang Timur. Belum maksimalnya fungsi pasar perbatasan, karena pengusaha belum tertarik untuk berusaha di pasar perbatasan. Untuk diminati pengusaha, pasar perbatasan antara Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste perlu memiliki regulasi konkret. Sementara para pengusaha atau investor di perbatasan selalu dihadapkan kepada berbagai aturan yang cenderung menghambat, sehingga pasar di perbatasan RI-Timor Leste belum begitu berkembang. Pengusaha di perbatasan biasanya berhadapan dengan sejumlah institusi, seperti pemerintah antarnegara, bea cukai, dan pihak keamanan. Karena itu pengusaha merasa belum begitu nyaman berusaha di perbatasan, selain biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi.

Masalah perekonomian yang menjadi isu yang menonjol adalah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kabupaten yang prihatin karena bahan bakar minyak (BBM) terkuras

oleh kendaraan dari RDTL yang menggunakan tanki cukup besar mengisi BBM di stasiun bahan bakar umum (SPBU) di perbatasan. Kondisi ini seharusnya segera disikapi oleh pemerintah kabupaten dengan koordinasi dengan pemerintah pusat agar sesegera mungkin menghadirkan SPBU khusus di perbatasan. Kadin Belu mengungkapkan, sebagai bagian dari elemen masyarakat Kabupaten Belu, Kadin perlu menyatakan sikap terhadap kondisi riil yang dialami warga perbatasan dalam hal pelayanan BBM subsidi. Pemerintah Pusat dengan dana miliaran rupiah menyubsidi BBM untuk masyarakat di perbatasan, namun kendaraan dari RDTL justru memanfaatkan sesuka hati. Setiap kali kendaraan RDTL mengisi BBM subsidi, tetap menggunakan biaya standar nasional dan bukan standar internasional. Kondisi ini harus secepatnya diatasi sehingga BBM subsidi untuk warga Belu tetap aman.³²

Pengisian BBM subsidi oleh kendaraan dari RDTL merupakan pemandangan rutin di setiap SPBU dalam wilayah kota Atambua. Petugas SPBU tentu tidak bisa disalahkan karena memang mereka tidak mengetahui regulasi aturan untuk pengisian BBM. Masyarakat berharap, yang harus dilakukan sekarang adalah pemerintah kabupaten segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar menghadirkan SPBU khusus dengan harga internasional di wilayah perbatasan RI-RDTL.

Pemerintah Kabupaten Belu segera menanggapi positif keluhan masyarakat tersebut. Pada bulan Mei 2012 Pemerintah Kabupaten Belu telah mendapat izin membangun stasiun bahan bakar umum (SPBU) khusus bagi kendaraan plat putih (Timor Leste) dari PT Pertamina Surabaya, Jawa Timur. Langkah berikutnya, menurut Bupati Lopez, pemerintah akan membangun komunikasi dengan pihak swasta untuk membangun SPBU khusus tersebut sehingga tidak mengganggu lagi pengambilan BBM subsidi oleh kendaraan dari luar negeri.³³

Mobil plat putih atau kendaraan dari Timor Leste, diminta untuk menggunakan pertamax dan bukan premium bersubsidi ketika hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM) di satasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di NTT. Hal tersebut dikarenakan premium atau bensin itu dikhususkan bagi warga negara Indonesia saja. Meski kebijaksanaan antarnegara bukanlah wewenang Pertamina, namun sebagai penyalur BBM, Pertamina tetap mengarahkan agar kendaraan berplat putih (Timor Leste) mengisi BBM pertamax, dan bukan dengan premium. Namun bila pengendara itu tidak mau, Pertamina juga tidak bisa berbuat banyak, karena larangan itu sendiri belum ada.³⁴

Di bidang kebudayaan, yaitu untuk melaksanakan ritus-ritus adat seperti

³² Anonymous, 2012. "Kadin Belu Prihatin BBM Subsidi Habis Terkurus, dalam *Kupang Pos*, 21 Maret, hal: 17, kol. 1-3.

³³ Anonymous, 2012. "SPBU 'Plat Putih' Bangun di Motaain: Izin Sudah Keluar, Sedang Survei Lahan", dalam *Pos Kupang* 30 Mei, hal: 1, kolom 4-7.

³⁴ Sonny Indro, *Sales Representative Pertamina NTT*, dikutip *Pos Kupang* "Mobil dari Timor Leste Diminta Pakai Pertamax", 21 Februari, hal: 3.

perkawinan, upacara-upacara kematian dan hubungan-hubungan kekeluargaan lainnya, telah ada kemajuan yang signifikan yang dialami oleh dua warga negara yang berbeda yang sebenarnya satu keturunan tersebut. Warga dua negara yang sama-sama tinggal di perbatasan, telah mengucapkan "selamat tinggal jalan tikus", jalan yang kerap dilalui untuk melepas rindu antarwarga di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Kerinduan yang terpendam selama 11 tahun kini terobati dengan pemberlakuan pas lintas batas (PLB).

Sejak berpisah dari NKRI 1999 silam, warga Timor Leste bercerai-berai. Ada yang tetap menghuni Timor Leste, dan yang lainnya memilih Indonesia. Namun perbedaan politik dan batas administrasi serta kedaulatan negara tidak bisa memutuskan ikatan kekeluargaan antarwarga. Sejak 1999 sampai 2010 (11 tahun), tak lagi ada keleluasaan untuk bepergian melintasi batas negara untuk melepas rindu. Yang memilih Indonesia dengan yang bertahan di Timor Leste nasibnya tak jauh berbeda. Di Timor bagian barat (Indonesia), kebanyakan eks warga Timtim tinggal di kamp-kamp pengungsi. Sementara kaum kerabat mereka yang menghuni tanah Timor Leste pun setali tiga uang. Ekonomi morat-marit di tengah susah payahnya negara baru termiskin itu membangun bangsanya.

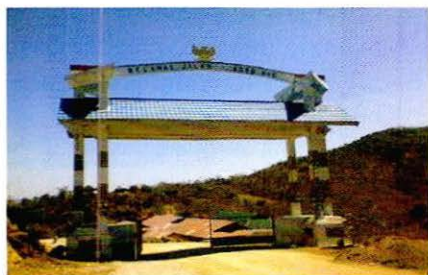
Kerinduan antarwarga untuk bebas bersilaturahmi pun terpendam selama bertahun-tahun. Sebab untuk saling mengunjungi membutuhkan biaya tak sedikit untuk mengurus paspor. Dan jalan tikus alias jalur-jalur ilegal pun jadi andalan selama bertahun-tahun untuk melepas rindu. Tak heran pelepasan Pas Lintas Batas (PLB) oleh pemerintah RI dengan Timor Leste pun disambut gembira warga perbatasan kedua negara.

Menurut warga, pemberlakuan PLB sangat membantu mereka. Dengan memegang PLB mereka bisa bertemu keluarga selama 10 hari. Tidak ada lagi rasa was-was ditangkap aparat keamanan. Biaya hanya sekitar Rp. 15 ribu, dengan memasukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga dan surat pengantar dari kepala desa, tinggal ke Kantor Imigrasi, diurus, dan satu hari selesai. PLB secara resmi diberlakukan hari Rabu 28 Juli 2010. PLB yang berlaku untuk satu tahun itu dilayani di sembilan titik yang sudah disepakati sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah RI dan RDTL tanggal 16 Juni 2003. Sebagai catatan, pintu perbatasan Motaain merupakan pintu masuk resmi yang pertama kali memberlakukan PLB bagi warga di kedua negara.³⁵

Antusiasme pelintas batas antar Indonesia-Timor Leste di pintu utama kedua negara itu, tinggi. Tingginya antusiasme itu karena warga sudah bisa lebih bebas mengunjungi kerabatnya tanpa direpotkan mengurus paspor dan visa yang menelan biaya yang tidak sedikit. Sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas imigrasi itu harus

³⁵ Anonimous, 2010, "Selamat Tinggal Jalan Tikus", dalam *Pos Kupang*, 1 Agustus, hal: 1, kolom 1-2.

membayar visa sebesar 30 dolar atau sekita Rp. 300 ribu lebih untuk keluar masuk pintu utama, yaitu Metamauk, Motaain di Kabupaten Belu dan Wini dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Lebih dari 200 warga pelintas batas dari dan negara Indonesia melalui pintu perbatasan Motaain, pasca pemberlakuan, cukup membuat kewalahan petugas imigrasi kedua negara.



Gambar 5.19

Pintu gerbang perbatasan RI-RDTL di Napan (Kabupaten Timor Tengah Utara). Di seberang pintu gerbang, tampak atap-atap perkantoran RDTL dan rumah-rumah penduduk Timor Leste.



Gambar 5.20

Pintu gerbang perbatasan NKRI-RDTL di Napan, dilihat dari arah Timor Leste. Di sebelah kanan adalah Pos Polisi Republik Indonesia di Napan.

Namun tidak semua warga bisa memiliki PLB, karena untuk sementara hanya diberikan bagi warga yang berdomisili di sekitar wilayah perbatasan dengan waktu tertentu setelah itu dapat diperpanjang, sesuai ketentuan yang berlaku dalam kesepakatan bersama kedua negara. Diharapkan PLB membantu memberdayakan ekonomi rakyat di perbatasan dan menekan pelintas ilegal yang bepergian melalui jalan tikus. Penggunaan PLB pun hanya diizinkan pada radius 10 kilometer dari pintu perbatasan sesuai ketentuan yang disepakati kedua negara. Sementara, batas waktu penggunaan PLB hanya 10 hari dan akan diperpanjang pada 10 hari berikutnya dengan mendatangi imigrasi setempat lalu menunjukkan KTP, akte kelahiran/surat baptis, surat keterangan dari kepala desa setempat, ijazah jika ada, pas photo 3 x 4 berlatar belakang merah dan syarat lainnya.³⁶

Syarat-syarat ini berlaku untuk mengurus PLB baru atau perpanjangan masa berlaku langsung ke pos-pos perlintasan atau TPI yang ditetapkan bersama kedua negara. Proses untuk mendapatkan PLB ini bisa langsung ke pos-pos perlintasan

³⁶ Ferry Kiswanto, staf imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Motaain, dikutip *Pos Kupang*, "Imigrasi Kewalahan", dalam *Pos Kupang*, 1 Agustus, 2010, hal: 1.

atau TPI terdekat dari domisili warga yang ditunjuk atau juga langsung di Kantor Imigrasi Atambua, Kabupaten Belu. PLB juga terkait soal ternak yang sering masuk keluar wilayah kedua negara. Jika ternak masuk ke suatu wilayah maka dengan menggunakan PLB tersebut pemilik bisa masuk ke wilayah RDTL maupun Indonesia untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk membawa pulang ternaknya.

Alousius Luan Mau (50 tahun),³⁷ salah seorang pegawai negeri di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, juga merasa sangat senang dengan adanya PLB, karena orangtuanya dan adiknya sampai kini tetap berada di Timor Leste dan menjadi warga negara Timor Leste. Pada waktu terjadi pengungsian menyusul hasil jajak pendapat dulu, sebagai pegawai negeri di Propinsi Timor Timur, ia dan anak isterinya ikut mengungsi ke Kabupaten Belu meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya. Selama ini ia merasa kesulitan bila hendak bertemu dengan orang tua dan adiknya itu.

Tanggal 15 Desember 2011, Pas Lintas Batas (PLB) Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste juga resmi diberlakukan di Perbatasan Humusu C/Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), serta RI-Sakato-Oekusi RDTL, dan Perbatasan Metamauk, Kabupaten Belu-Salele Distrik Suai-RDTL.³⁸



Gambar 5.21

Pos Polisi di Perbatasan RI-RDTL di Napan (Kabupaten Timor Tengah Utara).

Pemberlakuan PLB Lintas Batas Wini-Metamauk ditandai dengan perjalanan pertama lima pelintas batas dari Indonesia dan lima pelintas batas dari Timor Leste di daerah ini. PLB Wini-Metamauk diluncurkan langsung oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Majen (TNI) Amirudin Usman, selaku tuan rumah, dan Wakil Menteri Luar Negeri RDTL, Alberto X.P Carlos, di Pos Perbatasan Wini, Insana Utara (TTU). Hadir dalam peluncuran perdana PLB Wini-Metamauk, Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, Edy

³⁷ Wawancara dengan Allusius Luan Mau, seorang pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, di rumahnya, tanggal 22 Agustus 2012.

³⁸ Anonimous, 2011, "PLB RI-RDTL Resmi Diberlakukan: Di Wini-Sakato dan Metamauk-Salele", dalam *Pos Kupang*, 18 Desember, hal: 5, kolom 2-5.

Setiabudy. Dengan diberlakukannya PLB Wini-Sakato dan Metamauk Salele, maka sudah ada tiga titik perbatasan yang mendapat fasilitas PLB.

Peresmian pemberlakuan PLB di kedua titik tersebut merupakan langkah konkrit implementasi kesepakatan negara RI-TL tahun 2003, yang mengatur tentang PLB pada sembilan titik perlintasan. Tahap pertama PLB yang diberlakukan sejak Juli 2010, untuk perlintasan Motaain-Batu Gade diresmikan Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Timor Leste di Dili.

Keinginan kuat kedua negara untuk memberlakukan PLB di titik perlintasan lain telah tercermin dalam berbagai hasil pertemuan kedua negara seperti *Join Ministerial Comission (JMC)* ke-5 RI-TL Maret tahun 2005. Pada JMC ke-5 kedua pihak sepakat untuk membentuk tim sosialisasi dan tim evaluasi bersama pemberlakuan PLB. Dan sosialisasi bersama itu telah dilakukan tanggal 23-26 September di Wini dan Metamauk. Diharapkan, PLB bisa bermanfaat bagi penduduk di dua titik perbatasan. Bisa saling kunjung-mengunjungi, menggelar pertemuan keluarga, pertemuan adat maupun pertemuan keagamaan. Dalam jangka panjang dengan pemberlakuan PLB diharapkan tercipta keteraturan dan keamanan lebih baik. Dengan PLB juga diharapkan, dapat mempererat persaudaraan dan kekeluargaan yang sesungguhnya antar penduduk di kedua titik yang ada di dua negara. Intinya, PLB memberikan sumbangan yang penting dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Sembilan titik perbatasan yang disepakati penggunaan PLB: 1) Motaain-Batu Gade; 2) Metamauk-Salele; 3) Napan Bawah-Bobometo; 4) Builalo-Merno; 5) Haekesak-Turiskain; 6) Haumus C/Wini-Sakato; 7) Haumeni Ana-Passabe; 8) Laktutus-Belulik Leten; dan 9) Pos Oepoli Sungai-Citrana.

Wakil Menteri Luar Negeri Timor Leste, Alberto Xavier Parera Carlos, yang hadir pada acara peresmian pemberlakuan PLB di dua titik perbatasan itu, mengatakan, Pemerintah Timor Leste sejak awal mempunyai komitmen sangat kuat untuk membangun hubungan bilateral sangat baik dengan Indonesia. Karena menurut Menlu Albertto, hanya perbatasan yang memisahkan masyarakat dua negara, tetapi hubungan antara masyarakat di perbatasan kedua negara tetap ada sejak zaman dahulu dan itu perlu dijaga, perlu dilestarikan demi kepentingan masyarakat di perbatasan. Selaku orang yang mewakili Pemerintah Timor Leste menyampaikan terima kasih kepada usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia. Bantuan-bantuan yang telah dilakukan kepada Pemerintah Timor Leste merupakan satu wujud solidaritas sangat baik," kata Alberto.³⁹

Sementara Duta Besar RI untuk Timor Leste, Edy Setiabudy mengatakan, dari Sembilan *border crossing* sudah tiga dilaksanakan, dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan dibuka pasar perbatasan. Duber RI untuk Timor Leste menegaskan, fasilitas PLB hanya untuk masyarakat di sekitar perbatasan kedua negara,

³⁹ Anonymous, 2011, "Terima Kasih Pemerintah Indonesia", dalam *Pos Kupang*, 18 Desember, hal: 5, kolom 4-5.

dan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan fasilitas PLB hanya kegiatan yang bersifat tradisional dan *cultural* yang mendorong perekonomian di perbatasan.

Tentang maraknya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), pengamat Hukum Internasional, Wilhelmus Wetan Songa mengatakan, sudah saatnya bagi Indonesia dan Timor Leste (RDTL) menandatangani sebuah perjanjian bilateral tentang pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan pribadi dari Timor Leste ke wilayah Indonesia, khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).⁴⁰ Menurut Wilhelmus, pemerintah sibuk mengatur kebijakan soal pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis premium bagi kendaraan-kendaraan pribadi di dalam negeri, tetapi lupa mengatur regulasi serupa bagi kendaraan luar negeri, khususnya dengan Timor Leste yang menggunakan BBM bersubsidi di Indonesia (Timor Barat). Mereka (Timor Leste) tahu bahwa tidak ada regulasi antar negara yang mengatur soal pembatasan BBM bersubsidi, sehingga dengan seenaknya pula mengisi BBM di dalam negeri kemudian kembali ke negaranya.

Rendahnya kehidupan ekonomi eks pengungsi Timor Timur, bukanlah suatu rahasia lagi. Inilah yang menyebabkan wajah pintu gerbang perbatasan Indonesia Timor Leste masih terlihat bopeng-bopeng. Karena beratnya kehidupan eks pengungsi, sebagian di antaranya melakukan repatriasi atau mencari pekerjaan keluar daerah (propinsi) lain. Di antaranya ada yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Tanggal 18 Oktober 2010, sebanyak enam kepala keluarga (KK) atau 24 jiwa warga eks Timor Timur, yang selama ini bermukim di Kabupaten Belu, memutuskan kembali ke tanah kelahirannya (repatriasi), Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Mereka kembali ke Timor Leste difasilitasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli kepada warga eks Timtim, yaitu Forum Peduli Perempuan dan Anak (FPPA) Atambua. Para warga itu berangkat melalui pintu resmi Motaain.⁴¹

Seorang warga yang berasal dari Kamp Gurita, Kecamatan Kakuluk Mesak, menjelaskan, keputusan dirinya dan keluarga kembali ke Timor Leste karena tidak ada lagi lahan untuk tempat tinggal di wilayah Timor Barat (Belu) – sejak eksodus tahun 1999 – keluarganya sudah empat kali berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir kami sudah dipatok untuk PLTU Atapupu. Dari pada berpindah-pindah terus, ia memutuskan kembali ke Timor Leste. Di sana (Distrik Liquisa) ia masih punya rumah dan lahan.

Sementara warga lainnya asal Kamp Sukabitetek, Kecamatan Raimanuk, mengatakan, keinginan kembali ke Timor Leste adalah keinginan pribadi, karena urusan adat. Dikatakannya, ia pulang ke Timor Leste bukan karena paksaan. Sebagai

⁴⁰ Anonimus, 2012, "Perlu Perjanjian Bilateral RI-Timor Leste Soal BBM", dalam *Pos Kupang*, 12 Januari, hal: 7, kolom 4-7.

⁴¹ Anonimus, 2010, "Perbaiki Nasib: 24 Warga Eks Timtim Repatriasi", dalam *Pos Kupang*, 23 Oktober, hal: 17, kolom 4-7.

penjaga rumah adat ia harus kembali ke Timor Leste. Barang *lulik* (adat) ada di Belu, namun rumah adat ada di Timor Leste. Karena itu ia dan keluarganya harus kembali ke sana (Timor Leste). Apalagi di Belu mereka juga tidak mempunyai tanah. Kelompok yang bernama *Grupo Servisu ba Repatriasaun* (sebuah kelompok yang bekerja untuk repatriasi di Timor Leste), akan terus berupaya memfasilitasi warga eks Timtim yang hendak kembali secara sukarela ke Timor Leste.

Sedangkan pada Pebruari 2012 warga Belu yang kebanyakan kelahiran Timor Timur yang mengadu nasib ke propinsi lain (Kalimantan Barat) sebagai tenaga kerja sebanyak 128 orang, bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kerjasama dilaksanakan dengan Sinar Mas Group sejak tahun 2011, yang waktu itu memberangkatan 341 orang. Pada Maret 2012, aparat keamanan menangkap para calon TKI ilegal di Pelabuhan Tenau Kupang. Kepada aparat keamanan yang menangkap, para calon TKI asal Belu mengaku tidak bisa bertahan hidup di daerahnya karena tidak mempunyai lahan untuk bertani. Mereka adalah pengungsi asal Timor Timur sejak 1999 lalu, dan lahan yang mereka garap sudah diambil kembali oleh pemiliknya.⁴²

5.2.3 Pertahanan keamanan

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah RI-RDTL tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Wilayah perbatasan sangat berpotensi terjadi konflik karena berbagai kepentingan, sehingga diharapkan semua warga ikut menciptakan kondisi kamtibmas agar tetap kondusif. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Belu, Daniel Asa, ketika membuka seminar dengan tema: "Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Kamtibmas Perbatasan RI-RDTL", yang diselenggarakan Lembaga Masyarakat Peduli Timor Indonesia (LPMTI) Kabupaten Belu di Hotel Nusantara II Atambua, Selasa (21/2/2012).⁴³

Wilayah perbatasan memang berpotensi terjadi konflik, baik karena kepentingan ekonomi, politik, pertahanan keamanan, sehingga semua warga wajib menciptakan kondisi perbatasan sehingga tetap kondusif. Dalam rangka pengamanan perbatasan RI-RDTL, Polres Belu telah membentuk enam pos pengamanan terpadu (pospol), yakni di Motaain, Turiskain, Alas, Builalu, Lookeu, dan Laktutus. Namun pengamanan terhadap gangguan kejahatan di perbatasan masih sulit dilakukan karena panjangnya garis batas dan banyaknya jalan tikus.

Adanya kesamaan budaya, adat dan keturunan (suku yang sama) kawasan perbatasan, menyebabkan adanya kegiatan pelintas batas tradisional yang ilegal (lewat

⁴² Anonimous, 2012, "Kami Tak Bisa Hidup di Belu: 23 Calon TKI Ditangkap di Tenau", dalam *Pos Kupang*, 31 Maret, hal: 1, kolom 6-7.

⁴³ Anonimous, 2012, "Kamtibmas di Perbatasan Tanggung Jawab Bersama", dalam *Pos Kupang*, 26 Pebruari, hal: 4, kolom 1-4.

jalan tikus) dan sulit dicegah. Persamaan budaya dan adat masyarakat dan kegiatan pelintas batas tradisional ini merupakan isu sekaligus masalah perbatasan antarnegara yang telah ada sejak lama dan kini muncul kembali seiring dengan penanganan kawasan perbatasan darat di Timor Leste. Masalah perbatasan antarnegara ini telah berlangsung lama namun sampai saat ini belum dapat diatasi oleh kedua pihak (negara), karena: belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh. Beberapa segmen garis batas baik di darat maupun di laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan darat adalah pemindahan patok-patok batas yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Namun secara umum, titik koordinat batas negara di darat pada umumnya sudah disepakati. Permasalahan batas yang perlu diprioritaskan penanganannya saat ini adalah perbatasan laut, dimana garis batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagian besar belum disepakati bersama negara-negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dan beberapa negara tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan, terhadap batas negara di laut menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

Selain itu, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) menyatakan bahwa batas ZEE Indonesia di segmen-segmen perairan yang berhadapan dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut, maka ZEE merupakan garis median. Jika mengacu kepada konvensi tersebut, maka batas ZEE yang merupakan garis median pada wilayah laut NKRI yang berhadapan dengan Timor Leste adalah Selat Wetar.

Belum ditetapkan batasan ZEE antara Indonesia dengan Timor hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan, atau belum dilakukannya ratifikasi. Ketidaktepatan batasan ZEE tersebut menyebabkan sulitnya penegakan hukum oleh aparat dan berpotensi untuk menjadi sumber pertentangan antara Indonesia dengan negara tetangga.



Gambar 5.22

Tampak pada foto, tanah yang dijadikan sengketa di Haumeni Ana yang sudah digarap dengan mesin ekskavator untuk didirikan kantor bea dan cukai RDTL yang mengakibatkan sengketa.

5.2.4 Pengelolaan sumber daya alam

Potensi sumberdaya alam yang berada kawasan perbatasan, baik di wilayah darat maupun laut cukup besar, namun sejauh ini upaya pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Potensi sumberdaya alam yang memungkinkan dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara lain sumber daya kehutanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Selain itu, devisa negara yang dapat digali dari kawasan perbatasan dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan antarnegara.

Terkait dengan hal tersebut, DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani masalah pencemaran laut akibat bocornya pengeboran minyak milik perusahaan Australia di laut Timor. Pencemaran Laut Timor telah berdampak luas pada gagal panen rumput laut di wilayah Rote Ndao. Pemerintah pusat diminta kerja serius dan cepat untuk mengatasi keterpurukan masyarakat di wilayah Rote Ndao.⁴⁴

Pencemaran laut oleh perusahaan pengeboran minyak Australia telah terjadi setahun yang lalu, dan dampaknya sangat luas. Dalam pertemuan dengan pimpinan SKPD dilaporkan Kadis Perikanan dan Kelautan Rote Ndao bahwa setahun sebelumnya produksi rumput laut di Rote Ndao mencapai 7 ribu ton, tetapi setelah terjadi pencemaran minyak produksi rumput laut turun Cuma seribu ton saja. Artinya, enam ribu ton rumput laut hilang. Kerugian inintidak sedikit. Itu untuk rumput laut, belum termasuk usaha penangkapan ikan nelayan yang tidak bisa berjalan baik, biota laut yang rusak atau mati dan seabainya, sehingga dampak pencemaran diperkirakan mencapai 90 milyar rupiah.

Isu meluasnya pencemaran di perairan laut Timor akibat gagalnya penyumbatan kebocoran minyak di sumur West Atlas di ladang gas Montana yang meledak beberapa waktu yang lalu telah menjadi topik berita di berbagai media lokal, nasional, maupun internasional. Bahkan sejumlah pemerhati lingkungan di Australia telah memuat iklan layanan masyarakat di media cetak Australia untuk menggugah Pemerintah Australia dan operator ladang gas Montana agar dapat berusaha memulihkan lingkungan di Laut Timor guna melindungi kehidupan ikan, satwa laut dan biota laut.⁴⁵

Pemberitaan tumpahan minyak di Laut Timor telah menurun setelah api berhasil dipadamkan, namun siapa yang dapat menerka dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan di laut berikut kerusakan mata rantai makanan (*food chain*) akibat terganggunya ekosistem kelautan? Apalagi jika dihitung sejak September tahun terjadinya ledakan, ledakan sumur West Atlas di lading gas Montana telah menyemburkan 500.000 liter minyak mentah sehari, maka sudah berapa puluh juta liter minyak mentah tumpah di perairan laut Timor dan jumlah itu tentu akan terus

⁴⁴ Anonymous, 2010, "Pencemaran laut Timor: DPRD Tanya keseriusan Pemerintah Pusat" dalam *Pos Kupang*, 24 Maret, hal: 23.

⁴⁵ Maran, Canisyus, 2010, "Tumpahan Minyak di Laut Timor" dalam *Pos Kupang*, 26 Nopember, hal: 4.

bertambah 500.000 liter per hari jika upaya untuk menghentikannya belum juga maksimal

Di NTT, sejak Gubernur Piet A Tallo meluncurkan Program Gemala (Gerakan Masuk Laut), kehidupan nelayan dan pesisir mulai bergairah. Namun kegembiraan para nelayan kadang terganggu dengan antara lain pencurian ikan dan tertangkapnya nelayan NTT oleh polisi Australia karena dianggap melanggar batas zona. Kini, Laut Timor penuh dengan minyak mentah akibat sumur West Atlas di ladang gas Montana meledak. Menjadi pertanyaan, ke manakah gerakan nelayan NTT mencari nafkah jika lokasi pemancingan tercemar minyak mentah?

Belum diketahui sejauh mana tim terpadu yang dibentuk Gubernur Frans Lebu raya yang melibatkan unsur TNI, Polri dan pejabat Pemerintah NTT memantau dan mengantisipasi meluasnya pencemaran di Laut Timor. Laut Timor atau perairan NTT menurut hasil studi JICA (*Japan International Cooperation Agency*) bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan RI merupakan areal penangkapan ikan (*Fishing Ground*) dan budi daya untuk meningkatkan rata-rata pendapatan nelayan. Tumpahan minyak di laut, tidak saja merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Tumpahannya minyak lebih-lebih menghambat peningkatan etos budaya bahari dan pariwisata.

Untuk pengamanan perairan di perbatasan RI-Australia, telah diadakan kegiatan latihan bersama yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut VII Kupang bersama Angkatan laut Australia (*Royal Australia Navy*) menggunakan sandi “kasuari exercise” untuk pengamanan perairan di perbatasan kedua negara.⁴⁶ Ke depan diharapkan, model latihan antar serdadu kedua negara seperti ini terus dilakukan secara terpadu. Hal ini, selain untuk menjaga keamanan bersama kedua negara di wilayah perairan perbatasan Indonesia dan Australia, juga di sisi lain untuk lebih memupuk jalinan komunikasi dan persahabatan antara dua elemen organ pertahanan yang bertugas menjaga kedaulatan dua negara yang berdaulat ini.

Sebagaimana di ketahui bersama, wilayah perairan Indonesia dan Australia di Samudera Hindia (perairan Laut Timor) masih sangat rentan dengan aktivitas yang berkaitan dengan ‘manusia perahu’ terutama dari Afganistan dan Irak yang selalu/sering menggunakan perairan Laut Timor untuk menyeberang ke wilayah Benua Australia mencari suaka politik. Laut Timor juga sangat rawan dengan kasus pencurian ikan. Australia sering mengklaim ada orang-orang luar tanpa izin masuk ke perairan negara itu untuk mengambil hasil laut, khusus di Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) yang masih dalam teritori Australia. Latihan tersebut mendapat respon positif, bukan saja dari pihak TNI, namun juga dari pemerintah NTT dan Pemerintah Kabupaten Kupang yang sudah menerima program bantuan Pemerintah Australia bidang pendidikan dan bidang lainnya.

⁴⁶ Anonimus, 2010, “Pentingnya Kerjasama TNI dan Angkatan Laut Australia”, dalam *Pos Kupang*, 15 Mei, hal: 4.

Terkait dengan berita-berita yang beredar pada awal tahun 2010 yang menyatakan bahwa "TNI Pancang Tujuh Pilar, Rugikan Batas Wilayah RI"⁴⁷, tanpa koordinasi dengan Pemkab TTU, Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang saat itu, Kolonel Dody Usodo Hargo, S. S.Ip menegaskan, penentuan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab negara, bukan pemerintah daerah. TNI diamanatkan oleh negara untuk menjaga keutuhan wilayah agar tidak diganggu oleh pihak lain.

Danrem 161/Wara Sakti telah meluruskan pemberitaan tersebut, karena berita tersebut sangat diskriminatif terhadap keberadaan TNI dalam mengawal dan menjaga kedaulatan negara, khususnya Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. TNI mempunyai tugas pokok menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa Indonesia di daerah perbatasan dari segala bentuk ancaman, dan tugas-tugas lainnya, termasuk mencegah semua bentuk kegiatan illegal di perbatasan.

Menurut Danrem, bicara tentang patok perbatasan merupakan kewenangannya sebagai Komandan Pelaksana Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL. Dengan demikian, masyarakat tidak salah menafsirkan. TNI (prajurit yang bertugas di perbatasan RI-RDTL) tidak mungkin melepas kedaulatan NKRI kepada RDTL, walau hanya sejengkal tanah saja. Pelanggaran sejengkal tanah yang dilakukan UPF (*Unidade Police Foreinter*/Polisi Perbatasan RDTL) dalam membangun pos perbatasannya saia diminta dibongkar paksa.

Menurut Danrem, berita yang benar sesuai realita di lapangan adalah pemasangan pilar perbatasan telah disepakati oleh kedua negara melalui jalur diplomatik yang dilakukan oleh Menlu RI dengan Menlu RDTL pada tahun 2005 lalu. Pemasangan pilar batas dilakukan oleh kedua negara, untuk Indonesia oleh Tim Interdep yang terdiri dari Badan Koordinasi Survei Tanah dan Laut (Bakorsutal dan Depdagri. TNI hanya mengawal pelaksanaannya. Sedangkan, permasalahan pemasangan patok batas di Desa Sunsea sudah betul dan sah dengan perincian sebagai berikut, pemasangan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 21 November 2009, jumlah pilar yang dipasang sebanyak lima pilar (bukan 7 pilar seperti yang diberitakan).

Danrem merinci, empat pilar batas di Bakitolas dan satu pilar batas di Sunsea. Saat pemasangan dihadiri oleh (pihak masyarakat) Ketua RT 08 Nelu, Martinus Suni, Kepala Dusun III, Andreas Koa dan Kepala Desa Sunsea Imelda Kosat. Jadi tidak benar Pemda tidak dilibatkan atau tidak tahu. Saat itu Camat Naebenu, Gaspar Nono tidak datang. Danrem menjelaskan, pada 17 November 2009, Tiem Intrdep menghadap Bupati TTU, tetapi Bupati TTU, Wakil Bupati, Sekda dan para Asisten Sekda tidak

⁴⁷ Anonymous, 2010, "Batas Wilayah NKRI Tanggung Jawan Negara, Bukan tanggung Jawab Daerah", dalam *Pos Kupang*, 24 Februari, hal: 6.

ada di tempat. Tim hanya diterima Kabag Tata Pemerintahan Sekda TTU. Sesuai kesepakatan Tim Interdep RI dengan Tim RDTL, maka dipasang lima pilar itu.

5.2.5 Kelembagaan dan kewenangan pengelolaan

Kawasan perbatasan RI-Timor Leste masih mengalami kesulitan aksesibilitas baik darat, laut, maupun udara menuju pusat-pusat pertumbuhan. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000–2004 dinyatakan “program pengembangan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain”. Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keamanan kawasan perbatasan.

Sekalipun demikian, sejauh ini belum tersusun suatu kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan, dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh *stakeholders* kawasan perbatasan, baik di pusat maupun daerah, secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini mengakibatkan penanganan kawasan perbatasan terkesan terabaikan dan bersifat parsial. Hal tersebut disebabkan:

- a. Belum adanya kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan secara integral dan terpadu.

Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Sampai saat ini, permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara *ad hoc*, sementara (temporer) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (*security*) melalui beberapa kepanitiaan (*committee*), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain *General Border Comitee (GBC) RI – Malaysia*, *Joint Border Committee (JBC) RI – Papua New Guinea*; dan *Joint Border Committee RI-UNMISSET (Timor Leste)*.

Pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat strategis dan mendesak untuk dilakukan, karena menyangkut dengan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang turut memberikan kontribusi terhadap belum optimalnya pengelolaan dan penanganan permasalahan perbatasan saat ini adalah belum adanya suatu lembaga yang secara khusus mengelola keseluruhan aspek pengelolaan perbatasan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Di Nusa Tenggara Timur, Januari 2011 Badan Pengelola Perbatasan NTT-Timor Leste terbentuk. Setelah enam bulan terbentuk atau sejak Januari 2011, Badan

Pengelola Perbatasan NTT-Timor Leste, belum melakukan pembangunan fisik. Langkah yang sudah diambil adalah melakukan pemetaan sumber daya alam (SDA). Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan, Eduard Frans Gana mengatakan, hasil identifikasi beberapa potensi yang dapat dikembangkan di kawasan perbatasan antara lain, peternakan, perkebunan serta pertanian.⁴⁸ Menurut Gana, ada dua hal yang perlu diperhatikan bagi pengembangan kawasan perbatasan, pertama: menghimpun data terkait dengan potensi ekonomi dan infrastruktur. Kedua, melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Pemerintah perlu membuat peta potensi perbatasan untuk pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan menjadi lebih baik. Setiap kawasan perbatasan memiliki potensi, kebutuhan, kebijakan, dampak dan kompleksitas yang berbeda-beda.

Masyarakat di kawasan perbatasan RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur sampai saat ini masih dihadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan yang mendasar seperti kesejahteraan, keamanan, pelestarian lingkungan, transportasi, penerangan, pendidikan, kesehatan, dan rendahnya akses terhadap informasi dan sarana-prasarana sosial lainnya, seperti air, listrik, dan sebagainya. Selain itu, ada persoalan yang belum diselesaikan sampai saat ini, antara Indonesia dan RDTL, mengenai perbatasan darat di kawasan perbatasan dan batas wilayah maritim yang masih menunggu kesepakatan batas darat. Padahal, wilayah perbatasan dan wilayah kepulauan di mana posisi NTT persis di gerbang selatan Asia Pasifik dan Republik Indonesia tentu akan menjadi satu perhatian yang khusus bagi keberlanjutan dari pengembangan wilayah dan dinamika perkembangan masyarakat.

- b. Belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan
Sesuai UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, pengaturan tentang pengembangan kawasan perbatasan secara hukum berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten. Kewenangan pemerintah pusat hanya ada pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS).

Dengan demikian sebenarnya Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kawasan perbatasan selain di pintu-pintu masuk tersebut, tanpa menunggu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah belum melaksanakan kewenangannya tersebut. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor : (1) Belum memadainya

⁴⁸ Anonimous, 2011, "Badan Pengelola Perbatasan Baru Petakan Potensi SDA: Pemerintah Pusat Belum Cairkan Dana Rp. 4 Miliar", dalam *Pos Kupang*, 7 Juli, hal: 6.

kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi; (2) Belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, (3) Terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; (4) Masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai *international inheritance* yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan).

Selama tahun 2011, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp. 900 miliar untuk membangun daerah perbatasan antara Indonesia (NTT) dengan Negara Timor Leste. Untuk tapal batas di Kabupaten Belu, dana itu sudah dikucurkan dan saat ini sedang dalam evaluasi tentang penggunaannya.⁴⁹ Alokasi dana yang besar bagi daerah tapal batas, dipijaki pada banyak pertimbangan. Satu di antaranya adalah menjaga agar tidak terlalu mencolok perbedaan kemajuan antara daerah-daerah di negara tetangga dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia.

Untuk tahun 2012, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kucuran dana sekitar Rp. 1 triliun untuk penataan kawasan perbatasan antarnegara. Dana itu akan dibagikan kepada tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, yakni Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), dan Belu. Dana itu diperuntukan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, di mana akan dilakukan persiapan bagi masyarakat agar bisa meningkatkan pendapatan ekonomi di kawasan itu.⁵⁰

Sebagaimana diketahui, di beberapa propinsi yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara lain, perbedaan kemajuan sangat tajam. Itu bisa disaksikan di daerah tapal batas antara sejumlah daerah di Kalimantan dengan Malaysia. Daerah-daerah di Malaysia yang berada di wilayah Malaysia yang berada di wilayah tapal batas, kemajuannya sangat signifikan. Tapi di Indonesia, daerah-daerah di tapal batas masih jauh tertinggal. Perbedaan yang demikian, dapat mengakibatkan masyarakat cenderung memuji-muji negara tetangga ketimbang tanah tumpah darahnya sendiri. Berdasarkan realita itu, maka pemerintah pusat mulai mengambil langkah-langkah maju. Satu di antaranya adalah mengalokasikan dana yang besar bagi pembangunan daerah tapal batas. Salah satunya untuk Kabupaten Belu.

Pengelolaan perbatasan, dalam berbagai literatur adalah mempertahankan kedaulatan (*sovereignty*) dan hak-hak berdaulat (*sovereign Right*) antarnegara serta menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hubungan internasional, sebenarnya

⁴⁹ Emanuel Babu Eha, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTT, "Untuk Bangun Tapal Batas: Belu Kebagian Rp. 900 Miliar", dalam *Pos Kupang*, 22 Nopember, 2011, hal: 6.

⁵⁰ Eduard Gana, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Propinsi NTT, "Rp. 1 Triliun untuk Tata Kawasan Perbatasan", dalam *Pos Kupang*, 1 Agustus, 2011, hal: 18.

negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah (*Border Zone*) tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dimaksud.

Menurut Seran dalam artikelnya, perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat dikualifikasi dalam terminologi "*Border Zone*" (zona perbatasan) maupun *CustomFree Zone* (zona bebas kepabeanan). Kawasan perbatasan dalam dua terminology di atas dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional yang bersifat "*treaty contract*" untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan secara insidental maupun yang bersifat "*law making treaty*" untuk pengaturan masalah perbatasan secara permanen berkelanjutan. Perbatasan wilayah harus dikelola secara baik dan berkelanjutan karena selain berkaitan dengan penyelesaian berbagai sengketa internasional (*international disputes*) juga karena daerah perbatasan memiliki fungsi yang sangat strategis seperti fungsi militer, ekonomi perdagangan, kedaulatan negara dan fungsi-fungsi identitas nasional menuju kepentingan domestic di bidang ipoleksosbudhankam. Oleh karena itu menurut para ahli hukum internasional dan pengamat perbatasan dalam mengelola ke keamanan di perbatasan RI-RDTL dalam melaksanakan fungsi-fungsi perbatasan perlu diperhatikan aspek-aspek kultur masyarakat, pengaruh politik masyarakat dua negara, kebijakan pemerintah dua negara, dan kekuatan pasar dua negara.

Pengelolaan perbatasan oleh badan-badan khusus yang ditentukan negara secara internal dimaksudkan agar administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan baik dan penerapan hukum nasional secara berkeadilan. Secara eksternal penetapan dan pengelolaan perbatasan antar negara dimaksudkan agar dapat menjamin penetapan hukum internasional secara holistic untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban suatu negara dalam konteks hubungan internasional yang harmonis, damai dan seimbang.

Seran menyatakan, dalam konteks pengelolaan perbatasan wilayah antar negara dapat diuraikan beberapa perspektif yang berimplikasi pada penerapan hukum internasional secara holistik dan konstruktif.⁵¹

1. Kehadiran badan pengelola perbatasan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia diharapkan dapat memfokuskan pada aktifitas pemetaan dan identifikasi titik-titik perbatasan (darat, laut dan udara). Terobosan ini dapat mewujudkan penetapan batas-batas antarnegara secara limitative dan holistic agar dapat

⁵¹ Seran, John Bernado. 2012. "Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional: Pencerahan untuk Pengelola Perbatasan di Indonesia" dalam *Pos Kupang*, 7 Maret, hal: 4

diterapkan ketentuan hukum internasional secara baik di wilayah perbatasan. Tidak sepenuhnya pelaksanaan kegiatan dapat menghalangi penetapan hukum internasional kendati dapat ditegakkan hukum-hukum transisi (*Transitional Justice*) berupa “*ius constituendum*” yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan internasional yang disepakati dan dijalankan dua negara.

2. Badan pengelola perbatasan di Indonesia dan daerah dapat berperan dalam membantu penyelesaian berbagai persengketaan internasional (*International Disputes*) demi terciptanya kondisi keamanan perbatasan yang harmonis dan terkendali. Kendati hukum internasional memberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur kekerasan (*Use a force*) seperti perang dan blokade damai, diharapkan tetap diupayakan jalan sengketa melalui perdamaian yang memfokuskan pada pilihan-pilihan seperti arbitrase, judicial, negosiasi-mediasi, dan rekonsiliasi.
3. Kehadiran Badan Pengelola Perbatasan, menurut Seran, juga dapat mensinergikan kegiatan-kegiatan produktif seperti merintis ke arah pembentukan perjanjian-perjanjian internasional (*treaty*) untuk membina hubungan internasional yang harmonis, berdaulat dan “*mutual benefit*” dalam berbagai aspek. Dalam tataran ini Badan Pengelola Perbatasan dapat melakukan diplomasi untuk melahirkan kesepakatan-kesepakatan internasional berdasarkan hukum internasional seperti “*pacta sunt servanda*”. Pelaksanaan dimensi ini alangkah baiknya didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam hal meneruskan dan menganalisis berbagai dasar hukum. Pengaturan dan penegakan hukum di zona perbatasan baik untuk kepentingan perbatasan internasional berdasarkan hukum positif negara masing-masing maupun untuk kepentingan perbatasan eksternal berdasarkan keputusan hukum internasional berupa “*ius constitutum*” maupun penemuan atau pembentukan hukum internasional dari kebiasaan hukum internasional dua negara (konvensi).
4. Badan perbatasan juga dapat menjadi “*Leading Institution*” dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pembangunan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat maupun untuk pembentukan karakter kehidupan di perbatasan yang tidak saling mencurigai dan lebih ke arah terbentuknya kondisi “*mutual understanding*” di bidang sosial budaya maupun pertahanan keamanan wilayah.

Pemerintah perlu membuat peta potensi perbatasan untuk pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan menjadi lebih baik. Setiap kawasan perbatasan memiliki potensi, kebutuhan, kebijakan, dampak dan kompleksitas yang berbeda-beda. Demikian

dikatakan Mulyana⁵². Selanjutnya Mulyana mengatakan, dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan bermitra dengan pihak swasta, dalam hal ini Kadin yang sudah ada di dalam Undang-Undang. Karena pemerintah, baik pusat melalui APBN, propinsi dan kabupaten melalui APBD II tidak bisa bekerja sendiri.

Mulyana mengatakan, ada lima hal pokok yang menyebabkan adanya Forum Temu Pelaku Tata Ruang Kawasan Perbatasan. Pertama, kebutuhan ruang di tiap-tiap pelaku atau organisasi yang bergerak di kawasan perbatasan yang berbeda-beda. Karena kebutuhan ruang yang berbeda, perlu diseleraskan. Misalnya, kementerian Kehutanan, kebutuhannya beda dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PB) atau Pariwisata Budaya, Pendidikan ataupun Kementerian Kesehatan.

Kedua, adanya potensi dari setiap kawasan perbatasan yang berbeda-beda, karena panjang kawasan perbatasan di Indonesia berbeda-beda. Misalnya, di Kalimantan terdapat 2004 km kawasan perbatasan, Papua terdapat 700 km, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 200 km. Ketiga, kebijakan penggunaan ruang berbeda-beda, keempat, dampak penggunaan ruang di kawasan perbatasan yang berbeda, dan kelima, kompatibilitas atau kesetaraan penggunaan ruang dengan negara tetangga yang berbeda. Menurutnya, tahun 2011, BNPP sudah siap memberikan bantuan untuk penataan ruang di kawasan perbatasan, termasuk NTT yang berbatasan dengan RDTL.

Mulyana mengatakan, dalam mengatasi pembangunan tata ruang kawasan perbatasan harus melalui tiga pendekatan, yakni kesejahteraan masyarakat di perbatasan terutama pendidikan dasar dan kesehatan dasar serta kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM). Kedua, pendekatan keamanan, di mana mengembangkan organisasi masyarakat dan pemuda di kawasan perbatasan sebagai garda "Kasbara" atau garda terdepan kawasan perbatasan. Ketiga, keseimbangan ekosistem di mana mengembangkan pusat pertumbuhan yang menjadi pusat pelayanan masyarakat daerah perbatasan seperti fasilitas apa saja dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan lainnya untuk mengembangkan kawasan perbatasan secara menyeluruh.

Dalam forum yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, dalam sambutan yang dibacakan Kepala BNPP Propinsi Nusa Tenggara Timur, mengatakan, penataan tata ruang kawasan perbatasan hendaknya memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Forum ini, katanya, diharapkan bisa menggali lebih dalam pola perencanaan, pemanfaatan untuk terwujudnya ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Menurutnya, masyarakat di kawasan perbatasan NTT sampai saat ini masih

⁵² Agung Mulyana, Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pada pembukaan Forum Temu Pelaku Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Tahun 2011 di Hotel Kristal, Kupang, Tanggal 6 Juni, 2011.

dihadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan yang mendasar seperti kesejahteraan, keamanan, pelestarian lingkungan, transportasi, penerangan, pendidikan, kesehatan, dan rendahnya akses terhadap informasi dan sarana-prasarana sosial lainnya, seperti air, listrik, dan sebagainya. Selain itu, ada persoalan yang belum diselesaikan sampai saat ini, antara Indonesia dan RDTL, mengenai perbatasan darat di kawasan perbatasan dan batas wilayah maritime yang masih menunggu kesepakatan batas darat.

Yang juga terkait dengan kelembagaan dan kewenangan pengelolaan perbatasan dalam dimensi ketatanegaraan adalah adanya *Enclave Oekusi* yang berada di dalam wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Menurut Tadeus⁵³, *Enclave Oekusi* diibaratkan adanya kamar orang lain di dalam rumah kita. Baik pemilik rumah maupun pemilik kamar sama-sama terganggu. Disadari atau tidak ini sangat mengganggu baik bagi Pemerintah Negara Timor Leste maupun bagi Pemerintah Indonesia dalam menata wilayah negaranya masing-masing. Untuk itu perlu dipikirkan dan diidentifikasi secara matang bidang-bidang yang sensitif dan perlu dicari jalan keluarnya oleh kedua belah pihak. Salah satu bidang yang dijadikan acuan pertimbangannya adalah "perjalanan para pejabat Timor Leste dari dan ke *Enclave Oekusi* yang menggunakan wilayah darat melalui wilayah kedaulatan RI di Kabupaten Belu dan Timur Tengah Utara (TTU) Propinsi NTT.

Pejabat Timor Leste yang melakukan perjalanan pada kedua wilayah kabupaten tersebut adalah pejabat negara asing, yang mana pengaturan tentang para pejabat asing ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, tetapi bila ada permasalahan (kasus) paipomatik dan Konsuler, para pejabat diplomatik memiliki "*prevelege*" tertentu berupa keistimewaan-keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada mereka sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Keistimewaan dan Kekebalan ini juga termasuk ketika para pejabat diplomatik tersebut bersama staf maupun keluarganya berada dalam negara ketiga dalam "*in transit*". Bagasi dan tas para diplomat yang sedang transit pun tidak boleh diperiksa atau dibuka kecuali ada indikasi yang mencurigakan. Keharusan untuk menghormati diplomatik para pejabat diplomatik tersebut tidak berarti bahwa para pejabat diplomatik tersebut tidak perlu menghormati hukum di negara penerima atau hukum di mana ia berada. Keistimewaan dan kekebalan para pejabat diplomatik ini sebenarnya untuk menghormati jabatan yang diemban oleh mereka itu sebagai jabatan yang suci yang membawa persahabatan dan perdamaian antar negara.

Para pejabat yang melakukan perjalanan dari *Enclave Oekusi* melalui Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU, tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat diplomatik. Para pejabat ini tidak memiliki *privilege* tertentu, tetapi hanyalah tugas rutin kenegaraan

⁵³ Tadeus, Dhey Wigo, "Kewenangan Propinsi NTT Berkaitan dengan Adanya *Enclave Oekusi* Timor Leste dalam Wilayah Negara Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara", *Orasi Ilmiah*, pada Upacara Wisuda Magister dan Sarjana Periode Juni, 2012. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

yang menggunakan wilayah Indonesia sebagai jalan untuk mencapai wilayah negaranya (Oekusi). Mereka adalah pejabat negara asing yang harus dianggap sebagai tamu kenegaraan yang berada di dalam wilayah Indonesia. Untuk itulah maka pemerintah pusat (Jakarta) merasa bahwa merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap pengaturan pejabat asing. Hal ini menimbulkan “kekakuan” bagi Pemerintah Propinsi NTT maupun aparat Kabupaten Belu dan TTU, ketika berhadapan dengan persoalan yang berkaitan dengan tingkah laku para pejabat Timor Leste yang melakukan perjalanan (termasuk *in transit*) di wilayahnya.

Untuk itu, menurut Tadeus, diperlukan iktikad baik (*good faith*) dua negara yang berbatasan sebagai satu prinsip hukum yang diakui dalam hukum internasional modern. *Good faith* mengandung nilai kejujuran, kepantasan dan kelayakan (*honesty, fairness, dan reasonableness*), bagi kedua negara yang merupakan refleksi etis, terhadap sikap dari kedua negara yang bertetangga.

Diakui, bahwa antara masyarakat Indonesia (Timor Bagian Barat) dan Timor Leste mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat dalam rumpun keluarga Timor. Namun catatan masa silam yang kelam dapat menjadi pemicu konflik antara kedua negara, yang diekspresikan dengan mengadakan penyerangan terhadap para pejabat Timor Leste yang sedang melakukan perjalanan di wilayah tersebut.

Dalam kondisi yang demikian, di satu sisi belum ada ketentuan hukum yang memayungi persoalan ini, tetapi di sisi lain Pemerintah Propinsi NTT maupun Pemda Kabupaten Belu dan Pemda TTU, yang memiliki hak otonomi, harus lebih bersikap proaktif mengantisipasi permasalahan yang ada. Salah satu jalan yang harus dilakukan adalah dengan membentuk perjanjian internasional antara kedua negara. Pada langkah inilah peranan Pemda Belu dan Pemda TTU tidak dapat diabaikan oleh Pemerintah Pusat, terutama dalam perundingan bilateral dengan Pemerintah Timor Leste, karena kedua Pemerintah Kabupaten inilah yang paling mengetahui masalah-masalah di daerahnya.

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, telah dengan tegas menetapkan urusan politik luar negeri adalah urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan yurisdiksi menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Belu maupun Pemerintah Kabupaten TTU, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menata warganya termasuk para pejabat Timor Leste yang sedang berada di wilayahnya.

Sekalipun menurut hukum internasional, bahwa pihak dalam perjanjian internasional adalah negara, namun secara internal harus diidentifikasi lembaga yang memiliki kewenangan, yang disebut lembaga pemrakarsa. Lembaga pemrakarsa ini mempunyai kewenangan untuk memprakarsai, mengkoordinasi, serta menerapkan perjanjian internasional Lembaga pemrakarsa ini haruslah lembaga negara dan

lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan tingkat daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional (Pasal 5 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional). Hal ini berarti Pemerintah Daerah (baik Propinsi/Kabupaten/Kota) memiliki kualifikasi sebagai lembaga pemrakarsa.

Oleh karena itu, menurut Tadeus, sudah saatnya memikirkan ulang tentang urusan luar negeri sebagai kewenangan pemerintah pusat yang dapat diserahkan ke daerah Propinsi NTT. Kendatipun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah menetapkan suatu wilayah yang dikenal dengan "kawasan khusus" untuk menyelenggarakan suatu kepentingan nasional tertentu, tetapi keberadaan *Enclave* Oekusi adalah suatu kenyataan riil wilayah negara lain yang berada di dalam wilayah Indonesia, yang tentunya membutuhkan perlakuan khusus. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan juga bersifat "khusus" karena substansi permasalahannya menlintasi batas-batas negara dalam berbagai aspek pemerintahan.

Bila lalu lintas pejabat Timor Leste yang melewati wilayah Indonesia diaitikan dengan otonomi daerah, diartikan sebagai urusan yang dapat diatur oleh daerah, maka dalam konteks Undang-Undang Otonomi Daerah, menurut Tadeus, hal ini dapat diartikan sebagai "kepentingan masyarakat" yang perlu diurus. Alasannya bahwa, bila tidak diurus akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat itu. Dikatakan sebagai kepentingan masyarakat dalam konteks ini, karena selama ini ditemukan ada beberapa hal yang dapat diajukan sebagai contoh:

1. Para pejabat Timor Leste yang masuk ke Indonesia, biasanya mengisi bahan bakar (bensin) pada kendaraannya di Atambua atau di Kefamenanu dengan harga subsidi yang disediakan pemerinrah RI (Rp. 4.500,--/liter). Bila hal ini tidak diadakan regulasi yang baik, akan merugikan Indonesia.
2. Adanya sikap para pejabat Timor Leste yang sering melampaui kewajaran sebagai tamu, ketika sedang melintasi wilayah Indonesia. Tak jarang mereka tidak menaati ketentuan hukum Indonesia. Misalnya, membawa minuman beralkohol, yang akan membahayakan bila diminum secara berlebihan. Bahkan ada di antaranya yang menolak diperiksa oleh polisi bila melanggar rambu lalu lintas yang ada.

Dari contoh di atas, tampak bahwa kedaulatan intern "terasa terganggu" bila daerah dianggap sebagai penonton dengan "membiarkan suatu peristiwa hukum" yang dibuat oleh pejabat negara lain (pejabat Timor Leste), terjadi dalam wilayahnya. Karenanya, Propinsi NTT perlu ditetapkan sebagai Daerah Khusus, karena adanya urusan luar negeri di wilayah NTT ini.

Tentang pengelolaan wilayah perbatasan, Kabiرو Perencanaan, Kerjasama dan

Hukum BNPP, Sugeng Haryono,⁵⁴ mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemda, DPRD Belu dan masyarakat Belu. Pasalnya selama ini dengan dana APBD II, pemerintah, DPRD dan masyarakat telah berupaya mengelola wilayah perbatasan itu dengan segala kemampuannya dan hasilnya baik.

Mengenai bantuan dana dari BNPP, Sugeng mengatakan, pihak BNPP akan membantu, namun akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Tahun 2011 BNPP sudah bisa memberikan bantuan kepada Belu sebagai wilayah perbatasan Negara RI-Timor Leste. Tentunya usulan pagu dari BNPP harus disetujui Kementerian Keuangan dan DPR RI," kata Sugeng. Mengenai koordinasi BNPP dengan kementerian lembaga, Sugeng mengatakan, hal itu sudah menjadi tugas yang tentunya akan dilakukan BNPP. Selanjutnya tim BNPP turun ke Belu untuk melihat lebih dekat kondisi wilayah perbatasan itu. Hasil kunjungan dipakai sebagai kajian BNPP untuk menindak lanjuti pengelolaan wilayah perbatasan di Belu.

Terkait hal di atas, terdapat usulan permintaan Pemerintah Kabupaten Belu kepada BNPP sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran PT untuk rencana detail Rencana Tata Bangunan dan Tata lingkungan (RTBL) untuk 4 kecamatan gerbang negara.
2. Mengalokasikan, mendorong Kementerian PU untuk buka akses dan peningkatan jalan sabuk perbatasan jalan perkerasan yang baik total Rp 44 miliar.
3. Mengalokasikan, mendorong Kementerian Perumahan untuk alokasi bantuan perumahan ke Kabupaten Belu.
4. Mengalokasikan, mendorong Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan pengadaan traktor lahan kering untuk 4 kecamatan gerbang negara masing-masing 2 unit.
5. Mengalokasikan, mendorong kementerian lainnya untuk membangun air baku (embung teknis, perpipaan air bersih sumur bor dan listrik pedesaan di 4 kecamatan gerbang negara.

5.2.6 Kerjasama antar negara

Sejak Timor Leste merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan kesembilan, tanggal 20 Mei 2011 hampir dua tahun lalu, terdapat harapan besar bahwa pada HUT ke-9 nya itu, Timor Leste mendapat 'kado' istimewa, yakni menjadi anggota ke-11 pada 18th ASEAN Summit di Jakarta, tanggal 7-8 Mei 2011. Terkait dengan hal tersebut Indonesia sangat getol memperjuangkan proposal dari Pemerintah Timor Leste yang diajukan oleh Zakarya Albano da Costa (Menteri Luar Negeri Timor Leste), disirkulasikan oleh *counter part*-nya, Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri Indonesia) sebagai *urgent attention*, namun akhirnya gagal diterima oleh anggota

⁵⁴ Anonimous, 2010, "Apresiasi Untuk Belu", dalam *Pos Kupang*, 22 Oktober, hal: 13, kolom 1-3.

ASEAN lainnya. Banyak alasan yang menyebabkan negara baru tersebut belum dapat bergabung dengan ASEAN. Alasan utamanya adalah kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar sehingga negara baru tersebut sulit berkontribusi terhadap pembangunan komunitas ASEAN, sekaligus dapat menghambat visi Integrasi ASEAN 2015.⁵⁵

Menurut Veira, Indonesia mempunyai alasan strategis sehingga sangat getol memperjuangkan Timor Leste agar bergabung dengan ASEAN. Pertama, Indonesia yang mempunyai sejarah politik kurang baik berupaya untuk memenangkan hati rakyat Timor Leste dengan meningkatkan kerja sama antarnegara. Kedua, dari aspek sosial budaya, masyarakat Timor Leste dan Timor Barat (Indonesia), tidak dapat dipisahkan, karena mempunyai ikatan kekerabatan yang sangat dekat. Ketiga, kepentingan Timor Leste secara ekonomi terhadap Indonesia tidak dapat dipungkiri. Barang dan jasa non-migas 90% diimport dari Indonesia. Keempat, aspek strategi geo-politik, Timor Leste yang secara geografis berada di dalam kawasaan negara kepulauan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya keras agar Timor Leste tidak didominasi oleh kepentingan negara lain, terutama persaingan Cina dan Australia menjadikan Timor Leste sebagai 'satelit' untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pada masa perang dingin, Partai Fretilin sangat dekat dengan Partai Komunis Cina (PKC). Fretilin juga menjadi pemenang pemilu dua kali berturut-turut sejak kemerdekaan Timor Leste.

Bagi Cina, demikian Viera menjelaskan, nostalgia edeologi komunis saat perang dingin, berpeluang dilanjutkan kemesraan tersebut dalam ekspansi kepentingan ekonomi. Saat ini Cina merupakan donor terbesar bagi Timor Leste. Pembangunan istana negara Presiden Timor Leste dan infra struktur, sebagian besar bantuan hibah Cina. Di lain pihak, pasca pemisahan dengan Indonesia, Australialah yang berperan secara dominan di Timor Leste, antara lain pengiriman pasukan *International Force for East Timor* (Interfet) pasca kerusuhan 1999. Kepentingan Australia adalah menjadikan Timor Leste sebagai *buffer zone* (wilayah penyangga) bila ada ancaman dari Indonesia, bilamana suatu saat – negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia – dikuasai oleh Islam fundamental, misalnya isu perjuangan Negara Islam Indonesia (NII). Australia juga menginginkan Timor Leste menjadi penyangga imigran gelap dari Timur Tengah,

Indikator-indikator tentang Timor Leste mencerminkan kesenjangan ekonomi yang sangat lebar berpengaruh signifikan terhadap pembangunan komunitas ASEAN dan dapat menghambat visi integritas komunitas ASEAN. Pekerjaan rumah bagi Indonesia adalah mengambil peran penting dalam isu geo-politik dan geo-ekonomi, karena letaknya Timor Leste strategis di *enclave* kepulauan Indonesia. Timor Leste akhirnya berharap lagi pada Indonesia, tentu bukan sebagai bagian integrasi dengan

⁵⁵ Veira, Florencio Mario. 2011, "Timor Leste Anggota Asean: Kado HUT Kemerdekaan yang Tertunda", dalam *Pos Kupang*, 21 Mei, hal: 4, kolom 3-5.

NKRI tapi dalam kerangka integrasi ASEAN 2015.

Dalam rangka menjalin kerja sama antarnegara, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sejak tahun 2009 telah survey daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, terutama di lima titik yang masih menjadi sengketa. Lokasi yang disurvei adalah lima titik batas negara antara Indonesia dan Timor Leste yang belum terselesaikan, yakni Imbate, Sumkaen, Haumeni Ana, Nilulat, dan Tabana antara Oekusi dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).⁵⁶

Hasil survey ini, disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk dikordinasikan dengan Pemerinrah Timor Leste, untuk menetapkan wilayah. Hasil survey ini, juga digunakan untuk meminimalkan ekses di perbatasan antara kedua negara, terutama di perbatasan antara masyarakat Oekusi dan Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, yang telah terjadi penyerobotan lahan. Langkah ini untuk menghindari kemungkinan terjadi konflik antara masyarakat di perbatasan.

Dalam rangka meningkatkan hubungan dagang antara Kabupaten Alor (NTT) dengan Timor Leste, sejak tahun 2010, Pemerintah Pusat melalui Dirjen Perhubungan Darat memperbaiki sarana-prasarana perhubungan di Pelabuhan Fery Maritaing, Kecamatan Alor Timur yang selama ini mubazir. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Alor adalah Kabupaten yang mempunyai perbatasan laut dengan Timor Leste. Perbaikan itu untuk mendukung ide pemerintah untuk membuka hubungan dagang melalui jalur laut antara Kabupaten Alor dengan Negara Timor Leste.⁵⁷

Pemerintah ingin memperbaiki sarana pelabuhan fery ini terkait rencana akan dibukanya hubungan dagang dari Kabupaten Alor melalui jalur laut dengan Timor Leste dan sebaliknya. Rencana pemerintah ini merupakan ide yang positif. Pasalnya, selama ini Kabupaten Alor yang jaraknya sangat dekat dengan Timor Leste tidak pernah dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan hubungan dagang. Untuk membuka hubungan dagang maka akan dioperasikan sebuah kapal fery yang menghubungkan Kalabahi Alor dengan Timor Leste.

Dalam bidang kepolisian, juga diadakan kerja sama antar negara. Hal tersebut dilaksanakan dengan dilaksanakannya latihan bersama antara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan *Policia Nacional de Timor Leste* (PNTL) dalam penanggulangan dan penanganan terorisme. Selanjutnya *Comandante-General* PNTL, Longuinhos Monteriro mengatakan, Kepolisian Timor Leste akan mengirimkan anggota kepolisian dari negara itu untuk menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kupang.⁵⁸

⁵⁶ Anonimous, 2009, "Deplu Survey Perbatasan RI-Timor Leste" dalam *Flores Pos*, 27 Agustus, hal: 15.

⁵⁷ Anonimous, 2010, "Alor Buka Hubungan Dagang dengan Timor Leste: Sarana Pelabuhan Maritaing Perlu Diperbaiki" dalam *Pos Kupang*, 20 Juli, hal: 12.

⁵⁸ Anonimous, 2011, "NTT-PNTL Latihan Bersama Penanganan Teoris", dalam *Pos Kupang*, 22 Juni, hal: 1.

Dalam bidang kesehatan juga dijajaki kerja sama antara RI dengan Timor Leste. Menteri Kesehatan Timor Leste, Prof. Dr. Nelson Martins, menjajaki kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Citra Husada Mandiri Kupang (CHMK) untuk perkuliahan tenaga perawat dan bidan. Sebab, Timor Leste masih kekurangan sekitar 3.000 perawat dan 3.000 bidan.⁵⁹ Hal ini disampaikan Martin di Kampus STIKES CHMK usai memberikan kuliah umum tentang *Revitalisasi Sistem Kesehatan Primer*, tanggal 8 Desember 2011 petang. Kunjunganannya juga dalam rangka eksplorasi, karena mereka tahu tentang STIKES CHMK dan sering mendengar namanya di Timor Leste sebagai salah satu institusi pendidikan di bidang kesehatan untuk menciptakan bidan dan perawat.

Jika melihat kekurangan tenaga perawat dan bidan, maka setidaknya Timor Leste membutuhkan waktu 20 tahun untuk memenuhi tenaga bidan dan perawat. Menurut Martins, di Timor Leste masih banyak tenaga kesehatan yang sebatas Sekolah Menengah Atas sehingga pendidikan mereka bisa ditingkatkan menjadi Diploma atau Si dengan kerja sama ini.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, hubungan kedua negara yang selalu mengedepankan pendekatan *forward-looking*, semakin menunjukkan berbagai kemajuan. Hubungan dua negara semakin intens, dengan ditandatanganinya kesepakatan dalam bentuk *letter of intent* (LoI) pembangunan regional melalui pendekatan integrasi ekonomi.⁶⁰ LoI Indonesia dan Timor Leste itu ditandatangani seiring dengan lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Timor Leste. Konsep integrasi ekonomi, merupakan tawaran Timor Leste guna mendorong pembangunan di kedua negara terutama dengan Kawasan Timur Indonesia. Indonesia menyambut baik hal itu mengingat adanya kepentingan bersama dalam memajukan perekonomian di kawasan. Pertemuan dengan Preside baru Timor-Leste ini akan menjadi kesempatan penting bagi kedua pemimpin untuk menegaskan komitmen bersama untuk memelihara kesinambungan hubungan baik antara kedua negara.

Kerja sama itu akan menggabungkan pembangunan Timor Leste dengan koridor lima dan koridor enam dari masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Koridor lima merupakan koridor Bali-NTT, dengan fokus sektornya adalah pariwisata, pertanian dan peternakan. Sedangkan koridor enam di Papua-Maluku dengan fokus pada sektor pertambangan, terutama emas, pertanian dan perkebunan. Timor Leste akan membangun pelabuhan dan bandara, materialnya Indonesia yang *mem-back up*.

Pada kunjungan itu, Presiden SBY langsung bertemu Presiden Jose Maria Vasconcelos (Taur Matan Ruak) di Istana Presiden Timor Leste *Palacio*

⁵⁹ Anonimus, 2011, "Timor Leste Jajaki Kerja Sama STIKES CHMK", dalam *Pos Kupang*, 10 Desember, hal: 5, kolom 3-4.

⁶⁰ Anonymous, 2012, "Indonesia-Timor Leste Teken Kesepakatan", dalam *Pos Kupang*, 21 Mei, hal: 3.

Presidencial Nicolau Lobato, Dili, usai pelantikan. Matan Ruak, pemimpin gerilya dan bekas kepala militer, dilantik sebagai Presiden baru Timor Leste pada Minggu 20 Mei /2012. Pertemuan itu merupakan pertemuan resmi Presiden SBY dengan Presiden Taur Matan Ruak, dan berlangsung sekitar 15 menit.

Setelah melakukan pertemuan bilateral, Presiden Yudhoyono dan mantan Presiden Ramos Horta, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama kedua negara di sejumlah sektor, antara lain kemudahan. Presiden juga menerima penghargaan dari pemerintah Timor Leste berupa *The Grand Collar of the Order of Timor-Leste* yang disampaikan oleh Ramos Horta, kemudian melakukan pertemuan dengan PM Timor Leste, Xanana Gusmao. SBY juga mengunjungi Taman Makam Seroja dan Santa Cruz. Sebelumnya, yaitu pada tanggal 16 Mei 2012, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Timor-Leste, Eddy Setiabudhi, menerima bintang penghargaan *Insignia of the Order of Timor-Leste*. Upacara penganugerahan bintang penghargaan itu dilakukan di istana Republik Timor-Leste, Dili, Anugerah serupa juga diberikan kepada para perwakilan dan duta besar yang bergiat di negara itu, yaitu dari Uni Eropa, Brazil, Portugal, dan Filipina.

Yang masih menjadi ganjalan bagi peningkatan kerja sama antar negara, adalah keberadaan sebanyak 467 mantan milisi Eks Timtim yang melarikan diri ke Timor Barat (Indonesia) usai pergolakan tahun 1999 lalu, yang kini masih masuk daftar merah (*red notification*) oleh Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Mereka masih dianggap penjahat perang dan diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶¹ Sebenarnya Komisi Keadilan dan Perdamaian telah menandatangani perjanjian damai yang melibatkan berbagai komponen masyarakat Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Indonesia, namun Mahkamah Internasional belum menghapus nama 467 mantan milisi dan daftar merah sebagai penjahat perang. Pengejaran terhadap mantan milisi dimulai dengan pembentukan *Serious Crimes Investigation Unit* (CSU) oleh *The United Nation Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) yang dibentuk PBB. Mantan milisi yang ditangkap diadili di Pengadilan *Ed Hoc* di Dili, Timor Timur. Sedangkan mantan milisi yang melarikan diri ke Timor Barat (Nusa Tenggara Timur), dilaporkan ke *International Criminal Court* (ICC) dan namanya didaftarkan ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.

Dalam pertemuan Forum Penegak Kebenaran dan Keadilan dan Rekonsiliasi (FPKKR) tanggal 14 April 2010 di Atambua, para pejuang pro integrasi yang kini berdomisili di Kabupaten Belu dan tergabung dalam Forum Penegak Kebenaran dan Keadilan dan Rekonsiliasi (FPKKR) menuntut pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk meminta klarifikasi PBB dan menghapus 400-an nama-nama dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan *Serious Crime Unit* (SCU) PBB.⁶²

⁶¹ Anonim, 2012. "Masih Dianggap Penjahat Perang: 464 Mantan Milisi Eks Timtim", dalam *Kupang Pos*, 16 Juni, hal: 13.

⁶² Anonymous, 2010, "Pejuang Pro Integrasi Minta Pemulihan " dalam *Pos Kupang*, 12 April, hal:23.,

Hadir dalam pertemuan tersebut tokoh eks Timtim, antara lain Eurico Guterres, Filomeno Hornay, Felixberto Amaral, Soares Pereira, dan Guilherme Dos Santos. Selain tuntutan tersebut, ratusan warga yang hadir sepakat untuk meminta Pemerintah RI, agar melakukan pemulihan nama baik 400-an orang yang masuk DPO SCU PBB karena daftar tersebut seakan menjadi hukuman psikologis bagi warga eks Timtim yang dituduh melanggar HAM saat jajak pendapat tahun 1999. DPO SCU PBB menjadi stigma negatif bagi warga eks Timtim terutama bagi keluarga karena mereka dianggap sebagai pembunuh, pemerkosa dan lainnya.

Persoalan lain lagi, adalah janji ganti rugi terhadap asset milik warga eks pengungsi Timtim yang ditinggalkan di negara RDTL, usai pergolakan 1999 lalu. Waktu itu sudah ditandatangani kesepakatan antara mantan Menlu RI Hasan Wirayuda dengan Menlu Ramos Horta. Salah satu butir kesepakatannya adalah membayar ganti rugi asset warga eks Timtim seperti tanah dan bangunan yang ditinggalkan di RDTL tahun 1999 lalu. Tapi sayang, sampai hari ini kesepakatan itu belum direalisasikan. Padahal mereka sudah meninggalkan harta benda termasuk mepertaruhkan nyawanya demi merah putih. Ada himbauan dari berbagai pihak, agar stigma warga 'eks Timtim' supaya digantikan dengan istilah yang lebih sopan, yaitu warga negara Indonesia kelahiran Timtim. Dengan begitu tidak ada perbedaan perlakuan dalam pelayanan pembangunan kemasyarakatan.

Meningkatnya hubungan antara RI-RDTL sangat terasa menjelang pemilu presiden di Timor Leste pada awal Maret 2012 yang lalu. Para kandidat Presiden RDTL melintasi wilayah Pantai Utara TTU menuju Oekusi menuju sambutan pelayanan yang diberikan para pejabat dan petugas penjaga perbatasan Indonesia. Salah satu kandidat Presiden Timor Leste, Fernando Lasama Araujo, yang ditemui di Pos Perbatasan RI-RDTL di Wini, memberikan apresiasi terhadap pelayanan dan perhatian pejabat dan petugas Perbatasan RI. Fernando mengatakan, meskipun telah berdiri sendiri, Timor leste tetap membutuhkan Indonesia. Katanya, ke depan, jika terpilih menjadi presiden, tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia karena Timor Leste membutuhkan dukungan Indonesia.⁶³

Fernando yang diusung Partai Demokrat Timor Leste, mengungkapkan, jika terpilih menjadi Presiden Timor Leste, dirinya akan melanjutkan perjuangan agar Timor Leste masuk menjadi anggota Penuh ASEAN. Dikatakan, mereka tidak berjuang sendiri. Mereka butuh bantuan dan dukungan Indonesia dan Presiden SBY, ungkap Fernando yang membawa 83 anggota rombongan dengan 23 kendaraan roda empat.

Selain Fernando, ada dua calon Presiden Timor Leste yang pada hari yang sama juga melintasi pantai Utara menuju Oekusi. Mereka adalah Ramos Horta dan Fransiskus Lu Olo. Namun Ramos Horta memilih melalui udara. Hanya tim suksesnya

⁶³ Anonimous, 2012, "RDTL Butuh Indonesia", dalam *Pos Kupang* 12 Maret, hal: 13.

yang melalui darat. Mereka melintas dalam waktu yang berbeda. Rombongan Ramos Horta pada pagi hari, rombongan Fernando Lasama pada siang hari, dan rombongan Fransiskus Lu Olo sore harinya sekitar pukul 14.00.

Pengamanan di wilayah perbatasan RI-RDTL, diperketat menjelang Pemilu Presiden Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Rombongan calon presiden (capres) Timor leste harus menanggalkan seluruh atribut kampanye saat melintasi Republik Indonesia, rombongan capres harus menjalani pemeriksaan di perbatasan RI-RDTL, kemudian dikawal oleh Polri di depan dan ditutup oleh TNI. Meskipun ada peningkatan pengamanan khususnya pada rute-rute yang akan dilewati rombongan capres RDTL dari Dili ke Distrik Oekusi, namun tidak ada kebijakan untuk menutup pintu masuk maupun keluar bagi pelintas batas termasuk pada hari pemilihan presiden. Semua berlangsung normal. Waktu bagi pelintas batas juga tidak berubah. Dibuka pukul 06.00 Wita dan ditutup pukul 16.00 Wita.

Rombongan capres RDTL juga dilarang membawa senjata tajam saat melintas di wilayah Indonesia. Kalau ada anggota rombongan yang membawa senjata tajam, senjata tersebut harus dimasukkan ke bea cukai saat memasuki wilayah Indonesia. Demikian juga dengan kendaraan. Jumlah kendaraan yang masuk ke Motaain harus sama saat tiba di Wini. Sementara itu calon presiden Timor Leste yang pertama kali melintasi wilayah Indonesia dalam rangka kampanye Pilpres di Oekusi, yaitu Taur Matan Ruak, yang menuju Oekusi dengan melintasi Pantai Utara TTU. Rombongan Taur Matan Ruak berjumlah 122 orang menuju Oekusi, sekitar pukul 10.28.

Wagub NTT Esthon Foenay, mengkhawatirkan provokator mengganggu keamanan di Indonesia (NTT) dan Timor Leste menjelang dan pasca pemilihan presiden (pilpres) di negara Eks Propinsi Timor Timur tersebut tanggal 17 Maret 2012 yang lalu. Mengantisipasi terjadinya gejolak, aspek keamanan menjadi prioritas kamtibmas, baik di Indonesia atau pun di Timor Leste, selain menjaga ketat arus keluar-masuk masyarakat dari Timor Leste ke NTT. Kepala Perwakilan RI di Dili Timor Leste, Eddy Setiabudi menyatakan, ada 13 calon presiden mengikuti pemilu presiden di Timor Leste bulan Maret yang lalu.. Sedangkan bulan Juni 2012, setidaknya ada 25 partai politik yang mengikuti pemilu di Timor Leste. Setidaknya ada sekitar 5.744 warga negara Indonesia yang bermukim di Timor Leste. Dari jumlah itu, 850 orang balita, 10 orang tenaga bidan, dan 493 orang menikah dengan warga negara asing. Dalam keadaan darurat, WNI yang tinggal di Timor Leste dapat menghubungi nomor KBRI-Dili yang disebarkan di beberapa tempat umum. Apabila sulit menghubungi nomor *hotline*, diusahakan melakukan penyelamatan diri di titik-titik perlindungan seperti susteran, pastoran, atau masjid yang berada di lokasi terdekat, dan evakuasi akan dilakukan secara bertahap. Beruntunglah, apa yang dikhawatirkan Wagub NTT pada saat pemilihan presiden di Timor Leste tidak terjadi.

5.3 Tinjauan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Lepasnya Timor Timur (dan sekarang menjadi RDTL) dari Indonesia telah menyadarkan bangsa Indonesia akan berbagai kekurangan selama ini, baik dari sisi pembinaan wilayah, pemahaman dalam perang informasi dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia, pemahaman yang masih kurang tentang hak-hak azasi manusia (HAM), serta proses demokratisasi. Hal-hal yang disebutkan tersebut telah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan, di mana untuk melakukan perubahan itu tidak lagi menggunakan pendekatan kekuasaan dan kekerasan.

Salah satu yang dilakukan pemerintah untuk tidak lagi menggunakan pendekatan kekuasaan dan kekerasan dalam menjamin keamanan daerah perbatasan, adalah dengan menyerahkan jaminan keamanan dalam negeri kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) yang sebelumnya mendominasi tugas tersebut, memusatkan diri pada upaya menjaga keutuhan NKRI terhadap ancaman dari luar sesuai dengan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara. Pemantapan tugas-tugas TNI di wilayah perbatasan, sangat diperlukan, mengingat dari sisi geografis Indonesia berada di pihak yang dilematis sejak terjadinya jajak pendapat masyarakat Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999. Hal tersebut disebabkan Timor Timur (RDTL sekarang) tidak hanya menjadi masalah Indonesia saja, namun melibatkan banyak kepentingan, termasuk Amerika Serikat, Portugal, dan Australia.

Selama Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto, Australia menjadi 'penurut', yang terpaksa menyesuaikan diri dengan Indonesia. Australia juga mempunyai masalah 'psikologis' dengan latar belakang sejarah dan geografisnya. Dari segi etnis, ia adalah termasuk orang 'bule' dalam kelompok Eropa, namun secara geografis mereka dekat dengan Asia yang 'coklat atau kuning'. Tumbangnya Soeharto, merupakan kesempatan yang dimanfaatkan oleh Australia, untuk menunjukkan kekuatan sebagai negara yang mampu mendikte negara lain.

Tidak dapat dipungkiri, kepentingan Australia di Timor adalah untuk menguasai minyak di Laut Timor yang di dalamnya tercakup celah Timor. Potensi kandungan minyak mentah/petroleum yang terdapat di celah Timor diperkirakan mencapai minimal lima miliar barel, dan ditaksir termasuk salah satu dari 23 lapangan minyak terbesar di dunia. Angka lima miliar barel minyak mentah ini baru di wilayah yang terkenal dengan Celah Timor, belum seluruh Laut Timor yang diperkirakan potensinya mencapai lebih dari 10 miliar barel minyak mentah (Tanoni, 2008: 52).

Sejak integrasi wilayah Timor Timur tahun 1976 hingga lepasnya dari wilayah NKRI, masyarakat Timor Timur telah dididik dan merasa bahwa Indonesia adalah tanah air mereka. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia selalu dinyatakan sebagai kembalinya (Timor Timur) ke Pangkuan Ibu Pertiwi (Madjiah: 2002: 14).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kunjungannya ke Timor Leste pada tanggal 8-9 April 2005, menyatakan, bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste dapat tercapai apabila kedua negara dapat mengupayakan terciptanya *comprehensive relations* (hubungan komprehensif), artinya hubungan bilateral tersebut harus mencakup banyak bidang, yakni sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan keamanan (yang meliputi militer dan kepolisian).⁶⁴

Terkait dengan kebijakan tersebut, sejak waktu tersebut pendekatan keamanan lebih bercorak pendekatan kesejahteraan. Sebagai contoh, adalah pengobatan gratis yang digelar TNI Batalyon 744/SYB di Pos Tapal batas Haumeni Ana, pada tanggal 18 Juni 2012. Kurang lebih 500 warga dari beberapa desa di Kecamatan Bikumi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara dan warga Pasabe, Distrik Oekusi, Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) mendapat pengobatan gratis. Pengobatan gratis ini digelar dalam rangka bakti sosial TNI Batalyon 744/SYB di Pos tapal Batas TNI. Pada waktu itu, di daerah itu sedang berlangsung musim pancaroba, sehingga berdampak pada terganggunya kesehatan manusia. Karena pertimbangan tersebut, TNI menggandeng beberapa dokter dari RSUD Kefamenanu untuk menggelar bakti sosial dan kemanusiaan dengan menggelar pengobatan gratis di wilayah perbatasan.⁶⁵

Pengobatan gratis itu juga diikuti anggota polisi dan tentara dari Negara RDTL yang bertugas di garis perbatasan. Selain menggelar pengobatan gratis, TNI juga menggelar beberapa meteri penyuluhan, di antaranya tentang HIV/AIDS. Sebab daerah perbatasan sangat riskan terhadap penyebaran HIV/AIDS. Tujuan kegiatan ini untuk menjalin rasa kekerabatan antara warga dua negara tetangga. Meki beda negara, namun warga di perbatasan TI-RDTL masih bersaudara, memiliki hubungan kekerabatan yang kuat, serta memiliki kesamaan budaya. Jadi dengan kegiatan ini rasa kekeluargaan dijalin lebih kuat lagi untuk menghindari konflik di wilayah perbatasan. Data yang dihimpun Pos Kupang dari pengobatan gratis itu menyebutkan, jenis penyakit yang dikeluhkan warga yakni infeksi saluran pernafasan (ispa), maag kronis/lambung, malaria, asam urat, sakit mata, penyakit kulit dan kelamin, serta hipertensi dan anemia.

Tentang penyelesaian pengungsi, Presiden SBY menginstruksikan agar masalah ribuan pengungsi eks Timor Timur yang kini menjadi warga Indonesia dapat diselesaikan sebelum 2014.⁶⁶ Negara berkewajiban memberikan tempat tinggal dan kehidupan yang layak bagi pengungsi yang kini berada di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur itu. Peresiden ingin penyelesaian warga baru itu betul-betul

⁶⁴ Hadiwinata, Bob Sugeng, 2008, "Sebuah Kebijakan Alternatif: Dari pendekatan Keamanan Menuju Pendekatan Komprehensif" dalam Ganewati Wuryandari (ed), *Model Alternatif Pengelolaan Keamanan di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal. 153.

⁶⁵ Anonim, 2012. "Warga RI-RDTL Diobati Gratis: Digelar TNI Batalyon 744/SYB di Pos Tapal batas Haumeni Ana", dalam *Kupang Pos*, 18 Juni, hal: 12, kol. 1-4.

⁶⁶ Anonim, 2012. "Eks Timor Timur: Tuntaskan Masalah Ribuan Pengungsi", dalam *Kompas*, 19 Mei, hal: 5, kol. 1-3.

tuntas dan pelaksanaannya mesti berjalan baik. Hal tersebut dikatakan Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Mataram Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Mei 2012. Persoalan itu dibahas sehari menjelang kunjungan Presiden ke Timor Leste. Rapat terbatas dihadiri 17 menteri. Rapat tak hanya membahas masalah warga eks Timor Timur, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Bali, NTB, dan NTT, serta upaya mengurangi kemiskinan di sana.

Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay mengatakan, ada sekitar 29.000 keluarga eks warga Timor Timur di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, serta sebagian dari mereka tinggal di pengungsian atau rumah-rumah darurat yang dibangun pada 1999, di halaman rumah masyarakat lokal. Penangan pengungsi akan dilakukan *resettlement* sesuai penyediaan lahan dan rencana tata ruang di kabupaten. Hal ini juga dilakukan bagi masyarakat lokal yang menampung mereka.

Menteri Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp. 1 triliun pada 2011-2012 untuk membangun 29.000 rumah bagi eks pengungsi Timor Timur dan warga lokal. Program ini terkendala penyediaan tanah. Presiden menginstruksikan penambahan anggaran Rp. 1 triliun untuk pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur.

Penanganan pengungsi, pada periode 1999, selepas Referendum Timor Leste pada 30 Agustus 1999 yang diikuti kekerasan, pembakaran, dan penjarahan oleh militer dan milisi, gelombang pengungsi memenuhi sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT): Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Alor. Pemerintah RI dan PBB memberikan tiga pilihan: tinggal di NTT, bertansmigrasi di Indonesia, atau ikut program pemukiman kembali sementara ("*temporary resettlement*").⁶⁷ Sejumlah masalah tetap muncul: bagaimana bertahan hidup di NTT setelah segala subsidi dihentikan oleh Pemerintah RI, juga ketidakjelasan koordinasi program transmigrasi dan *temporary resettlement*.

Periode 2000, Menko Kesra dan Taskin saat itu, Basrie Hasanudin menawarkan tiga pilihan: kembali ke Timor Leste, menetap sementara di Indonesia, menjadi WNI. Pemerintah RI mengadakan program Registrasi untuk mendata pengungsi. Hasilnya: 98% memilih tinggal di Indonesia. Namun, program ini dikritik karena menimbulkan kesalahpahaman tentang substansi registrasi.

Periode 2002-2011, paket bantuan kemanusiaan dihentikan sejak 1 Januari 2002. Tiga program diadakan pemerintah RI, yaitu: repatriasi (pemulangan kembali ke Timor Leste), pemberdayaan ekonomi dan transmigrasi. Repatriasi memiliki sejumlah masalah: jumlah pengungsi mencapai 300.000 orang, tidak ada jaminan ketersediaan rumah, tanah, pekerjaan di Timor Leste, serta ancaman keamanan di sana. Perdana

⁶⁷ Litbang Kompas, 2012. "Sejumlah Agenda untuk Pengungsi Timor Leste", dalam *Kompas*, 19 Mei, hal: 5.

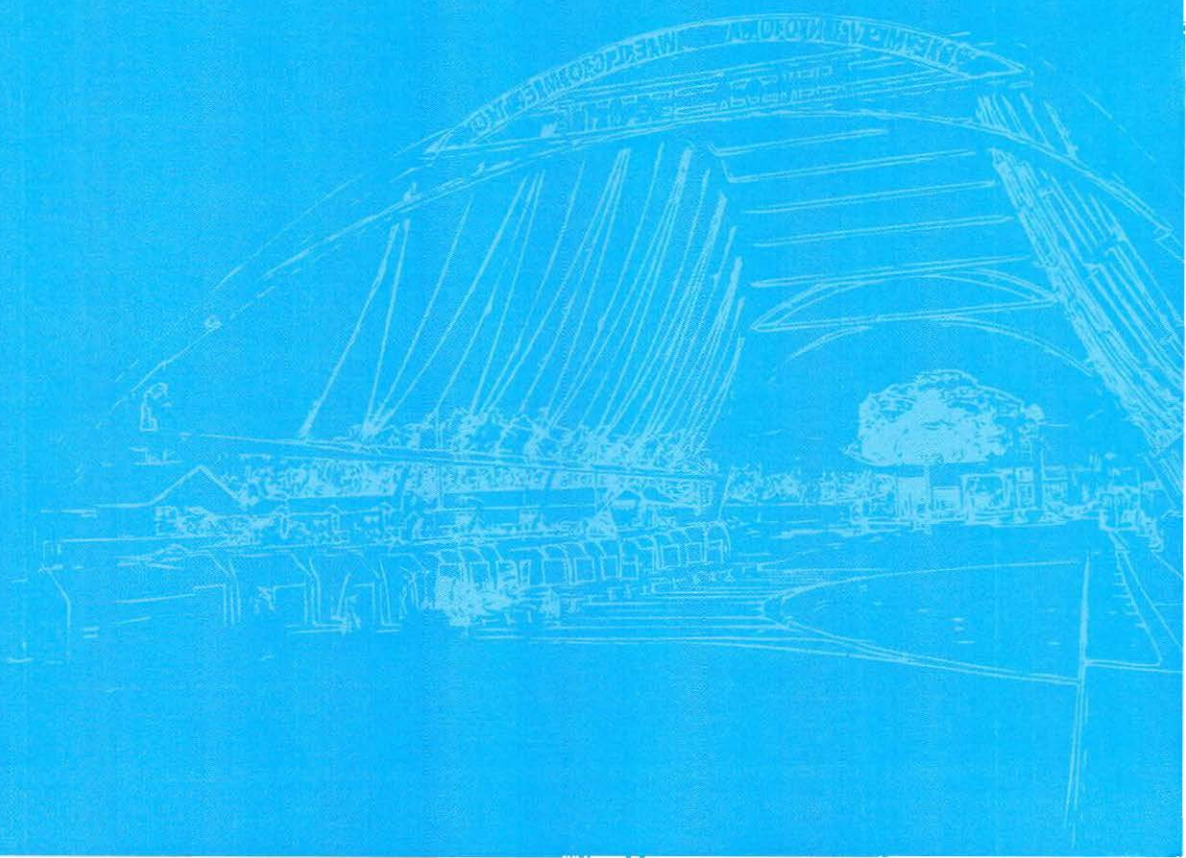
Menteri Xanana Gusmao menjamin keamanan eks pengungsi yang mengikuti repatriasi. Sejumlah Proyek kemanusiaan senilai Rp. 12,996 miliar digulirkan Uni Eropa untuk warga Eks Timor Leste.

Membaiknya hubungan RI-Timor Leste, juga diikuti dengan membaiknya hubungan RI-Portugal. Pertemuan Presiden Portugal Anibal Antonio Cavaco Silva dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, di istana Merdeka, tanggal 22 Mei 2012 yang lalu, menjadi babak baru hubungan kedua negara. Relasi kedua negara yang sempat renggang terkait isu Timor Timur (sekarang Timor Leste) saat ini lebih cair. Bahkan, kedua kepala negara berkomitmen mengupayakan kerja sama yang konkrit. Dalam konperansi pernya, Presiden SBY mengatakan, kunjungan Presiden Portugal sekali gus membuka lembaran sejarah baru peningkatan kerja sama, persahabatan, dan kemitraan kedua negara yang memiliki tekad sama untuk menemukan peluang baru bagi kerja sama lebih luas di masa datang.

Kunjungan Presiden Antonio, adalah yang pertama bagi kepala negara Portugal sejak hubungan diplomatik dibuka tahun 1950. Presiden pertama RI Soekarno pernah berkunjung ke Portugal pada tahun 1960. Kontak kedua bangsa berlangsung lebih dari setengah abad, khususnya perdagangan. Dalam pertemuan bilateral itu ditandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama bidang ekonomi, pelayanan paspor khusus dan visa diplomatik; serta pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, pariwisata, olah raga, dan media massa.

Khusus di bidang ekonomi, kedua negara sepakat meningkatkan volume perdagangan yang berimbang. Perdagangan pada 2010-2011 meningkat 58 persen menjadi 171 juta dollar AS. Kedua pemimpin juga menyepakati kerja sama politik dalam forum-forum internasional. Kerja sama itu diwujudkan dengan saling memberikan dukungan dalam diplomasi di forum internasional.

BAB 6 | **Kesimpulan**



6.1. Simpulan

Kemerdekaan Timor Leste, yang dahulunya Propinsi Timor Timur, meninggalkan banyak persoalan perbatasan bagi Indonesia. Dalam aspek ketatanegaraan, keberadaan Enclave Oekusi, ibarat terdapatnya kamar orang lain di dalam rumah kita. Baik pemilik rumah maupun pemilik kamar sama-sama terganggu. Disadari atau tidak ini sangat mengganggu baik bagi Pemerintah Negara Timor Leste maupun bagi Pemerintah Indonesia dalam menata wilayah negaranya masing-masing. Untuk itu perlu dipikirkan dan diidentifikasi secara matang bidang-bidang yang sensitif dan perlu dicari jalan keluarnya oleh kedua belah pihak.

Untuk itu diperlukan iktikad baik (good faith) dua negara yang berbatasan sebagai satu prinsip hukum yang diakui dalam hukum internasional modern. Good faith mengandung nilai kejujuran, kepatutan dan kelayakan (honesty, fairness, dan reasonableness), bagi kedua negara yang merupakan refleksi etis, terhadap sikap dari kedua negara yang bertetangga. Walaupun antara masyarakat Indonesia (Timor Bagian Barat) dan Timor Leste mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat dalam rumpun keluarga Timor. Namun catatan masa silam yang kelam dapat menjadi pemicu konflik masyarakat antara dua negara, dan sudah sering terjadi bahkan berulang-ulang di beberapa garis perbatasan.

Perbatasan wilayah harus dikelola secara baik dan berkelanjutan karena selain berkaitan dengan penyelesaian berbagai sengketa internasional (international disputes) juga karena daerah perbatasan memiliki fungsi yang sangat strategis seperti fungsi militer, ekonomi perdagangan, kedaulatan negara dan fungsi-fungsi identitas nasional menuju kepentingan domestik di bidang ipoleksosbudhankam. Oleh karena itu menurut para ahli hukum internasional dan pengamat perbatasan "Keamanan di Perbatasan RI-RDTL" dalam melaksanakan fungsi-fungsi perbatasan perlu diperhatikan aspek-aspek kultur masyarakat, pengaruh politik masyarakat dua negara, kebijakan pemerintah dua negara, dan kekuatan pasar dua negara.

Keselamatan warga, keselamatan tanah, serta kepastian garis-garis batas, hanyalah sedikit persoalan dari segudang problema perbatasan. Dan mengendulkannya, selalu masyarakat terdekat yang menjadi sasaran. Seolah mereka adalah 'martil' hidup dari alotnya perundingan di tingkat atas. Posisi sejati mereka sebagai komunitas yang paling paham situasi perbatasan, belum terakomodir secara memadai.

Dalam berbagai dimensi, wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah yang berbatasan dengan negara lain, yaitu berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Karena Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari Indonesia, maka, harapan masyarakat di daerah perbatasan, jika Nusa Tenggara Timur menjadi lebih maju dari sekarang, atau lebih maju dari daerah-daerah perbatasan lainnya, maka hal ini akan menjadi kekuatan Indonesia. Wilayah perbatasan yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur dari dimensi strategi pertahanan, front line pertama dari negara Indonesia. Dari

dimensi sosial, ekonomi, dan kebudayaan, wilayah perbatasan yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah beranda depan Indonesia. Oleh karena itu, beranda depan Indonesia itu harus diakselerasi kemajuannya, sehingga tidak kalah dengan Timor Leste dan Darwin.

6.2. Saran

Dalam kasus-kasus perbatasan seperti yang terjadi di Haumeni Ana, pendekatan adat merupakan pendekatan terpenting dari beragam pendekatan lainnya. Bentuk teknis dari pendekatan ini bisa diwujudkan melalui pelibatan tokoh adat secara maksimal. Kehadiran meraka adalah kata kunci dari segala jenis perundingan. Supaya bisa diketahui batas wilayah versi mereka itu bagaimana. Tanyakan, apa maunya adat. Jangan dulu ada pendekatan hukum dan segala macam. Setelah urusan adat selesai, baru membicarakan dasar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. "Bilateral: Relasi Indonesia – Portugal Memasuki babak baru", dalam Kompas, 23 Mei, hal: 8 kol. 3-4.
- Anonim, 2012. "Suta Buka TMMD Netemnanu: Tugas Mulia TNI", dalam Kupang Pos, 25 Mei, hal: 2, kol. 1-3
- Anonim, 2012. "Belajar dari TMMD", dalam Kupang Pos, 25 Mei, hal: 4, kol. 1-4.
- Alderwerelt, J.de Roo. *Aanteekeningen over Timor en Onderhoorigheden*. uit T.B.G.deel 47 blz. 194-226.
- Arbitrage Concernant la delimitation des pssessions neer landaises et Portugaises daans l,Ile do Timor. Memore presente par le Gouvernement des Pays Bas. The Hague. 1913.*
- Ataupah, Hendrik. 1992. *Ekologi Persebaran Penduduk, Dan Pengelompokan Orang Meto di Timor Barat*. Jakarta: Universitas Indonesia (Disertasi).
- Bere Tallo, A.A. 1968. *Sejarah Perkembangan Daerah Kabupaten Belu Atambua*, tidak diterbitkan.
- _____. 1978. *Adat Istiadat dan Kebiasaan Suku Bangsa Bunaq di La maknen, Timor Tengah, Bei Gua II*. Kumpulan Syair Adat (Tidak diterbitkan).
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTT. 2002. *Konsepsi dan Teknis Penataan Batas NTT-Republik Demokrasi Timor Leste*. Kupang: Bappeda.
- _____. 2002. *Laporan Akhir Pelaksanaan Operasional Room Demarkasi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Bappeda
- _____. 2002. *Himpunan Materi/Dokumen Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan RI (NTT) RDTL*. Kupang: Bappeda NTT
- _____. 2002. *Isu Strategis dan Mendesak Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Propinsi NTT*. Kupang: Bappeda.
- _____. 2002. *Rencana Penanganan Kawasan Perbatasan Kabupaten dan Timor Leste*. Kupang: Bappeda NTT.
- Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Wali Gereja Indonesia. 1974. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia jilid 1,2,3*. Ende: Arnoldus.
- Biro Administrasi Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT. 1973. *Memori Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT Tahun 1958–1972*. Buku 1. Ende: Arnoldus.
- Chijs, van der, J.A. *Koepang omstreeks 1750*, UIT Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, deel 18, blz. 209-227
- Coolhas. 1948. *Een Historisch Onderzoek op het Landarchief naar Verhoudingen in de Reidentie Timor en Onderhoorigheden, wordt bemoeilijk door de Volgende Omstandigheden*.

- Da Franca, Antonio Pinto. 2000. *Pengaruh Portugis Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan..
- Duarte, Jorge de Barros. 1984. *Timor Ritos and Mitos Atauros*. Lisboa: Ministeri da Educacao.
- Depdikbud, 1980. *Sejarah Daerah Timor Timur*. Jakarta :
- Doko I.H. 1973. *Nusa Tenggara Timur Dalam Kancah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Bandung, Masa Baru.
- Depdagri, 1977. Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tentang Penyatuan Timor Timur Ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. Jakarta : Balai Pustaka.
- Durkheim, Emile. 1960. *The Dualism of Human Nature and Its Social Conditions*. Dalam K.H. Wolff (ed): Emile Durkheim et.al. *Essay on Sociology and Philosophy*. New York: ETC.
- Erb, Maribeth. 1987. *When the rocks were young and Earth was Soft: Ritual and Mythology in Northeastern Manggarai*. New York: State University of New York (Disertasi).
- Fobia, F.H. 2003. *Pahlawan Sonbai*. (Tidak diterbitkan)
- Francisco X. Lopez da Cruz 1999. Status kewarganegaraan Indonesia Masyarakat eka Timor Timur pasca jajak pendapat di tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Makalah). Kupang
- Fernandez, SVD, Stephanus Ozias. 1990. *Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Timur. Dulu dan Kini*. Maumere: STTF Ledalero
- Forth, Gregory L. 1983. *Blood, Milk and Coconut, a Study of Intra Cultural variation*. The British Asia: Institute of South Asia.
- Fox, J.J. (ed). 1980. *The Flow of Life in Eastern Indonesia*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London, England.
- Francillon, Gerald. 1980. *Incurison Upon Wehali, a Modern History of Ancient Empire*., Massachussetts, In Fox (ed): *The Flow of Life in Eastern Indonesia*. Harvard University Press, Cambridge and London, England.
- Fried Berg, Claudine. 1980. *Boiled Woman, and Broiled Man: Myths and Agricultural Ritual of Bunaq of Central Timor*, in Fox J.J. (ed). *The Flow of Life in Eastern Indonesia*. Massachussets and London, England: Harvard University Press
- Fox, J.J. 1977. *The Harvest of the Palm.. The Ecological Change in Eastern Indonesia*. Cambridge, Massachusett and London, England.
- Gomang, Syarifudin R. 1993. *The People of Alor and their Alliances in Eastern Indonesia*. Department of Sociology, Wollangong Unioversity.
- Gomez, KA and Gomez A.A. 1982, *Multipele Cropping in the Humid Project of Asia*. Ottawa: AFRC.

- Groeneveldt, W.P. 1960. *Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*. Bhartara, Jakarta
- Gronsaangelegenheden op Timor. Kolonial Veslag. The Hague 1911
- Haga, A. De Slag bij Penefoeij en Vandrig LIP. Uit. T.B.G. deel 27 blz. 389-408.
- Hans Hagerdal. Tanpa Tahun. *Historical Notes on Pre Modern Timor*. Departement of Humanities, University of Vaxyo, Sweden.
- Hejman, Albertoa. *De Timor Tractaktaten 1859 en 1893*. Leiden, S.C. van Doeslaigh, Doctoral thesis, Leiden 1893.
- Hidayat, Z.M. 1976. *Masyarakat dan Kebudayaan Suku-Suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Tarsito.
- Hicks, David. 1985. *Roh Orang Tetun di Timor Timur*. Jakarta: Sinar Harapan
- Jasmi, Khairul 2002. *Eurico Guterres melintas badai politik Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jorge de Barros Duarte. 1984. *Timor Ritos and Mitos Atauros*. Ministerio da Educacao, Lisboa
- Jolliffe, Jill. 1978. *East Timor Nationalism and Colonialism*. Queensland: Queensland University Press.
- Kusaeni, Akhmad 2000. *Kerikil dalam sepatu – diplomasi penyelesaian kasus Timor Timur di PBB (Kesaksian Wartawan)*. Jakarta: Antara.
- Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. 2003. *Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2003*. Atambua: Kantor Statistik Kabupaten Belu.
- _____. 2003. *Kecamatan Lamaknen Dalam Angka Tahun 2003*. Atambua: Kantor Statistik Kabupaten Belu.
- _____. 2003. *Kecamatan Tasifeto Timur Dalam Angka Tahun 2003*. Atambua: Kantor Statistik Kabupaten Belu.
- _____. 2003. *Kecamatan Tasifeto Barat Dalam Angka Tahun 2003*. Atambua: Kantor Statistik Kabupaten Belu.
- _____. 2003. *Kecamatan Renhat Timur Dalam Angka Tahun 2003*. Atambua: Kantor Statistik Kabupaten Belu.
- Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. 2003. *Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka Tahun 2003*. Kefamnanu: Kantor Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.
- _____. 2003. *Kecamatan Miomaffo Barat Dalam Angka Tahun 2003*. Kefamnanu: Kantor Statistik Kabupaten TTU.
- _____. 2003. *Kecamatan Miomaffo Timur Dalam Angka Tahun 2003*. Kefamnanu:

- _____. 2003. *Kecamatan Insana Dalam Angka Tahun 2003*. Kefamnanu: Kantor Statistik Kabupaten TTU.
- Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang. 2003. *Kabupaten Kupang Dalam Angka Tahun 2003*. Kupang: Kantor Statistik Kabupaten Kupang.
- _____. 2003. *Kecamatan Amfoang Utara Dalam Angka Tahun 2003*. Kupang.: Kantor Statistik Kabupaten Kupang.
- Kartodirdjo, Sartonno. 1977. *Metode Penggunaan Bahan Dokumen*. Dalam Kuntjaningrat (ed). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Kevin Serlock, 1980. *A Bibliography of Timor Including East Timor/Formaly Portugues Timor and Rote*. Researc School of Pasific Studies, The Australian National University, Canberra
- Laeyendecker, L. 1991. *Tata Perubahan dan Ketimpangan, Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Lamberts, H. *Nota betreffende de Portugeesche grensgewesten*. 1912
- Memore du Gouvernemet Portugais, Arbitrage de Timor, Frontiere est de Oecussi-Ambenu*. Lisbon, Inprensa Nacional. 1913.
- Mededeelingen van Afdeeling Bestuurs Zaken der Buitengewesten van het Departement van Binnelandsch Bestuur* seri A no.3 Tahun 1929,
- Middleton, Victor T.C. 1998. *Marketing in Travel and Tourism*. Oxford: Heinemann.
- Middelkoop, P. 1949. *Een Studie van het Timorische Doodenritueel*. Bandung: Konin klijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Verhande lingan Jilid LXXXVI.
- _____. 1968. *Migraton of Timorese Groeps and The Question of The Kase Metan or Overseas B;ack Foreigners*. Leiden. Reprint from Inernational Archoeves of Ethnography, vol. LI E.J.Brill.
- Neonbaru, Gregor. 2011. *We Seek Our Roots: Oral Tradition in Biboki, West Timor*. Switzerland Academic Press Fribourg.
- Neonbasu, P. G., 1997. *Peta politik dan dinamika pembangunan Timor Timur*. Jakarta :Yanense Mitra Sejati
- Noor, Machmudin, dkk. 1977. *Lahirnya Propinsi Timor Timur*. Jakarta : Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia/BP.Alda.
- Nanulaitta, I.O. 1966. *Timbulnya Militerisme Ambon*. Jakarta: Bhratara
- Nas, Peter J.M. 1984. *Settlements as Simbols: The Indonesian Town as Field of Anthropological Study*. Dalam, Josselin de Jong, P.E (ed) *Unity in Diversity, Indonesia as a Field of Anthropological Study*, Foris Publications Dordrecht-Holland/Cinnamiminson USA.

- Orimbao, P. Sareng. 1992. *Tata Berladang Tradisional dan Pertanian Rasional Suku Bangsa Lio*. Nita Flores: STTF Ledalero.
- Ormeling, F.J. 1955. *The Timor Problem*. Jakarta Groningen: J.B. Wolters
- Panitia Pelaksanaan Seminar Adat Fehalaran 2003. *Laporan Hasil Seminar Adat Fehalaran dan Pembentukan Sekretariat Lembaga Adat, Fehalaran*. Kabupaten Belu, Atambua.
- Paparan Gubernur NTT. 2004. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan. Kupang: Pemerintah Daerah Propinsi NTT.
- _____. 2005. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan. Kupang: Bappeda NTT.
- Parera, A.D.M. 1971. *Sejarah Pemerintahan Asli Raja-Raja Timor*. Kupang: Tidak diterbitkan.
- Parimarta, I Gede. 2002. Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara Tahun 1815-1915. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur. 2002. *Masukan Daerah Dalam Rangka Pertemuan Bilateral Tingkat Menteri RI-UNTAET di Denpasar, 25 Februari 2002*. Kupang: Pemerintah Propinsi NTT.
- Penelitian dan Pengembangan. UPTD. 2005. *Laporan Studi Pengembangan Ketrampilan Teknis bagi tenaga kerja dan SDM pada Umumnya*. Kupang: UPTD Litbang Propinsi NTT.
- Pemda NTT 2001. Pelayanan kemanusiaan dalam dan dengan pelbagai keterbatasan. Kupang.
- Riedel, J.G.F. *de Timmor Tractaten van 1859 en 1893*, Indische Gids, Amsterdam
- Roo van Alderwerelt I. De, *Aanteekeningen over Timor en Onderhoorigheden*, UIT TBG deel 47
- Singh, Bilveer, 1998. Timor Timur, Indonesia, dan dunia mitos dan kenyataan (edisi revisi). Jakarta: Institut for Policy Studies.
- Sjamsudin, N. 1991. Jejak langkah Pak Harto, 27 Maret 1973 – 23 Maret 1978. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Subroto, Hendro 1977. Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur. Jakarta : Sinar Harapan.
- Schulte Nordholt, H.G. 1971, *The Political System of Atoni of Timor*. Martijnus Nijhoff: The Hague.
- _____. 1975. *Analisa Struktural Dalam Antropologi dan Sejarah*. Dalam Cakrawala Majalah Penelitian Sosial No. 1. Th. VIII 1975. Salatiga: LPIS Universitas Satyawacana.
- _____. 1980. *Symbolic Classification of Atoni of Timor*. In Fox (ed): *The Flow of Life in Eastern Indonesia*. Harvard University Press, Cambridge and London, England

Seminari Tinggi Lalian. 2002. *Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 1*. Nenuk. Seminari Tinggi Lalian, Atambua..

_____. 2002. *Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 2*. Nenuk. Seminari Tinggi Lalian., Atambua

_____. 2002. *Sejarah Gereja Katolik di Timor jilid 3*. Nenuk. Seminari Tinggi Lalian. ,Atambua.

Sensus Tahun 1920 hal.234. Reprint International Population Dynamic Program Department Demography, Research School of Social Sciences, The Australian National University 1981.

Selo Sumardjan. 1980. *Perubahan Sosial di Jogjakarta*. Gajah Mada Press.

Seran, Herman Yoseph. 2009. *Ema Tetun, Kelangsungan dan Perubahan Dalam Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Suatu Masyarakat Tradisional di Pedalaman Pulau Timor, Indonesia*. Kupang: Penerbit Gita Kasih

Silab, Willfridus, Tallan, J.M., Subani, Mathias. 2005. *Dari Noetoko ke Kefa menanu*., Kefamenanu. Dians Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Timor Tengah Utara.

_____. 2002. *Biboki, Miomaffo dan Insana*. Proyek Penelitian dan Kajian Sejaarah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Timor engan Utara.

Slamet Muljono. 1976. *Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya*. Bhratara, Jakarta

_____. 1969. *Sriwijaya*.. Percetakan Arnoldus, Ende, Flores.

Sturler, Jaques Eduard de. 1881. *Tractaat van 20 April 1859 tot regeling van het weder Zijsch grond gebied van Nederland en Portugal op Timor en Onder hoorigheden*. In *his het grondgebied van Nederlandsch Oost Indie in verband met de tractaten met Spanje, England en Porugal*. Leiden

Therik, Gerson Tom. 1995. *Wehali, The four corner Land. The Cosmology and Traditions of a Timorese Ritual Centre*. Australian National University, Canberra (Disertasi).

Timor Pequena Monografia, 1970, Agencia Geral Do Ultamal, Lisboa

Toda, Dami N. 1999. *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*. Ende: Penerbit Nusa Indah.

Usfinit, Alexander Un. 2003. *Insana Maubes, Salah Satu Masyarakat di imor dengan Struktur Adat yang Unik*. Yogyakarta: Kanisiius..

Van Wouden, F.A.E. 1983. *Klen Mitos dan Kekuasan*. Jakarta: Grafiti Press.

Widiyatmika, M. 1982. *Sejarah Perkembangan Desa di Nusa Tenggara Timur*. Ku Pang: Pusat Penelitian Undana.

_____. 2007. *Perdagangan Cendana dan Dinamika Masyarakat Nusa Tenggara Timur*.

Kupang: PPM Propinsi NTT 2007

- _____. 1996. *Kebudayaan Masyarakat Daerah Gersang*. Jakarta: PPPSL.
- _____. 2007. *Kebudayaan Masyarakat di Bumi Cendana*. Kupang: Pusat Pengembangan Madrasah NTT.
- _____. 2010. *Kupang Dalam Kancah Persaingan Hegemoni Kolonial Tahun 1653-1917*. Kupang: Pusat Pengembangan Madrasah NTT.
- Widiyatmika, M.dkk.. 2005. *Belu Dalam Kancah Perjuangan Melawan Kekuasaan Kolonial*. Kupang: UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional NTT.
- _____. 2007. *Sejarah Pemerintahan Tradisional Kabupaten Belu*. Kupang: UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional NTT.
- _____. 2008. *Sjarah Pemerintahan Tradisional kabupaten TTU*, Kupang: UPTD Arkeologi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional NTT.
- Widja, I.G. 1988. *Pengantar ilmu sejarah dalam perspektif pendidikan*. Semarang : Satya Wacana.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. S. Hudijono, asal Jawa Tengah, adalah Guru Besar Antropologi Budaya Universitas Nusa Cendana Kupang. Pendidikan S1, S2 dan S3 nya, masing-masing diselesaikan di Universitas Sebelas Maret, Solo, Universitas Indonesia, Jakarta, dan Universitas Udayana, Denpasar.

Di samping kegiatannya mengajar pada Program S-1 maupun S-2 di Universitas Nusa Cendana Kupang, juga menulis sejumlah modul maupun bahan ajar mata kuliah, antara lain: Antropologi

Budaya (2008); Hukum Perdata (2009); Pengembangan dan Penyusunan Media Pembelajaran (2009); Hukum Islam (2010), dan Hukum Perburuhan (2011).

Giat melakukan penelitian dan sempat mendapat penghargaan sebagai peneliti utama dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2007. Penelitiannya antara lain antara lain: Hubungan antara Kepesertaan Sebagai Anggota ASTEK dengan Ketenangan Kerja Para Tenaga Kerja pada Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kupang (Ketua, 1991); Mobilitas Tenaga Kerja, Ekonomi Rumah Tangga dan Peningkatan Peran Wanita: Kasus Kecamatan Tanjung Bunga Flores Timur (Ketua, 1998); Peranan Wanita dalam Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Pantai Kupang (Ketua, 1998); Peranan Mediator dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Perburuhan pada Perusahaan-perusahaan di Kotamadya Kupang (Ketua, 1999); Jaringan Kekekerabatan dan Pseudo Kekekerabatan dalam Mobilitas Tenaga Kerja (Ketua, 2000); Analisis Situasi Ibu dan Anak Kabupaten Sumba Timur (Ketua, 2001); Analisis Situasi Ibu dan Anak Kabupaten Sumba Barat (Ketua, 2001); Pengendalian Sosial Tradisional di Ende: Suatu Kajian Antropologi Hukum tentang Peranan Mosalaki dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Ketua, 2002); Penyelesaian Ritual Tragedi Kamis Berdarah: Suatu Kajian Antropologi Hukum tentang Penyelesaian Non-litigasi Konflik Suku Loli dan Waijewa di Kabupaten Sumba Barat (Ketua, 2003); Perubahan Pola Relasi Jender dalam Keluarga Penjual Jamu Gendong di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (2004); Perubahan Perilaku Orang Tua dalam Pembuatan Akte Kelahiran Anak Terkait Program AMPEK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Sumba Barat (Ketua, 2007). Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif di Ende: Dekonstruksi Sentralisme Hukum dan Pengembangan Kebijakan Multikultural (Ketua, Multi Year 2008-2009); Performance Penguasaan Kompetensi mata Pelajaran Ujian Nasional SMA dan Model Revitalisasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sabu-Raijua NTT (Anggota: 2011). Karya-karya penelitiannya itu tersebar dalam jurnal-jurnal ilmiah seperti: Yustisia, Penduduk dan Pembangunan, Mudra, Linguistik dan Sastra, Gatra Nusantara, dan Indikator.

Karyanya yang lain: Identifikasi Kearifan Tradisional dalam Penyelesaian Sengketa

di Sumba Barat, Yogyakarta: Aksara Indonesia, 2009; Mediasi dan Ritual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Sumba Barat, Yogyakarta: Aksara Indonesia, 2010; Penerapan Mediasi dan Ritual dalam Penyelesaian Sengketa di Sumba Barat, Yogyakarta: Aksara Indonesia, 2010.



Drs. Munandjar Widiyatmika, lahir di Malang pada 23 Juli 1942. Menyelesaikan studinya di Jurusan Sejarah Antropologi IKIP Malang pada tahun 1968. Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah diantaranya seminar-seminar ilmiah di daerah, regional, nasional dan internasional, dan dalam berbagai kegiatan penelitian sejarah dan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1974 sampai sekarang.

Beberapa judul penelitian terkait dengan perbatasan antara lain: Penelitian Sejarah Pemerintahan Desa di NTT tahun 1983; Penelitian Masalah Integrasi Timor Timur tahun sebagai anggota tim peneliti Leknas LIPI Tahun 1982; Penelitian Perlawanan Noemuti menentang kekuasaan Kolonial tahun 2005; Penelitian Kancah Perlawanan di Belu melawan kekuasaan Kolonial Tahun 2006; Penelitian Sejarah Pemerintahan Tradisional Belu Tahun 2007; Penelitian Sejarah Pemerintahan Tradisional Timor Tengah Utara Tahun 2008; Penelitian Perang Lidak tahun 1852 melawan Belanda Tahun 2005; Penelitian Perang Nahak Maroe Rae di Belu Melawan Belanda tahun 2006; Penelitian Masalah Sosial Budaya di Perbatasan tahun 2007.

Beberapa karya buku terkait dengan perbatasan yang telah diterbitkan antara lain adalah : Cendana dan Dinamika Sosial Budaya NTT tahun 2007; Lintasan Sejarah Bumi Cendana tahun 2007; Kupang Dalam Kancah Persaingan Hegemoni colonial 1653-1917, tahun 2012; Sejarah Pemerintahan Tadisional Kabupaten Belu tahun 2007 (dkk); Sejarah Pemerintahan Tradisional Kabupaten Timor Tengah Utara. 2008 (dkk).



Drs. Djakariah MPd, lahir di Lido, Bima tanggal 5 Desember 1966. Menyelesaikan studinya di Jurusan Pendidikan Sejarah tahun 1990, kemudian melanjutkan pendidikan pada Magister Pendidikan Sejarah IKIP Jakarta tahun 1996. Saat ini aktif sebagai tenaga pengajar / Dosen jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Undana. Selain itu juga aktif dalam organisasi sebagai pengurus Masyarakat Sejarahwan Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur.

Dalam kegiatan ilmiah aktif menulis di Jurnal Sejarah tentang Pendidikan Sejarah dan Sejarah Daerah NTT. Di samping aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah/seminar tentang sejarah dan pendidikan sejarah di NUSA Tenggara Timur, juga Aktif melakukan penelitian sejarah di Nusa Tenggara Timur

sejak tahun 1996 sampai sekarang Khusus tentang penelitian di Perbatasan antara lain: Penelitian perlawanan Bill Nope tahun 1910 di kerajaan Amanuban, tahun 2002; Perjuangan Nahak Maroe rai melawan Belanda di Wewiku, Kabupaten Belu tahun 2003; Penelitian Meo Moru Pahsunan melawan Belanda di Lidak, Belu tahun 2004; Penelitian sejarah Pemerintahan tradisional kabupaten Timor Tengah Utara, 2008; Dan yang terakhir penelitian Sejarah Perbatasan Nusa Tenggara Timur Timor Leste tahun 2012.

DAFTAR PUBLIKASI TENTANG WILAYAH PERBATASAN SEJAK 1974

Sumber Kevin Sherlock..1980. *A Bibliography of Timor. Including East Timor/Formely Portuguese Timor and the Rote Island*. Canberra: The Australian National University

1. Aarse, Robert, Le jou de l'Indonesie des et des Etats-Unie dans l'ile de Timor, Le Monde Diplomatique. Pris, Mart,1976. (The Games of Indonesia and the United States in Timor Island).
2. Aguiar, Luis. Livro negro da descolonisacao, 1977 (Black Book of Decolonization).
3. Alkatiri, Mari. The Democratie Republic of East Timor, Journal of Contemporary Asia, Stokholm,1977.
4. Andrade, Leonel Sales de. Fretelin,s liberation struggle in East Timor. New Perspectives, Journal of the World Peace Council.1977.
5. Araujo, Abilio. Timorese Elites. (Translated by J.M. Alberto from As elites em Timor (Canberra, J. Jolliffe and Bob Reece), 1975.
6. _____. East Timor, Fretelin Speaks. Tricontinental, Havana, 1975.
7. _____. Timor Leste es loriges voltaram a cantar , Lisabon, 1977.
8. Arrndt, Heins Wolfgang. Timor expediency or principle. Quadrant, Sydney, Mei 1976.
9. Arumugam, Raja Segaran. Indonesia: Internal Developments and External outlook, Southeast Asian Affairs, 1976.
10. Australian Cuncil for NGO,s-the future. Canberra, ACFOA, 1975.
11. Australian Council of Overseas Aid. Second East Timor Consultation held in Melborne, on October, 1975
12. _____. Report on Visit to East Timor fo the ACFOA Timor Task Force, Canberra ACFOA, 1975.
13. Australian Foreign Affair Record. Canberra, Department of Foreign Affairs, July 1975.

14. Bridgemen, EJames C. East Timor Case Study of Law of the Sea Conflicts. New York Ocean Education Project of the Methodist .Mission to United Nations, 1977.
15. Butler, Eric D. What happening of East Timor. Intelligence Survey, Melbourne, 1976.
16. Campaig For an Independent East Timorn, CIET Newsletter, Sidney, 1977
17. _____. What is Fretelin? The Revolutionary Front of Independencet East Timor (Fretelin) CIET, Sydney, 1974,
18. _____, East Timor on the Road to Independence: a background report, The Danger of an Indonesian invasion- Fretelin the mass independence movement- The Colonial legacy, Sydney CIET 1974.
19. Capizzi, Elaiine, Hill Helen and Mazey, Dave. Fretelin and the Struggle for Independence in East Timor, Race and class, London, Spring, 1976.
20. Carlos, Rui Batista da Falma. Ey Fui ao fim de Portugal (Iwent to the very end of Portugal. By one of Portuguese soldier imprisionerd by pro Indonesian force) (Queluz, Sodedade Editora, 1977).
21. Caracais, Antonio Manuel Cravo. Timor, quem e o Culpado, (Timor who is guilty, Braga Editora, 1977
22. Chomsky, Noam. Statement delivered to the fourth committee of United Nations General Assembly, B.Ciet as East Timor a special Report, 1 Dec. 1978.
23. Collins, R.D.. East Timor-Vacuum Diplomacy. Pacific Defence Reporter. Sydney 1977.
24. Conflict in Timor. Pacific Research and World Empire Telegram, Palo Alto, Cal. 7, Nov. Dec. 1975
25. Costa ,Fransisco, Borja da. Revolutionary poems in struggle against colonialism: Timorese nationalist verse. Sidney, Wild & Woolley, 1976.
26. Gravo, Joaquim, Foi Timor. Lisabon, Pluma, 1976 (This was Timor).
27. Cullen, Paul A. Australia, s Policy on East Timor. Pacific Defence Reporter. Sydney, Oct. 1977.
28. Dijk, Paul A. East Timor. Review of Indonesian and Malayan Affairs. Sydney

Jan.June.1976.

29. Dunn, James Stanley. Portuguese Timor before and after the coup: option for the future. Canberra, Legislative Service of Parliament of Australia. 1974.
30. _____. Portuguese Timor-the Independence movement from coalition to conflict. Dyason House Papers. East Melbourne. Aug. 1975.
31. _____. Talk by Mr. Jim Dunn, foreign policy adviser to the Australian Government and ex-Australian Consul to Dili, at the East Timor Consultation held in Melbourne on 26 September 1975. In AFFOA, Timor and Australian NGOs-the future. (Canberra, ACFOA, 1975).
32. _____. The United Nations and the Question of East Timor. (Canberra, Legislative Research Service of Parliament of Australia, 1976).
33. _____. The Timor Story. (Canberra, Legislative Research Service of the Parliament of Australia. 1976).
34. Dunn, James Stanley (etd). The East Timor Situation: report on talks with Timorese refugees in Portugal. (Canberra, J.S. Dunn. 1977). Reprinted in Hansard, Aust. Senate. 23.3.1977, East Timor News, Sidney 21.4.1977. Journal of Contemporary Asia. Stockholm. 7(3), 1977) De Situatie op Oost Timor, Amsterdam.
35. _____. East Timor-From Portuguese colonialism to Indonesian incorporation. (Canberra, Legislative Research Service of Parliament of Australia, 14.9.1977)
36. East Roger. Independence or Death.. East Timor, s border war, Eyewitness reports by Roger East. (Sidney, CIET, 1976).
37. East Timor Information and Research Project. Indonesian Intervention in East Timor a chronology (Ithaca 1st.ed. 7.12.1976).
38. East Timor Information Bulletin. (London, British Campaign for Independent East Timor, 40 Concanon RD., London SW2, England, Jan. 1976).
39. East Timor News. (Sidney, East Timor News Agency, 232 Castlereagh St., Sidney New 2000, Australia, Fortnightly from 24.2.1977.. Contain Translated transcripts of Radio Maubere broadcasts, reproductions of Press items, Comment etc.

40. East Timor Report. Canberra, CIET (Act), PO Box 514, Manuka ACT 2603, Australia). Monthly, Jan. 1978.
41. Evans, Grant. Eastern Portuguese Timor: Independence or oppression? Appendices: Party programmes: Fretilin, UDT, Apodeti. Merborn: Australian Union of Students, 1975.
42. _____. Portuguese Timor. New Left review. May-June 1975.
43. _____. Timor: the Dynamics of underdevelopment and Independence, Intervention. Carlton, July 1975.
44. . Fact and Reports. (Amsterdam, Komite Zuidelijk Afrika, Da Costrastraat 88., Amsterdam, Holland). Formaly Angola comitte, this Organisation has covered East Timor in its beweekly publication, which provides information from cuttings from the International press.
45. Forman, Shepard. (Testemony before US Congress, 28 June, 1977. In; Human Rights in East Timor. Washington, US. Government Printing Office, 1977.
46. Franck, Thomas M. and Hoffman, Paul. The Raight of self determination in very small places. International Law and Politics. 8L3) 1976.
47. Franke, Richard. East Timor Hidden war. New York, East Timor Nefense Committee, 1976.
48. Freney, Denis. East Timor the Modest Revolution. Australian Left Review, Forest Lodge. #8:3-10. Sep. 1975. 3 photographs inc. back covers and front covers.
49. _____. East Timorteh Fight for independence== who was the behind the UDT coup? Why FROTELIN won.. Sidney, CIET, 1975.
50. _____. Timor freedom caught between the powers. (Nottingham, Spokesman, 1975.
51. Guerrilla war in East Timor. Australian Left Review. Sydney. 1976.
52. Frente Revolucionaria der Timor Leste Independente. (FRETILIN). FRETILIN, Manual e Programa Politicos. Dili, 1974.
53. _____. Fronte Revolucionaria de Timor Lerste Independente- FRETILIN: Estauto Politco. Dilli, 5 Jan. 1975.

54. FRY, Ken L. Report on Visit bay by Ken Fry to the United Nations Security Council to participate in debate on East Timor. Canberra 10.5.1976.
55. _____.and GIETELT, Arthur. Report on visit to Portuguese East Timor by Senator Gietzelt and K.L.Frey. In:ACFOA,Timor ang Australian NGO-s-the future. Canberra,ACFOA,1975.
56. GIETELT, Arthur. East Timor,the Guilty men. Sidney CIET 1976. Senate Speech of 7-41976, plus Senate speech by Neville Bonner, From From Hansard.Frec..7-41976,pp.1167-1175.
57. Hastings,Peter. The Timor Preblem-I. Australian Outlook. Melbourne,29(1):18-33.1975.
58. _____.Foreign policy problem on our doorstep-realism orrhetic? Dyason House Pepers, East Melbourne,3(3):1-33, March 1977
59. Hicks, David . The Timorese crisis. Prtugal,s legacy. Spactat. London 15 Dec. 1975 .
60. Hill,Hellen.. Australia and Portuguese Timor-beween principles and pragmatism. In. the first thousand days of Labor,vol.i.Compilde by Roger Scott and James Richardson, Canberra College and Advanced Aducaation in Asociacion with the Australian Political Studies Association. Canberra1975.
61. _____. Extract from a talk given by Mc. Hllen Hill at the East Timor Consultation held in Melbourne on 26 September 1975.in ACFOA, Timor and Australian NGO,s-the Future, Canberra, ACFOA 1975.
62. _____. The Timor story.(Melbourne, Timor Information Service,1st ed.Jan.1976 2nd ed.June 1976.
63. _____. The Timorese betrayal. Dissent, Parkville.vic.nos.35-36:35-41 and 55 May 1977.
64. _____. Timor: the Politics of conscience. Arena,Greensborousgh, Vic.#46:4-14, 1977.
65. _____, Indonesia,s newest minority:the East Timorese.In:Georgina ASEWORTH (ed),World Minorities I. (Sunbury Middlessex, Quartermaine Rouse, 1977 pp.89-93.
66. _____, FRETILIN:the origins, ideologis and strategies of a nationalist

movement in East Timor. Unpublished MA Thesis, Politics Dept. Moash University, Victoria, Australia May, 1978.

67. Hiorth, Finngeir. De militaire positie van de Oosttimoreszen. Zelfbeschi kking, Groningen, 8(3):12-13, Sep-Nov. 1977 (The Militeray position of Timorese.
68. Hiorth, Finnageir(etd). Ost Timor-Fortid eller Frestid? Paper for the Scandinavian Conferene on Indonesian aand Malaysian Studies, Kungälv, Sweden, June 3-5, 1977 (East Timor-Fast or Future).
69. _____. Timor –Past and Present. Manuscript, Oslo, January 1978.
70. Hoadley, J. Stephen. The Future of Portuguese Timor. Dilemmas and opportunities, (Singapore, Institute of Southeast Asian Study, 1975.
71. _____. Portuguese Timor and regional stability. Southeast Asian Spectrum, Bangkok, 3(4):1—14, 1975.
72. _____. New Zealand' responses to the East Timor: controversy , New Zealand International Review. 1(6):4-8, Nov. Sep. 1976.
73. _____. East Timor, civil war—causes and consequences, South East Asian Affairs, 1976. Singapore, pp. 411-419.
74. _____. Indonesia's annexation of East Timor: Political administrative, South East Asian Affairs 1977. Singapore pp. 133-142.
75. Horta, Josef Ramos. Raamos Horta, Interviewd by Erendan O'Dwyer. Development News Degest, Canberra, #11:4-5, Sep. 1974.
76. _____. FRETILIN's literacy campaign in Timor. Alternate News Services, Melbourne, #46:17-18, 19 Sep. 1975.
77. _____. East Timor Speaks; the Report of Mr. Jose Ramos Horta, Minister of External Relations in the Democratic Republic of East Timor, to the United Nations Decolonization Committee (Committee of 24) on September 8, 1976. Sydney, CIET, 1976).
78. _____. Fretelins Soldater lever som fisken I vattnet bland Oost Timors folk. Komentar , Stokholm 10 (1):10-17, 1977.
79. _____. Dix-huit mois de guerre a Timor-Oriental. Le Monde Diplomatique, Paris, #280:16, July 1977. (18 month of war in East Timor).

80. Hadson, William Janes. Problems in Australian Foreign Policy, July to December, 1975. Australian Journal of Politics and History. Brisbane, 22 (1):1-6, April 1976.
81. Indonesia: Buku Petunjuk delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Timor Timur. (Jakarta, 1976.) Guide Book for government delegation of Indonesian Republic to East Timor).
82. Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Team Penanggulangan Pengungsi Timor Timur. Laporan/memori Penjelasan tentang kegiatan Team Penanggulangan Pengungsi Timor Timur. (Jakarta, TPPTT, April 1976). (Report of the activation of the East Timor Refugee Team).
83. Jolliffe, Jill. Report from East Timor. (Canberra, ANU Student Association. 1975).
84. _____. A New Independence struggle right on our doorstep. Development News Digest, Canberra, #13:5-6, June 1975.
85. Kohenn Arnold S. US Diplomacy and Human Rights: the Cruel case of Indonesia. The Nation, Ithaca, N.Y. 26 Nov. 1977.

Daftar Publikasi Media Tentang Wilayah Perbatasan Timor

I. Sumber Luar Negeri

Tahun	Judul	Sumber
1893	Certain Chieftains in Maubara looked to Support from Dutch in Atapupu	Macao Press 29 Juli 1893
1912	The Greater Part of the Island of Timor has Revolted	Sidney Morning Herald, 19 Februari 1912
1916	Jakarta Cast an Auxiousseije over Timor	Sidney Morning Herald, 15 Desember 1916
1935	The Fighting in Maubara	The Canberra Times, 19 November 1935
1960	Extension of Indonesia Rule to Portuguese Suggested Prof M.Yamin.	Sydney Moning Herald, 21 Februari 1960
1966	Border Tense	Sydney Morning Herald, 10 Desember 1966
1975	Indonesian Told Chief to Recruit Guerillas	The Age, 4 Maret 1975
1975	Guerillas care in Timor	The Age, 15 Maret 1975
1975	Timor has song knives and will to fight	The Australian, 17 Maret 1975
1975	No glory in the Timor Secret war	The Guardian weekly 23 April 1975
1975	Three dead in Timor Fighting	The Sidney Morning Herald, 15 Augustus 1975
1975	Timor Island of Tragedy	The Bulletin, 6 September 1975
1975	Kills 89 Fretelin Soldiers	The Canberra Times, 23 September 1975
1975	Bobonaro Captured	The Sidney Morning Herald, 28 Oktober 1975
1975	Timor a new Vietnam die	National Times, 29 September 1975
1975	Ramos Horta: Australia o Mitos and a Realidade a Voz.	De Timor, 3 Oktober 1975

1975	Dili under attack	The Sidney Morning Herald, 4 November 1975
1975	When we killed directd Fretellin, says UDT	The Age, 4 November 1975
1975	Landiing in Baucau	5 November 1975
1975	Today Melo Antones and Adam Malik Meet in Roma	Timor Leste, 6 November 1975
1975	Heavily Involved in Timor	the Sidney Morning Herald, 14 November 1975
1975	Warning on danger received Last Week	The Canberra Times, 27 November 1975
1975	Timor a Blight on Record	The Age, 28 November 1975
1975	One voice on Timor	The Age, 2 Desember 1975
1975	Fighting tragic: Songs Peacock and our troop	The Age, 9 Desember 1975
1975	Will leave, Say Malik	
1975	Fretelin Ready or Long War of Real Time	The Age, 9 Desember 1975
1975	String of Timor Coastal Towns Hits	The Sidney Morning Herald, 13 Desember 1975
1975	We Won't middle in Timor was Says Former PM.	The Sidney Morning Herald, 5 Desember 1975
1976	Timor Death Toll 60.000	The Age, 14 Februari 1976
1976	Timor Sleeping Island	The Bulletin Sidney 29 Februari 1976
1976	Witnesses to murder held for protection	The Sydney Morning Herald, 12 Maret 1976
1976	Indonesia the crush Timor rebels	The Canberra Times 26 Juli, 1976
1976	Don't Anger Jakarta	The Age, 3 Agustus 1976
1976	Regog Take Over companies in Approach to	The Age, 22 Oktober 1976

2. Sumber Dalam negeri

Tahun	Judul	Sumber
2006	<i>Warga dua desa saling serang, lima luka-luka.</i> Kupang:	Post Kupang 1 Oktober 2006.
2006	Lopez, Joachim : <i>Penentuan batas wilayah NKRI-RDTL: Jangan abaikan tokoh local</i>	Post Kupang 23 Maret 2006.
2006	Mengusik Damai di Tapal Batas	Gatra 21 Januari 2006
2006	Bola, A.P.J.Noach. 2006. <i>Insiden penembakan di perbatasan: Itu skenario</i>	Post Kupang 13 Januari 2006

**WILAYAH PERBATASAN
NUSA TENGGARA TIMUR - TIMOR LESTE**
Satu Gunung Dua Dunungan

Sejarah Wilayah Perbatasan NTT-Timor Leste merupakan akumulasi dinamika sejarah Perbatasan yang panjang. Pada masa pra kolonial Timor merupakan suatu wilayah yang bersatu di lingkungan kerajaan Wesei Wehali yang berpusat di Laran, Belu Selatan. Kerajaan Wesei Wehali yang diperintah raja yang bergelar Maromak Oan. Dalam menjalankan pemerintahan Wesei Wehali dibantu pejabat yang bergelar Liurai. Di wilayah bagian Timur yakni wilayah matahari terbit (rai Loro Sae) diperintah Liurai Likusaen. Di wilayah bagian Barat atau wilayah matahari terbenam (rai Loro Toba) diperintah Liurai Sonbai. Sedangkan dibagian tengah di Belu rai Wehali dikuasai oleh Liurai Fatuaruin. Kerajaan Wesei Wehali mengalami kemerosotan akibat serangan Portugis tahun 1642. Kerajaan-kerajaan kecil memisahkan diri. Hegemoni Wesei Wehali digantikan Portugis Hitam/Kase Metan di Noemuti. Sejalan dengan kedatangan bangsa Barat yakni Portugis dan Belanda di Timor, terjadi persaingan wilayah kekuasaan yang melibatkan para raja lokal yang menimbulkan perpecahan. Persaingan wilayah melalui serangkaian peperangan menimbulkan pergeseran wilayah, sistem pemerintahan tradisional dan pergeseran kependudukan akibat pengungsian. Portugis yang semula berkedudukan di Lifao sejak tahun 1702 sampai 1769 dipindahkan ke Dili sejak tahun 1769. Sedangkan Belanda mempunyai kedudukan di Benteng Concordia di Kupang

Upaya mengatasi persaingan kekuasaan kolonial dan masalah perbatasan, dilakukan melalui sejumlah perjanjian. Tahun 1859 dilakukan perjanjian Lisabon, diikuti Konvensi London tanggal 1 Juli 1893 yang disahkan dalam Konvensi London 1904 yang menetapkan garis perbatasan kedua belah pihak. Keputusan Mahkamah Arbitrase 25 Juni 1914 dan selanjutnya Provinsial Agreement tanggal 8 April 2005 Serangkaian perjanjian tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan tentang garis perbatasan, wilayah perbatasan dan pertukaran wilayah perbatasan. Dari segi politik permasalahan perbatasan dianggap telah selesai. Namun menyisakan sejumlah masa sosial, ekonomi dan budaya di wilayah perbatasan yang belum tuntas penanganan. Maka masih diperlukan upaya mengatasi permasalahan dan pembangunan wilayah perbatasan yang berorientasi perbaikan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

Perpus
Jende